



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH



PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026

*Mari wujudkan
Kepulauan Riau yang
**Makmur, Berdaya
Saing dan Berbudaya***

2021

PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa tujuan, sasaran, kebijakan, dan strategi pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagai visi dan misi kepala daerah terpilih dalam masa pemerintahannya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2021;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
dan
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
10. Program adalah sekumpulan rencana kerja suatu perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Capaian kinerja tahunan adalah capaian target kinerja yang terealisasi setiap tahunnya.
17. Capaian kinerja akhir RPJMD adalah akumulasi capaian target kinerja tahunan yang terealisasi sampai dengan masa akhir RPJMD.
18. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi dan program Gubernur ke dalam strategi pembangunan Daerah Provinsi, kebijakan umum, program prioritas Gubernur, dan arah kebijakan keuangan Daerah Provinsi, dengan mempertimbangkan RPJPD dan RTRW; dan
- b. dokumen perencanaan Daerah Provinsi yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII: Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. BAB IX : Pembangunan Kewilayahan;
- j. BAB X : Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2021-2026;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD setiap tahunnya.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V PENDANAAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Pendanaan pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pagu indikatif pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, yang disesuaikan dengan Pagu Indikatif dalam RPJMD untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan kemampuan anggaran tahun berjalan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 9

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPJMD tahun 2021-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2026-2031 yang memuat visi dan misi Gubernur terpilih periode selanjutnya.

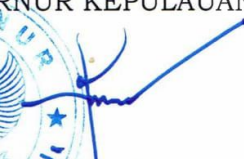
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 23 SEPTEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMIDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 3-160/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dengan sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah dan konsekuensi penerapan desentralisasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia maka diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik; Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib bagi pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); RPJMD merupakan salah satu bentuk dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 9 Desember 2020; RPJMD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kerangka pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta bersifat indikatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pelayanan dasar serta meningkatkan daya saing daerah;

Dalam penyusunan RPJMD ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang RPJPD;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR
54

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad SAW.

Substansi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini adalah penjabaran Visi, Misi, Janji-janji Kampanye, dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan kondisi daerah, keuangan daerah, permasalahan dan isu-isu strategis daerah, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pembangunan kewilayahan.

Tim penyusun menyadari bahwa RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini masih memiliki kelemahan-kelemahan. Oleh karena itu saran dari berbagai pihak sangat diharapkan demi terwujudnya RPJMD yang lebih baik. Akhir kata terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga RPJMD ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan semoga mendatangkan manfaat.

Tanjungpinang, September 2021

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	Bab I -1
1.1 LATAR BELAKANG.....	Bab I -1
1.2 DASAR HUKUM	Bab I -3
1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN	Bab I -6
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN.....	Bab I -9
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	Bab I -9
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	 Bab II -1
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	Bab II -1
2.1.1 Luas dan Batas Administrasi	Bab II -1
2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan.....	Bab II -2
2.1.3 Geologi dan Tanah	Bab II -8
2.1.4 Hidrologi	Bab II -9
2.1.5 Klimatologi.....	Bab II -12
2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah	Bab II -13
2.1.7 Wilayah Rawan Bencana.....	Bab II -26
2.1.8 Kondisi Demografi.....	Bab II -35
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Bab II -38
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Bab II -38
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	Bab II -65
2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga	Bab II -83
2.3 Aspek Pelayanan Umum	Bab II -85
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar	Bab II -86
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar	Bab II -170
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	Bab II -258
2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	Bab II -294
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	Bab II -315
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	Bab II -315
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur	Bab II -318



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi	Bab II -321
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia	Bab II -326
2.5	<i>Sustainable Development Goals (SDGs)</i>	Bab II -327
2.5.1	Tanpa Kemiskinan	Bab II -329
2.5.2	Tanpa Kelaparan	Bab II -335
2.5.3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Bab II -339
2.5.4	Pendidikan Berkualitas	Bab II -348
2.5.5	Kesetaraan Gender	Bab II -355
2.5.6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	Bab II -359
2.5.7	Energi Bersih dan Terjangkau	Bab II -366
2.5.8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Bab II -368
2.5.9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Bab II -373
2.5.10	Berkurangnya Kesenjangan	Bab II -377
2.5.11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	Bab II -380
2.5.12	Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Bab II -385
2.5.13	Penanganan Perubahan Iklim	Bab II -389
2.5.14	Ekosistem Lautan	Bab II -391
2.5.15	Ekosistem Daratan	Bab II -393
2.5.16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Bab II -396
2.5.17	Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Bab II -403
 BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH		Bab III - 1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	Bab III - 1
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	Bab III - 1
3.1.2	Neraca Daerah	Bab III - 22
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	Bab III - 39
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	Bab III - 39
3.2.2	Analisis Pembiayaan	Bab III - 39
3.3	Kerangka Pendanaan	Bab III - 45
3.3.1	Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bab III - 45
3.3.2	Proyeksi Pendapatan Daerah	Bab III - 51
3.3.3	Proyeksi Belanja Daerah	Bab III - 62
3.3.4	Proyeksi Pembiayaan Daerah	Bab III - 67



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3.3.5	Penghitungan Kerangka Pendanaan	Bab III - 70
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Bab IV -1		
4.1	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	Bab IV -2
4.1.1	Bidang Ekonomi	Bab IV -3
4.1.2	Bidang Kemaritiman dan Lingkungan Hidup	Bab IV -10
4.1.3	Bidang Sosial	Bab IV -12
4.1.4	Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Bab IV -13
4.1.5	Bidang Tata Kelola Pemerintahan	Bab IV -18
4.1.6	Bidang Kebudayaan.....	Bab IV -20
4.1.7	Bidang Infrastruktur	Bab IV -22
4.1.8	Permasalahan Pembangunan Per Urusan.....	Bab IV -25
4.2	ISU-ISU STRATEGIS.....	Bab IV -79
4.2.1	Potensi Maritim	Bab IV -79
4.2.2	Tata Kelola Pemerintahan	Bab IV -83
4.2.3	Sumber Daya Manusia	Bab IV -85
4.2.4	Kemiskinan	Bab IV -88
4.2.5	Kesehatan	Bab IV -89
4.2.6	Disparitas antar wilayah.....	Bab IV -91
4.2.7	Infrastruktur Wilayah	Bab IV -93
4.2.8	Budaya Melayu dan Nasional	Bab IV -96
BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN..... Bab V -1		
5.1	VISI DAN MISI.....	Bab V -1
5.2	TUJUAN DAN SASARAN.....	Bab V -5
5.2.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026.....	Bab V -5
5.2.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	Bab V -7
5.2.3	Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Bab V -13
5.3	KESELERASAN RPJMD 2021 – 2026 DAN RPJPD 2005 - 2025.....	Bab V -21



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

5.3.1	Kesesuaian Misi RPJMD 2021 – 2026 dan Misi RPJPD 2005 – 2025	Bab V -21
5.3.2	Kesesuaian Tujuan Pembangunan RPJMD 2021 – 2026 dan Penekanan Prioritas Pembangunan RPJPD di Tahun 2021 – 2025	Bab V -24
5.4	KESELERASAN RPJMD 2021 – 2026 DAN RPJMN 2020 - 2024	Bab V -28
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....		Bab VI -1
6.1	STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	Bab VI -1
6.1.1	Analisis SWOT	Bab VI -1
6.2	ARAH KEBIJAKAN /TEMA PEMBANGUNAN	Bab VI -30
6.3	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	Bab VI -39
BAB VII KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH		Bab VII -1
7.1	Kerangka Pendanaan	Bab VII -1
7.2	Program Perangkat Daerah.....	Bab VII -6
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH		Bab VIII -1
BAB IX PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN		Bab IX -1
9.1	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	Bab IX -1
9.1.1	Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah	Bab IX -1
9.1.2	Kerangka Umum Pengembangan Wilayah.....	Bab IX -2
9.1.3	Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota ...	Bab IX -8
9.2	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN <i>CROSS CUTTING</i>	Bab IX -22
9.2.1	Penanggulangan Kemiskinan	Bab IX -22
9.2.2	Penanggulangan Stunting	Bab IX -23
9.2.3	Pembangunan Infrastruktur.....	Bab IX -24
9.2.4	Kluster Daerah Pertanian	Bab IX -25
9.2.5	<i>Tourism Linkage Networking</i>	Bab IX -25
9.2.6	Industri Perikanan dan Kelautan	Bab IX -26
9.2.7	<i>Link and match</i> Pendidikan dan Industri	Bab IX -26



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

9.3	PROGRAM- PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN <i>CROSS CUTTING</i>	Bab IX -27
9.3.1	Penanggulangan Kemiskinan	Bab IX -27
9.3.2	Penanggulangan Stunting	Bab IX -29
9.3.3	Pembangunan Infrastruktur.....	Bab IX -29
9.3.4	Kluster Daerah Pertanian	Bab IX -30
9.3.5	<i>Tourism Linkage Networking</i>	Bab IX -30
9.3.6	Industri Perikanan dan Kelautan	Bab IX -31
9.3.7	<i>Link and match</i> Pendidikan dan Industri	Bab IX -31
BAB X PENUTUP		Bab X -1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015	Bab II -3
Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007	Bab II -3
Tabel 2.3 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -4
Tabel 2.4 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi	Bab II -5
Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -5
Tabel 2.6 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020 ...	Bab II -7
Tabel 2.7 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota	Bab II -8
Tabel 2.8 Daftar DAS di WS Kepulauan Riau	Bab II -9
Tabel 2.9 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020	Bab II -12
Tabel 2.10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -27
Tabel 2.11 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -28
Tabel 2.12 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -29
Tabel 2.13 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -29
Tabel 2.14 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -30
Tabel 2.15 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -31
Tabel 2.16 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -32
Tabel 2.17 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -33
Tabel 2.18 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -33
Tabel 2.19 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit	Bab II -34
Tabel 2.20 Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -35
Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota	Bab II -36
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2020.....	Bab II -36



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.23 Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2020	Bab II -37
Tabel 2.24 Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -38
Tabel 2.25 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -40
Tabel 2.26 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -43
Tabel 2.27 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020	Bab II -47
Tabel 2.28 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Kontribusi terhadap Jumlah PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -49
Tabel 2.29 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -51
Tabel 2.30 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota	Bab II -54
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -54
Tabel 2.32 Sektor Dominan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Bab II -57
Tabel 2.33 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2018-2020.....	Bab II -63
Tabel 2.34 IPM Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota	Bab II -66
Tabel 2.35 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016-2020 ...	Bab II -67
Tabel 2.36 Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -69
Tabel 2.37 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -70
Tabel 2.38 Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020.....	Bab II -72
Tabel 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020	Bab II -74
Tabel 2.40 Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2015-2020....	Bab II -76



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.41 Profil Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -77
Tabel 2.42 Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2017 - 2020	Bab II -77
Tabel 2.43 Lima Jenis Komoditi Berkontribusi Terbesar Pada Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah pada Tahun 2020	Bab II -81
Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -83
Tabel 2.45 Indikator Fokus Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -84
Tabel 2.46 Indikator Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -85
Tabel 2.47 Pencapaian Target SPM Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -87
Tabel 2.48 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -89
Tabel 2.49 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -90
Tabel 2.50 Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -91
Tabel 2.51 Indikator Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -91
Tabel 2.52 Indikator Kompetensi Lulusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -93
Tabel 2.53 Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -95
Tabel 2.54 Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -96
Tabel 2.55 Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -97
Tabel 2.56 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan 2019	Bab II -104
Tabel 2.57 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Bab II -132
Tabel 2.58 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -133
Tabel 2.59 Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -134



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.60 Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -136
Tabel 2.61 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik Dari Tahun 2015 - 2020	Bab II -137
Tabel 2.62 Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2015 - 2020 per Kabupaten/Kota	Bab II -138
Tabel 2.63 Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -140
Tabel 2.64 Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020	Bab II -141
Tabel 2.65 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2016 – 2020	Bab II -142
Tabel 2.66 Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020..	Bab II -143
Tabel 2.67 Capaian Kinerja Menurunkan Genangan Banjir Tahun 2020.....	Bab II -145
Tabel 2.68 Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -145
Tabel 2.69 Status PK dan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -147
Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	Bab II -148
Tabel 2.71 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -150
Tabel 2.72 Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -152
Tabel 2.73 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dan Penanganan Demo.....	Bab II -153
Tabel 2.74 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat	Bab II -153
Tabel 2.75 Kebutuhan Ideal Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -154
Tabel 2.76 Kondisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -154
Tabel 2.77 Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -155
Tabel 2.78 Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -156
Tabel 2.79 Realisasi Capaian Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -158
Tabel 2.80 Gap Expectation Indikator Urusan Sosial Tahun 2020.....	Bab II -160



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.81 Data Keluarga Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -163
Tabel 2.82 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -165
Tabel 2.83 Jumlah PMKS Yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020	Bab II -165
Tabel 2.84 Capaian Kumulatif yang Dikonversi Jumlah PMKS yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020	Bab II -166
Tabel 2.85 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2016–2020	Bab II -167
Tabel 2.86 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016–2020	Bab II -167
Tabel 2.87 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2016–2020	Bab II -168
Tabel 2.88 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -168
Tabel 2.89 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diverifikasi Menurut Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2018-2020.....	Bab II -170
Tabel 2.90 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -171
Tabel 2.91 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -172
Tabel 2.92 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -173
Tabel 2.93 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	Bab II -174
Tabel 2.94 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indikator Hubungan Industrial	Bab II -178
Tabel 2.95 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Bab II -180
Tabel 2.96 IPM, IPG, dan IPG Komposit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -181
Tabel 2.97 IDG dan Komposit IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .	Bab II -182
Tabel 2.98 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota	Bab II -183
Tabel 2.99 Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -184
Tabel 2.100 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -187
Tabel 2.101 Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2015-2020.....	Bab II -189



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.102 Lokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -194
Tabel 2.103 Produksi, Kebutuhan, dan Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -194
Tabel 2.104 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020	Bab II -195
Tabel 2.105 Luas Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Bersertifikat Tahun 2015-2020.....	Bab II -197
Tabel 2.106 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -198
Tabel 2.107 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -201
Tabel 2.108 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -202
Tabel 2.109 Uji Pencemaran Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -202
Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020...	Bab II -203
Tabel 2.111 Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Telah Aktif Tahun 2016-2020.....	Bab II -205
Tabel 2.112 Data Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2020	Bab II -205
Tabel 2.113 Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020.....	Bab II -206
Tabel 2.114 Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2016-2020	Bab II -206
Tabel 2.115 Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2016-2020	Bab II -207
Tabel 2.116 Data Prestasi Yang Diraih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -208
Tabel 2.117 Data Persentase TTG Yang Dimanfaatkan Masyarakat Tahun 2016-2020.....	Bab II -209
Tabel 2.118 Perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2020	Bab II -210
Tabel 2.119 Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -210
Tabel 2.120 Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020.....	Bab II -211
Tabel 2.121 Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -211
Tabel 2.122 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020.....	Bab II -212
Tabel 2.123 Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020	Bab -212



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.124 Data Jumlah RT/RW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -213
Tabel 2.122 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -214
Tabel 2.123 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -217
Tabel 2.124 Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -218
Tabel 2.125 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab II -218
Tabel 2.126 Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	Bab II -220
Tabel 2.127 Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab II -220
Tabel 2.128 Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi Darat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	Bab II -221
Tabel 2.129 Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -222
Tabel 2.130 Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	Bab II -223
Tabel 2.131 Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -223
Tabel 2.132 Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -224
Tabel 2.133 Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -224
Tabel 2.134 Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -224
Tabel 2.135 Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -225
Tabel 2.136 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	Bab II -226
Tabel 2.137 Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -229
Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -230
Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -231
Tabel 2.140 Persebaran Investasi PMDN di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Tahun 2015-2020 (%).....	Bab II -235



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.141 Persebaran Investasi PMA di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Tahun 2015-2020 (%).....	Bab II -236
Tabel 2.142 Sebaran Investasi Dalam Negeri di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor Tahun 2016 – 2020 (%)	Bab II -237
Tabel 2.143 Sebaran Investasi Asing di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020 (%).....	Bab II -238
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -239
Tabel 2.145 Organisasi Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -241
Tabel 2.146 Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -242
Tabel 2.147 Jumlah SDM di Bidang Statistik	Bab II -243
Tabel 2.148 Pendidikan SDM di Bidang Statistik	Bab II -243
Tabel 2.149 Kinerja Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -244
Tabel 2.150 Data Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis terkait Persandian dan Keamanan Informasi	Bab II -245
Tabel 2.151 Jumlah SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Bab II -246
Tabel 2.152 Data Infrastruktur Persandian dan Keamanan Informasi	Bab II -247
Tabel 2.153 Dimensi-Dimensi IPK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019	Bab II -248
Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -250
Tabel 2.155 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -251
Tabel 2.156 Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	Bab II -253
Tabel 2.157 Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan	Bab II -255
Tabel 2.158 Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan	Bab II -257
Tabel 2.159 Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020.....	Bab II -261
Tabel 2.160 Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -262
Tabel 2.161 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2020.....	Bab II -263
Tabel 2.162 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB	Bab II -267



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.163 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -272
Tabel 2.164 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019	Bab II -274
Tabel 2.165 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam Pertanian Tahun 2015-2020.....	Bab II -278
Tabel 2.166 Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -280
Tabel 2.167 Lahan Kritis Tahun 2020 Wilayah Kerja BPDASHL Sei Jang Duriangkang Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -281
Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -287
.Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -291
Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -293
Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Transmigrasi	Bab II -294
Tabel 2.172 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -295
Tabel 2.173 Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020.....	Bab II -297
Tabel 2.174 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -298
Tabel 2.175 Kesesuaian Dokumen Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -302
Tabel 2.176 Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -303
Tabel 2.177 Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -304
Tabel 2.178 Kinerja Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -305
Tabel 2.179 Indeks Profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	Bab II -309
Tabel 2.180 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	Bab II -312
Tabel 2.181 Kinerja Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -312
Tabel 2.182 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2018	Bab II -315
Tabel 2.183 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Bab II -315
Tabel 2.184 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -316



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.185 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -317
Tabel 2.186 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Bab II -317
Tabel 2.187 Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -318
Tabel 2.188 Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -318
Tabel 2.189 Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -320
Tabel 2.190 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -321
Tabel 2.191 Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -323
Tabel 2.192 Rata-rata Lama Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -325
Tabel 2.193 Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -326
Tabel 2.194 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -327
Tabel 2.195 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 1	Bab II -330
Tabel 2.196 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 2	Bab II -336
Tabel 2.197 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 3	Bab II -340
Tabel 2.198 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 4	Bab II -349
Tabel 2.199 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 5	Bab II -356
Tabel 2.200 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 6	Bab II -360
Tabel 2.201 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 7	Bab II -367
Tabel 2.202 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 8	Bab II -369
Tabel 2.203 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 9	Bab II -374
Tabel 2.204 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 10	Bab II -378



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.205 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 11	Bab II -381
Tabel 2.206 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 12	Bab II -386
Tabel 2.207 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 13	Bab II -390
Tabel 2.208 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 14	Bab II -392
Tabel 2.209 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 15	Bab II -394
Tabel 2.210 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 16	Bab II -397
Tabel 2.211 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 17	Bab II -404
Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -3
Tabel 3.2 Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -5
Tabel 3.3 Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -15
Tabel 3.4 Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -17
Tabel 3.5 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 - 2020	Bab III -19
Tabel 3.6 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	Bab III -21
Tabel 3.7 Neraca Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -26
Tabel 3.8 Pertumbuhan Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020	Bab III -33
Tabel 3.9 Hasil Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -37
Tabel 3.10 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kepulauan Riau	Bab III -39
Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020	Bab III -41
Tabel 3.12 Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -41



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.13 Penutup Defisit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020.....	Bab III -42
Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020	Bab III -44
Tabel 3.15 Potensi Objek Pajak Per 5 Maret 2021	Bab III -52
Tabel 3.16 Perkembangan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021.....	Bab III -53
Tabel 3.17 Korelasi Kendaraan baru dan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021	Bab III -55
Tabel 3.18 Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021	Bab III -57
Tabel 3.19 Perkembangan Jumlah Penggunaan BBM tahun 2019 s/d 2021	Bab III -58
Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab III -60
Tabel 3.21 Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab III -65
Tabel 3.22 Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab III -68
Tabel 3.23 Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan	Bab III -71
Tabel 5.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau Untuk Tahun 2021 - 2026	Bab V -5
Tabel 5.2 Kesesuaian Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dengan Permendagri 86 Tahun 2017	Bab V -8
Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.....	Bab V -14
Tabel 5.4 Keselarasan Misi RPJMD 2021 – 2026 dan RPJPD 2005 – 2025 Provinsi Kepulauan Riau	Bab V -22
Tabel 5.5 Keselarasan Misi RPJMD 2021 – 2026 dan RPJMN 2020 - 2024.....	Bab V -29
Tabel 5.6 Penyelarasan Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021 - 2026 dan RPJMN 2020 - 2024.....	Bab V -31
Tabel 6.1 Matrik Identifikasi Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau	Bab VI -5
Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab VI -18
Tabel 6.3 Arah Kebijakan/Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Tahun Tahun 2021-2026.....	Bab VI -30



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab VI -47
Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab VII -2
Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026.....	Bab VII -14
Tabel 8.1 Indikator Kinerja Makro Daerah Tahun 2021-2026.....	Bab VIII -3
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Bab VIII -4
Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab VIII -5
Tabel 9.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	Bab IX -8
Tabel 9.2 Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab IX -9
Tabel 9.3 Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	Bab IX -9



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Bab I -7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Riau	Bab II-2
Gambar 2.2 Peta WS Kepulauan Riau	Bab II -11
Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -53
Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 (Ribu Rupiah)	Bab II -56
Gambar 2.5 Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -59
Gambar 2.6 Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020.....	Bab II -60
Gambar 2.7 Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Acuan Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -61
Gambar 2.8 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September Tahun 2016-2020.....	Bab II -62
Gambar 2.9 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Bank Dunia	Bab II -64
Gambar 2.10 Kontribusi Sektor dan Penduduk yang Bekerja Berdasar Sektor Tahun 2019	Bab II -65
Gambar 2.11 Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -66
Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -68
Gambar 2.13 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -71
Gambar 2.14 Perbandingan Perkembangan Lama Harapan Sekolah antara Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -73
Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%).....	Bab II -78
Gambar 2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P1) (%)	Bab II -79
Gambar 2.17 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	Bab II -80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 2.18 Indeks Keparahan Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P2) (%)	Bab II -80
Gambar 2.19 Garis Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau	Bab II -82
Gambar 2.20 IKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020	Bab II -86
Gambar 2.21 Angka Kematian Bayi	Bab II -101
Gambar 2.22 Angka Kematian Balita.....	Bab II -101
Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu	Bab II -102
Gambar 2.24 Prevalensi Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020	Bab II -104
Gambar 2.25 Prevalensi Stunting di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -104
Gambar 2.26 Rasio Posyandu per Satuan Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020.....	Bab II -106
Gambar 2.27 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020.....	Bab II -106
Gambar 2.28 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -107
Gambar 2.29 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -108
Gambar 2.30 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -109
Gambar 2.31 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -110
Gambar 2.32 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -111
Gambar 2.33 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -112
Gambar 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -113
Gambar 2.35 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020	Bab II -114
Gambar 2.36 <i>Non-Polio AFP Rate</i> Per 100.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -115
Gambar 2.37 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020	Bab II -116
Gambar 2.38 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -117



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 2.39 Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019.....	Bab II -118
Gambar 2.40 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019	Bab II -118
Gambar 2.41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -119
Gambar 2.42 Penderita Diare Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -120
Gambar 2.43 Angka Kejadian Malaria Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -121
Gambar 2.44 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -123
Gambar 2.45 Cakupan Puskesmas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -124
Gambar 2.46 Cakupan Puskesmas Pembantu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -124
Gambar 2.47 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -125
Gambar 2.48 Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -126
Gambar 2.49 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020	Bab II -127
Gambar 2.50 Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -128
Gambar 2.51 Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -129
Gambar 2.52 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -129
Gambar 2.53 Cakupan Desa/Keluarga Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -131
Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -174
Gambar 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020 ...	Bab II -175
Gambar 2.56 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -176



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 2.57 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020.....	Bab II -178
Gambar 2.58 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2015-2020.....	Bab II -182
Gambar 2.59 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -184
Gambar 2.60 Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -186
Gambar 2.61 Grafik Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Tahun 2016-2020.....	Bab II -187
Gambar 2.62 Rasio Kekerasan Pada Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2020.....	Bab II -188
Gambar 2.63 Pernikahan Usia Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015–2019.....	Bab II -190
Gambar 2.64 Perkembangan PATBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020.....	Bab II -193
Gambar 2.65 Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020.....	Bab II -194
Gambar 2.66 Tingkat Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020.....	Bab II -195
Gambar 2.67 <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -215
Gambar 2.68 <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -216
Gambar 2.69 <i>Unmet Need</i> Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -217
Gambar 2.70 Nilai IP-TIK Indonesia menurut Provinsi Tahun 2019	Bab II -228
Gambar 2.71 Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020 di Provinsi Kepulauan Riau.....	Bab II -235
Gambar 2.72 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020	Bab II -259
Gambar 2.73 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)	Bab II -260
Gambar 2.74 Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019	Bab II -260
Gambar 2.75 Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2014-2020 (Ribuan Orang).....	Bab II -267
Gambar 2.76 <i>Mapping</i> Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Empat Pintu Masuk 2017-2020.....	Bab II -268



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 2.77 Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2015-2020.....	Bab II -269
Gambar 2.78 Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2016-2020	Bab II -272
Gambar 2.79 Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020	Bab II -276
Gambar 2.80 Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020	Bab II -276
Gambar 2.81 Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020.....	Bab II -277
Gambar 2.82 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -295
Gambar 2.83 Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -297
Gambar 2.84 Nilai LKPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	Bab II -298
Gambar 2.85 Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%).....	Bab II -304
Gambar 2.86 Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020.....	Bab II -308
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021	Bab III -53
Gambar 3.2 Perkembangan Realisasi BBNKB tahun 2019 s/d 2021	Bab III -56
Gambar 3.3 Perkembangan Kendaraan Baru tahun 2019 s/d 2021	Bab III -56
Gambar 4.1 Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau	Bab IV -2
Gambar 9.1 Target Persentase Penduduk Miskin	Bab IX -23
Gambar 9.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita	Bab IX -24
Gambar 9.3 Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau	Bab IX -24
Gambar 9.4 PDRB Sektor Perikanan.....	Bab IX -26
Gambar 9.5 Target Tingkat Pengangguran Terbuka.....	Bab IX -27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang berisi visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan mengacu pada RPJPD, RTRW, RPJMN dan dokumen lainnya.

Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak Ansar Ahmad dan Ibu Marlin Agustina yang secara resmi dilantik pada 25 Februari 2021. Sesuai dengan waktu terpilihnya maka Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih berada pada periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.

Selain itu, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, di dalam perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini dimulai dari tahap persiapan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Setelah Rancangan Teknokratik RPJMD disusun maka selanjutnya dijadikan sebagai input dalam penyusunan rancangan awal RPJMD dan disempurnakan melalui konsultasi publik untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan terhadap substansi RPJMD. Selanjutnya, dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan DPRD, Musrenbang RPJMD sampai dengan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 juga akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota, sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603)
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

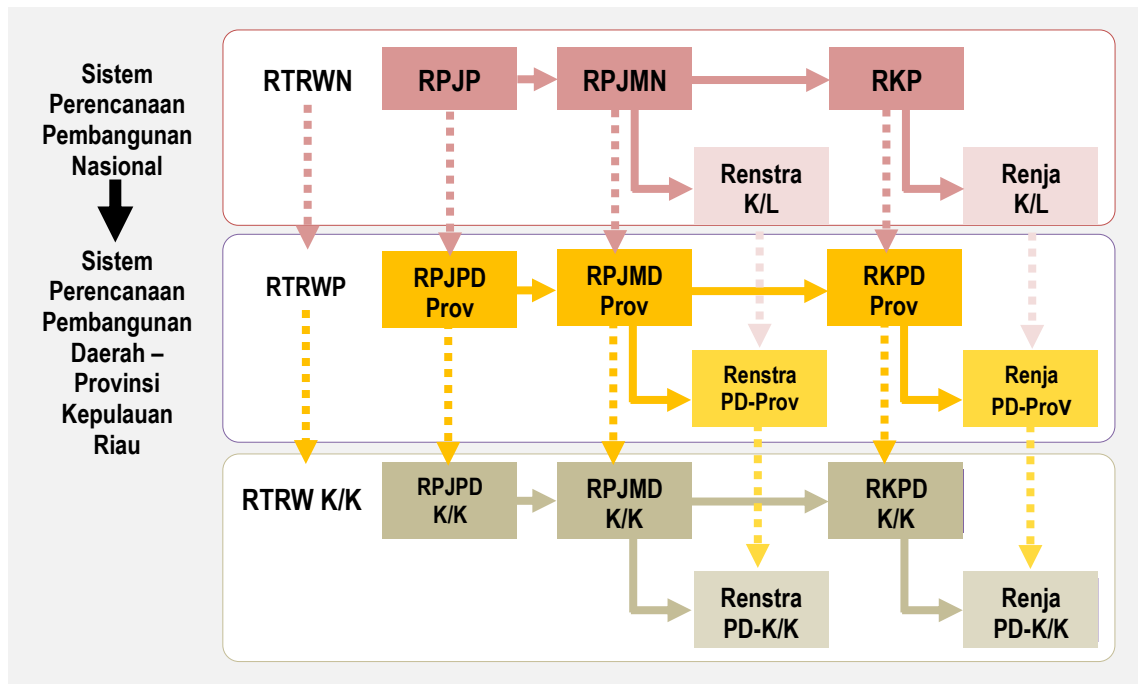
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1); dan
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, RPJMD memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya terutama RPJPD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Hubungan antardokumen pembangunan tersebut, dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Gambar 1.1

Hubungan Antardokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut :

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau**

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan pada tahap RPJPD ke-4 (2021-2025).

2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024 terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMN, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan arah pengembangan wilayah Pulau Sumatera.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3. RTRW Provinsi Kepulauan Riau

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 mempedomani RTRW Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, terutama terkait dengan rencana pola ruang dan program pengembangan wilayah.

4. Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya yang langsung berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Dokumen Perencanaan Multisektor

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multisektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan hasil kajian seperti Perencanaan Bidang Pendidikan dan Perencanaan Bidang Kesehatan.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan di tingkat Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 adalah menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu tahun 2021-2026.

Adapun tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan;
- c. Memberikan arah pengembangan wilayah bagi kabupaten/kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, maksud dan tujuan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang gambaran kondisi daerah dilihat dari Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
- Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang analisis lingkungan strategis, permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target kinerja sasaran pembangunan jangka menengah daerah.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan, berisi tentang Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, serta arah pengembangan wilayah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, berisi tentang program prioritas RPJMD dan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif per program.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Bab IX Pembangunan Kewilayahan, berisi uraian tentang kebijakan-kebijakan Daerah tahun 2021-2026 yang difokuskan pada pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah
- Bab X Penutup, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Cina Selatan

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Sebelah Selatan : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

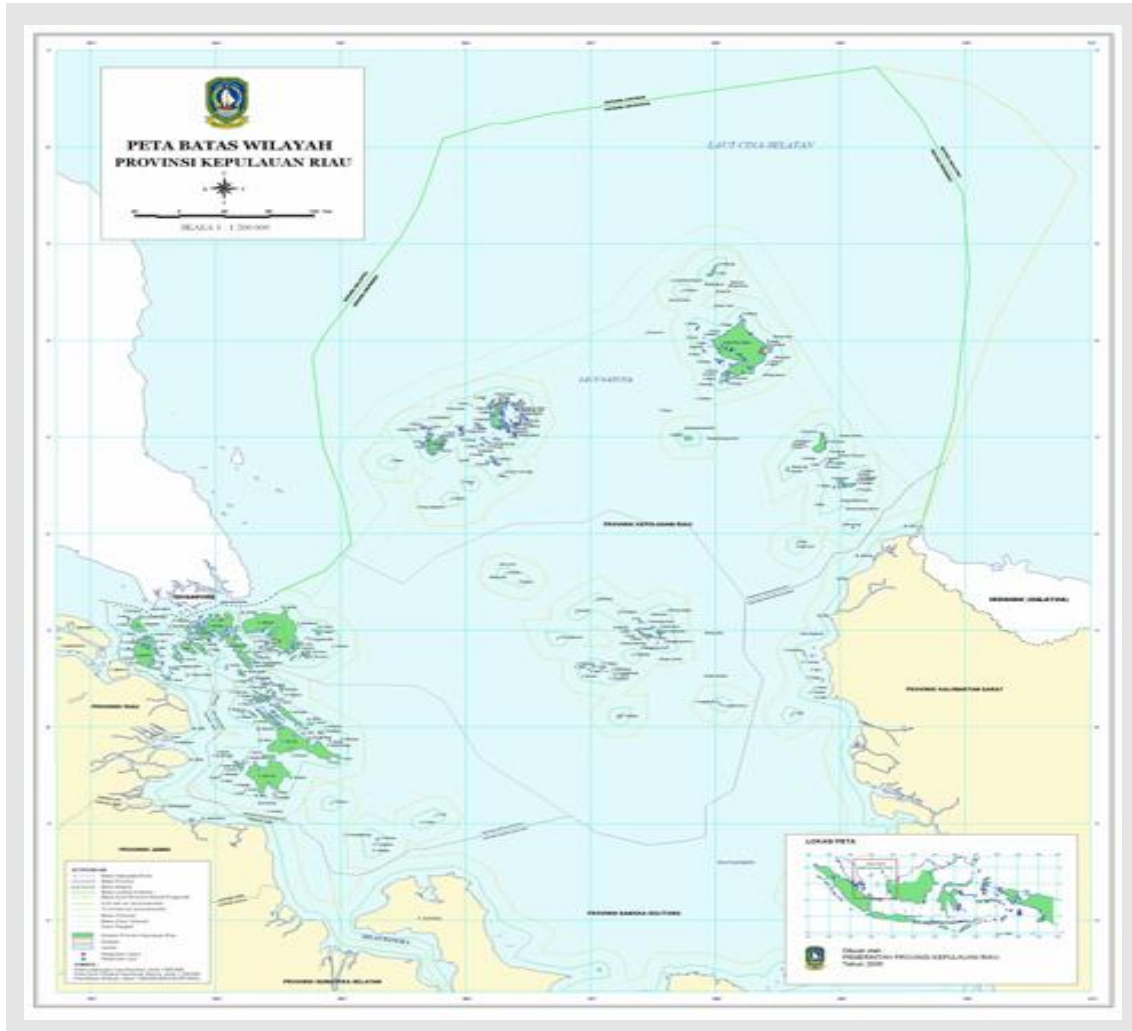
Kondisi saat ini batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja

Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat

Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan

Secara administratif Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki 5 (lima) kabupaten yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Jarak antara ibukota provinsi ke daerah kabupaten/kota terjauh ditempuh sejauh 440 km dari Natuna-Tanjungpinang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

8.201,72 km². Rincian luas daratan berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
Kota Tanjungpinang	144,56
Kabupaten Bintan	1.318,21
Kota Batam	960,25
Kabupaten Karimun	912,75
Kabupaten Lingga	2.266,77
Kabupaten Natuna	2.009,04
Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kota Tanjungpinang	149,13
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kota Batam	3.675,25
4	Kabupaten Karimun	4.698,09
5	Kabupaten Lingga	43.339,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
6	Kabupaten Natuna	216.113,42
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.074,00
Total		417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Kota Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT
2.	Kabupaten Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Kota Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
4.	Kabupaten Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
5.	Kabupaten Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
6.	Kabupaten Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
7.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Setelah terbitnya Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama. Dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berdasarkan Hasil
Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Tanjungpinang	9	2
2	Kabupaten Bintan	241	48
3	Kota Batam	371	133
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Lingga	532	76
6	Kabupaten Natuna	392	62
Jumlah		1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar (lihat Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1.	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kota Batam	4	Pulau Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
3.	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak,
4.	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Semiun, Pulau Sebetul, Pulau Sekatung, Pulau Senoa, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala,
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,

Sumber: Kepres Nomor 6 Tahun 2017

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang, dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Mengenai ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah (surat terlampir), diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Kota Tanjungpinang	65 m
2	Kabupaten Bintan	6 m
3	Kota Batam	8 m
4	Kabupaten Karimun	5 m
5	Kabupaten Lingga	6 m
6	Kabupaten Natuna	14 m
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	6 m

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, gunung tertinggi adalah Gunung Daik di Kabupaten Lingga dengan ketinggian 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.7 Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Kabupaten Bintan	Gunung Bintan	380
2	Kabupaten Karimun	Gunung Jantan	478
		Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
3	Kabupaten Lingga	Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
		Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
4	Kabupaten Natuna	Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
		Gunung Punjang	443
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan (Kepulauan Riau Dalam Angka 2017)

2.1.3 Geologi dan Tanah

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "Paparan Sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau di antaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulanau, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.



2.1.4 Hidrologi

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksploitasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. WS Kepulauan Riau mencakup 2.408 pulau pembentuk Provinsi Kepulauan Riau meliputi Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

WS Kepulauan Riau terdiri dari 117 Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Gambar 2.2.

Tabel 2.8 Daftar DAS di WS Kepulauan Riau

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
1.	DAS Abang Besar	0,29	41.	DAS Jelutung	0,43	81.	DAS Posik	0,44
2.	DAS Air Abu	0,49	42.	DAS Kampung Hilir	1,57	82.	DAS Rapit	0,17
3.	DAS Air Asuk	0,08	43.	DAS Kangka	0,49	83.	DAS Resun	0,18
4.	DAS Air Merah	0,27	44.	DAS Karimun	1,36	84.	DAS Sanglar	0,18
5.	DAS Alai	0,33	45.	DAS Katubi	1,02	85.	DAS Sawang	1,03
6.	DAS Anggus	0,89	46.	DAS Kelarik	0,39	86.	DAS Sebangka	1,71
7.	DAS Ara	0,42	47.	DAS Kelarik Hulu	0,67	87.	DAS Sebesi	0,47
8.	DAS Awak	0,28	48.	DAS Kerasing	1,89	88.	DAS Segeram	4,04
9.	DAS Bajau	0,25	49.	DAS Ketam	0,73	89.	DAS Sekarim	0,23



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

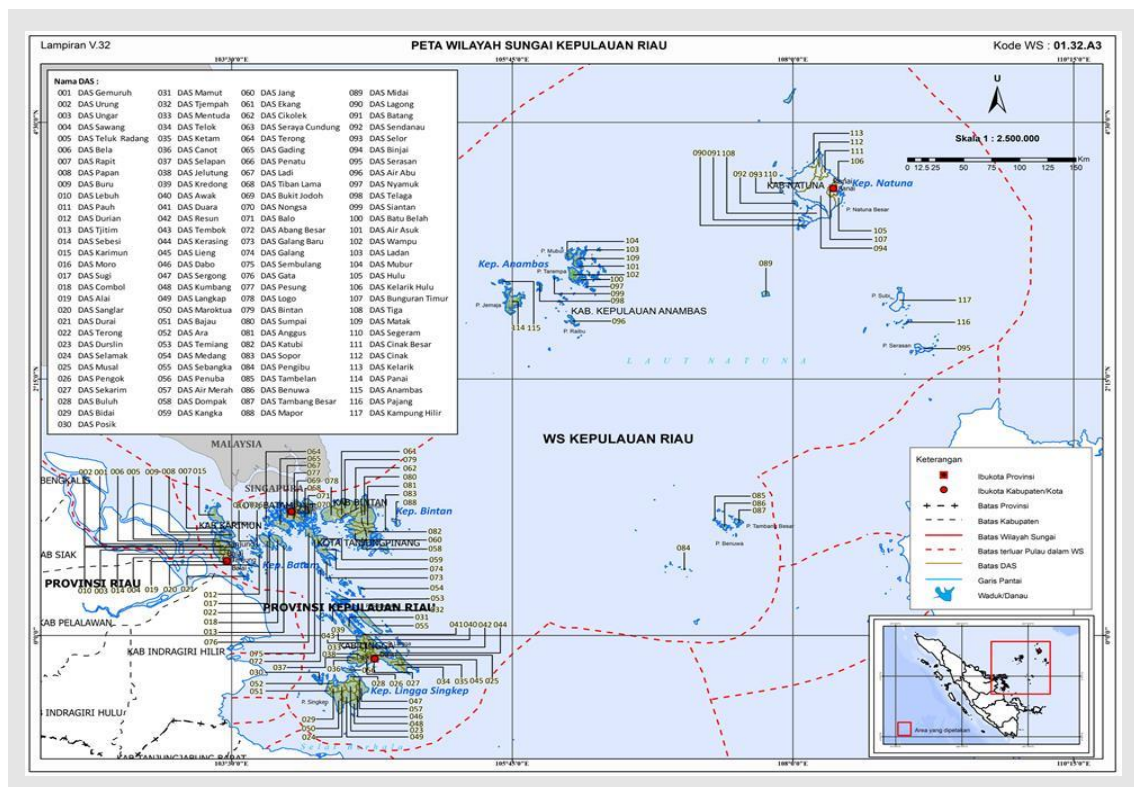
No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
10.	DAS Balo	0,34	50.	DAS Durai	0,20	90.	DAS Selamak	0,60
11.	DAS Batang	0,18	51.	DAS Durian	0,24	91.	DAS Selapan	0,55
12.	DAS Batu Belah	0,51	52.	DAS Kredong	0,50	92.	DAS Selor	0,07
13.	DAS Bela	0,57	53.	DAS Kumbang	0,57	93.	DAS Sembulang	0,43
14.	DAS Benuwa	0,21	54.	DAS Ladan	0,21	94.	DAS Sendanau	0,10
15.	DAS Bidai	0,34	55.	DAS Ladi	0,49	95.	DAS Serasan	0,69
16.	DAS Binjai	6,57	56.	DAS Lagong	0,21	96.	DAS Seraya Cundung	0,16
17.	DAS Bintang	1,79	57.	DAS Langkap	0,21	97.	DAS Sergong	0,90
18.	DAS Bukit Jodoh	0,51	58.	DAS Lebu	0,10	98.	DAS Siantan	0,10
19.	DAS Buluh	0,41	59.	DAS Lieng	0,35	99.	DAS Sopor	0,04
20.	DAS Bunguran Timur	0,77	60.	DAS Logo	1,87	100.	DAS Sugi	0,98
21.	DAS Buru	0,20	61.	DAS Mamut	1,43	101.	DAS Sumpai	2,27
22.	DAS Canot	0,78	62.	DAS Mapor	0,29	102.	DAS Tambang Besar	0,32
23.	DAS Cikolek	1,78	63.	DAS Maroktua	1,50	103.	DAS Tambelan	0,02
24.	DAS Cinak	1,04	64.	DAS Matak	0,86	104.	DAS Telaga	0,18
25.	DAS Cinak Besar	0,60	65.	DAS Medang	0,36	105.	DAS Telok	0,62
26.	DAS Combol	0,59	66.	DAS Mentuda	0,21	106.	DAS Teluk Radang	0,39
27.	DAS Dabo	0,44	67.	DAS Midai	0,27	107.	DAS Tembok	0,58
28.	DAS Dompok	1,33	68.	DAS Moro	0,23	108.	DAS Temiang	0,86
29.	DAS Duara	0,65	69.	DAS Mubur	0,41	109.	DAS Terong	0,32
30.	DAS Durai	0,20	70.	DAS Musal	0,27	110.	DAS Terong	0,01
31.	DAS Durian	0,24	71.	DAS Nongsa	0,75	111.	DAS Tiban Lama	0,75



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)	No	Nama DAS	Luas (Km2)
32.	DAS Durslin	0,97	72.	DAS Nyamuk	0,14	112.	DAS Tiga	2,06
33.	DAS E kang	0,48	73.	DAS Panai	2,34	113.	DAS Tjempah	0,32
34.	DAS Gading	1,16	74.	DAS Papan	0,53	114.	DAS Tjitim	0,25
35.	DAS Galang	0,87	75.	DAS Pauh	0,06	115.	DAS Ungar	0,58
36.	DAS Galang Baru	0,33	76.	DAS Penatu	0,72	116.	DAS Urung	0,48
37.	DAS Gata	0,65	77.	DAS Pengibu	0,01			
38.	DAS Gemuruh	0,25	78.	DAS Pengok	0,57	117.	DAS Wampu	1,06
39.	DAS Hulu	0,73	79.	DAS Penuba	0,43			
40.	DAS Jang	0,38	80.	DAS Pesung	0,50			

Sumber: Hasil Analisis Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015



Sumber: Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015

Gambar 2.2 Peta WS Kepulauan Riau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2.1.5 Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar 28,8⁰C dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga) 26,8⁰C. Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Bintan, Dabo (Lingga) dan Ranai (Natuna) sebesar 86%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) dan Karimun sebesar 82%. Jumlah hari hujan tertinggi di Batam sebanyak 233 hari sedangkan hari hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas) 182 hari. Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,6 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.009,3 mb. Kecepatan angin tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 3,0 knot, terendah di Kepulauan Anambas sebesar 1,0 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Kepulauan Anambas sebesar 65%, terendah di Karimun sebesar 39%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 7 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.9 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran
Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020**

No	Uraian	Tanjungpinang	Bintan	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Terempa (Kepulauan Anambas)
1	Suhu (°C)							
	Maksimum	33,9	33,9	35,3	34,7	31,5	34,9	36,1
	Minimum	21,9	21,9	20,7	21,6	23,8	22,0	21,0
	Rata-Rata	27,38	27,1	28,08	28,8	26,8	27,9	28,28
2	Kelembaban Udara (%)							
	Maksimum	94	98	100	100	93	98	100
	Minimum	43	75	46	44	75	58	45
	Rata-Rata	79	86	82	82	86	86	83
3	Tekanan	1011,0	1011,0	1011,6	1009,3	1010,1	1010,4	1009,9



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Tanjungpinang	Bintan	Hang Nadim (Batam)	Karimun	Dabo (Lingga)	Ranai (Natuna)	Terempa (Kepulauan Anambas)
	Udara (mb)							
4	Kecepatan Angin (knot)	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	1,0
5	Jumlah hari Hujan (hari)	214	210	233	203	227	213	182
6	Penyinaran Matahari (%)	50	50	42	39	51	65	52

Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BPS, Kepulauan Riau Dalam Angka 2021)

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 76/MenLHK-II/2015 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 207.569 Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 60.299 Hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 536 Hektar di Provinsi Kepulauan Riau, dengan Rincian Kawasan Hutan Produksi terbagi menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) 79.259 hektar, Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 120.490 Hektar, Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) seluas 74.367 Hektar.

Namun di tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Kepmen Nomor: SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di Pulau Batam Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 330 Hektar dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dari Kawasan Taman Buru Pulau Rempang Seluas ± 7.560 Hektar menjadi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi.



Dengan diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018 tersebut terdapat perubahan luasan Kawasan Hutan Produksi Konversi menjadi (HPK) seluas 81.927 ha. Selain itu kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 16.012 hektar dengan perhitungan setelah diterbitkannya SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2018.

2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 221.707 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

a) Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kawasan budidaya tanaman pangan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan basah dan lahan kering dimana pengairan dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis dan kawasan yang diperuntukan bagi tanaman pangan lahan kering untuk tanaman palawija dan hortikultura. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura dengan memanfaatkan potensi/kesesuaian lahan dengan kemungkinan dukungan prasarana pengairan (irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana).

Kawasan yang sesuai untuk tanaman pangan lahan basah adalah yang mempunyai sistem dan potensi Ketinggian < 1000 m dpl dan Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm.



b) Kawasan Peternakan

Kawasan peternakan merupakan kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perusahaan ternak. Kawasan peternakan dapat dilakukan secara terpadu sebagai bagian dari komponen usaha tani lainnya (tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) dan terpadu sebagai komponen ekosistem tertentu (kawasan hutan lindung atau suaka alam). Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk membangun peternakan yang berwawasan agribisnis berdasarkan ekonomi kerakyatan untuk mencapai kecukupan daging secara berkelanjutan. Kawasan agribisnis berbasis peternakan merupakan kawasan peternakan yang berorientasi ekonomi dan memiliki sistem agribisnis berkelanjutan dimulai dari industri hulu hingga industri hilir.

Kawasan peternakan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan berdasarkan pendekatan berbasis pulau dan terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan. Kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (backyard farming). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten

Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah hinterland. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan morfologi dan ukuran ternak, maka ternak besar (sapi dan kerbau) dikembangkan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan. Untuk ternak kecil (kambing, domba dan babi) diarahkan di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga. Sedangkan ternak unggas diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.



c) Kawasan Perkebunan

Kawasan perkebunan merupakan kawasan peruntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri. Tujuan pemantapan kawasan ini adalah mengembangkan areal produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan, peremajaan areal tanaman perkebunan serta pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan. Perkebunan yang menjadi komoditas favorit di Provinsi Kepulauan Riau adalah kelapa, sagu, karet, lada, cengkeh, coklat, gambir dan kopi. Kawasan yang sesuai untuk tanaman tahunan/perkebunan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. Ketinggian < 2.000 m dpl;
- b. Kelerengan 40%;
- c. Kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm

3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan perikanan merupakan kawasan yang diperuntukan bagi semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Kriteria kawasan peruntukan perikanan adalah:

- a. Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya dan industri pengolahan hasil perikanan.
- b. Tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan memuat zonasi kawasan yang terdiri dari:

a. Zona Inti

Zona inti diperuntukkan bagi perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, penelitian, dan pendidikan.

b. Zona Perikanan Berkelanjutan



Zona perikanan berkelanjutan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

c. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan diperuntukkan bagi perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan.

d. Zona Lainnya

Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu, yakni antara lain zona perlindungan, zona rehabilitasi dan sebagainya.

Sedangkan pengembangan pola ruang untuk kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dibagi menjadi:

a. **Kawasan Perikanan Tangkap**

Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.

Potensi perikanan berupa ikan kecil (pelagis) dengan potensi sekitar 513.000 ton namun pemanfaatannya baru sekitar 65%. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75%. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.600 ton dan 293.600 ton, dimana yang baru dimanfaatkan pada tahun 2008 tercatat 225.439 ton atau sebesar 97,23%.

Rencana pengembangan perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau yaitu tersebar pada seluruh wilayah pesisir dan kelautan Provinsi Kepulauan Riau terutama pada kawasan perikanan tangkap yang potensial dan tidak melanggar batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang berada di wilayah perbatasan dengan negara lain.



b. Kawasan Perikanan Budidaya

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.

c. Kawasan Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya. Kawasan minapolitan tersebar di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.

d. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

1) Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS)

Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) dikembangkan di Kabupaten Natuna dan Kota Batam.

2) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)

Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas B. Pelabuhan perikanan ini dirancang terutama untuk melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 30 GT. Pelabuhan ini dapat



menampung sekurang-kurangnya 75 buah kapal atau 2250 GT sekaligus dapat pula melayani kapal ikan yang beroperasi di laut teritorial dan ZEE Indonesia. Selain itu tersedia juga tanah untuk industri perikanan. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang dikembangkan di Kota Batam, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

3) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas C. Pelabuhan ini dapat melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT dan menampung 30 buah kapal atau 300 GT. Pelabuhan ini melayani kapal ikan yang beroperasi di perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan di Antang Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

4) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dikenal juga sebagai pelabuhan perikanan kelas D, melayani kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 3 GT dan menampung 20 buah kapal atau 60 GT kapal perikanan sekaligus. Pelabuhan ini melayani kegiatan perikanan di perairan pedalaman dan perairan kepulauan. Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikembangkan berada di Tanjung Batu Sawah Kota Tanjungpinang; Berakit, Tambelan, Batu Duyung, Kawal dan Berek Motor Kabupaten Bintan; Kecamatan Nongsa, Kecamatan Bulang dan Kecamatan Belakang Padang dan Kecamatan Galang Kota Batam; Moro Kabupaten Karimun; Kecamatan Senayang, Singkep, Selayar, Lingga Utara dan Singkep Barat Kabupaten Lingga; Serasan, Selat Lempa, Pulau Laut, Bunguran Barat, Pulau Tiga, Bunguran Utara, Subi, Midai dan Bunguran Timur Kabupaten Natuna serta Kecamatan Jemaja, Jemaja Timur, Siantan Timur, Siantan Tengah dan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas.



4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kawasan peruntukan pertambangan memiliki kriteria antara lain:

- a) Memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan data potensi mineral dan analisa geologi. Kawasan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi kawasan lindung.
- b) Kawasan tersebut merupakan bagian proses upaya merubah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 12.343 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan, dan Lingga, Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas, Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasis potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Adapun kriteria kawasan peruntukan industri yakni sebagai berikut;

- a) Kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri;
- b) Tersedia sistem air baku yang cukup;
- c) Adanya sistem pembuangan limbah;
- d) Tidak menimbulkan dampak sosial negatif yang berat;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- e) Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah yang beririgasi dan berpotensi untuk pengembangan irigasi.

Kawasan industri yang dikembangkan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau tersebut sesuai dengan kompetensi inti daerah. Adapun peruntukan kawasan industri di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di :

- a) Kota Tanjungpinang (kawasan industri Air Raja, Kawasan Industri Dompok Darat dan kawasan industri Dompok Seberang)
- b) Kabupaten Bintan (kawasan industri di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Gunung Kijang)
- c) Kota Batam (kawasan industri Kabil, Telaga Punggur, Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan Batu Besar di Kecamatan Nongsa, Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar, Sekupang di Kecamatan Sekupang, gugusan Pulau Janda Berhias di Kecamatan Sekupang, Tanjung Uncang di Kecamatan Batu Aji, Muka Kuning di Kecamatan Sungai Beduk, Sagulung dan Tanjung Gundap di Kecamatan Sagulung, Pulau Kepala Jeri di Kecamatan Belakang Padang, Sembulang di Kecamatan Galang, Batam Center di Kecamatan Batam Kota, Pelita di Kecamatan Lubuk Baja, Pulau Dangsi, Pulau Ladi, dan Pulau Belakang Sidi di Kecamatan Bulang)
- d) Kabupaten Karimun (kawasan industri di Parit Rempak, Tanjung Melolo, Tanjung Penggaru, Tanjung Jepun, Tanjung Sememal, Pasir Panjang dan Teluk Lekup)
- e) Kabupaten Lingga (kawasan industri di Sungai Tenam di Kecamatan Lingga dan kawasan industri Marok Tua di Kecamatan Singkep Barat)
- f) Kabupaten Natuna (Kawasan Industri Teluk Buton di Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut, Kawasan Industri Kelarik di Kecamatan Bunguran Utara dan Kawasan Industri perikanan di Kecamatan Pulau Tiga).
- g) Kabupaten Kepulauan Anambas (kawasan industri di Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja)



6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan komparatif terdiri dari:

- 1) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- 2) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- 3) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- 4) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- 5) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- 6) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- 7) Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

Geopark merupakan sebuah konsep manajemen pengembangan suatu kawasan (dengan luas tertentu) secara berkelanjutan yang memadu-serasikan tiga keanekaragaman alam, yaitu geologi (*geodiversity*), hayati (*biodiversity*) dan budaya (*cultural diversity*). Dalam pengembangannya, konsep ini berpiilar pada aspek Konservasi, Edukasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penumbuhan Nilai Ekonomi Lokal melalui geowisata. Berdasarkan keputusan Komite Nasional Geopark Indonesia di Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, November 2018, Natuna resmi termasuk sebagai kawasan Geopark Nasional. Setidaknya, ada 9 geosite yang masuk dalam



Geopark Natuna yaitu Pulau Akar, Batu Kasah, Gunung Ranai, Pantai Gua dan Bamak, Pulau Senua, Pulau Setanau, Senubing, Tanjung Datuk serta Taman Batu Alif.

Sebagai wujud keseriusannya, Kabupaten Natuna sedang menyusun Rencana Induk Pengembangan Geopark Natuna dan juga sudah diusulkan untuk masuk sebagai salah satu prioritas RPJMN 2020-2024. Seiring dengan hal tersebut, sebagaimana Program Kerja Badan Pengelola Geopark Natuna, pada saat ini dalam tahap persiapan menuju UNESCO Global Geopark dengan langkah yang telah dilakukan yaitu penelitian keragaman geologi Kabupaten Natuna dalam rangka perluasan geopark oleh Tim dari UNPAD Bandung.

Selain itu, pada tanggal 18 Desember 2019, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) di Natuna. Pada rapat tersebut disepakati bahwa Geopark Natuna memiliki kekhususan dibandingkan dengan geopark lainnya karena mendukung Rencana Strategis Pertahanan dan Keamanan sebagai bagian dari beranda terdepan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus mendorong konservasi dan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata.

7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana;
- b) Memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat diluar kawasan;
- c) Memiliki kelengkapan sarana, prasarana dan utilitas pendukung.

Masalah permukiman penduduk berkaitan erat dengan kebutuhan penduduk akan perumahan. Peningkatan jumlah penduduk yang terus bertambah akan memberikan konsekuensi dalam penyediaan perumahan. Perpindahan penduduk dari



desa ke kota juga menambah permasalahan di dalam penyediaan rumah. Tingkat urbanisasi semakin pesat akibat terjadinya perubahan yang sangat pesat dari sektor pertanian ke sektor industri.

Lahan siap bangun bagi pengembangan rumah perorangan perlu dikendalikan dari waktu ke waktu, hal ini mengingat keterbatasan lahan yang tidak mencukupi jika semua kawasan dibangun untuk perumahan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Orientasi pengembangan perumahan khususnya di kawasan perkotaan dan cepat tumbuh diarahkan bagi “rumah tumbuh” atau vertikal. Dengan demikian akan mengurangi tekanan bagi penyempitan lahan untuk aktivitas masyarakat secara keseluruhan. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 85.605 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

8. Pemanfaatan Ruang Laut

Pola perencanaan pembangunan hendaknya memasukkan unsur lingkungan dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya yang ada bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah haruslah didasarkan dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Jika dihubungkan dengan karakteristik negara kepulauan (yang dominan adalah perairan laut dan berfungsi sebagai jembatan dan jalan yang menyatukan wilayah kepulauan) maka tentunya beberapa perencanaan pembangunan yang disusun serta arahan penataan ruang wilayah yang dibuat haruslah berkarakteristik wilayah khususnya pada wilayah kepulauan, begitu juga dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi bentang wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan luas wilayah 425.214,676 Km² didominasi oleh perairan laut, terdiri dari 2.408 pulau, baik berpenghuni dan belum berpenghuni, bernama maupun belum bernama. Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi dan permasalahan sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat



Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografisnya. Selain itu perairan laut Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral. Berbagai aspek yang terdapat pada perairan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang di laut, seperti terganggunya ekosistem yang sangat dilindungi oleh kegiatan pertambangan pasir timah maupun oleh limbah dari alur pelayaran. Hal ini ditambah lagi dengan banyaknya pulau-pulau kecil yang terletak di kawasan perbatasan wilayah negara, sehingga aspek pengelolaannya perlu mendapatkan perlakuan khusus mengingat potensi dan masalah yang dapat muncul di kawasan tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan pengembangan kawasan laut, termasuk juga didalamnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang yang berkelanjutan.

Rencana pengembangan kawasan laut Provinsi Kepulauan Riau merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya laut melalui pembagian kawasan laut yang meliputi:

a. Kawasan pemanfaatan umum

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan dan diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata, permukiman yang telah ada, pelabuhan, pertanian, hutan, pertambangan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, kawasan khusus parkir kapal (Anchorage Area), kawasan alih muat muatan kapal Ship to Ship (STS Transfer), infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biofisik lingkungannya

b. Kawasan konservasi

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan/atau sempadan pantai.

c. Kawasan strategis nasional

merupakan kawasan yang dapat dimanfaatkan sebagai zona pertahanan dan keamanan, situs warisan dunia, kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, termasuk 22 pulau kecil terdepan yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.



d. Alur laut

Meliputi alur pelayaran internasional, nasional dan regional, alur sarana umum, alur migrasi ikan, serta jaringan kabel dan pipa gas bawah laut.

Aspek wilayah perencanaan pengembangan kawasan laut meliputi seluruh wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, aspek pengelolaan wilayah laut tetap mengikuti aturan pembagian kewenangan daerah provinsi di laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Apabila wilayah laut antar dua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah provinsi tersebut. Sementara itu penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

2.1.7 Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana alam di Provinsi Kepulauan Riau diketahui berdasarkan data sejarah kejadian bencana dan data hasil kajian bencana serta kejadian bencana yang sedang berlangsung dan tidak tercatat dalam sejarah kejadian bencana sebelumnya, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat disusunnya dokumen ini, dan masih berpotensi besar terus berlangsung dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan.

Dari catatan kejadian bencana DIBI, diketahui bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi terjadi 5 (lima) jenis bencana, yang tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi. Sedangkan dari hasil analisis menggunakan pendekatan sistem informasi geografis (SIG) teridentifikasi adanya potensi jenis bencana lainnya.

Potensi bencana yang dapat terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, dan yang membutuhkan penanganan untuk pengurangan risiko masing-masing bencana serta



menjadi subjek kajian dalam Dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan di Provinsi Kepulauan Riau ini meliputi 11 (sebelas) jenis bencana.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut:

1. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 820.450,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel 2.10)

Tabel 2.10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.050	Sedang
2	Kabupaten Bintan	131.177	Tinggi
3	Kota Batam	102.362	Sedang
4	Kabupaten Karimun	92.591	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	219.949	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	197.083	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.238	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		820.450	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024



2. Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi

Potensi bahaya kegagalan teknologi memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kegagalan teknologi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kegagalan teknologi. Di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh total luas bahaya kegagalan teknologi seluas 26.909,00 Ha dan berada pada kelas Rendah.

Tabel 2.11 Potensi Bahaya Kegagalan Teknologi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	942	Rendah
2	Kabupaten Bintan	8.674	Rendah
3	Kota Batam	10.893	Rendah
4	Kabupaten Karimun	4.014	Rendah
5	Kabupaten Lingga	378	Rendah
6	Kabupaten Natuna	1.485	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	523	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		26.909	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

3. Potensi Bahaya Tanah Longsor

Potensi luas bahaya tanah longsor merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana tanah longsor berdasarkan kajian bahaya tanah longsor. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak bahaya tanah longsor, sedangkan kelas bahaya tanah longsor Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/kota yang terdampak bencana tanah longsor. Potensi luas bahaya tanah longsor adalah 122.325,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.12.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.12 Potensi Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	6.419	Rendah
3	Kota Batam	1.978	Sedang
4	Kabupaten Karimun	8.551	Sedang
5	Kabupaten Lingga	36.344	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	22.101	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.932	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		122.325	Tinggi

Sumber: Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

4. Potensi Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Total luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 573.425,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Potensi luas bahaya banjir di Provinsi Kepulauan Riau menurut kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	11.104	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	106.477	Tinggi
3	Kota Batam	78.136	Tinggi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
4	Kabupaten Karimun	71.488	Sedang
5	Kabupaten Lingga	160.476	Sedang
6	Kabupaten Natuna	134.704	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	11.080	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		573.425	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

Sementara itu, potensi luas bahaya banjir bandang merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir bandang berdasarkan kajian bahaya banjir bandang. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak banjir bandang, sedangkan kelas bahaya banjir bandang Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya banjir bandang. Potensi luas bahaya banjir bandang adalah 12.145,00 Ha dan berada pada kelas tinggi (lihat Tabel 2.14)

Tabel 2.14 Potensi Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	2.601	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	-	-
3	Kota Batam	5.675	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	2.442	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1.427	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		12.145	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024



5. Potensi Bahaya Gempa Bumi

Potensi bahaya gempa bumi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gempa bumi berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten. Sedangkan kelas bahaya gempa bumi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak bahaya gempa bumi. Potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 821.513,00 Ha dan berada pada kelas rendah. (lihat Tabel 2.15).

Tabel 2.15 Potensi Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.016	Rendah
2	Kabupaten Bintan	131.049	Rendah
3	Kota Batam	102.165	Rendah
4	Kabupaten Karimun	92.269	Rendah
5	Kabupaten Lingga	219.493	Rendah
6	Kabupaten Natuna	199.193	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	62.328	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		821.513	Rendah

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

6. Potensi Bahaya Kekeringan

Potensi bahaya kekeringan memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kekeringan berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten. Kelas bahaya kekeringan Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak kekeringan. Dari hasil kajian dihasilkan total luas bahaya kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 816.627,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel 2.16).



Tabel 2.16 Potensi Bahaya Kekeringan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	15.003	Sedang
2	Kabupaten Bintan	130.383	Tinggi
3	Kota Batam	101.363	Sedang
4	Kabupaten Karimun	91.726	Sedang
5	Kabupaten Lingga	218.158	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	198.569	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	61.425	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		816.627	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

7. Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana gelombang ekstrim dan abrasi berdasarkan kajian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi. Total luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten/kota yang terdampak gelombang ekstrim dan abrasi, sedangkan kelas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari seluruh wilayah yang terdampak bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Adapun total luas wilayah yang memiliki potensi bahaya gelombang ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau seluas 108.958 ha dengan status kelas bahaya yang tinggi. Adapun rincian bahaya gelombang ekstrim dan abrasi per kabupaten/kota dapat dilihat lebih lanjut di Tabel 2.17.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.17 Potensi Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	1.515	Rendah
2	Kabupaten Bintan	13.837	Tinggi
3	Kota Batam	18.947	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	14.495	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	30.497	Tinggi
6	Kabupaten Natuna	12.776	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	16.891	Tinggi
Provinsi Kepulauan Riau		108.958	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

8. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim merupakan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya di Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya per kabupaten/ kota. Kelas bahaya cuaca ekstrim ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdampak cuaca ekstrim. Dari hasil analisis, total luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah 153.636,00 Ha dan berada pada kelas tinggi.

Tabel 2.18 Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	-	-
2	Kabupaten Bintan	511	Sedang
3	Kota Batam	-	-
4	Kabupaten Karimun	-	-
5	Kabupaten Lingga	97	Sedang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
6	Kabupaten Natuna	153.028	Tinggi
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		153.636	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

9. Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

Kawasan potensi bahaya epidemi dan wabah penyakit memperlihatkan potensi luas bahaya terdampak epidemi dan wabah penyakit tiap kabupaten/kota. Potensi bahaya epidemi dan wabah penyakit pada Tabel 2.19 memaparkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana epidemi dan wabah penyakit berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan total luas bahaya tiap kabupaten/kota. Kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak epidemi dan wabah penyakit. Di Provinsi Kepulauan Riau, potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit secara keseluruhan adalah 798.499,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel 2.19).

Tabel 2.19 Potensi Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.711	Tinggi
2	Kabupaten Bintan	128.705	Tinggi
3	Kota Batam	96.958	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.528	Tinggi
5	Kabupaten Lingga	214.051	Sedang
6	Kabupaten Natuna	195.646	Sedang
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	58.900	Sedang
Provinsi Kepulauan Riau		798.499	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024



10. Potensi Bahaya Pandemi Covid-19

Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana pandemi COVID-19 berdasarkan kajian bahaya pandemi COVID-19. Total luas bahaya Provinsi Kepulauan Riau ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak pandemi COVID-19, sedangkan kelas bahaya pandemi COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdampak bahaya pandemi COVID-19. Potensi luas bahaya pandemi COVID-19 adalah 789.558,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. (lihat Tabel 2.20).

Tabel 2.20 Potensi Bahaya Pandemi Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Kota Tanjungpinang	14.773	Sedang
2	Kabupaten Bintan	128.608	Rendah
3	Kota Batam	86.609	Tinggi
4	Kabupaten Karimun	89.497	Sedang
5	Kabupaten Lingga	212.855	Rendah
6	Kabupaten Natuna	195.566	Rendah
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	59.650	Rendah
Provinsi Kepulauan Riau		789.558	Tinggi

Sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024

2.1.8 Kondisi Demografi

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 385 pulau yang berpenghuni, sisanya sebagai pulau tidak berpenghuni. Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau, sehingga dalam pengaturan tata ruang, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pelayanan kepada masyarakat didasarkan kepada konsepsi gugus pulau.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Secara rinci, jumlah penduduk menurut kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.21.

**Tabel 2.21 Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2020**

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tanjungpinang	202.215	204.735	207.057	209.280	211.583	227.663
Kabupaten Bintan	153.020	154.584	156.313	157.927	159.403	159.518
Kota Batam	1.188.985	1.236.399	1.282.196	1.329.773	1.376.009	1.196.396
Kabupaten Karimun	225.298	227.277	229.194	231.145	232.797	253.457
Kabupaten Lingga	88.591	88.971	89.330	89.501	89.781	98.633
Kabupaten Natuna	74.520	75.282	76.192	76.968	77.771	81.495
Kabupaten Kepulauan Anambas	40.414	40.921	41.412	41.927	42.309	47.402
Provinsi Kepulauan Riau	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar) yang dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.22.

**Tabel 2.22 Jumlah Penduduk dan LPP Provinsi Kepulauan Riau menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2020**

Kabupaten/Kota	2019	2020	LPP (2019-2020)
Kota Tanjungpinang	211.583	227.663	0,076
Kabupaten Bintan	159.403	159.518	0,001
Kota Batam	1.376.009	1.196.396	-0,131
Kabupaten Karimun	232.797	253.457	0,089
Kabupaten Lingga	89.781	98.633	0,099
Kabupaten Natuna	77.771	81.495	0,048
Kabupaten Kepulauan	42.309	47.402	0,120



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kabupaten/Kota	2019	2020	LPP (2019-2020)
Anambas			
Provinsi Kepulauan Riau	2.189.653	2.064.564	-0,057

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Sementara itu, distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk tahun 2020 dapat dilihat lebih lanjut dalam tabel berikut.

Tabel 2.23 Komposisi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Usia Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	97.600	92.888	190.488
5 - 9	97.709	93.094	190.803
10 - 14	89.348	84.260	173.608
15 - 19	88.201	84.284	172.485
20 - 24	89.544	87.978	177.522
25 - 29	90.003	89.436	179.439
30 - 34	92.696	93.362	186.058
35 - 39	88.624	88.370	176.994
40 - 44	83.864	81.291	165.155
45 - 49	72.147	68.327	140.474
50 - 54	55.987	50.465	106.452
55 - 59	42.371	37.433	79.804
60 - 64	27.719	24.533	52.252
65 - 69	17.762	16.005	33.767
70 - 74	10.618	9.924	20.542
75+	9.103	9.598	18.701
Provinsi Kepulauan Riau	1.053.296	1.011.248	2.064.544

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Struktur umur penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh penduduk muda dan penduduk umur 30-39 tahun. Frekuensi terbesar penduduk laki-laki berada pada kelompok umur 0-9 tahun. Sedangkan frekuensi terbesar penduduk perempuan berada pada kelompok umur 0-9 tahun.

Penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari pembangunan sesuai dengan konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan di suatu daerah. Arah kebijakan pembangunan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul selaras dengan kebijakan nasional menuju Indonesia Maju. SDM unggul yaitu SDM yang memiliki kompetensi, *soft skill*, dan berkarakter. Secara rinci potret kondisi kependudukan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam Tabel 2.24.

Tabel 2.24 Indikator Kependudukan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah penduduk	1.973.043	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564
Laki-Laki	1.007.979	1.035.511	1.062.692	1.089.442	1.115.765	1.053.296
Perempuan	965.064	992.658	1.020.002	1.047.079	1.073.888	1.011.268
Pertumbuhan penduduk (%)	2,90	2,79	2,69	2,58	2,49	-5,7
Kepadatan wilayah/km ²	186	191	254	260	267	-
Rasio Jenis Kelamin	104,45	104,32	104,19	104,05	103,90	104,15

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (data diolah)

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, aspek kesejahteraan sosial, aspek seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. Untuk itu bagian ini menyajikan karakter ekonomi wilayah Kepulauan Riau melalui tabel kontribusi sektor dan pertumbuhan ekonomi melalui tabel pertumbuhan dan persebaran ekonomi melalui PDRB kabupaten/kota.

PDRB dapat dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku. Perkembangan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan



2010 Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari 155.131,35 milyar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 181.895,86 milyar rupiah pada tahun 2019, namun karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga konstan 2010 mengalami penurunan menjadi 174.976,70 milyar rupiah pada tahun 2020. Hal ini pun terjadi pada perkembangan nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2015-2019 dari 199.570,39 milyar rupiah pada tahun 2015 meningkat menjadi 267.658,24 milyar rupiah pada tahun 2019 tetapi karena pandemi covid-19, nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau atas harga berlaku mengalami penurunan menjadi 254.253,28 milyar rupiah pada tahun 2020.

Dilihat dari kontribusi terhadap PDRB, terlihat bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 38,35-40,76 persen selama periode 2015 hingga 2020. Adapun 5 Sektor ekonomi yang menunjukkan kontribusi terbesar sepanjang tahun 2015-2020 baik untuk harga berlaku maupun harga konstan yaitu sektor Industri Pengolahan, Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada saat ini terletak pada kelima sektor tersebut. Dengan demikian, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dapat diarahkan untuk menunjang kegiatan perekonomian kelima sektor tersebut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.25 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2016-2020 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan

Riau

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.689,22	3,67	6.018,41	3,70	5.945,61	3,58	5.757,78	3,32	5.717,73	3,14	5.466,78	3,12
B	Pertambangan dan Penggalan	25.417,33	16,38	26.883,19	16,51	25.648,83	15,44	25.995,36	14,98	26.037,64	14,31	24.951,04	14,26
C	Industri Pengolahan	59.498,19	38,35	61.497,86	37,76	62.436,28	37,59	65.018,04	37,47	69.079,81	37,98	71.325,79	40,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.400,52	0,90	1.523,11	0,94	1.621,70	0,98	1.600,28	0,92	1.653,05	0,91	1.580,66	0,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	193,11	0,12	203,26	0,12	222,66	0,13	225,03	0,13	224,90	0,12	218,65	0,12
F	Konstruksi	26.871,95	17,32	28.073,93	17,24	29.042,76	17,49	31.345,83	18,07	33.924,66	18,65	31.752,17	18,15
G	Perdagangan Besar dan	11.738,60	7,57	12.858,55	7,90	13.665,03	8,23	14.523,51	8,37	15.408,88	8,47	13.449,61	7,69



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
	Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor												
H	Transportasi dan Pergudangan	4.161,12	2,68	4.413,81	2,71	4.654,49	2,80	4.696,77	2,71	4.280,15	2,35	2.558,45	1,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.002,93	1,94	3.159,14	1,94	3.536,02	2,13	3.895,60	2,25	4.283,34	2,35	2.526,91	1,44
J	Informasi dan Komunikasi	3.230,70	2,08	3.469,62	2,13	3.736,38	2,25	4.136,74	2,38	4.626,51	2,54	5.392,39	3,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.105,52	2,65	4.335,03	2,66	4.466,53	2,69	4.724,11	2,72	4.951,67	2,72	4.798,29	2,74
L	Real Estate	2.340,43	1,51	2.443,35	1,50	2.549,27	1,53	2.539,78	1,46	2.542,82	1,40	2.330,97	1,33
M,N	Jasa Perusahaan	7,8	0,01	8,28	0,01	8,88	0,01	9,49	0,01	8,65	0,00	5,03	0,00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan	3.386,49	2,18	3.583,27	2,20	3.750,53	2,26	4.013,02	2,31	4.073,85	2,24	4.398,45	2,51



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
	Sosial Wajib												
P	Jasa Pendidikan	2.022,48	1,30	2.201,37	1,35	2.418,96	1,46	2.450,78	1,41	2.461,46	1,35	2.259,58	1,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.405,32	0,91	1.467,87	0,90	1.618,90	0,97	1.668,14	0,96	1.714,54	0,94	1.679,46	0,96
R,S,T,U	Jasa Lainnya	659,67	0,43	712,98	0,44	758,86	0,46	898,50	0,52	906,21	0,50	282,47	0,16
	PDRB	155.131,35	100	162.853,04	100	166.081,68	100	173.498,75	100	181.895,86	100	174.976,70	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.26 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.087,96	3,55	7.729,47	3,58	7.981,53	3,51	8.100,22	3,26	8.223,77	3,07	8.061,29	3,17
B	Pertambangan dan Penggalian	31.400,49	15,73	33.083,03	15,29	32.061,78	14,08	35.148,52	14,13	34.964,44	13,06	28.391,33	11,17
C	Industri Pengolahan	74.966,24	37,56	80.842,35	37,43	84.404,23	37,07	91.792,57	36,89	100.705,38	37,62	105.899,71	41,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.218,91	1,11	2.468,48	1,14	2.689,97	1,18	2.644,61	1,06	2.763,73	1,03	2.603,10	1,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	233,26	0,12	252,52	0,12	282,71	0,12	288,74	0,12	291,29	0,11	281,46	0,11



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
F	Konstruksi	36.456,42	18,27	38.848,43	17,98	41.409,19	18,19	46.628,25	18,74	52.239,25	19,52	49.317,72	19,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.424,15	7,73	17.716,68	8,20	19.653,11	8,63	22.074,79	8,87	24.314,35	9,08	21.561,95	8,48
	Transportasi dan Pergudangan	6.260,55	3,14	6.953,59	3,22	7.471,82	3,28	7.648,63	3,07	7.219,02	2,7	4.111,95	1,62
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.951,43	1,98	4.346,14	2,01	5.061,47	2,22	5.585,88	2,24	6.208,87	2,32	3.391,34	1,33
J	Informasi dan	3.603,55	1,81	3.969,12	1,84	4.485,79	1,97	5.016,21	2,02	5.603,09	2,09	6.483,54	2,55



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
	Komunikasi												
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.301,54	2,66	5.800,41	2,69	6.254,65	2,75	6.781,34	2,73	7.271,53	2,72	6.991,38	2,75
L	Real Estate	2.863,61	1,43	3.131,44	1,45	3.415,73	1,50	3.467,24	1,39	3.563,18	1,33	3.195,11	1,26
M,N	Jasa Perusahaan	9,15	-	10,10	0,01	11,34	-	12,48	0,01	11,38	-	5,82	-
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib												
O		4.627,75	2,32	5.106,64	2,36	5.914,07	2,60	6.385,00	2,57	6.791,47	2,54	7.347,30	2,89
P	Jasa Pendidikan	2.569,03	1,29	2.931,37	1,36	3.415,20	1,50	3.708,43	1,49	3.849,23	1,44	3.896,18	1,53
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1.737,40	0,87	1.882,15	0,87	2.119,21	0,93	2.228,24	0,9	2.305,97	0,86	2.277,84	0,9



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan usaha	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Sosial													
R,S,T,U	Jasa Lainnya	858,96	0,43	980,77	0,45	1.075,07	0,47	1.311,08	0,53	1.332,30	0,5	436,25	0,17
	PDRB	199.570,39	100	216.007,66	100	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Mengacu pada kajian *Background Study* Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020, dibandingkan dengan nasional maka struktur ekonomi Provinsi Kepulauan Riau sudah sangat berciri industri sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.27.

**Tabel 2.27 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau
Dibandingkan Nasional Tahun 2019-2020**

No	Sektor	Nasional		Provinsi Kepulauan Riau	
		Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)	Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,70	1,75	3,17	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalan	6,44	-1,95	11,17	-4,17
C	Industri Pengolahan	19,88	-2,93	41,65	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,16	-2,34	1,02	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	4,94	0,11	-2,78
F	Konstruksi	10,71	-3,26	19,4	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,93	-3,72	8,48	-12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	4,47	-15,04	1,62	-40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,55	-10,22	1,33	-41,01
J	Informasi dan Komunikasi	4,51	10,58	2,55	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51	3,25	2,75	-3,1
L	Real Estate	2,94	2,32	1,26	-8,33



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Sektor	Nasional		Provinsi Kepulauan Riau	
		Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)	Kontribusi (2020)	Pertumbuhan (2019-2020)
M/N	Jasa Perusahaan	1,91	-5,44	0	-41,88
	Administrasi Pemerintahan,				
O	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,76	-0,03	2,89	7,97
P	Jasa Pendidikan	3,56	2,63	1,53	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,30	11,60	0,9	-2,05
R-U	Jasa Lainnya	1,96	-4,10	0,17	-68,83
	PDRB	100	-2,07	100	-3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)

Dilihat dari persebarannya, maka Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen pada tahun 2020. Selanjutnya Kabupaten Bintan sebesar 7,78 persen pada tahun 2015 dan mengalami kenaikan menjadi 8,22 persen pada tahun 2020. Sedangkan kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen. Hal ini bisa dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.28 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Persentase Kontribusi terhadap Jumlah
PDRB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Kota Tanjungpinang	15.842,11	7,96	17.065,53	8,00	18.088,95	8	19.078,15	7,80	20.167,98	7,67	19.665,01	7,80
Kabupaten Bintan	15.481,10	7,78	16.596,40	7,78	17.982,66	7,95	19.597,81	8,01	21.303,01	8,10	20.743,70	8,22
Kota Batam	120.945,74	60,80	130.553,21	61,22	137.925,34	60,99	151.285,14	61,87	164.490,12	62,55	161.364,18	63,97
Kabupaten Karimun	9.632,11	4,84	10.610,20	4,98	11.618,49	5,14	12.628,78	5,16	13.544,17	5,15	13.310,63	5,28
Kabupaten Lingga	3.043,43	1,53	3.284,25	1,54	3.659,73	1,62	3.969,33	1,62	4.274,27	1,62	4.292,43	1,70
Kabupaten Natuna	17.893,99	9	18.552,33	8,70	19.604,96	8,67	21.123,65	8,64	21.795,5	8,29	18.405,91	7,30
Kabupaten Kepulauan Anambas	16.074,02	8,08	16.597,58	7,78	17.256,61	7,63	16.849,27	6,89	17.439,77	6,63	14.453,58	5,73
Provinsi Kepulauan Riau	199.570,39	100	216.007,66	100	227.706,88	100	248.822,23	100	267.658,24	100	254.253,29	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

PDRB Atas Dasar Harga Konstan mencerminkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi oleh harga yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu jika dilihat berdasarkan Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengeluarkan inflasi maka Kabupaten Lingga merupakan kota yang memiliki penurunan ekonomi terendah akibat dampak Covid-19 sebesar -0,68 % pada tahun 2020 dan Kepulauan Anambas merupakan kabupaten dengan penurunan ekonomi tertinggi yaitu sebesar -7,83. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.29 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar
Harga Konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

Kabupaten/Kota	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%	Rp (miliar)	%
Kota Tanjungpinang	12.568,74	5,70	13.197,81	5,01	13.544,58	2,63	13.979,22	3,21	14.436,94	3,27	13.938,24	- 3.45
Kabupaten Bintan	12.013,39	5,16	12.620,12	5,05	13.244,04	4,94	13.886,09	4,85	14.540,07	4,71	13.917,80	- 4.28
Kota Batam	90.457,74	6,87	95.369,70	5,43	97.862,56	2,61	102.718,60	4,96	108.800,35	5,92	106.029,65	- 2.55
Kabupaten Karimun	7.678,54	6,54	8.152,07	6,17	8.583,14	5,29	9.016,34	5,05	9.456,92	4,89	9.117,12	- 3.59
Kabupaten Lingga	2.429,75	2,38	2.529,11	4,09	2.682,78	6,08	2.790,12	4,00	2.934,66	5,18	2.914,60	- 0.68
Kabupaten Natuna	14.115,27	3,90	14.538,93	3,00	14.665,42	0,87	15.036,09	2,53	15.299,36	1,75	14.642,75	- 4.29
Kabupaten Kepulauan Anambas	12.784,25	3,03	13.155,24	2,90	13.142,46	-0,1	12.063,35	-8,21	12.047,35	-0,13	11.104,45	- 7.83
Provinsi Kepulauan Riau	155.131,35	6,02	162.853,04	4,98	166.081,68	1,98	173.498,75	4,47	181.895,86	4,84	174.976,7	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

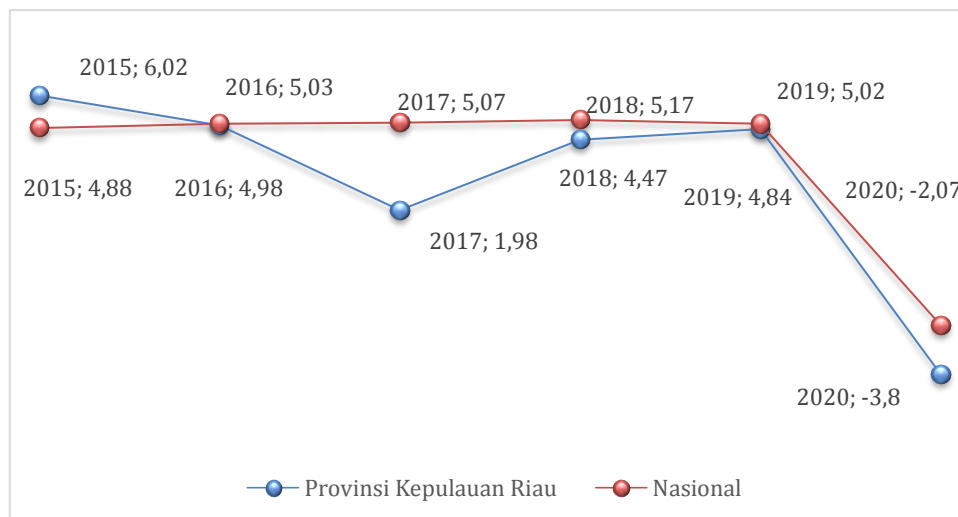
3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)



2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 dan akhirnya mencapai titik terendah sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4.58 persen di tahun 2018 dan mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 seluruh Kabupaten Kota di Provinsi Kepulauan Riau bertumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang sejalan dengan ekonomi nasional berkaitan dengan tingginya peran Covid-19 yang menyebabkan hampir seluruh sektor industri mengalami pelemahan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.30 Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kota Tanjungpinang	5,70	5,01	2,63	3,21	3,27	-3.45
Kab. Bintan	5,16	5,05	4,94	4,85	4,71	-4.28
Kota Batam	6,87	5,43	2,61	4,96	5,92	-2.55
Kab. Karimun	6,54	6,17	5,29	5,05	4,89	-3.59
Kab. Lingga	2,38	4,09	6,08	4,00	5,18	-0.68
Kab. Natuna	3,90	3,00	0,87	2,53	1,75	-4.29
Kab. Kepulauan Anambas	3,03	2,90	-0,10	-8,21	-0,13	-7.83
Provinsi Kepulauan Riau	6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)

Hampir seluruh sektor perekonomian di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau terdampak akibat pandemik Covid-19. Sektor yang mengalami dampak paling besar terjadi pada sektor Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, dan Jasa Lainnya yang mengalami pertumbuhan negatif di atas 40% di tahun 2020 ini. Sementara itu, tercatat hanya 3 sektor yang bertumbuh secara positif di tahun 2020 yaitu pada sektor Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Konstan Tahun 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,78	5,79	-1,21	-3,16	-0,7	-4,39
B	Pertambangan dan Penggalian	9,22	5,77	-4,59	1,35	0,16	-4,17
C	Industri Pengolahan	5,61	3,36	1,53	4,14	6,25	3,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,6	8,75	6,47	-1,32	3,3	-4,38
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	2,85	5,26	9,54	1,07	-0,06	-2,78



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kategori	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang						
F	Konstruksi	3,53	4,47	3,45	7,93	8,23	-6,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	9,54	6,27	6,28	6,1	- 12,72
H	Transportasi dan Pergudangan	5,62	6,07	5,45	0,91	-8,87	- 40,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,63	5,2	11,93	10,17	9,95	- 41,01
J	Informasi dan Komunikasi	5	7,4	7,69	10,71	11,84	16,55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,47	5,59	3,03	5,77	4,82	-3,1
L	Real Estate	4,24	4,4	4,33	-0,37	0,12	-8,33
M,N	Jasa Perusahaan	2,77	6,18	7,25	6,84	-8,82	- 41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,5	5,81	4,67	7	1,52	7,97
P	Jasa Pendidikan	6,15	8,85	9,88	1,32	0,44	-8,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,15	4,45	10,29	3,04	2,78	-2,05
R,S,T,U	Jasa Lainnya	6,55	8,08	6,43	18,4	0,86	- 68,83
	PDRB	6,02	4,98	1,98	4,47	4,84	-3,80

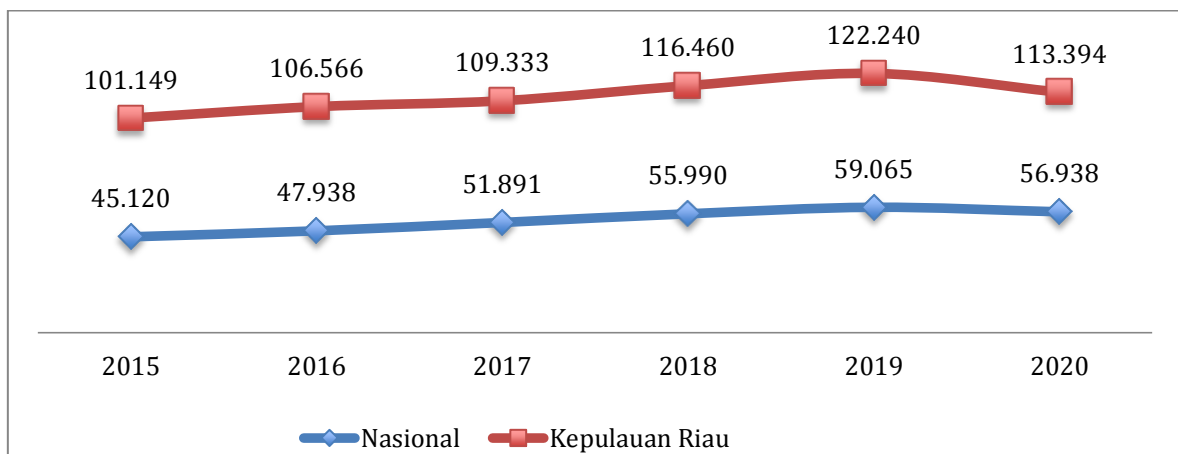
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2021 (diolah)



3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu enam tahun terakhir, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101.149 ribu meningkat menjadi meningkat menjadi Rp 122.240 ribu pada tahun 2019 dan terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp 113.394 ribu akibat dari dampak Covid-19.

Meskipun PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menurun tetapi secara agregat tahun 2015 - 2020 PDRB perkapita mengalami kenaikan dengan meningkatnya PDRB perkapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Apabila dibandingkan dengan PDB perkapita nasional, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

**Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020
(Ribu Rupiah)**



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Secara kewilayahan pendapatan perkapita yang dicapai oleh kabupaten/kota di Kepulauan Riau cukup senjang. Berdasar urutannya, kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tertinggi dinikmati oleh wilayah dengan dominasi sektor pertambangan, diikuti oleh industri dan terakhir sektor pertanian.

**Tabel 2.32 Sektor Dominan dan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019**

No	Kabupaten/ Kota	Sektor Dominan	Pendapatan Perkapita (2019) (Rp juta)	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita (2014-2019) (%)
1	Kota Tanjungpinang	Konstruksi Pemerintahan Industri	93,35	27,99
2	Kabupaten Bintan	Industri Konstruksi Perdagangan	133,63	44,16
3	Kota Batam	Industri Konstruksi Perdagangan	119,54	27,30
4	Kabupaten Karimun	Perdagangan Konstruksi Pertanian	58,15	50,53
5	Kabupaten Natuna	Pertambangan Pertanian Konstruksi	280,19	22,37
6	Kabupaten Lingga	Pertanian Perdagangan Konstruksi	47,55	47,07
7	Kabupaten	Pertambangan	415,05	10,35



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/ Kota	Sektor Dominan	Pendapatan Perkapita (2019) (Rp juta)	Pertumbuhan Pendapatan Perkapita (2014-2019) (%)
	Kepulauan	Pertanian		
	Anambas	Konstruksi		
Provinsi Kepulauan Riau			163,92	

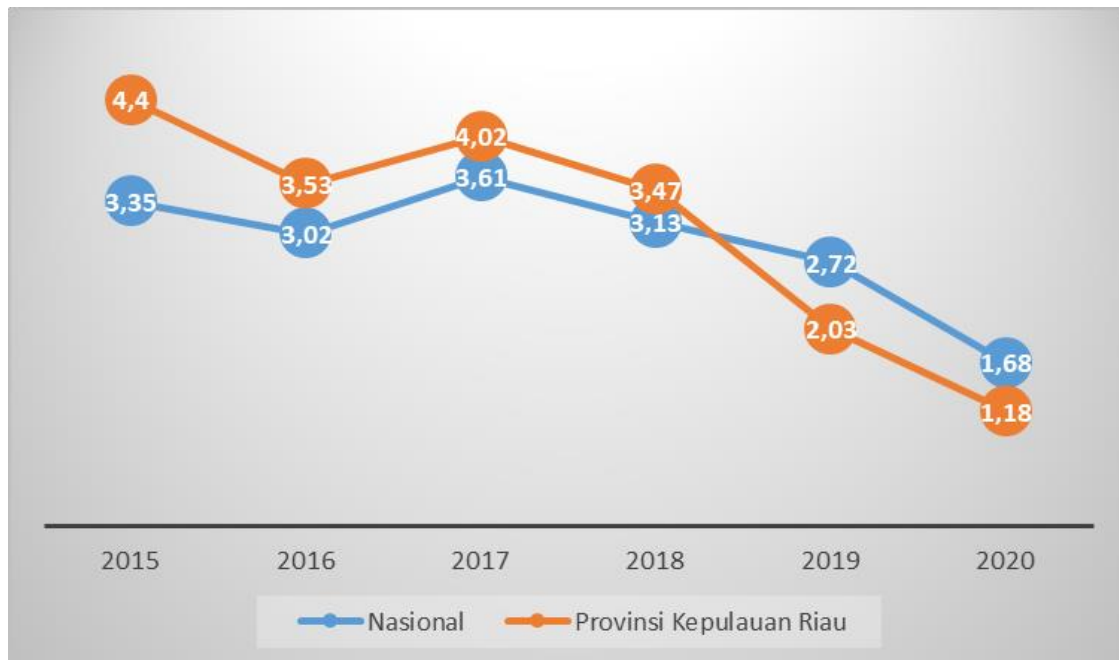
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2019

4. Inflasi

Tingkat inflasi sedikit banyak menunjukkan efisiensi kerja ekonomi dan tingkat keseimbangan ketersediaan barang dan jasa di sebuah wilayah. Secara makro tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional, namun tren-nya sejalan dengan angka inflasi nasional. Secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dalam jangka waktu tertentu. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka akan terjadi kenaikan inflasi. Walaupun inflasi secara umum menurun, namun inflasi pada kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian. Karena komoditas makanan adalah penyumbang terbesar yang membentuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Diolah dari Data BPS Nasional dan BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.5 Tingkat Inflasi Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau

Ada 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang menjadi sumber inflasi yaitu: (1) Makanan, Minuman, dan Tembakau; (2) Pakaian dan Alas Kaki; (3) Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga; (4) Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga; (5) Kesehatan; (6) Transportasi; (7) Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan; (8) Rekreasi, Olahraga, dan Budaya; (9) Pendidikan; (10) Penyediaan Makanan dan Minuman; dan (11) Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Tahun 2020, angka inflasi terbesar disumbang oleh kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang memiliki angka inflasi yang sangat tinggi dibandingkan angka nasional.



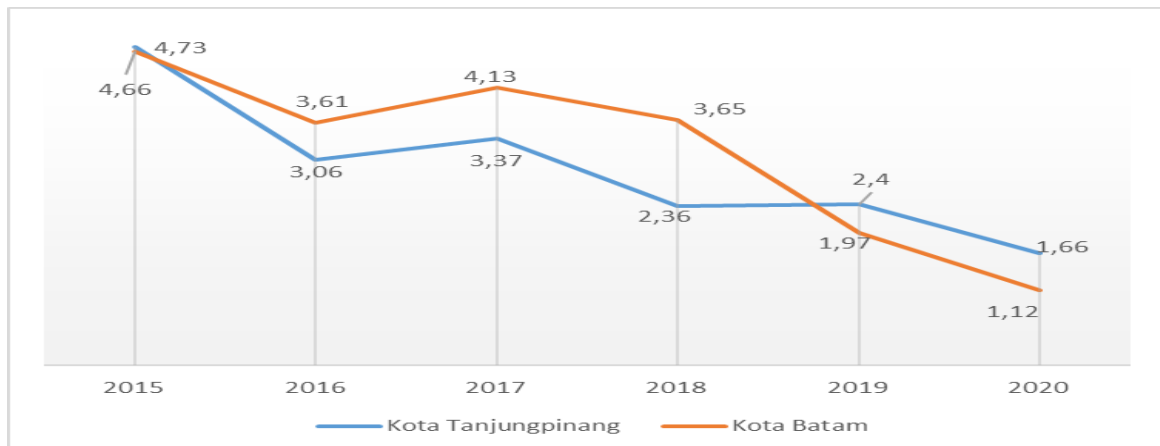
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka, 2021 & BPS Nasional 2021

**Gambar 2.6 Perbandingan Tingkat Inflasi Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Tahun 2020**

Tingkat inflasi Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan tidak dapat dilepaskan dari tingkat inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Inflasi di kedua kota tersebut adalah cerminan dari inflasi Kepulauan Riau. Selain itu, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang juga termasuk ke dalam 2 dari 82 kota lainnya yang menjadi basis tingkat inflasi nasional (Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2021). Tren inflasi Kota Batam sejak tahun 2015 mengalami penurunan dari angka 4,66 menjadi 1,12 di tahun 2020. Kota Tanjungpinang juga mengalami penurunan dari angka 4,73 di 2015 menjadi 1,66 di tahun 2020.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

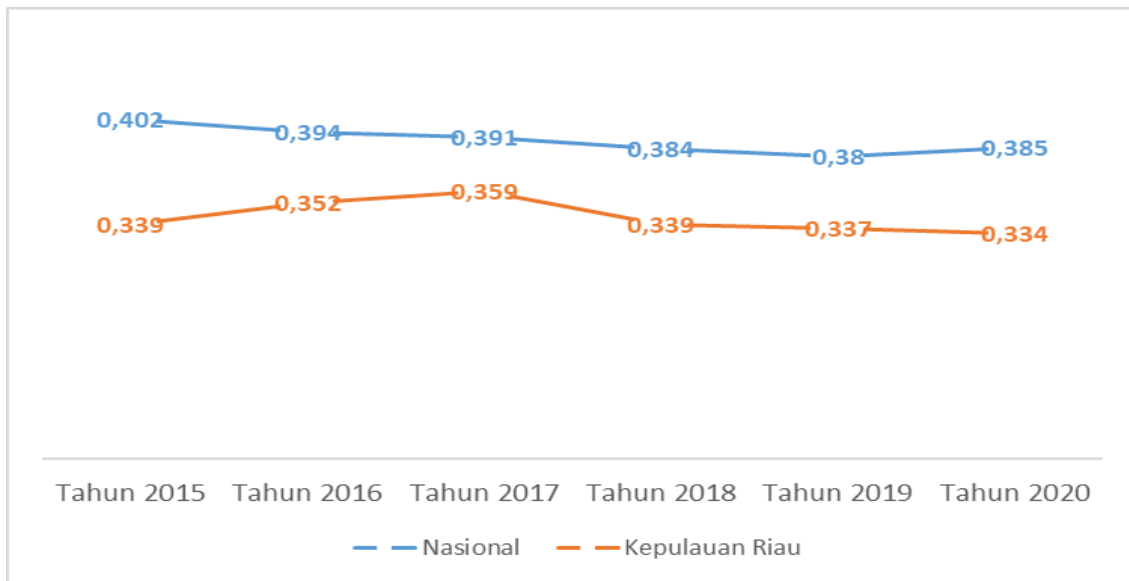
**Gambar 2.7 Perbandingan Tingkat Inflasi Kota Batam dan Kota Tanjungpinang Acuan
Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

5. Ketimpangan Pendapatan

Indeks Gini merupakan suatu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antarkelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “sedang” bila Indeks Gini antara 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “tinggi” bila indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau antara tahun 2015-2020 berfluktuasi dari sebesar 0,339 pada tahun 2015 menjadi 0,337 pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 kembali turun menjadi 0,334. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan meskipun sedang berada dalam kondisi Covid-19.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.8 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Per September Tahun 2016-2020

Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berada dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,334. Perkembangan Indeks Gini periode 2015-2020 sempat meningkat di tahun 2017 yaitu 0,359 namun kemudian menurun di tahun 2020 berada di bawah Indeks Gini nasional. Penurunan poin Indeks Gini mengindikasikan bahwa telah terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat ketimpangan secara nasional lebih besar dibandingkan tingkat ketimpangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara itu, jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi di tahun 2020 dan terendah berada di Kabupaten Lingga. Untuk tahun 2019 Indeks Gini tertinggi terjadi di Kota Batam dan Tahun 2018 terjadi di Kabupaten Karimun. Sementara itu, untuk yang terendah di tahun 2019 dan 2018 terjadi pada Kabupaten Lingga dan Kabupaten Anambas. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:



Tabel 2.33 Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per Maret 2018-2020

Wilayah Kepri	Gini Rasio		
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kepulauan Riau	0,33	0,34	0,34
Tanjungpinang	0,32	0,31	0,35
Bintan	0,33	0,30	0,31
Batam	0,31	0,33	0,32
Karimun	0,35	0,30	0,32
Lingga	0,29	0,28	0,28
Natuna	0,33	0,30	0,34
Kep. Anambas	0,29	0,28	0,30

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

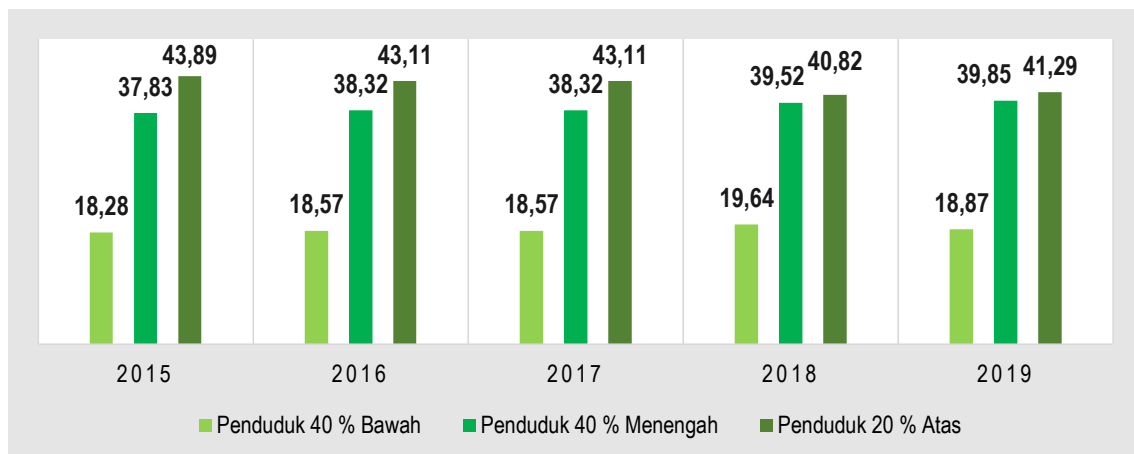
Selain Indeks Gini, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah Pendekatan Bank Dunia dengan cara mengelompokkan persentase pengeluaran pada kelompok penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan, yaitu 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Pengkategorian proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk sebagai berikut:

- Ketimpangan pendapatan tinggi (kurang dari 12 persen).
- Ketimpangan pendapatan sedang/menengah (12-17 persen).
- Ketimpangan pendapatan rendah (lebih dari 17 persen).

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia maka diketahui ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah selama lima tahun (2015-2019) menunjukkan dalam kategori ketimpangan rendah. Meskipun persentase pengeluaran penduduk 40 persen terbawah sempat naik sebesar 19,64 pada tahun 2018, namun tahun 2019 turun menjadi 18,87.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



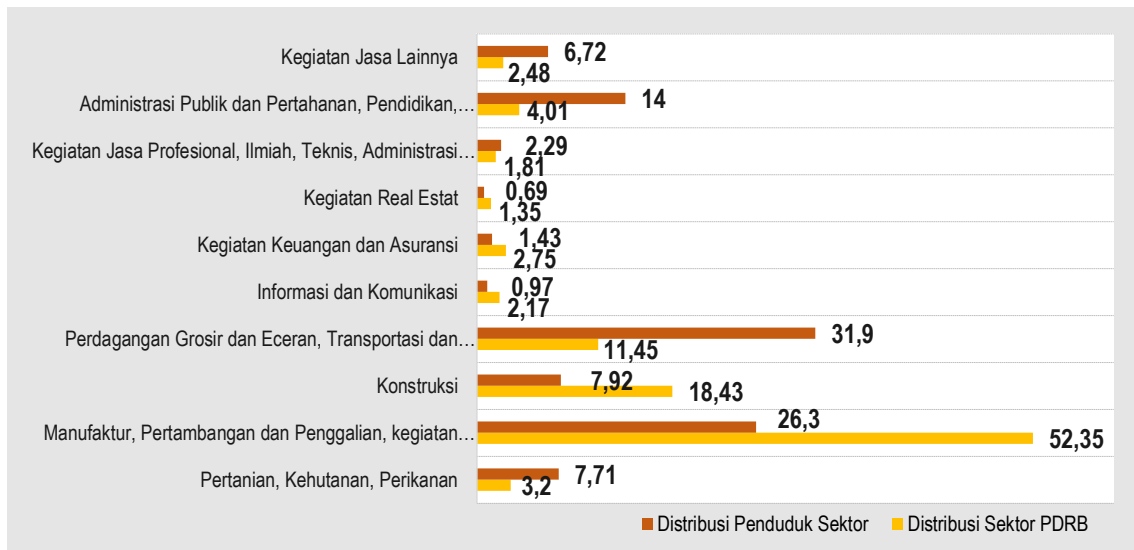
Sumber: BPS, 2020; diolah.

Gambar 2.9 Ketimpangan Pendapatan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Bank Dunia

Aspek lain yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah membandingkan kontribusi sektor dan penduduk yang terlibat dalam sektor bersangkutan. Sebagai salah satu kawasan industri nasional, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan sangat bercorak industri (lihat penjelasan di atas). Namun demikian jika dilihat dari aspek penduduk yang terlibat, terlihat bahwa penduduk tersebar pada berbagai sektor ekonomi, utamanya sektor pertanian, industri manufaktur, pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan administrasi publik. Lebih jauh dapat dilihat bahwa proporsi kontribusi sektor dan proporsi penduduk cukup timpang. Sektor pertanian dengan kontribusi yang sangat kecil harus menghidupi penduduk yang cukup banyak, hal yang sama terjadi juga pada sektor perdagangan dan administrasi publik. Sementara itu pada sektor industri manufaktur, pertambangan dan penggalian serta konstruksi terjadi hal yang sebaliknya, dengan kontribusi yang besar hanya menghidupi relatif sedikit penduduk. Implikasi dari hal ini adalah bahwa kantong penduduk miskin akan berada pada sektor pertanian dan perdagangan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

Gambar 2.10 Kontribusi Sektor dan Penduduk yang Bekerja Berdasar Sektor Tahun 2019

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

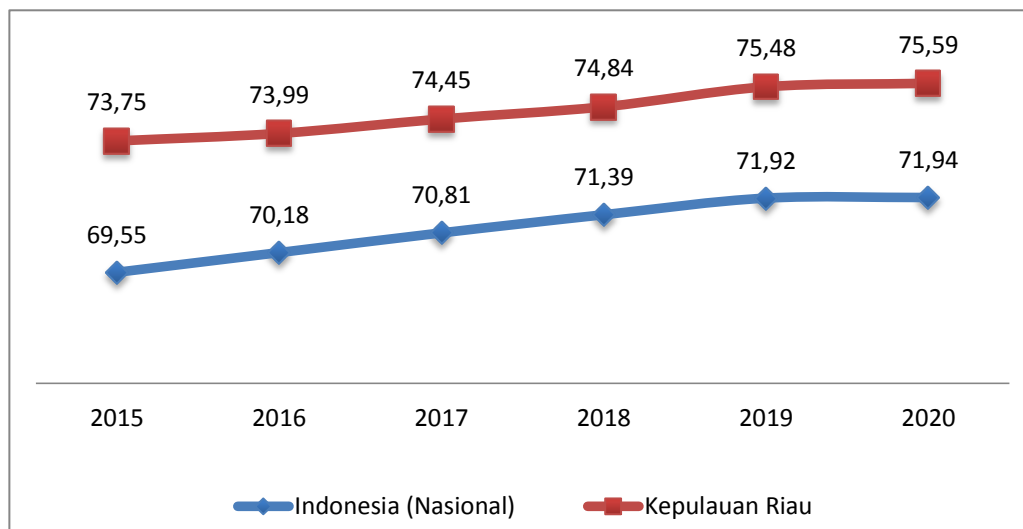
1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Secara umum, dalam rentang waktu enam tahun terakhir (2015-2020), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada grafik (Gambar 2.11). Berdasarkan grafik ini, perkembangan tiap tahunnya menunjukkan bahwa IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibanding IPM Nasional.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

**Gambar 2.11 Perbandingan Perkembangan IPM Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020**

Tabel 2.34 menunjukkan bahwa rata-rata IPM dalam enam tahun terakhir yang diperoleh/dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni 74,68, lebih tinggi daripada capaian rata-rata IPM secara nasional, yakni 70,97. Artinya, IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih baik karena di atas rata-rata capaian IPM secara nasional. Meskipun demikian, dari rata-rata capaian IPM diketahui pula bahwa ada perbedaan capaian IPM antar-kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 2.34 IPM Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota
Tahun 2015-2020**

Wilayah/Negara	Tahun						Rerata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
Indonesia (Nasional)	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	70,97
Provinsi Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	74,68
Kota Tanjungpinang	77,57	77,77	78,00	78,33	78,73	78,91	78,22
Kabupaten Bintan	71,92	72,38	72,91	73,41	73,98	74,13	73,12



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Wilayah/Negara	Tahun						Rerata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
Kota Batam	79,34	79,79	80,26	80,54	81,09	81,11	80,36
Kabupaten Karimun	69,21	69,84	70,26	70,56	71,10	71,44	70,40
Kabupaten Lingga	61,28	62,44	63,45	64,06	64,98	65,29	68,58
Kabupaten Natuna	70,87	71,23	71,52	72,10	72,63	72,72	71,85
Kabupaten Kepulauan Anambas	65,86	66,30	67,06	67,53	68,48	68,80	66,84

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021; diolah

Peringkat IPM Provinsi Kepulauan Riau berada pada peringkat ke-4 seluruh Indonesia. Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan provinsi lain di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera Tahun 2016-2020

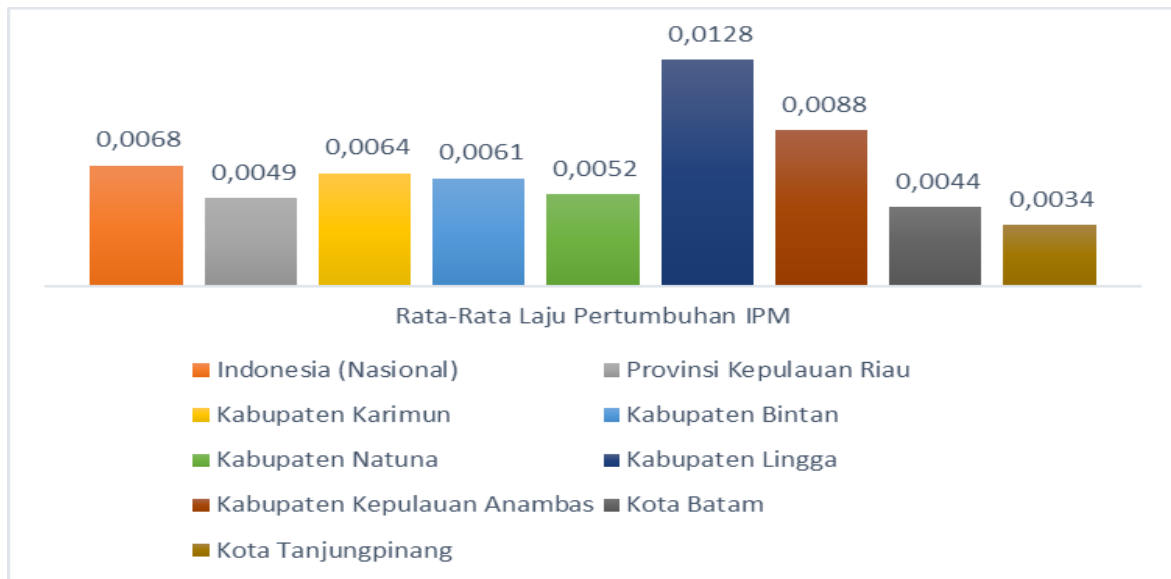
No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	69,45	70,00	70,6	71,19	71,9	71,99
2	Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77
3	Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
4	Riau	70,84	71,20	71,79	72,44	73	72,71
5	Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29
6	Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01
7	Bengkulu	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40
8	Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,3	71,47
10	Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59
	Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber: Badan Statistik Indonesia, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Meskipun IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi dibandingkan Nasional, namun laju pertumbuhannya lebih lambat dibanding dengan laju pertumbuhan IPM Nasional. Hal ini kemungkinan karena laju pertumbuhan IPM kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau tidak merata (lihat Gambar 2.12).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021; diolah

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Laju pertumbuhan IPM Kabupaten Lingga menunjukkan laju pertumbuhan paling tinggi dan Kabupaten Kepulauan Anambas tertinggi kedua dengan angka di atas Nasional dan Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2020. Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Natuna memiliki rata-rata laju pertumbuhan IPM yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kepulauan Riau akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan IPM nasional. Sementara itu, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang memiliki rata-rata laju pertumbuhan IPM dibawah Provinsi Kepulauan Riau

Dengan demikian, kemajuan pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi. Variasi tersebut tentunya disebabkan oleh faktor sumber daya (alam dan manusia) dan kebijakan pemerintah daerah yang berbeda. Capaian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pembangunan manusia yang tercermin dari angka IPM perlu terus ditingkatkan dan diawasi agar pembangunan manusia dapat terlaksana dengan baik dan merata. Kota Batam menempati peringkat pertama se-Provinsi Kepulauan Riau, sedangkan Kabupaten Lingga menempati peringkat terbawah. Peringkat kedua sampai peringkat keenam berturut-turut diduduki oleh Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas. Sehingga, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditingkatkan baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Perbandingan capaian setiap unsur IPM ketujuh kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.36.

**Tabel 2.36 Perkembangan Unsur Pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No.	Kabupaten/Kota	AHH (tahun)	EYS (tahun)	MYS (tahun)	Pengeluaran (ribu rupiah)	IPM
1	Kota Tanjungpinang	72,10	14,12	10,25	15.498	78,91
2	Kabupaten Bintan	70,38	13,10	8,44	14.482	74,13
3	Kota Batam	73,33	13,16	11,14	18.095	81,11
4	Kabupaten Karimun	70,91	12,42	8,17	11.885	71,44
5	Kabupaten Lingga	62,06	12,45	6,67	11.998	65,29
6	Kabupaten Natuna	65,06	13,90	8,73	14.705	72,72
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	67,21	12,81	7,17	11.875	68,80
Provinsi Kepulauan Riau		69,96	12,87	10,12	14.209	75,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Perkembangan masing-masing komponen dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.37. Rata-rata pencapaian masing-masing komponen IPM dalam lima tahun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

secara berurutan adalah Angka Harapan Hidup sebesar 69,62 tahun, Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,84 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 12,77 tahun, dan Pengeluaran Perkapita sebesar 13,626.

Tabel 2.37 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Komponen	Tahun						Rata-Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
1	Angka							
	Harapan	69,41	69,45	69,48	69,64	69,80	69,96	69,62
	Hidup							
2	Rata-Rata							
	Lama	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	9,84
	Sekolah							
3	Angka							
	Harapan							
	Lama	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,77
	Sekolah							
4	Pengeluaran							
	Perkapita	13.177,00	13.359,00	13.566,00	13.976,00	14.466,00	14.209,00	13.626,00
	(Rp ribu)							
	IPM	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	74,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Masing-masing komponen IPM akan diuraikan sebagai berikut:

Usia Harapan Hidup (UHH)

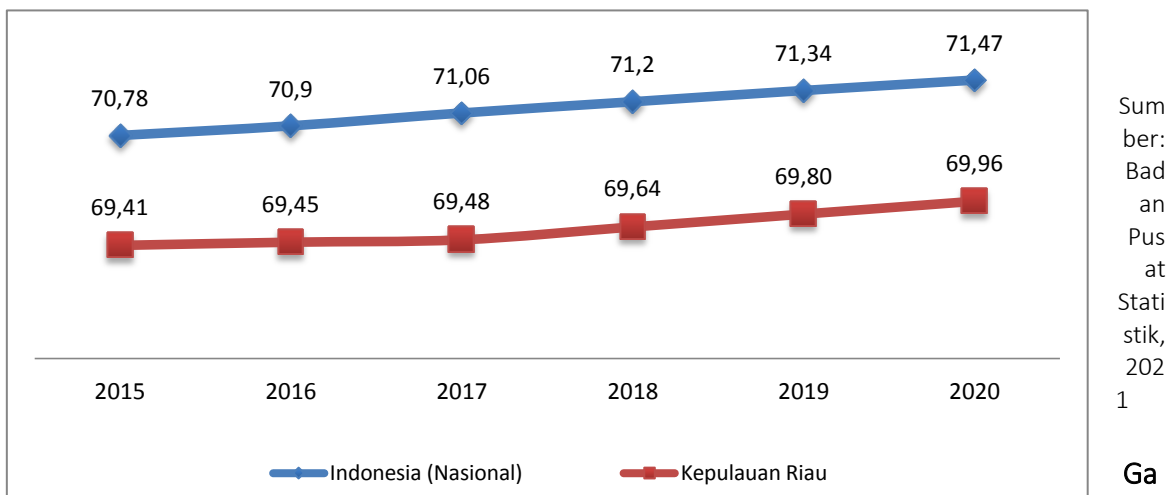
Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

langsung, peningkatan umur harapan hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

UHH penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,78 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,47. Sementara itu, selama enam tahun terakhir menunjukkan bahwa nilai UHH Provinsi Kepulauan Riau berada di bawah level nasional meskipun nilai UHH Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.13 berikut.



Gambar 2.13 Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang (BPS, 2020). HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota tahun 2015-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.38.

Berdasarkan data pada Tabel 2.36, dalam enam tahun terakhir (2015-2020), angka Harapan Lama Sekolah yang ditunjukkan nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Harapan Lama Sekolah menjadi indikasi positif dalam sektor pendidikan, sebab semakin lama seseorang mengenyam sekolah,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

artinya semakin tinggi jenjang pendidikan yang dilaluinya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari data ini, angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah daripada angka Harapan Lama Sekolah secara nasional. Dari tahun 2015-2020, rata-rata angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,77. Angka tersebut lebih rendah bila dibanding Rata-Rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 12,83. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan baik karena masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional. Secara sederhana, perbandingan perkembangan Lama Harapan Sekolah antara nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.14.

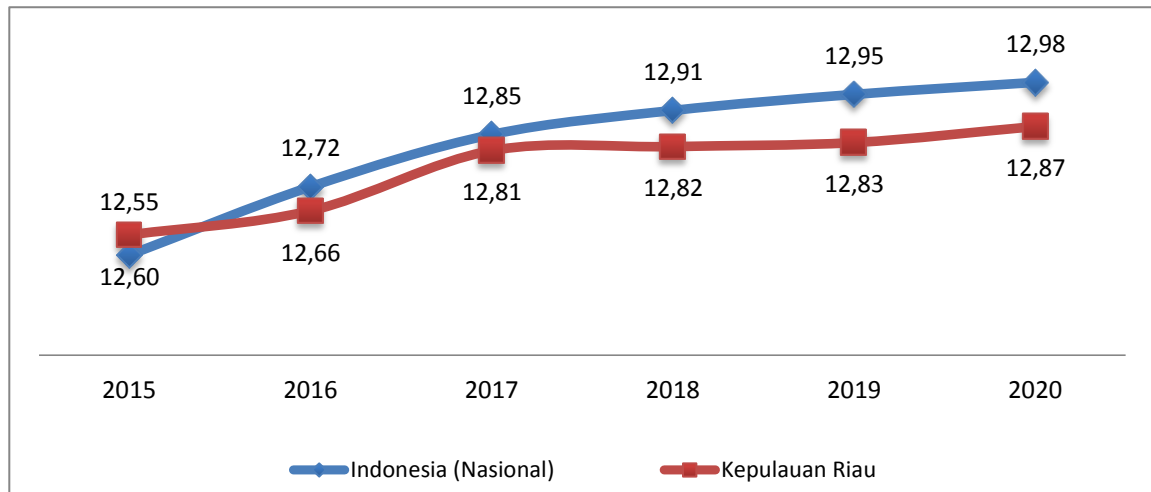
**Tabel 2.38 Harapan Lama Sekolah (HLS) Nasional, Provinsi Kepulauan Riau, dan
Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020**

Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015- 2020
Indonesia (Nasional)	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	12,83
Provinsi Kepulauan Riau	12,60	12,66	12,81	12,82	12,83	12,87	12,77
Kota Tanjungpinang	14,05	14,06	14,07	14,08	14,09	14,12	14,08
Kabupaten Bintan	11,98	12,27	12,60	12,75	12,95	13,10	12,61
Kota Batam	12,65	12,67	12,94	12,95	13,15	13,16	12,92
Kabupaten Karimun	11,87	12,14	12,15	12,16	12,30	12,42	12,17
Kabupaten Lingga	11,78	12,06	12,42	12,43	12,44	12,45	12,27
Kabupaten Natuna	13,85	13,86	13,87	13,88	13,89	13,90	13,88
Kabupaten Kepulauan Anambas	11,63	11,87	12,14	12,32	12,75	12,81	12,25



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.14 Perbandingan Perkembangan Lama Harapan Sekolah antara Nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Laju pertumbuhan Lama Harapan Sekolah antara nasional dengan Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kotanya tahun 2015-2020 menunjukkan peningkatan (positif) dari tahun 2015-2020. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan baik karena skor nilai yang diperoleh setiap tahunnya masih di bawah rata-rata angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, meski pada tahun 2015 angka Harapan Lama Sekolah lebih tinggi daripada tingkat nasional.

Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah (BPS, 2020). Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa



memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak (BPS, 2020). Manfaat dari evaluasi Rata-rata Lama Sekolah, yaitu (1) untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun, dan seterusnya; dan (2) untuk perencanaan dan evaluasi capaian Program Wajib Belajar (BPS, 2020). Rata-rata Lama Sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah (BPS, 2020). Rata-rata Lama Sekolah tingkat nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota tahun 2015-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.39.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dalam enam tahun terakhir (2015-2020), Rata-rata Lama Sekolah yang ditunjukkan nasional maupun Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya. Artinya bahwa perkembangan Rata-rata Lama Sekolah semakin baik kualitasnya dari tahun ke tahun. Sebab, semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk akan linier dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah, dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kurun waktu enam tahun (2015-2020), rata-rata pertumbuhan Provinsi Kepulauan Riau mencapai 9,84 untuk Rata-rata Lama Sekolah. Rata-rata pertumbuhan lama sekolah tersebut lebih tinggi daripada capaian rata-rata pertumbuhan yang diperoleh secara nasional, yakni 8.15.

Tabel 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota Tahun 2015-2020

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
Indonesia (Nasional)	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,15
Provinsi Kepulauan Riau	9,65	9,67	9,79	9,81	9,99	10,12	9,84



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun						Rata-rata
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015-2020
Kota Tanjungpinang	9,95	9,96	9,97	9,98	9,99	10,25	10,02
Kabupaten Bintan	8,32	8,33	8,34	8,35	8,36	8,44	8,36
Kota Batam	10,81	11,10	11,11	11,12	11,13	11,14	11,07
Kabupaten Karimun	7,74	7,75	7,80	7,81	7,92	8,17	7,87
Kabupaten Lingga	5,54	5,85	5,97	6,27	6,51	6,67	6,14
Kabupaten Natuna	8,45	8,46	8,47	8,71	8,72	8,73	8,59
Kabupaten Kepulauan Anambas	6,62	6,63	6,69	6,70	6,91	7,17	6,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli)

Pengeluaran riil perkapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran riil perkapita Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar Rp 14.209.000, dengan angka tertinggi dicapai Kota Batam sebesar Rp 18.095.000, dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas Rp 11.875.000.

2. Penduduk Miskin

Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi di antaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. pendapatan perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Sementara, jumlah penduduk miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Khusus untuk pendapatan perkapita tidak akan diulas mendalam pada bagian ini karena akan diulas Bidang Ekonomi. Pada bagian ini berfokus pada penduduk miskin.

Kemiskinan sudah menjadi permasalahan dan isu global. Dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun pada tahun 2030.

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan-makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, 2018). Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2020 jika dibanding tahun 2019 (Tabel 2.40). Meski demikian, secara umum, tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentasenya.

Tabel 2.40 Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau September 2015-2020

Profil Kemiskinan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk Miskin	114.830	119.140	128.430	125.360	127.760	142.610
Persentase Penduduk Miskin (persen)	5,78	5.84	6.13	5,83	5,80	6,13
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	480.812	502.653	536.027	567.972	602.038	617.532
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (persen)	0,86	0,71	1,18	0,591	0,90	1,21
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (persen)	0,23	0,15	0,31	0,11	0,18	0,42

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Data BPS tentang Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa berdasarkan tempat tinggal, pada periode Maret 2018 - September 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 22.085 orang sedangkan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

daerah perdesaan berkurang sebanyak 11.690 orang (Tabel 2.41). Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 5,45 persen menjadi 5,69 persen. Sedangkan di perdesaan naik dari sebesar 10,77 persen menjadi 11,25 persen.

Tabel 2.41 Profil Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau

Periode	Perkotaan		Perdesaan	
	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
Maret 2018	99.195	5,45	32.480	10,77
September 2018	98.459	5,15	26.903	11,26
Maret 2019	104.207	5,33	24.254	11,04
September 2019	104,230	5,26	23,520	10,67
Maret 2020	108,860	5,42	23,110	10,43
September 2020	121,820	5,69	20,790	11,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 2.42 Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau per
Maret 2017 - 2020**

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	125,37	131,68	128,46	131,97
Tanjungpinang	19,19	19,30	19,05	19,98
Bintan	9,37	10,42	10,14	10,21
Batam	61,16	67,41	66,21	67,06
Karimun	16,94	15,93	15,36	15,99



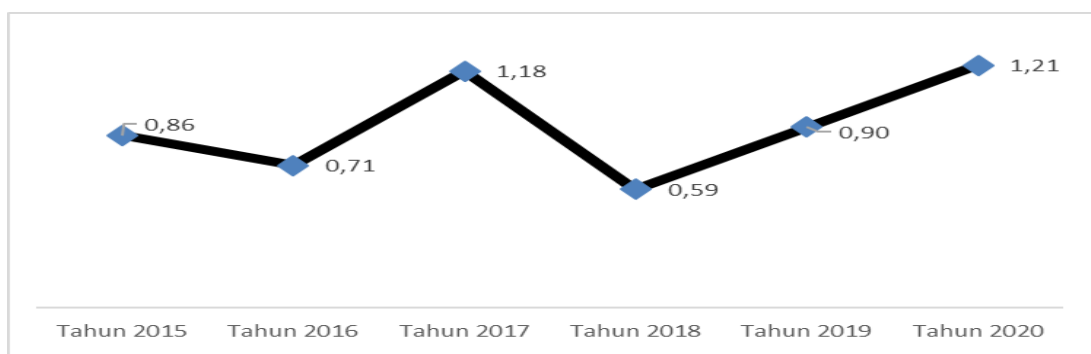
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)			
	2017	2018	2019	2020
Lingga	12,35	12,13	11,56	12,45
Natuna	3,53	3,60	3,43	3,47
Kepulauan Anambas	2,84	2,90	2,72	2,80

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap Garis Kemiskinan (P1) terukur sebesar 0,86. Pada tahun 2016 kondisi membaik sebesar 0,71 dan tren terus menurun pada tahun 2017 dengan nilai P1 sebesar 1,18. Namun, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan tren meningkat pada tahun 2018 adalah 0,59 dan 2019 sebesar 0,90. Namun demikian, di September tahun 2020 indeks ini mengalami penurunan dalam yang mencapai 1,21. Hal ini disebabkan dampak dari Covid-19 yang ikut mempengaruhi penurunan dari indeks ini. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut.



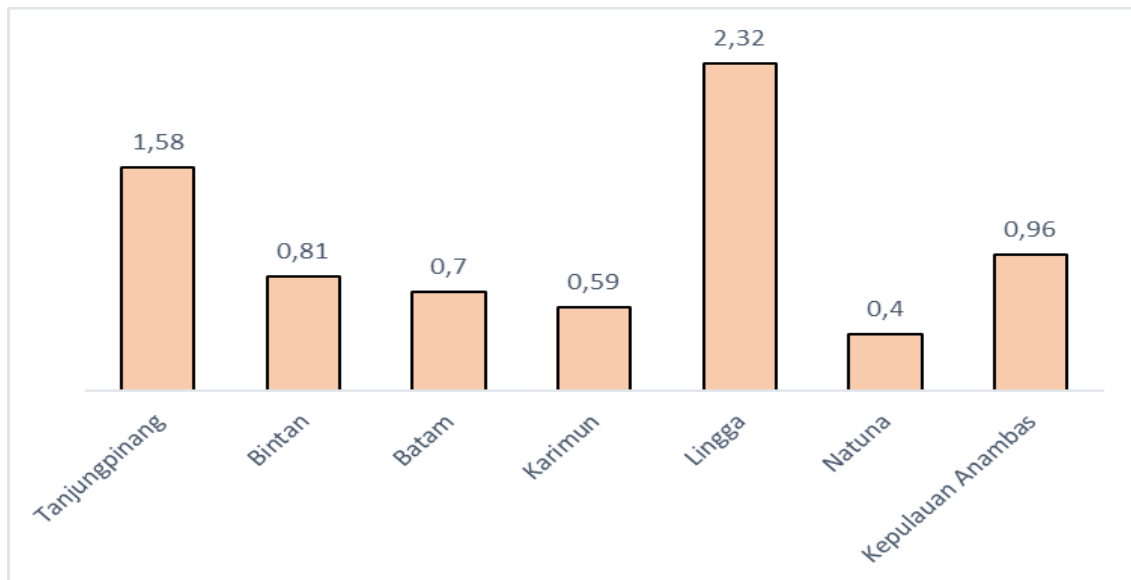
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Sementara itu, jika melihat Indeks Kedalaman Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.16 berikut:



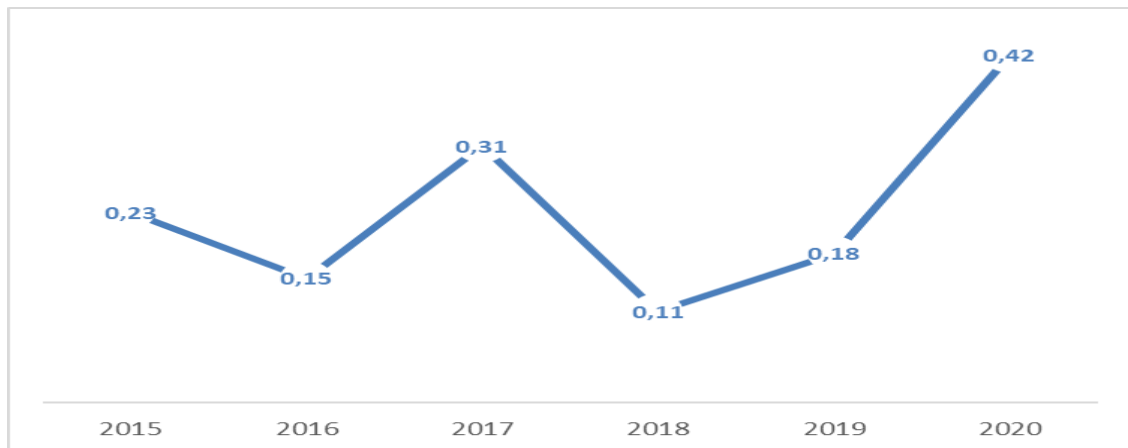
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P1) (%)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sebesar 0,23. Pada tahun 2016 ketimpangan pengeluaran antar penduduk semakin menyempit dengan nilai sebesar 0,15. Pada tahun 2017 angka keparahan kemiskinan meningkat sebesar 0,31, tahun 2018 kembali menurun menjadi 0,11, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar 0,18. Pada September tahun 2020, indeks ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi yang mencapai 0,42 (Gambar 2.17).



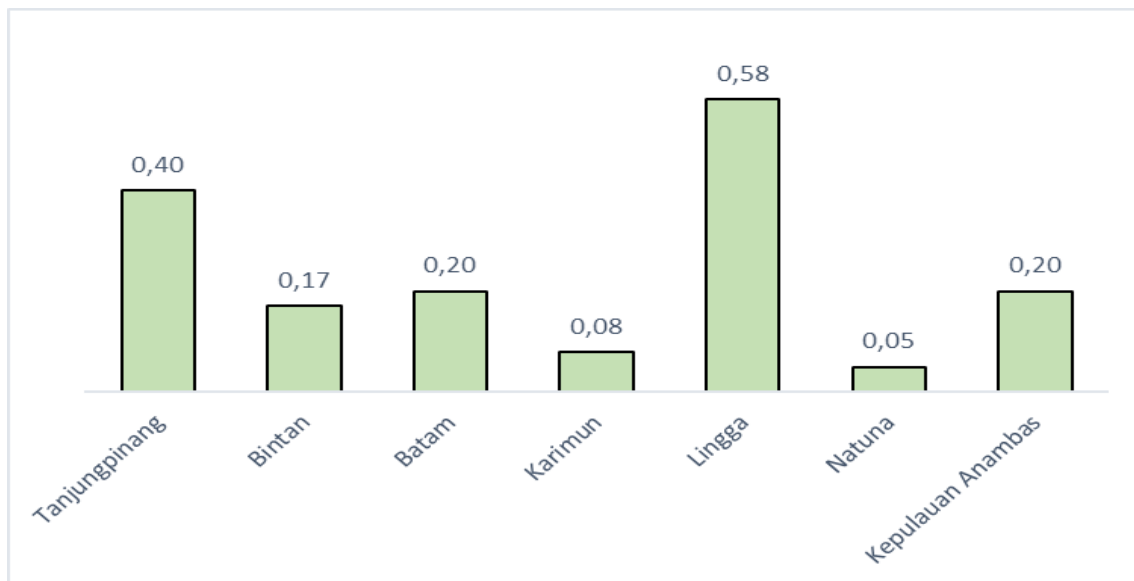
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.17 Indeks Keparahen Kemiskinan (P2) (%)

Sementara itu, jika melihat Indeks Keparahen Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kabupaten Lingga memiliki nilai indeks tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.18 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 2.18 Indeks Keparahen Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau (P2) (%)

Garis Kemiskinan (GK)

Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK.

Garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Garis kemiskinan yang digunakan sebagai dasar penghitungan jumlah penduduk miskin menunjukkan peningkatan sebesar 31,6 persen, yaitu dari Rp 480.812,- perkapita per bulan pada tahun 2015 menjadi Rp 617.532,- perkapita per bulan di bulan September tahun 2020. Kenaikan Garis Kemiskinan antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan harga (inflasi) komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan perubahan komoditas barang atau jasa yang dikonsumsi.

Dengan memperhatikan komponen GK, yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas non makanan. Berdasarkan kontribusinya, terdapat lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan, yaitu: beras, rokok kretek, telur ayam ras, kue basah, dan tongkol/tuna/cakalang. Sedangkan komoditi non makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan, yaitu perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi (Tabel 2.43).

Tabel 2.43 Lima Jenis Komoditi Berkontribusi Terbesar Pada Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah pada Tahun 2020

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Makanan		Makanan	
Beras	12,70	Beras	17,95
Rokok Kretek	14,05	Rokok Kretek	17,77
Daging ayam ras	3,39	Kue basah	3,16
Telur ayam ras	3,21	Gula pasir	3,64
Kue basah	2,27	Telur ayam ras	3,41

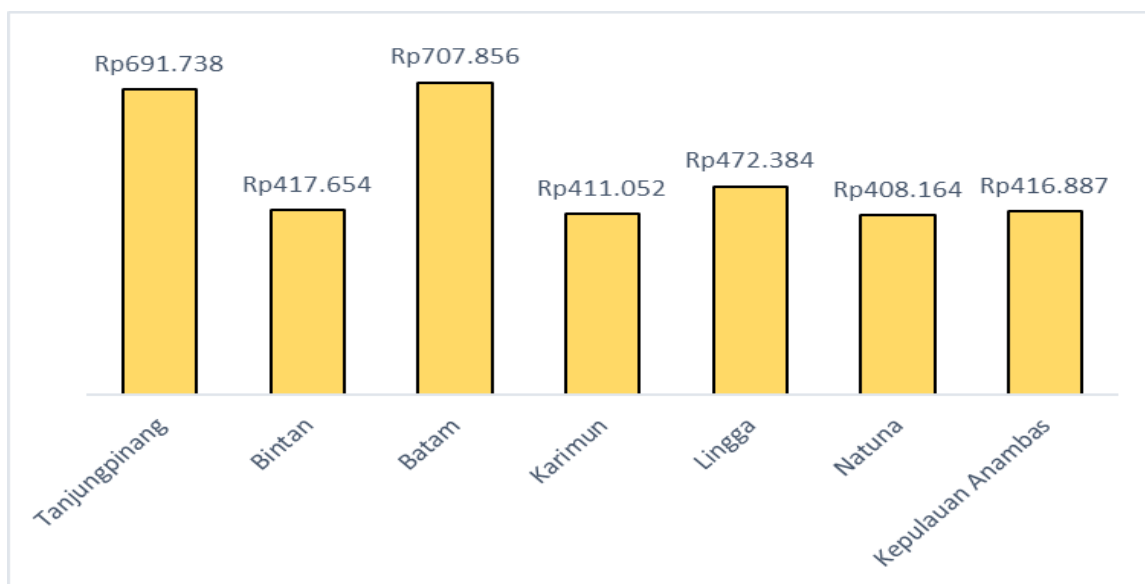


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
Perumahan	10,04	Perumahan	8,51
Listrik	5,37	Bensin	2,31
Bensin	4,00	Listrik	3,38
Pendidikan	2,32	Perlengkapan mandi	1,05
Perlengkapan mandi	1,37	Pendidikan	2,31

Sumber: Badan Perencanaan dan Litbang Provinsi Kepulauan Riau Tahun, 2021.

Sementara itu, jika melihat Garis Kemiskinan per Maret 2020 untuk masing-masing kabupaten/kota maka Kota Batam menjadi yang tertinggi dan yang terendah di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.19 berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Gambar 2.19 Garis Kemiskinan Per Maret 2020 untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan, maka upaya pengentasan kemiskinan terus dilakukan di Provinsi Kepulauan Riau. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin.



2.2.3 Fokus Seni, Budaya, dan Olahraga

Kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap pelestarian pelestarian kesenian, budaya, serta olahraga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan merupakan penanda jati diri yang menjadi kekhasan dan karakter suatu daerah. Kekayaan budaya seharusnya dikelola dengan baik agar menjadi penggerak dan modal pembangunan manusia.

1. Fokus Seni dan Budaya

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan salah satu faktor pendukung upaya pembangunan manusia. Oleh karena itu, indikator tersebut menjadi penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat termasuk di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengembangan seni dan budaya di Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dalam beberapa hal yaitu dengan pelestarian kesenian sesuai dengan tradisi lokal pada sanggar kesenian. Persentase sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dengan target capaian pada tahun 2021 sebesar 72,03 persen, pada tahun 2020 sudah mencapai 78,48 persen. Data sanggar seni yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 323 sanggar dan pada tahun 2017 setelah diverifikasi ulang ada sanggar seni yang tidak aktif lagi sebanyak 114 sehingga menjadi 209 hingga tahun 2020. Meskipun jumlah sanggar tetap, namun sanggar yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal setiap tahun bertambah, penambahan signifikan pada tahun 2019 sebesar 136 sanggar.

Tabel 2.44 Perkembangan Jumlah Sanggar Seni dan Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Sanggar	Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal
2016	323	10
2017	206	13
2018	207	27
2019	208	136



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tahun	Jumlah Sanggar	Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal
2020	209	164

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dengan demikian, grup kesenian per 10.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 0,92 grup. Indikator grup kesenian ini menurun jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 0,94 grup. Sementara, gedung kesenian dari tahun 2016-2020 tidak ada unit gedung kesenian yang dibangun. Pemerintah daerah belum memiliki gedung kesenian khusus yang representatif untuk pengembangan kesenian.

Tabel 2.45 Indikator Fokus Seni dan Budaya Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Penduduk	1,02	0,99	0,96	0,94	0,92
Jumlah Gedung Kesenian per 10.000 Penduduk	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi hal yang penting dilakukan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembinaan kepemudaan melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan, pengembangan prestasi kepemudaan, pelatihan kewirausahaan kepada pemuda dan kegiatan lain yang dapat mendorong partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat akan mendorong tumbuhnya klub-klub olahraga. Keberadaan klub ini dapat menjadi cikal bakal tumbuhnya prestasi olahraga secara lokal maupun nasional. Munculnya klub olahraga di Provinsi Kepulauan Riau baru dimulai tahun 2020 sebesar 0,09. Sementara, belum ada gedung olahraga yang dibangun (lihat Tabel 2.46). Padahal, pengembangan prestasi olahraga yang didukung oleh pemerintah dengan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

penyediaan sarana dan prasarana dan pembinaan terhadap klub olahraga salah satu Sarpras yang dibangun adalah gedung olahraga yang dapat digunakan oleh masyarakat dan klub olahraga dalam Latihan rutin untuk mendukung tumbuhnya bibit-bibit atlet daerah.

Tabel 2.46 Indikator Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

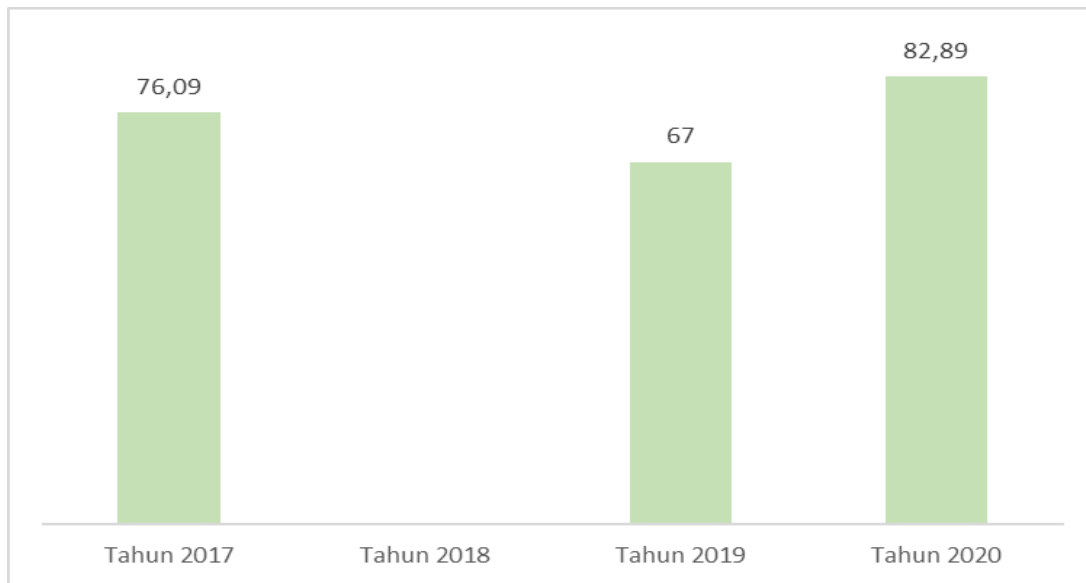
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Klub Olahraga per 10.000 Penduduk	-	-	-	0,09	0,09
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat sehingga pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Beberapa faktor strategis pendukung perwujudan pemerintah yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum dan kesetaraan. Faktor-faktor tersebut menjadi hal penting dalam menciptakan iklim birokrasi yang sehat.

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Sumber: LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Gambar 2.20 IKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Berdasarkan LKPJ Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 terlihat adanya tren peningkatan angka Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun 2017-2020. Meskipun pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian dan di tahun 2019 nilai IKM baru mencapai angka 67,00 namun di tahun 2020 nilai IKM menjadi yang tertinggi selama 4 tahun terakhir dengan nilai 82,89.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan berikut ini.

1. Urusan Pendidikan

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan

Dasar hukum SPM Bidang Urusan Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Target pencapaian SPM pada Dinas



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum ditetapkan, karena belum adanya penganggaran khusus terkait penerapan SPM, namun merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 maka target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Namun demikian, pada tahun 2020 realisasi pencapaian kedua indikator SPM belum mampu memenuhi target tersebut. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK	100%	84,62%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	100%	82,48%

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan masih belum dilakukan secara optimal. Dimana dari dua indikator tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Permendagri No 100 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2026 belum mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, sehingga penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum dapat termuat dalam Dokumen Perencanaan baik RENSTRA maupun RKPd Tahun 2020, walaupun sebenarnya sebagian besar kegiatan yang ada sudah berkesesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal. Selain itu, Belum adanya Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.



Capaian Kinerja Bidang Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan pendidikan menengah; pengelolaan pendidikan khusus; penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi; penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas-daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan melalui indikator-indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2020). APK dapat menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. APK menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk



menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang terlambat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya (BPS, 2020).

Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Negeri dan Swasta

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu SMA sederajat. Nilai APM maksimal adalah 100 persen. APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020).

Secara rinci Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.48.

**Tabel 2.48 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar dan Murni di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APK						
	SMA/SMK/MA/Paket C	82,23	85,17	87,11	92,12	94,92	96,02
	Sekolah Luar Biasa (SLB)	n/a	n/a	70,12	72,00	72,00	82,49



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	APM						
	SMA/SMK/MA/Paket C	71,58	74,59	75,87	77,3	76,7	77,20

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Dari total penduduk usia sekolah (16 – 18 tahun) di Kepulauan Riau yang berjumlah sekitar 89.440 anak, Berdasarkan data Tahun 2020 Anak Tidak Sekolah di Kepulauan Riau Mencapai 15,38% atau 13,756 anak ada beberapa penyebab Anak Tidak Sekolah : Belum mendapatkan akses layanan pendidikan (Letak Sekolah Lanjutan Jauh dari Tempat Tinggal dan Tidak ada Transportasi), Anak tersebut bekerja atau menjadi pekerja Anak, Anak Penyandang Disabilitas atau anak yang sedang berurusan dengan Hukum.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Sekolah Negeri dan Swasta

Sementara itu, data Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung mengalami fluktuasi meskipun secara keseluruhan di tahun 2020 nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini juga berlaku sama dengan nilai APS SMA/MA/SMK untuk tahun 2020 dimana nilainya menjadi yang tertinggi selama 6 tahun terakhir.

**Tabel 2.49 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APS SD/MI	99,34	99,33	99,32	99,52	99,34	99,55
2.	APS SMP/MTs	98,67	98,78	99,08	99,20	98,50	98,82
3.	APS SMA/MA/SMK	81,84	81,79	82,80	83,78	82,87	84,62

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021. *Rasio Murid Terhadap Gedung Sekolah*

Rasio murid terhadap jumlah gedung sekolah di Provinsi Kepulauan Riau dari berfluktuasi setiap tahunnya (lihat Tabel 2.50).



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.50 Rasio Murid Terhadap Jumlah Gedung Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio murid per gedung sekolah SD/MI						
	Sekolah Dasar	1 : 244	1 : 245	1 : 246	1 : 244	1 : 241	1 : 229
	Madrasah Ibtidaiyah	n/a	1 : 193	1 : 202	1 : 195	1 : 199	...
2.	Rasio murid per gedung sekolah SMP/MTs						
	SMP	1 : 242	1 : 245	1 : 256	1 : 249	1 : 244	1 : 238
	MTs	n/a	1 : 159	1 : 146	1 : 12	1 : 13	...
3.	Rasio murid per gedung sekolah SMA/SMK/MA						
	SMA/ SMK	1 : 281	1 : 428	1 : 304	1 : 307	1 : 318	1 : 308
	MA	n/a	1 : 103	1 : 118	1 : 99	1 : 118	1 : 136

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tujuan pendidikan menghasilkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan jaman. Guru merupakan bagian penting dalam pendidikan, sehingga perannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kualitas pendidikan. Sebagai pelaksana pendidikan, guru harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dan kompetensi akademik agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Capaian indikator terkait tenaga kependidikan dan mutu pendidikan yang juga menjadi kunci utama dalam keberhasilan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.51.

**Tabel 2.51 Indikator Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2015-2020**

No	Indikator Kinerja Kunci	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kualifikasi Guru						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Kunci	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase Guru SMA/SMK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	80	84	89,27	95,99	96,11	95,63
2.	Kompetensi Guru						
	Persentase Guru yang sudah sertifikasi	n/a	31	35	38,69	37,00	39,09
	Persentase Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	n/a	58	62	65,30	62,00	65,54

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Untuk indikator pertama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1) dan Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, persentase guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Kepulauan Riau dengan kualifikasi S1/D4 terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 95,63 persen guru sekolah menengah memiliki ijazah S1 sederajat.

Untuk indikator kedua yaitu kompetensi guru, persentase guru yang sudah sertifikasi setiap tahun memang meningkat, namun peningkatannya sangat kecil. Hal ini dikarenakan hanya sedikit guru yang bisa dilatih untuk mengikuti TPG setiap tahunnya karena program ini dari pusat dan sudah dialokasikan kuotanya untuk masing-masing kabupaten/kota. Tahun 2020 baru sekitar 39,09 persen guru SMA/SMK/SLB yang sudah sertifikasi. Sedangkan, untuk persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan juga telah mengalami fluktuasi dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2016 ada 58 persen, meningkat menjadi 65,30 persen pada tahun 2018, kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 62,00 persen dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 65,54 persen.

1. *Rasio Guru dengan Murid dengan sekolah SMA/SMK/MA*

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

SMA/ SMK/MA	562,99,	497,9	810,79	793,86	743,58	703,31
2. Rasio Guru dengan sekolah SMA/SMK/MA						
TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SMA/ SMK/MA	25,334,6	19,8	22,64	22,27	21,43	20,07

Peningkatan Mutu Pendidikan

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari sisi kompetensi lulusan baik SMA maupun SMK. Kompetensi lulusan SMA/MA diukur dari persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi. Kompetensi lulusan SMK diukur dari persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha dan persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non akademik (minat, bakat, prestasi). Kompetensi lulusan SMA/SMK di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52 Indikator Kompetensi Lulusan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lulusan SMA						
	Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di PT	n/a	15	35,42	43	56,30	58,50
2.	Lulusan SMK						
	Persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha	n/a	15	50	50	56,87	60,10
	Persentase peserta didik yang memiliki kompetensi non-akademik (minat, bakat dan prestasi)	n/a	30	44.44	42,00	8,27	24,28

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Lulusan SMA yang diterima di PT meningkat setiap tahunnya, mulai tahun 2016 diterima sebanyak 15 persen dari siswa yang tamat, kemudian meningkat menjadi 58,50 persen pada tahun 2020. Peningkatan kompetensi lulusan juga pada lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha. Tahun 2016 meskipun baru mencapai 15 persen



namun meningkat jauh pada tahun 2017 yaitu sebesar 50 persen dan di tahun 2020 mencapai 60,1 persen. Meski demikian, kompetensi lulusan SMK masih perlu ditingkatkan lagi supaya lulusan SMK ini dapat lebih diterima lagi di dunia industri atau dapat berwirausaha.

Berdasarkan Data Tahun 2020 Jumlah Siswa SMK yang tidak diterima di DU/DI Dunia Usaha/Dunia Industri sebesar 39,91% atau 3,961 Siswa dari Total 9.925 Siswa Lulusan SMK, Di Tahun 2020 pandemi Covid 19 melanda Indonesia ini tentunya berpengaruh pada Perekonomian Indonesia, banyak perusahaan perusahaan besar maupun kecil yang terpaksa menutup usahanya, Kota Batam sebagai pusat perekonomian Kepulauan Riau pun ikut terdampak, tentunya hal ini berpengaruh pada lulusan PT maupun menengah untuk mencari pekerjaan

Sementara itu, untuk indikator persentase Peserta Didik yang memiliki Kompetensi non-Akademik (minat, bakat dan prestasi) cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018 meskipun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan jika dibandingkan untuk tahun 2019. Penurunan yang signifikan terjadi di tahun 2019 dimana ditargetkan 37% dan hanya terealisasi sebesar 8,27%. Hal ini disebabkan pada Tahun 2019 Dinas Pendidikan mengirimkan 145 peserta untuk mengikuti Lomba di tingkat Nasional untuk semua cabang lomba dari Jenjang SMA/SMK dan SLB, dari 145 peserta yang dikirim hanya 12 peserta yang mampu meraih peringkat 1,2 dan 3. Hal ini berdampak pada persentase kinerja yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2018 capaiannya sebesar 42,00 persen. Belum mampunya siswa SMA/SMK/SLB yang ada di Kepri bersaing dalam lomba tingkat nasional secara optimal disebabkan beberapa hal: di antaranya adalah Besarnya biaya pelatihan yang dibutuhkan oleh siswa dalam latihan praktek untuk persiapan lomba sehingga pelatihan yang disiapkan tidak maksimal hanya dilakukan beberapa hari menjelang hari perlombaan, kekurangan sarana prasarana dan tidak sesuai alat praktek yang dimiliki sekolah dengan alat praktek yang dimiliki tim pusat untuk perlombaan juga menjadi penyebab rendahnya motivasi siswa dalam mengikuti perlombaan.



Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

Di samping layanan yang dilakukan Dinas Pendidikan secara umum juga ada layanan yang dilakukan dengan tujuan mencapai kualitas layanan pendidikan berbasis teknologi informasi yang difokuskan pada Balai Teknologi Komunikasi dan Informasi yang dimiliki Dinas Pendidikan. Layanan berupa siaran televisi pendidikan dan pelatihan guru dan siswa yang berbasis teknologi informasi. Walaupun dalam pengembangan Baltekkomdik ini terkendala dengan dana, namun sumber daya di Balai Tekkomdik ini terus berusaha untuk memajukan kualitas pendidikan melalui jaringan telekomunikasi dan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator yang Baltekkomdik yang meningkat setiap tahun walaupun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 memang terjadi defisit besar-besaran sehingga capaian indikatornya menurun drastis dari 63,35% pada tahun 2017 menjadi 28,57% di tahun 2018, tahun 2019 mencapai 71,14% dan pada tahun 2020 menjadi 78%.

Tabel 2.53 Indikator Kualitas Layanan Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase SMA/SMK						
	yang memiliki sistem						
	informasi manajemen berbasis IT	40	50	63.35	28,57	71,14	78
2	Persentase						
	kabupaten/kota yang						
	sudah terlayani akses siaran TV Pendidikan	28,57	28.57	28.57	60	85	71,42

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

2. Urusan Kesehatan

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 25 indikator yang tersebar pada 7 program pembangunan dan juga pencapaian pada bidang SPM. Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Kesehatan adalah Peraturan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Pencapaian pada bidang SPM untuk tahun 2020 menunjukkan bahwa realisasi capaian telah mencapai 100% untuk dua jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diwajibkan bagi provinsi. Adapun Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan untuk Provinsi terdiri atas:

- pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi

Adapun realisasi capaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.54 Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar	Jumlah warganegara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat layanan kesehatan	100%	100%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi

biasa provinsi

sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau 2020

Sementara itu, realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan disajikan lebih lanjut pada Tabel 2.55 berikut.

Tabel 2.55 Capaian Sasaran Pembangunan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

NO	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Kesehatan Masyarakat						
-	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	120	131	130	98	92
-	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	35	18	15	13	11,1
-	Persentase kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	%	17,7	16,4	13	11,9	5,6
-	Cakupan kabupaten/kota sehat	%	43	57	71	100	100
2	Program Pencegahan dan pengendalian penyakit						
-	Prevalensi HIV	%	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,05
-	<i>Case Notification Rate</i> (CNR) Semua kasus TB	per 100.000 penduduk	171	181	177	316	164
-	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (<i>success rate</i>)	%	78,6	88	81	87,7	90,5
-	<i>Incidence rate</i> DBD	per 100.000 penduduk	102	38,2	56	91	76,15
-	API (<i>Annual Paracite Incidence</i>)	per 100.000 penduduk	0,37	0,2	0,14	0,1	0.09
-	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	88,7	94	91	96,9	89,6
-	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	22,4	27	27,4	28,2	26,28
3	Program Pelayanan Kesehatan						
-	Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	28,6	71,4	100	100	100
-	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	6,49	19,48	79,3	96,5	96,51
-	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan	%	63	71,49	82,58	86,1	89,65



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

NO	PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN				
			2016	2017	2018	2019	2020
	Nasional/KIS						
-	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	Mad ya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
-	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan						
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD						
-	Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	%	77.9	78	80.42	80.6	78,24
-	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjung Uban	%	71.7	76.5	80	85.5	81,5
5	Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan						
-	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	53	50	56.32	77	49,43
-	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	%	54.5	58	73.68	73.7	51,72
-	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	%	61	70.2	84.04	85.7	85,71
-	Persentaseee tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	0	26.7	53.33	93.3	100
6	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan						
-	Persentase Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	75.5	88.5	93.1	92	93,18
7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya						
-	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100
-	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi perlu mendapatkan perhatian pemangku kebijakan. AKB mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat. Angka ini digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi program serta kebijakan kependudukan dan kesehatan suatu negara di seluruh dunia. AKB adalah banyaknya kematian bayi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup (KH) di wilayah dan kurun waktu yang sama. Suatu kasus kematian bisa dikategorikan sebagai kematian bayi jika terjadi pada bayi usia 0-11 bulan (termasuk neonatal) tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera, atau bunuh diri.

Secara absolut, jumlah kematian bayi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 jumlah kematian bayi di Provinsi Kepulauan Riau terus menurun (lihat Gambar 2.21). Berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan dari pelayanan kesehatan diketahui AKB di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 ialah sebesar 5,5 per 1.000 kelahiran hidup. Angka ini bisa dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan data AKB hasil survei seperti data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2017 yaitu sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan data AKB Nasional berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 yaitu sebesar 22,23 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini dapat dimungkinkan oleh karena terdapat kasus kematian bayi yang belum atau tidak dilaporkan karena berbagai macam sebab antara lain faktor budaya etnis tertentu. Oleh karena itu dirasa perlu untuk menghitung estimasi AKB sebesar dua kali lipat dari AKB yang dilaporkan oleh pelayanan kesehatan dan ditetapkan AKB estimasi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 11 per 1.000 kelahiran hidup dengan perhitungan ($229 \text{ kematian bayi} / 41.292 \text{ kelahiran hidup} \text{ dikali konstanta } 1.000$).

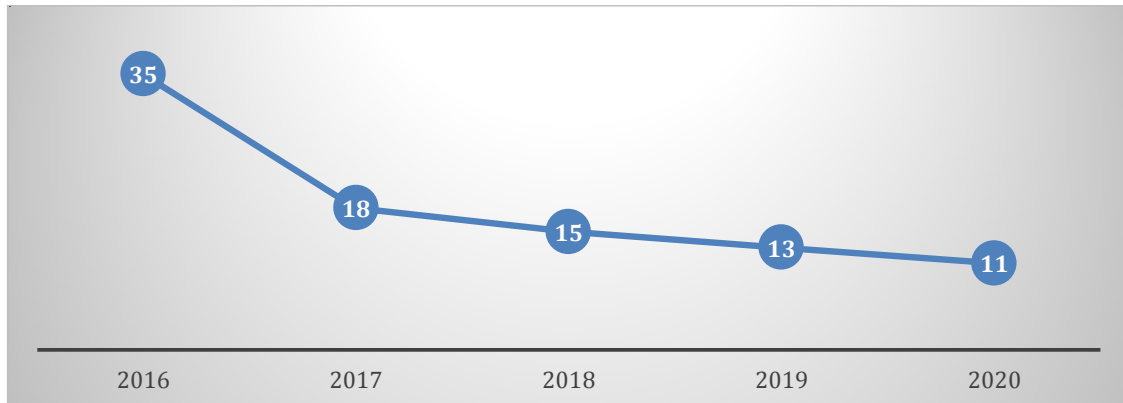
Jika dibandingkan dengan target AKB Tahun 2020 pada Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (31 per 1.000 kelahiran hidup), capaian AKB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 termasuk dalam kategori sangat baik dimana diperoleh nilai 11 per 1.000 kelahiran penduduk dengan Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 juga



mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu dari 267 kasus menjadi 229 kasus kematian bayi.

Penyebab terbesar kematian bayi pada tahun 2020 adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna, dan diare. Angka kematian neonatal di Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap Angka Kematian Bayi. Kematian neonatal banyak disebabkan akibat adanya gangguan fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh (asfiksia) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal).

Upaya penurunan AKB ditunjang dengan pelaksanaan antenatal yang berkualitas dan terpadu, kelas ibu hamil, persalinan yang aman serta pemantauan kasus kematian ibu dan bayi yang akurat sehingga dapat menggambarkan penyebab kematian yang nantinya bisa menjadi bahan pembelajaran. Secara garis besar ada beberapa hal yang mendukung terjadinya penurunan AKB di Provinsi Kepulauan Riau yaitu adanya pembiayaan Jampersal, peningkatan pelayanan ANC (*Antenatal Care*/pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil), ketersediaan SDM yang berkompeten, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), pelaksanaan Kelas Ibu Hamil di puskesmas pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang melibatkan lintas-sektor, membaiknya sistem rujukan di beberapa kabupaten/kota, dan pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) yang rutin setiap tahunnya. AMP merupakan kegiatan yang menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan bayi dengan tujuan mencegah kesakitan dan kematian yang akan datang serta dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.



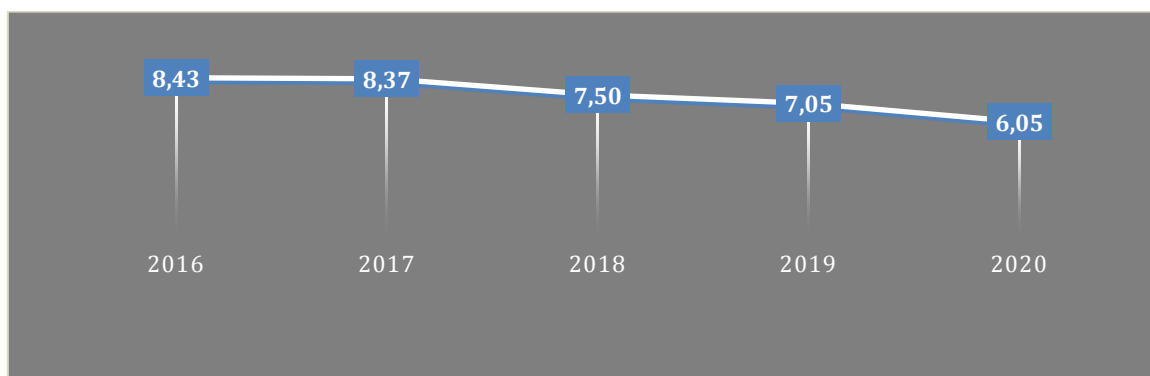
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.21 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Balita

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) adalah kematian anak balita (12 - 59 bulan) per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Balita mempunyai manfaat untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan.

Angka Kematian Balita di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun mengalami penurunan (lihat Gambar 2.12). Hal ini menggambarkan turunnya tingkat permasalahan kesehatan anak balita, tingkat pelayanan KIA, tingkat keberhasilan program KIA dan menilai kondisi sanitasi lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.22 Angka Kematian Balita



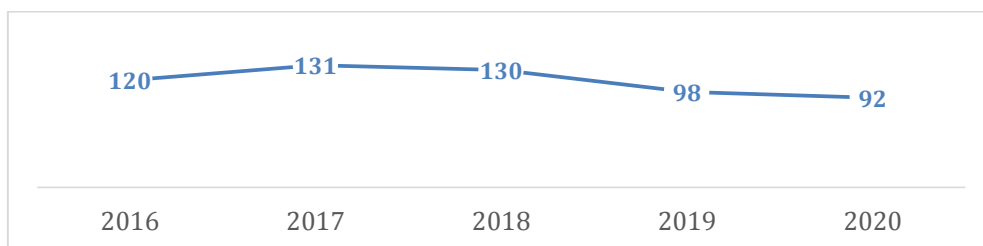
Angka Kematian Ibu (AKI)

Peran ibu sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Sosok seorang ibu yang melahirkan dan mengantarkan generasi penerus menjadi manusia yang kelak berguna bagi negara. Indikator kesehatan ibu yang utama bisa dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) di suatu wilayah.

AKI adalah banyaknya kematian ibu yang dinyatakan dalam per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada tahun yang sama. Suatu kematian bisa dikategorikan sebagai kasus kematian ibu jika terjadi selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau cedera.

Berdasarkan kematian ibu yang dilaporkan, Angka Kematian Ibu (AKI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yaitu sebesar 92 per 100.000 KH (38 kematian Ibu/41.292 kelahiran hidup dikali konstanta 100.000). Capaian AKI Tahun 2020 lebih baik jika dibandingkan dengan AKI pada tahun 2019 yang sebesar 98 per 100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan jumlah kasus kematian ibu, juga terdapat penurunan dari 41 kasus kematian ibu ditahun 2019, turun menjadi 38 kasus di tahun 2020 (lihat Gambar 2.23).

Penyebab kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 masih didominasi oleh penyebab langsung yaitu pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Selain itu, persentase penyebab lainnya yang merupakan penyebab tidak langsung juga cukup besar, contohnya kondisi penyakit malaria, HIV, edema paru (suatu kondisi yang ditandai dengan gejala sulit bernapas akibat terjadinya penumpukan cairan di dalam kantong paru-paru (alveoli), gagal ginjal, batu empedu atau penyakit lain yang diderita ibu.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.23 Angka Kematian Ibu



Status Gizi Balita

Pengukuran status gizi didasarkan atas Standar *World Health Organization* (WHO, 2005) yang telah ditetapkan pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak. Menurut standar tersebut, status gizi balita dapat diukur berdasarkan tiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh gizi yang didapatkan. Gizi yang seimbang dapat menunjang proses tumbuh kembang anak dan akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas gizi yang diterima dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang saling terkait, seperti kesehatan buruk, kualitas SDM yang rendah, hingga daya saing di pasar tenaga kerja yang kurang memadai (Indeks Pembangunan Manusia, 2018).

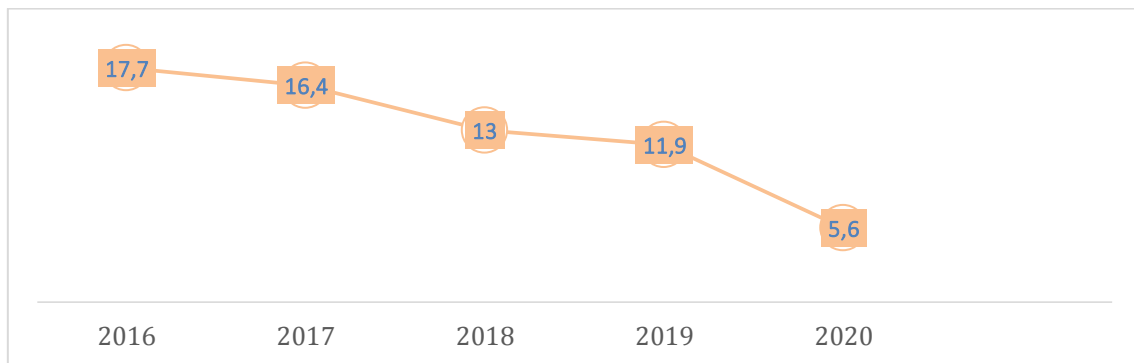
Gizi kurang dan gizi buruk merupakan status gizi yang didasarkan pada Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa persentase gizi buruk pada balita usia 0-23 bulan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 5,6. Berdasarkan Riskesdas 2018, prevalensi balita gizi kurang di Provinsi Kepulauan Riau adalah yang terbaik di seluruh Indonesia.

Mengingat pentingnya status gizi bagi kesehatan penduduk, pemerintah telah menetapkan gizi menjadi salah satu tujuan utama dalam RPJMN 2015-2020, khususnya gizi ibu dan balita. Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta).

Faktor yang memengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas-sektor antar instansi pemerintah.

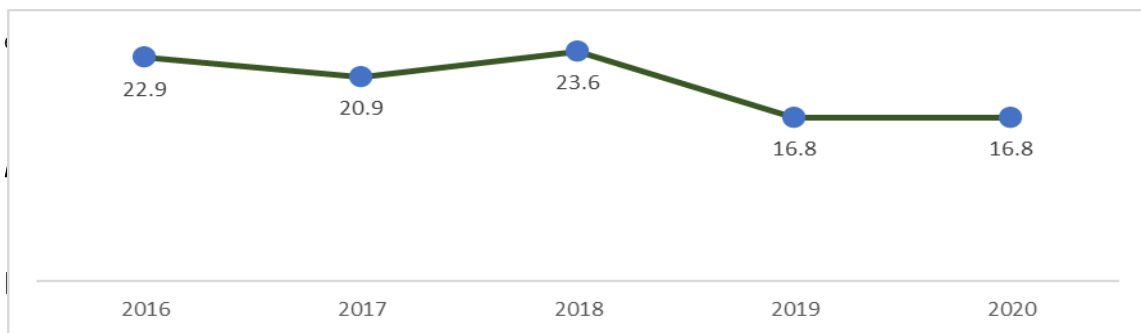


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.24 Prevalensi Kekurangan Gizi (*Underweight*) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020



mereka berada. Pada Tabel 2.56 diketahui bahwa penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 lebih banyak yang berobat jalan ke Puskesmas/Pustu sebesar 28,30 persen. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka pada tahun 2019 penduduk Kota Batam yang mayoritas tinggal di daerah perkotaan lebih banyak ke klinik/praktik dokter bersama yang menjadi tempat rujukannya dalam berobat jalan yaitu sebesar 36,10 persen.

Tabel 2.56 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat Jalan 2019

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	Lainnya
Kota Tanjungpinang	19,24	6,34	26,96	8,19	42,69	1,65	1,17	0,15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/Bidan	Klinik/Praktek Dokter Bersama	Puskesmas/Pustu	UKBM	Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	Lainnya
Kabupaten Bintan	16,15	4,70	19,93	16,43	46,47	3,75	1,11	2,05
Kota Batam	4,68	19,53	23,01	36,68	20,26	1,00	2,69	2,72
Kabupaten Karimun	11,00	8,67	32,15	21,78	29,39	0,37	0,73	0,00
Kabupaten Lingga	8,13	0,91	35,38	5,56	32,32	21,60	1,44	3,42
Kabupaten Natuna	8,76	0,08	37,38	7,27	40,69	6,18	5,82	0,00
Kabupaten Kepulauan Anambas	8,17	1,70	20,04	25,56	56,42	1,37	1,88	1,68
Provinsi Kepulauan Riau	8,50	13,05	25,74	26,41	28,30	2,96	2,14	1,98

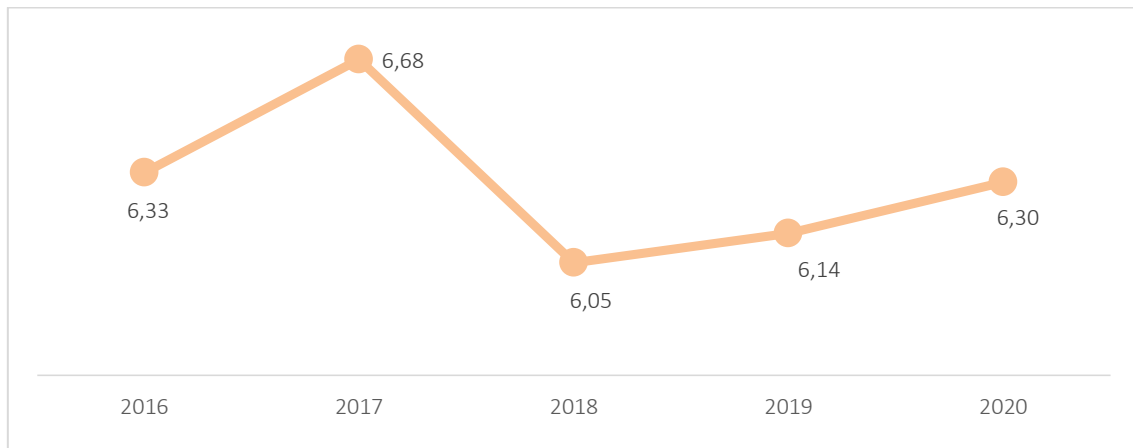
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (diolah)

Rasio Posyandu per Satuan Balita

Rasio Posyandu per Satuan Balita merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari/oleh/untuk, dan bersama masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi. Di Provinsi Kepulauan Riau sendiri Rasio Posyandu per Satuan Balita dari tahun ke tahun fluktuatif. Pencapaian tahun 2016 sebesar 6,33 per 1000 balita, 2017 sebesar 6,68 per 1000 balita, 2018 sebesar 6,05 per 1000 balita dan meningkat kembali di tahun 2019 dan 2020 menjadi 6,14 dan 6,30 per 1.000 balita.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

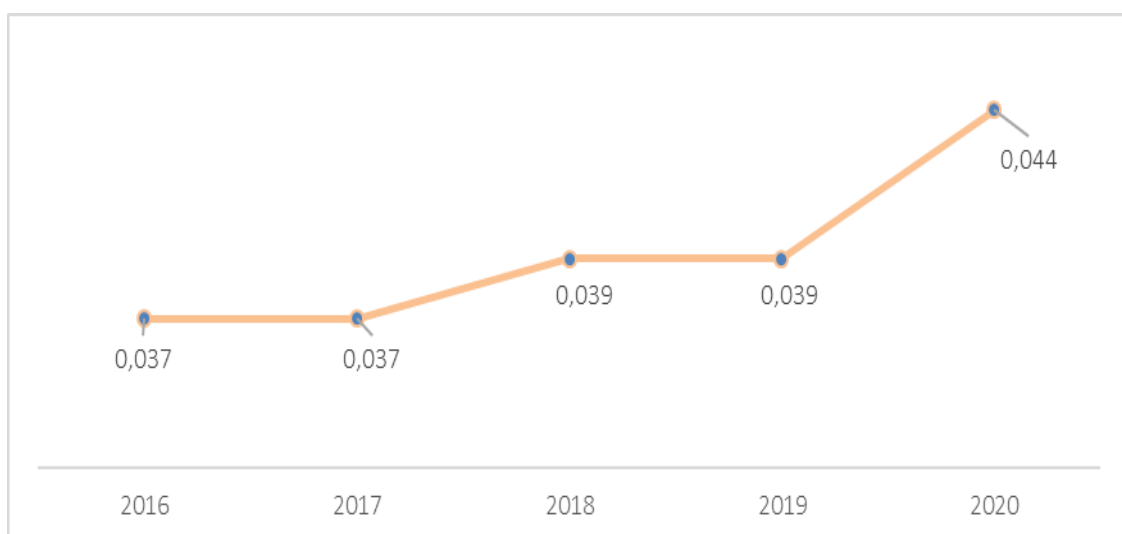


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.26 Rasio Posyandu per Satuan Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai tahun 2017 terhitung konstan di angka 0,037 dan meningkat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 di angka 0,039 dan di tahun 2020 mengalami peningkatan 0,044. Rasio Puskesmas per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan, hal ini menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer yang semakin meningkat di Provinsi Kepulauan Riau.



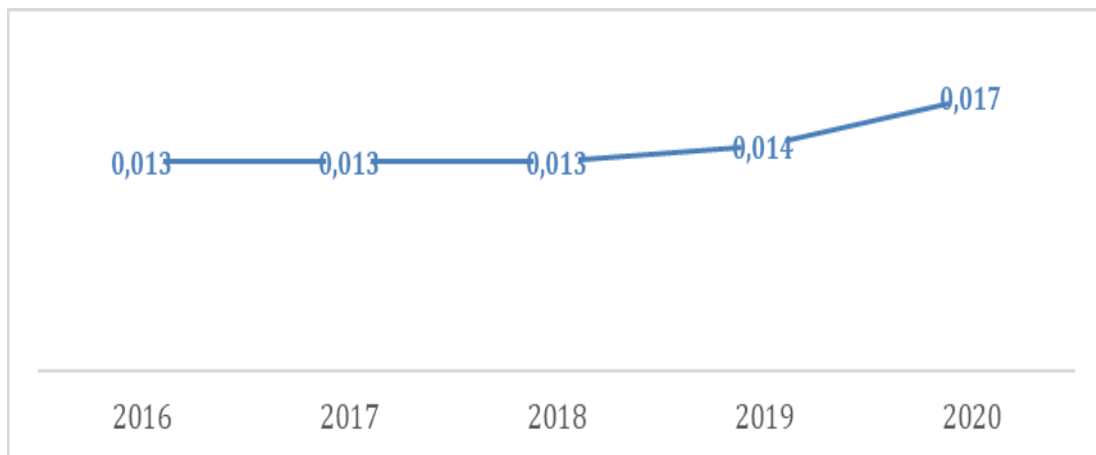
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.27 Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk Tahun 2016-2020



Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya. Dilihat dari capaian Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai tahun terhitung konstan di angka 0,013 per 1000 penduduk sampai tahun 2018 dan mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020 (0,017 per 1000 penduduk), hal ini terjadi karena jumlah rumah sakit bertambah beriringan dengan pertambahan jumlah pertumbuhan penduduknya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

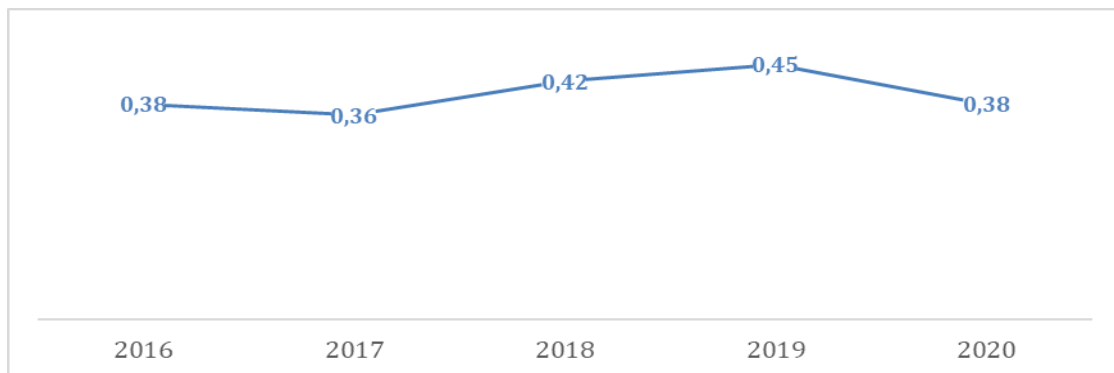
Gambar 2.28 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, rasio dokter per 1000 penduduk bersifat fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, rasio dokter per 1000 penduduk di Indonesia sebesar 0,4. Sedangkan rasio dokter per 1.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau adalah 0,38. Artinya Provinsi Kepulauan Riau memiliki 38 dokter untuk melayani 100.000 penduduk. Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan upaya



untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan yang ada, demi terlaksananya pembangunan kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kepulauan Riau. Salah satu terobosan yang dilakukan dengan pengangkatan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) dan tenaga paramedis (bidan) dengan status non-PNS. Program ini telah berjalan sejak tahun 2011 dengan sumber pembiayaan dari APBD Provinsi Kepulauan Riau.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

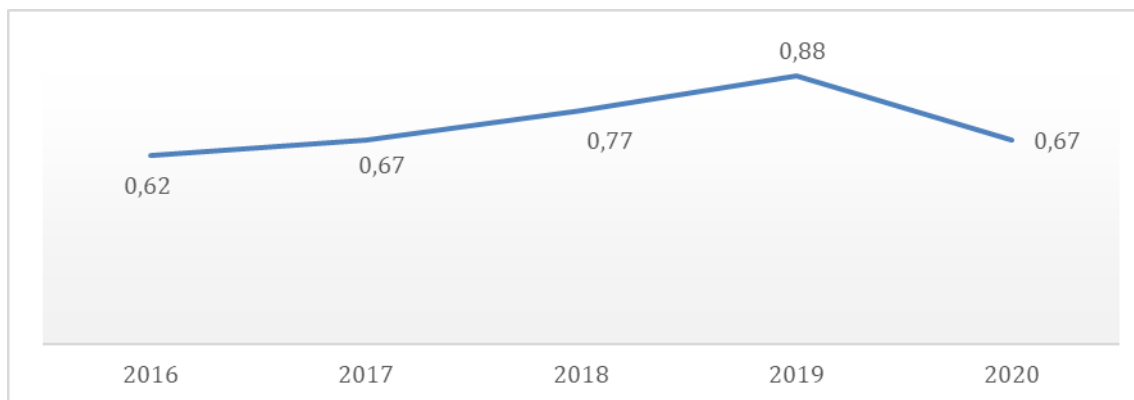
Gambar 2.29 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,67. Dengan kata lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 67 tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Rasio tenaga medis ini dari tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk menjaga agar pelayanan kesehatan dapat tetap berjalan secara optimal, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau juga menyelenggarakan pendidikan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan ini dilaksanakan dengan pembiayaan oleh pemerintah pusat, daerah, maupun pihak lain.

Jenis pendidikan yang berkelanjutan yaitu Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS), Program Tugas Belajar Pusat, Program Tugas Belajar Daerah, dan Izin Belajar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan strategi penguatan kuantitas tenaga kesehatan melalui program pengangkatan dokter/dokter gigi non-PNS, dan bidan non-PNS Provinsi Kepulauan Riau, yang pendayagunaannya di Puskesmas, Pustu, Polindes, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah. Dukungan pendayagunaan tenaga kesehatan juga diperkuat dengan adanya program Penugasan Khusus Nusantara Sehat (NS) serta Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) yang pengadaan dan pembiayaan oleh Kementerian Kesehatan RI.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

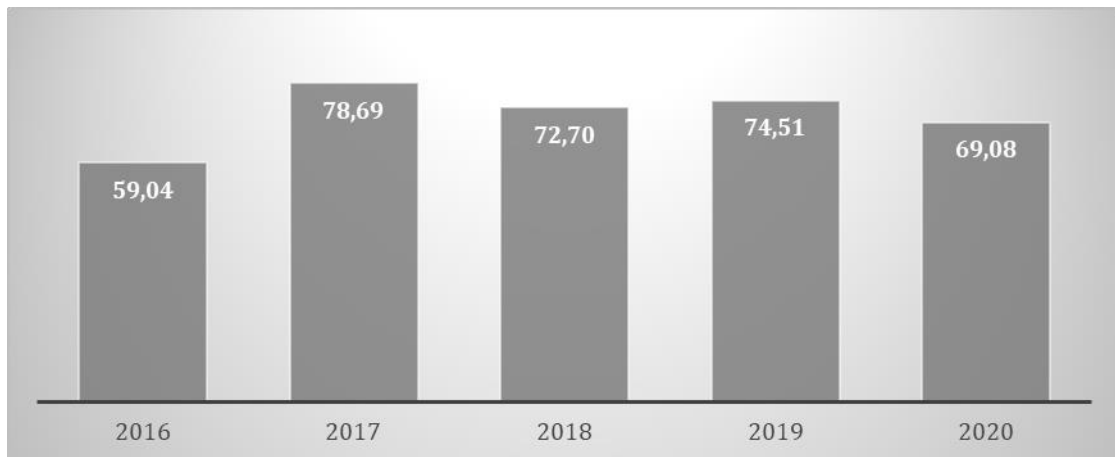
Gambar 2.30 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Komplikasi kebidanan adalah masalah kesehatan yang melibatkan ibu, bayi, atau keduanya. Komplikasi kebidanan bisa dialami bahkan oleh perempuan yang sudah sehat sebelumnya dan mereka yang pernah mengalami masalah sebelumnya berisiko lebih tinggi untuk mengalaminya. Selain itu komplikasi kebidanan dapat membuat kehamilan berisiko tinggi yang membutuhkan perawatan dan pemantauan rutin. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

bersifat fluktuatif. Tiga tahun terakhir cakupan sudah berada di atas 71% namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 69,08%.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti pelatihan APN, pelatihan MTBS, orientasi SDIDTK.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.31 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar ialah persalinan yang dilakukan oleh bidan/dokter/dokter spesialis kebidanan yang berkompeten di fasilitas pelayanan kesehatan, baik persalinan normal atau persalinan dengan komplikasi. Terkait pelayanan ini, indikator yang biasa digunakan ialah cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan (PN) dan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF). Cakupan PN di Kepulauan Riau memang menunjukkan capaian yang baik, namun jika ditilik lebih lanjut diketahui bahwa masih banyak persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang dilakukan di non-faskes (misalnya di rumah). Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan, geografis, jarak rumah dan faskes, dan kebiasaan masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian, antara lain: peningkatan kapasitas tenaga kesehatan seperti pelatihan APN, pelatihan MTBS dan orientasi SDIDTK.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.32 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

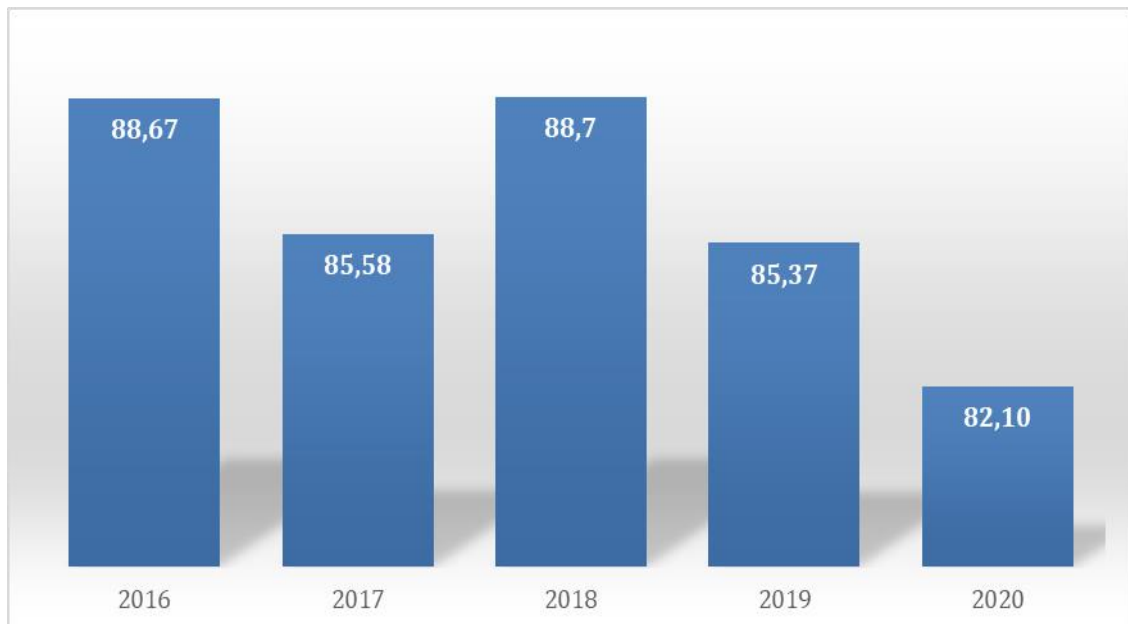
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Imunisasi merupakan intervensi kesehatan yang paling *cost effective* dalam mencegah terjadinya penyakit menular dan menurunkan angka kematian pada anak khususnya akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Cakupan imunisasi harus dipertahankan tinggi dan merata di seluruh wilayah, yang bertujuan untuk menghindarkan terjadinya daerah kantong yang akan mempermudah terjadinya kejadian luar biasa (KLB). Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan desa UCI (*Universal Child Immunization*) dari tahun 2016 bersifat fluktuatif dengan capaian rata-rata di atas 86%.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan capaian indikator adalah:

- 1) Memberi edukasi ke ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi lengkap untuk bayi dalam rangka mencegah PD3I termasuk Campak/MR
- 2) Petugas mengingatkan jadwal imunisasi pada tiap ibu melalui kader di wilayah kerja masing-masing
- 3) Melaksanakan *sweeping* dan DOFU (*Drop Out Follow Up*) untuk bayi/baduta yang tidak diimunisasi

- 4) Monitoring Evaluasi secara berjenjang dalam pelaksanaan imunisasi dalam rangka mencapai target IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) Provinsi Kepulauan Riau
- 5) Supervisi suportif kepada pengelola imunisasi secara berjenjang dalam pelaksanaan imunisasi



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.33 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

Masa pertumbuhan merupakan masa esensial bagi anak-anak untuk mendapatkan asupan nutrisi dan gizi yang cukup. Asupan nutrisi dan gizi yang cukup dapat mencegah pertumbuhan tidak sempurna, seperti *stunting* dan *wasting*. Namun, gizi buruk masih menjadi masalah utama kesehatan di Indonesia. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan *stakeholder* dan lintas-sektor untuk mengatasi masalah gizi buruk. Di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, masih ada balita dengan status gizi buruk. Berkat kerjasama yang baik antar*stakeholder*, setiap tahun cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sudah mencapai 100%. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau antara lain:



- 1) Pemberian Makanan Tambahan
- 2) Pelacakan kasus gizi buruk
- 3) Penanganan kasus gizi buruk sesuai tata laksana balita gizi buruk
- 4) Konseling PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak)



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.34 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

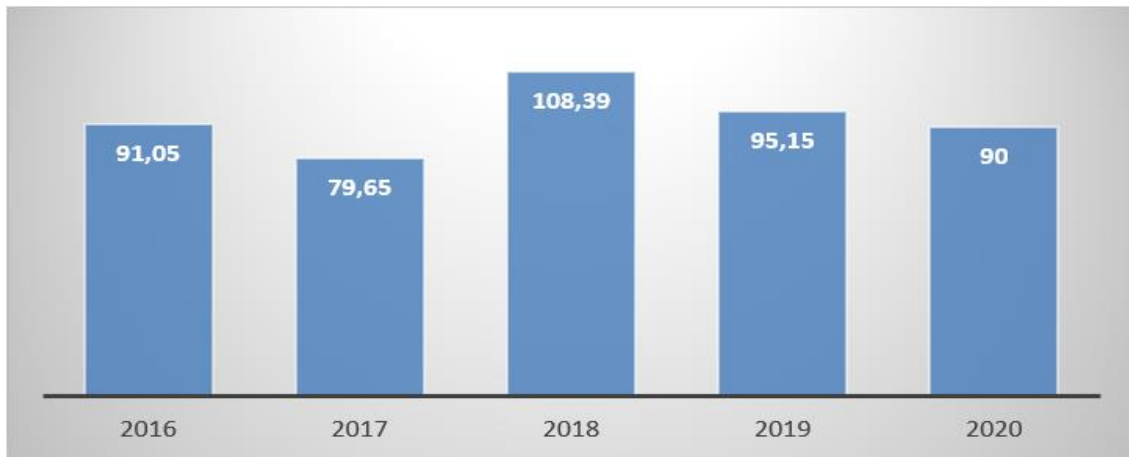
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 bulan. Pemberian vaksin ini masuk ke dalam program imunisasi rutin lengkap yang dianjurkan oleh Pemerintah Indonesia. Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, persentase imunisasi campak anak usia 1 tahun mengalami fluktuasi. Salah satunya dikarenakan status vaksin MR yang belum ada sertifikat halal sehingga banyak orangtua yang tidak bersedia anaknya untuk divaksin.

Namun demikian Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya untuk meningkatkan capaian jumlah anak usia 1 tahun yang di imunisasi campak. Beberapa upaya yang telah dilakukan, antara lain:

- 1) Memberi edukasi ke ibu tentang pentingnya pemberian imunisasi lengkap untuk bayi dalam rangka mencegah PD3I termasuk campak/MR.
- 2) Petugas mengingatkan mengenai jadwal imunisasi pada tiap ibu melalui kader di wilayah kerja masing-masing.

- 3) Melaksanakan *sweeping* dan DOFU (*Drop Out Follow Up*) untuk bayi/baduta yang tidak diimunisasi.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.35 Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020

Non-Polio AFP Rate per 100.000 Penduduk

Indonesia telah berhasil mendapatkan sertifikasi bebas polio bersama negara-negara *South East Asia Region* (SEARO) pada tanggal 27 Maret 2014. Setelah Indonesia dinyatakan bebas polio, bukan berarti Indonesia menurunkan upaya imunisasi dan surveilans AFP atau kasus lumpuh layu akut. Pemantauan terhadap kasus lumpuh layu adalah upaya pencegahan harus terus ditingkatkan hingga seluruh dunia benar-benar terbebas dari polio. Dalam rentang waktu 2016 - 2020, Non-Polio AFP rate per 100.000 penduduk di Provinsi Kepulauan Riau sudah baik. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau terus melakukan terobosan, antara lain:

- 1) Meningkatkan capaian vaksin polio yang tinggi dan merata di seluruh kabupaten/kota.
- 2) Melakukan surveilans aktif AFP di seluruh kabupaten/kota.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.36 Non-Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Cakupan penanganan pneumonia balita tahun 2020 (67,12) mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dimana untuk tahun 2019 data tidak tersedia, 2018 sebesar 11,95% tahun 2017 sebesar 9,23% dan 2016 sebesar 7,69%, capaian ini telah melampaui target tahun 2018 yaitu 11%. Rendahnya persentase penemuan pneumonia yang ditangani menunjukkan bahwa belum maksimalnya deteksi terhadap kasus pneumonia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang tanda-tanda pneumonia pada balita serta bahayanya bila tidak segera ditangani.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.37 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2020

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 adalah 3555 kasus, jumlah kasus baru BTA Positif tahun 2016 adalah 1.371 kasus (38,57%). Nilainya mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2017 yaitu sebanyak (36,13%), Sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebanyak 4.353 kasus dengan jumlah kasus baru BTA Positif sebanyak 1.758 kasus (40,39%), pada tahun 2019 terdapat sebanyak 3648 kasus dengan jumlah kasus baru BTA Positif sebanyak 2504 kasus (68,64%) dan tahun 2020 mengalami penurunan (48,87%). Jumlah kasus menurun disebabkan adanya Kegiatan Ketuk Pintu dalam rangka penemuan kasus TB di rumah-rumah yang dilakukan oleh kader-kader TB di kabupaten/ kota.



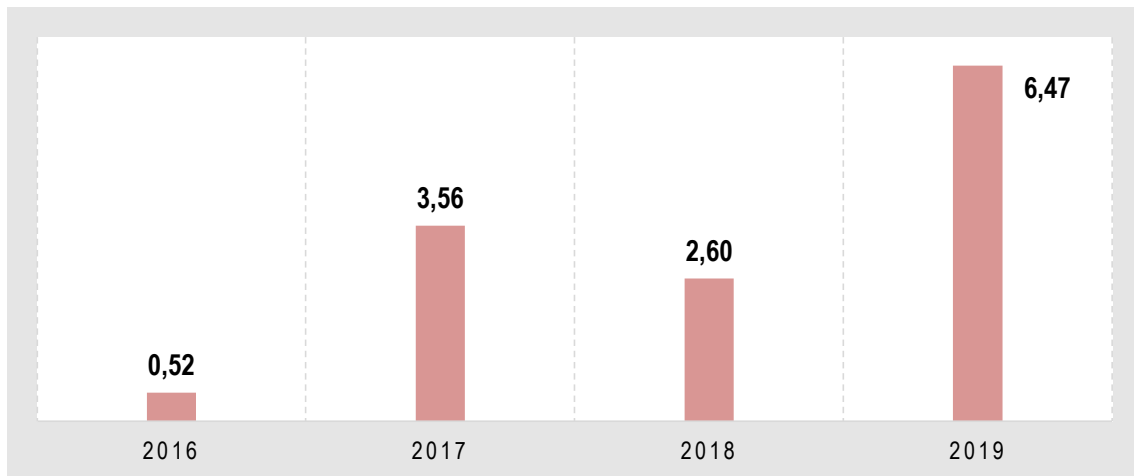
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.38 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh serta Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis

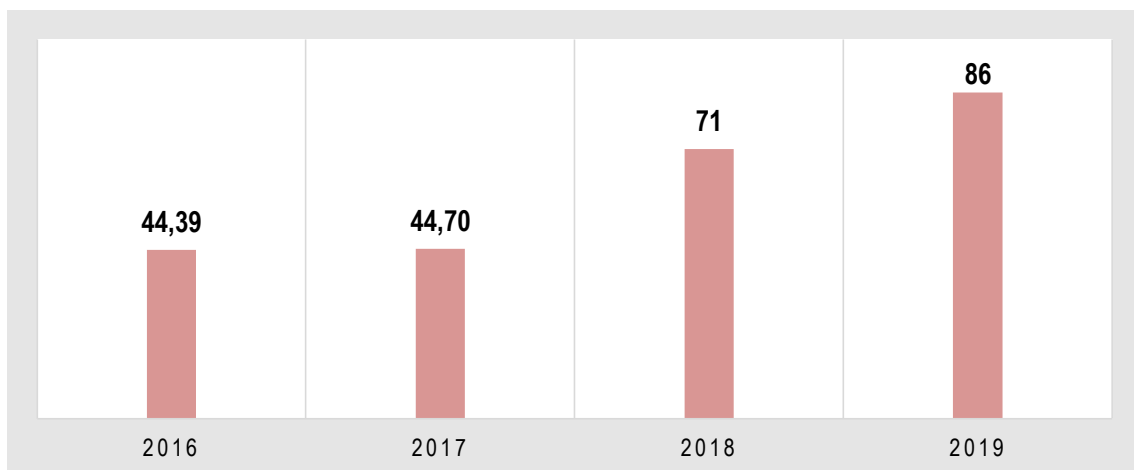
Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2018. Angka kesembuhan TB tahun 2016 sebesar (44,39%), kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2017 sebanyak (44,70%), 2018 (71%) dan pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan menjadi (70,09%).

Tingkat kematian akibat tuberkulosis juga meningkat pada tahun 2016 dengan jumlah kematian TB sebesar 0,52 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2017 sebesar 3,56 per 100.000 penduduk. Namun pada tahun 2018 kembali terjadi penurunan menjadi 2,60 per 100.000 penduduk dan kembali meningkat menjadi 6,71 per 100.000 penduduk. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu terdapat kasus *drop out* atau putus obat, gagal, dan adanya kasus pasien pindah ke fasilitas kesehatan lain yang tidak diketahui hasil akhir pengobatannya.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.39 Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.40 Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Diobati Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2019

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Siklus epidemik DBD biasanya terjadi setiap 9 – 10 tahun, dengan kata lain setiap 9 – 10 tahun akan terjadi peningkatan kasus DBD secara drastis berbanding tahun sebelumnya. Jumlah kasus DBD di Provinsi Kepulauan Riau meningkat setiap tahunnya yaitu 2017 (837 kasus), 2018 (1.134 kasus) dan 2019 (1.862 kasus). Meskipun jumlah kasus terus meningkat, penanganan penderita DBD dilakukan secara menyeluruh (100%) sampai dengan tahun 2020.

Tingginya penemuan kasus DBD dapat terjadi karena adanya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kehidupan vektor, diluar faktor-faktor lain yang memengaruhinya. Perubahan iklim menyebabkan perubahan curah hujan, suhu, kelembaban, arah udara sehingga berefek terhadap ekosistem daratan dan lautan serta berpengaruh terhadap kesehatan terutama terhadap perkembangbiakan vektor penyakit seperti nyamuk aedes, malaria, dan lainnya. Selain itu, faktor perilaku dan partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) serta faktor pertambahan jumlah penduduk dan faktor peningkatan mobilitas penduduk yang sejalan dengan semakin membaiknya sarana transportasi menyebabkan penyebaran virus DBD semakin mudah dan semakin luas.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.41 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Penderita Diare yang Ditangani

Penanganan kasus diare pada tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 54,9%, meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 (48,6%), pada tahun 2018 capaian penanganan kasus diare (65,9%), namun terjadi penurunan pada 2019 dengan capaian (26,2%) dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan (42,4%).

Penanggulangan yang telah dilakukan meliputi peningkatan pengetahuan masyarakat (*hygiene* kesehatan, berperilaku hidup bersih dan sehat), penyediaan air



bersih dan jamban sehat. Dari segi masyarakat, diharapkan untuk waspada dan melakukan tindakan pencegahan dengan menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan seperti mencuci tangan dengan sabun sebelum makan dan mengonsumsi air minum yang sudah direbus.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

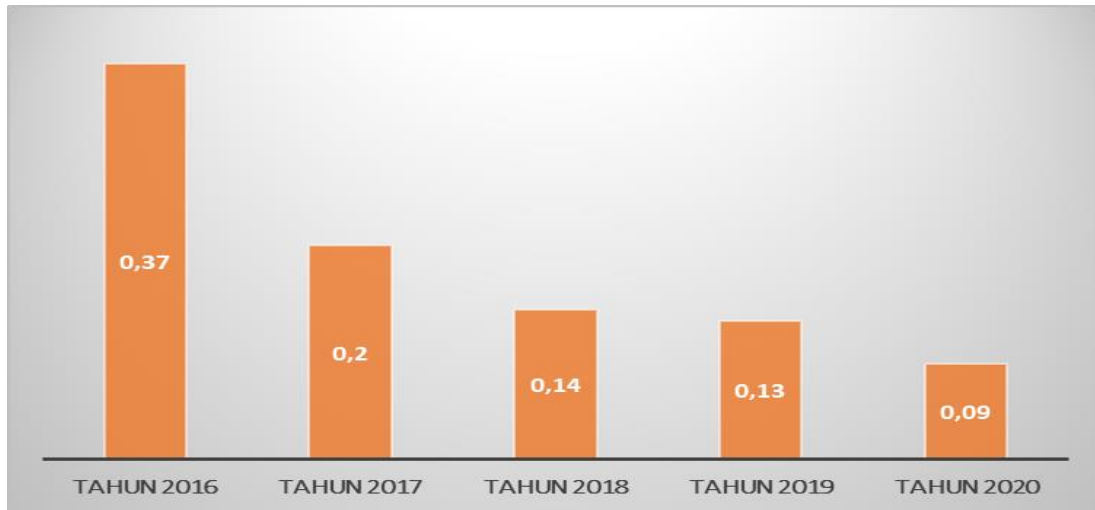
Gambar 2.42 Penderita Diare Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Angka Kejadian Malaria

API adalah jumlah kasus positif malaria per 1.000 penduduk berisiko dalam satu tahun. API Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 sebesar 0,37 per 1000 penduduk, terjadi penurunan pada tahun 2017 sebesar 0,20 per 1.000 penduduk dan tahun 2018 sebesar 0,14 per 1.000 penduduk.

Pada tahun 2019 API Provinsi Kepulauan Riau kembali terjadi penurunan sebesar 0,13 per 1.000 penduduk berisiko dengan jumlah kasus malaria positif sebesar 265 kasus berbanding 1.999.000 penduduk berisiko dikali konstanta 1.000 sementara untuk tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 0,09 per 1.000 penduduk. Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan sertifikat pembebasan/eliminasi malaria di Provinsi Kepulauan Riau, adalah: Kota Tanjungpinang, Kota Batam dan Kabupaten Karimun; Kabupaten Natuna dalam proses persiapan sejak 2019; Kabupaten Anambas,

Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan dalam status “pra-eliminasi malaria” menuju indikator program kasus indigenous 0 (nol) dan API <1‰ (diprediksi tahun 2023).



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.43 Angka Kejadian Malaria Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Tingkat Kematian Akibat Malaria

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 Tentang “Eliminasi Malaria di Indonesia” dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota Nomor 443.41/465/SJ tanggal 8 Februari 2010 Tentang “Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia” yang harus dicapai secara bertahap mulai dari tahun 2010 sampai seluruh wilayah Indonesia bebas malaria selambat-lambatnya tahun 2030, maka program malaria di Indonesia bertujuan untuk mencapai eliminasi.

Eliminasi malaria diimplementasikan melalui penguatan sistem kesehatan di daerah yang terintegrasi berdasarkan prinsip Pelayanan Kesehatan Dasar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggungjawab penuh untuk mencapai eliminasi malaria mengingat sifat dari eliminasi malaria adalah *public goods* (komoditas umum). Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau yang telah mampu mencapai eliminasi/bebas malaria adalah Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Karimun. Kabupaten Natuna dalam proses persiapan eliminasi malaria di tahun 2019. Untuk



Angka Kesakitan Malaria (*Annual Paracite Incidence/API*) di Provinsi Kepulauan Riau dari sejak tahun 2016 - 2020 cenderung menurun. Hal ini juga berdampak pada penanganan dan penanggulangan kasus malaria. Selama tahun 2016 - 2017, tidak ada ditemukan kasus pasien malaria meninggal dunia, sehingga CFR (*Case Fatality Rate*) malaria di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0%. Kabupaten Anambas, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Bintan dalam status “pra-eliminasi malaria” menuju indikator program kasus indigenous 0 (nol) dan API <1‰ (diprediksi tahun 2023).

Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Angka prevalensi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) Provinsi Kepulauan Riau merujuk kepada angka prevalensi pusat dengan capaian tahun 2016 - 2019 sebesar <0,05%. Untuk menurunkan angka prevalensi HIV/AIDS, beberapa strategi telah diterapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya pengembangan klinik layanan sukarela bagi masyarakat yang ingin mengetahui status HIV dan akselerasi klinik perawatan dukungan pengobatan (PDP) bagi pasien yang positif HIV dan harus memulai pengobatan ARV.

Cakupan Kunjungan Bayi

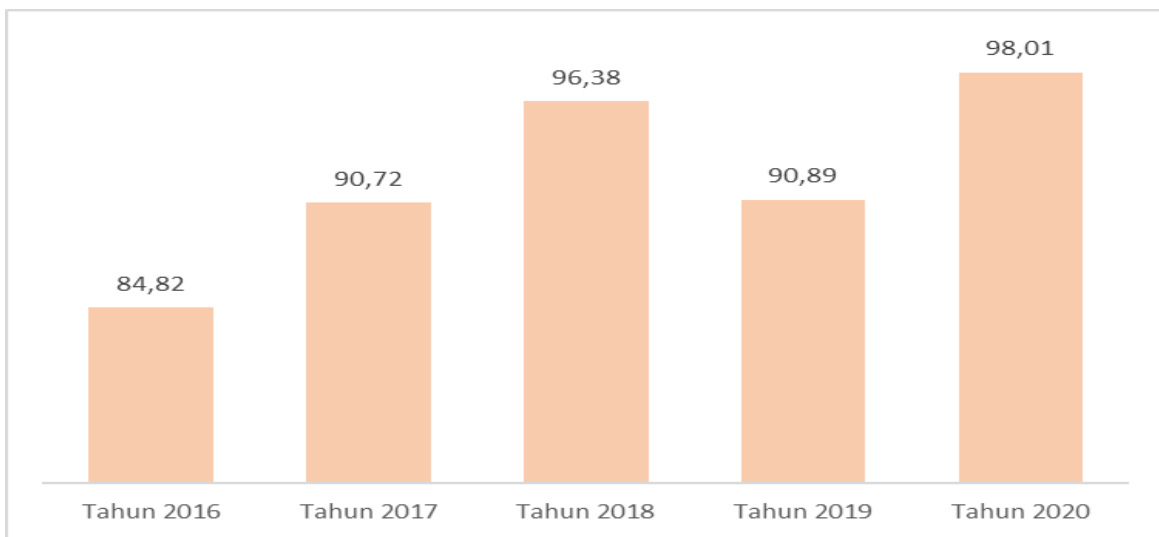
Pelayanan kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi sedikitnya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bayi:

- 1) Kunjungan bayi satu kali pada umur 29 hari – 2 bulan
- 2) Kunjungan bayi satu kali pada umur 3 – 5 bulan
- 3) Kunjungan bayi satu kali pada umur 6 – 8 bulan
- 4) Kunjungan bayi satu kali pada umur 9 – 11 bulan

Kunjungan bayi bertujuan untuk meningkatkan akses bayi terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi sehingga cepat mendapat pertolongan, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit melalui pemantauan pertumbuhan, imunisasi, serta peningkatan kualitas hidup bayi dengan stimulus tumbuh kembang. Berdasarkan capaian realisasi kunjungan bayi



Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020, terlihat pencapaian bersifat fluktuatif. Tahun 2016 - 2018, terjadi peningkatan capaian kunjungan bayi yaitu dari tahun 2016 sebesar 84,8%, meningkat di tahun 2017 menjadi 90,7%, meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 96,4%, mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 90,9% serta mengalami peningkatan kembali di tahun 2020 menjadi 98,01%.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

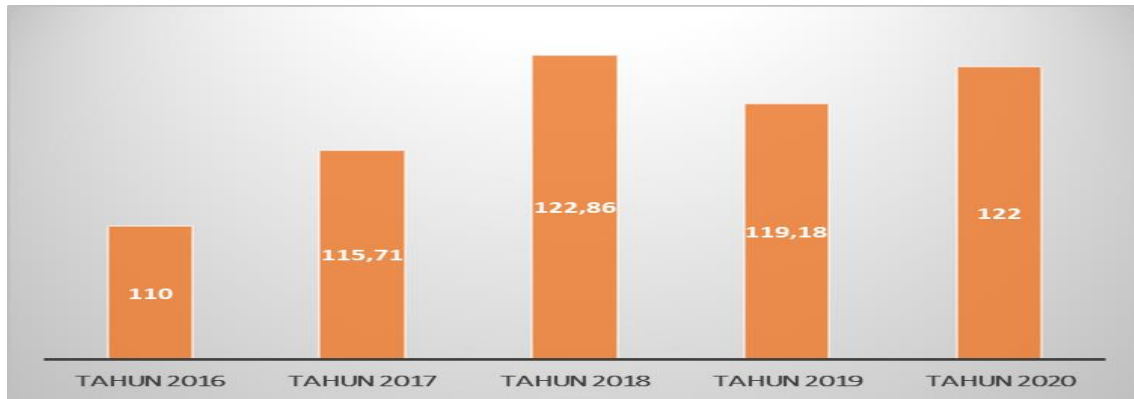
Gambar 2.44 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Puskesmas

Cakupan Puskesmas berdasarkan definisi operasional Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu cakupan jumlah Puskesmas per kecamatan. Pada tahun 2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 81 Puskesmas meningkat menjadi 87 Puskesmas di Tahun 2019. Secara realisasi cakupan Puskesmas dari 110% di tahun 2018 menjadi 122% di tahun 2020. Pusat mengalokasikan anggaran pembangunan Puskesmas melalui anggaran Dana Alokasi Khusus, sehingga saat ini Puskesmas-puskesmas khususnya di wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK) telah memiliki Puskesmas dengan bentuk bangunan modern.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

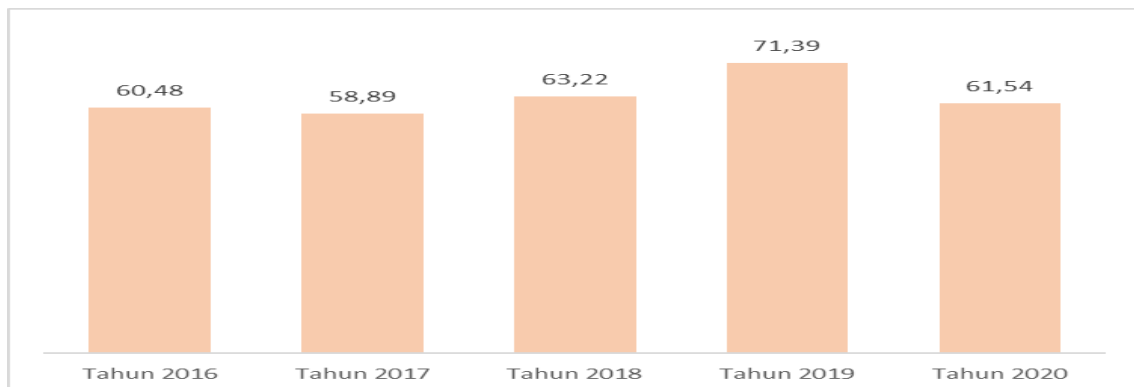


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.45 Cakupan Puskesmas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) dihitung berdasarkan perbandingan jumlah Pustu dengan jumlah kelurahan/desa. Hasil pencapaian cakupan Pustu di tahun 2016 sebesar 60,48%, 2017 menurun menjadi 58,89%, 2018 meningkat kembali menjadi 63,22%, 2019 menjadi 71,39%, dan 2020 sebesar 61,54%. Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka jaringan Puskesmas termasuk Pustu, Posyandu, dan lain-lain menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.46 Cakupan Puskesmas Pembantu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya

ke tenaga kesehatan minimal 4 kali, sesuai dengan ketentuan waktu kunjungan. Di samping itu, indikator ini menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, melalui kegiatan ini diharapkan ibu hamil dapat dideteksi secara dini adanya masalah atau gangguan atau kelainan dalam kehamilannya dan dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Berdasarkan capaian cakupan kunjungan ibu hamil (K4) di tahun 2016 tercapai sebesar 86,17% lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 93,77%, namun menurun di dua tahun selanjutnya 2018 (92,88%), 2019 (91,86%) dan 2020 (94,98%). Salah satu penghambat capaian indikator ini oleh karena banyak ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya di trimester I ataupun juga masih terdapat ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan trimester 3 (*drop out*). Selain itu, penurunan angka kunjungan K4 ini disebabkan ibu hamil yang bermigrasi untuk melahirkan di kota yang berbeda.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.47 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Pelayanan Nifas

Masa nifas adalah masa pemulihan pasca persalinan hingga seluruh organ reproduksi wanita pulih kembali sebelum kehamilan berikutnya. Masa nifas ini berlangsung sekitar 6-8 minggu pasca persalinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat masa nifas antara lain, suhu, pengeluaran lochea, payudara, traktur urinarius, dan sistem kardiovaskuler. Selain dari segi klinik ibu, kondisi kejiwaan ibu pasca persalinan



juga harus selalu dipantau dan diberi dukungan. Dalam masa nifas ini tidak sedikit ibu yang mengalami problem kesehatan seperti nyeri, bengkak pada kaki, ketidakmampuan menyusui, dan nutrisi. Budaya dan mitos yang kadang kurang menguntungkan kesehatan ibu di masa nifas masih menjadi masalah.

Kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh kematian pada ibu nifas (49%). Ibu nifas rentan untuk mendapatkan komplikasi setelah melahirkan, maka dari itu seorang ibu yang baru bersalin harus mendapatkan kunjungan dan pemantauan oleh tenaga kesehatan terlatih. Pada minggu-minggu pertama setelah persalinan adalah periode kritis bagi seorang ibu baru dan bayi yang baru lahir. Selama periode inilah, seorang wanita harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang dialami pasca melahirkan, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Berdasarkan cakupan pelayanan nifas di tahun 2016 tercapai sebesar 86,79% dan meningkat di tahun 2017 menjadi 90,45%. Untuk 2018 dan 2019 mengalami penurunan menjadi 84,92% namun meningkat kembali di tahun 2019 menjadi 88,4% dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi 90,74%. Penghambat pencapaian ini dikarenakan banyak pemeriksaan nifas tidak mencapai 3 kali (*drop out*).

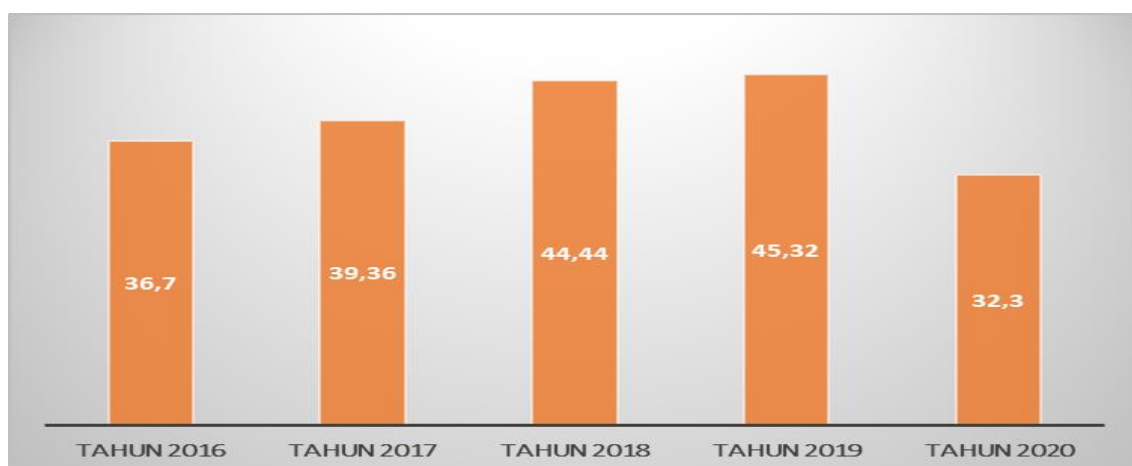


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.48 Cakupan Pelayanan Nifas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi yang Ditangani

Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Penanganan definitif adalah pemberian tindakan akhir pada setiap kasus komplikasi neonatus yang pelaporannya dihitung 1 kali pada masa neonatal. Kasus komplikasi yang ditangani adalah seluruh kasus yang ditangani tanpa melihat hasilnya hidup atau mati. Indikator ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus-kasus kegawatdaruratan neonatal, yang kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya, atau dapat dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Perkiraan neonatal komplikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah sasaran bayi pada periode yang sama. Hasil cakupan penanganan neonatus komplikasi di tahun 2016 sebesar 36,7%, lalu meningkat menjadi 39,4% di tahun 2017, meningkat menjadi 44,4% di tahun 2018 dan meningkat menjadi 45,3% di tahun 2019 namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 32,3%. Hambatan yang ditemui terkait pencapaian indikator ini yaitu banyak ditemui perbedaan pemahaman tenaga kesehatan akan definisi operasional neonatus komplikasi, sehingga banyak kasus tidak dianggap sebagai komplikasi, tidak terekamnya pencatatan komplikasi (*data missing*).



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.49 Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020



Cakupan pelayanan anak balita

Pelayanan kesehatan anak balita ialah pelayanan yang diberikan kepada anak usia 12 – 59 bulan yang dilakukan sesuai standar, yaitu meliputi pemantauan pertumbuhan minimal delapan kali setahun, pemantauan perkembangan minimal dua kali setahun, pemberian Vitamin A dua kali setahun. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Kepulauan Riau masih berada di angka yang rendah (di bawah 60%). Permasalahan yang terjadi di lapangan harus diidentifikasi sehingga dapat dilakukan upaya strategis untuk meningkatkan cakupan secara optimal. Salah satu penyebabnya yaitu kesibukan orang tua dan juga balita yang sudah mulai bersekolah (PAUD). Berdasarkan data Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, cakupan pelayanan anak balita selama 2016 - 2020 mengalami peningkatan, tetapi masih rendah karena masih di bawah 70%. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengajak orangtua untuk membawa balita ke Posyandu.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.50 Cakupan Pelayanan Anak Balita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Setiap anak usia sekolah harus diberikan pelayanan Kesehatan, salah satunya melalui penjangkaran kesehatan yang dilaksanakan melalui koordinasi antara Puskesmas dan sekolah dan biasanya dilaksanakan setahun sekali. Pemeriksaan yang dilakukan



antara lain: a) pengukuran tinggi dan berat badan; b) pemeriksaan gigi dan mulut; c) pemeriksaan penglihatan; d) pemeriksaan pendengaran; e) pemeriksaan kebugaran; dan f) kuesioner intelegensia, mental, kesehatan reproduksi, dan gaya hidup.

Jumlah cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016 sebesar (96,29%) terjadi penurunan pada tahun 2017 (79,38%) dan 2018 sebesar (66,15%) namun untuk tahun 2019 dan 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 96,75% dan 96,2%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat yaitu:

- 1) Penguatan koordinasi dengan TIM Pembina UKS/M melalui Orientasi Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja.
- 2) Berkoordinasi dengan lintas-sektor terkait dalam hal bimbingan teknis dan supervisi pembinaan dan pelaksanaan UKS.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.51 Cakupan Penjangkauan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota yaitu pelayanan gawat darurat yang memiliki dokter umum *on site* (berada di tempat) 24 jam dengan kualifikasi *General Emergency Life Support* (GELS)

dan/atau *Advance Trauma Life Support* (ATLS) + *Advance Cardiac Life Support* (ACLS), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Cakupan indikator ini tahun 2016 sebesar 66,67% lalu meningkat menjadi 100% di tahun 2017 dan 2018, namun menurun kembali di tahun 2019 menjadi 93,75% dan kembali naik di tahun 2020 sebesar 97,14%. Hambatan yang dihadapi terkait pencapaian indikator ini adalah terdapatnya tenaga IGD yang belum tersertifikasi BTCLS + GELS terutama pada rumah sakit di wilayah Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.52 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level I Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 Jam

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam tahun 2016 - 2020 telah mampu dicapai dengan capaian 100%. Indikator ini juga menjadi salah satu poin dalam pencapaian indikator SPM Provinsi Bidang Kesehatan sesuai yang tertuang dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Melalui aplikasi SKDR (Sistem Kewaspadaan Dan Respon), mampu memberikan sinyal kewaspadaan dari 22 penyakit yang dilaporkan oleh Puskesmas. SKDR sebagai upaya mewujudkan tindakan atau respon cepat terhadap adanya potensi atau munculnya KLB.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Sistem ini bekerja dengan cara memantau perkembangan tren suatu penyakit menular potensial wabah/KLB dari waktu ke waktu dalam periode mingguan. Sistem didasarkan pada pelaporan kasus di lapangan. Para petugas kesehatan seperti bidan, mantri dan Puskesmas Pembantu (Pustu) melakukan pelaporan kepada petugas surveilans di Puskesmas melalui SMS/HT. Petugas surveilans Puskesmas akan mengirimkan data yang diterima ke kabupaten juga melalui SMS. Data akan *dientry* dan dianalisis oleh kabupaten, lalu dikirim melalui *e-mail* ke provinsi dan pusat dengan menggunakan *software* khusus yang dapat menghasilkan peringatan dini (sinyal kewaspadaan) menurut tempat, waktu dan jenis penyakitnya. Bila dalam analisis muncul *alert* atau *signal* maka kabupaten segera lakukan respons (verifikasi data, penyelidikan epidemiologi, konfirmasi laboratorium dan penanggulangan) sesuai dengan situasi dan kondisi. Respon juga dapat dilakukan secara bersama dengan Puskesmas.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.53 Cakupan Desa/Keluarga Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi <24 jam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Fasilitas Kesehatan

Angka harapan hidup yang bergantung pada sarana kesehatan yang tersedia merupakan salah satu indikator untuk pembangunan non fisik. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi tingkat pelayanan kesehatan yang terselenggara secara terintegrasi yang menyangkut aspek promotif, aspek preventif, aspek kuratif dan aspek



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

rehabilitatif. Semua aspek pelayanan kesehatan tersebut sangat membutuhkan sarana pendukung. Sebagai gambaran jenis sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa rumah sakit umum dan khusus, puskesmas, klinik/balai kesehatan dan posyandu.

Faktor ketersediaan sarana kesehatan dapat dilihat dari jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau meliputi 31 rumah sakit umum, 87 puskesmas, 99 klinik dan 1.407 posyandu.

Pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau ini didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter umum yang, meliputi 647 orang dokter, 3.604 orang perawat, dan 1.775 orang bidan. Sedangkan jumlah ahli farmasi dan ahli gizi masing-masing sebanyak 443 orang, dan 136 orang. Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.57 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Klinik/Balai Kesehatan	Posyandu
Tanjungpinang	3	7	24	136
Bintan	1	15	7	165
Batam	18	20	32	514
Karimun	2	13	9	225
Lingga	2	11	2	181
Natuna	2	14	24	118
Kepulauan Anambas	3	7	1	68
Provinsi Kepulauan Riau	31	87	99	1.407

sumber: Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2024

Sementara itu, terkait upaya pengendalian pandemi COVID-19, sangat diperlukan penyiapan sarana dan prasarana untuk penatalaksanaan kasus yang dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Penatalaksanaan PDP



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

membutuhkan ruangan isolasi yang memenuhi syarat pengendalian penyakit infeksi. Melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/ MENKES/169/ 2020, pemerintah telah menetapkan 132 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Indonesia. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan 4 rumah sakit sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.58 Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1	RSUD Embung Fatimah	Jl. R. Soeprapto. Blok D 1 - 9 Batu Aji Kota Batam Telepon: (0778-364446) Fax: (0778-361363) Email: rsud_batam@yahoo.co.id
2	RSBP Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No.1, Sekupang, Batam Telepon: (0778-322046, 322121) Fax: (0778-322165, 324391) Email: rsbp.official@gmail.com
3	RSUD Muhammad Sani (Kabupaten Karimun)	Jl. Soekarno - Hatta No. 1 Tanjung Balai Karimun Telepon: (0777-327808) Fax: (0777-327818) Email: karimunhospital@yahoo.com
4	RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang	Jl. W.R Supratman No. 100 Km. 8 Tanjungpinang Kepulauan Riau Telepon: (0771-7335203) Fax: (0771-7335203) Email: rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id

Sumber: Permenkes No. HK.01.07/ MENKES/169/ 2020

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM mencakup pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Target pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 belum ditetapkan, karena Kedua jenis urusan pelayanan tersebut di tahun 2020 masih dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, di bidang Cipta Karya sebagai pengampu SPM tersebut. Direncanakan pada tahun 2021 bidang Cipta Karya Baru akan berada di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau sehingga kedua pelayanan dasar tersebut baru dapat dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Belum adanya penganggaran khusus terkait penerapan SPM, namun merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.59 Pencapaian Target SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/ Air Minum yang aman	100%	92,68%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Air Limbah	96,36%	83,84%

Sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020



Pada tabel pencapaian target SPM tersebut pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun 2020 terealisasi sebesar 92,68% dari target 100%. Hal ini mengalami kenaikan jika dilihat pada Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan bahwa realisasi pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota pada tahun 2019 sebesar 41,38% dari target 96,79%.

Sarana dan Prasarana Umum

Jalan dan Jembatan

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah, jalan yang baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan berkondisi baik adalah jalan dengan permukaan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan jalan. Persentase jalan provinsi berkondisi baik merupakan perbandingan dari jumlah jalan provinsi berkondisi baik dengan panjang jalan provinsi. Namun demikian, kondisi jalan baik pada tahun 2020 menurun menjadi 60,25% yang mana target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD pada tahun tersebut sebesar 73,24%. Pada tahun 2016 ruas jalan berstatus provinsi mengalami perubahan yang semula (SK Gubernur No. 530 Tahun 2010) sepanjang 679,49 km berubah menjadi 896,45 km (SK Gubernur No. 1.863 Tahun 2016). Secara rinci hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.60 berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.60 Panjang Jalan dan Panjang Jalan Kondisi Baik di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Jalan	Panjang	Jalan	Panjang	Jalan	Panjang	Jalan	Panjang	Jalan	Panjang
		Berkondisi	Jalan	Berkondisi	Jalan	Berkondisi	Jalan	Berkondisi	Jalan	Berkondisi	Jalan
		Baik (km)	(km)	Baik (km)	(km)	Baik (km)	(km)	Baik (km)	(km)	Baik (km)	(km)
1	Kota Tanjungpinang	47.15	70.23	49.15	70.23	50.10	70.23	51.56	70.23	49,38	70.23
2	Kabupaten Bintan	128.61	139.10	128.61	139.10	129.93	139.10	130.71	139.10	121,20	139.10
3	Kota Batam	88.96	112.35	91.96	112.35	104.82	112.35	110.63	112.35	65,95	112.35
4	Kabupaten Karimun	104.34	143.72	105.35	143.72	109.03	143.72	112.31	143.72	84,94	143.72
5	Kabupaten Lingga	126.95	236.72	128.47	236.72	128.62	236.72	138.35	236.72	124,45	236.72
6	Kabupaten Natuna	72.97	143.33	75.18	143.33	82.26	143.33	87.86	143.33	63,52	143.33
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	24.58	51.00	24.58	51.00	25.51	51.00	28.76	51.00	30,67	51.00
Total		593.54	896.45	603.31	896.45	630.27	896.45	660.17	896.45	540,11	896.45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan Tabel 2.60 di atas, kondisi ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Provinsi Kepulauan Riau yang telah diperbaiki, ditingkatkan, dan dibangun melalui APBD Provinsi maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) sepanjang 29.66 km melalui program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Sejak tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2019, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau telah memperbaiki ruas jalan provinsi menjadi berkondisi baik sepanjang 66.38 km. Namun di tahun 2020 ruas jalan Provinsi yang berkondisi baik kembali mengalami penurunan. Oleh karena itu kondisi jalan rusak yang masih harus diperbaiki masih membutuhkan jumlah anggaran perbaikan yang masih sangat besar.

Tabel 2.61 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Jalan Berkondisi Baik Dari Tahun 2015 - 2020

Indikator Kinerja	Prov/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Persentase jalan berkondisi baik (%)	Prov Kepulauan Riau	71.37%	66.21%	67.30%	70.31%	73.64%	74.51%
	Tanjungpinang	82.49%	67.14%	69.98%	71.34%	73.42%	74.09%
	Bintan	77.24%	92.46%	92.46%	93.41%	93.97%	94.30%
	Batam	90.30%	79.18%	81.85%	93.30%	98.47%	103.68%
	Karimun	92.61%	72.60%	73.30%	75.86%	78.15%	78.49%
	Lingga	53.54%	53.63%	54.27%	54.33%	58.44%	58.55%
	Natuna	67.65%	50.91%	52.45%	57.39%	61.30%	61.43%
	Kep. Anambas	55.22%	48.20%	48.20%	50.02%	56.39%	56.39%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada Tabel 2.61, Jalan yang berkondisi baik pada Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015 sebesar 71,37%. Pada tahun 2016, 2017, 2018 persentase jalan yang berada dalam kondisi baik menurun jika dibandingkan tahun 2015. Akan tetapi jumlah ini meningkat pada tahun 2019 dan 2020. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

persentase jalan berkondisi baik paling rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota yang lain di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 56,39% pada tahun 2020. Kota Batam memiliki realisasi persentase kondisi jalan baik paling tinggi diantara Kabupaten/Kota yang lain.

Sementara itu, tingkat konektivitas antar wilayah strategis Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sepanjang 32.343 km, pada Kabupaten Karimun sepanjang 10.973 km. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) cukup dekat yakni pada Kota Tanjung Pinang sepanjang 0,85 km, Kabupaten Bintan sepanjang 1,7 km, Kota Batam sepanjang 5,08 km, Kabupaten Lingga sepanjang 2,15 km, Kabupaten Natuna sepanjang 6,99 km dan Kabupaten Kepulauan Anambas sepanjang 4,6 km. Lebih lengkap dapaian indikator kinerja konektivitas dapat dilihat pada Tabel 2.62.

Tabel 2.62 Realisasi Indikator Kinerja Konektivitas Tahun 2015 - 2020 per Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja	Provinsi/ Kab/ Kota	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020
Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km)	Provinsi Kepulauan Riau	3,29	4,65	6,97	16,20	25,96	32,34
	Tanjungpinang	0	0	0	0.00	0.25	0.85
	Bintan	0	0	0	0.80	1.70	1.7
	Batam	1,0	1,5	1,5	2.98	5.08	5.08
	Karimun	0,9	0,9	1,5	3.46	6.20	10.973
	Lingga	0	0	0	0.80	1.15	2.15
	Natuna	1,39	1,80	2,62	6.81	6.99	6.99
	Kep. Anambas	0	0,45	1,35	1.35	4.60	4.6

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jembatan berfungsi sebagai penunjang untuk menjangkau daerah yang satu dengan yang lain agar lebih efisien dan efektif. Jembatan dalam kondisi baik adalah jembatan yang ditentukan dari segi baiknya kondisi struktur. Persentase jembatan



berkondisi baik merupakan perbandingan dari panjang jembatan berkondisi baik dengan panjang jembatan provinsi.

Evaluasi terhadap persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Adapun jembatan berkondisi baik pada setiap kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam Tabel 2.63.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.63 Jembatan Berkondisi Baik di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			2020		
		Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)	Panjang Jembatan (m)	Jembatan Berkondisi Baik (m)	Jembatan Berkondisi Baik (%)
1	Kota Tanjungpinang	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.597,61	82.98%	1.925,3	1.897,61	98.56%
2	Kabupaten Bintan	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%	105,10	35,02	33.33%
3	Kota Batam	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%	385,4	365,67	94.88%
4	Kabupaten Karimun	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%	396,20	346,68	87.50%
5	Kabupaten Lingga	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%	660,70	498,63	75.47%
6	Kabupaten Natuna	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%	445	350,92	78.86%
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%	228	126,68	55.56%
Total		4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.321,12	80.11%	4.145,70	3.621,12	87.34%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Dari Tabel 2.63, kinerja pencapaian jalan, jembatan, dll masih perlu untuk lebih dioptimalkan dukungan pembangunannya baik terhadap sektor pariwisata ataupun pendidikan terutama terkait isu sinergitas dengan OPD terkait

Irigasi

Indikator kinerja persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada merupakan ketersediaan air irigasi (litr/dtk) pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi (litr/dtk) berdasarkan rencana tata tanam. Adapun kondisi awal tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi telah tercapai 39,83% pada tahun 2017. Lebih lanjut pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tercapai sebanyak 46,50% yang dalam artian pada tiga tahun tersebut tidak ada peningkatan. Data ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat lebih detail terdapat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Ketersediaan Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2020

No	Daerah Irigasi (DI)	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Ketersediaan Air Tahun 2020 (liter/dt)	Total Kebutuhan Air Tahun 2020 (liter/dt)	Capain Tahun 2020 (%)
1	D.I Jemaja	38.86%	38.86%	38.86%	38.86%	180	463	38.86%
2	D.I Kawasan Pertanian Terpadu	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	334	334	100.00%
3	D.I Air Raya	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
4	D.I Batubi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	280	280	100.00%
5	D.I Kelarik	47.20%	47.20%	47.20%	47.20%	708	1,500	47.20%
6	D.I Meliah	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	48	48	100.00%
7	D.I Payak	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	127	127	100.00%
8	D.I Tapau	34.55%	46.71%	46.71%	46.71%	844	1,806	46.71%
9	D.I Bintang Buyu	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	12	120	10.00%
10	D.I Bukit Langkap	0.00%	14.60%	14.60%	14.60%	175	1,200	14.60%
		39.83%	46.50%	46.50%	46.50%	2,755	5,926	46.50%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Air Baku

Air baku merupakan air yang akan digunakan untuk input pengolahan air minum yang memenuhi baku mutu air baku. Air baku yang diolah menjadi air minum dapat berasal dari sumber air bawah tanah yaitu dari lapisan yang mengandung air di bawah permukaan tanah dangkal atau dalam, sumber air permukaan yaitu sungai, danau, rawa dan mata air serta air laut. Evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk pada tahun 2020 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Bagi Penduduk Tahun 2016 – 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi penduduk	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk (%)	64.10	64.82	70.42	73.13	73,64
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada (%)	36.64	35.05	46.50	46.50	46.50

Sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terbesar di Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2017-2020 terbesar adalah pada Kota Batam dengan kondisi pemenuhan di tahun 2020 sebesar 90.56% sedangkan Ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk terkecil di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun sejak tahun 2017-2020 adalah pada Kabupaten Natuna dengan kondisi akhir tahun sebesar 23.68%. Dengan adanya evaluasi dan upaya peningkatan ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam pemerataan pelayanan khususnya untuk tahun-tahun yang akan datang dan daerah-daerah yang memiliki ketersediaan air baku yang cukup rendah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Adapun kondisi persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk sejak tahun 2017-2020 per kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih jelas pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66 Ketersediaan Sumber Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk di Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020

No	Indikator	Capaian Kinerja Per Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang				
	Debit andalan (liter/detik)	502	502	502	509
	Debit terpasang (liter/detik)	387	387	387	393,10
	Jumlah penduduk (jiwa)	207.286	209.870	212.485	227.663
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	440	440	440	440
	Nilai outcome (persen)	87,84%	87,84%	87,84%	89,34%
2	Kota Batam				
	Debit andalan (liter/detik)	4,723	4,763	4,763	4784,00
	Debit terpasang (liter/detik)	4,531	4,571	4,571	4.591,50
	Jumlah penduduk (jiwa)	1.285.704	1.336.975	1.390.290	1.196.396
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	5,062	5,070	5,070	5.070
	Nilai outcome (persen)	89,50%	90,15%	90,15%	90,56%
3	Kabupaten Bintan				
	Debit andalan (liter/detik)	515	515	570	720,00
	Debit terpasang (liter/detik)	515	515	570	720,00
	Jumlah penduduk (jiwa)	156.164	157.760	159.373	159.518
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	1,731	1,731	1,731	1.731
	Nilai outcome (persen)	29,75%	29,75%	32,93%	41,59%
4	Kabupaten Karimun				
	Debit andalan (liter/detik)	230	390	440	440
	Debit terpasang (liter/detik)	230	390	440	440
	Jumlah penduduk (jiwa)	229.273	231.287	233.319	253.457
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	625	625	625	625
	Nilai outcome (persen)	36,80%	62,40%	70,40%	70,40%
5	Kabupaten Lingga				
	Debit andalan (liter/detik)	90	90	110	110
	Debit terpasang (liter/detik)	90	90	110	110



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Capaian Kinerja Per Tahun			
		2017	2018	2019	2020
	Jumlah penduduk (jiwa)	89.353	89.736	90.121	98.633
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	185	190	190	190
	Nilai outcome (persen)	48,75%	47,37%	57,89%	57,89%
6	Kabupaten Natuna				
	Debit andalan (liter/detik)	35	35	90	90
	Debit terpasang (liter/detik)	35	35	90	90
	Jumlah penduduk (jiwa)	76.052	76.829	77.615	81.495
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	380	380	380	380
	Nilai outcome (persen)	9,21%	9,21%	23,68%	23,68%
7	Kabupaten Kepulauan Anambas				
	Debit andalan (liter/detik)	20	20	50	50
	Debit terpasang (liter/detik)	20	20	50	50
	Jumlah penduduk (jiwa)	41.434	41.954	42.480	47.402
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	82	94	94	94
	Nilai outcome (persen)	24,45%	21,21%	53,02%	53,02%
Total					
	Debit andalan (liter/detik)	6,115	6.315	6.548	6.703
	Debit terpasang (liter/detik)	5.807	6.007	6.238	6.395
	Jumlah penduduk (jiwa)	2.085.266	2.144.411	2.202.961	2.064.564
	Kebutuhan air tahun 2021 (liter/detik)	8.504	8.530	8.530	8.530
	Nilai outcome (persen)	68,28%	70,42%	73,13%	74,96%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Banjir

Jumlah titik rawan banjir adalah jumlah kawasan rawan banjir di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun titik rawan banjir yang belum tertangani hingga tahun 2019 adalah sebanyak 22 titik. Hasil evaluasi capaian kinerja untuk sasaran menurunkan genangan banjir pada tahun 2020 tercapai 90% yaitu menurunkan 4 titik genangan banjir dari 22 titik menjadi 20 titik. Tabel 2.67 menyajikan capaian kinerja sasaran menurunkan genangan banjir dan jumlah titik rawan banjir pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.67 Capaian Kinerja Menurunkan Genangan Banjir Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal (Tahun 2019)	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Realisasi
Menurunkan Genangan Banjir	Jumlah Titik Rawan Banjir	22	18	20	90

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Adapun 2 titik rawan banjir yang tertangani pada tahun 2020 meliputi Kawasan Kampung Kolam dan Teluk Keriting (Kota Tanjungpinang). Sisa lokasi banjir yang belum ditangani adalah sebanyak 26 titik rawan banjir yang akan dijabarkan pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68 Jumlah Titik Rawan Banjir Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Realisasi				Lokasi Titik Rawan Banjir
	2016	2017	2018	2019	
Kota Tanjungpinang	9	9	6	4	9 Kawasan (Kaw. Kampung Kolam, Kaw. Cendrawasih Kaw. Bandara RHF, Kaw. Rawasari, Kel. Batu 9, Jl. Kunai Kp. Sidodadi RT 02 RW 09 Kel. Batu 9, Kaw. Sido Makmur Kel. Batu 9, Kaw. Taman Harapan Indah, Kaw. Suka Berenang dan Kaw. Hang Tuah Permai)
Kabupaten Bintan	5	5	5	5	5 Kawasan (Kaw. KM. 18 - KM. 20 Kel. Sei Lekop, Sungai Kangboi Km 38, Kaw. Kota Tanjung Uban, Kaw. Jl. Merdeka Tanjung Uban, dan Kaw. Jl. Pasar Berdikari Tanjung Uban)
Kota Batam	6	5	3	3	5 Kawasan (Kawa. Baloi, Kaw. Tanjungpiayu/Sungai Sei Beduk, Kaw. Saluran Utama Sei Tering, Sungai Sagulung,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kabupaten/Kota	Realisasi				Lokasi Titik Rawan Banjir
	2016	2017	2018	2019	
					dan Sungai Bengkong)
Kabupaten Karimun	4	3	2	2	2 Kawasan (Kaw. Badang Perkasa, Sungai Raya Karimun, Sungai Kundur)
Kabupaten Lingga	4	4	4	4	4 Kawasan (Sungai Bukit Langkap, Sungai Resang, Sungai Marok Kecil, dan Sungai Nerekeh)
Kabupaten Natuna	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Air Kubang Kec. Bunguran Timur)
Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	1	1	1 Kawasan (Sungai Dapit menuju Kuala Maras)
Provinsi Kepulauan Riau	30	28	22	20	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Penataan Ruang

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, keserasian dengan wilayah di sekitarnya, dasar perizinan pembangunan, maupun administrasi pertanahan. Pengaturan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017. Urusan penataan ruang yang menjadi kewenangan Dinas PU, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau adalah rencana tata ruang wilayah daratan sesuai pelaksanaan tugas, pokok, fungsi organisasi.

Sebanyak 6 kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, sedangkan Kota Batam sampai saat ini belum ditetapkan dengan Perda. Pada tahun 2020 ini, dari 7 kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten yang sedang melaksanakan PK dan revisi RTRW Kabupaten Status proses PK dan Revisi RTRW Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.69.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.69 Status PK dan Revisi Perda RTRW Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Peraturan Daerah	Keterangan
1	Perda Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2020 tentang RTRW Kabupaten Bintan	Sudah selesai dilakukan peninjauan kembali dan revisi.
2	Perda Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Natuna	Penyusunan Kajian PK telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini sedang memasuki tahapan penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Natuna.
3	Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Karimun	Penyusunan Kajian PK dan Revisi Ranperda telah selesai dilaksanakan. Ranperda (Revisi) RTRW Kabupaten Karimun akan disampaikan kepada TKPRD Provinsi untuk dibahas pada minggu kedua Agustus 2018
4	Perda Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Lingga	Penyusunan Kajian PK telah selesai dilaksanakan pada tahun 2017. Saat ini sedang memasuki tahapan Laporan Antara (Revisi) RTRW Kabupaten Lingga.
5	Perda Kabupaten Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Anambas	Sedang melaksanakan kajian PK RTRW Kabupaten Anambas, memasuki tahapan FGD.
6	Perda Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Tanjungpinang Tahun 2011- 2031	Akan diusulkan PK dan Revisi Perda RTRW Kota Tanjungpinang pada tahun 2021.

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Secara rinci kinerja urusan penataan ruang dapat dilihat pada Tabel 2.70.

Tabel 2.70 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2020	2019	2020
1	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	n/a	14,28	28,57	57,14	85,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya setiap tahun menunjukkan tren peningkatan. Hingga pada tahun 2020 sebanyak 85,71%. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat sangat mendukung hasil dari pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2019, jumlah tenaga kerja konstruksi berpendidikan S1 sebanyak 4.074 orang, sedang yang memiliki SKA sebanyak 426 orang atau setara sebesar 10,46%. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan kompetensi tenaga konstruksi. Terkait dengan persentase tersebut, belum memperhitungkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana pelaku tenaga kerja konstruksi tidak dibenarkan mempunyai posisi sebagai Penanggung Jawab Teknis (PJT), Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) di perusahaan yang lain yang berlaku mulai tanggal 2 Juni 2021. Dengan demikian adanya kebijakan tersebut akan diprediksi jumlah tenaga kerja konstruksi akan berkurang.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi



dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau masih dalam kategori N/A (*not available*) yang memuat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Sehingga target capaian SPM Perumahan Rakyat belum diakomodir pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (*livable*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai, tentram, dan sejahtera.

Permasalahan perumahan yang terkait dengan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seperti *backlog*, rumah tidak layak huni dan permukiman kumuh banyak dipengaruhi oleh regulasi perumahan yang ada dalam mendukung penyediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR. Regulasi dalam hal pembiayaan merupakan salah satu contoh regulasi yang memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi MBR.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.71 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi
Kepulauan Riau

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni	34.03 %	37.61 %	34.09 %	44.09 %	47.35 %
2	Rasio permukiman layak huni	92 %	95 %	98 %	97 %	97 %
3	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	n/a	33 %	21 %	19 %	13 %
4	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0.1 %	0.09 %	0.08 %	0.07 %	0.05 %
5	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	10.81 %	27.81 %	37.81 %	47.81 %	57.81 %
6	Capaian luasan penanganan kawasan permukiman kumuh	n/a	244,95 ha	128,89 ha	103,01 ha	476,85 ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau, 2021.

Secara umum permasalahan di kawasan kumuh adalah keterbatasan infrastruktur dasar permukiman dengan mengukur 7+1 indikator kumuh yaitu: keteraturan bangunan, akses jalan, drainase, akses air minum layak, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Dari 7+1 indikator tersebut yang dominan menjadi sumber permasalahan di kawasan kumuh secara umum yaitu: aspek pengelolaan persampahan, akses air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Tipologi permukiman kumuh yaitu permukiman di atas air dan tepi air sehingga memengaruhi sumber permasalahan utama kawasan.

Kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kepulauan Riau berdasarkan data RPJMD 2016-2021 seluas 832,44 ha, dalam kurun waktu tahun 2016 - 2020 penanganan kawasan kumuh di Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 mencapai 476,85 ha dengan uraian capaian penanganan kumuh pada tahun 2017 sebesar 244,95 ha, tahun 2018 sebesar 128,89 ha, dan tahun 2019 sebesar 103,01 ha. Capaian tersebut menggambarkan bahwa persentase luasan permukiman kumuh di.



Minimnya peningkatan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dikarenakan peningkatan pelayanan PSU yang belum memenuhi standar sehingga berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan perumahan. Terlihat dari capaian lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2016 sebesar 10,81 % dan pada tahun 2020 menjadi 57,81%. Hal ini disebabkan karena ketidakteraturan bangunan, kurangnya drainase lingkungan, pelayanan persampahan yang belum optimal, pembuangan limbah yang tidak terkendali, akses jalan lingkungan yang tidak memadai.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi.

Target capaian SPM Urusan Ketenteraman, dan ketertiban umum belum diakomodir pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, pencapaian SPM jenis pelayanan dasar urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 belum dapat dilaksanakan.

Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketenteraman dan ketertiban suatu daerah sangat memengaruhi proses pembangunan daerah. Bahkan ini menjadi salah satu prasyarat untuk investor dalam menanamkan modalnya di daerah tersebut. Ketenteraman, ketertiban umum dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat tercermin dari angka kriminalitas yang terjadi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa angka kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau cukup fluktuatif, bahkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban di Provinsi Kepulauan Riau belum relatif cukup kondusif meskipun di situasi Pandemi, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72 Angka Kriminalitas Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis Kriminal	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus Narkoba	508	341	444	401	387
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	8	5	5	4	11
3	Jumlah Kejahatan Seksual	9	1	12	10	3
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	67	58	86	86	92
5	Jumlah Kasus Pencurian	1.731	1.469	1.142	1.303	1.022
6	Jumlah Kasus Penipuan	773	682	136	113	88
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
8	Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun	3.096	2.556	1.825	1.917	1.603
9	Jumlah Penduduk	2.028.169	2.082.694	2.136.521	2.189.653	2.064.564
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	0,00153	0,00123	0,00085	0,00088	0,00078

Sumber: Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, 2020

Data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat kasus kriminalitas yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Walaupun penanganan tindak kejahatan merupakan kewenangan kepolisian, namun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki kewajiban untuk membina dan melindungi masyarakatnya. Salah satu faktor penyebab masih adanya berbagai tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum tersebut adalah belum optimalnya penanganan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Di samping itu faktor kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi penyebab masih tingginya kasus kriminalitas di Provinsi Kepulauan Riau.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.73 Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada dan Penanganan Demo

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase demo yang berjalan aman	91 %	92 %	100 %	100 %	100%
2	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur	272 Kasus	240 Kasus	240 Kasus	235 Kasus	235 Kasus

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kualitas penataan peraturan perundangan yang masih kurang baik menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penegakan Perda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, keterbatasan personil juga menjadi faktor penyebab belum optimalnya penegakan Perda di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Persentase anggota satuan perlindungan masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian dan kenyamanan lingkungan pada tahun 2020 baru mencapai 43% (Tabel 2.74). Bahkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau masih jauh dari ideal (Tabel 2.75 dan Tabel 2.76).

Tabel 2.74 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	4: 10.000	4: 10.000	4: 10.000	4: 10.000	4: 10.000
2.	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	55 %	41 %	42 %	43 %	43%
3	Jumlah Pos Terpadu Se-Provinsi Kepulauan Riau	640 Pos	647 Pos	650 Pos	652 Pos	652 Pos
4.	Persentase Kabupaten/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	0 %	28,57 %	28,57 %	42,85 %	42,85 %

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.75 Kebutuhan Ideal Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan
Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kelompok Tugas	Jumlah Personel		
		Ideal	Real	Kurang
1	Pleton 1 (gedung Daerah)	30	17	13
2	Pleton 2 (kantor gubernur)	30	12	18
3	Pleton 3 (Kantor DPRD)	30	9	21
4	Pleton Batam	40	40	-
5	Pleton Dalmas	30	-	30
6	Patroli	24	5	19
7	Pengamanan Pos	18	9	9
8	Pos Rumah Jabatan	35	13	22
9	VIP	25	18	7
10	Petugas Tindak Internal	15	10	5
11	Pleton Markas	40	27	13
Total		317	160	157

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Tabel 2.76 Kondisi Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	OPD	Personel			Total
		PNS	PTT	THL	
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau	72	104	50	226

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk patroli dalam rangka pengawasan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur di wilayah Provinsi Kepulauan Riau menjadi faktor penyebab ketiga belum optimalnya penegakan Perda di daerah ini (Tabel 2.75). Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang hampir 90%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

daerah perairan membutuhkan sarana dan prasarana tidak hanya kendaraan darat namun juga *speedboat* sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.77.

**Tabel 2.77 Kebutuhan Ideal Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan
Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau**

No	Jenis	Jumlah Kendaraan			Keterangan
		Ideal	Real	Kurang	
1	Mobil Dinas Kepala Pol PP	2	2	2	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
2	Mobil Dinas Sekretaris dan Kabid	5	-	5	
3	Mobil Patwal	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
4	Mobil Patroli	4	2	2	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
5	Mobil Dalmas	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
6	Motor Patwal	6	2	4	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
7	Minibus	2	-	2	
8	<i>Speedboat</i>	2	1	1	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun
9	Motor Dinas Operasional	15	15	15	Kondisi kendaraan sudah berumur di atas 10 tahun

Sumber: Satuan Polisi pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau, 2021

6. Urusan Sosial

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah provinsi terdiri atas:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Adapun realisasi pencapaian SPM Bidang Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 2.78 Pencapaian Target SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	252 Orang di dalam panti
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	602 orang Anak Telantar di dalam panti
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100%	100%	554 orang Lanjut Usia Telantar
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan	Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan	100%	100%	13 orang tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Realisasi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
	pengemis) di dalam panti	dasarnya di dalam panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam dan	Persentase korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	172,73%	2.591 orang korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi dari target sejumlah 1500 orang

Sumber: Laporan SPM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Capaian Kinerja Bidang Urusan Sosial

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Penanganan PPKS didasarkan atas jenis-jenis PPKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PPKS, pemerintah provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Lembaga/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan PPKS tersebut secara rutin dan berkala selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Frekuensi pembinaan terhadap lembaga tersebut selalu meningkat dari tahun ke tahun. Demikian pula terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial kemasayarakatan yang dibina, persentasenya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan sosial di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

capaian kinerja 13 indikator. Secara lengkap kinerja urusan sosial dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan dalam Tabel 2.79.

Tabel 2.79 Realisasi Capaian Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan Ekonomi Produktif	0,27	0,37	0,61	0,61	1,20	1,52
2	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	5,59	26,88	51,53	38,09	38,09	53,97
3	Persentase anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	0,10	0,19	0,24	0,27	0,29	0,61
4	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti jompo	0,13	2,1	4,91	6,03	7,02	8,05
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	0,56	1,4	23,06	23,76	25,86	27,04
6	Persentase tunasosial terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	0,68	0,85	1,3	1,42	1,57	1,69
7	Persentase WNI Migran Korban Perdagangan Orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	78,37	78,37	44,76	9,81	15,88	8,44
8	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	0	19,67	19,33	25,00	25,83	25,00
9	Persentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan	30,36	30,36	30,36	39,37	37,71	38,08



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	dan/atau asuransi kesejahteraan sosial						
10	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	8,03	11,04	20,4	28,43	42,81	46,15
11	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	0	0	8,12	32,49	49,24	79,70
12	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada tahun 2020, dari 14 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat 7 indikator yang belum tercapai targetnya yakni persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP), persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya, persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS), persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS), persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS), persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS), persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas, Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas, dan jumlah sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara. Secara



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

rinci realisasi dan gap capaian indikator program pembangunan urusan sosial disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80 *Gap Expectation* Indikator Urusan Sosial Tahun 2020

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	<i>Gap Expectation</i>
Program Penanggulangan Kemiskinan	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	1,38	1,05	0,33
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	KK	893	680	213
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,31	0,47	-0,16
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	200	300	-100
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	41,19	53,97	-12,78
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	KK	26.573	34.815	-8.242
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,31	0,61	-0,30
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	orang	381	756	-375
	Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	9,91	8,05	1,85
	Persentase lanjut usia terlanjar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	orang	2009	1633	376



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Gap Expectation
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	28,72	27,04	1,68
		orang	411	387	24
	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	1,96	1,69	0,27
		orang	204	176	28
	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	65,41	51,89	13,51
		lembaga	121	96	25
	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	51,51	46,15	5,35
		lembaga	154	138	16
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	62,94	79,70	-16,75
		orang	124	157	-33



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Program & Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Gap Expectation
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau disediakan	unit	2	5	-3
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	3	1	2
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	10,32	13,91	-3,59
		orang	2300	3101	-801
	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	50,00	50,00	0,00
		kegiatan	7	7	0

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Beberapa indikator akan diuraikan sebagai berikut:

Keluarga Miskin

Berdasarkan data BPS tahun 2020, penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 142.610 jiwa. Namun, ketika berbicara tentang sasaran program, data yang digunakan ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial RI. DTKS adalah data yang memuat informasi sosial ekonomi bagi 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia secara *by name by address*. Angka 40% penduduk tersebut ialah persentase secara nasional. Di setiap daerah, persentase penduduk yang masuk dalam DTKS berbeda-beda. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial per 2020, keluarga miskin di Provinsi Kepulauan Riau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

berjumlah 110.276 KK dengan rincian pada setiap kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.81.

Tabel 2.81 Data Keluarga Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Desil 4+	Jumlah
1	Kota Tanjungpinang	1.717	6.110	877	487	2.308	11.499
2	Kabupaten Bintan	191	1.159	2.050	2.686	4.296	10.382
3	Kota Batam	17.837	5.705	5.204	6.008	18.882	53.636
4	Kabupaten Karimun	7	49	776	4.593	11.107	16.532
5	Kabupaten Lingga	1.529	1.852	2.735	615	2.580	9.311
6	Kabupaten Natuna	157	289	645	1.514	3.760	6.365
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	21	196	436	1.897	2.551
Jumlah		21.439	15.185	12.483	16.339	44.830	110.276

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Rumah tangga dalam DTKS dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya ke dalam 10 desil, yang dapat juga dinyatakan dalam persentil 1 hingga 100:

- 1) Desil 1 (sangat miskin) : kelompok 1–10% terendah dalam DTKS.
- 2) Desil 2 (miskin) : kelompok 11–20% terendah dalam DTKS.
- 3) Desil 3 (hampir miskin) : kelompok 21–30% terendah dalam DTKS.
- 4) Desil 4 (rentan miskin) : kelompok 31–40% terendah dalam DTKS.
- 5) Desil 4 Plus (Desil 5–10) : persentil 41–100.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengambil kebijakan menjadikan kelompok Desil 1–3 sebagai kelompok sasaran yang dituju oleh program penanganan kemiskinan, sehingga target pada tahun 2018–2021 didasarkan pada data Desil 1–3 dalam DTKS 2018, yaitu 64.506 KK. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mengambil kebijakan menjadikan kelompok Desil 1–4 sebagai kelompok sasaran yang dituju oleh program penanganan kemiskinan, sehingga target mulai tahun 2022 akan didasarkan pada data Desil 1–4 dalam DTKS. Berdasarkan DTKS



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

per 2020, kelompok Desil 1–4 berjumlah 65.446 KK. Jika capaian kumulatif 2019 menggunakan penyebut 65.446 KK, maka sampai dengan 2020:

Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif:

$$\frac{\text{Jumlah KK penerima UEP dan KUBE}}{65.446 \text{ KK}} \times 100 = \frac{980 \text{ KK}}{65.446 \text{ KK}} \times 100 = 1,50 \%$$

Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya:

$$\frac{\text{Jumlah KK penerima bankesos lainnya}}{65.446 \text{ KK}} \times 100 = \frac{34.815 \text{ KK}}{65.446 \text{ KK}} \times 100 = 53,19 \%$$

Capaian ini menunjukkan bahwa cakupan penanganan keluarga miskin masih belum cukup optimal.

PMKS Lainnya

Jumlah PMKS di Provinsi Kepulauan Riau menurun yang dapat dilihat pada Tabel 2.78. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial menurun yang ditunjukkan dengan jumlah PMKS di dalam panti Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang menurun (lihat Tabel 2.82) dari jumlah PMKS. PMKS menjadi sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan yang mengancam tatanan hidup masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat perlu melakukan pelayanan sosial, guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial serta pemberdayaan sosial. Meskipun peningkatan jumlah PMKS yang dijamin sebagai bentuk pelayanan sosial merupakan capaian yang baik bagi pemerintah, namun di sisi lain, peningkatan jumlah PMKS dapat menjadi indikator kesenjangan yang terjadi di masyarakat.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.82 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Dalam
Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

No	Jenis PMKS	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak terlantar	1.709	1.709	1.699	1.707	1.734	1.761
2	Lanjut usia terlantar	530	530	544	528	555	512
3	Penyandang disabilitas	41	41	46	38	65	65
4	Tunasosial terlantar	44	44	45	29	56	50
5	WNI Migran KPO	28.071	28.071	25.878	4.324	4.700	2.369

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Tabel 2.83 Jumlah PMKS Yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016–2020**

No	Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020
1	Anak terlantar	118	59	32	24	400
2	Lanjut usia terlantar	400	570	227	200	210
3	Penyandang disabilitas	12	310	10	30	17
4	Tunasosial terlantar	17	47	13	15	13
5	WNI Migran KPO	22.000	12.565	2.755	4.457	2.369

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Jika capaian kumulatif dikonversi menjadi capaian rata-rata tahun 2016-2020 dengan jumlah PMKS yang direhabilitasi di dalam panti-panti sosial swasta sebagai angka penyebut, maka capaian rata-rata hingga 2020 diperlihatkan pada Tabel 2.84. Capaian tersebut menunjukkan masih rendahnya cakupan penanganan anak terlantar,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, tunasosial terlantar, dan WNI Migran Korban Perdagangan Orang.

Tabel 2.84 Capaian Kumulatif yang Dikonversi Jumlah PMKS yang Direhabilitasi Di Dalam Panti Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020

Jenis PMKS	Jumlah rata-rata PMKS per tahun yang dibantu Pemprov pada tahun 2016–2020 (orang)	Populasi PMKS di dalam panti pada 2020 (orang)	Nilai Capaian Rata-Rata s.d. 2020 (%)
Anak terlantar	127	1.761	7,27
Lanjut usia terlantar	301	512	59,19
Penyandang disabilitas	20	65	39,06
Tunasosial terlantar	16	50	37,47
WNI Migran KPO	8.829	2.369	77,09

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Panti Sosial

Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum memiliki UPTD Panti Sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PMKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PMKS ke UPTD panti sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PMKS yang direhabilitasi di 123 panti swasta. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial dari tahun 2016-2020, masing-masing untuk anak (lihat Tabel 2.85), lanjut usia (lihat Tabel 2.86), dan penyandang disabilitas (lihat Tabel 2.87).



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.85 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Tahun 2016–2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	18	19	19	17	16
2	Kabupaten Bintan	17	17	18	14	14
3	Kota Batam	62	62	64	74	74
4	Kabupaten Karimun	8	10	10	7	7
5	Kabupaten Lingga	-	1	1	2	2
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		105	109	113	114	113

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.86 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Tahun 2016–2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	1	1	1	1	1
2	Kabupaten Bintan	3	3	3	3	4
3	Kota Batam	3	3	3	3	3
4	Kabupaten Karimun	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Lingga	1	1	1	1	1
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		8	8	8	8	9

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.87 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2016–2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	-	-	-	-	-
2	Kabupaten Bintan	-	-	-	-	-
3	Kota Batam	1	1	1	1	2
4	Kabupaten Karimun	-	-	-	-	-
5	Kabupaten Lingga	-	-	-	-	-
6	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	-	-	-	-
Provinsi Kepulauan Riau		1	1	1	1	2

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sementara itu, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Kepulauan Riau di setiap kabupaten memiliki jumlah yang tidak merata. Sebagai contoh, Forum CSR yang hanya terdapat di Kota Batam dan Kabupaten Kepulauan Anambas (lihat Tabel 2.88).

Tabel 2.88 Profil Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Kabupaten/Kota	PSM	TKSK	LK3	FCU	LKS	Karang Taruna	Forum CSR	WKSBM
Kota Tanjungpinang	17	4	1	-	2	30	-	-
Kabupaten Bintan	28	10	1	1	1	40	-	53
Kota Batam	22	12	1	27	1	50	5	-
Kabupaten Karimun	38	12	1	-	1	40	-	-
Kabupaten Lingga	66	13	1	-	1	20	-	-
Kabupaten Natuna	1	15	1	-	1	10	-	-
Kabupaten Kepulauan Anambas	3	9	1	-	1	10	7	-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kabupaten/Kota	PSM	TKSK	LK3	FCU	LKS	Karang Taruna	Forum CSR	WKSBM
Kepulauan Anambas								
Jumlah	175	75	7	28	8	200	12	53
dalam Provinsi	250		35		273			

Keterangan:

PSM	: Pekerja Sosial Masyarakat
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
LK3	: Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Keluarga
FCU	: Family Care Unit
LKS	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
CSR	: Corporate Social Responsibility
WKSBM	: Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keberadaan PSKS diharapkan dapat membantu menangani masalah kesejahteraan sosial di Provinsi Kepulauan Riau lebih baik. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang dimiliki masih belum cukup untuk menangani keseluruhan masalah sosial yang ada. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah rumah tangga miskin pada tahun 2019 di setiap kabupaten/kota. Penurunan jumlah keluarga miskin memang terjadi di Kota Batam dan Tanjungpinang pada tahun 2019, namun tidak terlalu signifikan. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah keluarga miskin mengalami kenaikan di semua kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau selain Kota Batam yang mengalami penurunan (lihat Tabel 2.89). Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sinergitas semua *stakeholder* terkait, dan aksi kolaboratif menjadi salah satu kunci keberhasilan penanganan masalah sosial.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.89 Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Diverifikasi Menurut
Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Pada Tahun 2018-2020

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	10.677	10.320	11.499
2	Kabupaten Bintan	-	9.724	10.382
3	Kota Batam	56.388	54.562	53.636
4	Kabupaten Karimun	-	13.929	16.532
5	Kabupaten Lingga	-	8.575	9.311
6	Kabupaten Natuna	-	4.932	6.365
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	-	2.531	2.551
Provinsi Kepulauan Riau		67.065	104.573	110.276

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib Non-Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan:

1. Urusan Tenaga Kerja

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian.

Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi *output* produksi. Capaian indikator kinerja pada urusan tenaga kerja secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 2.90.

Tabel 2.90 Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Karakteristik	2016	2017	2018	2019	2020
Angka partisipasi angkatan kerja	931,435	966,091	970,132	1.005,161	1.062,087*
Tingkat partisipasi angkatan kerja	66,00	66,41	64,72	64,76	67,50*
Pencari kerja yang ditempatkan	56,40 %	66,91 %	63,80 %	60,81 %	*
Tingkat pengangguran terbuka	7,69	7,16	7,12	6,91	5,57*
Keselamatan dan perlindungan	1,38	1,73	2,51	2,74	3,15*
Persentase Tenaga Kerja Asing yang diawasi (Jumlah Tenaga Asing yang diawasi/Jumlah Tenaga Asing)	n/a**	n/a **	1,79	11,56	n/a
Besaran Pemeriksaan Perusahaan	22,70 %	24,64 %	25,05 %	28,18 %	32,09 %*
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	3,97 %	3,16 %	4,12 %	2,79 %	2,30 %
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	42,63	0	52,30	40,53	n/a
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	130	0	0	40	n/a



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Karakteristik	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase lulusan BLK yang diterima kerja	80 %	75 %	86,04 %	70 %	n/a

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Keadaan tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau secara rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Angkatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran jika dibanding keadaan Agustus 2019. Jumlah angkatan kerja pada Tahun 2020 sebanyak 1.133.776 mengalami penambahan sebanyak 128.616 orang dibandingkan keadaan 2019. Angkatan kerja yang bekerja sebanyak 1.016.600, sedangkan yang menganggur sebanyak 117.176 orang (Tabel 2.91).

Tabel 2.91 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja, Penduduk Bekerja, dan Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Penduduk Bekerja		Pengangguran	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
2015	891.988	836.670	93,80	55.318	6,20
2016	931.436	859.813	92,31	71.622	7,69
2017	966.091	896.000	92,74	69.160	7,16
2018	970.132	901.019	92,88	69.113	7,12
2019	1.005.160	935.682	93,09	69.478	6,91
2020	1.133.776	1.016.600	89,66	117.176	10,34

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja. Secara garis besar jumlah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang beriringan dengan penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang juga bertambah setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 dan 2019 penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun. Namun, pada tahun 2020 angka tersebut kembali mengalami peningkatan sebesar 1,52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan nilai ini sangat dipengaruhi oleh dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap dunia kerja. Jumlah angkatan kerja diharapkan untuk ke depannya lebih meningkat agar semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 2.92 Jumlah dan Persentase Angkatan Kerja dan TPAK Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020**

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (orang)	Persentase TPAK
2015	891.988	65,07
2016	931.435	65,93
2017	966.091	66,41
2018	970.132	64,72
2019	1.005.160	64,76
2020	1.133.776	66,28

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka Tahun 2021

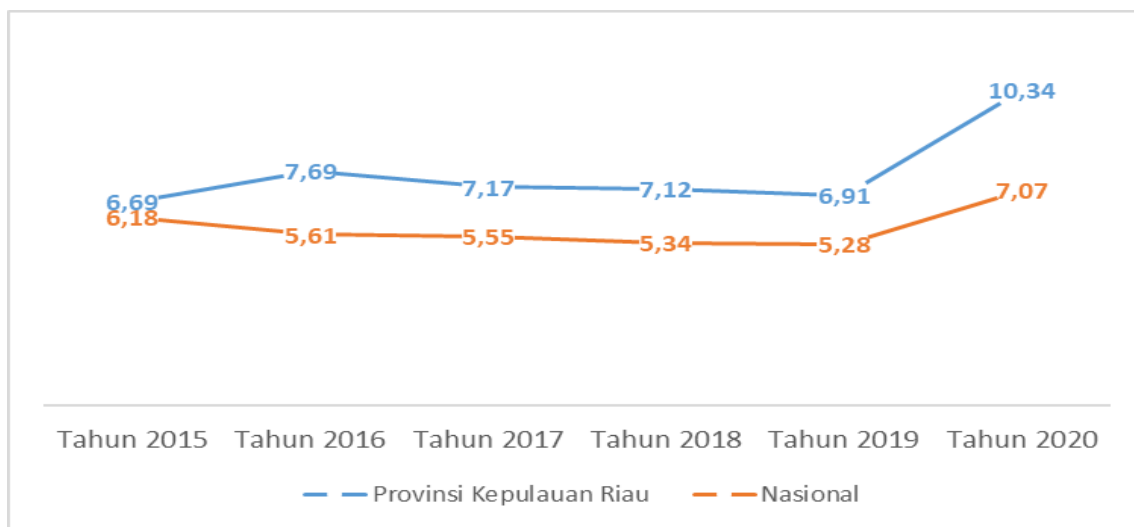
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Jumlah pengangguran pada 2020 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 117.176 orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dimana TPT Agustus 2020 sebesar 10,34 persen atau naik sebesar 3,43 persen poin apabila dibandingkan dengan TPT Agustus 2019, dimana TPT Agustus 2019 sebesar 6,91 persen. Meski demikian, Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau mencatat TPT sebesar 6,91 persen menempatkan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah dengan angka pengangguran tertinggi keempat di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah).

Gambar 2.54 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Berdasarkan kabupaten/kota, terdapat satu kota yang memiliki TPT di atas TPT Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kota Batam untuk tahun 2020, Kabupaten Bintan untuk Tahun 2019, Kota Batam untuk untuk Tahun 2018, dan Kabupaten Bintan di Tahun 2017 (Tabel 2.93).

Tabel 2.93 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Wilayah	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Riau	7,16	7,12	6,91	10,34
Tanjungpinang	7,11	5,49	5,64	9,30
Bintan	8,08	5,89	8,01	8,86

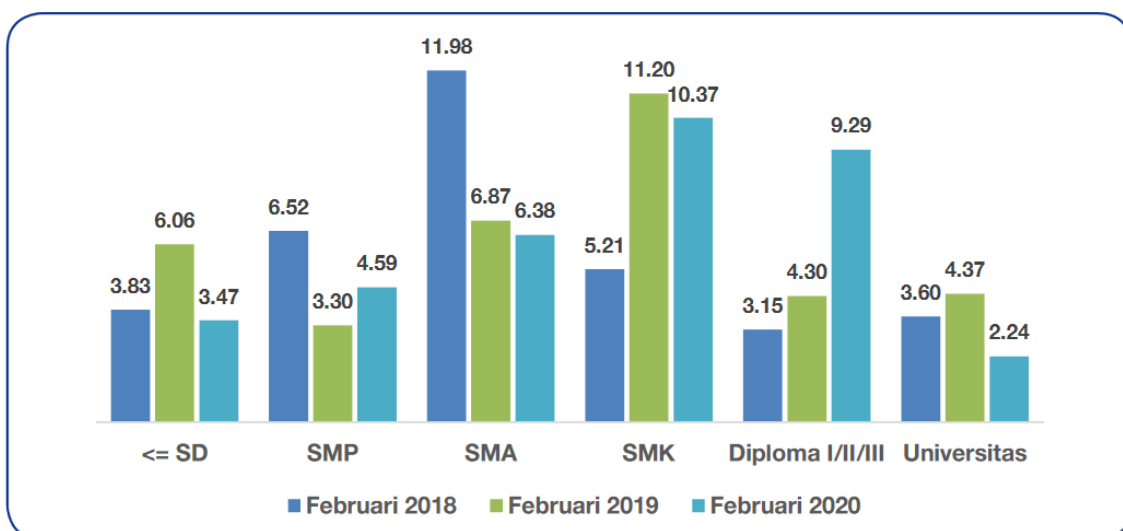


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Wilayah	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Batam	7,82	8,93	7,72	11,79
Karimun	5,7	2,45	5,46	8,36
Lingga	3,23	3,65	4,01	4,41
Natuna	4,07	3,52	3,33	4,10
Kepulauan Anambas	5,18	2,46	2,91	3,44

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Dilihat dari tingkat pendidikan pada Februari 2020, TPT untuk SMK masih mendominasi di antara tingkat pendidikan lain yaitu sebesar 10,37 persen. TPT tertinggi berikutnya terdapat pada Diploma I/II/III sebesar 9,29 persen. Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. TPT pada tingkat Universitas, SD dan SMA menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2019. Pada tingkat Universitas, TPT sebesar 2,24 persen, sedangkan pada TPT tingkat SD adalah 3,47 persen dan TPT SMA sebesar 6,38 persen (Gambar 2.52).



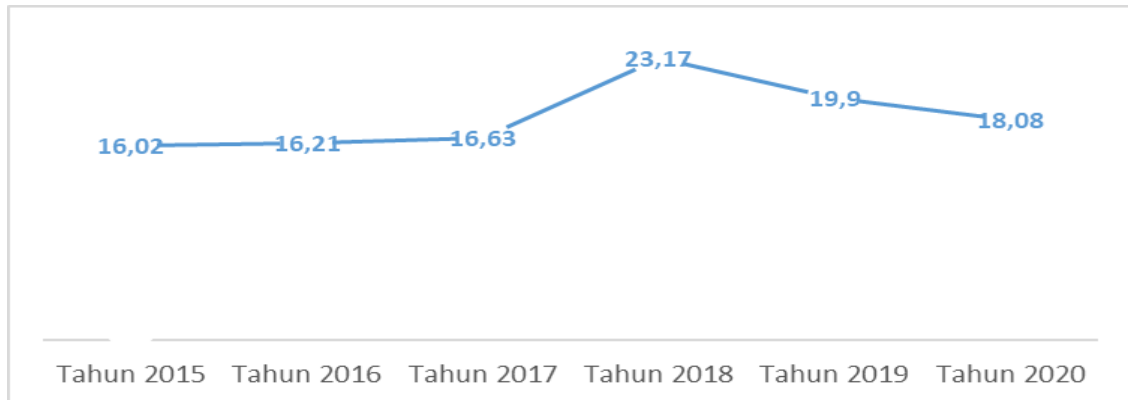
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

**Gambar 2.55 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang
Ditamatkan di Provinsi Kepulauan Riau, Februari 2018 - Februari 2020**



Pengangguran pada Kelompok Usia Muda

Penduduk angkatan kerja usia muda adalah penduduk yang berusia 15-24 tahun, karena usia 25 tahun sudah dianggap sebagai penduduk dewasa. Adapun persentase tingkat pengangguran terbuka umur muda di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.56 berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 (diolah)

Gambar 2.56 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Umur Muda di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Pada tahun 2020, TPT penduduk usia muda sebesar 18,08 persen yang artinya dari 100 penduduk angkatan kerja usia 15-24 tahun terdapat 18 orang pengangguran. Jika dibandingkan dengan kategori sebelumnya, maka didapatkan bahwa TPT penduduk angkatan kerja usia muda lebih rendah dibanding TPT total penduduk angkatan kerja. Meskipun TPT usia muda 2020 naik dibanding tahun sebelumnya, namun secara jumlah pengangguran usia muda jauh lebih tinggi dibanding usia yang lain. Terdapat 44.208 orang pengangguran usia muda dari 117,176 orang pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau atau sebesar 37,73 persen.

Pencari Kerja Yang Sudah Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan menggambarkan banyaknya pencari kerja yang memperoleh pekerjaan. Kondisi perekonomian di beberapa kabupaten/kota mulai menunjukkan tren yang positif bagi terserapnya tenaga kerja. Seperti Kota Batam pada tahun 2020 yang masih merupakan pusat aktivitas perekonomian di Kepulauan Riau, menunjukkan bahwa sebanyak 2.860 para pencari kerja telah ditempatkan.



Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan pada dasarnya mengatur berbagai norma yang mencakup norma pelatihan, norma penempatan, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, dan norma hubungan kerja. Untuk menjaga pelaksanaan aturan ketenagakerjaan, perlu dilakukan pengawasan ketenagakerjaan. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019 pengawasan terhadap perusahaan mengalami tren yang meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah pengawas dan bertambahnya unit pelayanan teknis pengawasan yang berada di daerah seperti Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Pelaksanaan pengawasan bertujuan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan memberi penerangan teknis serta pembinaan kepada pengusaha atau pengurus dan atau tenaga kerja tentang hal-hal yang dapat menjamin pelaksanaan efektif peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan tentang hubungan kerja dan keadaan ketenagakerjaan dalam arti yang luas. Selain itu juga untuk mengumpulkan bahan-bahan guna pembentukan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang baru.

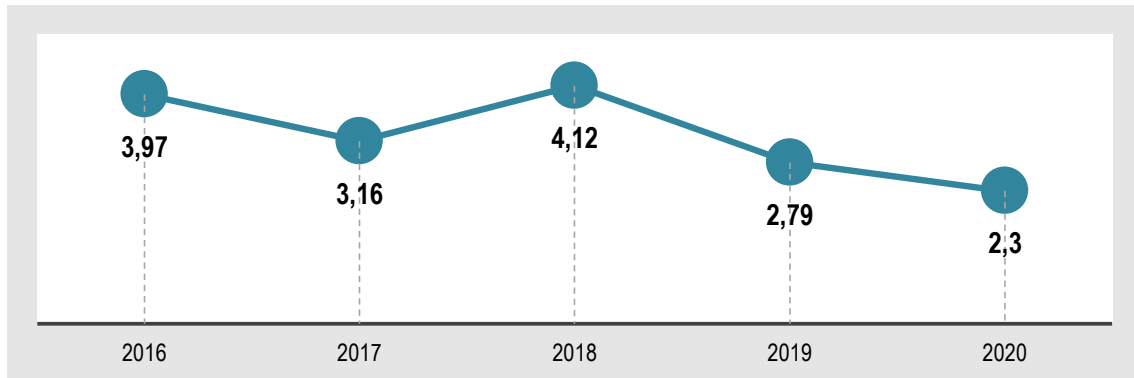
Pengawasan ketenagakerjaan penting dilakukan sebagai dasar untuk merancang, mendorong dan berkontribusi pada pengembangan budaya pencegahan yang mencakup semua aspek ketenagakerjaan seperti: hubungan industrial, upah, kondisi kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta permasalahan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan jaminan sosial.

Pengawasan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja dari tahun ke tahun terus meningkat. Seperti Pengawasan SMK3 meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.



Hubungan Industrial

Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun dalam tiga tahun terakhir di Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun.



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.57 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Tahun 2016 – 2020

Sengketa antara pengusaha-pekerja tidak terlepas dari permasalahan syarat kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti: (1) Peraturan Perusahaan (PP) yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan, (2) Perjanjian Kerja Bersama, yang merupakan hasil perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (3) PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu)/Pekerja Kontrak yang didasarkan jangka waktu, atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, dan (4) PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)/Pekerja Permanen.

Tabel 2.94 Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Indikator Hubungan Industrial

No	Subindikator	Nilai Aktual			
		2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Peraturan Perusahaan yang disahkan	18,41	22,59	10,32	0,37
2	Tingkat PKB yang didaftarkan	2,95	3,28	1,49	0,02
3	Tingkat LKS Bipartit di Perusahaan	26,61	29,38	1,47	0,03



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Subindikator	Nilai Aktual			
		2017	2018	2019	2020
4	Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial	0,78	0,65	84,26	22,02

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kondisi hubungan industrial tahun 2017-2020 mengalami tren yang menurun. Hal ini terlihat dari nilai aktual peningkatan Perjanjian Perusahaan yang disahkan mengalami penurunan dari 22,59 pada tahun 2018 menjadi 0,37 pada tahun 2020. Demikian juga Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan dari 2.95 persen pada tahun 2017 menjadi 0,02 persen pada tahun 2020. Tingkat LKS Bipartit di perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 26,61 tahun 2017 menjadi 0,03 persen pada tahun 2020. Upaya ini secara signifikan dapat meningkatkan angka perselisihan hubungan industrial dari 0,78 menjadi 22,02 persen.

Berdasarkan data besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami fluktuatif. Perselisihan yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama selama periode 5 tahun, cukup tinggi pada tahun 2017 dan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 sebesar 35,66% dan pada Februari 2020 mengalami kenaikan perselisihan sampai pada 57.14 persen. Salah satu masalah yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuai pendapatan upah yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat sementara upah yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerakan protes kaum pekerja/buruh.

Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

jabatan atau pekerjaan. Berdasarkan data pemerintah, indikator yang digunakan untuk pelatihan kerja ini antara lain: Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, dan Persentase lulusan BLK yang diterima kerja.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan kualitas sumber daya manusia yang unggul seharusnya memperhatikan kesetaraan gender dan anak. Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 suburusan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Adapun capaian indikator kinerja PPPA dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Indikator Kinerja	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO	33,16	29,52	27,77	28,08	30,52	33,42
2.	Rasio Kekerasan Terhadap Anak	4,43	4,22	3,39	3,01	3,09	2,90
3.	Anggaran Responsif Gender (ARG)	3,68	4,68	6,49	9,32	11,24	5,34
4.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,15	65,60	66,96	66,18	61,58	62,02
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,22	93,13	92,96	92,97	93,10	93,31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Proses pembangunan harus memperhatikan keseimbangan pembangunan berbasis gender, namun kadangkala pembangunan yang dilakukan tidak membawa keberuntungan bagi kaum perempuan. Isu gender menjadi salah satu poin dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan kelima SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Memberdayakan Kaum Perempuan”. Untuk melaksanakan SDGs, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pembangunan manusia diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Pendapatan. Perkembangan IPG dan kompositnya pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.96. Angka IPG berfluktuasi dan cenderung stagnan dimana IPG kurang dari 100, artinya IPM laki-laki lebih tinggi dibanding IPM perempuan yang menunjukkan masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun masih terdapat kesenjangan, namun perkembangan IPG Provinsi Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir lebih baik dibandingkan IPG Nasional (lihat Gambar 2.58).

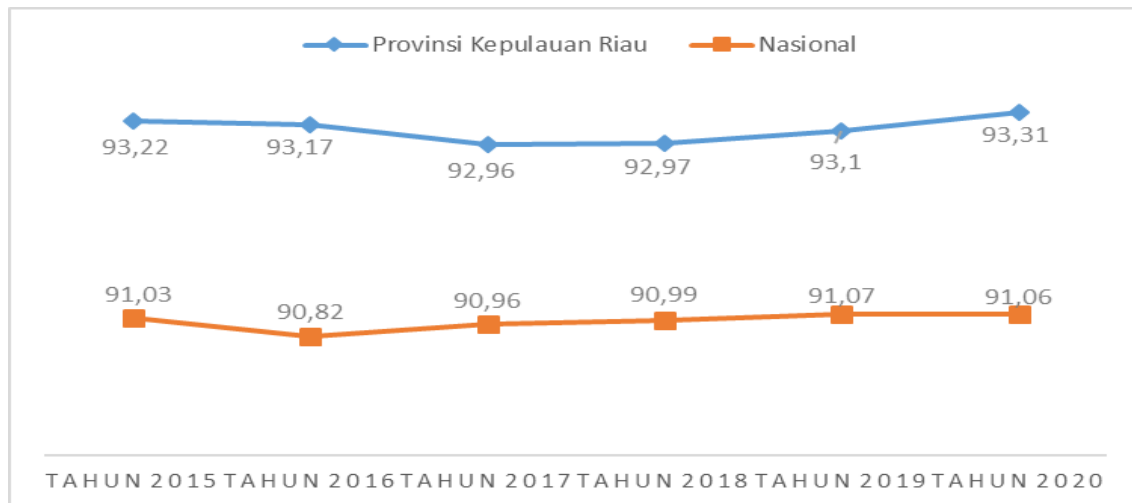
Tabel 2.96 IPM, IPG, dan IPG Komposit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Angka Harapan Hidup		Harapan Lama Sekolah		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Perkapita		IPM		IPG
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
2015	67,54	71,38	12,39	12,82	9,86	9,36	18.921	11.681	77,44	72,19	93,22
2016	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	77,73	72,39	93,17
2017	67,60	71,40	12,76	12,88	10,00	9,57	19.398	11.951	78,25	72,74	92,96
2018	67,76	71,56	12,82	12,89	10,01	9,60	19.939	12.268	78,65	73,12	92,97
2019	69,92	71,73	12,83	12,90	10,19	9,77	20.541	12.712	79,23	73,76	93,10
2020	68,08	71,90	12,84	12,97	10,25	9,98	20.222	12.462	79,27	73,97	93,31

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.58 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2015-2020

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. IDG digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Nilai Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kepulauan Riau tahun 2019 sebesar 61,58. (lihat Tabel 2.97). Nilai IDG di tahun 2019 dan 2020 tersebut menjadi nilai IDG yang terendah yang diperoleh Provinsi Kepulauan Riau sejak 6 tahun terakhir. Angka pencapaian IDG masih rendah dibanding nasional.

Tabel 2.97 IDG dan Komposit IDG Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
2015	13,33	46,41	27,12	62,15
2016	16,28	45,81	27,76	65,60
2017	17,78	41,63	28,26	66,96
2018	17,78	37,98	28,37	66,18
2019	11,11	43,16	28,61	61,58
2020	11,11	46,12	28,83	62,02

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pencapaian masing-masing komposit IDG menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan perempuan sangat rendah persentasenya. Hal ini disebabkan karena rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dari tahun 2017 sebesar 49,96 menurun 3,78 poin menjadi 46,18 pada tahun 2018 begitu juga pada tahun 2019 mengalami penurunan 1,32 poin menjadi 44,86, meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 48,93.

Tabel 2.98 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota

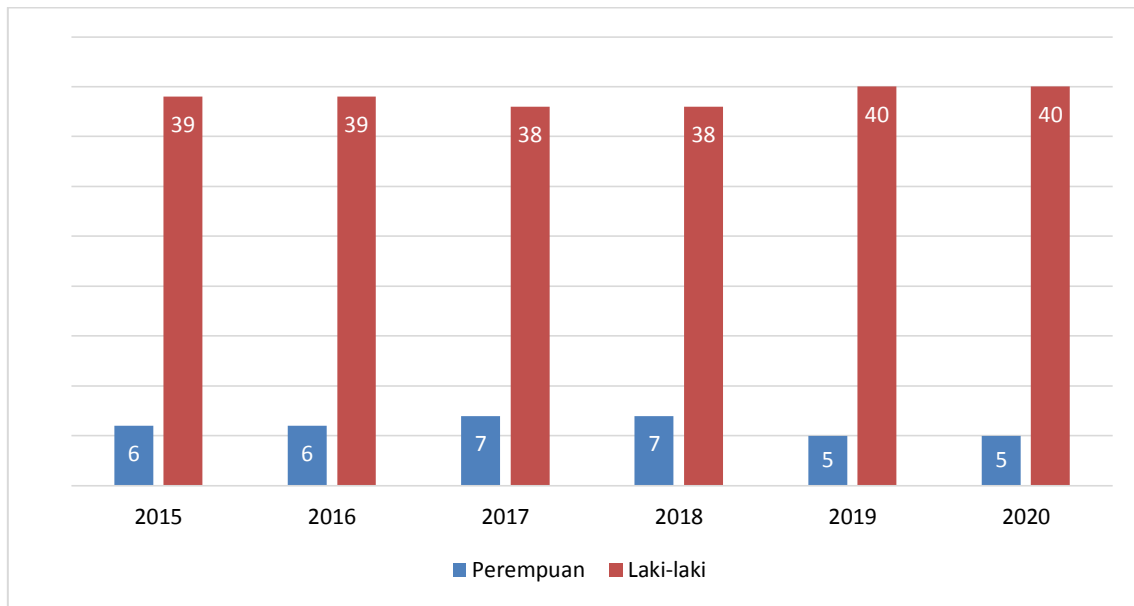
Kabupaten/Kota	2017			2018			2019			2020		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
Kabupaten Karimun	83,66	42,13	63,23	79,67	46,45	63,31	79,53	36,02	58,09	77,80	41,02	59,76
Kabupaten Bintan	83,22	39,83	62,19	81,32	42,16	62,34	80,11	42,69	61,98	82,39	38,36	61,28
Kabupaten Natuna	86,34	55,65	71,55	82,57	51,31	67,48	84,22	49,81	67,59	85,49	52,05	69,39
Kabupaten Lingga	81,08	46,06	63,87	83,17	48,99	66,37	84,37	45,73	65,34	84,12	44,24	64,56
Kabupaten Kepulauan Anambas	82,19	51,21	67,33	84,35	53,57	69,28	82,99	42,88	63,63	85,50	49,90	68,40
Kota Batam	82,16	52,54	67,65	84,28	45,65	65,25	85,91	46,05	66,35	84,25	51,69	68,33
Kota Tanjungpinang	79,19	49,74	64,65	76,59	47,63	62,19	78,84	46,82	62,90	77,36	47,49	62,56
Provinsi Kepulauan Riau	82,21	49,96	66,41	82,68	46,18	64,72	83,92	44,86	64,76	82,86	48,93	66,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Rendahnya indeks komposit keterlibatan perempuan di parlemen dapat terlihat dari jumlah dan persentase keterwakilan perempuan di legislatif belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Jumlah anggota legislatif perempuan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2018 sejumlah 7 orang atau 15,56 persen, pada tahun 2019 dan 2020 menurun 4,45 persen menjadi 11,11 persen atau sebanyak 5 orang (lihat Gambar 2.59).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.59 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Sedangkan rendahnya persentase perempuan sebagai tenaga profesional di Provinsi Kepulauan Riau, terlihat mulai menurun dari tahun 2016 yang menduduki sebagai pejabat eselon II sebanyak 4 orang menurun menjadi 2 orang pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi 4 orang sampai tahun 2019 dan 2020 jumlahnya tetap dan tidak mengalami perubahan (Tabel 2.99).

Tabel 2.99 Pejabat Eselon II, III dan IV di Provinsi Kepulauan Riau

Pejabat Eselon	2016			2017			2018			2019			2020		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
II	35	4	39	41	2	43	40	4	44	37	4	41	35	4	39
III	158	52	210	139	51	190	144	51	195	153	56	209	130	50	180
IV	338	200	538	338	189	527	344	204	548	370	215	585	353	211	564

Sumber: BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pembangunan gender selayaknya berasosiasi dengan pemberdayaan gender di suatu wilayah. Pemetaan wilayah berdasarkan capaian IPG dan IDG diperlukan sebagai dasar kebijakan yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik wilayah tersebut. Ada empat kelompok dalam memetakan provinsi berdasarkan kondisinya. Kelompok

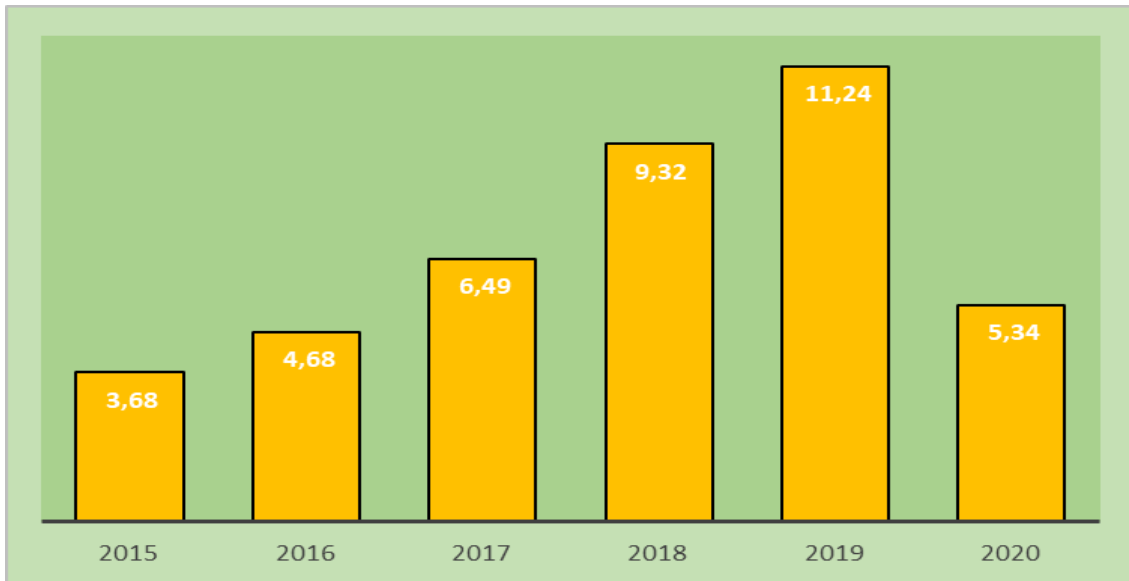


kuadran I merupakan provinsi dengan IPG dan IDG di atas angka nasional, kuadran II merupakan provinsi dengan kondisi IPG di atas angka nasional tetapi IDG di bawah angka nasional, kuadran III adalah provinsi dengan IPG dan IDG di bawah angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah provinsi dengan kondisi IPG di bawah angka nasional tetapi IDG di atas angka nasional. Dalam lima tahun terakhir, Provinsi Kepulauan Riau selalu berada pada kuadran II.

Anggaran Responsif Gender (ARG)

Anggaran Responsif Gender Kepulauan Riau dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan namun di tahun 2020 ARG mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 5,34 atau turun sebesar 5,9 poin persen dibanding tahun 2019. Turunnya anggaran ini disebabkan oleh refocusing anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Namun demikian, secara umum anggaran ARG meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan ARG yang disusun berdasarkan analisis GBS dan GAP tetapi belum secara signifikan menjawab permasalahan perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan isu tematik gender di OPD belum terakumulasi dengan baik, salah satunya faktornya yaitu belum didukung adanya data pilah yang berkualitas yang berperan penting di dalam penyusunan Anggaran Responsif Gender.

Program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terus mendapat perhatian dalam kebijakan pembangunan daerah. Program-program yang dilaksanakan melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG).



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

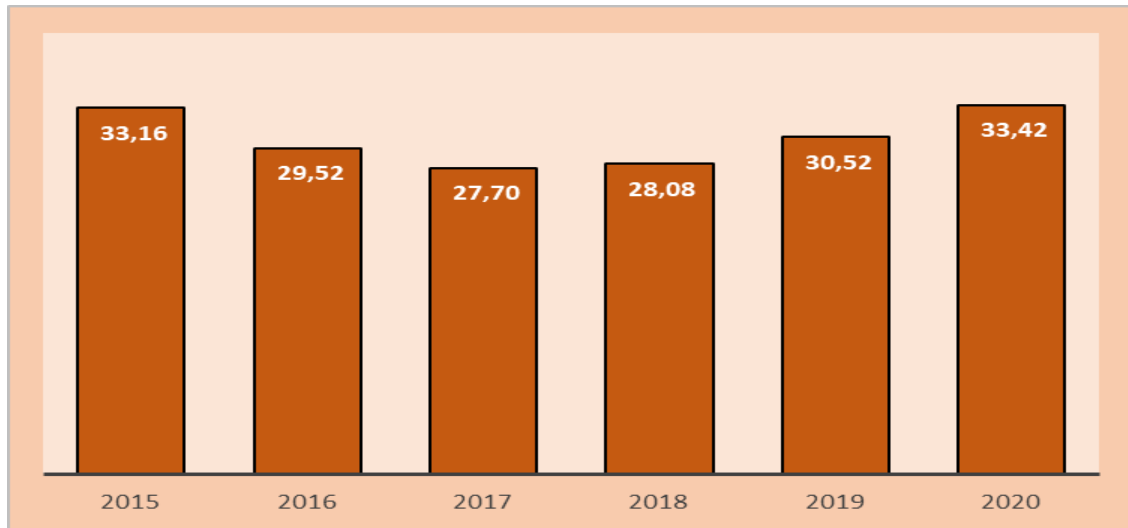
Gambar 2.60 Anggaran Responsif Gender (ARG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO

Indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO merupakan indikator yang menggambarkan berapa jumlah perempuan yang mengalami kekerasan per 100.000 penduduk perempuan. Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah border perbatasan antarnegara, sehingga Kepulauan Riau sebagai daerah transit. Untuk itu perlu memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Ini menunjukkan bahwa jumlah kekerasan pada perempuan belum banyak perbaikan karena dalam tiga tahun terakhir rasio kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren naik (lihat Gambar 2.61) hal ini seiring dengan meningkatnya berkurangnya upaya pemerintah dalam melaksanakan komunikasi informasi dan edukasi terkait kekerasan terhadap perempuan baik upaya pencegahan maupun penanganan akibat dampak pandemic Covid-19.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.61 Grafik Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO Tahun 2016-2020

Adapun kekerasan terhadap perempuan tahun 2015 sampai dengan 2020 meliputi 7 (tujuh) bentuk kekerasan yaitu fisik, psikis, seksual, eksploitasi, TPPO, penelantaran, dan lainnya (lihat Tabel 2.100). Secara umum, setiap tahun bentuk kekerasan terhadap perempuan bervariasi jumlahnya hal ini berkaitan dengan karakteristik kasus kekerasan yang dihadapi dan kompleksitas faktor penyebabnya. Jumlah kekerasan terhadap perempuan menurut tempat kejadian dapat dipilah menjadi tiga yaitu rumah tangga, tempat kerja, dan lainnya. Pada tahun 2016 sampai dengan 2020 kekerasan terhadap perempuan lebih banyak terjadi di rumah tangga, sedangkan kejadian di tempat kerja cukup sedikit.

Tabel 2.100 Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Fisik	83	43	72	62	84	78
2.	Psikis	93	21	51	49	86	88
3.	Seksual	68	102	32	48	59	92
4.	Eksplorasi	13	31	9	8	6	10

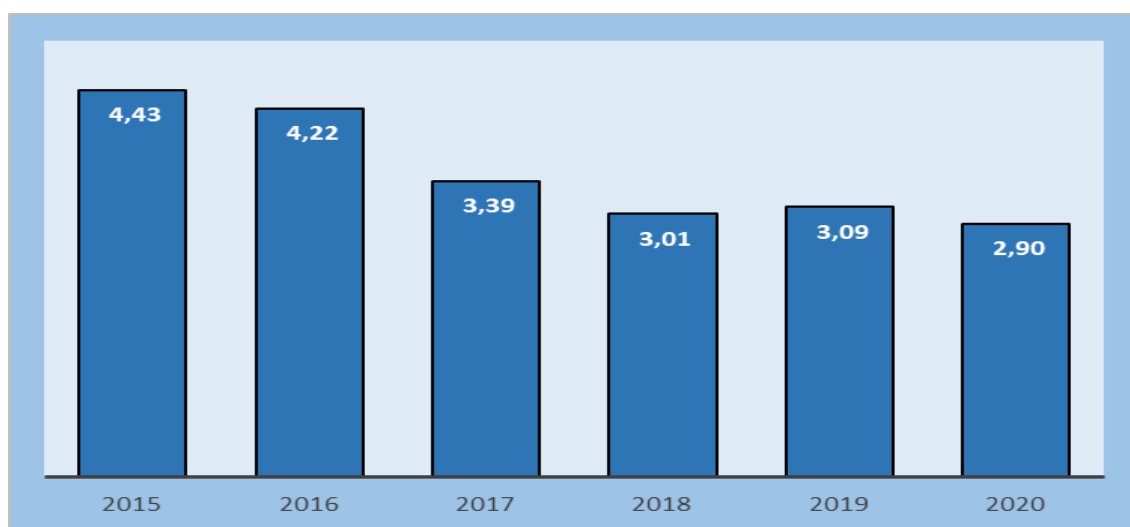


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Bentuk Kekerasan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5.	TPPO	20	41	15	43	26	50
6.	Penelantaran	26	20	35	36	43	18
7.	Lainnya	17	5	54	48	8	16
Jumlah		320	293	268	294	312	352

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Demikian pula halnya dengan rasio kekerasan pada anak tahun 2015-2020 mengalami tren penurunan, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan jumlah kasus mengalami peningkatan (lihat Gambar 2.62).



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.62 Rasio Kekerasan Pada Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 - 2020

Jenis kekerasan yang paling sering terjadi pada anak pada tahun 2015-2020 adalah kekerasan fisik, eksploitasi, TPPO seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran (lihat Tabel 2.101). Dari jenis kekerasannya, kekerasan seksual masih menjadi kasus terbesar, walau mengalami tren penurunan, diikuti oleh kekerasan fisik. Adapun kekerasan psikis justru mengalami sedikit peningkatan, seperti kasus pengancaman dan perundungan. Untuk kasus anak yang mengalami penelantaran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

justru meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari Data Simfoni (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) Kementerian PPPA, komposisi jenis kekerasan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini sama dengan yang terjadi di skala nasional.

Tabel 2.101 Kekerasan yang Terjadi Pada Anak Tahun 2015-2020

No	Bentuk Kekerasan	Jumlah			
		2017	2018	2019	2020
1.	Fisik	37	40	29	75
2.	Psikis	14	17	57	55
3.	Seksual	95	50	55	115
4.	Eksplorasi	4	7	5	5
5.	TPPO	5	0	13	8
6.	Penelantaran	24	35	39	40
7.	Lainnya	69	78	42	54
Jumlah		248	227	240	232

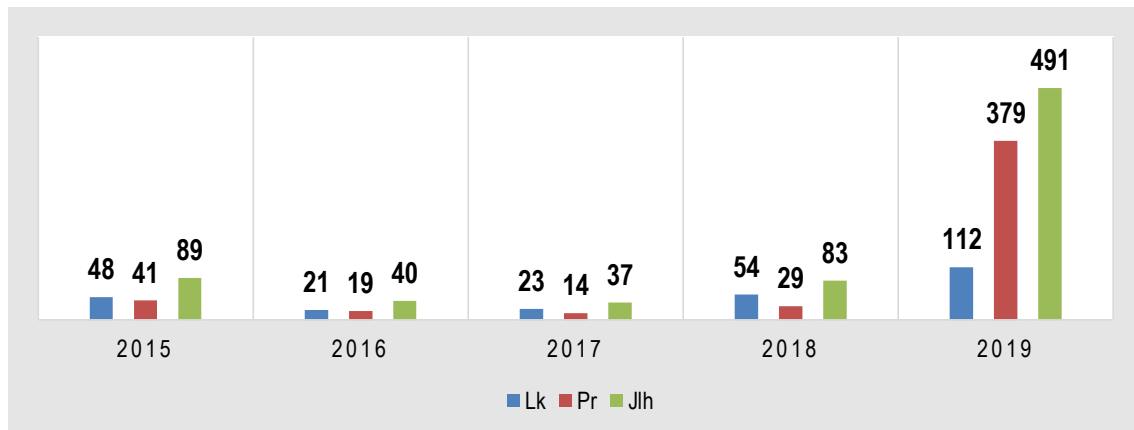
Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Bila ditelusuri lebih lanjut, dapat ditemu-kenali beberapa faktor penyebab, antara lain:

- 1) Era globalisasi menyebabkan anak-anak semakin mudah terhubung di dunia maya, hal yang tak terhindari adalah pornografi, kecanduan games, media sosial, dll. Kecanduan pornografi ini tidak saja menimpa orang dewasa tetapi juga anak-anak. Hal ini berdampak pada tingginya kasus kekerasan seksual pada anak yang pada beberapa tahun terakhir selalu menempati posisi teratas kasus kekerasan pada anak.
- 2) Kekerasan fisik dan psikis pada anak di antaranya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua dan lingkungan terhadap pengasuhan anak, serta kurangnya kepedulian masyarakat untuk melindungi anak di lingkungan masing-masing.
- 3) Kasus penelantaran banyak disebabkan oleh tingginya angka perceraian dan KDRT di masyarakat, serta masalah ekonomi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.63 Pernikahan Usia Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015–2019

Program Perlindungan Anak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan. Pemenuhan Hak anak meliputi pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Kesehatan dan Kesejahteraan, dan Hak atas Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Apabila anak terpenuhi haknya, maka akan semakin kecil anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak yang mendapatkan kekerasan dan anak disabilitas.

Untuk menurunkan angka kekerasan seksual pada anak, upaya yang sudah dilakukan pada program perlindungan anak berupa sosialisasi:

- 1) GN AKSA (Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual pada Anak) berupa menyebarkan video edukasi, leaflet, pamflet, spanduk, media sosial, dll.
- 2) Kegiatan pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan membentuk forum aktivis perlindungan anak di tingkat desa/kelurahan sebagai ujung tombak mensosialisasikan perlindungan anak, mensosialisasikan bahaya gawai, pola pengasuhan yang sesuai dengan usia anak, dll serta respon masyarakat cepat terhadap kasus. Sampai dengan 2019 telah terbentuk 69 Desa/Kelurahan PATBM atau sebesar 16,59% dari seluruh desa/kelurahan di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah aktivis sebanyak 700 orang.



- 3) PUSPAGA melakukan sosialisasi perlindungan terhadap anak berupa materi pengasuhan, perlindungan anak di keluarga, majelis taklim, di organisasi masyarakat, instansi pemerintah dan swasta.
- 4) Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) secara berkesinambungan dilakukan sebagai penguatan bagi perempuan untuk menyadari hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi, sehingga muncul keberanian untuk menyampaikan pengaduan terjadinya kekerasan. Layanan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan membentuk UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Selain itu, inovasi untuk mendekatkan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat tersedia Aplikasi CeK Dare Kepulauan Riau. Aplikasi ini dapat diakses melalui telepon genggam (gawai). Upaya pencegahan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan secara berkesinambungan memberikan jaminan rasa aman bagi perempuan dan anak, dengan demikian diharapkan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau semakin baik.

Jumlah kasus yang meningkat dapat dianggap sebagai keberhasilan yang ditandai dengan keberanian dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasusnya sebagai implikasi atas upaya komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah selama ini, serta implikasi atas tersedianya lembaga layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan yang memadai. Meski demikian, sisi ini harus tetap disikapi dengan arif, melalui upaya edukasi dan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan, hak-hak perlindungan korban, pelembagaan perlindungan perempuan dan anak terpadu, penguatan kapasitas sumber daya petugas layanan yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan layanan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah. Lokasi lembaga layanan perlindungan perempuan dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102 Lokasi Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan di Provinsi Kepulauan Riau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/Kota	Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan						
		P2TP2A	UPPA	UPTD P2TP2A	RPTC	RPSA	BP2MI	PPT RS
1	Kota Tanjungpinang	1	1	1	1		1	1
2	Kabupaten Bintan	1	1	-	-	-	-	1
3	Kota Batam	1	2	-	-	1	1	1
4	Kabupaten Karimun	1	1	-	-	-	-	1
5	Kabupaten Lingga	1	1	-	-	-	-	1
6	Kabupaten Natuna	1	1	-	-	-	-	-
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	1	-	-	-	-	-
Jumlah		7	8	1	1	1	2	5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

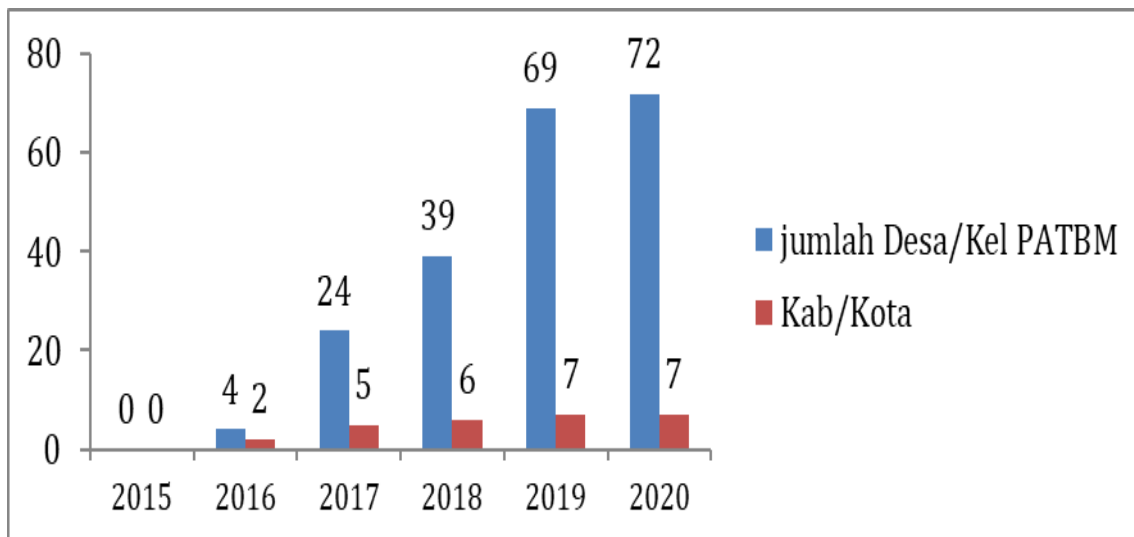
Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki lembaga layanan perlindungan perempuan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di Kepolisian. Sedangkan di tingkat Provinsi Kepulauan Riau lembaga layanan perlindungan perempuan antara lain UPTD P2TP2A Provinsi Kepulauan Riau, RPTC, RPSA, BP2MI, PPT RSUD Provinsi dan UPPA Polda Kepulauan Riau.

Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) baru digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada tahun 2015. Kemudian baru dibuat percontohannya di 4 desa/kelurahan di 2 kabupaten/kota di setiap provinsi di Indonesia pada tahun 2016. Program PATBM ini merupakan suatu program terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan peran serta masyarakat untuk turut aktif melindungi anak di lingkungan masing-masing. Berbeda dengan program-program lainnya, PATBM ini melibatkan fasilitator daerah untuk terus membimbing aktivis di wilayah kerjanya, melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Karena melihat dampak yang menggembirakan dari peran serta masyarakat, program ini mendapatkan sambutan baik di berbagai daerah, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah PATBM dari tahun ke tahun. Hingga



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

akhir 2020 sudah terbentuk 72 PATBM di seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau. Perkembangan PATBM ini dikembangkan menggunakan dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota.



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.64 Perkembangan PATBM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

3. Urusan Pangan

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja pangan, yakni ketersediaan pangan, keanekaragaman pangan, dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan mengacu pada pangan utama sebagaimana dijabarkan pada Tabel 2.103.



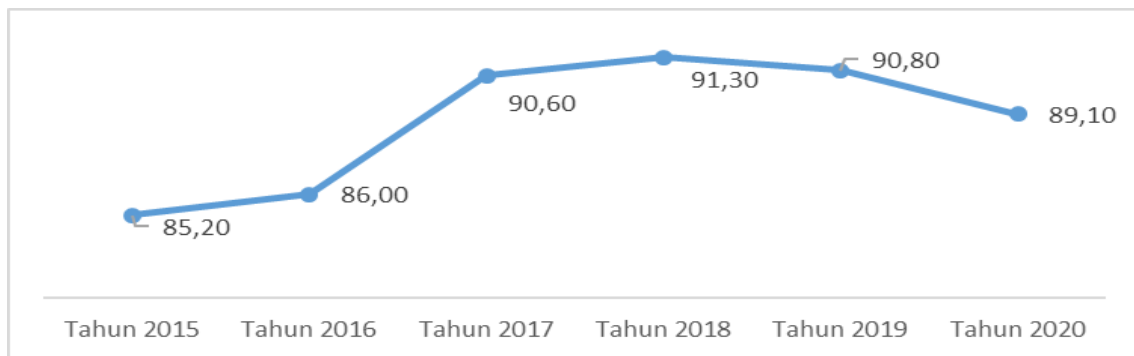
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.103 Produksi, Kebutuhan, dan Ketersediaan Pangan Utama Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Jiwa	Kebutuhan Pangan (Ton)	Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (ton)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (ton)	Ketersediaan Pangan (ton)
2015	1.973.043	168.373	566	-167.807	197.520	198.086
2016	2.028.169	178.248	370	-177.878	209.333	209.703
2017	2.082.694	186.903	379	-186.524	225.188	219.886
2018	2.136.521	191.732	491	-191.241	191.241	225.567
2019	2.189.653	190.404	491	-189.913	190.404	218.964
2020	2.242.198	194.973	491	-194.482	194.973	224.219

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Untuk mengukur keanekaragaman pangan, maka indikator yang digunakan adalah skor PPH, berikut disajikan skor PPH Kepulauan Riau.



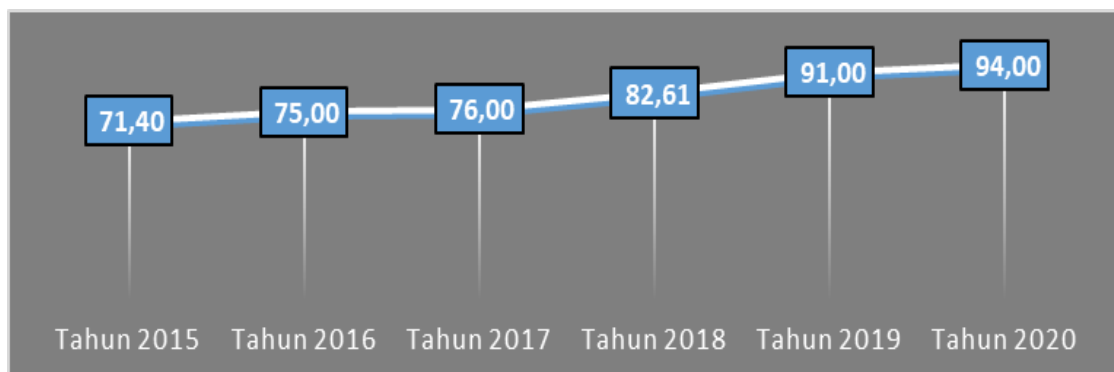
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.65 Skor PPH Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2015-2020

Untuk mengukur tingkat keamanan pangan digunakan ukuran hasil pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.66 Tingkat Keamanan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

4. Urusan Pertanahan

Kinerja urusan pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan tingkat capaian indikator persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kabupaten/Kota yang terfasilitasi, persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan jumlah penyelesaian kasus tanah negara. Adapun capaian kinerja urusan pertanahan dapat dilihat pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/ Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	n/a	n/a	100 %	100 %	100 %	100%
	Persentase luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	2,16 %	2,51 %	37,77 %	39,33 %	45,06 %	45,06 %



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Jumlah penyelesaian kasus tanah negara	n/a	n/a	1 kasus	n/a	n/a	n/a

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Selama tahun 2015-2020 hanya ada satu kasus tanah negara yaitu pada tahun 2017 terkait dengan gugatan sengketa lahan di Pasir Panjang Tanjung Siambang Desa Dompok Kecamatan Bukit Bestari. Kasus tersebut bermula dari gugatan sengketa lahan dari masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang menuntut lahan dengan dasar alas hak atas nama Trimawan Jogo Prijono dengan luas lebih kurang 5 ha yang berlokasi Pasir Panjang Tanjung Siambang RT 01 RW 02 Desa Dompok (Sekarang Kelurahan Dompok) Kecamatan Tanjungpinang Timur (sekarang Kecamatan Bukit Bestari) pada tahun 2016. Kasus tanah negara ini selesai pada tahun 2017 dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung yang mengikuti putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada tanggal 4 September 2017.

Sementara itu, masih sedikitnya luas lahan pemerintah yang bersertifikat pada tahun 2020 walaupun terdapat peningkatan antara tahun 2015-2020 dikarenakan tidak adanya bukti kepemilikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga menyulitkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan sertifikat tanah hibah dari Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan penambahan aset lahan pemerintah baik dari Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang rata-rata sudah bersertifikat sehingga mempermudah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam proses sertifikasi tanah.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.105 Luas Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Bersertifikat Tahun
2015-2020**

Tahun Sertifikat	Luas Tanah Bersertifikat (m ²)	Total Luas Tanah	Persentase Penambahan Luas Tanah Bersertifikat
s/d 2015	191.708,75	8.885.050,64	2,16
2016	32.683,00	9.382.598,64	0,35
2017	3.431.456,00	9.732.597,64	35,26
2018	167.587,00	10.769.693,49	1,56
2019	676.234,00	11.811.512,69	5,73
2020	7.690,00	11.819.202,69	0,06
Jumlah	4.507.358,75	11.819.202,69	45,11

Sumber: Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Peningkatan luas tanah bersertifikat milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan adanya penambahan aset tanah pemerintah. Tahun 2020 terdapat penambahan tanah lagi yang berasal dari rekonsiliasi aset bermasalah antara Kabupaten Bintan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 yang baru dicatat pada tahun 2020 seluas 7.690,00 m² sehingga total aset tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 seluas 11.819.202,69 m². Jumlah Aset Tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 yang bersertifikat seluas 4.507.358,75 m² dari jumlah keseluruhan seluas 11.819.202,69 m² sehingga prosentase tanah bersertifikat sebanyak 45,11%. Sedangkan sisanya seluas 7.319.533,94 m² masih dalam tahap pengurusan. Tahap pengurusan yang sedang dilakukan adalah pengajuan perjanjian kerjasama percepatan sertifikasi aset tanah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang nantinya akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2023 sehingga aset tanah Provinsi Kepulauan Riau seluruhnya bersertifikat.



5. Urusan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup berkaitan dengan menjaga kualitas lingkungan untuk kelestarian pembangunan. Selama 5 tahun belakangan kondisi lingkungan hidup di Kepulauan Riau terus menunjukkan penurunan kualitas. Ukuran kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka yang terus menurun, baik dari air udara maupun dari tutupan lahan. Berikut disajikan kinerja urusan lingkungan hidup.

Tabel 2.106 Kinerja Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,97	70.19	70.34	66.50	67,00
2.	Indeks Kualitas Air	84.67	80.00	66.67	57.85	54,00
3.	Indeks Kualitas Udara	86.61	78.60	95.47	90.83	90,59
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54.31	56.53	54.24	54.75	59,06

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

Tabel 2.106 menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara keseluruhan mengalami tren yang cenderung bergerak turun setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 kembali menguat secara komposit. Namun demikian, Indeks kualitas air secara konsisten mengalami penurunan sejak tahun 2016-2020 meskipun di saat yang bersamaan indeks kualitas udara juga ikut terus naik secara signifikan.

Kecenderungan penurunan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- 1) Adanya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Kejadian ini terjadi pada setiap tahun memasuki musim utara, hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan *tank cleaning* secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 dari kegiatan tersebut dengan baik di perairan Provinsi Kepulauan Riau sehingga limbah B3 dimaksud menyebabkan kerusakan pada kawasan pesisir di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Hal ini



merupakan ancaman paling nyata atas wilayah laut dan pantai di Kepulauan Riau adalah tumpahan minyak dan bahan-bahan kimia beracun berbahaya (B3) yang sifatnya destruktif terhadap lingkungan hidup perairan. Bahwa pencemaran tumpahan minyak di perairan Kepulauan Riau sudah berlangsung lama dan selalu terjadi setiap tahun terutama pada musim utara, sampai saat ini belum ada pelaku/kapal yang membuang limbah minyak *sludge oil* tersebut yang ditangkap dan diproses hukum. Akibat yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem laut dan pesisir laut yang berada di sekitar Pulau Bintan dan Pulau Batam. Dampak tumpahan minyak juga mencemari pesisir pantai dalam bentuk minyak hitam (*sludge oil*). Kerugian yang ditimbulkan adalah kerusakan ekosistem pesisir dan sangat merugikan terhadap sektor pariwisata dan nelayan.

- 2) Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pemahaman terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan disebabkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah limbah dari Fayankes, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang tumbuh. Hal di atas disebabkan oleh mahal biaya yang akan dikeluarkan oleh Kapal-Kapal maupun Perusahaan dalam Pengelolaan Limbah B3 dan didukung data Perusahaan yang melakukan Pengumpulan, Pengangkutan Limbah B3 di Provinsi Kepulauan Riau s.d Tahun 2021 yakni Limbah Padat sebanyak 3.513.607 Kg, Sludge Oil sebanyak 1.020.867 Kg, Limbah Cair sebanyak 1.244.945 Kg.

- 3) Belum optimalnya penanganan limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* yang mencemari di wilayah pesisir khususnya wilayah pantai Kota Batam



dan Kabupaten Bintan dikarenakan keterbatasan anggaran. Limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* yang mencemari pantai wajib dibersihkan, ditempatkan dalam kemasan drum, diletakkan pada TPS Khusus B3, kemudian diangkut dan dimusnahkan oleh pihak ketiga yang memiliki izin. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan amanat Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2018 telah dilakukan pengangkutan dan pemusnahan limbah tersebut sebanyak 100 drum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau.

- 4) Belum optimalnya pelaksanaan amanat Gubernur Kepulauan Riau melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 742 Tahun 2018 Tentang Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan tidak mendapat anggaran. Tim Daerah Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut Provinsi Kepulauan Riau ini dibentuk oleh Gubernur Kepulauan Riau dengan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam menangani tumpahan minyak di laut dan/atau pembuangan limbah minyak hitam/*sludge oil* ke laut. Tim ini diketuai oleh Gubernur Kepulauan Riau dan Sekretaris Daerah sebagai penerima mandat dari gubernur dan sebagai pelaksana komando di darat. Tim ini beranggotakan: Komandan Lantamal IV, Kapolda Kepulauan Riau, Guskamla, Bakamla Zona Maritim Barat, Kanwil Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau, Syahbandar Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Pangkalan PLP Tanjung Uban, SKK Migas, BP Batam, Universitas Maritim Raja Haji, BMKG Daerah, LAPAN, Lemigas, KTNA, Asosiasi Pengelola Pantai, Porwasmas, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- 5) Minimnya penanganan dan sarana/prasarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) di Provinsi Kepulauan Riau. Limbah B3 (limbah medis yang bersumber dari Fasyankes) tersebut tidak dapat dikelola oleh Fasyankes karena tidak memiliki sarana pengelolaan yang berizin, seperti incinerator yang berizin. Selama ini pihak Fasyankes bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, dan pemusnahan limbah B3 (limbah medis) yang ada di Kota Batam. Masalah yang timbul adalah sulitnya mendapat akses penyeberangan untuk mengangkut limbah B3 dari Pulau Bintan ke Pulau Batam.
- 6) Rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan membuang sampah tidak pada tempatnya sehingga banyak sampah rumah tangga dan sejenisnya yang mencemari laut, khususnya dalam radius 0-12 mil laut yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya, dan juga banyaknya kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi kendaraan.

Tabel 2.107 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	n/a	239.768,72	269.394,77	359.838,29	314.192,80
2.	Jumlah Volume produksi sampah (ton)	-	614.916,34	635.285,25	656.533,36	678.571,64
3.	Persentase tidak tertangani	-	46%	40%	24%	32%
4.	Persentase tertangani	-	54%	60%	76%	68%
5.	Jumlah limbah B3 yang terkelola (100 perusahaan sektor industri) (ton)	1.722.224	1.798.232	1.896.688	2.221.028	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kemampuan penanganan sampah berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Dari tahun 2016 sampai tahun 2020 tidak terdapat penambahan tempat pembuangan sampah. Pada sisi lain penduduk terus bertambah yang menyebabkan jumlah sampah yang diproduksi terus meningkat.

Tabel 2.108 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah TPS			1.023	1.026	1.026
2.	Daya Tampung TPS (ton)			1,7	1,7	1,7
3.	Jumlah Penduduk		1.540.936	2.203.505	2.269.562	2.337.998
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk			1: 845 = 0,00119	1: 868 = 0,00115	1: 893,94 = 0,00112

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

Tabel 2.109 Uji Pencemaran Air Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Uji pencemaran air	8	5	5	4	4

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 2021

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat merupakan salah satu target pencapaian dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi, sehingga kinerja pelayanan pada urusan ini dapat dilihat pada pencapaian beberapa indikator antara lain rasio penduduk ber-KTP, rasio bayi berakta kelahiran, rasio pasangan berakta nikah, kepemilikan KTP, kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, ketersediaan database kependudukan skala provinsi, dan penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Tabel 2.110).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.110 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Indikator Kinerja	Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP	89,68	90,7	95,02	98,05	99,96**
2.	Rasio bayi berakta kelahiran	68,70	83,19	86,83	88,91	96,61
3.	Rasio pasangan berakta nikah	44,37	44,32	44,51	45,27	51
4.	Kepemilikan KTP	89,68	90,7	95,02	98,05	99,96
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	687,1	831,9	868,3	903,4	966,1
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100	100	100	100	100
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2020

Cat: ** Data Hasil Konsolidasi Kemendagri Semester II Tahun 2020

Tabel 2.110 menunjukkan bahwa ketujuh indikator yang di bawah urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau selama 4-5 tahun terakhir terus meningkat. Pada ketujuh indikator terdapat dua indikator yang terdapat di dalam RPJMD yaitu indikator Rasio Bayi Berakta Kelahiran dan Indikator Kepemilikan KTP. Kedua indikator tersebut menunjukkan realisasi capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD.

Rasio Penduduk Ber-KTP

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa rasio penduduk ber-KTP setiap tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun belum mencapai 100%. Kondisi ini mencerminkan bahwa ada peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya terkait pelayanan administrasi kependudukan disertai dengan kesadaran masyarakat sebagai warga negara dalam mendukung pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.



Kepemilikan KTP dapat dipastikan “masih sulit” tercapai 100% karena penduduk wajib KTP yang berusia 17 tahun terus bertambah setiap hari. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kepemilikan KTP belum bisa 100% yaitu:

- 1) Status perekaman yang belum dicetak dikarenakan *updating* biometrik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk status *Print Ready Ready* (PRR) atau status siap cetak;
- 2) Data Anomali (gangguan) yaitu data ganda yang harus diselesaikan oleh penduduk yang bersangkutan secara administrasi;
- 3) Perubahan status penduduk yang belum atau tidak melaporkan seperti status pernikahan dan pindah datang penduduk pada suatu wilayah;
- 4) Mobilitas (perpindahan) penduduk keluar dan masuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang tidak/belum melaporkan kepindahannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mencakup penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat; fasilitasi kerjasama antardesa dari daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) daerah provinsi; pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas-daerah kabupaten/kota.

Adapun periode tahun 2016-2021 dilakukan pembinaan sebanyak 1.248 dari total lembaga PKK, Posyandu dan LPM di 416 desa/kelurahan. Untuk RT dan RW pembinaan difokuskan pada kepengurusan Forum Komunikasi RT/RW Kabupaten/Kota. Sedangkan Karang Taruna di bawah binaan instansi lain. Capaian persentase Lembaga Kemasyarakatan desa/kelurahan yang telah aktif dimana menjadi indikator dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat guna peningkatan kesejahteraan tahun 2016 pencapaian sebesar 36,62%, di tahun 2017 adalah 40%, sedangkan tahun 2018 sebesar



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

46,63%, di tahun 2019 sebesar 64,48%, dan di tahun 2020 sebesar 53,45%. Dari realisasi tersebut dapat dilihat perlu upaya yang lebih besar agar seluruh lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan di seluruh kabupaten/kota dapat bergerak aktif 100%. Hal ini sangat diharapkan agar peran serta lembaga kemasyarakatan dapat mendukung pembangunan dan pengembangan wilayah dan mendorong kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.111 Data Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Telah Aktif Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif
2016	457
2017	499
2018	582
2019	805
2020	667

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Peran PKK sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat sangat penting khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah total PKK adalah sebanyak 501 yang terdiri dari 416 desa/kelurahan, 77 kecamatan, 7 kabupaten/kota dan 1 tingkat provinsi.

Tabel 2.112 Data Jumlah PKK Aktif Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2016	495
2017	495
2018	498
2019	500
2020	501

Sumber: PKK Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu ujung tombak kader kesehatan yang paling strategis di bidang kesehatan masyarakat di desa/kelurahan. Posyandu memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi bayi dan ibu hamil terutama



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta pencegahan stunting (kondisi gagal pertumbuhan pada anak). Jumlah Posyandu di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebanyak 1.354 dan yang aktif sebesar 732 (54,06%), di tahun 2017 sebanyak 1.384 dan yang aktif sebanyak 748 (54,05%), tahun 2018 sebanyak 1.407 dan yang aktif sebanyak 761 (54,09%), di tahun 2019 sebanyak 1.437 dan yang aktif sebanyak 861 (59,92%) dan di tahun 2020 sebanyak 1.439 dan yang aktif 991 (68,87%). Adapun status Posyandu tersebut terdiri dari Pratama, Madya, Purnama dan Mandiri. Diharapkan pembinaan yang dilakukan dapat mendorong peran aktif Posyandu di masyarakat sehingga akan lebih banyak status Posyandu Purnama dan Mandiri.

Tabel 2.113 Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif
2016	1.354	732
2017	1.384	748
2018	1.407	761
2019	1.437	861
2020	1.439	991

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi bertujuan meningkatkan perekonomian di desa di antaranya melalui pemberdayaan lembaga ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan mendorong dan menggali potensi ekonomi desa dengan inovasi-inovasi terutama memanfaatkan sumber daya alam di desa.

Tabel 2.114 Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah BUMDes	BUMDes Aktif	Target BUMDES Aktif di RPJMD
2016	31	NA	-
2017	80	35	35
2018	176	80	40



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tahun	Jumlah BUMDes	BUMDes Aktif	Target BUMDES Aktif di RPJMD
2019	186	108	45
2020	207	154	50

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Untuk tahun yang akan datang BUMDes akan dikelompokkan dalam klasifikasi yaitu: Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Dalam klasifikasi ini terdapat 8 BUMDes yang tergolong dalam klasifikasi Berkembang dan belum ada yang tergolong dalam klasifikasi Maju. Sedangkan untuk kategori Dasar dan Tumbuh dapat dilihat dari Tabel 2.115.

Tabel 2.115 Data Jumlah BUMDes dan BUMDes Aktif Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	Jumlah BUMDes	Klasifikasi BUMdes			
			Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju
1	Bintan	35	11	16	8	0
2	Karimun	39	27	12	0	0
3	Lingga	48	36	12	0	0
4	Natuna	54	31	23	0	0
5	Kepulauan Anambas	31	21	10	0	0
Total	5 Kabupaten	207	126	73	8	0

Sumber: Data Olahan Tenaga Ahli Madya Provinsi Tahun 2021

Melihat kondisi tersebut, ke depannya akan terus dilakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan, mendorong masyarakat, pemerintah dan pihak swasta ikut berpartisipasi dan kerjasama baik dalam memberikan ide inovasi, penyertaan modal, bantuan keuangan dan mendorong program kemitraan/CSR, serta mendorong kerjasama BUMDes antardesa.

Pengembangan potensi desa untuk mendorong ekonomi desa salah satunya dilakukan melalui penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam pengelolaan sumber daya alam desa. Inovasi TTG masyarakat sangat baik hal ini dibuktikan seiring tampilnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai juara dalam ajang Gelar TTG Nasional setiap tahunnya. Berbagai kreasi teknologi melalui Lomba Inovasi TTG tingkat provinsi dan nasional



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dimaksudkan sebagai sarana untuk mengenalkan TTG hasil temuan/inovasi pada masyarakat, mendorong dan mengembangkan kreatifitas masyarakat untuk menciptakan TTG dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya alam desa melalui TTG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk percepatan alih teknologi kepada masyarakat, pemasyarakatan dan pemanfaatan hasil TTG. Tabel 2.116 menunjukkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup drastis dalam penerapan TTG sebagai bagian dari dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.116 Data Prestasi Yang Diraih Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020	Total
Kabupaten/Kota yang Mengikuti							
1	Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG)	7	7	7	7	0	28
2	Inovasi TTG Tingkat Kabupaten/Kota	117	87	78	98	17	397
3	Inovasi TTG Tingkat Provinsi	30	30	30	30	0	120
4	Inovasi TTG Tingkat Nasional	1	1	1	2	0	5
5	Inovasi TTG Unggulan	1	1	1	1	0	4

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Sejak tahun 2017 alat TTG yang diikutkan dalam lomba inovasi TTG baik tingkat lokal maupun nasional mulai dimanfaatkan atau digunakan baik oleh masyarakat maupun kalangan dunia usaha. Hal ini tak terlepas dari dorongan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang mulai memotivasi para inovator agar mulai mengarah pada *"business oriented"* dari sekadar pemakaian sendiri. Hal ini sudah mulai terlihat hasilnya dimana inovasi yang meraih juara 1 di tingkat provinsi dan juara 2 di tingkat nasional tahun 2017. Alat TTG tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebanyak 1 alat TTG, tahun 2018 tercapai 2 alat TTG yang telah dimanfaatkan sedangkan tahun 2019 sebanyak 1 alat TTG yang sudah dimanfaatkan. Bahkan Provinsi Kepulauan Riau sudah memfasilitasi pengurusan Hak Paten alat TTG ke lembaga berwenang. Meskipun prosedur pengajuan Hak Paten memakan waktu lebih dari 1 tahun, maka pada tahun



2019 inovator dari Tanjungpinang berhasil memperoleh Hak Paten alat TTG-nya. Namun demikian, di tahun 2020 hal ini menjadi berkurang akibat dari dampak Covid-19.

Tabel 2.117 Data Persentase TTG Yang Dimanfaatkan Masyarakat Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah TTG	Persentase
2016	1	16,67
2017	1	16,67
2018	2	33,33
2019	1	16,67
2020	0	0

Sumber: Data Olahan Dinas PMD DukCapil Provinsi Kepri Tahun 2021

Salah satu upaya dalam rangka pengembangan TTG di desa/kelurahan maka dibentuk suatu wadah yakni Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) sebagai lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis Teknologi Tepat Guna. Peran Posyantek sangatlah dibutuhkan di dalam masyarakat karena kehadiran Posyantek diharapkan berdampak pada perkembangan inovasi TTG sehingga mampu memberikan nilai tambah suatu inovasi ataupun produk yang dihasilkan. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam rangka mengakselerasi penggunaan produk TTG untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna agar dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas produksi yang baik.

Posyantek di Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk berjumlah 76 Posyantek, di antaranya terdapat 24 Posyantek yang aktif dan 52 Posyantek tidak aktif. Hal ini disebabkan masih minimnya perhatian aparaturnya kabupaten/kota dan desa terhadap kelembagaan Posyantek, minimnya pendanaan, sarana dan prasarana, kurang aktifnya pengurus Posyantek dalam menjalankan fungsi Posyantek sebagai wadah para inventor/inovator dalam penyediaan TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk kedepannya akan terus dilakukan pembinaan dan dorongan kepada masyarakat dalam mengembangkan inovasi TTG serta mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dapat memberikan perhatian kepada pembentukan dan pemanfaatan lembaga Posyantek.

Tabel 2.118 Perkembangan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 - 2020

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif
1	Kota Tanjungpinang	1	1	0
2	Kabupaten Bintan	24	10	14
3	Kota Batam	9	3	6
4	Kabupaten Karimun	2	0	2
5	Kabupaten Lingga	5	0	5
6	Kabupaten Natuna	25	10	15
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	0	10
Total		76	24	52

Sumber: Data Olahan Dinas PMD DukCapil Provinsi Kepri Tahun 2021

Pembangunan desa menurut status desa dengan indikator dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri salah satunya yakni status Desa Cepat Berkembang. Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017 Desa Cepat Berkembang sebanyak 15 desa, tahun 2018 sebanyak 28 desa, tahun 2019 sebanyak 30 desa dan tahun 2020 sebanyak 57 desa. Adapun total desa yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 275 desa. Dilihat dari data capaian Desa Cepat Berkembang masih sangat minim setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor penentuan dalam klasifikasi status desa seperti sarana prasarana baik di bidang pemerintahan desa, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang lainnya.

Tabel 2.119 Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Tahun	Desa Cepat Berkembang	Desa Berkembang
2016	n/a	n/a
2017	15	260
2018	28	247



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tahun	Desa Cepat Berkembang	Desa Berkembang
2019	30	245
2020	57	218

Sumber: Data Profil Desa/ Kelurahan Provinsi Kepri Tahun 2021

Tabel 2.120 Data Status Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah		Swadaya		Swakarya		Swasembada	
		Kec.	Desa/ Kel	2018	2020	2018	2020	2018	2020
1	Kota Tanjungpinang	4	-	17	17	1	1	-	-
2	Kabupaten Bintan	10	70	6	-	43	46	10	15
3	Kota Batam	12	-	60	62	-	1	-	-
4	Kabupaten Karimun	12	42	57	61	6	4	3	3
5	Kabupaten Lingga	13	36	74	147	1	6	5	6
6	Kabupaten Natuna	15	75	69	62	3	12	9	11
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	10	52	19	37	-	14	1	2
Total		76	275	225	307	53	82	28	37

Sumber: Data Profil Desa/ Kelurahan Provinsi Kepri Tahun 2020

Tabel 2.121 Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	36,62	40	46,63	64,48	53,45
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	0	0	0	0	0
3	LPM Berprestasi	0	0	0	0	0
4	PKK aktif	495	495	498	500	501
5	Posyandu aktif	1.354	1.384	1.407	1.437	991

Sumber: Dinas PMD Dukcapil Prov. Kepulauan Riau Tahun 2021

Sementara itu, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau selama 3 tahun terakhir secara komposit mengalami kenaikan. Dimana untuk tahun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2020 nilai IDM Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 0,6562 atau naik sebesar 0,0258 basis poin. Selain itu, jumlah desa yang mengalami kenaikan status mengalami tren yang positif. Dimana untuk desa yang berstatus maju sampai tahun 2020 naik lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan terdapat 1 desa yang telah masuk ke kategori desa yang mandiri. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.122 dan Tabel 2.123 berikut.

**Tabel 2.122 Perkembangan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2018-2020**

Tahun	Indeks Ketahanan Sosial (IKS)	Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)	Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)	Nilai IDM	Status
2018	0,6581	0,5062	0,6633	0,6092	Berkembang
2019	0,7261	0,5040	0,6584	0,6304	Berkembang
2020	0,7475	0,5406	0,6805	0,6562	Berkembang

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

**Tabel 2.123 Data Status Desa Menurut Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2018-2020**

Tahun	Status Desa					Total Desa
	Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
2018	6	111	145	13	0	275
2019	1	66	186	22	0	275
2020	0	34	193	47	1	275

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Untuk data jumlah RT/RW per Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.124 berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.124 Data Jumlah RT/RW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Tahun	RT	RW	Jumlah RT/ RW
1	Kota Tanjungpinang	680	168	848
2	Kabupaten Bintan	605	198	803
3	Kota Batam	3.433	804	4.237
4	Kabupaten Karimun	1.090	394	1.484
5	Kabupaten Lingga	609	269	878
6	Kabupaten Natuna	761	305	1.066
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	417	177	594
TOTAL		7.595	2.315	9.910

Sumber: Data Laporan Kab/ Kota Tahun 2020

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya untuk mewujudkan penduduk Kepulauan Riau yang berdaya saing tinggi harus didukung oleh tumbuhnya penduduk secara seimbang dan berkualitas yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan manusia. Pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centre development*) adalah strategi yang menempatkan penduduk sebagai fokus dan sumber utama pembangunan, menjadi sasaran (*object*) sekaligus pelaku (*subject*) pembangunan, konkritnya diwujudkan dengan menjadikan penduduk sebagai komponen *input* sekaligus *output* pembangunan.

Perubahan struktur penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif serta menurunnya angka ketergantungan penduduk memberikan peluang kepada Kepulauan Riau untuk menikmati bonus demografi pada tahun 2020-2035. Melimpahnya SDM produktif berpotensi menjadi *driving force* dalam akselerasi pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari peningkatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

suplai angkatan kerja (*labour supply*), peningkatan tabungan (*saving*) serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Program Pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, berkualitas, dan berdaya saing untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya program ini tidak dapat berdiri sendiri, namun memerlukan sinergi dengan berbagai program pembangunan pada berbagai sektor lainnya. Program yang diselenggarakan meliputi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana serta Keluarga Sejahtera. Sedangkan indikator dan capaian kinerja ditunjukkan pada Tabel 2.122.

Tabel 2.122 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

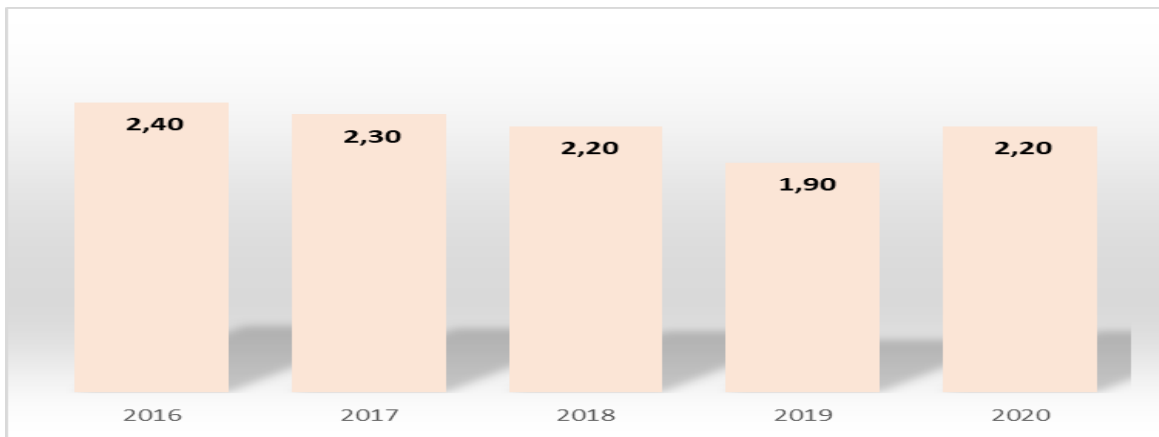
No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2,79*	2,69*	2,58*	2,49*	2,85 ****
2.	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	2,4	2,3*	2,2*	1,9**	2,02 ****
3.	<i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)	79,83***	81,9***	82,37***	79,2***	82,10 ****
4.	<i>Unmet need rate</i>	11,67***	10,06***	9,50***	12,04***	10,14 ****

Sumber: * BPS Provinsi Kepulauan Riau ** SKAP BKKBN *** Statistik Rutin BKKBN
**** Radalgram Desember Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur penduduk merupakan variabel yang tidak dapat diabaikan dalam tahapan perencanaan pembangunan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang berpengaruh dalam perubahan struktur penduduk suatu wilayah, yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) serta migrasi (pesebaran) penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kepulauan Riau dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan (lihat gambar laju pertumbuhan penduduk di



bagian demografi). Dua faktor dominan yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Riau adalah faktor migrasi penduduk serta faktor kelahiran. Keberhasilan Program KB dalam 4 (empat) dekade terakhir berhasil menurunkan *Total Fertility Rate*/TFR (rata rata perempuan melahirkan di dalam hidupnya) di Provinsi Kepulauan Riau dari 4,68 jiwa pada tahun 1970-an menjadi 2,2 jiwa pada tahun 2020 (lihat Gambar 2.67).



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

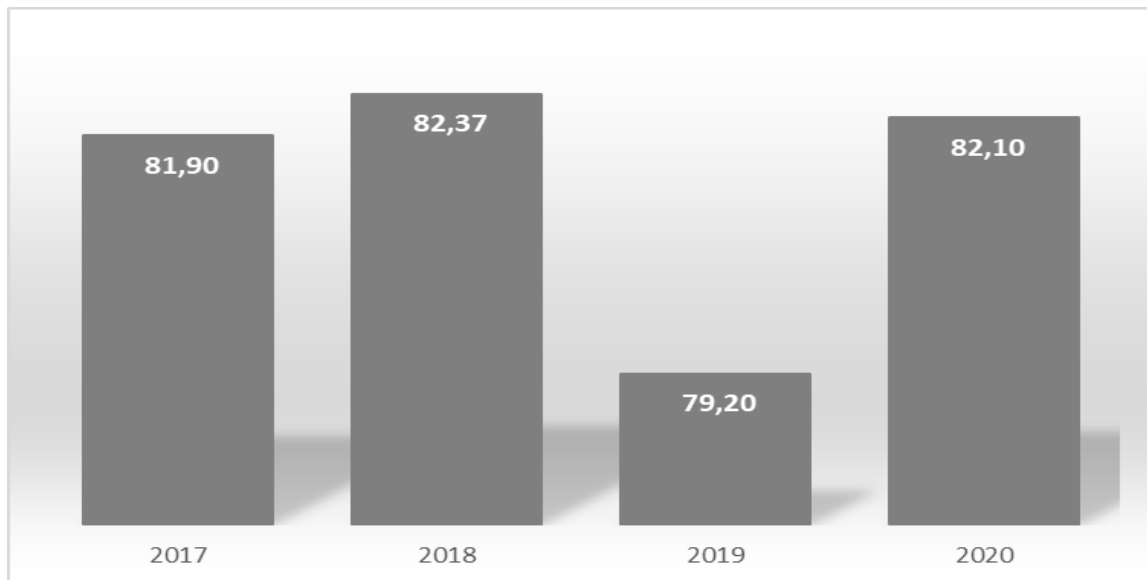
Gambar 2.67 Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, maka fertilitas perlu dijaga stabil pada angka 2,1. Tingkat fertilitas 2,1 menjadi syarat penduduk tumbuh seimbang agar besarnya jumlah penduduk usia produktif dapat dipertahankan lebih lama. Rendahnya tingkat fertilitas akan berisiko meningkatkan laju pertumbuhan penduduk lansia serta pertambahan penduduk usia produktif (15-64 tahun) melambat. Kekurangan penduduk usia produktif menyebabkan beban penduduk nonproduktif melonjak seperti yang dialami negara maju saat ini.

Contraceptive Prevalence Rate (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi) merupakan salah satu indikator kependudukan, yang mencerminkan cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Penggunaan kontrasepsi pada pasangan usia subur (PUS) di Provinsi



Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebesar 79,2% per tahun dan mengalami peningkatan menjadi 82,1% pertahun pada tahun 2020 (lihat Gambar 2.68)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

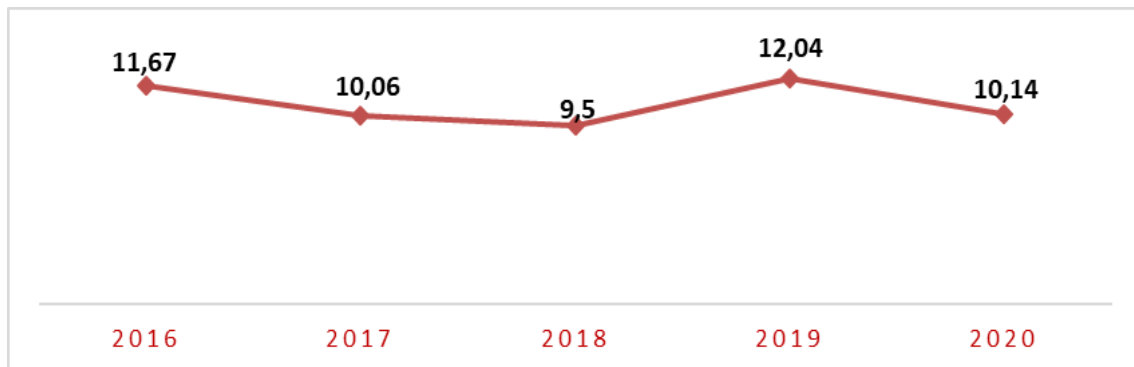
Gambar 2.68 *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Pada tahun 2020 telah terjadi kenaikan di *Contraceptive Prevalence Rate* (Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi). Faktor yang memengaruhi naiknya CPR di Provinsi Kepulauan Riau adalah meningkatnya kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) dalam pemakaian alat kontrasepsi, masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) menurun.

Unmet need bermakna kebutuhan yang tidak terpenuhi, kondisi ini mengisyaratkan keinginan PUS terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia, sehingga mereka mengambil keputusan untuk tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi. *Unmet need* Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Kondisi ini dapat terjadi karena faktor layanan KB atau ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (lihat Gambar 2.69)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.69 *Unmet Need* Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

9. Urusan Perhubungan

Pelabuhan

Ketersediaan Pelabuhan

Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Saat ini jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dalam rentang waktu 2016 – 2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan.

Tabel 2.123 Jumlah Pelabuhan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pelabuhan Laut	20	22	25	28	33

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pelaksanaan pembangunan pelabuhan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan mengusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) (untuk pembangunan baru) apabila sudah ada kemudian ada penetapan lokasi kemudian dilakukan *pra-feasibility study* (FS) dan studi Amdal hingga ke tahap desain dan konstruksi.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional

Saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan telah mengirimkan usulan kepada Menteri Perhubungan RI Berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 120/834.I/DISHUB-SET/2020 Tanggal 15 Juni 2020 Perihal Usulan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Tabel 2.124 Data Lokasi dan Rencana Lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Pelabuhan
1	Kota Batam	Bengkong
2	Kota Batam	Tanjung Sauh
3	Kabupaten Karimun	Kundur
4	Kabupaten Natuna	Teluk Buton
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Air Bini (Siantan Selatan)
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	Teluk Durian

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Angkutan Pelayaran dan Penerbangan

Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang angkutan umum adalah jumlah arus penumpang angkutan umum (bis/kereta api/kapal laut/pesawat udara) yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah. Tren untuk jumlah arus penumpang angkutan umum ditampilkan pada Tabel 2.125.

Tabel 2.125 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penumpang Bis	1.244.359	2.028.963	2.398.798	2.650.580	729.551
	Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan (Roro)	597.793	651.735	475.012	590.992	342.863



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2	Jumlah Penumpang Angkutan Laut	14.705.440	15.980.784	16.986.652	17.860.415	6.427.808
3	Jumlah Penumpang Angkutan Udara	6.159.886	6.160.343	5.697.422	4.636.867	2.737.851
Total Jumlah Penumpang		22.707.478	24.821.825	25.557.884	25.738.854	10.238.073

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kenaikan arus penumpang angkutan laut dikarenakan:

- 1) Peningkatan sarana dan prasarana angkutan laut yang selalu menjadi perhatian dari segi kualitas dan kuantitas pada transportasi angkutan laut.
- 2) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- 3) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Harga tiket kapal yang cenderung relatif stabil dan alternatif angkutan dengan biaya menengah yang menjadi pilihan masyarakat pada umumnya.
- 5) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan.
- 6) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional.
- 7) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan non-pemerintah dalam menunjang industri maritim dan non-maritim yang menarik jumlah kebutuhan tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

Penurunan penumpang angkutan udara dikarenakan:

- 1) Lokasi Kepulauan Riau yang berada di perbatasan Singapura yang menawarkan harga tiket lebih murah dengan tujuan domestik.
- 2) Rute penerbangan yang kurang karena tidak adanya potensi *demand* ekonomi mengalami penurunan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Ijin Trayek

Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan transportasi, setiap kendaraan yang menyelenggarakan transportasi harus memiliki ijin. Berikut disajikan capaian jumlah ijin trayek yang dikeluarkan.

Tabel 2.126 Jumlah Ijin Trayek dikeluarkan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin Penyeberangan	1	1	6	1	3
2	Jumlah Izin Pelayaran Rakyat	330	350	372	487	342
3	Jumlah Izin Pelayaran Nasional	7	10	23	15	13

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Ijin trayek yang dikeluarkan terlihat fluktuatif. Ijin trayek yang turun berkaitan dengan adanya perbaikan/*docking* pada kapal yang melayani trayek yang sudah dikeluarkan izinnya. Sementara naiknya ijin trayek berkaitan dengan ijin lintasan penyeberangan antar-kabupaten/kota dalam provinsi. Berbagai fasilitas penyeberangan yang telah tersedia mampu meningkatkan arus penyeberangan baik barang maupun orang.

Tabel 2.127 Jumlah Barang Terangkut oleh Angkutan Umum di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Barang Penyeberangan	24.713	12.208	198.521	276.935	117.939
2	Barang Angkutan Laut	26.413.210	31.135.600	15.462.988	30.255.306	10.910.520

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Peningkatan arus penyeberangan berkaitan dengan:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- 1) Perkembangan dan peningkatan informasi tentang kepastian jadwal kapal yang sudah semakin terbuka dan informatif baik melalui media cetak dan elektronik.
- 2) Jumlah lintasan pelayaran yang sudah dapat dijangkau pada wilayah kepulauan yang sejalan dengan pembangunan pelabuhan-pelabuhan yang terus ditingkatkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Saat ini Kepulauan Riau khususnya angkutan laut menjadi sarana transportasi yang merupakan kebutuhan utama dalam menyatukan wilayah-wilayah kepulauan
- 4) Terbentuknya kawasan-kawasan wisata bahari yang menjadi daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional
- 5) Peningkatan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Riau baik dari sektor pemerintah dan nonpemerintah dalam menunjang industri maritim dan nonmaritim yang menarik jumlah tenaga kerja selain tenaga kerja lokal.

Penerbangan

Untuk melayani transportasi udara, Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan tahun 2020 memiliki 8 (delapan) bandar udara. Ada penambahan 2 (dua) bandar udara yaitu: Bandar Udara Letung di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Bandar Udara Tambelan di Kabupaten Bintan. Sementara itu, ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan baru tersedia di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam atau sebanyak 2 dari 8 bandara.

Tabel 2.128 Jumlah Bandara dan Ketersediaan Prasarana Sisi Darat di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bandar Udara	6	7	7	7	8
Ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Lalu Lintas Angkutan Jalan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Ketersediaan fasilitas keselamatan keamanan transportasi di jalan-jalan provinsi Kepulauan Riau belum memadai jumlahnya. Hal ini dikarenakan jumlah fasilitas keselamatan keamanan transportasi yang dibutuhkan sebanyak 325.594 unit sedangkan yang tersedia sebanyak 300.954 unit atau masih terdapat kekurangan 25.000 unit. Selain itu, kondisi prasarana yang tidak dalam kondisi baik (rusak) yakni sebanyak 300.954 unit 30% diantaranya (90.000 an) dalam kondisi perlu perbaikan/penggantian dan perawatan. Jumlah ketersediaan alat perlengkapan jalan yang ada di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau yang berada di kabupaten/kota masih terbilang minim. Kondisi ini dapat dijadikan salah satu alasan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Tabel 2.129 Ketersediaan Alat Perlengkapan Jalan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Alat Perlengkapan Jalan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rambu	buah	2.340	2.812	3.211	3.224	3.335
2	Rambu RPPJ F	buah	90	90	90	90	90
3	Rambu Peringatan	buah	100	106	106	106	106
4	Rambu Ganda	buah	144	164	164	164	164
5	Deliniator	buah	3.943	4.443	4.893	4.893	4.893
6	Guardril	meter	5.704	5.704	5.704	5.704	5.729
7	Pita Kejut	meter	3.900	4.044	4.189	4.235	4.235
8	Paku Marka	buah	4.197	5.297	5.297	5.297	5.297
9	<i>Zebra Cross</i>	m ²	800	836	983	1.055	1.055
10	Marka Jalan	meter	270.093	271.593	274.506	275.681	281.431
11	<i>Warning Light</i>	titik	57	57	57	57	57
12	LPJU	buah	0	10	20	84	131
13	<i>Zoss</i>	titik	0	20	23	24	24
14	<i>Traffic Light</i>	titik	0	41	43	43	43
15	JPO	unit	4	4	4	4	4
16	Halte	unit	0	2	6	6	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kondisi alat perlengkapan jalan yang ada saat ini di jalan milik Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.130.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.130 Kondisi Fasilitas Alat Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Alat Perlengkapan Jalan	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Tidak Baik	
1	Rambu	buah	113	420	553
2	Rambu RPPJ F	buah	6	2	8
3	Rambu Peringatan	buah	32	10	42
4	Rambu Ganda	buah	24	3	27
5	Deliniator	buah	2.197	503	2.700
6	Guardril	meter	682	200	882
7	Pita Kejut	meter	1.650	312	1.962
8	Paku Marka	buah	3.770	417	4.187
9	<i>Zebra Cross</i>	m ²	203	32	235
10	Marka Jalan	meter	3.300	1.200	4.500
11	<i>Warning Light</i>	buah	33	24	57
12	LPJU	buah	74	10	84
13	<i>Zoss</i>	titik	1	3	4
14	<i>Traffic Light</i>	titik	5	0	5
15	JPO	unit	1	3	4
16	Halte	unit	6	0	6

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pada tabel 2.130 terlihat bahwa 420 dari 553 (75,94%) rambu jalan tidak dalam kondisi baik. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 24,05% rambu lalu lintas yang dapat digunakan dengan baik.

**Tabel 2.131 Jumlah Bandar Udara/Pelabuhan/Terminal Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandar Udara	6	7	7	7	8
2	Pelabuhan Penyeberangan (Roro)	8	10	10	10	10
3	Pelabuhan Laut	20	22	25	28	31
4	Terminal Type B	2	2	2	2	2
Jumlah		36	41	44	47	51

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kepulauan Riau pada tahun 2017-2020 memiliki Pelabuhan penyeberangan (roro) sebanyak 10 pelabuhan. Selain itu terminal tipe B berjumlah 2 terminal. Selanjutnya angkutan umum berupa armada penyeberangan berjumlah 12 dan armada perhubungan laut berjumlah 68 pada tahun 2020.

Tabel 2.132 Jumlah Armada Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Armada Penyeberangan (Roro)	9	9	11	12	12
2	Armada Perhubungan Laut	41	46	53	60	68
Jumlah		50	54	64	72	90

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.133 Jumlah Trayek Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Trayek Angkutan Darat	4	6	8	10	12
2	Trayek Angkutan Penyeberangan (Roro)	10	10	10	10	14
3	Trayek Angkutan Laut	53	56	63	63	63
4	Trayek Angkutan Udara	4	5	7	14	18

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Kepulauan Riau memiliki arus barang yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan naik menjadi 304.628 kendaraan dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 276.935

Tabel 2.134 Jumlah Arus Barang Angkutan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus						
1	kendaraan melalui	24.713	12.208	198.521	276.935	304.628



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Angkutan Penyeberangan (Roro)					
	Jumlah Barang					
2	melalui Angkutan Laut	26.413.210	31.135.600	15.462.988	30.255.306	25.578.647
	Jumlah arus					
3	Barang melalui Angkutan Udara	46.134.982,5	50.541.314	60.904.841	72.086.740	32.983.840
	Jumlah Arus Barang	72.572.905,5	81.689.122	76.566.350	102.618.981	58.867.115

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan yakni pada tahun 2020 sebesar Rp429.718.867. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp689.760.000.

**Tabel 2.135 Jumlah Pendapatan Retribusi Bidang Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	3.131.250	7.058.500	303.563.680	269.962.310	429.718.867
	Retribusi Izin					
2	Bidang Perhubungan	14.500.000	12.450.000	605.590.000	341.900.000	689.760.000
	Jumlah	17.631.250	19.508.500	909.153.680	611.862.310	1.119.478.867

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika menjadi unsur yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan terlebih untuk mewujudkan *smart province* di Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan dengan capaian kinerja indikator nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau, nilai *e-government* Provinsi Kepulauan Riau dan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2.136.

Tabel 2.136 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau	59,5	13,03	53,87	43,24	74,18
2	Nilai <i>e-government</i> Provinsi Kepulauan Riau/ Nilai Indeks SPBE	1,85	2,1	2,1	2,73	2,80
3	Persentase Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri yang telah dimanfaatkan	n/a	36,17	47,82	68,08	76,85

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun di tahun 2019 mengalami penurunan namun di tahun 2020 kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Apabila dilihat capaian nilai keterbukaan informasi yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan target yang ada di RPJMD, hal ini disebabkan tingginya pemanfaatan fasilitas aplikasi PPID, keamanan *web* yang mulai *diupgrade*, operator perangkat daerah yang mulai terlatih dan peduli terhadap



dokumen publik serta semakin baiknya kesadaran perangkat daerah akan pentingnya pelaksanaan PPID.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dengan membentuk PPID utama berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, membentuk komisi informasi yang berfungsi membantu menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara pemohon dan termohon serta membangun sarana komunikasi melalui pemanfaatan teknologi informasi berupa *website* pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (www.Kepulauan.Riauprov.go.id) dan *website* PPID (www.PPID.Kepulauan.Riauprov.go.id). Dua sarana komunikasi tersebut merupakan wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun sayangnya dalam *website* tersebut belum ada domain untuk digunakan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, masih terbatas penyediaan informasi kegiatan pemerintah daerah dan dokumen formal lainnya.

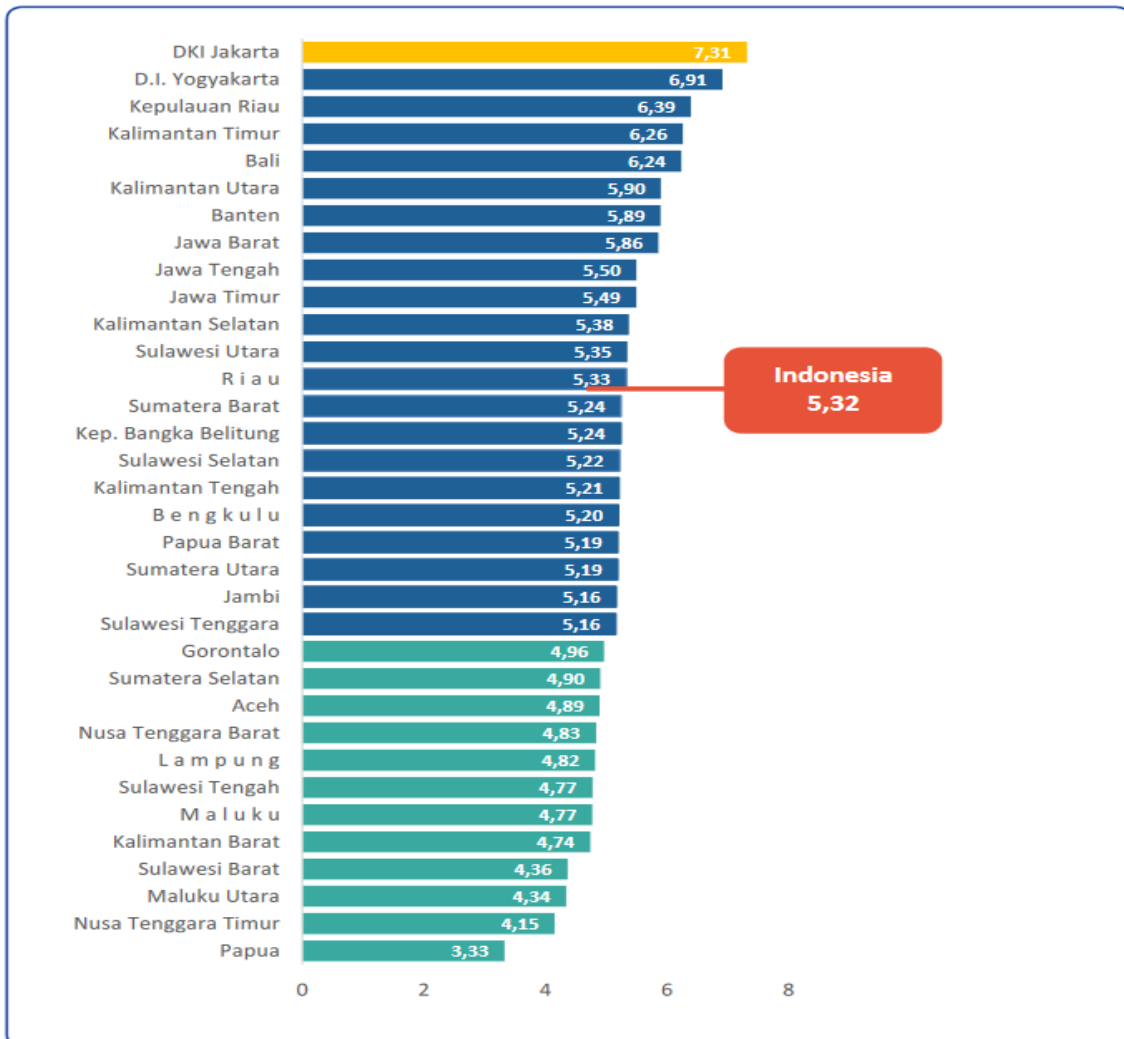
Sementara itu untuk menuju *smart province*, pemerintah telah mengembangkan *e-government* dengan membangun berbagai aplikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai *e-government* Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan walaupun nilainya masih tergolong rendah namun berada di atas target RPJMD. Hal ini disebabkan karena masing-masing aplikasi tersebut masih parsial dan belum terintegrasi. Bahkan beberapa aplikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada. Di sisi lain aplikasi yang berkembang masih pada ranah perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Sedangkan untuk pelayanan publik masih belum banyak dan belum terintegrasi antara satu dengan lainnya.

Secara keseluruhan kinerja urusan komunikasi dan informatika juga dapat dilihat dari capaian nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai indeks SPBE tahun 2020 mengalami



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang mencapai angka 2,80 dengan predikat Baik. Walaupun mengalami peningkatan namun angka tersebut juga masih tergolong rendah. Namun demikian, secara keseluruhan pembangunan TIK di wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 menempati urutan ketiga se-Indonesia setelah DKI Jakarta, dan DI Yogyakarta dengan nilai 6,39.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.70 Nilai IP-TIK Indonesia menurut Provinsi Tahun 2019

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peran Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memiliki posisi yang cukup strategis dalam perekonomian daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

provinsi Kepri melaksanakan fungsi urusan wajib non pelayanan pemerintah daerah dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah, mencakup: pemberian Rekomendasi izin KSP/USP, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Penilaian Kesehatan KSP/USP, Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Pengembangan UKM.

Perkembangan koperasi di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau tercatat kontribusi koperasi pada pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,22% yang menunjukkan bahwa koperasi telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Online Data System (ODS) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau menyajikan data-data terkait jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT, jumlah koperasi yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK). Berdasarkan data ODS tersebut juga diketahui volume usaha koperasi di Kepulauan Riau pada tahun 2020 yang tercatat sebesar Rp. 503 Milyar. Berikut disampaikan data koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.137 Koperasi Aktif di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	229	229	216	117	130
2	Kab. Bintan	167	167	242	142	148
3	Kota Batam	506	571	229	239	242
4	Kab. Karimun	52	52	331	129	143
5	Kab. Lingga	75	75	53	70	59
6	Kab. Natuna	45	45	56	66	61
7	Kab. Kepulauan Anambas	28	28	47	53	52



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/ Kota	2016	2017	2018	2019	2020
8.	Binaan Provinsi	53	53	30	35	47
Jumlah Koperasi Aktif		1.155	1.220	1.204	851	882

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau kedepan adalah bagaimana menjadikan koperasi yang maju dan moderen dengan capaian diantaranya digitalisasi koperasi & inovasi usaha koperasi, peningkatan jumlah koperasi aktif dan menyelenggarakan RAT (secara daring), peningkatan jumlah koperasi yang bersertifikat NIK serta menumbuhkan koperasi milenial di Provinsi Kepulauan Riau.

Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi merupakan salah satu urusan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau. Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan koperasi yang sehat, kuat, mandiri, tangguh dan akuntabel. Adapun aspek pengawasan yang dilakukan meliputi: penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi dan penerapan sanksi.

Kinerja urusan koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi	Unit	2.308	2.355	2.355	2.191	2.131	2.159
2	Persentase Koperasi Aktif	jumlah	1.125	1.155	1.220	1.204	851	882
		%	48,74	49,04	51,80	54,95	39,93	40,85
3	Persentase Koperasi Sehat	%	-	7,60	8,40	36,11	38,19	41,86



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah koperasi yang dibina	Unit	440	120	385	260	660	316
		%	19,06	5,10	16,35	11,87	30,97	14,64
5	Volume usaha per koperasi	Rp juta	136,57	150,25	178,61	225,06	232,63	233,04

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Pembinaan yang dilakukan terhadap koperasi seiring dengan meningkatkan volume usaha dari koperasi. Omset koperasi yang relatif rendah itu tentu berkaitan dengan jumlah koperasi yang aktif dan yang sehat. Keaktifan dan kesehatan koperasi mestinya sejalan dengan pembinaan yang dilakukan, namun data tidak terlihat hubungan tersebut. Sebagai contoh, tahun 2016 kemampuan pembinaan turun namun koperasi aktif dan sehat justru meningkat, demikian juga dengan tahun 2019 kemampuan pembinaannya naik tapi tetapi koperasi yang sehat dan aktif justru mengalami penurunan. Data ini mengirimkan pesan bahwa terdapat permasalahan yang belum terpecahkan dalam pembinaan koperasi. Untuk meningkatkan kinerja koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau dibantu tenaga penyuluh di bidang perkoperasian salah satunya adalah Petugas Penyuluh Koperasi di Lapangan (PPKL) yang selama ini di biayai dengan Dana Dekonsentrasi. Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara umum disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan UKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah	unit	106.389	106.809	107.185	107.605	108.055	146.638
2	Persentase UKM Naik Kelas	%	-	0,21	0,33	0,41	0,55	0,79
3	Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima di pasar modern/ tersertifikasi	%	-	19,80	19,80	19,30	19,85	20,93



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Usaha kecil menengah (UKM) yang dibina	unit	1.018	500	295	712	530	655
		%	0,96	0,47	0,28	0,66	0,49	0,45
5	Volume usaha per UMKM	Rp juta	514,23	512,43	510.70	508,73	506,67	493,43
6	Rasio kewirausahaan	%	-	-	-	-	1	1

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap UMKM adalah mewujudkan UMKM yang sehat, mandiri dan berdaya saing. Berbagai upaya dalam rangka mewujudkan UMKM yang sehat, mandiri dan berdaya saing terus dilakukan dengan berbagai strategi. Capaian kinerja yang menunjukkan pertumbuhan UMKM, selama 5 (lima) tahun ini meningkat. Dimana pada tahun 2015 berjumlah 106.389 UMKM, pada tahun 2016 berjumlah 106.809 UMKM, ditahun 2017 berjumlah 107.185 UMKM, tahun 2018 naik 107.605 UMKM dan pada tahun 2019 naik 108.055 UMKM. Dari jumlah UMKM naik kelas yang salah satu indikturnya adalah telah memanfaatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat) terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 berjumlah 0,21 %, pada tahun 2017 bertambah 0,33%, pada tahun 2018 meningkat 0,41%, pada tahun 2019 menjadi 0,55%, dan pada tahun 2020 sejumlah 0,79%.

Jumlah UMKM yang memiliki karakteristik informal semakin bertambah di Kepulauan Riau, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMKM. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM adalah untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, bantuan pemasaran, mendorong transformasi Usaha mikro yang sebelumnya informal menjadi formal, dan



menumbuhkembangkan *start-up* dan lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMKM sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kinerja *outcome* yang dicapai UMKM secara nominal lebih tinggi dari koperasi, namun dari aspek kecenderungan, terjadi penurunan omset. Sementara itu indikator lain dari keberhasilan UMKM dapat dilihat dari naik kelas UMKM maupun pasar yang menerima produk UMKM. Kedua indikator ini menunjukkan capaian yang terus meningkat setiap tahun, walaupun untuk peringkat naik kelas baru dialami oleh kurang dari 1% usaha. Sementara untuk pasar produk memiliki kinerja yang lebih baik. Kinerja UMKM yang masih rendah.

Hal penting lainnya yang akan menjadi fokus pembinaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau adalah terkait kewirausahaan (*enterpreneurship*) Menggali potensi, menumbuhkembangkan jiwa, dan menciptakan iklim dan ekosistem serta pembentukan pusat inkubasi yang baik bagi kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau, menjadi tantangan yang harus segera dimulai.

Kewirausahaan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran sehingga beban pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan peningkat kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau dapat teratasi. Rasio kewirausahaan di suatu Negara idealnya adalah minimal 4%, data secara nasional rasio kewirausahaan Indonesia berkisar 3,7%, sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau masih dibawah 1%.

12. Urusan Penanaman Modal

Kewenangan pemerintah provinsi pada urusan penanaman modal mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerjasama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Sebagai aset utama untuk mengolah potensi yang ada, Kepulauan Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.242.198 jiwa, Dilihat dari sebarannya, jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Kota

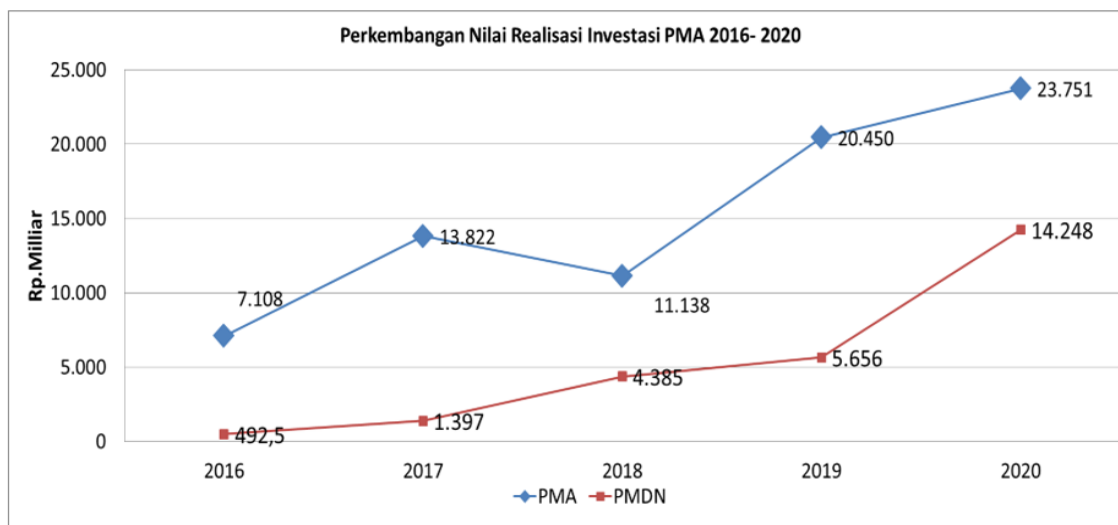


Batam memiliki jumlah sebaran penduduk yang tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya. Perbedaan jumlah sebaran penduduk berpotensi menimbulkan disparitas dalam percepatan pembangunan antar wilayah. Wilayah dengan jumlah sebaran tinggi didominasi oleh wilayah yang berlokasi di perkotaan, sedangkan wilayah dengan jumlah sebaran penduduk rendah berada jauh dari lokasi ibu Kota Provinsi.

Secara umum, capaian kinerja pada urusan penanaman modal tergolong baik. Dalam kurun waktu tahun 2016-2020 terjadi peningkatan realisasi Investasi PMA dan PMDN yang signifikan dari Tahun 2016 yaitu Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp.492,5 (miliar) dengan 130 Proyek menjadi Rp.14,248 (Miliar) dengan 2.294 Proyek di tahun 2020. Sedangkan Realisasi Investasi PMA Tahun 2016 sebesar 519,077 (US\$.Ribu) dengan 874 proyek dan mengalami kenaikan yang sangat tinggi di Tahun 2020 sebesar 1.649,4(US\$) atau Rp.23.751 (Milliar) dengan 2.268 Proyek. Sebaran investasi juga menjadi aspek yang perlu diperbaiki, mengingat realisasi investasi masih terfokus di Kota Batam. Meningkatnya realisasi investasi tidak luput dari semakin banyaknya minat dari investor untuk menanamkan modal nya, di Tahun 2016 jumlah Investor PMA dan PMDN sebanyak 358 Investor yang mengalami peningkatan secara signifikan di tahun 2020 sebanyak 5,714 Investor PMA dan PMDN di karenakan mulai Tahun 2019 Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) diganti (OSS) *Online Single Submission* sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.71 Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020 di Provinsi Kepulauan Riau.

Dilihat dari persebarannya realisasi investasi kinerja investasi terlihat tidak tersebar secara proporsional, baik antar wilayah maupun antar sektor. Dilihat secara kewilayahan investasi yang masuk baik investasi asing maupun domestik dari tahun ke tahun didominasi hanya oleh wilayah Batam. Sebagaimana diketahui bahwa Batam merupakan pusat industri nasional, maka sebaran investasi ini jelas menunjukkan arah investasi hanya pada setor sektor yang mendukung industri nasional. Hal ini sejalan dengan kajian Tampubolon & Ningsih (2019) yang menyatakan bahwa peningkatan investasi di Kota Batam ternyata hanya memiliki manfaat pada penyerapan tenaga kerja, namun belum bisa mensejahterkan masyarakat dalam hal ini adalah pelaku UKM.

Tabel 2.140 Persebaran Investasi PMDN di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Tahun 2015-2020 (%)

Kab/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanjungpinang	0	0	5,68	1,09	2,8	1
Bintan	28,16	0,02	3,37	23,5	4,5	1



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kab/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Batam	22,49	99,3	78,07	72,5	86,29	96
Karimun	43,02	0,54	7,62	2,49	6,1	1
Lingga	5,49	0	0,06	0	0,02	1
Natuna	0,84	0,11	5,20	0,42	0,21	0
Kepulauan Anambas	0	0	0	0	0,08	0
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.141 Persebaran Investasi PMA di Provinsi Kepri berdasarkan wilayah Tahun 2015-2020 (%)

Kab/Kota	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Tanjung Pinang	0,001	0,001	0,002	0,008	0,01	0
Bintan	21,98	7	34,995	28,386	43,4	54
Batam	48,959	75	47	68,82	55,06	39
Karimun	25,76	14	18	1,29	1,38	7
Lingga	0	0	0,001	0,001	0	0
Natuna	3	0,001	0,001	0,001	0,01	0
Kepulauan Anambas	0,3	3,998	0,001	1,494	0,14	0
Total	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sebaran investasi antar wilayah yang berat ke arah industri nasional didukung oleh fakta bahwa sebagian besar investasi itu terarah ke sektor industri berskala besar yang untuk kebutuhan industri nasional tanpa keterkaitan dengan sumber daya lokal. Hanya satu industri yang mungkin dekat dengan sumber daya lokal yaitu industri karet dan bahan dari karet.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.142 Sebaran Investasi Dalam Negeri di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor Tahun
2016 – 2020 (%)**

Sektor Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Industri Kimia Dasar, Barang Kimia Dasar dan Farmasi	-	-	31	42	-
Hotel dan Restaurant	-	-	39	21	-
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	16	6	-	18	-
Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	16	9	-	11	26
Industri Mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan listrik, presisi, optic dan jam	-	-	12	8	-
Pertambangan	31	-	12	-	21
Tanaman Pangan dan Perkebunan	-	6	6	-	-
Perdagangan dan Reparasi	7	-	-	-	8
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	-	71	-	-	-
Sektor Usaha Lainnya	11	-	-	-	-
Sektor Jasa Lainnya	19	8	-	-	-
Kimia Dasar dan Farmasi	-	-	-	-	33
Konstruksi	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari tabel tersebut terlihat dinamika sektor usaha yang menempati urutan teratas dari tahun 2016 hingga 2020. Dinamika ini terjadi karena adanya perubahan tren dunia usaha yang berimbas pada realisasi investasi di masing-masing sector, di saat PAndemi Covid 19 Sektor usaha Kimia Dasar dan Farmasi menjadi sector yang di memiliki persentase sector terbesar. Sebagaimana PMDN dinamika yang sama juga terjadi pada Penanaman Modal Asing, sebagaimana tergambar pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.143 Sebaran Investasi Asing di Provinsi Kepri Berdasarkan Sektor Tahun 2016-2020 (%)

Sektor Usaha	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Perdagangan dan Reparasi	8	4	3	-	
Hotel dan Restaurant	3	59	43	6	6
Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi	3	8	5	12	-
Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	1	20	43	46	56
Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	-	-	-	3	-
Industri Lainnya	-	-	6	-	-
Jasa Lainnya	85	9	-	-	-
Industri Makanan	-	-	-	-	12
Pertambangan	-	-	-	-	5
Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	-	-	-	33	21

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari tahun 2016 hingga 2020 investasi asing di Provinsi Kepulauan masih merata di berbagai sektor, Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik masih menjadi sektor unggulan dalam PMA. Hal tersebut terletak di Kota Batam sebagai Kota Industri di Kepulauan Riau yang masih memegang peranan penting.

Mencapai sasaran Kepri menggunakan strategi meningkatkan penyediaan infrastruktur, pelayanan perijinan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

meningkatkan promosi potensi dan peluang investasi. Dengan strategi tersebut, ada tiga program prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kepri, yaitu Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Dari ketiga program tersebut, ada dua dari enam indikator program yang belum tercapai pada tahun 2017 dan 2018. Dua indikator tersebut adalah lain jumlah investasi modal asing dan Indeks Kepuasan masyarakat atas perijinan. Berikut ini merupakan Tabel Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dalam melaksanakan strategi peningkatan penyedia

Secara rinci kinerja urusan penanaman modal selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Investasi PMA	Miliar	3.383	7.108	13.822	11.138	20.450	23,751
2	Realisasi Investasi PMDN	Miliar	1.384	492,5	1.397	4.185	5.656	14,249
3	Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	115	168	200	119	493	660
4	Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	51	190	291	167	4.365	5,054
5	Pelayanan Sesuai SOP	%	100	100	100	100	92,88	95,21
6	Nilai IKM PTSP	Nilai	80,4	81,25	76,61	77,2	82,34	81,93

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Berdasarkan tabel di atas terlihat peningkatan yang cukup signifikan terhadap capaian kinerja urusan penanaman modal pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Semakin banyak perusahaan yang memiliki kesadaran untuk menyampaikan LKPM secara online;
2. Banyak investor besar yang masuk merealisasikan investasinya meski sedang dalam pandemic Covid 19
3. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kepulauan Riau, dan
4. Peran BKPM dan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi penyampaian LKPM kepada para pelaku usaha.

Dinamika capaian kinerja yang terjadi pada tahun 2020 menjadi prestasi tersendiri di sektor ekonomi khususnya bagi provinsi Kepulauan Riau. namun prestasi ini akan mendapat kendala untuk dilanjutkan di tahun 2020. Ini dikarenakan dengan adanya pandemi Covid 19 yang bukan hanya melanda Indonesia namun hampir seluruh Negara di dunia. Pandemi Covid 19 memaksa pembatasan aktifitas yang berimbas pada kegiatan ekonomi. Banyak usaha baik kecil menengah maupun usaha yang berskala besar harus menutup sementara maupun permanen kegiatannya.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Berkaitan dengan urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi; penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi; pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

provinsi; dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi.

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari jumlah organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi yang diberdayakan dan dibina capaiannya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 100%. Sementara itu, jumlah atlet berprestasi mengalami penurunan yang cukup besar di tahun 2020 yang pada tahun 2019 sebanyak 35 atlet berprestasi dan menurun menjadi sebanyak 13 atlet berprestasi di tahun 2020. Selain itu, penurunan lainnya terlihat dari jumlah prestasi olahraga yang diperoleh di tahun 2020 dari yang sebelumnya sebanyak 17 prestasi olahraga yang diperoleh di tahun 2019 menjadi 1 prestasi yang diperoleh di tahun 2020.. Minimnya prestasi pemuda di tahun 2020 sangat dipengaruhi dampak dari Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya even-even yang tidak dapat dilaksanakan dan/atau diikuti.

Tabel 2.145 Organisasi Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	n.a	n.a	n.a	100	100
2.	Persentase wirausaha Muda	12	48	70	60	60
3.	Jumlah organisasi olahraga	n.a	n.a	n.a	45	52
4.	Jumlah prestasi olahraga	n.a	n.a	n.a	17	1
5.	Jumlah atlet berprestasi	5	21	17	35	13

Sumber: Rekapitulasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, 2021

14. Urusan Statistik

Ketersediaan data statistik merupakan aspek penting dalam proses perencanaan pembangunan di daerah terlebih untuk mendukung satu data Indonesia. Kinerja urusan statistik ditunjukkan dengan capaian kinerja persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau.



Tabel 2.146 Kinerja Statistik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Persentase ketersediaan data						
1.	statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau	n/a	n/a	n/a	25	99,67	38,09

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa persentase ketersediaan data statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Meskipun demikian, capaian tersebut belum mencapai 100% yang dapat disebabkan oleh perihal berikut, yaitu:

- 1) Produsen data (perangkat daerah) belum bersedia memberikan data sektoral secara terbuka untuk menuju satu data. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman produsen data (perangkat daerah) terhadap pentingnya data sektoral dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah. Data terbuka adalah data yang dapat digunakan secara bebas, dimanfaatkan dan didistribusikan kembali oleh siapapun tanpa syarat. Kriteria data terbuka sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan dan akses.
Data harus tersedia utuh dan bebas biaya. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah digunakan dan dapat diolah kembali. Data juga dapat diunduh melalui internet.
 - b. Penggunaan dan pendistribusian.
Data dapat digunakan dan didistribusikan kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
 - c. Terbuka untuk umum.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Setiap orang bebas menggunakan dan mendistribusikan kembali dataset serta tidak diperkenankan adanya diskriminasi atas bidang usaha, orang, atau kelompok.

- d. Dipublikasikan sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat jenis data yang dikecualikan dan tidak boleh dirilis.

2) Keterbatasan SDM di bidang statistik dan database di Provinsi Kepulauan Riau.

Pelaksanaan urusan statistik sesuai dengan NSPK penyelenggaraan statistik sektoral membutuhkan SDM yang kompeten di bidang statistik baik kuantitas maupun kualitas. Kondisi SDM di bidang statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat digambarkan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147 Jumlah SDM di Bidang Statistik

No	Uraian	Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah SDM bidang statistik	0	2	2	2	4	Dibutuhkan 6 orang (1 orang PNS, 2 orang PNS di BKO kan dari BPS Provinsi dan 3 orang THL)

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.148 Pendidikan SDM di Bidang Statistik

No	Uraian	Status	Pendidikan
1	Kasi Pengelola Data Statistik	PNS	S1/SSTP
2	Staf	THL	SMA

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

- 3) Belum terlaksananya sistim satu data. Prinsip satu data adalah mempunyai standar data, metadata baku, interoperabilitas data dan referensi data. Data



masih bersifat parsial di masing-masing sektoral, sehingga menghambat proses pelayanan publik.

- 4) Belum adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- 5) Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM *single* data statistik (SDS).

15. Urusan Persandian

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan capaian indikator persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sebagaimana tersaji pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149 Kinerja Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	2.5 (1 OPD)	20 (8 OPD)	100 (41 OPD)	100 (41 OPD)

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari Tabel 2.149 dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja persandian sudah 100%. Indikator kinerja tersebut dapat dicapai dengan melaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait pembuatan dan penerapan email SANAPATI ke seluruh OPD dan telah disosialisasikan serta dimplementasikan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kinerja persandian selain pemenuhan indikator pada RPJMD juga telah melaksanakan Audit Keamanan Informasi pada website dan aplikasi secara mandiri dengan mendatangkan tim ahli dari Badan Siber dan Sandi Negara, melaksanakan kontra penginderaan di ruang kerja dan kediaman pimpinan serta meningkatkan keamanan informasi pada sistem *e-government* di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Walaupun pencapaian kinerja persandian sudah 100%, namun masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan persandian dan keamanan informasi yaitu:

- 1) Kuantitas dan kualitas SDM bidang persandian dan keamanan informasi dalam menjaga informasi masih kurang. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu:
 - a. Keterbatasan SDM persandian yang memiliki sertifikat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
 - b. Pelaksanaan pelatihan terkait keamanan informasi lembaga masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan daerah.

Tabel 2.150 Data Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis terkait Persandian dan Keamanan Informasi

No	Uraian	Jumlah kebutuhan pelaksanaan (2016-2021)	Jumlah yang sudah dilaksanakan (2016-2021)	Keterangan
1	Peningkatan kapasitas SDM untuk admin aplikasi website OPD	5 kali	3 kali	Keterbatasan anggaran
2	Bimbingan teknis penerapan sertifikat elektronik	4 kali	0	Keterbatasan anggaran
3	Bimbingan teknis ISO 27001 (ISMS)	4 kali	1	Keterbatasan anggaran
4	Pelatihan IT <i>security</i> bagi admin aplikasi website tingkat ahli	4 kali	0	Keterbatasan anggaran
5	Pelatihan sandiman	3 kali	1 kali	Mengirimkan peserta ke BSSN selama 2 bulan
6	Pelatihan <i>Computer Security Incident Response Team</i> (CSIRT)	2 kali	0	Tidak dilaksanakan karena pandemi



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	Jumlah kebutuhan pelaksanaan (2016-2021)	Jumlah yang sudah dilaksanakan (2016-2021)	Keterangan
	bagi tim keamanan informasi			COVID-19
7	Pelatihan persandian pada OPD Pemprov Kepulauan Riau dan Dinas Kominfo kab/kota	3 kali	0	Keterbatasan anggaran
8	Diklat teknis <i>security operational center</i> (SOC)	3 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN
9	Diklat teknis dasar-dasar keamanan jaringan	2 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN
10	Diklat teknis disain jaringan komputer	2 kali	0	Mengirimkan peserta ke BSSN

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tabel 2.151 Jumlah SDM Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

No	Uraian	Tahun					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Jumlah SDM bidang						Dibutuhkan
1	persandian dan keamanan informasi	n/a	1	1	2	2	sebanyak 7 orang

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

- 2) Infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih kurang karena peralatan persandian yang tersedia baru dari BSSN. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab dalam pengadaan peralatan keamanan informasi. Berikut disajikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

data infrastruktur persandian dan keamanan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Tabel 2.152.

Tabel 2.152 Data Infrastruktur Persandian dan Keamanan Informasi

No	Nama barang kebutuhan persandian dan keamanan informasi	Jumlah kebutuhan	Jumlah tersedia	Keterangan
1	Jammer	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
2	<i>Spectrum analyzer</i> (kontra penginderaan)	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
3	Kriptosoft	2 unit	1	Pinjam pakai dari BSSN
4	Komputer	4 unit	2	Pengadaan sendiri
5	Printer	3 unit	1	Pengadaan sendiri
6	CCTV	5 titik	0	Pengadaan sendiri
7	<i>Firewall</i>	2 unit	1	Pengadaan sendiri
8	Server antivirus (<i>software</i>)	1 unit	0	Pengadaan sendiri

Sumber: Dinas Kominfo Provinsi Kepulauan Riau, 2021

- 3) Pemahaman terhadap tata kelola terkait persandian dan keamanan informasi masih kurang. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terkait pemahaman, kesadaran dan tata kelola persandian dan keamanan informasi. Di sisi lain peraturan tersendiri terkait tata kelola persandian dan keamanan informasi belum ada. Saat ini regulasi yang mengatur hal tersebut menjadi satu dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *e-government*.

16. Urusan Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Di



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

samping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat *tangible* (aset budaya yang kasat mata) maupun *intangible* (aset budaya yang tidak kasat mata). Mewarisi situs-situs kerajaan, peninggalan sejarah, seperti makam-makam, dan peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di Pulau Penyengat dan daerah lainnya. Untuk memajukan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan dalam penerapan nilai-nilai budaya melayu di dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Kepulauan Riau yang berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Melayu.

Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 2.153 berikut:

Tabel 2.153 Dimensi-Dimensi IPK Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2019

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Provinsi Kepulauan Riau
	Indonesia	Provinsi Kepulauan Riau	
Ekonomi Budaya	33.79	27.06	6
Pendidikan	72.49	82.24	
Ketahanan Sosial Budaya	73.55	80.15	
Warisan Budaya	43.89	47.84	
Ekspresi Budaya	37.14	34.24	
Budaya Literasi	59.11	72.13	
Gender	54.57	62.40	6
IPK Total	55.91	60.90	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Dimensi	Nilai Indeks		Ranking Provinsi Kepulauan Riau
	Indonesia	Provinsi Kepulauan Riau	
	Peringkat se-Indonesia (34 Provinsi)		

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kewenangan provinsi pada urusan kebudayaan mencakup: kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Kinerja terkait kebudayaan bisa dilihat dari beberapa indikator, seperti: penetapan karya budaya tak benda (*intangible*) yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan capaian sampai dengan tahun 2019 sebanyak 43 WBTB; jumlah SDM yang bersertifikasi bidang kebudayaan tingkat nasional dengan capaian sebanyak 5 orang; dan pemberian penghargaan bidang kebudayaan tingkat regional dan nasional dilaksanakan sebanyak 4 kali. Guna mendukung pengembangan kebudayaan diperlukan penyusunan peraturan daerah dalam bidang kebudayaan. Saat ini Perda di bidang kebudayaan yang telah disahkan yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Lembaga Adat Melayu (LAM), Perda Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau dan Perda Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan kebudayaan disajikan pada Tabel 2.154.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.154 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pengembangan Nilai Budaya							
	Bangunan yang Berciri Khas Melayu	persen	-	5,28	6,60	13,44	14,32	26,15
	Nilai Adat dan Tradisi yang Digali, Diaktualisasi dan Direvitalisasi	persen	-	4,87	10,2	19,98	40,64	55,85
	Warisan Budaya Tangible yang Lestari	persen	14,97	18,53	19,58	19,93	22,03	22,72
	Organisasi Budaya Berkategori Maju	persen	-	0	14,49	37,68	-	98,55
	Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	persen	-	3,1	6,49	13,29	-	79,61

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Jumlah festival yang paling banyak dilaksanakan di tahun 2018 sebanyak tiga festival dan tahun 2019 sebanyak enam festival. Dari enam festival hanya satu festival yang memiliki level tingkat regional dan satu festival bertaraf internasional dan memiliki kepesertaan dan pengunjung yang banyak yaitu Parade Tari Daerah dan Nusantara dan Festival Sastra Internasional Gunung Bintang. Peserta parade tari merupakan perwakilan dari 7 kabupaten/kota untuk mewakili Provinsi Kepulauan Riau ke tingkat nasional. Peserta Festival Sastra tingkat regional dari 33 provinsi dan se-Asia Tenggara.

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Keberadaan situs sejarah dan cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau belum dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana pengembangan kebudayaan. Jumlah total cagar budaya di 7 kabupaten/kota sebesar 286 cagar budaya, sampai dengan tahun 2020 persentase cagar budaya yang dilestarikan masih sangat rendah, yaitu sebesar 22,72% atau 65 cagar budaya (lihat Tabel 2.155).

Tabel 2.155 Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Warisan <i>Tangible</i> Dalam Kondisi Baik	Warisan <i>Tangible</i>	Persentase
1	Kota Tanjungpinang	4	65	6,15%
2	Kabupaten Bintan	1	45	2,22%
3	Kota Batam	3	20	15%
4	Kabupaten Karimun	3	18	16,67
5	Kabupaten Lingga	54	106	50,94
6	Kabupaten Natuna		13	0
7	Kabupaten Kepulauan Anambas		19	0
Total		65	286	22,72

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Dari 286 keberadaan cagar budaya dan 9.998 benda cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau belum dilakukan pengelolaan secara terpadu. Hal tersebut disebabkan antara lain belum adanya perda pengelolaan cagar budaya, dokumen perencanaan, juklak juknis pengelolaan, belum adanya UPTD pengelola, dan zonasi cagar budaya yang akan dikelola.

Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Sampai dengan tahun 2020 jumlah karya budaya yang sudah dicatat oleh kementerian sebesar 92 karya budaya, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Kebudayaan sebanyak 43 karya budaya atau sebesar 40,64%, sedangkan karya budaya yang sudah direvitalisasi sebanyak 6 karya budaya antara lain Gurindam Dua Belas, *Tudung Manto*, *Gazal*, Mak Yong Pantun Melayu, Tari Inai. Kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya sehingga membuat karya budaya tersebut hanya sebagai pencatatan, tidak bisa diusulkan sebagai penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia.

Bangunan yang Berciri Khas Melayu

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya memperkuat identitas masyarakat Kepulauan Riau dengan menjadikan bangunan berciri khas Melayu sebagai ikon yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat Melayu di Kepulauan Riau. Namun, persentase bangunan berciri khas Melayu masih rendah. Hal ini disebabkan antara lain belum ditetapkannya peraturan gubernur tentang bangunan berciri khas Melayu sebagai peraturan turunan dari Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri Khas Melayu. Pada tahun 2020, persentase bangunan yang berciri khas Melayu hanya sebesar 26,15% atau 497 dari total 1.900 bangunan pemerintah dan swasta yang ada di 7 kabupaten/kota (lihat Tabel 2.156).



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.156 Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu

No.	Kabupaten/Kota/ Provinsi	2016		2017		2018		2019		2020		2016-2020	
		Bangunan		Bangunan		Bangunan		Bangunan		Bangunan		Bangunan	
		Jumlah Bangunan	Berciri	Jumlah Bangunan	Berciri	Jumlah Bangunan	Berciri	Jumlah Bangunan	Berciri	Jumlah Bangunan	Berciri	Jumlah Bangunan	Berciri
			Khas Melayu		Khas Melayu		Khas Melayu		Khas Melayu		Khas Melayu		Khas Melayu
1	Kota Tanjungpinang	76	<i>n/a</i>	965	20	965	27	965	3	965	83	965	133
2	Kabupaten Bintan	215	3	285	3	285	25	285	3	285	37	285	76
3	Kota Batam	106	7	214	7	214	8	214	8	214	31	214	62
4	Kabupaten Karimun	88	6	143	6	143	9	143	11	143	20	143	52
5	Kabupaten Lingga	121	10	148	12	148	3	148	18	148	47	148	90
6	Kabupaten Natuna	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	62	2	62	14	62	6	62	3	62	25
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	60	5	60	30	60	1	60	4	60	36
8	Provinsi Kepulauan Riau	<i>n/a</i>	6	23	6	23	17	23	0	23	0	23	23
Total		606	32	1900	57	1.900	133	1.900	50	1900	225	1900	497

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan berperan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional, kreatif, dan inovatif serta membangun masyarakat yang berpengetahuan melalui ikhtiar kolektif untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca. Dalam melaksanakan kedua peran tersebut, setidaknya terdapat 3 fungsi perpustakaan dalam pembangunan. Pertama, perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan yang mampu mendorong inovasi dan kreatifitas. Kedua, perpustakaan adalah pusat pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi berbasis literasi, serta ketiga, perpustakaan adalah pusat kebudayaan yang berperan dalam memajukan dan melestarikan budaya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan provinsi pada urusan wajib non-pelayanan dasar perpustakaan mencakup pembinaan perpustakaan dan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Pembinaan perpustakaan digambarkan pada dua hal yaitu pengelolaan perpustakaan tingkat daerah provinsi serta pembudayaan gemar membaca. Sedangkan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno digambarkan pada tiga hal yaitu pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi daerah, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, serta pelestarian naskah kuno milik daerah provinsi.

Kinerja urusan perpustakaan secara umum ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja utama urusan perpustakaan yaitu nilai budaya literasi dan indeks tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan. Pada tahun 2019, nilai budaya literasi Provinsi Kepulauan Riau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018 dengan nilai yang mencapai 72,13. Sementara itu, indeks tingkat kepuasan pelayanan perpustakaan pada tahun 2020 mencapai angka 88,17. Capaian ini dikategorikan sudah baik, namun masih perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.157 Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perpustakaan

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Budaya Literasi	n/a	n/a	58,83	72,13	n/a
2.	Indeks Tingkat Kepuasan Pelayanan Perpustakaan	75	81,94	84,35	84,60	88,17
3.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	75,29	38,99	40,14	25,11	56,3
4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	n/a	n/a	48,61	n/a	14,45
5.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,26	0,41	0,45	0,52	13,38
6.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	18.424	20.546	21.209	22.424	21,663
7.	Persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	n/a	0	2	2	2
8.	Serah Simpan Karya Cetak Karya Rekam (KCKR)	0	0	0	7	53
9.	Ketercukupan koleksi perpustakaan dengan jumlah penduduk	8,33	14,33	39,55	39,43	0,09
10.	Ketercukupan tenaga perpustakaan dengan jumlah penduduk	n/a	0	0,0016	0,0025	0,000014
11.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	76.000	80.672	81.193	81.302	28,247
12.	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun	20,25%	27,65%	28,00%	28,64%	-65,26
13.	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk	n/a	0,0029	0,0031	0,0031	0,0007455
14.	Peningkatan Pelestarian Bahan Perpustakaan dan Naskah Kuno	n/a	n/a	Alih Media = 21 Naskah, Alih Bahasa	Alih Media = 1.027 Naskah, Alih	Alih Media = 6 naskah, Alih



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
				= 3 Naskah, Bahasa = 3 bahasa = 3 Perawatan Naskah, naskah, = 1.473 Perawatan Perawatan = 634 Lembar = 1.004 lembar Naskah dan Lembar dan 300 189 Buku Naskah buku dan 373 Buku		

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

18. Urusan Kearsipan

Arsip dapat diartikan sebagai segala kertas naskah, buku, foto, film, *microfilm*, rekaman suara, gambar peta, bagan, atau dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli atau salinannya, serta dengan segala cara penciptaannya, dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu badan sebagai bukti atas tujuan organisasi, fungsi, kebijakan, keputusan, prosedur, pekerjaan, atau kegiatan suatu organisasi, atau karena pentingnya informasi yang terkandung didalamnya. Arsip sangat penting terkait dengan kelancaran sistem organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sumber ingatan bagi organisasi. Pengelolaan kearsipan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui sistem sentralisasi dimana semua arsip yang ada dari berbagai bidang (unit) disimpan dan dikelola pada satu ruangan tersendiri dan melalui sistem desentralisasi dimana arsip-arsip dibagi menurut bidangnya (unitnya) untuk kemudian disimpan dan dikelola oleh masing-masing unit pada ruangan khusus di tiap unit.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan provinsi pada urusan wajib non-pelayanan dasar kearsipan mencakup pengelolaan arsip serta perlindungan dan penyelamatan arsip. Pengelolaan arsip digambarkan pada tiga hal yaitu pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, serta pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN. Sedangkan perlindungan dan penyelamatan arsip digambarkan pada lima hal yaitu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pemusnahan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala provinsi, penyelematan arsip, autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, serta pencarian arsip statis.

Kinerja urusan kearsipan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum ditunjukkan dengan capaian indikator urusan kearsipan yaitu nilai hasil pengawasan kearsipan, persentase SDM kearsipan yang mendapat sertifikasi dan penilaian kinerja, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, indeks ketersediaan arsip, indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan serta indeks tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Nilai hasil evaluasi pengawasan yang diukur oleh ANRI terhadap penyelenggara pengelolaan arsip di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan pada tahun 2020 adalah 55,10 atau berkategori "CC" (cukup) yang berarti masih jauh dari harapan. Sedangkan untuk indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan, sampai dengan tahun 2020 belum pernah dilakukan karena pelaksanaan pelayanan belum dapat dilaksanakan dan juga akibat situasi masih dalam kondisi pandemik Covid-19.

Tabel 2.158 Capaian Kinerja Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kearsipan

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	28	42	59,67	54,14	55,10
2.	Persentase jumlah SDM Kearsipan yang mendapat sertifikasi dan penilaian kinerja	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
3.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara Baku.	48,94 %	63,83 %	74,47 %	85,11%	63,83%
4.	Indeks Ketersediaan Arsip	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	52,50	1,01
5.	Indeks pelayanan dan fasilitasi kearsipan	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	45	18,33
6.	Indeks Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban sebagai aspek	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	71,39	61,54



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
	kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintah, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

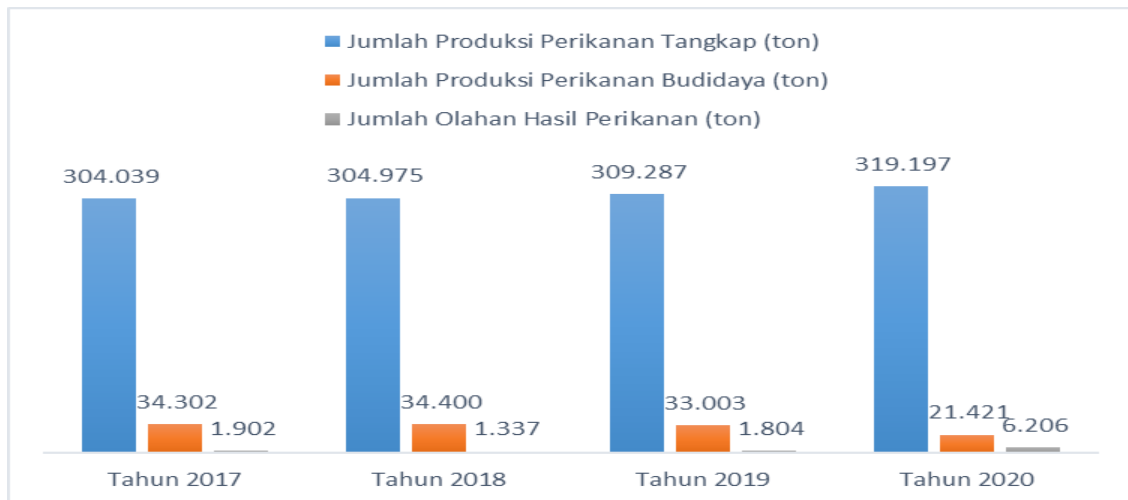
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor pertanian penting lainnya di Provinsi Kepulauan Riau adalah subsektor perikanan. Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang sangat besar mengingat lebih dari 96 persen wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah laut. Kawasan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meliputi seluruh wilayah laut dan perairan yang terdiri dari Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan Perikanan Budidaya. Dari kawasan tersebut, komoditas unggulan terdiri dari rumput laut (*seaweed*), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan. Berlimpahnya kekayaan kelautan Provinsi Kepulauan Riau tidak lantas menjadikan sektor perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Namun, penurunan jumlah produksi perikanan budidaya justru menunjukkan tren yang menurun sampai dengan Tahun 2020 meskipun di saat yang bersamaan jumlah olahan hasil perikanan mengalami kenaikan yang cukup besar di tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.72 berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.72 Perbandingan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya, dan Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton) Tahun 2017-2020

Pembangunan kelautan dan perikanan melalui program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan dalam rangka mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing di pasar domestik dan internasional dengan menerapkan sistem industri yang efisien dan nirlimbah. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan kompetitif.

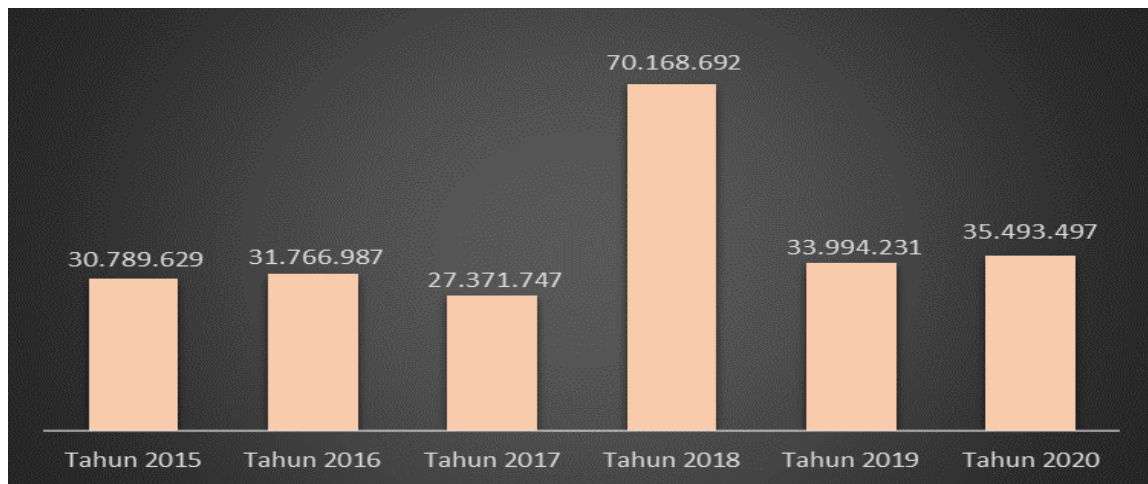
Peningkatan volume produk olahan hasil perikanan adalah indikator kinerja utama keberhasilan program kegiatan yang dilakukan. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Kepulauan Riau masih belum tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI), baik skala UMKM maupun skala besar.

Selain jumlah produksi perikanan, kinerja perikanan juga dapat dilihat dari nilai ekspor perikanan berdasarkan US Dollar (USD). Berdasarkan laporan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, nilai ekspor perikanan meningkat signifikan pada tahun 2018 namun pada tahun 2019-2020 kembali mengalami penurunan. Jika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

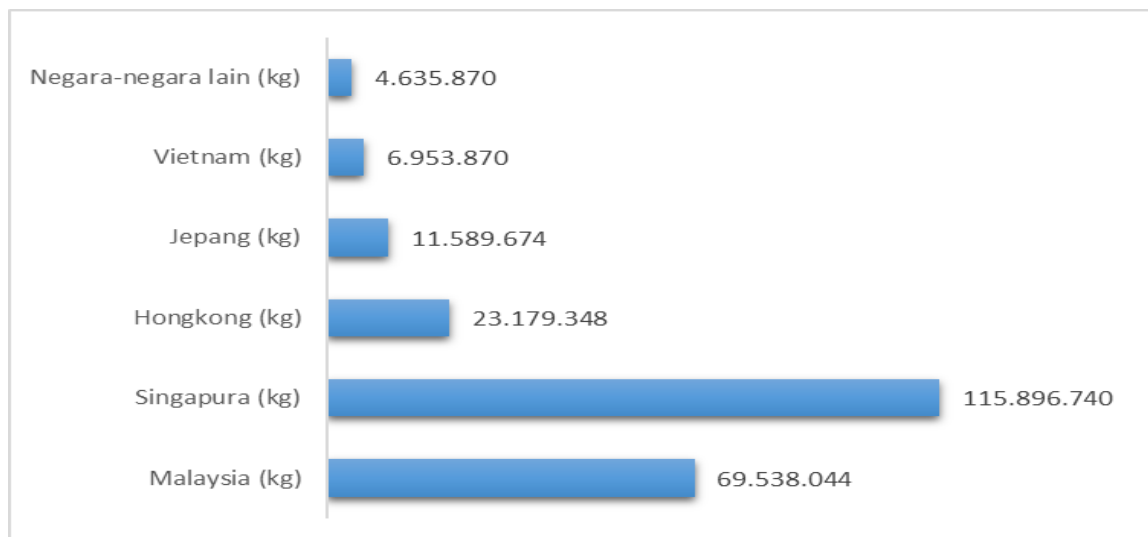
pada tahun 2015 nilai ekspor perikanan mencapai USD 30,789,629, angka tersebut meningkat ke angka USD 35.493.497 pada tahun 2020.



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.73 Nilai Ekspor Hasil Perikanan (dalam USD)

Sementara itu, negara tujuan ekspor produksi ikan terbanyak Provinsi Kepulauan Riau adalah Singapura disusul oleh Malaysia. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.74 berikut.



Sumber: Statistik Ekspor Provinsi Kepulauan Riau 2019

Gambar 2.74 Jumlah Ekspor Ikan Segar Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

Menilai kinerja sektor perikanan juga dapat dilihat dari kesejahteraan nelayan, yang dapat dideteksi dari nilai tukarnya. Dibandingkan dengan angka nasional, baik nilai



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tukar nelayan maupun pembudidaya ikan Kepulauan Riau lebih tinggi dari angka nasional, demikian juga dengan perkembangannya yang juga lebih baik. Pada tingkat konsumsi. Membaiknya kinerja nilai tukar nelayan berkaitan dengan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan adanya stimulus berupa sarana dan prasarana perikanan tangkap skala kecil yaitu alat penangkap ikan dan sampan bermesin. Selain itu juga, pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan budidaya yang menyediakan stimulus terhadap perkembangan budidaya ikan khususnya budidaya ikan laut. Stimulus yang diberikan berupa pakan, benih dan sarana pendukung lainnya. Kemudian, melalui peran UPTD Balai Benih Ikan dilakukan pengujian yang memproduksi benih ikan untuk memenuhi kebutuhan pembudidaya ikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya.

Tabel 2.159 Nilai Tukar Nelayan Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Nilai Tukar	Capaian					Sumber
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Nelayan						
1.	Kepulauan Riau	108,5	110,7	115,26	117,42	115,94	BPS
2.	Pembudidaya Ikan	107,28	107,23	108,20	126,77	101,83	BPS
3	Nelayan Nasional	102,38	102,82	104,05	105,99	107,53	BPS
4	Konsumsi Ikan (kg/kapita/th)	55,79	56,02	58,58	62,28	65,43	Susenas KKP

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Salah satu indikator lain keberhasilan kinerja bidang perikanan adalah tingkat konsumsi ikan. Saat ini posisi konsumsi ikan Kepulauan Riau jauh lebih tinggi daripada target nasional yang berkisar pada angka 45 kg/kapita/tahun. Sebagai wilayah kepulauan maka konsumsi ikan adalah pola konsumsi yang telah berakar kuat di



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

masyarakat, itulah sebabnya saat rata-rata konsumsi ikan Indonesia baru di angka sekitar 4 kg, Kepulauan Riau sudah mencapai lebih dari 55 kg perkapita per tahun.

Tabel 2.160 Kinerja Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

No.	Uraian	Capaian					Sumber
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Konsumsi Ikan (kg/kapapita/th)	55,79	56,02	58,58	62,28	65,43	Susenas KKP
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha	99	99	99	99	99	-
3	Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100	100	100	100	100	-
4	Kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola minimum (level 3)	-	1	1	1	n/a	Dinas KP Prov. Kepulauan Riau

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Capaian kinerja perikanan ini didukung oleh program-program yang telah dirancang dalam perencanaan pembangunan perikanan Kepulauan Riau sebagai berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.161 Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 2019-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Pencapaian Target Kinerja Program						Ketercapaian Target 2019 dan 2020
		2019			2020			
		T	R	% R	T	R	% R	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkp								
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	305.239,05	309.287,15	101,33	305.850,75	319.196,89	104,36	102,84
Nilai Tukar Nelayan (NTN)		110,08	117,42	106,66	110,32	115,94	98,87	102,76
Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya								
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.784,95	33.003,11	97,68	33.852,65	21.421,10	63,28	80,48
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		107,99	126,77	117,39	108,23	101,83	93,90	105,64
Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan								
Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.326,22	1.803,55	135,99	1.328,88	6.205,90	467,00	301,49
Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan								
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US Dolar	31.779.695	33.994.231	106,97	31.786.051	35.493.497	111,66	109,31
Peningkatan Status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	4	1	0	4	n/a	0	0
Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/Peraturan	1 (Pergub Rencana Pengelolaa n WP3K)	0	0	1 (Pergub Rencana Pengelolaan WP3K)	0	0	0
Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja Pencapaian Target Kinerja Program						Ketercapaian Target 2019 dan 2020
		2019			2020			
		T	R	% R	T	R	% R	
%Jumlah kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan								
Persentase Kelompok (KUB, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	13,13	13,13	100	16,95	16,95	100	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Kinerja perikanan yang kurang baik itu diidentifikasi disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut:

- 1) Permasalahan dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan perikanan tangkap: (1) Rendahnya persentase penggunaan perahu bermotor dibandingkan perahu tradisional; (2) Masih adanya *illegal fishing* dan *unregulated fishing* dan *unreported fishing*; (3) Kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi untuk nelayan Kepulauan Riau; (4) Kurangnya akses infrastruktur yang memadai dalam hal ini pelabuhan yang lengkap infrastrukturnya di setiap pulau; (5) Rendahnya tingkat pendidikan; (6) Kebutuhan keakuratan data oseanografi untuk setiap nelayan terkait peralihan musim yang dapat mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan tangkap; (7) Nelayan kurang menggunakan teknologi dalam penangkapan ikan, misalnya kapal-kapal asing dapat menangkap ikan lebih banyak dikarenakan mereka menggunakan teknologi pencarian ikan termutakhir; dan (8) belum optimalnya data nelayan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran.
- 2) Permasalahan dalam pembangunan dan pengelolaan perikanan budidaya antara lain: (1) Kurang akuratnya data oseanografi terkait peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan; (2) Adanya program pemberdayaan dari pusat maupun daerah yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat dan wilayah geografis kepulauan misalnya program budidaya ikan lele misalnya, program tersebut kurang mendapatkan respon yang baik bagi masyarakat di daerah dengan karakteristik nelayan tangkap; dan (3) belum optimalnya data nelayan penerima manfaat sehingga bantuan pemerintah belum sepenuhnya tepat sasaran.
- 3) Permasalahan dalam Program Penguatan daya saing hasil perikanan: Pengusaha mikro, kecil, dan menengah hasil perikanan mengalami kesulitan permodalan, bahan baku, pemasaran, BBM, transportasi, ketrampilan, upah buruh, dan lain sebagainya.



- 4) Permasalahan Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan masih perlu ditingkatkan terutama untuk menyelesaikan permasalahan terkait pemasaran.
- 5) Permasalahan dalam program Pengelolaan Sumber daya Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau kecil: (1) Masih maraknya alih fungsi hutan mangrove, penambangan, penebangan usaha arang di Tanjungpinang dan Batam yang memang beberapa akar permasalahan tersebut tidak bisa dihindari akibat dampak kawasan industri; (2) Penggunaan alat tangkap berbahaya sehingga merusak padang lamun dan terumbu karang; dan (3) Perlunya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi perumusan kebijakan yang komprehensif.
- 6) Permasalahan dalam Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan memiliki permasalahan yang kompleks. Ketika mereka tidak hanya dihadapkan permasalahan daerah akan tetapi mereka dihadapkan dengan permasalahan nasional, bahkan internasional dalam *illegal fishing*, *unregulated fishing*, *unreported fishing* dan *overfishing*.
- 7) Permasalahan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan. Masyarakat Kelautan dan Perikanan seharusnya mengarah pada *outcome* dari pengembangan sumber daya yang berbentuk sebelum dilaksanakan pengembangan dan sesudah dilaksanakan pengembangan. Hal ini dikarenakan permasalahan nelayan yang masih belum menggunakan metode yang tepat masih menjadi permasalahan sampai saat ini.

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi makro dapat dideteksi dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Wisatawan yang datang akan membutuhkan tempat untuk menginap dan tempat untuk berkonsumsi. Namun demikian, sebelum adanya pandemi COVID - 19 kontribusi sektor



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

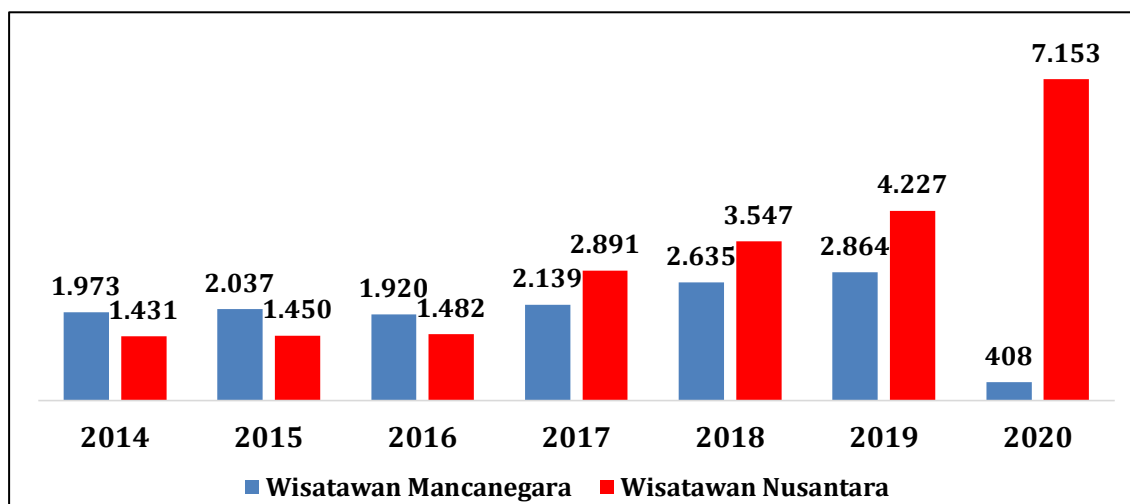
ini menunjukkan peningkatan, ini sebuah indikasi terus berkembangnya sektor pariwisata.

Tabel 2.162 Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kepulauan Riau terhadap PDRB

Uraian	Capaian					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,94%	1,94%	2,13%	2,26%	2,36%	1,60%*

Sumber: BPS, Kepulauan Riau dalam Angka 2020 * angka sementara

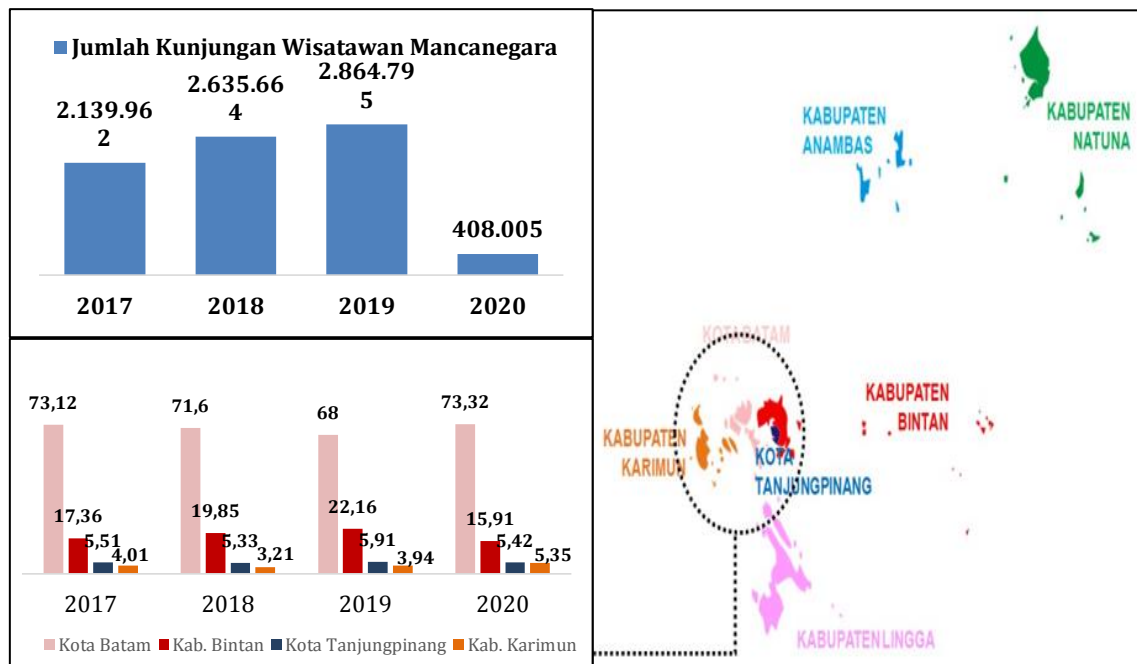
Kinerja pada sektor akomodasi dan penyediaan makan minum bersumber dari jumlah kunjungan wisata yang terus bertambah didukung oleh jumlah kunjungan wisata dan rata rata lama menginap yang semakin tinggi. Jumlah kunjungan wisata ke Kepulauan Riau baik domestik maupun mancanegara terus menunjukkan peningkatan, walaupun untuk wisatawan mancanegara peningkatannya kurang signifikan. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dalam hal jumlah kunjungan wisata Kepulauan Riau menempati urutan kedua setelah Bali.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Gambar 2.75 Perbandingan Jumlah Wisatawan Nusantara dan Mancanegara 2014-2020 (Ribuan Orang)

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 paling banyak melewati pintu masuk dari kota Batam yaitu sebanyak 299,158 orang (73,32%), selanjutnya Kabupaten Bintan sebanyak 64,896 orang (15,91%), Kabupaten Karimun sebanyak 21,836 orang (5,35%), dan melewati Kota Tanjungpinang sebanyak 22,115 orang (5,42%). Total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 408.005 orang. Dari seluruh kabupaten/ kota pintu masuk wisatawan mancanegara mengalami penurunan kunjungan yang signifikan; Kota Batam mengalami prosentase penurunan 84,64%, Kabupaten Bintan mengalami prosentase penurunan tertinggi sebesar 89,78 %, Kota Tanjungpinang mengalami prosentase penurunan sebesar 86,94 % dan Kabupaten Karimun mengalami prosentase penurunan sebesar 80,93%.

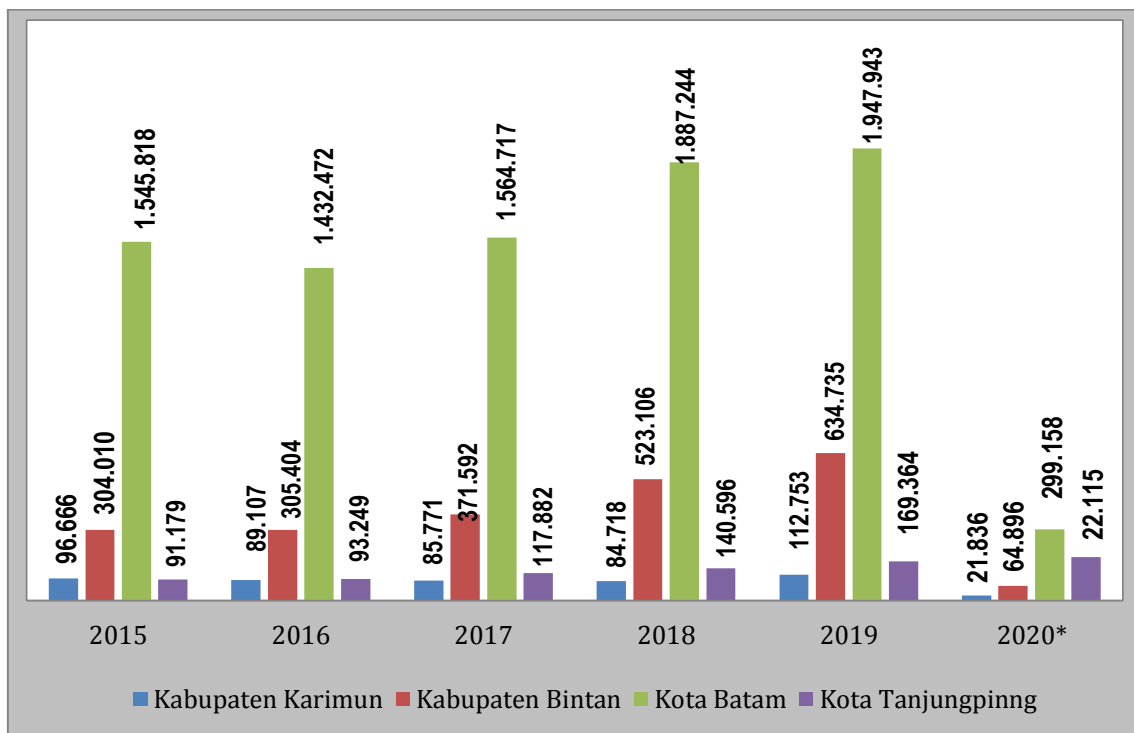


Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.76 Mapping Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Empat Pintu Masuk 2017-2020

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Sebagai contoh, berdasarkan BPS Kabupaten Bintan (2019) 89,29% wisatawan di Bintan didominasi oleh wisatawan mancanegara. Pariwisata di Kabupaten Bintan berkembang pesat dengan dikelolanya Kawasan Wisata Lagoi yang

terkenal sebagai pusat resor, *leisure activities*, serta berbagai gelaran internasional. Sementara itu, pariwisata di Tanjungpinang juga didominasi oleh wisatawan mancanegara dengan potensi wisata sejarah dan budaya, wisata belanja dan kuliner, serta event wisata. Tanjungpinang sebagai pusat pemerintahan ini kaya akan akulturasi budaya Melayu dan Tionghoa yang berpotensi untuk pengembangan wisata budaya. Sama seperti Bintan dan Tanjungpinang, pariwisata di Karimun juga didominasi oleh wisatawan mancanegara. Berdasar pada BPS Karimun (2019), 92% wisatawan di Karimun adalah wisatawan mancanegara. Koridor Kawasan Karimun memiliki potensi wisata alam (pantai dan air terjun), sejarah dan budaya, serta resor dengan konsep “Pulau Pribadi” di Pulau Sugi.



Sumber: Data BPS 2020, * data masuk hingga November 2020

Gambar 2.77 Jumlah Wisatawan Mancanegara melalui Empat Pintu 2015-2020

Dilihat dari asalnya, maka wisman berkebangsaan Singapura masih mendominasi angka berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada periode Januari hingga Desember 2019 atau hampir setengah (48,52 persen) dari total seluruh kunjungan wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. wisman berkebangsaan Malaysia berkontribusi



sebesar 10,57% sedangkan wisman berkebangsaan Tiongkok berkontribusi sebesar 10,00%. sedangkan wisatawan dari negara lainnya yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau kontribusinya masih dibawah 6% selama tahun 2019, seperti India, Philipina, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika.

Sementara itu pada tahun 2020 (data masuk hingga Desember 2020) wisman berkebangsaan Singapura juga masih mendominasi angka berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau pada periode Januari hingga Desember 2020 dengan kontribusi 44,91% dari total seluruh kunjungan wisman yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau. wisman berkebangsaan Malaysia berkontribusi sebesar 11,43% wisman berkebangsaan Tiongkok berkontribusi sebesar 6,02%, sedangkan wisman berkebangsaan India berkontribusi sebesar 4,30%. sedangkan wisatawan dari negara lainnya yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau kontribusinya masih dibawah 2% selama tahun 2020, seperti Philipina, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Australia, dan Amerika.

Rendahnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kepulauan Riau dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda dunia. Adanya wabah pandemi covid-19 kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan ekonomi yaitu larangan masuk atau transit bagi orang asing di Indonesia. Selain itu banyak negara yang melarang warga negaranya untuk bepergian sehingga memberi tekanan terhadap perekonomian terutama pada sektor pariwisata.

Untuk percepatan pemulihan pariwisata, pemerintah melaksanakan program sertifikasi *Cleanliness* (Kebersihan), *Health* (Kesehatan), *Safety* (Keselamatan) & *Environment Sustainability* (Kelestarian Lingkungan) untuk melakukan verifikasi jenis usaha/sektor/fasilitas dan layanan publik serta deklarasi mandiri wilayah bagi para pelaku usaha. Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability* (CHSE) berfungsi sebagai jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan. Dengan adanya sertifikasi CHSE ini tempat wisata dipastikan telah memenuhi standard status kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Label Indonesia *Care* akan menjadi penanda bahwa lokasi wisata tersebut



aman untuk dikunjungi, sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dan masyarakat, yang pada akhirnya akan memutar kembali roda perekonomian khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

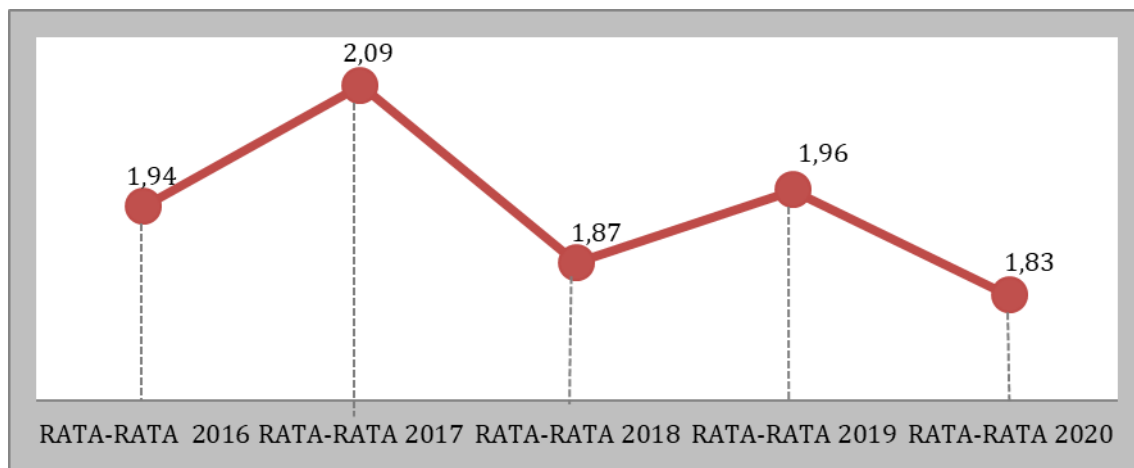
Bila jumlah wisatawan mancanegara cenderung stagnan dari tahun ke tahun, wisatawan Nusantara justru menunjukkan sebaliknya. Tren menunjukkan adanya peningkatan wisatawan Nusantara dari 1,48 juta orang di tahun 2016 meningkat menjadi 2,89 juta orang di tahun 2017, dan kembali meningkat menjadi 3,5 juta orang di tahun 2018. Tidak mengherankan kunjungan wisatawan Nusantara meraih posisi ke-17 seluruh Indonesia dan mengalami pertumbuhan paling pesat di wilayah Sumatra dalam lima tahun terakhir (lihat Lakip Dinas Pariwisata, 2018). Bila aktivitas pariwisata meningkat, pariwisata dapat menjadi salah satu daya ungkit bagi sektor-sektor lainnya baik itu pertanian, perdagangan bahkan sektor jasa lainnya. Tren adanya peningkatan wisatawan Nusantara dari 3,5 juta orang di tahun 2018 juga meningkat menjadi 4,2 juta orang di tahun 2019, dan kembali meningkat menjadi 7,1 juta orang di tahun 2020. Kunjungan wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik menempati peringkat ke -12 seluruh Indonesia atau mengalami peningkatan 5 (lima) titik di mana pada tahun sebelumnya Kepulauan Riau ada di peringkat ke-17. Sementara itu Kepulauan Riau menempati peringkat ke-4 di wilayah Sumatera di bawah Provinsi Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Barat, akan tetapi mengalami pertumbuhan yang paling pesat di wilayah Sumatera, bahkan di Indonesia. Pada tahun sebelumnya Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau hanya berada pada posisi ke-8 di wilayah Sumatera.

Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Desember 2020 adalah 1,3 hari, atau turun 0,06 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu pada November 2020. Pada bulan Desember 2020, rata-rata lama menginap tamu Indonesia mencapai 1,31 hari atau lebih rendah 2,96 poin dibanding dengan rata-rata lama menginap tamu asing yang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

mencapai 4,27 hari. Total Rata-rata lama menginap wisatawan dapat dilihat pada Gambar 2.78.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Gambar 2.78 Rata-rata Lama Menginap (hari) Tahun 2016-2020

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2020 mencapai rata-rata 27,41 persen atau naik 2,77 poin dibanding TPK november 2020 sebesar 24,64 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun sebelumnya, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 29,26 poin, dimana TPK bulan Desember 2019 yaitu sebesar 56,67 persen. Pada bulan Desember 2020, TPK hotel berbintang di Provinsi Kepulauan Riau lebih rendah 13,38 poin dibanding dengan TPK hotel berbintang secara nasional, dimana rata-rata TPK Nasional sebesar 40,79 persen

Untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata dan rata-rata lama menginap, telah dilakukan beberapa upaya. Capaian kinerja dari upaya-upaya tersebut secara detail disajikan dalam Tabel 2.163.

Tabel 2.163 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kunjungan wisatawan Mancanegara	juta orang	2,03	2,1	2,07	2,6	2,8	0,408
2	Kunjungan wisatawan Nusantara	juta orang	n/a	1,48	2,89	3,5	4,2	7,15



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,84	1.94	2.09	1.87	1.99	1.83
4	Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum	%	1,94	1,94	2,13	2,26	2,36	1,60*
5	Jumlah obyek wisata Unggulan	Unit	2	2	16	16	16	16
6	Jumlah Desa Wisata	Desa	15	19	22	25	31	58
7	Jumlah Kelompok Sadar Wisata	kelompok	17	20	30	51	81	81
8	Jumlah Pola Perjalanan	paket	<i>n/a</i>	4	<i>n/a</i>	2	4	5
9	Kapasitas Profesionalisme SDM Pariwisata	orang		1100	75	325	572	1.095
10	Peningkatan Pelaku Ekonomi Kreatif Aktif	%	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	2.73	13.3	24.21	21.74
11	CEO Kepulauan Riau di CEO Kemenpar	event	<i>n/a</i>	1	3	6	6	4
12	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	milyar rupiah	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	14.299	19.625	14.422
13	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	49.18	48.19	52.66	53.75	50.87	22.76

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Terdapat beberapa kinerja yang menunjukkan adanya fluktuasi, utamanya berkaitan dengan upaya untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat lokal. Sebagai contoh adalah jumlah desa wisata. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong pariwisata berbasis masyarakat belum berjalan secara baik di semua daerah, namun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa penambahan jumlah desa wisata di Kepulauan Riau.

Mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, pemerintah kabupaten/kota telah mulai dengan pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif. Ada 3 kabupaten/kota yang telah memiliki ruang kreatif, seperti Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Kota Tanjungpinang sendiri telah memiliki 6 ruang ekonomi kreatif, perkembangan tiap tahunnya terus meningkat.



Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan sendiri dan harus ditunjang dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Seperti aksesibilitas jalan, pelabuhan laut maupun udara merupakan kewenangan dari instansi lain seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan. Hal ini telah tercantum *dalam Grand Design* Pariwisata Kepulauan Riau yaitu RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau 2012-2022.

3. Urusan Pertanian

Sektor pertanian di Kepulauan Riau merupakan sektor yang memiliki kontribusi cukup kecil dalam perekonomian dengan pertumbuhan yang negatif, sehingga sektor ini masuk dalam kategori sektor non unggulan. Namun jika dilihat dari penduduk yang terlibat dalam sektor pertanian, maka sektor ini menjadi sektor unggulan. Sektor yang tumbuh negatif dengan kontribusi kecil ini jelas menjadi sektor yang tertinggal (*Background Study* Ekonomi, 2020).

**Tabel 2.164 Kontribusi dan Pertumbuhan Sektor dan Subsektor Pertanian Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2015-2019**

Sektor/Subsektor	2015		2016		2017		2018		2019	
	K	P	K	P	K	P	K	P	K	P
Pertanian	3,55	5,78	3,58	5,79	3,58	-1,21	3,26	-2,85	3,08	-0,7
Tanaman pangan	0,02	6,59	0,02	3,97	0,02	-5,60	0,01	-24,37	0,01	-10,31
Hortikultura	0,15	3,90	0,14	-1,82	0,14	0,39	0,13	5,71	0,15	17,90
Perkebunan	0,70	2,22	0,66	-2,26	0,68	4,13	0,66	1,35	0,66	6,86
Peternakan	0,32	6,18	0,33	8,29	0,35	8,73	0,35	6,90	0,38	12,26
Perikanan	2,32	7,04	2,39	8,35	2,28	-3,77	2,07	-5,81	1,84	-6,15

Ket: K= kontribusi ; P = pertumbuhan

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

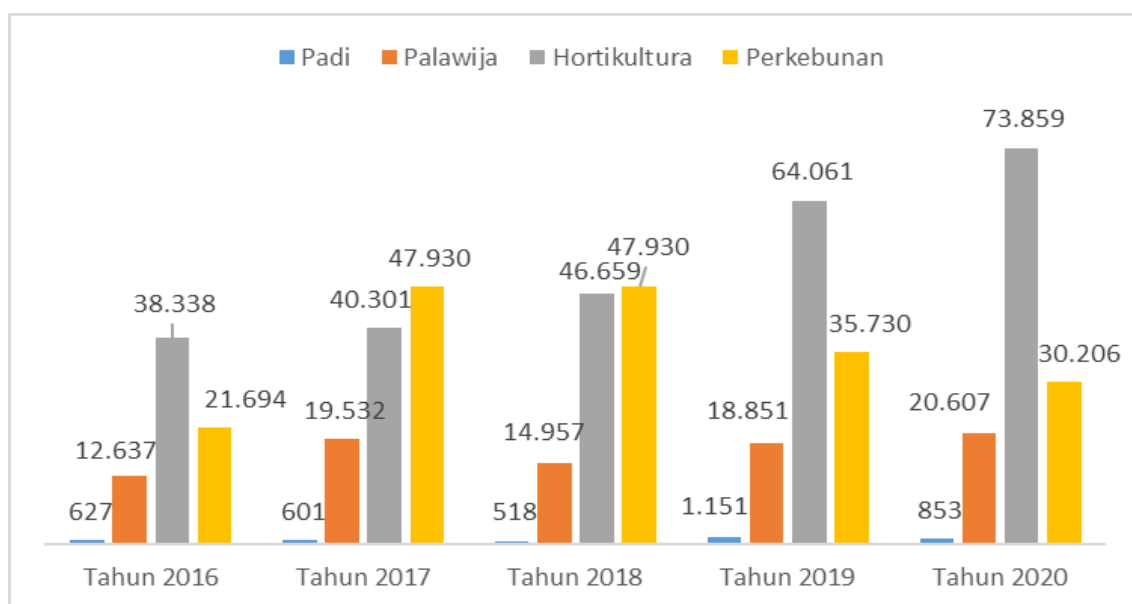
Sektor pertanian yang kurang optimal dan bukan unggulan ini tetap harus menjadi perhatian penting, sebab sektor pertanianlah yang menjadi sumber penghasilan penduduk sekaligus sebagai supplier pangan. Pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sektor unggulan untuk mengurangi ketergantungan terhadap hasil bumi seperti pertambangan dan penggalian. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kawasan peruntukan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pertanian seluas 227.682,63 ha. Kawasan tersebut terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pengembangan kawasan budidaya ini bertujuan untuk memanfaatkan potensi berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan demi mendukung ketahanan pangan serta pengembangan berorientasi agribisnis pertanian. Lebih lanjut, kawasan peternakan kemudian dibagi menjadi dua peruntukan, meliputi: skala agribisnis dan skala peternakan rakyat. Kawasan agribisnis di Provinsi Kepulauan Riau diprioritaskan di Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan beberapa pulau lainnya yang memiliki potensi serta kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Sementara itu, pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan.

Di antara berbagai produk pertanian itu, produk perkebunan dan hortikultura merupakan produk dominan di Kepulauan Riau, sedangkan produk padi adalah produk pertanian yang paling rendah. Hal ini berkaitan dengan wilayah Kepulauan Riau yang sebagian besar adalah laut. Dilihat dari perkembangan produksinya juga mengalami fluktuasi, terutama untuk perkebunan.

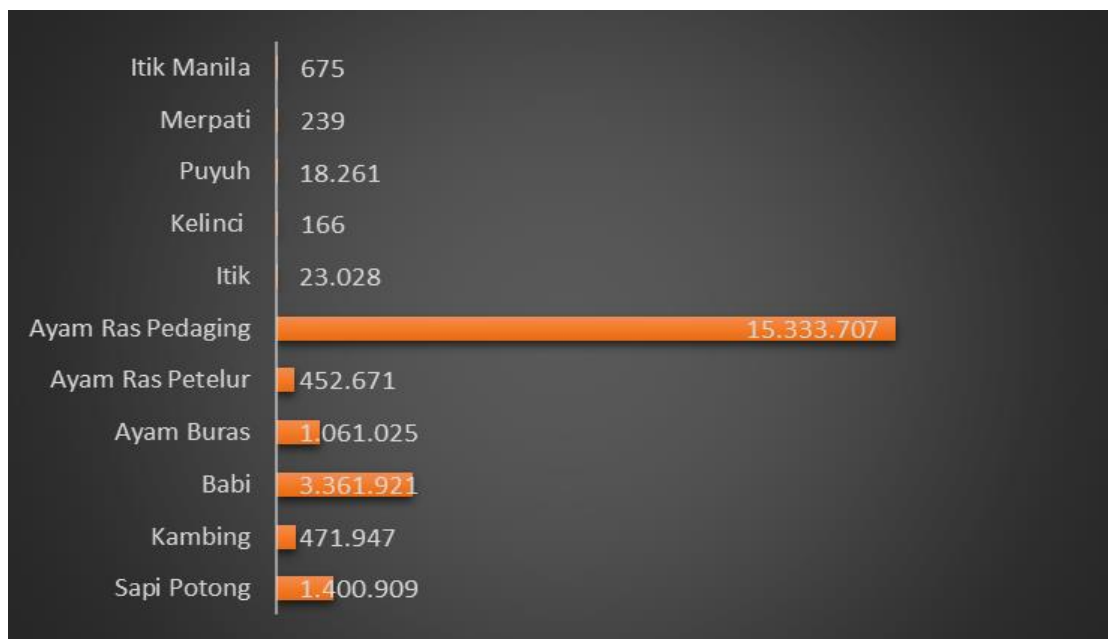


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Gambar 2.79 Perbandingan Jumlah Produksi Padi, Palawija, Hortikultura, dan Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Meskipun hasil produksi pertanian hortikultura meningkat, namun secara substansi kinerja indikator tersebut masih belum optimal. Hal ini dikarenakan buah dan sayuran masih berasal dari provinsi lain bahkan diimpor. Untuk peternakan, produk peternakan unggas lebih unggul jika dibandingkan dengan ternak besar. Sekali lagi persoalan sempitnya lahan menjadi masalah untuk ternak besar.



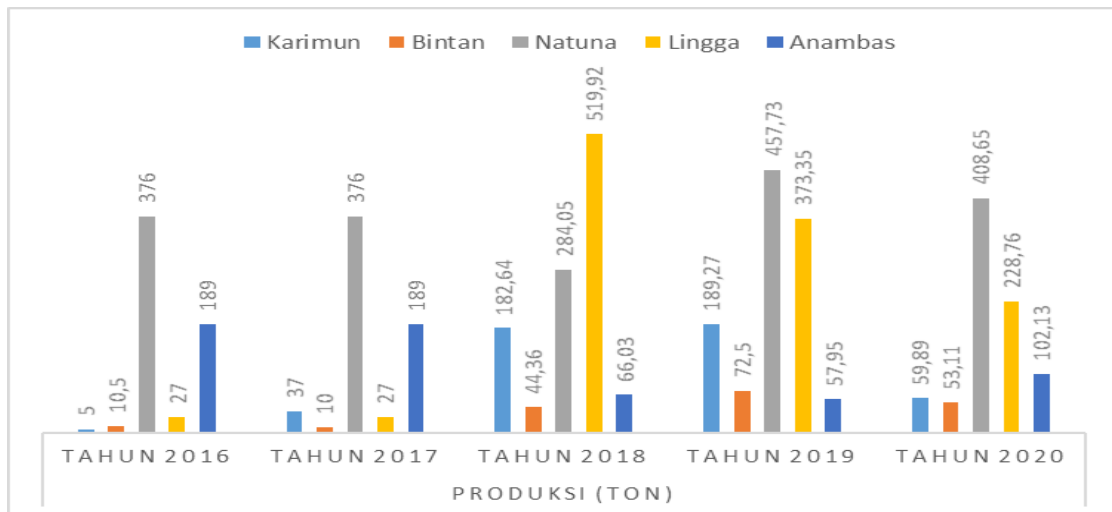
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.80 Perbandingan Produksi Hasil Produk Peternakan (kg) Tahun 2020

Dilihat dari persebarannya, maka produk pertanian, utamanya padi tersebar di seluruh kabupaten dengan kontributor terbesar di Kabupaten Natuna, disusul oleh Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Karimun. Di tahun 2020 jumlah produksi padi dari setiap kabupaten sangat fluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.81 Jumlah Produksi Padi Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2020

Kinerja sektor pertanian yang kurang baik itu disebabkan oleh berbagai aspek. Pertama, sumber daya manusia yang belum siap. Masyarakat baik nelayan belum siap untuk berubah haluan menjadi petani, pada sisi lain para transmigran, juga masih belum mampu dalam pelaksanaan bercocok tanam dengan baik. Kedua, alih fungsi lahan. Ini terjadi di Karimun yang dahulu menjadi kawasan budidaya pangan dan sekarang menjadi kawasan industri. Ketiga, adanya ketergantungan yang tinggi terhadap beras dan mengabaikan potensi pangan lokal. Ketika beras menjadi sumber pangan utama, maka Kepulauan Riau mengalami ketergantungan beras dari luar provinsi, padahal ada sagu yang juga merupakan salah satu pangan pokok di berbagai daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sagu dapat dikembangkan suatu pangan pokok dengan adanya pengembangan teknologi melalui industri pangan lokal di Kabupaten Lingga. Kinerja pertanian ini didukung oleh berbagai program Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditunjukkan pada Tabel 2.165 berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.165 Kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan dalam Pertanian Tahun 2015-2020

Jumlah Produksi	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,45	98,16	97,98	97,02	98,22	99,19
Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	1,21	0,81	4,9	2,6	9,36	-2,96
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan							
Jumlah Produksi Padi	Ton	959	627	601	518	1.150	852
Jumlah ProduksiTanaman Palawija	Ton	12.637	12.637	19.531	14.957	18.851	20.432
Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	Ton	14.000	38.338	40.301	46.659	61.301	63.382
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	21.694	21.694	47.930	47.930	37.553	30.051
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan							
Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,98	5,98	4,67	5,05	5,32	5,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak							
Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,042	0,042	0,04	0,032	0,04	0,021
Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,0045	0,0035	0,0035	0,003	0,002	0,002
Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	51,27	76,34	78,84	85,71	57,31	67,18



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Jumlah Produksi	Satuan	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Peternakan							
Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	3,11	3,11	3	5	5,28	5,56
Persentase Kelompok Tani menerapkan Teknologi pertanian/perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	3,28	3,28	4,53	4,63	6,85	6,95

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

4. Urusan Kehutanan

Sektor Kehutanan memiliki kontribusi terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,01% dari target 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi tersebut sesuai dengan LKJP 2020 menunjukkan pada kategori rendah. Selain kontribusinya terhadap PDRB, Tabel 2.166 menyajikan kinerja urusan kehutanan tahun 2016-2020.

Tabel 2.166 Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Kritis yang Terehabilitasi	313	243	386	400	300
2.	Persentase Luas Hutan dan Lahan Kritis yang direhabilitasi	7,01 %	7,03%	7,39%	7,58%	7,73%
3.	Persentase kerusakan kawasan hutan	29,27%	29,21%	29,11%	28,98%	28,925
4.	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	32,56%	32,59%	32,64%	32,68%	32,71%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Lahan kritis menjadi satu indikator adanya degradasi lingkungan dan sebagai akibat dari berbagai jenis pemanfaatan sumber daya lahan yang kurang tepat Lahan kritis akan menyebabkan terganggunya fungsi lahan sebagai media pengatur tata air, perlindungan banjir dan/atau sedimentasi di wilayah hilir. Dampak lahan kritis mengakibatkan penurunan fungsi konservasi, fungsi produksi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dari fungsi konservasi, lahan kritis adalah lahan yang sudah tidak mampu lagi berfungsi untuk menjaga tata air, sumber daya tanah, serta biodiversitas yang hidup di atas lahan tersebut. Dari fungsi produksi, lahan kritis dipandang tidak mampu lagi sebagai media tumbuh dan berkembang tanaman pertanian, perkebunan,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

kehutanan, perikanan, pemukiman, industri dan pariwisata. Berdasarkan kondisi tersebut dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut.

Strategi penanganan lahan kritis pada kegiatan RHL dapat dilakukan dengan cara: 1) meningkatkan sinergi antara BPDASHL Sei Jang Duriangkang dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan RHL; 2) membuat RHL menjadi lebih inklusif sehingga kegiatan RHL dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor yang tidak terbatas oleh BPDASHL Sei Jang Duriangkang; dan 3) meningkatkan kapasitas partisipasi dalam hal perumusan strategi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Di samping itu, kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat berupa Kelompok Tani Hutan.

Berdasarkan data lahan kritis di atas, potensi kegiatan RHL di Provinsi Kepulauan Riau pada lahan kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis seluas $\pm$ 346.110 hektar. Kegiatan RHL yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016-2020 dengan pelaksana BPDASHL Sei Jang Duriangkang dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau baru seluas $\pm$ 1.658 hektar. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan pelaksanaan RHL masih sangat kecil dibanding dengan luas lahan yang perlu direhabilitasi. Tabel 2.167 menyajikan data lahan kritis di kabupaten/kota.

**Tabel 2.167 Lahan Kritis Tahun 2020 Wilayah Kerja BPDASHL Sei Jang Duriangkang
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)					Total Luas (Ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
1	Bintan/Tanjungpinang	52.221	15.744	76.589	2.269	-	146.823
2	Kota Batam	33.120	45.239	19.526	5.481	-	103.367
4	Kabupaten Karimun	30.335	57.343	5.201	288	-	93.167
5	Kabupaten Lingga	42.341	38.570	141.902	20	-	222.833
6	Kabupaten Natuna	122.307	44.036	34.266	337	-	200.946
7	Kabupaten Kepulauan	1068	2369	59.675	-	51	63.262



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/Kota	Tingkat Kekritisan Lahan (Ha)					Total Luas (Ha)
		Tidak Kritis	Potensial Kritis	Agak Kritis	Kritis	Sangat Kritis	
Anambas							
	Total	281.474	203.933	337.880	8.179	51	831.517

Sumber: BPDASHL Sei Jang Duriangkang, 2021

Selain lahan kritis, di Kepulauan Riau terdapat permasalahan konflik tenurial Kawasan hutan. Kawasan hutan yang menimbulkan konflik tenurial di wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara lain tertuang dalam surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepada Wakil Ketua DPR RI Nomor: S.91/MenLHK-II/2015 Tanggal 6 Maret 2015 perihal Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang Berdampak Penting dengan Cakupan yang Luas dan Bernilai Strategis (DPCLS) di Provinsi Kepulauan Riau, luas areal DPCLS yang dimohon Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk diberikan persetujuan perubahan menjadi bukan kawasan hutan oleh DPR RI adalah seluas ± 23.872 hektar yang berasal dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam/Taman Buru (KSA/KPA/TB) seluas ± 8.620 hektar dan kawasan hutan lindung seluas ± 15.252 . Namun hanya sebagian kecil dari permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari DPR RI sehingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Nomor: 272/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 hanya merubah peruntukan kawasan hutan seluas ± 330 hektar dan merubah fungsi Taman Buru menjadi Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas ± 7.560 hektar dari total ± 23.872 hektar yang dimohonkan persetujuan sehingga menimbulkan kecemburuan bagi kabupaten/kota yang lain mengingat keputusan tersebut hanya mengubah fungsi dan peruntukan di wilayah Kota Batam. Dengan terbitnya keputusan tersebut, maka kawasan hutan DPCLS yang belum mendapatkan persetujuan DPR RI di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah seluas ± 16.002 hektar dengan rincian:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- Kabupaten Bintan-Kota Tanjungpinang seluas ± 11.005 hektar terdiri dari fungsi kawasan suaka alam/pelestarian alam seluas ± 1.068 hektar dan fungsi hutan lindung seluas ± 9.937 hektar
- Kota Batam seluas ± 1.667 hektar, terdiri dari fungsi kawasan suaka alam/pelestarian alam seluas ± 12 hektar dan fungsi hutan lindung seluas ± 1.655 hektar
- Kabupaten Karimun seluas ± 2.216 hektar dengan fungsi hutan lindung
- Kabupaten Lingga seluas ± 966 hektar dengan fungsi hutan lindung.
- Kabupaten Natuna seluas ± 148 hektar dengan fungsi hutan lindung.

Belum adanya persetujuan DPR RI sebagaimana tersebut di atas menyebabkan terjadinya tumpang tindih antara kawasan hutan dengan hak-hak pihak ketiga yang menyebabkan konflik tenurial. Dampak negatif yang timbul dari permasalahan di atas antara lain adalah:

- 1) Perlu adanya kepastian hukum akan pemanfaatan ruang yang akan menyebabkan memperlambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu ujung tombak pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah tidak dapat diterapkan secara maksimal;
- 3) Terjadinya stagnasi pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tanggal 2 Desember 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun;
- 4) Terganggunya iklim investasi dan sosial kemasyarakatan;



- 5) Terganggunya pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana prasana pemerintahan pada areal yang masih berstatus kawasan hutan.

Pemasangan Pal Batas Kawasan Hutan merupakan rangkaian dari proses pengukuhan kawasan hutan dimana berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses penunjukan, tata batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan. Pemasangan pal batas kawasan hutan merupakan bukti fisik di lapangan bahwa kawasan hutan telah dilakukan penataan batas. Pemasangan pal batas dilakukan dengan melibatkan unsur Kehutanan baik pusat maupun daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Barenlitbang, Camat, Kepala Desa/Lurah setempat yang ditetapkan sebagai Panitia Tata Batas Kawasan Hutan melalui Surat Keputusan. Pada kegiatan rapat panitia tata batas, dilakukan analisis terhadap hak atas tanah/penguasaan tanah. Apabila kawasan hutan yang akan dipasang Pal Batas Kawasan Hutan terdapat hak-hak pihak ketiga yang sah berdasarkan peraturan agraria, maka dilakukan enklave untuk melindungi hak-hak keperdataan masyarakat.

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kondisi geomorfologinya merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan sebutan nama “Paparan Sunda” atau bagian dari kerak Benua Asia. Dengan kondisi geomorfologi, dapat kita lihat Provinsi Kepulauan Riau tersimpan kekayaan alam yang melimpah baik yang terdapat di permukaan maupun tersembunyi di dalam bumi. Pengelolaan terhadap energi dan sumber daya mineral ini harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari atas ribuan pulau, sehingga masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia karena rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah perdesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Merupakan



suatu kenyataan bahwa kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat ditambah seiring dengan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), selaku lembaga resmi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan.

Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2020 adalah 93,72 sementara itu, untuk Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Provinsi Kepulauan Riau, Daya Terpasang 132,28 rumah tangga dan Daya Mampu 86,33 rumah tangga. Di Provinsi Kepulauan Riau keluarga yang menggunakan listrik PLN tahun 2020 mencapai angka 621.982 keluarga, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sedangkan jumlah keluarga yang menggunakan Listrik Non-PLN mencapai angka 6.614 keluarga, berkurang dari tahun sebelumnya, ini merupakan bukti Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan tugas fungsinya sebagai unsur pelaksana. Kendala keterbatasan infrastuktur ketenagalistrikan dapat diatasi oleh pemerintah secara bertahap dengan membangun perluasan jaringan listrik ke pelosok-pelosok desa. Selain itu terdapatnya kesulitan dalam mengalokasi bantuan pembangkit listrik dalam bentuk genset ke desa terpencil karena adanya desa yang belum memiliki kelembagaan setara BUMDes yang mampu menjamin *sustainability* pembangkit listrik yang akan dihibahkan oleh pemerintah provinsi, sehingga perlu adanya dorongan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk melakukan percepatan pembentukan BUMDes/Koperasi agar dapat mengalokasi bantuan pembangkit listrik ke desa sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan mesin genset, sehingga capaian target Rasio Elektrifikasi untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2020-2024 dapat tercapai 100%.

Pada sektor energi baru terbarukan (EBT) saat ini belum begitu berkembang. Penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahalnya biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil, hal ini menyebabkan pengembangan dan



pemanfaatan EBT masih terkendala, tidak maksimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Berdasarkan atas validasi dan pengukuran survei secara teknis dalam rangka meningkatkan kualitas data, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi EBT seperti:

- Tenaga Surya: dengan potensi sebesar 753 MW dan telah terealisasi melalui dana APBD/ APBN sebesar 1,95 MW (pembangkit).
- Biogas: potensi sebesar 4,3 MW.
- Energi laut: dengan potensi sebesar 126.567 MW.
- Biomassa (PLTBM): terealisasi melalui dana APBD/APBN sebesar 900 KW.
- Bayu/angin: dengan potensi sebesar 922 MW.

Sehubungan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan penetapan Peraturan Daerah Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang bertujuan mengarahkan pengelolaan energi daerah secara optimal dan terpadu, guna terwujudnya kemandirian dan ketahanan energi daerah dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan air tanah adalah terbatasnya sumber daya air tanah di alam yang disertai dengan meningkatnya pemanfaatan air tanah. Sering terjadi pemanfaatan air tanah melampaui batas kemampuan cadangan air tanah itu sendiri. Ditambah dengan keterbatasan pelayanan air bersih yang mendorong pengambilan air tanah secara tidak terkontrol, yang dapat berakibat terjadinya degradasi kuantitas, kualitas dan lingkungan air tanah.

Sumber daya air, termasuk di antaranya air tanah digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan, jasa, termasuk di antaranya kegiatan pariwisata. Agar ketersediaan air tanah dapat terus berkelanjutan maka pengelolaan air tanah mulai dari pengambilan kebijakan, penyusunan strategi dan rencana pengelolaan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah harus mengacu pada peta



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Cekungan Air Tanah (CAT). Sampai saat ini belum ada penetapan CAT di Provinsi Kepulauan Riau, padahal penetapan CAT tersebut dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan strategi dan rencana pengelolaan serta pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Belum adanya penetapan CAT tersebut karena belum optimalnya kajian/ penelitian potensi air bawah tanah serta terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan kajian/penelitian.

Pada sektor sumber daya mineral, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya mineral logam dan non logam dan batuan dengan beberapa kriteria yang didapatkan dari hasil penyelidikan baik dari tingkat penyelidikan berupa prospeksi.

Pemprov Kepulauan Riau melalui Dinas ESDM saat ini tengah menyusun ketentuan hukum terkait dengan tatacara penunjukan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Sejak terbitnya UU Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020, ke depannya pengelolaan kegiatan usaha pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat, dan berdasarkan undang-undang tersebut saat ini telah tersedia “sanksi yang memaksa” pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pascatambang yaitu berupa sanksi pidana.

Tabel 2.168 Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Kinerja Urusan ESDM	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	89,14	91,44	91,50	92,59	93,72
2.	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	n/a	n/a	69	71,2	65,27
	Daya Terpasang	n/a	n/a	125,34	127,31	132,28
	Daya Mampu	n/a	n/a	86,49	107,6	86,33
3.	Jumlah keluarga yang menggunakan listrik PLN	452.118	519.604	519.604	551.005	621.982
4.	Jumlah keluarga yang menggunakan yang menggunakan listrik non-	11.989	3.960	4.327	2.796	6.614



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Kinerja Urusan ESDM	2016	2017	2018	2019	2020
PLN						
5.	Jumlah keluarga yang belum berlistrik	56.524	49.017	48.650	44.341	42.105
6.	Desa yang menggunakan listrik PLN	311	327	354	374	380
7.	Desa yang menggunakan listrik non-PLN	87	76	52	42	36
8.	Desa belum berlistrik	19	13	10	0	0
9.	Persentase pertambangan tanpa izin	Blm dilakukan Pendataan	Blm dilakukan Pendataan	Blm dilakukan Pendataan	9,18	16,43
10.	Potensi Energi Baru Terbarukan					
	Tenaga Surya	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	753 MW	753 MW
	Biogas	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	4,3 MW	4,3 MW
	Energi Laut	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	126.567 MW	126.567 MW
	Biomassa (PLTBM)	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	1 MW	1 MW
	Bayu/angin	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	922 MW	922 MW

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, 2021

6. Urusan Perdagangan

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika mampu dioptimalkan. Provinsi Kepulauan Riau masih bisa meningkatkan kinerja ekonominya terutama di sektor pertanian, kehutanan dan kelautan serta produk olahan selanjutnya. Didukung letak geografis Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara Singapura dan Malaysia, maka peluang untuk mengeksport produk-produk unggulan Provinsi Kepulauan Riau tersebut terbuka lebar.

Ekspor sebagai salah satu sumber devisa negara saat ini sedang berusaha digalakkan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar 2.9% pada tahun 2019, Adalah rekor terendah. Hal ini merupakan tantangan global yang dihadapi yaitu adanya



konflik, Ancaman non-tradisional, populisme (sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat yang sering kali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang di sebut elit), proteksionisme (Kebijakan ekonomi yang mengetatkan perdagangan antar Negara melalui cara-cara seperti tarif barang import, batas kuota, dan berbagai peraturan pemerintah yang dirancang untuk menciptakan persaingan adil), bencana alam, rivalitas/persaingan, *trade war*/perang dagang. Adanya perubahan kondisi ekonomi global dan regulasi yang sangat cepat, tidak diimbangi dengan intensitas (komunikasi, sosialisasi&mediasi) antar pelaku usaha eksportir-importir dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Saat ekonomi global yang sedang mengalami perlambatan saat ini Industri Kecil dan Menengah justru masih dapat tumbuh dan terus berkembang karena masih besarnya potensi untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor khususnya Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan nilai ekspor dengan memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha, diantaranya adalah dengan memberikan fasilitasi ekspor dan impor. Dengan kemudahan-kemudahan tersebut diharapkan para pengusaha lebih termotivasi untuk meningkatkan ekspor produk-produk mereka, sehingga devisa yang masuk ke Indonesia akan semakin besar.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pembangunan secara terpadu, baik pembangunan ekonomi, masyarakat maupun lingkungan. Agar pengembangan industri dan perdagangan memberikan hasil yang optimal dalam rangka kemajuan perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau maka potensi daerah yang dimiliki telah menjadi satu kekuatan dalam pengembangan industri dengan memanfaatkan peluang pasar domestik maupun internasional. Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berperan aktif dalam pertumbuhan kinerja ekspor melalui Peningkatan Pengembangan Ekspor pada industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Kepulauan Riau dan meningkatkan daya saing eksportir pemula.

Kinerja sektor perdagangan didukung oleh dua sektor, yakni sektor perdagangan luar negeri dan sektor perdagangan dalam negeri. Sektor perdagangan luar negeri dalam tugas dan fungsinya melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan



perdagangan luar negeri di daerah dengan peningkatan dan fasilitasi ekspor, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, meningkatkan kerjasama dan promosi, pengembangan dan peningkatan produk potensial ekspor serta pembinaan pelaku usaha ekspor impor dengan kontribusi PDRB dapat dilihat pada Tabel 2.169, pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2014 sebesar 0,078 %; tahun 2015 sebesar 0,058 %; tahun 2016 sebesar 0,061 %; tahun 2017 sebesar 0,052 %; tahun 2018 sebesar 0,027 % ; tahun 2019 sebesar 0,024 % dan tahun 2020 mengalami penurunan sebesar minus 0,030 % hal ini disebabkan masih berlangsungnya pemulihan ekonomi Pandemi Covid 19 yang dirasakan oleh pelaku usaha di provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu untuk kontribusi perdagangan terhadap PDRB Tahun 2014-2019 mengalami kenaikan yaitu pada Tahun 2014 sebesar 7,30% ; Tahun 2015 sebesar 7,73 % ; Tahun 2016 sebesar 8,20 % ; Tahun 2017 sebesar 8,63 % ; Tahun 2018 sebesar 8,86 % ; Tahun 2019 sebesar 9,07 % ; dan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 8,8 %.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberdayakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai tempat pengaduan kasus yang menyangkut masalah perlindungan konsumen, dimana BPSK terdapat di 2 (dua) kab. Kota yaitu di Kota Tanjungpinang dan Kota Batam, sebagaimana terlampir data pelaporan kasus yang sudah diselesaikan dan data pelaporan konsultasi kasus. Secara rinci pencapaian kinerja indikator urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel 2.169.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.169 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasar pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi	unit	60	63	70	108	113	119	121
2	Cakupan pasar yang dilakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi (%)	%	n/a	n/a	60,00	61,00	63,00	64,00	57,14
3	Jumlah pengaduan kasus sengketa BPSK Kota Batam	kasus	-	-	48	68	10	-	113
4	Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	%	7.30	7.73	8.20	8.63	8.86	9.07	8,8
5	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	0,078	0,058	0,061	0,052	0,027	0,024	-0,030
6	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan	USD juta	4.602.57	3.284.87	3.280.75	3.391.46	1.769.48	1.850.91	742,38

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

7. Urusan Perindustrian

Kinerja sektor perindustrian di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh dua bidang yaitu bidang Industri Agro dan Manufaktur dan Bidang Industri Kecil dan Menengah. Sektor Perindustrian dalam hal ini Industri Pengolahan menjadi salah satu sektor yang dominan dalam pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut bisa dilihat



dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB, yang selama beberapa tahun terakhir selalu menunjukkan kontribusi terbesar dibandingkan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan data BPS, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 42,77% mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang sebesar 37,57%. Besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB salah satunya dipengaruhi oleh banyaknya perusahaan yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan data BPS, jumlah perusahaan besar dan menengah tahun 2017 dengan klasifikasi jumlah tenaga kerja diatas 20 orang sebanyak 444 perusahaan, dimana sebanyak 390 diantaranya berada di kota Batam.

Jumlah industri kecil di Kepulauan Riau mencapai 2.500 unit pada tahun 2020, meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2019 yang jumlahnya 2.400 unit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku industri kecil, banyak hal yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya yang dilakukan antara lain melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap pelaku industri kecil dan menengah baik melalui pelatihan, bimtek, sosialisasi, bantuan mesin dan peralatan, fasilitasi klinik kemasan, dan menyertakan pelaku industri serta produk-produk dari pelaku industri kecil ke berbagai kegiatan pameran maupun expo. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih terbatasnya jumlah produk-produk pelaku industri kecil yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mengikuti pameran atau expo. Cakupan IKM yang dibina provinsi sebanyak 11,57%, sedangkan cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk sebanyak 0,05%. Dalam rangka meningkatkan jumlah wirausaha baru di Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah juga melakukan pelatihan terhadap warga masyarakat yang belum memiliki usaha yang diharapkan dapat tumbuh sebagai wirausaha baru.

Dalam rangka meningkatkan kinerja sektor industri, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama kabupaten/kota mengembangkan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Kawasan industri ini akan ditingkatkan jumlahnya pada tahun-tahun mendatang sehingga dapat memicu pertumbuhan industri. Secara rinci kinerja urusan perindustrian dalam kurun waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.170.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.170 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi sektor perindustrian	%	37,56	37,43	37,07	36,85	37,57	42,77
2	Pertumbuhan sektor perindustrian	%	5,61	3,36	1,53	4,14	6,25	13,84
3	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	sentra	2	4	6	8	8	8
4	Jumlah rencana pembangunan industri provinsi.	dokumen	0	0	1	2	2	1
5	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	2.400	2.500
6	Rata-rata omset IKM yang dibina	%	n/a	0,008	0,012	0,021	0,014	n/a
7	Cakupan pelaku IKM yang mengikuti promo produk	IKM	n/a	n/a	18	20	24	10
8	Cakupan IKM yang dibina provinsi	IKM	n/a	60	145	175	338	120
9	Jumlah IKM yang terfasilitas melalui klinik kemasan	IKM	180	180	180	180	180	250
10	Jumlah calon wirausaha baru yang dilatih	orang	n/a	n/a	20	20	30	20
11	Jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan	orang	n/a	n/a	20	60	150	45
12	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	26	32

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

8. Urusan Transmigrasi



Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini belum memiliki jenis Transmigrasi Swakarsa, yang ada adalah Transmigrasi Umum sejak tahun 1992 yang berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas, dan Kabupaten Lingga. Rencana Transmigrasi Swakarsa berkemungkinan pada Kabupaten Lingga, yang saat ini sudah membuat dokumen teknis Rencana Kawasan Transmigrasi. Rencananya Kabupaten Lingga akan bekerjasama dengan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pengukuran capaian kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merujuk pada RPJMD Tahun 2016-2021 bahwasanya transmigrasi untuk pencapaian Indikator Kinerja Daerah berdasarkan atas indikator jumlah warga KK yang ditempatkan sesuai dengan Rencana Penempatan, yang mana tingkat capaiannya sebagai berikut:

Tabel 2.171 Capaian Indikator Kinerja Transmigrasi

No.	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah warga (KK) yang ditempatkan sesuai dengan rencana penempatan	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	1.845
2	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi	2	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

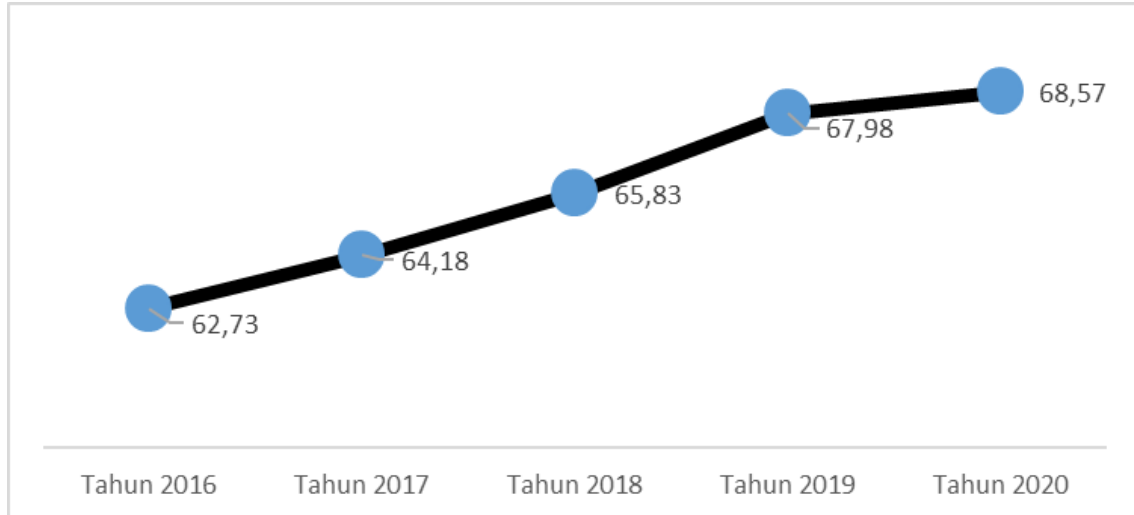
1. Urusan Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan reorganisasi, namun belum sepenuhnya mempertimbangkan proses bisnis dan kinerja yang akan diwujudkan, hal ini penting untuk mewujudkan *performance-based organization* sehingga tercipta organisasi yang efektif dan efisien. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan secara optimal yang tercermin dari pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

walaupun nilainya pada tahun 2020 masih rendah yaitu sebesar 68,57 sebagaimana yang tersaji pada Gambar 2.82.



Sumber: Data LKPJ Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Gambar 2.82 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rincian penilaian seluruh komponen Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.172.

Tabel 2.172 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
A	Komponen Pengungkit		
	I. Komponen	20,00	12,74
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,52
	III. Reform	30,00	16,44
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	35,70
B	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75
3.	Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	9,13
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,72



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai 2020
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	32,87
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	68,57

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

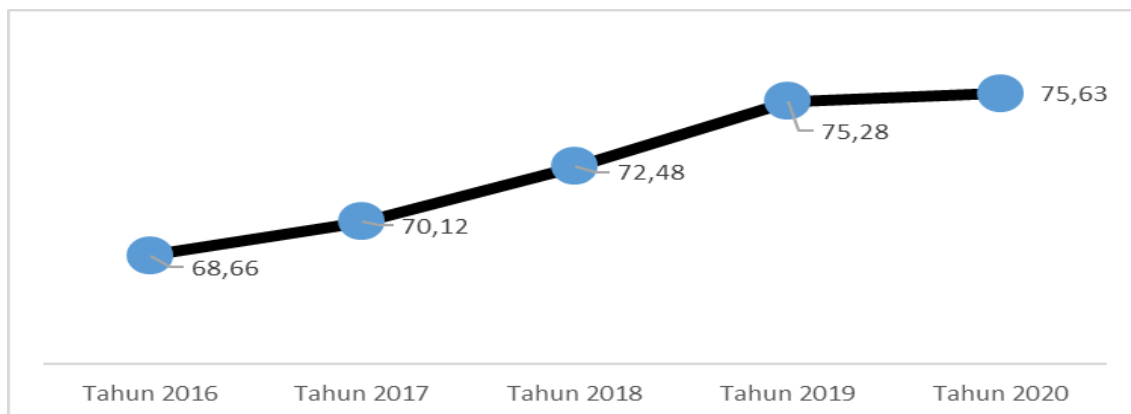
Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang direpresentasikan dengan nilai Indeks Reformasi Birokrasi beserta komponen kompositnya tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan dalam mencapai Reformasi birokrasi yang optimal yang antara lain terkait dengan perlunya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program-program reformasi birokrasi. Deregulasi kebijakan juga masih belum berjalan secara efektif dimana masih terdapat kebijakan yang tumpang tindih yang menghambat proses pembangunan. Dalam hal pengimplementasian *e-government* masih belum dilaksanakan secara memadai dimana pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi sehingga belum mengungkit perbaikan dan layanan.

Selain itu, Peta Proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah dan juga belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM. Standar pelayanan formal yang telah dibentuk dan dilaksanakan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Sementara itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan meskipun hal ini masih belum terbangun dengan baik. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan predikat BB dengan nilai 75,63 pada capaian nilai SAKIP. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Sumber: Data LKPI Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021

Gambar 2.83 Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Rincian penilaian seluruh komponen nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 -2020 dapat dilihat pada Tabel 2.173:

Tabel 2.173 Nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	2018	2019	2020
			Nilai	Nilai	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	23,97	24,47	24,95
2.	Pengukuran Kinerja	25	18,88	18,88	19,49
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,59	12,01	11,82
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,39	6,95	7,04
5.	Capaian Kinerja	20	11,65	12,97	12,33
Nilai Hasil Evaluasi		100	72,48	75,28	75,63
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB

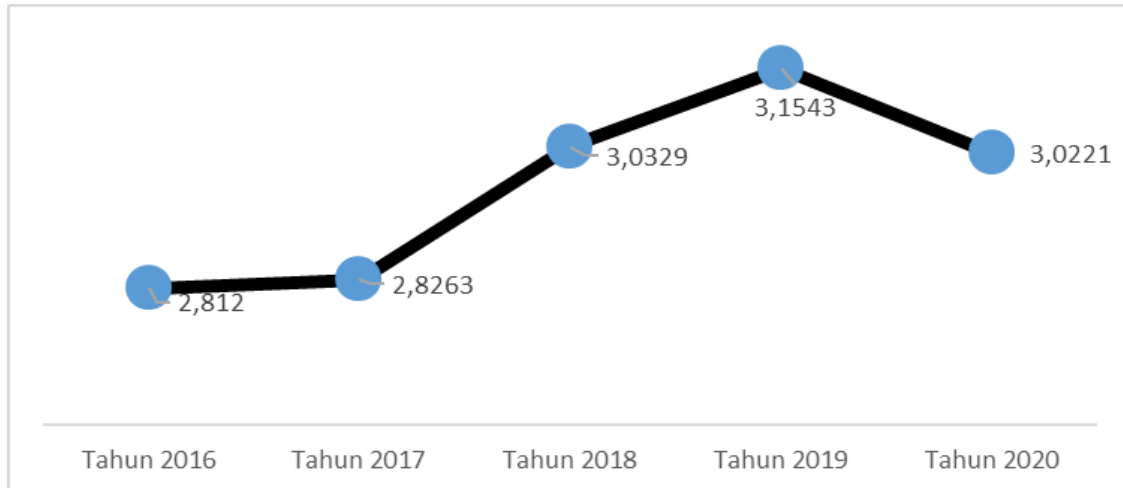
Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sejalan dengan peningkatan unsur komponen pelaporan kinerja pada tahun 2018 - 2020, nilai LPPD yang diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016-2019 juga terus mengalami peningkatan meskipun di tahun 2020 mengalami penurunan. LPPD merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Kemendagri untuk menilai Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPPD) selama satu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah.



Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.84 Nilai LKPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

Peningkatan kinerja instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tersebut juga didukung dengan capaian kinerja tata kelola pemerintahan lainnya sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.174.

Tabel 2.174 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Lokasi Prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	34,15	63,41	100	100	20%
2.	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan APBD sesuai target	Fisik: 94,00 Keuangan: 89,00	Fisik: 84,55 Keuangan: 88,04	Fisik: 97,04 Keuangan: 95,97	Fisik: 97,37 Keuangan: 100,32	Fisik: 99,36 Keuangan: 97,48
3.	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPD	n/a	65,26	69,64	75,39	86,57



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
4.	Rendahnya Tingkat Kesehatan BUMD	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	32	33,33	56,32
5.	Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	<i>n/a</i>	1	5	6	7

Sumber: Data LKPJ Provinsi Kepulauan Riau s/d 2020

2. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu daerah. Apabila perencanaannya bagus maka akan menghasilkan pembangunan yang baik juga. Sampai saat ini telah banyak produk dokumen perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pertama, RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun dan menetapkan RPJPD Tahun 2005-2025 dengan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2009.

Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2015 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2011 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025. Sebagai lanjutan perencanaan jangka menengah di tahun periode selanjutnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2016, dikarenakan terdapat penyesuaian terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah maka dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Riau Tahun 2016-2021 dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2018.

Ketiga, penyusunan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 2016.

Keempat, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Provinsi telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) dalam Peraturan Kepala Daerah yaitu Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dari tahun 2015 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 20 Mei 2014
2. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2015
3. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 28 Mei 2015
4. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2016
5. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 30 Mei 2016



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 27 tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 29 Mei 2017
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2018
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2018
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2019
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2019.
12. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2020 Tentang RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2020.

Rencana pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, *bottom up* dan *top down process*. Artinya, perencanaan pembangunan daerah selain memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, juga harus konsisten dengan rencana lain yang relevan. Pendekatan *money follow function* mulai digunakan pemerintah pada tahun 2017 dalam proses perencanaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan *money follow program*, jumlah keselarasan program di RPJMD dengan RKPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Kesesuaian dokumen perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.175.

Tabel 2.175 Kesesuaian Dokumen Perencanaan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90	80	96	100	100
2.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021



3. Urusan Keuangan

Kondisi keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target penerimaan daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui pengeluaran daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Secara umum terdapat 2 (dua) penerimaan daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sumber penerimaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan.

Berdasarkan hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sejak tahun 2010 Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Bahkan dari tahun 2016-2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil mempertahankan predikat WTP tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif.

**Tabel 2.176 Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

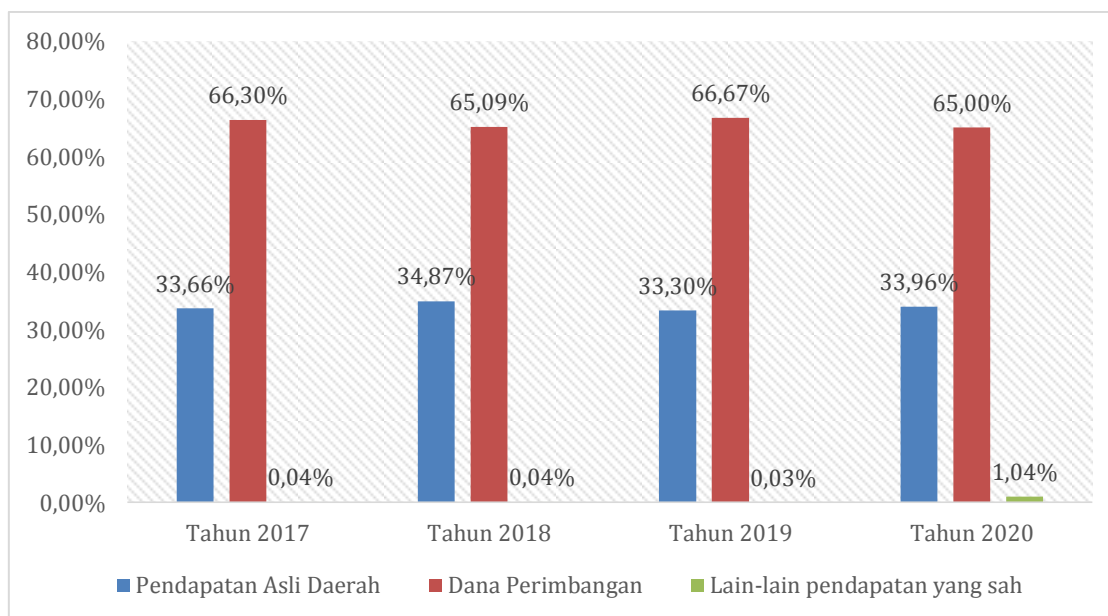
Sumber: Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Sementara itu, kinerja pendapatan daerah di Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan. Kontribusi pendaptan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2017-2020 cukup fluktuatif meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Mayoritas kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan. Pada tahun 2020, kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah mencapai angka 65,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pembiayaan pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini disebabkan karena penggalan PAD belum optimal dan adanya berbagai kendala dalam inventarisasi aset Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau khususnya pencatatan aset tanah sebagaimana yang telah dijelaskan pada urusan pertanahan.



Sumber: BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.85 Kontribusi Unsur-Unsur Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 (%)

Gambaran kinerja keuangan daerah juga dapat dinilai dari Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas PAD dan Persentase Kenaikan PAD sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177 Kinerja Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata	Kategori
Rasio Kemandirian	59.56%	50.77%	53.59%	49.94%	52,25%	53.47%	Sedang
Rasio Efektivitas PAD	95.24%	90.21%	106.86%	104.09%	102,29%	99.10%	Cukup Efektif
Rasio Efisiensi PAD	6.77%	7.79%	7.27%	7.63%	3,05%	7.37%	Sangat Efisien
Persentase Peningkatan PAD	6.52%	1.43%	11.51%	7.45%	-9,08%	6.73%	Efisien

Sumber: BP2RD Provinsi Kepulauan Riau, 2021



4. Urusan Pengawasan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota (pada Bab XIX tentang Pembinaan dan Pengawasan Bagian Kesatu tentang Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 373 ayat (2)) dan Gubernur melakukan pengawasan pada perangkat daerah provinsi dibantu oleh Inspektorat Provinsi (Bagian Kedua tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah Pasal 379 ayat (1) dan (2)). Setiap tahunnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Perencanaan Pengawasan yang menjadi acuan bagi Gubernur melakukan pengawasan baik terhadap pemerintah kabupaten/kota maupun pengawasan terhadap perangkat daerah. Kinerja pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja pengawasan sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.178.

Tabel 2.178 Kinerja Pengawasan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Level APIP	2	2	2	3	2+
2.	Pemenuhan Kebutuhan Auditor	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	43%	39%	38%
3.	Pemenuhan Kebutuhan P2UPD	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	79%	79%	79%
4.	Persentase Auditor yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	76%	90%	100%
5.	Persentase P2UPD yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	44%	93%	100%
6.	Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat	62%	76%	77%	68%	68%
7.	Jumlah Rekomendasi BPK	81	112	39	41	-
8.	Persentase tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	67%	%	82%	85%	85,50%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Nilai maturitas SPIP	2	3	3	3	3
10.	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik	Kuning	Hijau	Kuning	Hijau	Hijau
11.	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau
12.	Kasus Tipikor pada Pemprov Kepulauan Riau	0	2	2	3	0

Sumber: Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Berdasarkan hasil *Quality Assurance* BPKP atas penilaian mandiri yang dilakukan Inspektorat Daerah, level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada pada Level 3 (Dengan Catatan). Dari 6 elemen dan 151 pernyataan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mampu memenuhi sebanyak 140 pernyataan.

Sementara itu, capaian kinerja tindak lanjut atas hasil pemeriksaan Inspektorat belum cukup maksimal. Pada tahun 2020 persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat sebanyak 68%. Hal ini disebabkan oleh sejumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat terbit pada akhir tahun sehingga data pada akhir tahun 2020 terdapat temuan yang belum ditindaklanjuti. Penyebab lainnya masih rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat daerah adalah rendahnya komitmen kepala perangkat daerah atas tindak lanjut. Sedangkan untuk pemeriksaan BPK atas Pemeriksaan Keuangan, kinerja dan dan pemeriksaan tujuan tertentu cukup tinggi yaitu sebesar 85%.

Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 34 dan Pasal 35, Gubernur melalui Inspektorat Daerah melakukan pengawasan internal terhadap kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik untuk menjamin kualitas pelayanan publik di daerah. Hasil pengawasan terhadap pelayanan publik pada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana hasil pengawasan Ombudsman Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat kategori “Hijau” pada tahun 2019 dengan nilai mencapai 98%.



Selain Ombudsman, lembaga pemerintah lainnya yang melaksanakan pengawasan khususnya bidang pencegahan pada pemerintah daerah adalah KPK RI. Sejak tahun 2017, KPK telah melaksanakan program koordinasi dan supervisi yang terintegrasi pada pemerintah daerah. Pemerintah Daerah diberikan penilaian atas capaian indikator rencana aksi pencegahan korupsi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil meraih zona “hijau”. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong fungsi pengawasan yang efektif baik yang dilaksanakan oleh APIP, pengawas eksternal maupun oleh aparat penegak hukum

Meskipun penilaian dari lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat penilaian yang cukup baik, namun nyatanya kasus korupsi masih saja terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa indikator yang dicapai belum terinisialisasi dengan baik pada program-program khususnya pada sektor pelayanan publik. Hal ini disebabkan belum maksimalnya koordinasi yang terintegrasi antara APIP dan APH, sehingga fungsi pencegahan atas tindakan koruptif belum dapat diminimalisir dan indikator pencegahan korupsi belum dapat terinisialisasi pada program dan kegiatan pembangunan di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

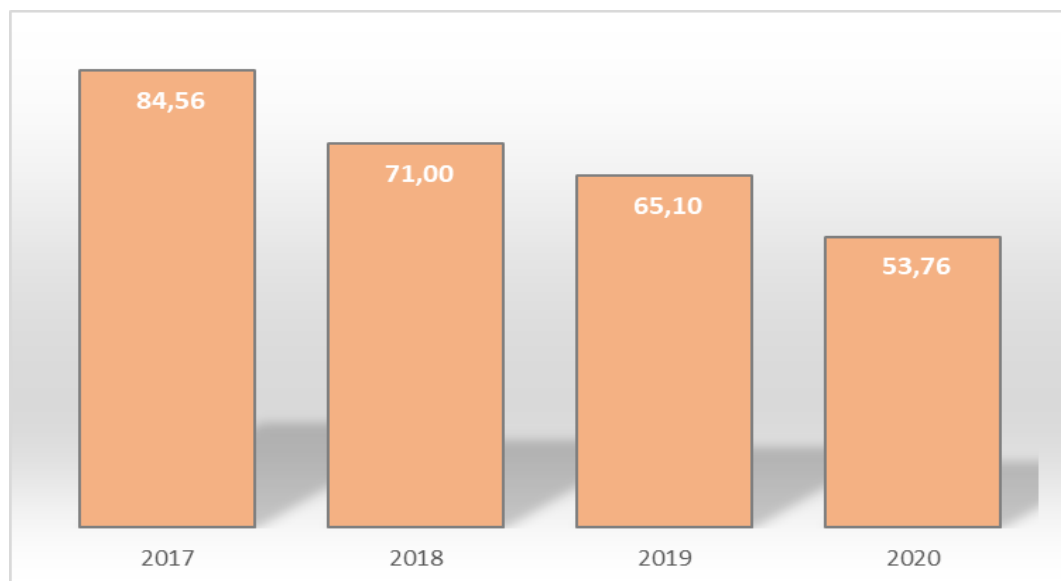
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. ASN juga menjadi mesin birokrasi yang menggerakkan sumber daya-sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan. Di sisi lain ASN menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam visi misi Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (SOTK) bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 (enam) Badan, 21 (dua puluh satu) Dinas, Inspektorat Daerah, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah yang memiliki 9 (sembilan) Biro dan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil



(PNS) sebanyak 5.111 orang, dengan jumlah PNS Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebanyak 2.321 orang atau sekitar 45,41% dari jumlah PNS di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terjadi karena tahun 2016 kewewenangan SMA/SMK sederajat dilimpahkan ke provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah diperlukan PNS yang profesional. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Gambar 2.86 Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

Dari data di atas terlihat bahwa indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 baru mencapai angka 53,76. Hal ini berarti tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih pada kategori rendah. Sedangkan rincian nilai komposit



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dari masing-masing variabel pembentuk indeks profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.179.

Tabel 2.179 Indeks Profesional ASN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Komponen	Penilaian	
		Bobot	Nilai
1	Dimensi Pendidikan	25	14,18
2	Dimensi Kompetensi	40	9.29
3	Dimensi Kinerja	30	25,30
4	Dimensi Disiplin	5	4,99
Total		100	53,76

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Tingkat profesionalitas ASN yang rendah mengakibatkan pelayanan umum, pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan secara optimal. Adapun indikator penilaian IPP tersebut sebagai berikut:

Indikator pertama, dinilai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal yang dicapai, meliputi Pendidikan S-3; Pendidikan S-2/D-4; Pendidikan S-1; Pendidikan D-3; Pendidikan D-2/D-1/SLTA Sederajat dan Pendidikan di bawah SLTA dengan nilai secara berurutan dari 5, 4, 3, 2, 1, dan 0. Peningkatan penilaian dalam indikator ini dapat dilakukan melalui ijin belajar atau tugas belajar untuk pendidikan formal dengan mengambil jenjang pendidikan setingkat di atasnya.

Indikator kedua, dinilai dari Kompetensi PNS diukur dari riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi Diklat Kepemimpinan; Diklat Fungsional; Diklat Teknis; dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara dengan nilai jika pernah mengikuti Diklat kepemimpinan 1 jika tidak pernah mengikuti mempunyai nilai 0, demikian seterusnya. Peningkatan nilai dalam indikator ini dapat dilakukan dengan mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat. Namun demikian, untuk bisa melaksanakan hal masih belum bisa dilaksanakan secara optimal karena kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Hal ini ditunjukkan pada tahun



2019 Diklat dilaksanakan sebanyak 7 kali sedangkan pada tahun 2018 pelaksanaan Diklat hanya dilaksanakan sekali.

Pengembangan kompetensi PNS diperlukan mengingat tuntutan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, peningkatan daya saing, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, lebih lanjut pengembangan kompetensi merupakan hak setiap PNS. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS disebutkan pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.

Ketiga, perhitungan indikator Kinerja diukur dari Penilaian Prestasi Kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan Perilaku Kerja dengan nilai perhitungan sesuai dengan nilai Gabungan Penilaian Kinerja. Perhitungan indikator Kinerja menjadi hal yang penting dalam mengukur keberhasilan kerja yang dicapai oleh setiap PNS. Saat ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menerapkan penilaian kinerja berbasis elektronik bagi seluruh PNS di luar Tenaga Pendidik dan Kependidikan. Untuk Pegawai Tidak Tetap serta Tenaga Harian Lepas belum diterapkan penilaian kinerja sehingga kontribusinya kepada instansi belum dapat diukur.

Indikator keempat, yang dinilai adalah Disiplin Pegawai. Penilaian disiplin pegawai ini diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dan Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin (Ringan, Sedang dan Berat) dengan penilaian 0 (Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin), R (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan), S (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang), dan B (Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat).

Upaya meningkatkan disiplin pegawai terus dilaksanakan oleh BKPSDM Provinsi Kepulauan Riau. Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya adalah penilaian kerja berbasis teknologi informatika melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja (SIMANJA) baru dapat diterapkan pada Pegawai Negeri Sipil non-tenaga pendidik dan kependidikan namun pada pemantauan disiplin kerja telah



terpantau seluruh pegawai di luar tenaga pendidik dan kependidikan melalui sistem informasi elektronik disiplin (e-disiplin) dengan rekam sidik jari pegawai ketika masuk dan pulang kerja sesuai jam kerja.

Sementara itu dari sisi kuantitas ASN sesuai dengan analisis jabatan saat ini masih banyak kekurangan. Kebutuhan ASN Provinsi Kepulauan Riau hingga tahun 2024 berdasarkan analisis jabatan sebanyak 12.073. Saat ini jumlah ASN yang ada baru sebesar 5.111 pegawai, sehingga masih kurang sebanyak 6.962 pegawai. Dengan besarnya jumlah pegawai di masa depan maka upaya peningkatan kompetensi ASN juga perlu ditingkatkan. Akan tetapi, pada saat ini sarana prasarana untuk menunjang peningkatan kompetensi tersebut belum tersedia. Di sisi lain frekuensi rotasi pegawai yang sangat cepat, penempatan ASN tidak sesuai kompetensi dan belum banyaknya tenaga fungsional tertentu yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga akan menghambat pengembangan kompetensi di beberapa bidang.

6. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Salah satu indikasi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dilandaskan pada hasil penelitian (riset), atau *planning by research*. Sebelum melakukan tahapan perencanaan maka tahapan penelitian atau kajian seperti pengenalan wilayah, analisis situasi (hasil dan manfaat), analisis zonasi wilayah, analisis kependudukan, analisis daya dukung, dan pemetaan prioritas pembangunan perlu dilakukan sehingga perencanaan yang dihasilkan berorientasi pada kebutuhan dan manfaat jangka panjang. Selain itu, dengan adanya *planning by research* maka diharapkan terciptanya iklim pembangunan yang tepat sasaran, tepat guna, tepat manfaat dan keberlanjutan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian terkait pembangunan daerah harus dimanfaatkan dan diterapkan secara optimal, karena hasil riset akan menjadi input dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat dari capaian indikator persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dan persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah. Berdasarkan data



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

yang ada, persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder dari tahun 2017 sampai tahun 2020 nilainya meningkat dari 59% menjadi 65%. Selanjutnya, persentase jumlah inisiatif inovasi yang sudah terbentuk menjadi inovasi daerah menunjukkan tren yang secara konsisten mengalami kenaikan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan inovasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah telah mampu diimplementasikan dengan optimal.

Tabel 2.180 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	Capaian			
		2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	59%	55%	55%	65%
2	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	N/A	0%	5%	20%

Sumber: LKPJ Provinsi Kepulauan Riau, 2021

7. Urusan Sekretariat DPRD

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah memberikan pelayanan dan fasilitasi atas tugas anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, sasaran strategis yang dicapai Sekretariat DPRD adalah meningkatnya pelayanan sekretariat DPRD dan pelayanan anggota DPRD. Keberhasilan sasaran ini diukur dengan hasil capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.181 Kinerja Sekretariat Dewan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan	skor	n/a	0	62	64	66	68



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020

Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Tahun 2020 menunjukkan dengan nilai 68 (skor), dimana berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, hasil penilaian survei tersebut masuk kedalam interval mutu pelayanan C (kurang baik) dan didukung data hasil survei indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2020.

Berdasarkan data di atas terlihat capaian kinerja indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD pada tahun 2016 tidak dapat tercapai dikarenakan pelaksanaan indikator pada tahun tersebut tinggal 2 bulan dari ditetapkannya indikator kinerja sehingga tidak memungkinkan indikator kinerja ini dilaksanakan. Sementara itu pada tahun 2017-2020, capaian indikator kinerja ini menunjukkan peningkatan dengan status Baik. Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dihitung sesuai ruang lingkup survei kepuasan masyarakat yang tercantum dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 yang meliputi:

1) Kemudahan Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2) Kesesuaian Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

3) Kejelasan Prosedur Pelayanan

Kejelasan dan waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4) Kompetensi Pelaksana



Kompetensi atau kemampuan melaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

5) Kewajaran Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6) Kecepatan Pelayanan

Kecepatan pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui standar operasional prosedur (SOP) Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

7) Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8) Kesesuaian Biaya

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9) Produk Spesifikasi Jenis pelayanan

Fasilitas sarana prasarana untuk kenyamanan dan keamanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Survei kepuasan sejak tahun 2019 mengalami perubahan pada ruang lingkup menjadi 9 (sembilan) unsur ruang lingkup kepuasan berbeda pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2017 dan tahun 2018 yang masih menggunakan 14 (empat belas) unsur ruang lingkup. Akan tetapi perbedaan jumlah unsur tersebut tidak mengurangi mutu dari metodologi pengukuran yang ada.

Survei dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan DPRD terhadap layanan dasar Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, memetakan kinerja pelayanan pelayanan Sekretariat DPRD menurut persepsi pengguna jasa layanan serta mengidentifikasi harapan DPRD akan pelayanan Sekretariat DPRD.



2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran konsumsi nonpangan perkapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Nilai konsumsi rumah tangga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Angka konsumsi rumah tangga perkapita per bulan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.182. Angka konsumsi rumah tangga perkapita paling rendah adalah Kabupaten Lingga dibanding kabupaten/kota yang lain (lihat Tabel 2.183).

**Tabel 2.182 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Per Bulan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2017-2018**

No	Uraian	2017	2018
1.	Total Pengeluaran RT (Rp)	1.564.877	1.574.392
2.	Persentase untuk makanan	48,54	47,51
3.	Persentase untuk nonmakanan	51,46	52,49

Sumber: Kepulauan Riau dalam Angka Tahun 2019

**Tabel 2.183 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran RT
1	Kota Tanjungpinang	20.338.740
2	Kabupaten Bintan	14.106.348
3	Kota Batam	24.250.164
4	Kabupaten Karimun	16.451.328



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran RT
5	Kabupaten Lingga	13.322.124
6	Kabupaten Natuna	13.341.552
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	18.078.336

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan petani.

Tabel 2.184 Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Yang Diterima Petani	115,22	116,74	118,53	119,42	123,74	n/a
2.	Indeks Yang Dibayar Petani	115,87	118,94	121,52	123,75	125,97	n/a
3.	Rasio	99,45	98,16	97,54	96,50	98,22	99,19

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

3. Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita (Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan)

Selain dilihat dari nilainya, pola konsumsi rumah tangga juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Persentase pengeluaran untuk pangan akan menurun sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin baik tingkat perekonomian masyarakat. Persentase konsumsi rumah tangga nonpangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.185 dan persentase konsumsi rumah tangga non pangan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.186.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

**Tabel 2.185 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Total						
1.	Pengeluaran Rumah Tangga Nonpangan	742.641	783.597	805.334	826.448	989.093	n/a
2.	Total Pengeluaran	1.344.712	1.465.121	1.564.877	1.574.392	1.778.150	1.465.121
3.	Rasio	55,2	53,5	51,5	52,5	55,6	n/a

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Tabel 2.186 Persentase Konsumsi Rumah Tangga Nonpangan Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Rumah Tangga Nonpangan	Total Pengeluaran	Rasio
1	Kota Tanjungpinang	895.198	1.694.895	52,8
2	Kabupaten Bintan	594.140	1.175.529	50,5
3	Kota Batam	1.166.669	2.020.847	57,7
4	Kabupaten Karimun	696.174	1.370.944	50,8
5	Kabupaten Lingga	506.574	1.110.177	45,6
6	Kabupaten Natuna	511.702	1.111.796	46,0
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	722.460	1.506.528	48,0

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020



2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah atau Infrastruktur

1. Luas Wilayah Produktif

Wilayah produktif adalah lahan yang digunakan untuk budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah produktif terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan perikanan. Persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.187 dan persentase wilayah produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.188.

**Tabel 2.187 Persentase Luas Wilayah Produktif Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Produktif	<i>n/a</i>	226.451	226.451	226.451	226.451
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	<i>n/a</i>	708.172	708.172	708.172	708.172
3.	Rasio	<i>n/a</i>	31,9%	31,9%	31,9%	31,9%

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)

**Tabel 2.188 Persentase Luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
1	Kota Tanjungpinang	0	13.941	0
2	Kabupaten Bintan	18.864	100.151	18,8 %
3	Kota Batam	9.624	77.999	12,3 %
4	Kabupaten Karimun	39.914	83.868	47,5 %
5	Kabupaten Lingga	92.268	189.620	48,6 %
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	24.404	59.528	41,0 %
7	Kabupaten Natuna	41.375	183.062	22,6 %

Sumber: RTRW Provinsi Kepulauan Riau (Perda No. 1 Tahun 2017)



Wilayah produktif di sini merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau, luas kawasan peruntukan pertanian yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kepulauan Riau ini adalah 20 tahun sampai dengan sebelum adanya revisi perubahan sebagaimana Perda RTRW Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki rentang waktu tahun 2017-2037. RTRW Provinsi Kepulauan Riau di-Perda-kan pada tahun 2017, sehingga data pada tahun 2016 belum dapat dihitung berdasarkan peruntukan ruang pertanian di dalam rencana pola ruang RTRW Provinsi Kepulauan Riau.

2. Jumlah Penginapan/Hotel

Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 pertumbuhan hotel di tiap kabupaten/kota mengalami peningkatan, dapat dilihat di beberapa daerah seperti Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Pertumbuhan hotel tiap tahunnya terlihat jelas mengalami peningkatan, seperti di Kota Tanjungpinang terlihat jelas peningkatan di tiap tahunnya. Kemudian Kabupaten Bintan pada tahun 2017 mengalami penurunan namun di tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan. Namun ada juga di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna yang pertumbuhan hotelnya mengalami lambat atau cenderung menurun. Kabupaten Lingga pertumbuhan hotelnya berjalan turun naik, sedangkan di Kabupaten Kepulauan Anambas cenderung mengalami penurunan pada tiap tahunnya.

Dari data yang ada terlihat jelas kenaikan jumlah hotel dan jumlah kamar di tiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara hingga sebelum tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah hotel di hampir seluruh kabupaten/kota di Kepulauan Riau dari, hanya kota Tanjungpinang yang tidak mengalami perubahan. Begitu juga dengan jumlah kamar hotel yang ada di Kepulauan Riau, terjadi penurunan jumlah kamar hotel di seluruh kabupaten/kota. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel dapat dilihat pada Tabel 2.189.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.189 Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Hotel					Kamar Hotel				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tanjungpinang	44	45	47	49	49	1,791	1,678	1,917	2,445	2,252
2	Bintan	36	32	42	47	45	1,485	1,448	1,589	3,105	2,455
3	Batam	190	210	221	233	230	13,835	13,642	14,809	15,490	15,304
4	Karimun	69	68	66	67	62	1,248	1,178	1,336	2,392	2,091
5	Lingga	22	23	22	22	23	353	358	378	548	483
6	Natuna	44	39	42	45	39	321	318	344	590	572
	Kepulauan										256
7	Anambas	21	16	16	15	14	102	99	109	257	
	Provinsi Kepulauan Riau	426	433	456	473	462	19,135	18,721	20,482	24,827	23,413

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. 2021

3. Jumlah Restoran

Pada tahun 2016 jumlah restoran/rumah makan yang ada di kabupaten/kota berjumlah 735 tempat usaha, jumlah terbanyak terdapat pada Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Di tahun 2017 tidak terjadinya peningkatan jumlah tempat usaha yang ada di Kepulauan Riau, namun pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebanyak 905 tempat usaha. Peningkatan yang tajam terjadi pada Kota Batam dan Kabupaten Lingga, sementara penurunan yang cukup drastis terjadi pada Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan. Sementara itu, pada tahun 2019 dan 2020 seluruh Kabupaten/Kota tidak mengalami penambahan/pengurangan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.190 Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kota Tanjungpinang	41	41	23	23	23
2	Kabupaten Bintan	141	141	124	116	116
3	Kota Batam	375	375	541	541	541
4	Kabupaten Karimun	49	49	35	37	37
5	Kabupaten Lingga	70	70	144	154	154
6	Kabupaten Natuna	39	39	4	4	4
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	20	20	34	45	45
Provinsi Kepulauan Riau		735	735	905	920	920*

Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2016-2019

*Data Sementara

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, posisi DPMPTSP menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi didalam agenda pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek ganda terhadap perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja sehingga dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

Untuk mendukung iklim investasi, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau menetapkan standar dengan fokus perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan promosi dan kerjasama peningkatan penanaman modal di Kepulauan Riau.



2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mempermudah perizinan.
3. Mewujudkan pengelolaan dan ketersediaan data penanaman modal berbasis teknologi informasi, dan
4. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pembangunan bidang penanaman modal.

Sebagai panduan pelaksanaan pelayanan perizinan, DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018. Dengan adanya acuan tersebut sudah jelas tugas, fungsi, dan Standar Operasional Pelayanan yang harus dilakukan DPMPTSP dalam pemberian pelayanan perizinan di lingkungan Provinsi Kepri. Sebagai panduan teknis pelayanan perizinan di PMDPTSP Provinsi Kepri, telah didasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur alur, penanggung jawab dan juga persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan perizinan. dalam pelaksanaannya setidaknya sudah terjadi beberapa kali revisi terhadap SOP Pelayanan Perizinan di DPMPTSP yang didasarkan pada penyesuaian terhadap kebutuhan pelayanan. Adapun kebijakan SOP yang ada di DPMPTSP provinsi Kepri adalah sebagai berikut :

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 857 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk tahun 2020, sedang dilakukan revisi dan penyesuaian terhadap SOP DPMPTSP. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dan tantangan terhadap pelayanan perizinan yang semakin kompleks dan memerlukan kecepatan dalam pengurusannya.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

SOP terbaru ini ditargetkan bias rampung pada triwulan ke 3 tahun 2020 dan siap menjawab kebutuhan investasi di Kepulauan Riau. Dalam rentang waktu tahun 2015-2020 DPMPTSP telah menerbitkan permohonan perizinan seperti tergambar pada tabel berikut.

Tabel 2.191 Pelayanan Perizinan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin dan Non Perizinan yang dilayani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Izin	928	1.246	1.011	1.938	1.348	2.505
2	Jumlah Jenis Izin dan Non Izin yang Diterbitkan DPMPTSP	Jenis	104	110	154	154	158	157
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	87,85	81,25	76,61	77,2	82,34	81,93
4	Jumlah Permohonan Izin yang Terlayani melalui Sistem Pelayanan Informasi dan PERizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Permohonan Izin	NA	NA	493	242	NA	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan dari tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini disebabkan adanya peralihan sistem pelayanan ke Online Single Submission (OSS). Pelayanan melalui sistem OSS mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan mulai dari izin prinsip, izin prinsip



perluasan, izin prinsip alih status, izin prinsip penggabungan dan izin perubahan, yang sebelumnya terdata melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Dengan diberlakukannya system OSS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission, para investor diharuskan pendaftaran ulang izin usahanya melalui sistem yang baru ini.

Sebagai evaluasi dan perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kepri. pada survey yang dilakukan pada pelayanan tahun 2020, DPMPTSP mendapat kategori sangat baik untuk Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, dan juga Persentase Pelayanan Sesuai SOP. Capaian ini memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Responden pada survey pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah para pengguna layanan perizinan dan non perizinan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 31 Tahun 2018). Total responden yang diikutsertakan berjumlah 78 orang responden.

Proses pelaksanaan verifikasi dan penerbitan perizinan pada Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Untuk penerbitan pada sektor penanaman modal tahun 2020, DPMPTSP Kepulauan Riau memberi jangka waktu penyelesaian selama 5 hari kerja atau Normatif satu minggu kerja.

Terkait perubahan jangka waktu penyelesaian pada SP dan SOP tahun 2018 dan tahun 2020, Hal tersebut sudah menjadi bahasan dan sudah dilakukan FGD Evaluasi bersama tim ahli. Alasannya, karena pada sektor penanaman modal masih ada beberapa jenis perizinan yang belum sepenuhnya terealisasi dengan maksimal dalam jangka waktu 3 hari tersebut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.192 Rata-rata Lama Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau

No	Sektor dan Jenis Perizinan	Tahun					
		2015*	2016*	2017**	2018***	2019***	2020
A	Sektor Penanaman Modal						
1	-Izin Prinsip Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
2	-Izin Usaha Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
3	-Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
4	-Izin Usaha Perluasan Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
5	-Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
6	-Izin Usaha Perubahan Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
7	-Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
8	-Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Untuk Berbagai Sektor Usaha	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
9	-Izin Pembukaan Kantor Cabang	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
10	-Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
11	-Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
12	-Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
13	-Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari
14	-Usulan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu	6 Hari	6 Hari	30 Hari	3 Hari	3 Hari	3 Hari

Keterangan

*Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.

**Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nomor : 821.2/20 SK-DPMPTSP-KPTS/VI/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



***Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 857 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Fokus sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung daya saing daerah dan pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya manusia merupakan sektor strategis yang harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan daerah. Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator Rasio Ketergantungan dan Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 untuk mengetahui potensi sumber daya manusia yang dimiliki.

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3)

Rasio pendidikan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang mengenyam pendidikan tinggi dalam empat tahun menunjukkan perkembangan meskipun masih kecil. Pada tahun 2019 rasio lulusan sebesar 3,63 (lihat Tabel 2.193)

Tabel 2.193 Rasio Lulusan S-1/S-2/S-3 Provinsi Kepulauan Riau

No	Jenis	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S-1	64.271	70.403	72.811	75.826
2.	Jumlah lulusan S-2	2.862	3.192	3.302	3,453
3.	Jumlah lulusan S-3	146	157	167	181
4.	Jumlah lulusan S-1/ S-2/S-3	67.279	73.752	76.280	79.460
5.	Jumlah Penduduk	2.028.169	2.082.694	2,136,521	2,189,653
6.	Rasio Lulusan S-1/S-2/ S-3 (4/5)	3,23	3,54	3,57	3,63

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan.

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 48,93 di tahun 2016 turun menjadi 43,70 di tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.194.

Tabel 2.194 Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	319.048	640.012	63.2262	644.297	554.899
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	21.145	44.236	51.135	58.986	73.010
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1 + 2)	340.193	684.248	683.397	703.283	627.909
4	Jumlah Penduduk Usia 15 - 64 tahun (Usia produktif)	695.318	1.398.446	1.399.297	1.486.370	1.436.655
5	Rasio Ketergantungan	48,93	48,93	48,85	47,31	43,70

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

2.5 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah sebuah program pembangunan berkelanjutan dimana di dalamnya terdapat tujuan dan target yang terukur dengan tenggat waktu yang ditentukan. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. Sehubungan dengan pencapaian tujuan TPB/SDGs, diperlukan perencanaan yang matang dan terarah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta lintas Kabupaten/Kota.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengintegrasikan tujuan yang menjadi prioritas TPB/SDGs kedalam RPJMD tahun 2016-2021, yang selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara garis besar ada 17 point penting dalam SDGs, yaitu :

1. tanpa kemiskinan;
2. tanpa kelaparan;
3. kehidupan sehat dan sejahtera;
4. pendidikan berkualitas;
5. kesetaraan gender;
6. air bersih dan sanitasi layak;
7. energi bersih dan terjangkau;
8. pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. industri, inovasi, dan infrastruktur;
10. berkurangnya kesenjangan;
11. kota dan permukiman berkelanjutan;
12. konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. penanganan perubahan iklim;
14. ekosistem lautan;
15. ekosistem daratan;
16. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
17. dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya pada Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan Pemantauan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Semester I Tahun 2020. Kondisi Pencapaian Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Semester I Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau akan ditunjukkan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.



2.5.1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 target yang diukur melalui 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 1 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.195 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 1

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan								
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	% (kondisi Maret)	6.24	5.83	5,92		
Target 1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.								
1.3.1(a)	Cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah orang	150,796	PM	584,136		
1.3.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	25.01	40.98	43.45		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
Target 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro								
1.4.1(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	77.95	PM		PM	
1.4.1(b)	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	PM	PM		PM	
1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BKKBN	Persentase peserta KB yang menggunakan semua cara	46.11	48,70	79.90		
1.4.1. (d)	Persentase rumah tangga yang memiliki Akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	69.77	PM	PM	PM	telah sesuai. Perlu dipastikan bahwa data ini dimintakan ke BPS untuk dihitung khusus pada kelompok penduduk miskin dan rentan (Q1-Q2)



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	55.81	PM	PM	PM	Indikator ini tersedia pada tingkat provinsi dan BPS telah biasa menyediakan data ini sejak MDGs. Jadi bisa komunikasikan dgn BPS untuk diminta data persentase ini khusus untuk kelompok penduduk miskin dan rentan saja (Q1-Q2)
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	Sebelumnya Jumlah RTLH, Perlu disesuaikan dan diganti dengan definisi nasional (dalam persentase) karena BPS biasa menyediakan data ini hingga tingkat provinsi sejak MDGs
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	99.56	PM	PM	PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat) (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	82.79	PM	PM	PM	
1.4.1(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	65.61	PM	PM	PM	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	%	PM	PM		PM	data terkait belum publis
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DESDM	%	PM	PM			Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana								
1.5.1.(b)	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	org	57	150	75		Target 150 org adalah target dari Bencana Alam 75 org dan Bencana Sosial 75 org
1.5.1.(c)	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Dinas Sosial	org	NA	150	75		Target 150 org adalah target dari Bencana Alam 75 org dan Bencana Sosial 75 org



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	RPB Provinsi Kepri	Dokumen	1	1			Dokumen Belum dilakukan pembaharuan
Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BPKAD	Rupiah	NA	PM		PM	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan	544.46	1,035,736,696,066.13	201,196,503,938.00		
			Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	223.96	404,433,773,527.54	179,712,580,522.94		
			Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial		33,520,878,884.71	13,413,080,413.00		



2.5.2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 2 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.196 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 2

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan								
Target 2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS		PM	PM			kewenangan pusat
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	Profil Kesehatan, Renstra Dinkes, dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	%	17	16.5	6.70		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	BPS	%	26.53	17.06		▶	Diperoleh di akhir tahun
Target 2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua								
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	%	22.9	20.35	9.10	▶	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	% Wasting (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	12	9.5	5.40	▶	
		Prevalensi obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas	% Obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas	2.7	PM	1.44		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	BPS, diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Skor PPH	83,8	93.5			ada perubahan target Renstra untuk Skor PPH sebesar 89 di tahun 2020 dan Skor PPH dilakukan penghitungan di akhir tahun
Target 2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS, Sakernas	Rp/tenaga Kerja	76,720	112,787	72,165		



2.5.3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 10 target yang diukur melalui 20 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 3 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.197 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 3

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera								
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup								
3.1.1*	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan, Renstra Dinkes, dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 100.000 kelahiran hidup	146,53	129	111.6		
3.1.2*	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil (Susenas)	Laporan Rutin Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi	%	93	87	37.58		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Kepri								
Target 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH								
3.2.1*	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	11.48	PM	6.8		
3.2.2*	Angka kematian neonatal (AKN)	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	7.79	PM	4.84		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		Riau						
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya								
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	0.38	< 0,5	< 0,5		
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 100.000 penduduk	145	PM	PM	PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	API (Annual Paracite Incidence) per 1000 penduduk	0.41	0.29	0.08		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	% Orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	52,6	PM	PM	PM	
		Profil Kesehatan	per 10.000 penduduk yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	0.49	PM	PM	PM	
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan								
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	Seksi Promosi dan Pemberdayaan	%	NA	PM	PM	PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Masyarakat								
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	37,3	28.1	25,7	▶	
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	42,7	16	28,75	▶	
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	12	PM	15	▼	
Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	762	129	40	▶	
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	163	80	20	▶	
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	LAKIP dan RENSTRA BNN	%	2,74	PM	0,30	▶	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional								
3.7.2*	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ ASFR</i>)	BPS		PM	PM		PM	
Target 3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang								
3.8.1*	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	BPS	%	3.12	PM			
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara secara tepat								
3.a.1	Prevalensi merokok pada penduduk usia ≥15 tahun	BPS	%	26.9	PM		PM	
Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang.								
3.b.1(a)	Peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	69,29	85	92.99		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan, pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang								
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Sumber : Profil Kesehatan)							
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.19	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.42	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.12	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi perawat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	1.93	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.04	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi bidan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.89	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.07	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.6	PM	PM	▶	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterampilan fisik	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.23	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisan medis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.03	PM	PM	▶	
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.1	PM	PM	▶	



2.5.4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 4 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.198 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 4

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas								
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BPS	%	32.33	PM		PM	
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas								
4.3.1(a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%		89.00	PM	PM	
4.3.1(b)	Persentase APK Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	21.14	PM	NA	NA	
4.3.1(b)	Persentase APK Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	21.14	PM		PM	
Target 4.4 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
4.4.1*	4.4.1. Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan	Susenas BPS			PM	NA	NA	
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan								
Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.								
4.5.1*	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/ sederajat	BPS	%	99.13	PM	PM	PM	
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/ sederajat	BPS	%	100.49	PM	PM	PM	
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	71.16	77	PM	PM	
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di PT	BPS	%	141.23	PM	PM	PM	
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	BPS	%	98.79	PM		PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)							
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan	%	NA	PM	PM	PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		SLB						
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	PM	NA	NA	
Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.								
	1. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB yang bersertifikat pendidik	Profil Disdik	%	50.05	70	PM	PM	
	Jenjang Pendidikan Menengah	Jenjang Pendidikan Menengah						
4.c.1*	1. Persentase Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	86.00	93.00	PM	PM	
	1. Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	19.20	PM	NA	NA	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	1. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	58.69	PM	NA	NA	
	1. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	78.23	PM	NA	NA	
	1. Persentase Guru SMA yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90.14	99	PM	PM	
	1. Persentase Guru SMK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90.5	95	PM	PM	
	1. Persentase Guru SLB yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	35.46	78	PM	PM	



2.5.5 Kesenjangan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 target yang diukur melalui 7 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 5 dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.199 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 5

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 5 Kesetaraan Gender								
Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3AP2KB	dokumen	11	1			
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	UPTD P2TP2A	orang	96	100	231		Target 2020 menjadi orang



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
5.2.2*	Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian	UPTD P2TP2A	kasus	29	100	85		Target 2020 menjadi orang
Target 5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	1.52	PM	PM		Data belum tersedia di BPS, merupakan sensus 4 tahunan
		BPS	% (sebelum umur 18 tahun)	11.73	PM	PM		Data belum tersedia di BPS, merupakan sensus 4 tahunan
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif , dan kesempatan yang sama untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana	%	3,09	30	14.43		
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BPS		PM	PM	PM	PM	Data tidak tersedia, belum ada survey
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1 *	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin	BPS		PM	PM		PM	



2.5.6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 target yang diukur melalui 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 6 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.200 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 6

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak								
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1. (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	84.12	97.59	2.26		
6.1.1. (b)	Kapasitas sarana dan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Pola PSDA WS Kep. Riau	m ³ /detik	0.04	0.016	0		Ada perubahan target dan tidak dapat tercapai akibat anggaran mengalami Refocusing (COVID 19)
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	BPS	%	PM	PM		PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas BPS	%	PM	PM		PM	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	BPS	%	71.97	PM		PM	
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	Desa	215	PM	383		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	Desa	30	PM	92		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	kota/kab	7	7	-		Tidak ada kegiatan di Tahun 2020
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	PM	PM	PM	PM	
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	kota/kab	3	5	-	NA	Tidak ada kegiatan di Tahun 2020



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).							
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	PM	PM	PM	PM	
6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Laporan KemenESDM	Kegiatan	-	1		PM	
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.5.1(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BP Dashl	RPDAS	1	-	-		
6.5.1.(c)	Jumlah Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	1	1		
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BP Dashl	Hektar	425	182	182		
6.5.1.(g)	Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	2	3	9		
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	BP Dashl	DAS	PM	2	2		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	2	0		
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau								
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	BP Dashl	Hektar	200	550	550		



2.5.7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 SDGs adalah menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Dalam rangka mencapai Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 3 Indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 7 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.201 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 7

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau								
Target 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern								
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	DESDM	%	83.72	92.5	92.59	▶	
7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS / DESDM	Kwh/Kapita	332.18	595.36		▶	
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global								
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	DESDM	%	9%	12%		▶	



2.5.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam rangka mencapai Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 7 target yang diukur melalui 16 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 8 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.202 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 8

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.								
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	6.01	PM	NA	PM	blm release dari BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	%	101	PM	NA	PM	blm release dari BPS
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1*	Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang yang bekerja	BPS	%	PM	PM	-2.32	Kontraksi	
Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
8.3.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	22.1	26.98	29.06%		
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	%	71,90	75.44	64.59		
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	76.49	78.93	25.75%		
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	%	6.09	30.49	37,87		Data Per Agustus 2020
Target 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	%	18,796	23,773	21,468		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,20 laki-laki : 6,10 % Perempuan : 6,41 % Usia 15-24 : 21.98 % Usia 25 : 3.36 %	6,83 laki-laki : 4,77 % Perempuan : 10,36 % Usia 15-24 : 19.99 % Usia 25 : 3,38 %	10.34 laki-laki : 4,77 % Perempuan : 10,36 % Usia 15-24 : 19.99 % Usia 25 : 3,38 %	▼	
8.5.2 (a)	Persentase Setengah Pengangguran	BPS	%	3.52	3.95	5.75	▼	
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau tidak mengikuti pelatihan								
8.6.1*	Persentase pemuda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (NEET)	RENSTRA DISNAKE RTRANS	%	14,88	15,43	21,10 (2019)	▼	
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
8.9.1(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	BPS RPJMD	Orang	2.037.673	2.400.000	408.005	▼	Turun dikarenakan pandemic Covid 19
8.9.1(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	KEMENPAR / DISPAR	Orang	1.450.000	1.600.000	7.153.725	●	
8.9.1(c)	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	BPS/ KEMENPAR / DISPAR	Jumlah Penerimaan devisa	NA	7.740.000.000.000	2.966.628.153.748	▼	Turun dikarenakan pandemic Covid 19
Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.								
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	OJK Prov. Kepri	Unit	1.372	PM	97	●	Juli 2020
	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa (Jumlah Bank Umum termasuk KP, KC, KCP, dan KK)	OJK Prov. Kepri	Unit	351	PM	31	●	Juli 2020
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (BankUmum) (Km)	BPS	Km	Km	PM		PM	



2.5.9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka mencapai Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 4 target yang diukur melalui 7 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 9 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.203 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 9

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur								
Target 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	Dinas Pu, Penataan Ruang dan Pertanahan	% Panjang jalan Provinsi baik	71.37	73.24	73.64		Persentase jalan provinsi dengan kondisi baik (Panjang jalan Kondisi Baik/Total Panjang jalan keseluruhan)
			% Panjang jalan kondisi jelek	28,63	26,76	26,36		
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dishub Kepri	Unit	20	31	33		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	%	38.36	PM	40.53		Meningkat
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	%	35.00	23.29	22.76		
Target 9.4 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi								
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	PM	PM		KLHK



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	74.17	PM		PM	
9.c.1(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS	%	37.02	PM	67.72		data dari BPS Provinsi 2020



2.5.10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara. Dalam rangka mencapai Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 target yang diukur melalui 7 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 10 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.204 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 10

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseli ne (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan								
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS dan RPJMD	% (September)	0.339	0,35±0,01	0,339		
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk miskin	BPS dan RPJMD Prov. Kepri	% (September)	5.78	5.83	6,13		
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	60	34		
10.1.1.(d)	jumlah desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	15	1		
Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%	PM	PM		PM	
Target 10.3 Pada tahun 2030, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	80.16	PM		PM	
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS BATAM I	%	34.32	31.46	43.45		



2.5.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 11 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 11 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.205 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 11

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan								
Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	98.05	98	98		
Target 11.3 Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi								
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	PM	PM	PM	0	NA	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	PM	PM	PM	0	NA	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Kota/Kab	n.a	2	1		
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	1.566	677,360	0	NA	
11.5.1.(a).	indeks resiko bencana (IRBI)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	indeks	0.52	PM	0	NA	di RAN adalah : Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Dokumen Laporan Inventarisasi Wilayah Pasca Bencana	Rupiah	52.501	PM	0	NA	Satuan di RAN : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.								
11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	n/a	80	65.97		Hanya 5 kab/Kota yang melaporkan, dan 2 Kab/Kota yang tidak melaporkan hingga saat ini yaitu Kota Tanjungpinang dan Kab.Natuna
11.6.1 (b)	Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	Renstra DLHK	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	3	5	5		7 Kab/Kota tahun ini kegiatan adipura dtunda sampai waktu belum ditentukan, dan yang masuk nominasi 5 Kab/Kota sedangkan 2 kab tidak masuk penilaian karena tidak mempunyai TPA
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	%	PM	PM		PM	
Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	3	1	0	▼	- Dokumen Belum dilakukan pembaharuan



2.5.12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 12 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.206 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 12

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 12 Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab								
Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	0	30		PM	Belum final
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	PM	30	30		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
12.5.1(a)	Jumlah timbunan sampah yang di daur ulang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	10,301	149,285,761	125,873,635		Hanya 5 kab/Kota yang melaporkan, dan 2 Kab/Kota yang tidak melaporkan hingga saat ini yaitu Kota Tanjungpinang dan Kab.Natuna
Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.								
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	-	PM			Data di KLHK
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	-	PM		▼	Data di KLHK



2.5.13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 SDGs adalah penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan. Dalam rangka mencapai Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 target yang diukur melalui 3 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 13 dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.207 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 13

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim								
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	3	1	0		- Dokumen Belum dilakukan pembaharuan
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1.566	677,360	0	NA	
Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim kedalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional								
13.2.1(a)	Dokumen Pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Barenlitbang	Dokumen	1	1	1		



2.5.14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 14 Ekosistem Lautan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 2 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 14 dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.208 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 14

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2019) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2019) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 14 Ekosistem Lautan								
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya								
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Statistik Perikanan tangkap, satu data KKP	%	93.08	100	100		
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi								
14.6.1 .(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKP Kepri	%	100	100	99		



2.5.15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai Tujuan 15 Ekosistem Daratan, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 15 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.209 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 15

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 15 Ekosistem Daratan								
Target 15. 1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	-	PM		PM	BPKH
Target 15. 2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.								
15.2.1 (d)	Pengelolaan Hutan Lestari	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Unit	1	6	6		



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%		PM		PM	



2.5.16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 Merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Dalam rangka mencapai Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang tertuang didalam 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 16 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 2.210 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 16

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah Kasus	19	PM	7		
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	0	PM	PM	PM	
16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	%	0.79	PM		PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	76,53 (2014)	PM	PM	PM	Pemenuhan data SDGs ini tidak tersedia di OPD (terlampir BA), data merupakan sensus 5 Tahunan dan tersedia pada semester II 2020
Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.								
16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	PM	PM	PM	PM	PM	Pemenuhan data SDGs ini tidak tersedia di OPD (terlampir BA)
16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	UPTD P2TP2A	orang	29	50	206	▼	data dari Simfoni PPA per 30 Juni 2020



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS	PM	PM	PM		PM	
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua								
16.3.1(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	PM	PM	PM		PM	
16.3.1(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	UPTD P2TP2A	orang	Bantuan hukum diberikan 96	Bantuan hukum diberikan PM	37	▶	data dari Simfoni PPA per 30 Juni 2020
		UPTD P2TP2A		non litigasi : 50	non litigasi : PM	29	▶	Sumber Data UPTD P2TP2A
		UPTD P2TP2A		Litigasi : 95	Litigasi : PM	7	▶	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
Target 16.6.Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat								
16.6.1 (c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	BPBJ	%	NA	80	91,51		
16.6.2.(a)	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Ombudsman RI	Zona	Hijau	Hijau	Hijau		100%
Target 16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan								
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM PROVINSI KEPRI	%	9.09	PM	10.75		
16.7.2(a)	Indeks Lembaga Demokrasi (dari IDI)	BPS	%	66.13			PM	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.7.2(b)	Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI)	BPS	%	80.16			PM	
16.7.2(c)	Indeks Hak-hak Politik (dari IDI)	BPS	%	65.01			PM	
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur	BPS	%	88.64	99	99		Sumber data kependudukan pada Dpmd dukcapil prov. Kepri
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BPS	%	PM	PM	PM	PM	Tidak Ada Data
16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Renstra 2016-2021	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	64.01	80	96.61		Sumber data kependudukan pada Dpmd dukcapil prov. Kepri



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								
16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	UPTD P2TP2A	orang	66	100	231		Data per 30 Juni 2020



2.5.17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 TPB/SDGs adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 17 Kemitraan Global Untuk Mencapai Tujuan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 Target yang diukur melalui 10 Indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 17 dapat dilihat pada tabel berikut.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.211 Hasil Pemantauan Semester I Pada Tahun 2020 Untuk Target dan Indikator Pada Tujuan 17

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan								
17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BP2RD	%	0.51	0.52	0.98		
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BP2RD	%	36.54	32.38	Data Belum Lengkap	PM	
Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.								



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
17.6.2.(b)	Tingkat akses tetap pitalebar (fixed broadband): Perkotaan dan Perdesaan	BPS		PM	PM		PM	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	BPS	%	37.02	PM		PM	
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologidan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS		37.02	PM		PM	
Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS		PM	PM	6.82		
Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.								



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS		PM	PM		PM	
17.18.1(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target	BPS		PM	PM		PM	
Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.								
17.19.1(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada OPD di daerah	BPS	orang	30	PM		PM	
17.19.1(b)	Persentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	BPS	%		PM		PM	



BAB III

GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum keuangan daerah yang memuat beberapa aspek terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta perhitungan kerangka pendanaan.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yang diamanatkan oleh rakyat digambarkan dalam analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu. Kinerja tersebut diukur dengan melihat kemampuan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi penerimaan yang dimilikinya serta dalam mendistribusikan belanja daerah dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- I. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 1. Pajak Daerah
 2. Retribusi Daerah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- II. Pendapatan Transfer; dan
- III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Setiap komponen pembentuk pendapatan (objek pendapatan) memiliki karakteristik yang berbeda yang memengaruhi cara pengelolaannya. Baik dalam tataran perencanaan target maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Hal inilah yang kemudian berpengaruh pada capaian realisasi dan fluktuasi pertumbuhan Pendapatan Daerah.

Selanjutnya gambaran kinerja realisasi dan pertumbuhan penerimaan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2016 sampai dengan 2020 disajikan dalam Tabel 3.1 dan 3.2.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.1. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
Total Pendapatan Daerah		2.914.857.620.562,68	3.252.237.500.366,54	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	1.079.309.741.998,68	1.094.788.614.304,54	1.220.768.246.945,10	1.311.704.305.173,32	1.195.637.693.103,26
1.1	Pajak Daerah	950.283.609.237,20	980.678.289.919,00	1.099.143.753.068,00	1.185.272.259.756,00	1.033.430.812.844,00
1.2	Retribusi Daerah	3.045.922.690,00	3.186.407.550,00	13.542.397.410,00	7.164.633.160,00	5.734.867.917,00
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	2.095.760.839,00	3.107.652.171,00	3.095.498.858,00	2.840.763.340,00	2.064.418.255,00
1.4	Lain lain PAD yang sah	123.884.449.232,48	107.816.264.664,54	104.986.597.609,10	116.426.648.917,32	154.407.594.087,26
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.812.089.029.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.626.462.699.205,00	2.317.188.590.222,00
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.464.904.579.643,00	2.156.268.926.062,00	2.278.002.977.357,00	2.573.155.268.205,00	2.282.262.140.222,00
2.1.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	521.708.951.643,00	526.669.661.632,00	537.458.002.746,00	737.447.035.580,00	459.765.163.578,00
2.1.2	Dana alokasi umum	866.810.696.000,00	1.059.822.693.000,00	1.150.516.796.000,00	1.190.057.596.000,00	1.099.291.405.000,00
2.1.3	Dana alokasi khusus	76.384.932.000,00	569.776.571.430,00	590.028.178.611,00	645.650.636.625,00	723.205.571.644,00
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00
2.2.1	Dana Penyesuaian	347.184.450.000,00			53.307.431.000,00	34.926.450.000,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.458.848.921,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	1.483.900.000,00
3.1	Hibah	22.334.448.921,00				1.483.900.000,00
3.2	Dana darurat					
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya					
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain					
3.6	Pendapatan Lainnya	1.124.400.000,00	1.179.960.000,00	1.236.000.000,00	1.284.000.000,00	-

Keterangan:

Data 2016-2020 Menggunakan Data Laporan Keuangan Audited



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.2. Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

Keterangan		Pertumbuhan				Rata-rata
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
Total Pendapatan Daerah		11,57%	7,62%	12,56%	-10,79%	5,24%
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	1,43%	11,51%	7,45%	-8,85%	2,89%
1.1	Pajak Daerah	3,20%	12,08%	7,84%	-12,81%	2,58%
1.2	Retribusi Daerah	4,61%	325,01%	-47,09%	-19,96%	65,64%
1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	48,28%	-0,39%	-8,23%	-27,33%	3,08%
1.4	Lain lain PAD yang sah	-12,97%	-2,62%	10,90%	32,62%	6,98%
2	Pendapatan Transfer-LRA	18,99%	5,65%	15,30%	-11,78%	7,04%
2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	47,20%	5,65%	12,96%	-11,30%	13,62%
2.1.1	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	0,95%	2,05%	37,21%	-37,65%	0,64%
2.1.2	Dana alokasi umum	22,27%	8,56%	3,44%	-7,63%	6,66%
2.1.3	Dana alokasi khusus	645,93%	3,55%	9,43%	12,01%	167,73%
2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya				-34,48%	-67,24%
2.2.1	Dana Penyesuaian	-100,00%	**		-34,48%	-67,24%
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-94,97%	4,75%	3,88%	15,57%	-17,69%
3.1	Hibah					
3.2	Dana darurat					
3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya					
3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus					
3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lain					
3.6	Pendapatan Lainnya	4,94%	4,75%	3,88%	0,00%	4,52%

** Faktor Penyebabnya 0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Beberapa penjelasan terkait dengan fluktuasi pertumbuhan kinerja pendapatan daerah dalam periode 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah, dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Sehingga PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya.

Secara keseluruhan kinerja realisasi penerimaan PAD Kepulauan Riau periode 2016-2019 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, akan tetapi menurun pada tahun 2020. Realisasi PAD pada tahun 2019 yakni sebesar Rp1.311.704.305.173,32, sedangkan pada tahun 2020 menjadi Rp1.195.637.693.103,26 atau turun sebesar - 8,85%. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang berimbas terhadap berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Rata-rata pertumbuhan realisasi PAD yakni sebesar 2,89%.

Beberapa penjelasan tentang kinerja realisasi penerimaan masing-masing sektor Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. Sektor Pajak Daerah

Perkembangan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2016-2020 mengalami progres yang baik dengan ditandai selalu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,58%. Dari 5 (lima) jenis pajak tersebut, kontribusi terbesar bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 36,64%. Berikutnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 32,82%, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 21,47%, Pajak Rokok sebesar 8,98%, dan yang terkecil adalah Pajak Air Permukaan (PAP) dengan kontribusi sebesar 0,09% dari total penerimaan pajak daerah. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membagikan sebagian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau dengan tetap memperhatikan potensi dan pemerataan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi penerimaan pajak terbesar diperoleh pada tahun 2019 dengan total penerimaan sebesar Rp1.185.272.259.756,-. Pada tahun tersebut capaian PKB, BBNKB dan PBBKB melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terdapat pertumbuhan pendaftaran kendaraan baru yang cukup signifikan dan adanya peningkatan jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis pajak yang tidak mencapai target adalah PAP. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan penurunan NPA yang merupakan dasar perhitungan PAP. Dengan turunnya NPA otomatis akan berpengaruh pada penurunan penerimaan PAP.

Jika tahun 2019 adalah tahun penerimaan realisasi terbesar, tahun 2020 merupakan tahun dimana capaian realisasi pajak terendah dalam 5 tahun terakhir. Hampir semua jenis pajak mengalami penurunan sangat signifikan dibanding tahun 2019. Hanya pajak rokok yang realisasinya naik. Secara *year to year*, realisasi pajak daerah tahun 2020 turun sebesar minus 12,81% dibanding tahun 2019. PKB minus 7,47%, BBNKB minus 38,18%, PBBKB minus 36,54%, dan PAP minus 29,11%.

Secara umum terjadinya penurunan realisasi pajak tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan berakibat pada anjloknya kondisi perekonomian secara global dan nasional yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan masyarakat membayar pajak. Turunnya penerimaan PKB dan BBNKB juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan penutupan dan pembatasan layanan SAMSAT selama 2 (dua) bulan dan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan penagihan dan razia. Pada sektor PAP dan PBBKB, penurunan realisasi dipengaruhi oleh adanya penurunan jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan selama masa pandemi yang disebabkan adanya kebijakan pembatasan aktifitas sosial yang diikuti dengan perlambatan kegiatan usaha sektor transportasi, pariwisata, industri, pertambangan dan sebagainya.



b. Sektor Retribusi Daerah

Pertumbuhan realisasi retribusi daerah selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan 65,64%. Retribusi Daerah pada tahun 2017 didominasi oleh Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang menyumbang kontribusi sebesar 53,81%. Pada tahun 2018 Retribusi Daerah meningkat sangat signifikan yakni sebesar 325,01% hal ini dikarenakan adanya realisasi penerimaan yang berasal dari retribusi pemakaian kekayaan daerah atas ijin reklamasi pemanfaatan ruang laut. Namun pada tahun 2019 pungutan retribusi tersebut dihentikan pemungutannya karena keluarnya ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengharuskan agar daerah menetapkan terlebih dahulu Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K). Pemerintah provinsi kepulauan riau sedang mengupayakan pembahasan dan pengesahan perda tersebut bersama-sama dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pertumbuhan menurun (negatif) secara signifikan terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan tahun 2018 sebesar -47,09%. Penurunan tersebut akibat tidak dibolehkannya pungutan retribusi jasa kepelabuhanan dari labuh tambat dan retribusi pemanfaatan ruang laut pada tahun 2019 karena adanya “pertentangan” regulasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pada tahun 2020 Retribusi Daerah kembali menurun dengan tingkat pertumbuhan sebesar -19,96% hal ini dikarenakan pada tahun 2020, secara umum realisasi penerimaan retribusi mengalami kenaikan penerimaan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Namun terdapat 2 (dua) objek retribusi daerah yang mengalami penurunan secara signifikan yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemanfaatan ruang laut) akibat dihentikan pemungutannya karena adanya ketentuan pemerintah pusat dan menurunnya penerimaan retribusi pemakaian asrama haji (turun 65,33% jika dibandingkan dengan tahun 2019) karena berhenti beroperasi asrama haji akibat adanya Pandemi Covid-19.

Salah satu sumber Retribusi Daerah yakni dari Area Labuh Jangkar. Area labuh jangkar dapat diartikan seperti area parkir atau rest area pada aktifitas lalu lintas jalan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Pungutan jasa penggunaan ruang parkirnya dinamakan dengan nama Jasa Labuh pada Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi Daerah, untuk itu besar atau kecilnya pendapatan daerah dari *jasa labuh* sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah kapal yang menggunakan area labuh jangkar, dengan besaran Retribusi Jasa Labuh direncanakan diberlakukan di Area Labuh Jangkar di Kepri sebesar Rp. 350/GT, maka untuk memperoleh pendapatan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berarti harus ada sebanyak 2.857.143 GT kapal yang parkir, atau 2.857 kapal ukuran rata-rata 1000 GT atau 285 kapal ukuran 10.000 GT atau 143 kapal ukuran rata-rata 20.000 GT.

Data pemanfaatan area labuh jangkar di perairan Provinsi Kepulauan Riau terus menurun dari tahun ke tahun sejak 2016 sampai dengan 2020, sesuai data informasi yang dihimpun pada 2016 rata-rata setiap bulan terdapat 300-400 kapal dan terus menurun hingga pada tahun 2020 hanya sejumlah 35-45 kapal yang menggunakan area labuh jangkar, sedangkan data jumlah kapal yang melintasi perairan Kepri pada tahun 2020 yaitu sebanyak 81.830 kapal jenis VLCC, Tanker, Kargo. Kontainer, Bulk Carrier dan Kapal Pesiar, artinya hanya 0,6% kapal melintas yang memanfaatkan perairan Kepri *yang berizin sebagai area labuh jangkar* untuk berlabuh jangkar selebihnya memanfaatkan area labuh jangkar di Singapura, Malaysia dan perairan di wilayah Kepri lainnya yang bukan area yang ditetapkan sebagai wilayah labuh jangkar.

c. Sektor Pendapatan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp2.095.760.839,00, jumlah ini terus berfluktuatif hingga pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp2.064.418.255,00. Pertumbuhan realisasi pendapatan atas hasil kekayaan daerah yang dipisahkan selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan 3,08%. Kinerja realisasi penerimaan sektor ini berasal dari deviden atas keikutsertaan Pemprov Kepulauan Riau dalam saham Bank Kepulauan Riau. Potensi penerimaan yang sedang diupayakan adalah penerimaan dari Badan Usaha Milik Daerah (PT. Pembangunan Kepulauan Riau) namun belum memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan karena



menurunnya penerimaan deviden atas penyertaan saham pada PT. Bank Riau Kepri. Jumlah sebesar Rp2.064.418.255,00 merupakan bagian laba atas penyertaan modal kepada Perusahaan Milik Daerah/BUMD terdiri dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pada PT. Bank Riau Kepri.

d. Sektor Lain-lain PAD yang sah

Realisasi Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2016 sebesar Rp123.884.449.232,48. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, jumlah ini terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2020 baru terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp154.407.594.087,26. Pertumbuhan realisasi Lain-lain PAD yang Sah selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 6,98%. Kinerja realisasi penerimaan sektor ini secara signifikan berasal dari Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang). Perurunan rata-rata pertumbuhan akibat adanya menurunnya realisasi penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dan Denda Pajak Daerah.

Lain lain PAD yang sah berasal dari Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan BLUD, serta Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Pada Tahun 2017 dan 2018 Lain lain PAD yang sah mengalami penurunan sebanyak -12,97% dan -2,62% dikarenakan penurunan realisasi tahun 2017 sebesar 12,97% jika dibandingkan tahun 2016 karena pada tahun 2016 terdapat pengembalian dana kegiatan APBD yang dimasukan dalam rekening penerimaan lain-lain. Sedangkan penurunan realisasi tahun 2018 sebesar 2,62% jika dibandingkan tahun 2017 karena menurunnya penerimaan jasa giro atas pengelolaan kas daerah.

Jumlah ini Kembali meningkat pada Tahun 2019 dan 2020 dikarenakan kenaikan secara signifikan pada tahun 2019-2020 karena meningkatnya realisasi penerimaan atas 2 (dua) BLUD yaitu RSUD Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang dan RSUD Engku Haji Daud



Tanjung Uban. Pada tahun 2020 terdapat pelunasan atas tagihan piutang BPJS tahun-tahun sebelumnya yang dibayarkan pada tahun 2020.

2. Pendapatan Transfer

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pertumbuhan realisasi Dana Perimbangan selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan 13,62%. Secara umum pertumbuhan realisasi dana perimbangan tiap tahunnya menunjukkan angka-angka yang berfluktuatif, dan terlihat “ekstrem” jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD/APBD-P. Hal tersebut karena penyaluran Dana Bagi Hasil terkadang baru disalurkan pada akhir tahun anggaran dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil atas perhitungan Kurang Bayar. Sementara proses pembahasan APBD Perubahan sudah selesai disahkan oleh DPRD.

Berdasarkan data realisasi, terjadi peningkatan dana perimbangan signifikan pada tahun 2019 sebesar 12,96% karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pelunasan atas seluruh tunda salur/kurang bayar DBH dari periode tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2020 realisasi Dana Perimbangan turun sebesar -11,30% jika dibandingkan pada tahun 2019.

Beberapa penjelasan tentang kinerja realisasi penerimaan masing-masing sektor Dana Perimbangan sebagai berikut:

a. Sektor Dana Bagi Hasil

Pertumbuhan realisasi Dana Bagi Hasil selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 0,64%. Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil terdiri atas Dana Bagi Hasil Pajak (Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21, 26, dan 29)) dan Pajak Bumi dan bangunan sektor pertambangan) dan Dana bagi Hasil Sumberdaya Alam (pertambangan umum dan migas).

Pertumbuhan kenaikan realisasi penerimaan DBH secara signifikan terjadi pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 naik sebesar 37,21%, disebabkan pemerintah pusat melakukan pelunasan/pembayaran Kurang Bayar atas semua



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

penerimaan DBH untuk periode tahun 2017 dan 2018. Sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan estimasi penerimaan DBH (-37,65%) hal tersebut karena turunnya jumlah *lifting* eksplorasi migas dan menurunnya harga jual (Indonesia Crude Price/ICP) migas di pasaran internasional akibat adanya resesi ekonomi global disebabkan Pandemi COVID-19.

b. Sektor Dana Alokasi Umum

Pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Umum selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 6,66%. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,56% akibat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil memperjuangkan perhitungan besaran DAU dengan memperhatikan karakteristik provinsi kepulauan.

c. Sektor Dana Alokasi Khusus

Pertumbuhan realisasi Dana Alokasi Khusus selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 167,73%. Salah satu komponen terbesar penerimaan DAK berasal dari DAK Nonfisik berupa Dana Operasional Sekolah (BOS). Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2017 sebesar 645,93%. Angka ini sangat tinggi kenaikannya dikarenakan kenaikan Dana BOS karena pada tahun 2017 mulai diberlakukannya ketentuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana mengamanatkan bahwa kewenangan pengelolaan SMA (Sekolah Menengah Atas) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) yang sebelumnya dikelola oleh kabupaten/kota diserahkan ke pemerintah provinsi. Hal tersebut yang menyebabkan alokasi DAK Non Fisik BOS menjadi sangat tinggi jika dibandingkan tahun 2016.

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian. Pada tahun 2020 dana penyesuaian menurun dari tahun 2019 sebesar -34,48%. Dana penyesuaian tersebut berasal dari Dana insentif Daerah yang besaran alokasinya ditetapkan oleh pemerintah. Besaran penetapan alokasi dan penyaluran Dana Insentif Daerah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2020 kriteria penilaian



yang ditetapkan agar daerah memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) adalah kepatuhan terhadap penyalpaian penyesuaian APBD dan laporan belanja kesehatan dan bantuan sosial dalam rangka kegiatan-kegiatan upaya pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Kinerja realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri atas penerimaan dari Dana Penyesuaian Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Hibah yang saat ini hanya bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero) atas bantuan pelaksanaan operasional pelayanan Samsat.

Kinerja realisasi penerimaan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun 2016-2020 mengalami penurunan sangat ekstrim pada Tahun Anggaran 2017 jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun Anggaran 2016 yakni sebesar -94,97%. Hal ini disebabkan pada tahun 2016 Pemprov Kepulauan Riau mendapat Hibah dari Pemerintah Pusat (pembayaran Hutang PDAM), dan pada tahun 2017 dana hibah tidak diberikan lagi. Pada periode tahun 2016-2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah secara rata-rata mengalami penurunan sebesar -17,69%.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran (PP Nomor 12 Tahun 2019). Analisis atas belanja daerah bertujuan untuk mencermati tingkat efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran.

Total Belanja pada tahun 2020 yakni sebesar Rp3.855.203.051.882,02 merupakan belanja tertinggi bila dibandingkan dengan tahun 2016-2019. Belanja Operasi mengalami peningkatan yang konsisten pada tahun 2016-2020. Belanja Modal pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp586.608.798.242,52 (turun sebesar -



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

7,34%). Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 sebesar Rp2.297.329.972,00. Jumlah transfer sebesar Rp544.714.483.152,00. Jumlah ini naik sebesar 8,74% dari tahun 2019. Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020 dan pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 3.3 dan Tabel 3.4.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	2.865.884.362.891,34	3.272.498.783.537,68	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.213,34	3.855.203.051.882,02
	BELANJA OPERASI	1.808.667.959.529,34	2.269.736.830.225,03	2.327.980.492.005,54	2.519.909.082.654,00	2.721.582.440.515,50
	Belanja Pegawai	501.999.949.887,34	818.787.343.986,00	900.881.257.498,00	998.150.649.443,00	1.004.932.687.935,00
	Belanja Barang	872.413.394.827,00	1.071.719.274.530,03	1.077.427.074.675,54	1.142.425.276.118,00	1.082.661.190.360,50
	Belanja Hibah	419.031.800.000,00	374.190.338.250,00	345.516.286.200,00	376.030.275.000,00	607.947.459.750,00
	Belanja Bantuan Sosial	13.576.941.183,00	3.393.999.827,00	2.510.000.000,00	1.619.120.000,00	26.041.102.470,00
	Belanja Bantuan Keuangan	1.645.873.632,00	1.645.873.632,00	1.645.873.632,00	1.683.762.093,00	-
	BELANJA MODAL	303.204.145.183,00	495.725.909.020,65	620.056.564.203,65	633.107.634.788,34	586.608.798.242,52
	Belanja Tanah	-	4.412.510.000,00	3.246.612.000,00	1.005.059.089,00	-
	Belanja Peralatan dan Mesin	84.924.761.124,00	198.774.915.735,00	186.978.638.614,00	155.140.414.801,06	145.686.505.598,24
	Belanja Bangunan dan Gedung	63.268.775.473,00	113.903.002.362,73	194.886.781.458,89	175.673.914.230,17	94.399.837.108,63
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	146.141.223.481,00	167.692.790.994,92	223.489.584.106,01	298.731.464.403,11	345.331.139.944,13
	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.869.385.105,00	10.942.689.928,00	11.454.948.024,75	2.556.782.265,00	1.191.315.591,52
	BELANJA TAK TERDUGA	320.714.000,00	158.100.000,00	255.375.000,00	-	2.297.329.972,00
	Belanja Tak Terduga					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Keterangan		2016	2017	2018	2019	2020
		320.714.000,00	158.100.000,00	255.375.000,00	-	2.297.329.972,00
	TRANSFER	753.691.544.179,00	506.877.944.292,00	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	544.714.483.152,00
	Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	742.700.704.179,00	487.555.320.934,00	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	518.464.483.152,00
	Bagi Hasil Pajak	742.700.704.179,00	487.555.320.934,00	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	518.464.483.152,00
	Transfer Bantuan Keuangan	10.990.840.000,00	19.322.623.358,00	-	-	26.250.000.000,00
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	10.990.840.000,00	19.322.623.358,00		-	26.250.000.000,00
	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa				-	



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.4. Pertumbuhan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

KETERANGAN	PERTUMBUHAN				
	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
TOTAL BELANJA	14,19%	4,50%	6,85%	5,51%	7,76%
BELANJA OPERASI	25,49%	2,57%	8,24%	8,01%	11,08%
Belanja Pegawai	63,11%	10,03%	10,80%	0,68%	21,15%
Belanja Barang	22,85%	0,53%	6,03%	-5,23%	6,04%
Belanja Hibah	-10,70%	-7,66%	8,83%	61,70%	13,04%
Belanja Bantuan Sosial	-75,00%	-26,05%	-35,49%	1508,35%	342,95%
Belanja Bantuan Keuangan	0,00%	0,00%	2,30%	-100,00%	-24,42%
BELANJA MODAL	63,50%	25,08%	2,10%	-7,34%	20,83%
Belanja Tanah		-26,42%	-69,04%	-100,00%	-65,16%
Belanja Peralatan dan Mesin	134,06%	-5,93%	-17,03%	-6,09%	26,25%
Belanja Bangunan dan Gedung	80,03%	71,10%	-9,86%	-46,26%	23,75%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,75%	33,27%	33,67%	15,60%	24,32%
Belanja Aset Tetap Lainnya	23,38%	4,68%	-77,68%	-53,41%	-25,76%
BELANJA TAK TERDUGA	-50,70%	61,53%	-100,00%	**	-29,73%
Belanja Tak Terduga	-50,70%	61,53%	-100,00%	**	-29,73%
TRANSFER	-32,75%	-6,98%	6,24%	8,74%	-6,19%
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	-34,35%	-3,29%	6,24%	3,50%	-6,98%
Bagi Hasil Pajak	-34,35%	-3,29%	6,24%	3,50%	-6,98%
Transfer Bantuan Keuangan	75,81%	-100,00%			-12,10%
Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya	75,81%	-100,00%			-12,10%
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa					

** Faktor Penyebutnya 0



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Belanja Peralalatan dan Mesin pada tahun 2017 naik sebesar 134,06% hal ini dikarenakan adanya keperluan OPD terhadap kebutuhan peralatan perkantoran untuk peningkatan pelayanan perkantoran dikarenakan adanya peralatan - peralatan kantor yang rusak / peremajaan. Pada tahun 2017-2019, Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan terus menerus, akan tetapi jumlah ini meningkat sangat signifikan pada tahun 2020 yakni sebesar 1508,35%, hal ini disebabkan karena dana tersebut dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial dengan pemberian Bantuan SPP sekolah menengah sederajat se Provinsi Kepulauan Riau .

Berdasarkan Tabel 3.5, terlihat bahwasanya Belanja perjalanan dinas mengalami penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp170.864.035.910,99 dari tahun sebelumnya sebesar Rp240.277.805.578,00. Selain itu, Pandemi Covid 19 membuat kegiatan terkait pengembangan kapasitas menjadi berkurang. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis pada tahun 2020 jumlahnya sebesar Rp857.046.514,00 dari sebelumnya sebesar Rp5.524.692.400,00. Selanjutnya terlihat bahwa Belanja Tak Terduga Pada tahun 2020 sebesar Rp2.297.329.972,00 jumlah ini sangat tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020*
A	Belanja tidak langsung	323.011.455.656,00	597.535.331.194,45	655.515.795.402,00	871.016.049.356,40	829.747.408.370,00
1	Belanja gaji dan tunjangan	160.153.688.061,00	304.577.648.421,45	309.417.690.072,00	329.630.349.365,40	342.995.473.439,00
2	Belanja tambahan penghasilan	136.297.319.704,00	260.777.641.765,00	309.912.559.723,00	495.236.132.082,00	454.914.243.763,00
3	Belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH	6.258.952.550,00	8.952.898.340,00	9.323.549.760,00	18.103.750.000,00	17.772.341.000,00
4	Belanja pemungutan pajak daerah	20.301.495.341,00	23.227.142.668,00	26.861.995.847,00	28.045.817.909,00	14.065.350.168,00
B	Belanja langsung	323.045.359.579,00	412.252.770.005,61	395.208.657.671,06	370.128.514.633,72	257.266.948.581,50
1	Belanja honorarium PNS	70.592.304.851,00	94.013.998.258,00	93.171.470.250,00	2.787.986.500,00	6.601.710.783,00
2	Belanja uang lembur	-	-	-	-	-
3	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.219.000.000,00	1.929.000.000,00	2.194.000.000,00	1.748.000.000,00	1.287.000.000,00
4	Belanja kursus,					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020*
	pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis	4.018.558.015,00	4.133.483.200,00	3.364.458.000,00	5.524.692.400,00	857.046.514,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	72.936.000,00	1.306.004.193,00	648.887.169,00	852.203.179,00	8.380.363.362,00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai	4.507.642.966,00	259.073.050,00	280.110.400,00	209.275.000,00	197.775.300,00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya	2.635.774.450,00	3.081.442.100,00	3.693.945.900,00	2.409.869.300,00	2.122.463.600,00
8	Belanja pakaian khusus dan hari hari tertentu	3.233.827.350,00	5.415.986.110,00	4.393.959.850,00	6.273.209.923,00	3.726.566.700,00
9	Belanja perjalanan dinas	157.983.342.369,00	210.595.596.605,00	211.389.495.288,35	240.277.805.578,00	170.864.035.910,99
10	Belanja perjalanan pindah tugas		-	-	-	-
11	Belanja pemulangan pegawai		-	-	-	-
12	Belanja modal (kantor, mobil dinas, meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	78.781.973.578,00	91.518.186.489,61	76.072.330.813,71	110.045.472.753,72	63.229.986.411,51
	Total	646.056.815.235,00	1.009.788.101.200,06	1.050.724.453.073,06	1.241.144.563.990,12	1.087.014.356.951,50

*audited 2020



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020

	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Belanja tidak langsung	1.045.410.664.494,00	1.061.863.509.460,45	1.100.151.181.171,00	1.343.891.670.218,40	1.334.146.541.354,00
1	Belanja gaji dan tunjangan	296.451.007.765,00	565.355.290.186,45	619.330.249.795,00	824.866.481.447,40	797.909.717.202,00
2	Belanja penerimaan anggota pimpinan DPRD serta operasional KDH/ WKDH	6.258.952.550,00	8.952.898.340,00	9.323.549.760,00	18.103.750.000,00	17.772.341.000,00
3	Belanja bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja bagi hasil	742.700.704.179,00	487.555.320.934,00	471.497.381.616,00	500.921.438.771,00	518.464.483.152,00
B	Belanja langsung	112.290.068.955,00	156.329.043.541,00	147.893.745.913,40	217.973.471.240,21	191.644.498.023,45
1	Belanja honorarium PNS tenaga khusus untuk guru dan tenaga medis	22.756.100.225,00	15.251.872.485,00	26.067.836.168,00	29.062.602.154,00	*5.328.832.460,00
2	Belanja beasiswa pendidikan PNS	1.219.000.000,00	1.929.000.000,00	2.194.000.000,00	1.748.000.000,00	1.287.000.000,00
3	Belanja jasa kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik,	88.314.968.730,00	139.148.171.056,00	119.631.909.745,40	187.162.869.086,21	185.028.665.563,45



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	telepon dsb)					
4	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya)	-	-	-	-	-
C	Pembiayaan pengeluaran	-	-	-	-	-
1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
2	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-

*per 30 Juni 2020

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca daerah merupakan laporan berkaitan dengan aset dan kewajiban daerah, melalui analisis terhadap neraca dapat ditelusuri potensi dan peluang sumber pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2020 jumlah aset lancar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp274.590.966.904,11, jika dibandingkan pada tahun 2019 terjadi penurunan yang sangat signifikan yakni sebesar Rp709.834.605.031 (menurun sebesar -61,31%). Jumlah uang dalam rekening Kas di Daerah mengalami kenaikan cukup tinggi pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 245.10% dan 257.79%. Tingginya jumlah kas tersebut dikarenakan adanya penyaluran



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

kurang bayar dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tertunda dari tahun 2016 s/d 2018. Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar 12.348,96%. Tingginya jumlah kas tersebut dikarenakan pengembalian sisa belanja atas penggunaan belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 yang kegiatannya masih berlanjut sampai dengan akhir tahun anggaran 2020.

Jumlah Piutang Lain-lainnya pada tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi Rp54.587.342.751,76 dari sebelumnya sebesar Rp455.000,00. Piutang ini berasal dari kelebihan pembayaran sebesar Rp854.584.105,76 serta piutang uang muka pekerjaan di beberapa OPD sebesar Rp53.732.758.646,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Dinas Kesehatan : Paket Pekerjaan pada CV. ANUGRAH JAYA
2. Dinas Kesehatan : Pembayaran Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Kantor Dinkes Prov. Kepri Th 2018 pada PT.MERAPI UTAMA PHARMA
3. Sekretariat DPRD : Pembayaran Belanja Cetak Buku Agenda DPRD 2018 pada PT. KEMALA NIAGA SELARAS
4. Sekretariat DPRD : Pembayaran Belanja Cetak pada PT. KEMALA NIAGA SELARAS
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman : Pekerjaan Tunda Bayar dari CV SINAR ABADI, Rehabilitasi Masjid dari CV KARYA PUTRA KUNDUR, Pembangunan Pondok Tahfiz dari CV. PURNA PERSADA INDONESIA, serta Peningkatan Masjid dari PT. TIGA NAGA MAS.
6. Kelebihan Setor Pemotongan Pajak

Kas yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2017 meningkat sebesar 676.29% dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 503.38%. Peningkatan ini dikarenakan adanya pengalihan wewenang dari pemerintah kab/kota kepada pemerintah provinsi untuk dana jaminan reklamasi dan pasca tambang yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada tahun 2020 meningkat sebesar 6.017,3%. Jumlah ini sangat tinggi dikarenakan adanya potongan pfk atas taperum yang berubah fungsi menjadi tapera berdasarkan PP 25 tahun 2020



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tentang tapera dan adanya surat edaran dari kementerian keuangan terhadap penghentian potongan taperum periode agustus 2020 sehingga potongan taperum pegawai yang sudah di potong belum di salurkan kembali ke kas negara menunggu aturan teknis lebih lanjut tentang tapera.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp63.246.500.707,20 merupakan nilai penyertaan modal kepada PT Pembangunan Kepri sebesar Rp1.456.797.884,62 (metode ekuitas) sesuai dengan nilai kekayaan bersih/ekuitas per 31 Desember 2018 yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Tahun 2018 (unaudited), PDAM Tirta Kepri sebesar Rp25.848.410.954,00 (metode ekuitas), PT Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp22.47.587.023,93 penyertaan modal kepada Bank Riau Kepri sebesar Rp12.000.000.000,00 (metode biaya) sesuai dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah investasi jangka panjang berfluktuatif, tetapi cenderung stabil. Jumlah investasi jangka panjang pada tahun 2020 sebesar Rp63.224.958.305,05, jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp67.101.173.910,96. Jumlah Aset Tetap pada tahun 2019 sebesar Rp5.196.552.071.175,69 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp5.611.230.207.580,39. Jumlah aset lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp543.305.403.536,93, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar Rp481.937.458.980. Jumlah aset dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan yang secara konsisten. Pada tahun 2016 jumlah aset Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp3.872.940.317.954, tahun 2017 sebesar Rp4.715.853.217.892, tahun 2018 sebesar Rp5.916.976.292.335, tahun 2019 Rp6.455.425.309.098, serta tahun 2020 sebesar Rp6.492.351.536.326,48.

Jumlah kewajiban jangka pendek pada tahun 2020 sebesar Rp178.645.777.313,05, jumlah ini turun sebesar -6,83% bila dibandingkan tahun 2019. Jumlah kewajiban jangka panjang meningkat secara signifikan pada tahun 2018. Pada tahun 2017 jumlah kewajiban jangka panjang sebesar Rp33.651.773.555,00 sedangkan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pada tahun 2018 sebesar Rp203.047.071.180,00. Pada tahun 2020 jumlah kewajiban sebesar Rp459.425.971.449,05, sedangkan jumlah ekuitas sebesar Rp6.032.925.564.877,43. Berikut disajikan neraca daerah beserta pertumbuhannya.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.7. Neraca Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	37.784.312.296,76	31.541.263.921,24	108.847.425.125,02	389.441.607.426,37	14.196.216.711,13
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.061.832.295,00	2.138.507.063,50	424.772,00	9.302.500,00	1.158.064.650,00
Kas di Bendahara Penerimaan	-	2.425.000,00	-	4.000.000,00	-
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	19.583.802.574,79	5.743.517.310,38	7.980.869.655,95	13.087.038.428,54	42.566.785.780,58
Kas di Bendahara BOS			2.206.124.760,06	2.437.710.124,61	6.504.941.018,75
Kas Lainnya	2.597.828.819,35	33.819.463,29	4.985.510,29	4.030.685,00	190.402.875,30
Investasi Jangka Pendek	-	-	-	-	-
Piutang Pajak	57.583.415.426,00	85.982.639.744,10	99.644.251.838,94	83.711.031.371,00	81.457.876.419,00
Penyisihan Piutang Pajak	(35.886.700.349,00)	(51.733.498.083,05)	(60.346.976.065,97)	(51.530.769.143,75)	(23.186.483.595,05)
Piutang Pajak Netto	21.696.715.077,00	34.249.141.661,05	39.297.275.772,97	32.180.262.227,25	58.271.392.823,95
Piutang Lain-lain PAD yang Sah					
Piutang Denda					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pajak				18.006.398.969,54	18.539.541.566,12
Penyisihan Piutang Denda Pajak				(10.156.389.539,77)	(3.999.203.623,48)
Piutang BLUD				19.988.198.404,97	4.681.471.016,97
Penyisihan Piutang BLUD				(10.353.222.061,77)	(1.380.542.889,36)
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Lainnya					581.875.792,20
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto				17.484.985.772,97	18.423.141.862,45
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				69.712.731.231,00	1.198.115.464,00
Piutang Lainnya	136.365.346,00	455.000,00	54.587.342.751,76	29.134.166.147,59	665.074.856,52
Piutang BLUD	5.907.166.142,57	11.626.350.037,97	9.869.508.902,97		
Penyisihan Piutang Lainnya	(2.951.258.333,07)	(5.819.345.019,27)	(5.027.762.924,77)		-
Piutang Lainnya Netto	3.092.273.155,50	5.807.460.018,70	59.429.088.729,96	29.134.166.147,59	665.074.856,52
Persediaan	324.291.749.137,27	393.278.742.988,22	377.028.466.181,33	156.338.770.487,90	131.416.830.861,43
JUMLAH ASET LANCAR	411.108.513.355,67	472.794.877.426,38	594.794.660.507,58	709.834.605.031,23	274.590.966.904,11
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	-	-	-	-	
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	-	-	-	-	
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-	-	-	
Investasi dalam Surat Utang Negara	-	-	-	-	
Investasi Non Permanen Lainnya	35.340.292.363,52	35.067.425.028,52	34.949.633.119,52	34.858.681.526,52	34.818.098.889,52
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(30.832.625.163,02)	(33.060.823.078,52)	(34.412.993.292,27)	(34.436.816.537,02)	(34.361.709.253,02)
JUMLAH Investasi Non Permanen	4.507.667.200,50	2.006.601.950,00	536.639.827,25	421.864.989,50	456.389.636,50
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	63.427.015.358,10	61.390.511.169,75	63.246.500.707,20	66.679.308.921,46	62.768.568.668,55
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	-	-	-	-	
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan	-	-	-	-	
Invertasi Permanen Lainnya	-	-	-	-	
JUMLAH Investasi Permanen	63.427.015.358,10	61.390.511.169,75	63.246.500.707,20	66.679.308.921,46	62.768.568.668,55



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	67.934.682.558,60	63.397.113.119,75	63.783.140.534,45	67.101.173.910,96	63.224.958.305,05
ASET TETAP					
Tanah	272.900.563.116,18	340.687.639.230,18	852.537.966.681,68	888.960.902.578,68	1.039.992.209.851,50
Peralatan dan Mesin	889.898.861.409,80	1.091.078.188.786,80	1.284.168.952.536,58	1.427.125.056.199,64	1.599.404.985.847,43
Gedung dan Bangunan	1.275.836.982.467,62	1.653.785.762.281,32	1.917.304.687.500,52	2.096.413.257.748,06	2.151.903.305.019,96
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.165.018.455.299,67	2.474.384.219.142,50	2.732.670.274.875,83	2.881.062.579.882,25	3.479.604.242.833,27
Aset Tetap Lainnya	118.267.532.261,00	140.075.434.556,00	163.959.211.629,72	214.969.692.104,82	221.016.675.554,34
Konstruksi dalam Pengerjaan	92.322.835.466,00	112.163.597.611,00	47.907.990.800,23	249.193.843.631,97	53.044.713.285,76
Akumulasi Penyusutan	(1.664.415.160.411,96)	(1.908.672.222.102,97)	(2.230.361.044.537,73)	(2.561.173.260.969,73)	(2.933.735.924.811,87)
JUMLAH ASET TETAP	3.149.830.069.608,31	3.903.502.619.504,83	4.768.188.039.486,83	5.196.552.071.175,69	5.611.230.207.580,39
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA CADANGAN	-	-	-	-	-
ASET LAINNYA					
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	-	-	-	-	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.048.503.950,00	1.048.503.950,00	1.048.503.950,00	998.508.950,00	996.008.950,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			-	-	
Aset Tidak Berwujud	9.421.425.720,06	10.984.973.431,06	43.550.075.497,06	9.022.871.087,06	18.576.994.567,06
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	4.334.959.664,00	33.651.773.555,00	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00
Aset Lain-lain	229.243.463.097,25	233.975.299.577,08	252.457.578.324,75	256.265.998.069,75	252.398.986.069,75
Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain		(3.501.942.671,83)	(9.892.777.145,88)	(9.744.541.145,88)	(9.446.780.185,88)
JUMLAH ASET LAINNYA	244.048.352.431,31	276.158.607.841,31	490.210.451.805,93	481.937.458.979,93	543.305.403.536,93
JUMLAH ASET	3.872.940.317.953,89	4.715.853.217.892,27	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.595.026.050,00	32.283.839,00	5.332.363,00	3.702.135,00	226.471.952,00
Utang Bunga	-	-	-	-	-
Utang Pajak	-	-	-	-	-



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-
Utang Beban	214.450.931.574,88	64.662.395.647,57	47.298.446.795,31	168.275.441.057,75	159.309.589.936,92
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-
Utang Pengadaan Aset Tetap				10.583.964.224,77	6.140.476.825,88
Utang Jangka Pendek Lainnya	54.838.162.969,19	50.984.256.343,22	52.651.070.053,04	12.883.026.663,13	12.969.238.598,25
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	271.884.120.594,07	115.678.935.829,78	99.954.849.211,35	191.746.134.080,65	178.645.777.313,05
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Utang Dalam Negeri-Obligasi	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Pusat	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Provinsi	-	-	-	-	-
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	4.334.959.664,00	33.651.773.555,00	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	4.334.959.664,00	33.651.773.555,00	203.047.071.180,00	225.394.622.019,00	280.780.194.136,00
JUMLAH KEWAJIBAN	276.219.080.258,07	149.330.709.384,78	303.001.920.391,35	417.140.756.099,65	459.425.971.449,05
JUMLAH EKUITAS	3.596.721.237.695,82	4.566.522.508.507,49	5.613.974.371.943,44	6.038.284.552.998,16	6.032.925.564.877,43
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.872.940.317.953,89	4.715.853.217.892,27	5.916.976.292.334,79	6.455.425.309.097,81	6.492.351.536.326,48



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.8. Pertumbuhan Neraca Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 - 2020

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata-rata Pertumbuhan
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Kas Daerah	-16,52%	245,10%	257,79%	-96,35%	97,50%
Kas di Bendahara Pengeluaran	3,72%	-99,98%	2090,00%	12348,96%	3585,67%
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00%	-100,00%	**	-100,00%	-50,00%
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	-70,67%	38,95%	63,98%	225,26%	64,38%
Kas di Bendahara BOS	0,00%	0,00%	10,50%	166,85%	44,34%
Kas Lainnya	-98,70%	-85,26%	-19,15%	4623,83%	1105,18%
Investasi Jangka Pendek	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piutang Pajak	49,32%	15,89%	-15,99%	-2,69%	11,63%
Penyisihan Piutang Pajak	44,16%	16,65%	-14,61%	-55,00%	-2,20%
Piutang Pajak Netto	57,85%	14,74%	-18,11%	81,08%	33,89%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piutang Denda Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	2,96%	0,74%
Penyisihan Piutang Denda Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	-60,62%	-15,16%
Piutang BLUD	0,00%	0,00%	0,00%	-76,58%	-19,14%
Penyisihan Piutang BLUD	0,00%	0,00%	0,00%	-86,67%	-21,67%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah - Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	1,34%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00%	0,00%	0,00%	-98,28%	-24,57%
Piutang Lainnya	-99,67%	11997118,19%	-46,63%	-97,72%	2999218,54%
Piutang BLUD	96,82%	-15,11%	-100,00%	0,00%	-4,57%
Penyisihan Piutang Lainnya	97,18%	-13,60%	-100,00%	0,00%	-4,11%
Piutang Lainnya Netto	87,81%	923,32%	-50,98%	-97,72%	215,61%
Persediaan	21,27%	-4,13%	-58,53%	-15,94%	-14,33%
#DIV/0!					
JUMLAH ASET LANCAR	15,00%	25,80%	19,34%	-61,32%	-0,29%
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Non Permanen					
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investasi Non Permanen Lainnya	-0,77%	-0,34%	-0,26%	-0,12%	-0,37%
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	7,23%	4,09%	0,07%	-0,22%	2,79%



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata-rata Pertumbuhan
JUMLAH Investasi Non Permanen	-55,48%	-73,26%	-21,39%	8,18%	-35,49%
Investasi Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-3,21%	3,02%	5,43%	-5,86%	-0,16%
Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Penyertaan Modal Perusahaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patungan					
Invertasi Permanen Lainnya	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JUMLAH Investasi Permanen	-3,21%	3,02%	5,43%	-5,86%	-0,16%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-6,68%	0,61%	5,20%	-5,78%	-1,66%
ASET TETAP					
Tanah	24,84%	150,24%	4,27%	16,99%	49,09%
Peralatan dan Mesin	22,61%	17,70%	11,13%	12,07%	15,88%
Gedung dan Bangunan	29,62%	15,93%	9,34%	2,65%	14,39%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	14,29%	10,44%	5,43%	20,78%	12,73%
Aset Tetap Lainnya	18,44%	17,05%	31,11%	2,81%	17,35%
Konstruksi dalam Pengerjaan	21,49%	-57,29%	420,15%	-78,71%	76,41%
Akumulasi Penyusutan	14,68%	16,85%	14,83%	14,55%	15,23%
JUMLAH ASET TETAP	23,93%	22,15%	8,98%	7,98%	15,76%
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ASET LAINNYA					
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00%	0,00%	-4,77%	-0,25%	-1,25%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Aset Tidak Berwujud	16,60%	296,45%	-79,28%	105,89%	84,91%
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	676,29%	503,38%	11,01%	24,57%	303,81%
Aset Lain-lain	2,06%	7,90%	1,51%	-1,51%	2,49%
Akumulasi Penyusutan - Aset Lain-lain	0,00%	182,49%	-1,50%	-3,06%	44,48%
JUMLAH ASET LAINNYA	13,16%	77,51%	-1,69%	12,73%	25,43%
JUMLAH ASET	21,76%	25,47%	9,10%	0,57%	14,23%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-98,76%	-83,48%	-30,57%	6017,33%	1451,13%



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

KETERANGAN	2017	2018	2019	2020	Rata-rata-rata Pertumbuhan
Utang Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pajak	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Beban	-69,85%	-26,85%	255,77%	-5,33%	38,44%
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pengadaan Aset Tetap	0,00%	0,00%	**	-41,98%	-10,50%
Utang Jangka Pendek Lainnya	-7,03%	3,27%	-75,53%	0,67%	-19,66%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-57,45%	-13,59%	91,83%	-6,83%	3,49%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Dalam Negeri-Obligasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pemerintah Pusat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pemerintah Provinsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Luar Negeri-Sektor Perbankan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Utang Jangka Panjang Lainnya	676,29%	503,38%	11,01%	24,57%	303,81%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	676,29%	503,38%	11,01%	24,57%	303,81%
JUMLAH KEWAJIBAN	-45,94%	102,91%	37,67%	10,14%	26,19%
JUMLAH EKUITAS	26,96%	22,94%	7,56%	-0,09%	14,34%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	21,76%	25,47%	9,10%	0,57%	14,23%

**Faktor Penyebut 0

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa secara keseluruhan Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Aset Lancar, Aset Tetap dan Investasi Jangka Panjang yang ikut menurun di tahun 2020 meskipun di saat yang bersamaan Aset Lainnya justru mengalami kenaikan di tahun 2020. Selain itu, pertumbuhan Jumlah Kewajiban dan Ekuitas juga mengalami pertumbuhan yang cenderung bergerak menurun sejak tahun 2019-2020. Hal ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh dampak Covid-19 yang ikut memberikan negatif terhadap pertumbuhan neraca keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan neraca yang disajikan, selanjutnya dilakukan analisis atas kekayaan daerah. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan aset yang dimilikinya. Rata-rata pertumbuhan untuk rasio lancar yakni 3,36 dan rasio quick sebesar 1,37. Rasio Solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan rasio solvabilitas sebesar 0,06. Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan, rata-rata piutang pendapatan daerah sebesar Rp72.611.640.827,10. Lebih lanjut hasil analisis rasio keuangan dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.9. Hasil Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

Keterangan		Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
Likuiditas							
a.	Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek	1,51	4,09	5,95	3,70	1,54	3,36
b.	Rasio quick = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek	0,32	0,69	2,18	2,89	0,80	1,37
Solvabilitas							
a.	Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset	0,07	0,03	0,05	0,06	0,07	0,06
b.	Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas	0,08	0,03	0,05	0,07	0,08	0,06
Aktivitas							
a.	Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang, dimana	3,02	3,64	7,24	11,45	11,79	7,43
b.	Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah	121,00	100,31	50,44	31,87	30,95	66,91



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Keterangan		Rasio					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020*	
c.	Rata-rata piutang pendapatan daerah =(saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2	24.089.735.954,32	32.422.794.956,13	69.391.483.091,34	123.619.254.940,87	113.534.935.192,87	72.611.640.827,10



3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan analisis proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kepulauan Riau, pada tahun anggaran 2016, total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp646.056.815.235,00 dengan total pengeluaran sebesar Rp2.888.218.811.812,34, sehingga persentase belanja aparatur pada tahun 2016 sebesar 22,37%. Persentase belanja aparatur mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Persentase belanja aparatur pada tahun 2017 sebesar 30,86%, tahun 2018 sebesar 30,72%, tahun 2019 sebesar 33,97%, dan tahun 2020 sebesar 28,45%.

Tabel 3.10. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran	Total Belanja Untuk	Total Pengeluaran	Prosentase Belanja Aparatur Aparatur
	Pemenuhan Kebutuhan	(Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	
	Aparatur (Rp)		
	A	B	(A/B) x 100%
Tahun 2016	646.056.815.235,00	2.888.218.811.812,34	22,37%
Tahun 2017	1.009.788.101.200,06	3.272.498.783.538,13	30,86%
Tahun 2018	1.050.724.453.073,06	3.419.789.812.825,19	30,72%
Tahun 2019	1.241.144.563.990,12	3.653.938.156.214,07	33,97%
Tahun 2020	1.096.759.012.320,50	3.855.203.051.882,02	28,45%

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis bagian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Bagian ini melakukan analisis atas surplus dan defisit serta komponen penutup defisit. Pada tahun 2016 terdapat surplus sebesar Rp26.638.808.750,34, dan pada tahun 2020 terdapat defisit sebesar Rp-340.892.868.556,76. Pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan surplus/defisit sebesar -176,06%, tahun 2018 sebesar -495,91%, tahun 2019 sebesar 255,92%, serta pada tahun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2020 kembali mengalami defisit sebesar -219,40%. Pada tahun 2016 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp32.248.571.545,70 dan pada tahun 2020 sebesar Rp405.406.834.699,57.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami Surplus/Defisit pada tahun 2020 sebesar Rp-340.892.868.556,76, dengan realisasi Pendapatan Daerah mengalami pertumbuhan (negatif) sebanyak -10,79%.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.11. Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		2016	2017	2018	2019	*2020
1	Realisasi pendapatan	2.914.857.620.562,68	3.252.237.500.366,54	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
	Dikurangi					
2	Realisasi belanja daerah	2.865.884.362.891,34	3.272.498.783.538,13	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	22.334.448.921,00	-	-	-	-
4	Surplus / (Defisit) riil daerah	26.638.808.750,34	(20.261.283.171,59)	80.217.411.476,91	285.512.848.164,25	(340.892.868.556,76)

*audited 2020

Tabel 3.12. Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2016 – 2017	2017 – 2018	2018 – 2019	2019 – 2020	Rata Rata
1	Realisasi pendapatan	11,57%	7,62%	12,56%	-10,79%	5,24%
2	Dikurangi					
3	Realisasi belanja daerah	14,19%	4,50%	6,85%	5,51%	7,76%
4	Pengeluaran pembiayaan	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-25,00%



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2016 – 2017	2017 – 2018	2018 – 2019	2019 – 2020	Rata Rata
	daerah					
5	Defisit riil daerah	-176,06%	-495,91%	255,92%	-219,40%	-158,86%

Tabel 3.13. Penutup Defisit Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	*2020
1	Realisasi pendapatan	2.914.857.620.562,68	3.252.237.500.366,54	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
	Dikurangi					
2	Realisasi belanja daerah	2.865.884.362.891,34	3.272.498.783.538,13	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02
A	Surplus / (Defisit) riil daerah	26.638.808.750,34	(20.261.283.171,59)	80.217.411.476,91	285.512.848.164,25	(340.892.868.556,76)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan					
	Pembiayaan					
1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya	32.248.571.545,70	59.415.664.756,00	39.427.248.919,41	119.762.452.305,32	405.406.834.699,57
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang	-	-	-	-	-



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian	Pertumbuhan (%)				
		2016	2017	2018	2019	*2020
	dipisahkan					
4	Penerimaan pinjaman daerah	158.100.000,00	-	-	-	-
5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	370.184.460,00	272.867.335,00	117.791.909,00	90.951.593,00	-
6	Penerimaan piutang daerah					
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan	32.776.856.005,70	59.688.532.091,00	39.545.040.828,41	119.853.403.898,32	405.406.834.699,57
(A-B)	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan	59.415.664.756,04	39.427.248.919,41	119.762.452.305,32	405.366.252.062,57	64.513.966.142,81



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.14. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016		2017		2018		2019		*2020	
	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
Jumlah SILPA	59.415.664.756,04	100,00%	39.427.248.919,41	100,00%	119.762.452.305,32	100,00%	405.366.252.062,57	100,00%	64.513.966.142,81	100,00%
Pelampauan penerimaan PAD	(53.906.080.639,32)	-90,73%	(118.821.946.747,46)	-301,37%	78.416.085.135,10	65,48%	51.543.256.504,32	12,72%	29.737.288.813,46	46,09%
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(114.609.868.138,00)	-192,90%	(65.880.165.179,00)	-167,09%	(123.789.354.533,55)	103,36%	173.921.402.750,00	42,90%	(39.580.272.175,60)	-61,35%
Pelampauan penerimaan lain lain pendapatan yang syah	(2.836.228.000,00)	-4,77%	-	0,00%	36.000.000,00	0,03%	-	0,00%	-	0,00%
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	230.239.557.072,66	387,51%	143.440.379.314,86	363,81%	164.464.029.794,81	137,33%	179.810.641.214,93	44,36%	74.316.366.867,95	115,19%
Kewajiban kepada pihak ke tiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	269.289.094.544,07	453,23%	115.646.651.990,78	293,32%	99.949.516.848,35	83,46%	191.742.431.945,65	47,30%	178.419.305.361,05	276,56%
Kegiatan lanjutan	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-

*audited 2020



3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Kebijakan Umum Pengelolaan Pendapatan Daerah

Landasan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini khususnya kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia serta analisa pertumbuhan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus diupayakan mengalami tren peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

1. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- b. Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- e. Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah.
- f. Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- g. Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau



Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan

- h. Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium.
- i. Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- j. Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD.
- k. Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya.
- l. Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

2. Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

3. Peningkatan Dana Perimbangan dilakukan melalui:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- c. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026 merupakan proyeksi target penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan didasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Asumsi-asumsi dalam menghitung proyeksi pendapatan tidak hanya dengan cara menganalisa tren pertumbuhan realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan kondisi objektif yang terjadi saat ini dimana bangsa Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 mengalami kemerosotan ekonomi secara nasional akibat adanya wabah/Pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia.

Kondisi wabah/Pandemi COVID-19 sangat memengaruhi terjadinya perubahan yang sangat besar dalam seluruh sektor perekonomian baik berdampak bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menghitung proyeksi pendapatan tahun 2021-2026 digunakan sebagai data awal (*baseline*) adalah target pendapatan daerah pada tahun 2020 dimana baik sektor penerimaan PAD maupun Dana Perimbangan mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Hingga saat ini (ketika menyusun RPJMD) belum ada kepastian kapan Pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kapan titik balik perekonomian akan pulih kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mengandalkan penerimaan dari pajak daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang sangat drastis akibat adanya Pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, dengan memperhatikan data dan informasi yang ada, maka dilakukan penyesuaian pertumbuhan baru dalam menentukan proyeksi target pajak daerah tahun 2021 sampai dengan 2026.

Retribusi daerah merupakan salah satu yang mengalami dampak akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Saat ini terdapat 8 (delapan) OPD dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Teknis penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari antara lain:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
9. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam;
10. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten karimun;
11. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
12. UPT P3 Antang;
13. UPT Laboratorium dan Klinik Hewan;
14. UPT Balai Benih Induk Pertanian;
15. UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi;
16. UPT Balai Benih Ikan Pengujan; dan
17. UPTD BPMP2KP;

Proyeksi penerimaan di masa lima tahun ke depan akan diupayakan Penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepulauan Riau yang rencananya akan melakukan pengelolaan Pelabuhan Dompok dan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjungmoco.

Proyeksi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan BLUD berasal dari 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang). Selebihnya penerimaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

lain-lain PAD yang sah berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dan Denda Pajak Daerah.

Pada 5 (lima) tahun ke depan, upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan Lain-lain PAD yang sah antara lain melalui Peningkatan jasa layanan kesehatan oleh 2 (dua) RSUD yang dimiliki oleh Pemprov Kepulauan Riau. Walaupun sudah berstatus BLUD namun bisa ditingkatkan penerimaannya dengan menaikkan kapasitas pelayanan rumah sakit. Anggaran terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD akan terus ditingkatkan selain sebagai pemenuhan hak masyarakat akan kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kepulauan Riau.

Untuk sektor penerimaan Dana Perimbangan berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan sangat tergantung dari realisasi penerimaan keuangan negara dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun pos anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH, tata cara penyaluran, pedoman umum, petunjuk teknis pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Diasumsikan Pandemi Covid-19 sudah mulai membaik di tahun 2021, namun diproyeksikan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan akan hanya meningkat dengan persentase yang tidak signifikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2022 keuangan negara segera membaik seiring dengan teratasinya Pandemi Covid-19. Namun demikian peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Perimbangan akan tetap diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai secara optimal.

Proyeksi penerimaan lain-lain pendapatan daerah diperoleh dari Dana Insentif Daerah dan hibah pihak ketiga yang berasal dari PT. Jasa Raharja (Persero) dimana



peningkatannya sebanding dengan tingkat realisasi penerimaan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

3.3.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan pembahasan bersama OPD penghasil Pendapatan Daerah yang selanjutnya dituangkan dalam surat usulan masing-masing OPD penghasil.

Penerimaan daerah dari sektor pendapatan daerah pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp3.396.198.955.130, jumlah ini meningkat menjadi Rp3.534.303.462.607 pada tahun 2022. Pada tahun-tahun selanjutnya mengalami peningkatan yang konsisten, pada tahun 2026 diperkirakan jumlah pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah Rp4.279.016.992.004.

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 diprediksikan mencapai Rp1.176.601.328.130. Jumlah ini terdiri dari prediksi Pajak Daerah sebesar Rp1.059.270.326.530, Retribusi Daerah diperkirakan sebesar Rp9.756.001.600, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp3.000.000.000, serta Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp104.575.000.000. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2026 diprediksikan mencapai Rp1.542.009.534.272. Jumlah ini terdiri dari prediksi Pajak Daerah sebesar Rp1.357.130.655.976, Retribusi Daerah sebesar Rp25.012.231.108, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp22.700.000.000, serta Lain-lain PAD yang Sah Rp137.166.647.188.

Pendapatan transfer Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp2.218.396.627.000, jumlah ini terus berfluktuatif tiap tahunnya hingga pada tahun 2026 diperkirakan pendapatan transfer yang diterima Kepulauan Riau sebesar Rp2.735.474.643.575. Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari pendapatan dari dana Hibah dengan jumlah pada tahun 2021 sebesar Rp 1.201.000.000. Jumlah ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp1.532.814.157. Penjelasan lebih detail terkait proyeksi pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.20.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Berikut adalah beberapa asumsi dalam melakukan proyeksi terhadap komponen pajak daerah. Data *base line* yang digunakan adalah data realisasi tahun 2020 dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi yang belum tahu kapan berakhir.

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan pajak yang bersifat periodikal dihitung berdasarkan realisasi penerimaan PKB tahun 2019 - 2021 dan potensi objek pajak per 5 Maret 2021 sebanyak 983.738 unit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.15 Potensi Objek Pajak Per 5 Maret 2021

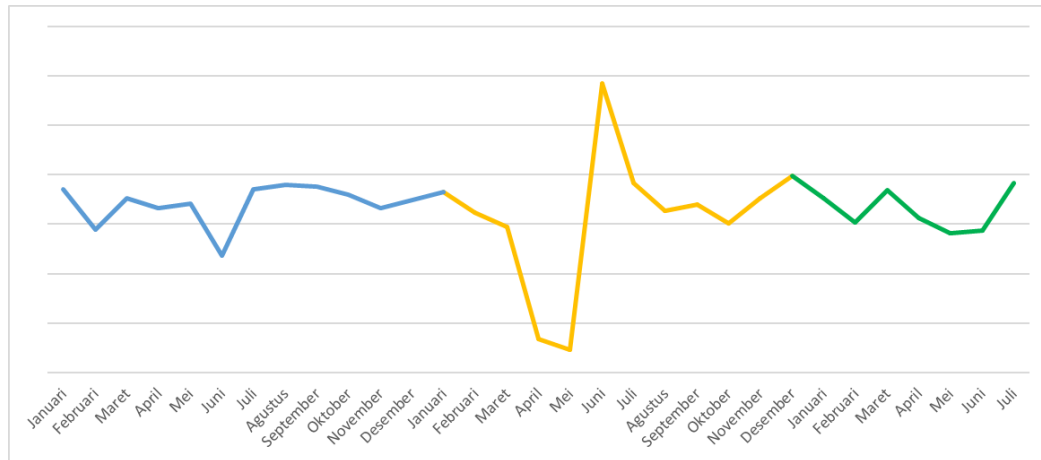
No	Uraian	Jumlah Kendaraan	Prosentase
TOTAL KENDARAAN POTENSIAL		983.738	
1	Aktif / Patuh	580.571	59,02%
2	Nunggak 1 Tahun	138.323	14,06%
3	Nunggak 2 Tahun	79.885	8,12%
4	Nunggak 3 Tahun	60.141	6,11%
5	Nunggak 4 Tahun	61.101	6,21%
6	Nunggak 5 Tahun	63.717	4,84%

Adapun perkembangan penerimaan PKB pada tahun 2019 s/d Juli 2021 terlihat sangat fluktuatif dan belum stabil. Kondisi ini tergambar grafik bulanan tabel dibawah ini :



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 3. 1. Grafik Perkembangan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021



Tabel 3.16 Perkembangan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021

NO	BULAN	PKB 2019	% naik turun	PKB 2020	% naik turun	PKB 2021	% naik turun
1	2	3	4	4	5	5	6
1	Januari	37.119.664.372		36.547.102.327	4,66%	35.225.285.874	-11,35%
2	Februari	28.824.377.018	-22,35%	32.402.520.594	-11,34%	30.291.574.779	-14,01%
3	Maret	35.229.755.298	22,22%	29.505.052.532	-8,94%	36.855.645.706	21,67%
4	April	33.302.787.352	-5,47%	6.777.704.487	-77,03%	31.345.797.661	-14,95%
5	Mei	34.127.448.568	2,48%	4.604.216.419	-32,07%	28.196.196.729	-10,05%
6	Juni	23.699.843.896	-30,55%	58.408.230.111	1168,58%	28.678.641.662	1,71%
7	Juli	37.024.173.966	56,22%	38.308.662.279	-34,41%	38.248.772.030	33,37%
8	Agustus	37.986.957.597	2,60%	32.753.371.428	-14,50%		
9	September	37.695.295.201	-0,77%	34.011.771.635	3,84%		
10	Oktober	35.957.052.057	-4,61%	30.209.081.923	-11,18%		
11	November	33.242.136.982	-7,55%	35.320.392.533	16,92%		
12	Desember	34.921.235.843	5,05%	39.734.728.486	12,50%		
JUMLAH		409.130.728.150		378.582.834.754		228.841.914.441	

Berdasarkan kondisi di atasmaka perhitungan proyeksi target PKB pada RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut.

- Besaran Tarif PKB dianggap masih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya
- Prediksi jumlah wajib pajak yang tidak melaksanakan daftar ulang pada tahun berikutnya sebesar 10% - 15% setiap tahunnya. Kondisi ini didasarkan pada kondisi eksisting yang menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat Wajib Pajak yang tidak melakukan daftar ulang (tidak



membayar kembali pada tahun berikutnya) yang disebabkan karena beberapa hal antara lain adalah :

- Perilaku Wajib Pajak yang tidak patuh membayar pajak. Hal ini pada umumnya terjadi pada WP yang kendaaraannya beroperasi di pulau-pulau atau jauh dari layanan SAMSAT
 - Kendaraan dalam masa kredit yang tidak mampu membayar cicilan sehingga ditarik leasing
 - Kendaraan yang masa berlaku STNK-nya habis dan Wajib Balik Nama, namun tidak dilakukan karena berbagai alasan
 - Kendaraan tidak dapat digunakan karena rusak, disita, dan sebagainya
 - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru dengan penekanan kenaikan pada jenis Roda dua, sedangkan jenis Roda empat diperkirakan stagnan bahkan lebih rendah apabila dibandingkan tahun sebelum adanya pandemi. Pertambahan jumlah objek kendaraan baru diperkirakan tumbuh sebesar 2,5% - 4% pertahun;
 - Prediksi objek mutasi masuk dan mutasi keluar yang jumlahnya tidak terlalu signifikan (dibawah 1%); -
 - Prediksi jumlah pembayaran tunggakan pajak sebesar 3% - 5% pertahun. Pembayaran tunggakan ini berasal dari data tunggakan lebih dari 1 tahun sesuai tabel di atas.
 - Prediksi target PKB tidak memperhitungkan potensi apabila dilakukan kebijakan insentif / keringanan Pajak atau adanya kebijakan lain di masa pandemi
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak yang sifatnya non periodikal dan dipungut apabila terjadi peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Khususnya yang bersumber dari pendaftaran kendaraan baru. Proyeksi BBNKB dihitung berdasarkan perkiraan penjualan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

kendaraan baru oleh GAIKINDO dan AISI, selaku asosiasi produsen kendaraan bermotor Roda 4 dan Roda 2 di Indonesia.

Peningkatan realisasi BBNKB sangat dipengaruhi oleh pendaftaran kendaraan baru, karena hampir 98% penerimaan BBNKB bersumber dari BBNKB kendaraan baru. Hal ini terlihat dari data 3 tahun terakhir yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.17

Korelasi Kendaraan baru dan Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021

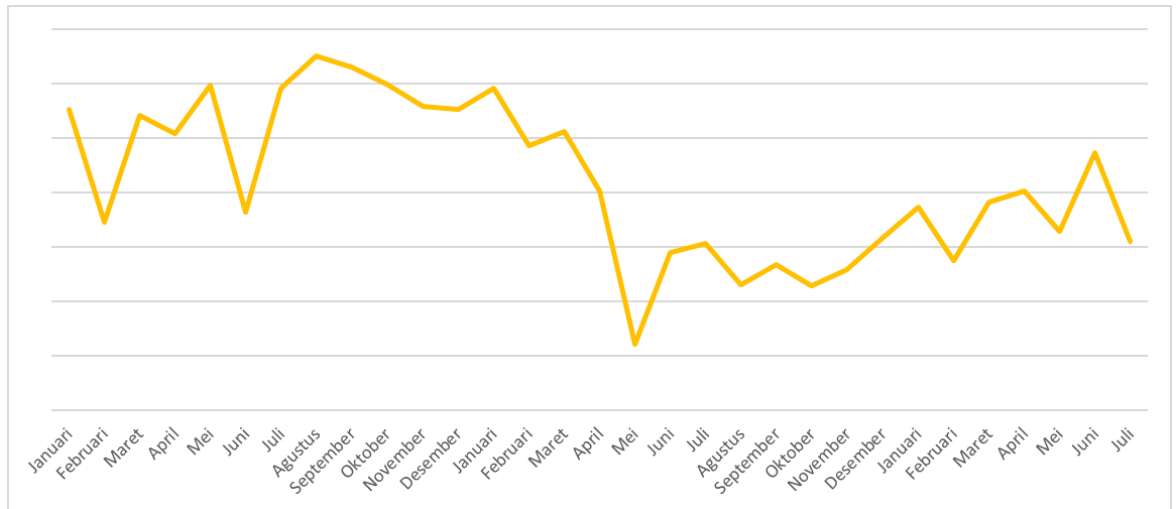
NO	BULAN	2019		2020		2021	
		Kendaraan	BBNKB	Kendaraan	BBNKB	Kendaraan	BBNKB
1	Januari	5.211	27.603.060.600	5.625	29.577.168.000	3.705	18.622.525.500
2	Februari	3.384	17.308.440.600	5.369	24.305.408.000	3.085	13.702.371.200
3	Maret	5.477	27.085.523.925	5.858	25.578.361.500	4.642	19.091.772.600
4	April	4.712	25.468.187.500	4.020	20.168.401.500	4.023	20.168.941.500
5	Mei	6.303	29.835.182.500	1.356	6.060.141.000	3.709	16.457.666.000
6	Juni	4.181	18.192.000.000	3.908	14.469.832.000	5.052	23.630.975.500
7	Juli	6.531	29.564.548.000	3.521	15.330.883.300	3.583	15.553.367.000
8	Agustus	6.832	32.596.186.500	2.966	11.509.817.000	-	-
9	September	6.513	31.501.597.700	2.985	13.397.413.000	-	-
10	Oktober	6.562	29.938.762.000	2.922	11.453.857.000	-	-
11	November	5.806	27.888.741.500	2.976	12.921.337.000	-	-
12	Desember	5.786	27.614.125.000	3.609	15.885.276.000	-	-
JUMLAH		67.298	324.596.355.825	45.115	200.657.895.300	27.799	127.227.619.300

Secara tren juga terlihat bahwa perkembangan realisasi BBNKB dan pertumbuhan kendaraan baru tahun 2019 – 2021 sangat fluktuatif dan cenderung menurun.

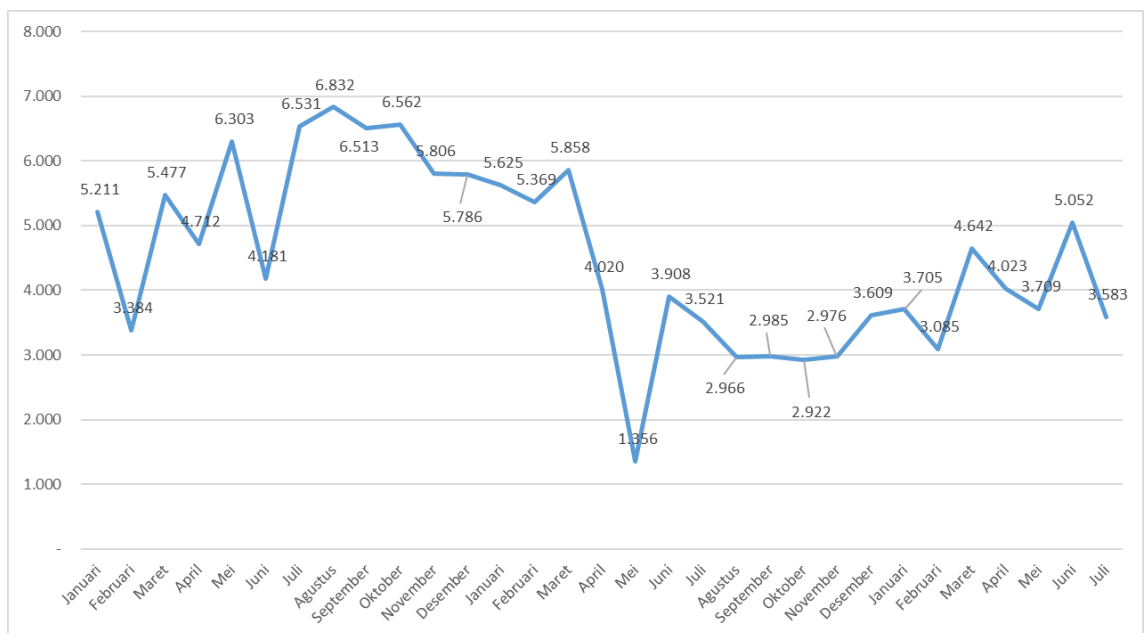


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Gambar 2 Perkembangan Realisasi BBNKB tahun 2019 s/d 2021



Gambar 3. Perkembangan Kendaraan Baru tahun 2019 s/d 2021



Berdasarkan data-data tersebut diatas dan memperhatikan kondisi perekonomian dimasa pandemi yang pastinya akan mempengaruhi dengan daya beli masyarakat, maka perhitungan proyeksi target BBNKB dalam RPJMD 2021 -2026 disusun dengan beberapa asumsi sebagai berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- Besaran Tarif BBNKB dianggap masih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya
 - Prediksi pertumbuhan kendaraan baru meningkat 2,5% - 5% setiap tahun
 - Prediksi penyebaran covid-19 akan terus menurun dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dihitung berdasarkan jumlah konsumsi BBM per-sektor usaha dikalikan harga BBM dikalikan tarif PBBKB. Pada tahun 2020 realisasi PBBKB di Kepulauan Riau mengalami penurunan cukup signifikan karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dan belum berjalannya kegiatan usaha transportasi, pariwisata, industri dan pertambangan secara maksimal akibat pandemi covid-19. Namun sejak triwulan kedua tahun 2021 realisasi PBBKB mulai mengalami peningkatan. Berikut disajikan data realisasi penerimaan PBBKB tahun 2019 – 2021.

Tabel 3.18 Realisasi PKB tahun 2019 s/d 2021

NO	BULAN	2019	2020	2021
1	Januari	27.048.120.498	29.639.316.818	28.029.291.808
2	Februari	23.297.631.590	33.332.790.620	25.776.927.699
3	Maret	25.841.701.634	31.164.426.803	23.663.774.536
4	April	28.112.031.290	28.519.153.318	30.694.634.556
5	Mei	27.772.532.507	19.845.471.683	32.179.387.823
6	Juni	28.840.392.338	21.601.827.034	30.396.818.968
7	Juli	27.401.196.418	23.628.722.751	30.143.670.087
8	Agustus	33.181.783.256	22.391.591.188	
9	September	29.486.398.062	24.844.629.657	
10	Oktober	30.915.917.199	25.011.372.584	
11	November	34.850.769.351	28.070.849.925	
12	Desember	34.899.356.647	28.484.055.468	
JUMLAH		351.647.830.790	316.534.207.849	200.884.505.477

Sedangkan dari penggunaann BBM, pada tahun 2018 – 2020 terlihat bahwa konsumsi BBM tahun 2020 turun sangat drasti dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dari jenis BBM terlihat adanya fluktuasi jumlah penggunaan per-jenis BBM. Penggunaan BBM subsidi jenis premium dan solar semakin menurun digantikan BBM non subsidi. Dengan begitu sangat dimungkinkan penerimaan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

PBBKB akan meningkat seiring dengan adanya perubahan penggunaan BBM Non Subsidi.

Tabel 3.19 Perkembangan Jumlah Penggunaan BBM tahun 2019 s/d 2021

NO	URAIAN	2018	2019	2020
		VOLUME BBM	VOLUME BBM	VOLUME BBM
1	Pertalite	112.564.264	131.744.544	142.039.955
2	Bio Solar	138.782.854	377.048.733	402.244.246
3	Premium	282.484.515	288.956.336	217.696.503
4	Solar	391.095.572	144.647.645	103.774.058
5	Pertamax Turbo	23.012.553	14.319.702	11.910.835
6	Pertamina Dex	4.512.105	10.729.920	10.297.180
7	Dexlite	5.107.734	5.346.837	7.292.894
8	Pertamax	-	4.879.700	9.400.950
JUMLAH TOTAL		957.559.597	977.673.417	904.656.621

Berdasarkan kondisi diatas, maka perhitungan proyeksi target PBBKB dalam RPJMD 2021 - 2026 disusun dengan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Besaran Tarif PBBKB dianggap masih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya
- Prediksi perubahan harga jual bahan bakar minyak oleh Pemerintah mengikuti perkembangan harga jual minyak mentah dunia dan nilai tukar mata uang asing.
- Prediksi kegiatan masyarakat dan kegiatan usaha transportasi, pariwisata, industri dan pertambangan sudah mulai berjalan normal.
- Prediksi rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM meningkat 2% - 3% per tahun.

- 4) Pajak Air Permukaan, dihitung berdasarkan jumlah konsumsi air permukaan dan nilai perolehan air (NPA). Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam menyusun proyeksi target PAP dalam RPJMD 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- Besaran Tarif PAP dianggap masih sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya
 - Prediksi perubahan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar perhitungan PAP
 - Prediksi adanya penambahan objek dan Wajib Pajak baru
 - Prediksi adanya fluktuasi konsumsi air yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan penggunaan air permukaan sektor usaha pertambangan. Perkebunan, perhutanan dan sebagainya
- 5) Pajak Rokok, dihitung berdasarkan prediksi jumlah cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah pusat dan memperhatikan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi. Selain itu hal yang sangat berpengaruh adalah komitmen terhadap partisipasi Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu sebesar 37,5% dari penerimaan Pajak Rokok, yang apabila tidak dilaksanakan akan dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat.

Berdasar analisis kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah berikut disajikan ringkasan asumsi untuk menghitung proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.20. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH (2+7+10)	3.396.198.955.130	3.534.303.462.607	3.685.626.759.843	3.862.826.531.910	4.062.456.787.423	4.279.016.992.004
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3+4+5+6)	1.176.601.328.130	1.242.335.715.947	1.307.423.412.172	1.379.722.106.355	1.455.993.605.108	1.542.009.534.272
3	Pajak Daerah	1.059.270.326.530	1.111.035.036.467	1.166.523.910.918	1.225.458.189.063	1.289.550.736.735	1.357.130.655.976
4	Retribusi Daerah	9.756.001.600	12.525.679.480	14.147.001.254	18.900.042.292	20.676.799.623	25.012.231.108
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	9.150.000.000	10.500.000.000	12.400.000.000	15.500.000.000	22.700.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	104.575.000.000	109.625.000.000	116.252.500.000	122.963.875.000	130.266.068.750	137.166.647.188
7	PENDAPATAN TRANSFER (8+9)	2.218.396.627.000	2.290.706.696.660	2.376.879.245.171	2.481.714.117.930	2.605.003.359.309	2.735.474.643.575
8	Dana Perimbangan	2.173.959.305.000	2.244.047.508.560	2.327.420.505.785	2.428.793.266.787	2.547.848.840.075	2.673.747.762.802
9	Dana Insentif Daerah (D.I.D)	44.437.322.000	46.659.188.100	49.458.739.386	52.920.851.143	57.154.519.234	61.726.880.773
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (11+12+13)	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
11	Pendapatan Hibah	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
12	Dana Darurat						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						



3.3.3 Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja Daerah digunakan untuk mendapatkan gambaran terkait kondisi Belanja Daerah dalam Periode RPJMD 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama 5 tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 3 kelompok prioritas sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan Perundang-undangan, antara lain :

- a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari APBD sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah minimal 25%, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
- d. Belanja Moda Transportasi, besarnya 10% dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok, 70 % untuk BBH kab/kota, 30% hak provinsi dengan komposisi : 50% specific grant dan 50% block grant, dari yang 50% specific grant, 75 % untuk iuran JKN. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Sedangkan Belanja Mengikat atau (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut :



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- a. Belanja Pegawai Belanja Pegawai yang digunakan untuk Belanja Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BOS, Honor Pengelola Keuangan, Barang Daerah dan Sistem Informasi;
- b. Belanja JKN, yang bersumber dari Pajak Rokok;
- c. Belanja DAK BOS;
- d. Belanja Operasional Kantor; dan
- e. Belanja Fungsional (RS dan UPT OPD yang melaksanakan PPK BLUD).

Juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Belanja Moda Transportasi, Belanja Infrastruktur, Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja bagi Hasil Pajak, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga.

2. Prioritas Kedua

Selain untuk memenuhi prioritas pertama, kapasitas riil digunakan untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tahun 2021 – 2026.

3. Prioritas Ketiga

Untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya

Belanja Operasi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp2.370.174.111.334 dan diprediksi akan terus mengalami peningkatan pada tahun-tahun selanjutnya hingga pada tahun 2026 diperkirakan sebesar Rp2.849.968.008.613. Belanja Operasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dianggarkan terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Subsidi dan Belanja Bunga diperkirakan Rp0 pada periode RPJMD 5 (lima) tahun mendatang.

Belanja Tidak terduga yang dianggarkan pada tahun 2021 sebesar Rp55.767.947.443 dan diperkirakan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2024 sampai 2026 belanja ini turun jika dibandingkan tren tahun 2021-2023. Pada tahun 2026 diperkirakan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2.699.049.226.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Provinsi Kepulauan Riau diperkirakan pada tahun 2021 sebesar Rp558.968.004.567 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp545.468.004.567 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp13.500.000.000. Pada tahun 2026 diperkirakan Belanja Transfer Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp638.837.378.158 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil sebesar Rp631.753.384.824 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp7.083.993.334.

Berikut disajikan ringkasan proyeksi Belanja Daerah (Belanja Wajib Mengikat) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.21. Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
23	BELANJA DAERAH (24+31+33)	2.984.910.063.344	2.830.214.832.235	2.953.743.308.797	3.099.532.810.583	3.305.146.161.951	3.491.504.435.997
24	BELANJA OPERASI (25+26+27+28+29+30)	2.370.174.111.334	2.241.036.607.154	2.340.185.584.767	2.515.228.106.798	2.693.065.830.123	2.849.968.008.613
25	Belanja Pegawai	1.160.462.322.430	1.177.493.281.120	1.261.919.549.376	1.352.399.181.066	1.449.366.202.349	1.553.285.759.057
26	Belanja Barang dan Jasa	662.681.755.999	611.020.012.832	615.370.842.695	695.366.715.438	749.016.853.019	797.624.185.951
27	Belanja Bunga						
28	Belanja Subsidi						
29	Belanja Hibah	542.767.742.905	448.298.226.727	458.479.685.549	462.779.692.964	489.675.479.668	493.725.820.876
30	Belanja Bantuan Sosial	4.262.290.000	4.225.086.475	4.415.507.146	4.682.517.331	5.007.295.087	5.332.242.728
31	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.767.947.443	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
32	Belanja Tidak Terduga	55.767.947.443	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
33	BELANJA TRANSFER (34+35)	558.968.004.567	532.703.025.527	556.365.883.143	581.608.351.585	609.382.631.452	638.837.378.158
34	Belanja Bagi Hasil	545.468.004.567	520.836.525.527	545.935.229.643	572.439.807.158	601.323.480.901	631.753.384.824
35	Belanja Bantuan Keuangan						



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		13.500.000.000	11.866.500.000	10.430.653.500	9.168.544.427	8.059.150.551	7.083.993.334



3.3.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pada sisi Pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada 5 (lima) tahun mendatang hanya menganggarkan Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Pada tahun 2021, diperkirakan Jumlah Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp64.510.636.579,85. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Tahun 2021 diperkirakan cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2026 diperkirakan jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp94.635.482.893,12. Adapun tabel Pembiayaan Proyeksi Daerah disajikan pada Tabel 3.22.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.22. Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
14	PEMBIAYAAN						
15	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (16+17+18+19+20+21)	64.510.636.580	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
16	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.510.636.580	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
17	Pencairan Dana Cadangan						
18	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
19	Penerimaan Pinjaman Daerah						
20	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
21	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
36	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (37+38+39+40+41))	-	-	-	-	-	-
37	Pembentukan Dana Cadangan						
38	Penyertaan Modal Daerah						
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
40	Pemberian Pinjaman Daerah						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
41	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						



3.3.5 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menghitung besarnya kapasitas riil keuangan daerah dalam rangka membiayai pendanaan prioritas pembangunan dalam suatu daerah. Berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berikut disajikan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahun 2021, diperkirakan jumlah kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp475.799.528.366 dan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp780.214.773.917. Pada tahun 2026 diperkirakan jumlah kapasitas riil keuangan daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp882.148.038.900. Adapun tabel Kapasitas Riil Keuangan Daerah disajikan pada Tabel 3.23.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 3.23. Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH (2+7+10)	3.396.198.955.130	3.534.303.462.607	3.685.626.759.843	3.862.826.531.910	4.062.456.787.423	4.279.016.992.004
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3+4+5+6)	1.176.601.328.130	1.242.335.715.947	1.307.423.412.172	1.379.722.106.355	1.455.993.605.108	1.542.009.534.272
3	Pajak Daerah	1.059.270.326.530	1.111.035.036.467	1.166.523.910.918	1.225.458.189.063	1.289.550.736.735	1.357.130.655.976
4	Retribusi Daerah	9.756.001.600	12.525.679.480	14.147.001.254	18.900.042.292	20.676.799.623	25.012.231.108
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.000.000.000	9.150.000.000	10.500.000.000	12.400.000.000	15.500.000.000	22.700.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	104.575.000.000	109.625.000.000	116.252.500.000	122.963.875.000	130.266.068.750	137.166.647.188
7	PENDAPATAN TRANSFER (8+9)	2.218.396.627.000	2.290.706.696.660	2.376.879.245.171	2.481.714.117.930	2.605.003.359.309	2.735.474.643.575
8	Dana Perimbangan	2.173.959.305.000	2.244.047.508.560	2.327.420.505.785	2.428.793.266.787	2.547.848.840.075	2.673.747.762.802
9	Dana Insentif Daerah (D.I.D)	44.437.322.000	46.659.188.100	49.458.739.386	52.920.851.143	57.154.519.234	61.726.880.773
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (11+12+13)	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
11	Pendapatan Hibah	1.201.000.000	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
12	Dana Darurat						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
14	PEMBIAYAAN						
15	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (16+17+18+19+20+21)	64.510.636.580	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
16	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	64.510.636.580	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
17	Pencairan Dana Cadangan						
18	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
19	Penerimaan Pinjaman Daerah						
20	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah						
21	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
22	TOTAL PENERIMAAN DAERAH (1+15)	3.460.709.591.710	3.610.429.606.152	3.765.122.409.161	3.946.051.186.478	4.150.806.979.379	4.373.652.474.897
23	BELANJA DAERAH (24+31+33)	2.984.910.063.344	2.830.214.832.235	2.953.743.308.797	3.099.532.810.583	3.305.146.161.951	3.491.504.435.997
24	BELANJA OPERASI (25+26+27+28+29+30)	2.370.174.111.334	2.241.036.607.154	2.340.185.584.767	2.515.228.106.798	2.693.065.830.123	2.849.968.008.613



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
25	Belanja Pegawai	1.160.462.322.430	1.177.493.281.120	1.261.919.549.376	1.352.399.181.066	1.449.366.202.349	1.553.285.759.057
26	Belanja Barang dan Jasa	662.681.755.999	611.020.012.832	615.370.842.695	695.366.715.438	749.016.853.019	797.624.185.951
27	Belanja Bunga						
28	Belanja Subsidi						
29	Belanja Hibah	542.767.742.905	448.298.226.727	458.479.685.549	462.779.692.964	489.675.479.668	493.725.820.876
30	Belanja Bantuan Sosial	4.262.290.000	4.225.086.475	4.415.507.146	4.682.517.331	5.007.295.087	5.332.242.728
31	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.767.947.443	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
32	Belanja Tidak Terduga	55.767.947.443	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
33	BELANJA TRANSFER (34+35)	558.968.004.567	532.703.025.527	556.365.883.143	581.608.351.585	609.382.631.452	638.837.378.158
34	Belanja Bagi Hasil	545.468.004.567	520.836.525.527	545.935.229.643	572.439.807.158	601.323.480.901	631.753.384.824
35	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000.000	11.866.500.000	10.430.653.500	9.168.544.427	8.059.150.551	7.083.993.334
36	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (37+38+39+40+41))	-	-	-	-	-	-
37	Pembentukan Dana Cadangan						
38	Penyertaan Modal Daerah						
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
40	Pemberian Pinjaman Daerah						
41	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan						
42	KAPASITAS RIIL (22 -23-36)	475.799.528.366	780.214.773.917	811.379.100.364	846.518.375.895	845.660.817.428	882.148.038.900



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis terhadap isu-isu strategis merupakan salah satu tahapan yang krusial dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Hal ini disebabkan isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dan sangat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu-isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu penting lainnya.

Dalam Bab IV ini diuraikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan Provinsi Kepulauan Riau, khususnya untuk jangka waktu 2016-2020. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat penyusunan RPJMD. Komponen pembentuk isu-isu strategis di Provinsi Kepulauan Riau merupakan analisis hasil pembangunan periode sebelumnya termasuk analisis terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk mengetahui permasalahan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dan faktor penentu keberhasilannya; hasil analisis terhadap dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005-2025; hasil analisis terhadap dokumen RPJMN 2020-2024; dan hasil analisis terhadap isu-isu lingkungan eksternal. Adapun penjelasan secara skematik disajikan dalam Gambar 4.1.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Gambar 4.1

Komponen Pembentuk Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Kebijakan pembangunan tersebut memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Penyajian permasalahan pokok pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dikelompokkan menjadi tujuh kelompok yaitu: 1) Ekonomi, 2) Kemaritiman dan lingkungan hidup, 3) Sosial, 4) Pembangunan sumber daya manusia, 5) Tata kelola pemerintahan, 6) Kebudayaan, dan 7) Infrastruktur.



4.1.1 Bidang Ekonomi

Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dapat diamati dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam enam tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 6.02 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut kemudian turun menjadi 4.98 persen di tahun 2016 dan akhirnya mencapai titik terendah sebesar 1.98 persen di tahun 2017. Setelah dua tahun berturut-turut mengalami penurunan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau akhirnya menunjukkan tren positif dengan adanya kenaikan menjadi 4.58 persen di tahun 2018 dan mencapai level kenaikan tertinggi di level 4.89 persen di tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 ekonomi tumbuh secara negatif dengan nilai sebesar -3,80 di Provinsi Kepulauan Riau. Penurunan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tersebut berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor ekonomi mengalami pelemahan.

Selain pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kepulauan Riau dapat diamati dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah satu indikator untuk melihat perkembangan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah. PDRB Provinsi Kepulauan Riau tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada perekonomian nasional. Pada tahun tahun 2015-2019, PDRB Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami peningkatan. Berturut-turut PDRB tahun 2015 adalah sebesar 155.131,35 milyar rupiah, tahun 2016 sebesar 162.853,04 milyar rupiah, tahun 2017 sebesar 166.081,68 milyar rupiah, tahun 2018 sebesar 173.498,75 milyar rupiah, dan tahun 2019 sebesar 181.895,86 milyar rupiah. Namun pada tahun 2020, PDRB Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi sebesar 174.976,70 milyar rupiah. Hal yang sama dengan penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan PDRB Provinsi Kepulauan Riau tersebut berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan sektor penunjang PDRB mengalami pelemahan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan hal tersebut di atas, pelemahan faktor-faktor penggerak ekonomi Provinsi Kepulauan Riau berdampak pada penurunan pertumbuhan dan penurunan PDRB. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pada sektor koperasi dan UMKM, industri, penanaman modal, lapangan kerja, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian.

Salah satu penunjang bidang perekonomian adalah sektor koperasi dan UMKM. Permasalahan pada sektor koperasi adalah koperasi belum menjadi kebutuhan masyarakat karena masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi. Namun secara umum, kinerja koperasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Salah satu indikatornya adalah persentase koperasi yang aktif. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif adalah sebesar 40,85% atau lebih tinggi dari persentase koperasi aktif tahun 2019 yaitu sebesar 39,93%. Namun, kondisi tahun 2020 tersebut masih rendah dari nilai 55,80% yang menjadi target untuk persentase koperasi aktif.

Permasalahan koperasi lainnya adalah peran koperasi yang belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal. Hal ini ditunjukkan dengan volume usaha per koperasi pada tahun 2020 yang naik namun tidak signifikan dari Rp232.630.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp233.040.000,00 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan penurunan persentase koperasi yang dibina dari 30,97% pada tahun 2019 menjadi 14,64% pada tahun 2020. Selain itu, terdapat permasalahan minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya dibidang simpan pinjam serta manajemen koperasi masih sederhana.

Pembinaan UMKM di Provinsi Kepulauan Riau juga masih kecil yaitu sebesar 0,45%. Pembinaan UMKM dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM. Permasalahan lainnya adalah meningkatkan produk UMKM diterima di pasar modern dan tersertifikasi yang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

telah mencapai 20,93% pada tahun 2020 serta meningkatkan rasio kewirausahaan di Provinsi Kepulauan Riau yang berkisar 1 % yang idealnya berada pada posisi 4%.

Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor industri khususnya industri pengolahan merupakan kontributor terbesar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai kontribusi yang berada pada kisaran 37,56-41,65 persen selama periode 2015 hingga 2020. Selain itu, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan berdasarkan harga konstan dari tahun 2015-2020 selalu positif meskipun mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 6,25 menjadi 3,25 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan sektor industri merupakan faktor dominan dalam perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk diperlukan upaya penguatan sektor industri antara lain pembukaan wilayah industri baru, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga pusat pertumbuhan yang telah berkembang, pengembangan kawasan industri kecil sebagai penunjang kegiatan industri utama dan Diperlukan pengembangan industri hilir.

Pada sisi lain, pertumbuhan jumlah industri besar yang belum sesuai target, yakni terealisasi sebanyak 554 unit dari target 785 unit. Penguatan sektor industri sangat diperlukan yang antara lain berupa penguatan pembangunan industri maritim serta mengembangkan kawasan strategis bagi pertumbuhan industri yang berbasis kelautan. Hal ini dapat dilanjutkan dengan pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan, di antaranya di Kabupaten Bintan. Selain itu, permasalahan agar industri dapat berkembang lebih optimal adalah belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri. Permasalah selanjutnya adalah penguatan industri harus selaras dengan perdagangan bebas yang ditunjukkan dengan Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) di Batam-Bintan-Karimun-Tanjungpinang.

Sektor industri tidak bisa lepas dari sektor perdagangan. Kondisi sektor perdagangan tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun



2019. Kontribusi Perdagangan terhadap PDRB tahun 2020 adalah sebesar 8,8% dari 9.07% pada tahun 2019. Pertumbuhan sektor perdagangan tahun 2020 tercatat -0,030 serta Nilai Ekspor Bersih Perdagangan tahun 2020 mengalami penurunan dari US\$ 1.850,91 juta pada tahun 2019 menjadi US\$ 742,38 juta. Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi Covid 19 yang berakibat belum optimalnya jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA dan belum optimalnya sektor non migas dengan nilai ekspor non migas USD 7.793.311 ribu dari target sebesar USD 9.100.000 ribu. Selain hal tersebut di atas, kualitas produk unggulan daerah yang belum mampu bersaing dengan produk lain karena belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) harus segera dapat diatasi.

Permasalahan lain di sektor perdagangan adalah diperlukan stabilitas harga kebutuhan pokok serta penurunan harga logistik barang, yang pemasarannya masih dikuasai oleh monopsoni (tengkulak) khususnya produk hortikultura. Hal ini dapat didukung dengan penguatan wilayah distribusi di Provinsi Kepulauan Riau, antara lain revitalisasi Pembangunan Pasar Inpres di Anambas dan mempertahankan Tanjungpinang sebagai Kota Perdagangan.

Tingginya peran sektor industri nasional di Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh kinerja investasi yang terus meningkat. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan realisasi Investasi PMA dan PMDN yang signifikan yaitu Realisasi Investasi PMDN sebesar Rp.14,249 (Miliar) dengan 2.294 Proyek dan Realisasi Investasi PMA sebesar 1.649,4(US\$) atau Rp.23.751 (Milliar) dengan 2.268 Proyek. Namun investasi yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah investasi bidang industri nasional. Sangat sedikit investor yang bersedia berinvestasi pada bidang ekonomi lokal, seperti pertanian maupun pariwisata yang berbasis masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM Data ini didukung oleh data persebaran investasi antarwilayah yang belum proporsional serta mengelompok pada wilayah non-pertanian atau 96% berada di Kota Batam pada tahun 2020 dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Iklim investasi nasional yang penuh dengan kemudahan,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tidak diikuti oleh ketertarikan pihak investor agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Kemudahan iklim investasi nasional dapat diikuti dengan kemudahan layanan perizinan berupa *one day service*. Hal ini bertujuan agar jumlah dan nilai investasi dapat meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan sekaligus untuk mengatasi belum maksimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) yang mencapai 82,34% dari 86,00% yang ditargetkan. Kemudahan iklim investasi dalam suasana pandemi Covid-19 dapat berupa pemberian insentif industri yang terdampak Covid-19, atau dengan insentif investasi berupa pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, atau fasilitasi peminjaman modal.

Ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dan jumlah pengangguran dari tahun ke tahun. Salah satu penyebabnya adalah terdapat tenaga kerja yang berasal dari luar Batam tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Para tenaga kerja yang mendapatkan peningkatan keterampilan yang berbasis kinerja dan kewirausahaan masih sebesar 40,53% dari target 43,00%. Selain itu, belum optimalnya ketersediaan anggaran pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan produktivitas yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Para tenaga kerja memerlukan sertifikat kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing pekerja. Hal ini harus didukung oleh peran Balai Latihan Kerja (BLK). Namun saat ini dukungan BLK belum optimal karena pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja serta terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

Perlindungan sumber daya tenaga kerja daerah harus menjadi perhatian terkait permasalahan keselamatan dan perlindungan pekerja yang disebabkan perselisihan dan PHK karena hubungan industrial. Hal ini termasuk fasilitasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkeadilan serta memperhatikan kondisi Sistem



Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang belum maksimal atau sebesar 2,74%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hal yang harus diperhatikan dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan PAD pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Kondisi ini akan berimbas pada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain akibat dari pandemi Covid 19, kondisi ini memerlukan optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan retribusi serta Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Selain itu, terdapat belum optimalnya inovasi pelayanan pengurusan dan pembayaran pajak berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran melalui e- Samsat yakni terealisasi sebesar 3% dari target 20% pada tahun 2019

Kepulauan Riau mempunyai objek dan daya tarik wisata yang beragam berupa alam, manusia, dan kebudayaannya. Pariwisata juga merupakan kegiatan yang strategis jika ditinjau dari segi pengembangan ekonomi dan sosial budaya karena kepariwisataan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kualitas masyarakat dan dapat menambah rasa cinta tanah air terhadap nilai-nilai budaya bangsa sekaligus sebagai instrumen untuk melestarikan lingkungan.

Kinerja sektor pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun adalah relatif baik. Namun adanya pandemi Covid 19 menyebabkan penurunan jumlah wisatawan khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini merupakan tantangan untuk pengembangan wisata yang ramah kesehatan sebagai implikasi dari masa pandemi Covid 19. Oleh karena itu, perlu dikembangkan destinasi obyek wisata baru untuk menarik minat wisatawan. Obyek wisata tersebut antara lain berupa wisata budaya (sejarah), religi, alam, bahari, kuliner, geopark dan lainnya.



Pengembangan destinasi obyek wisata memerlukan dukungan dari wisata-wisata unggulan kabupaten dan kota atau sebaliknya wisata-wisata unggulan kabupaten dan kota tersebut memerlukan dukungan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut dapat berupa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, insentif bagi pelaku industri pariwisata sekaligus peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, kerjasama dan koordinasi stakeholder dalam penyiapan sarana dan prasarana pendukung daerah pariwisata sangat diperlukan, seperti penginapan dan sarana transportasi.

Kunjungan wisata di Provinsi Kepulauan Riau ternyata tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi kreatif, sebagaimana industri nasional. Peran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan untuk pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata. Selain itu, perlunya fasilitasi untuk pelaku ekonomi kreatif untuk bekerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi.

Pada sisi lain, pelaku ekonomi kreatif yang berskala kecil (UMKM) memerlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan fasilitasi dan pendampingan kepada 1.000 pelaku ekonomi kreatif pertahun. Sekaligus perlunya perlindungan hukum terhadap industri kreatif dimaksud.

Sektor pertanian memiliki peranan penting di Provinsi Kepulauan Riau. Namun pada tahun 2019-2020, Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -4,39. Penurunan kondisi pertanian yang didukung oleh tanaman pangan dan hortikultura harus segera diantisipasi. Penyebabnya antara lain adalah belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan agar produk hortikultura tersebut bertahan lama. Selain itu, keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan harus melibatkan kearifan lokal serta



memperhatikan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor. Ketersediaan obat-obatan hewan juga merupakan hal yang harus diatasi agar Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yaitu 0,04% mencapai target 0,03%.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sangat diperlukan untuk penguatan sektor pertanian. Dukungan tersebut antara peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan; pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan; serta peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan berlanjut terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ketahanan pangan pada tahun 2020 adalah dalam kondisi baik dengan ditunjukkan Skor PPH sebesar 90,7 yang mendekati Skor PPH Nasional sebesar 90,8. Namun, ketahanan pangan ini sangat dipengaruhi oleh produksi dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan produksi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum mencukupi untuk kebutuhan pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu diwujudkan swasembada pangan daerah dengan memperhatikan kondisi lahan tanaman pangan yang memiliki target sebesar 300 ha. Selain itu, diperlukan peningkatan pada Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat yang tercapai sebesar 57,31% pada tahun 2019.

4.1.2 Bidang Kemaritiman dan Lingkungan Hidup

Sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor yang penting untuk penyedia pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja sektor perikanan dan kelautan. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi ruang laut yang memerlukan pembenahan pada infrastruktur, sarana dan prasarana bidang kelautan dan perikanan (tangkap dan budidaya) serta dukungan aspek permodalan maupun pemasaran agar



kesejahteraan nelayan dapat maksimal. Industri yang dapat mendukung perikanan dan kelautan adalah industri pengolahan rumput laut maupun pengolahan ikan yang memerlukan data oseanografi akurat, karena menyangkut estimasi peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan

Selain hal tersebut di atas adalah perlunya peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat yang masih rendah. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah pencegahan adanya *Illegal fishing*, *unregulated fishing* dan *unreported fishing* selain adanya alih fungsi hutan mangrove.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, saat ini Provinsi Kepulauan Riau juga menghadapi masalah turunnya kualitas lingkungan hidup. Kontributor terbesar bersumber dari merosotnya kualitas air, namun indeks tutupan lahan dan kualitas udara menunjukkan peningkatan. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyak kapal, ataupun pribadi. Pemahaman terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah limbah dari fasilitas layanan kesehatan. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah yang semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Bencana yang terjadi seringkali menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau memiliki kawasan rawan bencana yang cukup banyak, mulai dari tanah longsor, ancaman gelombang pasang dan abrasi serta banjir. Termasuk di dalamnya adalah kekeringan pada air terjun Temburung.

Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota dan keserasian dengan wilayah di sekitarnya. Namun, kualitas lingkungan hidup semakin berkurang dengan berkurangnya



kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH). Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi daerah sebagai implementasi kebijakan tata ruang dan sebagai perangkat operasional RTRW.

Permasalahan pembangunan pada sektor kehutanan adalah perlunya optimalisasi dan koordinasi tentang peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Pada sisi ekonomi, terdapat ketidakselarasan iklim investasi dengan lokasi investasi yang masih berstatus kawasan hutan dan ketidakselarasan pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial dan sarana prasana pemerintahan pada areal yang masih berstatus kawasan hutan.

Selain itu, tumpang tindih kawasan hutan dengan pihak ketiga yang menyebabkan perselisihan atau pertentangan klaim penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penggunaan kawasan. Hal ini akan membuat gejolak masyarakat terkait lahan milik masyarakat yang masih berstatus kawasan hutan.

4.1.3 Bidang Sosial

Kemiskinan menjadi salah satu perhatian di bidang sosial. Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan untuk tahun 2020 jika dibanding tahun 2019. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 128.462 sedang pada tahun 2020 sebanyak 142.610. Selain itu, persentase penduduk miskin meningkat dari 5,9% pada tahun 2019 menjadi 5,92% di tahun 2020.

Penanganan Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari tahun ke tahun telah membaik namun belum maksimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP hanya sebesar 1,05% dari target 1,38% pada tahun 2020. Selain itu keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya sebesar 0,47% pada tahun 2020. Sedangkan Keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 53,97% pada tahun 2020. Selain itu, terdapat belum



optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial, belum optimalnya penanganan kepada Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan belum optimalnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepri belum memiliki UPTD panti sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah, sementara anggaran tersedia tidak cukup untuk membantu PPKS yang direhabilitasi di 56 panti swasta.

Selain itu, terdapat permasalahan belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang hanya berjumlah 1 unit dan belum optimalnya korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang hanya sebesar 25,00% pada tahun 2020.

4.1.4 Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perkembangan suatu daerah dapat diukur dari perkembangan sumber daya manusia (SDM), karena SDM adalah modal utama dalam pembangunan. Pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pembangunan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Untuk mencapai kualitas hidup manusia yang baik memerlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas-sektor, serta kapasitas untuk melaksanakannya. Kualitas hidup manusia perlu



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan daya saing yang tinggi yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report (HDR)*. IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Setiap dimensi diwakili oleh indikator—dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Sementara, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir.

Rata-rata IPM dalam lima tahun terakhir yang diperoleh/dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, yakni 75,59, lebih tinggi daripada capaian rata-rata IPM secara nasional, yakni 71,94. Artinya, IPM Provinsi Kepulauan Riau lebih baik karena di atas rata-rata capaian IPM secara nasional. Namun masih terdapat kendala dalam pencapaian APM dimana angka Anak Tidak Sekolah masih cukup tinggi yaitu 15,38%. Hal ini disebabkan Anak di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), belum dapat mengakses layanan pendidikan formal maupun nonformal karena tantangan geografis dan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, atau karena tidak tersedianya satuan pendidikan atau layanan pendidikan dan pelatihan.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap of expectation* atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya



telah diatasi seoptimalnya. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Aspek penting dalam sumber daya manusia adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Umur Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Umur Harapan Hidup Saat Lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Umur Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dalam semua aspek kesehatan. Angka harapan hidup merupakan standar suatu negara maupun daerah untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

UHH penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 71,06 tahun dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 71,20 tahun. Pada tahun 2018, UHH Provinsi Kepulauan Riau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang diperkirakan anak yang lahir dapat hidup rata-rata sampai usia 69,64 tahun dengan catatan bila diasumsikan bahwa kondisi kesehatan dan kematian yang ada akan berjalan seperti pada saat ini atau tidak berubah. Selanjutnya, UHH Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 tergolong tinggi sebesar 69,96 tahun sementara pada level nasional berada pada 71,47.

Permasalahan utama di sektor kesehatan adalah pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap pandemi Covid-19. Hal ini harus didukung dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang siap dalam menangani berbagai penyakit tersebut.

Selain itu sarana dan prasarana rumah sakit perlu untuk senantiasa ditingkatkan demi menjawab kondisi kebutuhan terhadap fasilitas kesehatan yang juga semakin meningkat. Hal tersebut di antaranya adalah dengan modernisasi



RSUP Ahmad Tabib sehingga menjadi rumah sakit rujukan tertentu, rumah sakit Pendidikan, serta peningkatan pelayanan Rumah Sakit Engku Ahmad Daud Tanjung Uban.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah risiko kematian ibu yang didominasi oleh kematian pada ibu nifas yaitu sebesar 49%. Sementara itu cakupan pelayanan nifas baru mencapai angka 90,74% pada tahun 2020 serta Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani menunjukkan angka yang masih rendah yaitu hanya sebesar 45,32%.

Kesehatan anak juga merupakan hal yang perlu menjadi perhatian karena cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 50,82% pada tahun 2020. Angka ini turun dari awalnya sebesar 69,11% di tahun 2019. Selain itu, belum optimalnya *Universal Child Immunization* (UCI) menjadi permasalahan yang harus diatasi.

Hal-hal lain yang menjadi permasalahan di bidang kesehatan adalah belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular, belum optimalnya penanganan ODGJ, belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi orang dengan kecanduan NAPZA, serta belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS. Pada sisi SPM, belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa merupakan hal yang harus ditangani.

Manusia yang berkualitas yang seharusnya dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas antarindividu karena berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh pendidikan. Selama tahun 2015-2020, rata-rata angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,77. Angka tersebut lebih rendah bila dibanding Rata-Rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 12,83. Data perbandingan ini menunjukkan bahwa angka Harapan Lama Sekolah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

di Provinsi Kepulauan Riau belum bisa dikatakan baik karena masih di bawah rata-rata Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional.

Situasi dan kondisi pendidikan secara umum selama tahun 2015-2020 ditunjukkan tren perkembangan capaian rata-rata APK tingkat Sekolah Menengah Atas atau setaranya di Provinsi Kepulauan Riau yang hanya 96,02 % sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan khusus baru sebesar 82,49 %. Situasi dan kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak usia sekolah tidak bisa mengakses atau bersekolah di jenjang Sekolah Menengah Atas atau setaranya.

Permasalahan di bidang pendidikan lainnya adalah rendahnya sinkronisasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja karena *skill* yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan sesuai dengan potensi daerah. Lulusan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan banyak yang tidak dapat langsung memasuki dunia kerja karena *skill* yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK yang diterima di industri hanya sebesar 60,1% pada tahun 2020. Permasalahan ini disebabkan oleh program keahlian yang diselenggarakan di SMK saat ini belum semuanya sesuai dengan kebutuhan Dunia Usaha / Dunia Industri (DU/DI).

Selain itu terdapat kesenjangan mutu dan kualitas pendidikan yang dapat dilihat dari masih rendahnya SMA/SMK/SLB yang memiliki akreditasi B yang hanya sebesar 62,50% dari seluruh SMA/SMK/SLB yang ada. Pada sisi lain sarana dan prasarana pendidikan yang berupa ketersediaan ruang kelas, perpustakaan, musala, fasilitas olahraga, jaringan internet, dan fasilitas ekstrakurikuler di sekolah belum optimal. Kualitas para guru di Provinsi Kepulauan Riau juga perlu diperhatikan khususnya persentase guru yang memiliki sertifikasi dan kompetensi.

Kualitas SDM tidak dapat dipisahkan dengan kualitas pemuda. Kualitas pemuda harus mendapatkan perhatian karena terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut adalah rentannya pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA. Selain itu, kurang maksimalnya sarana dan prasarana mengakibatkan



kurang maksimalnya peningkatan bakat dan minat masyarakat dalam pengembangan kemampuan berolahraga sehingga berakibat terhadap minimnya prestasi olahraga.

Kesempatan dan perlakuan setara dalam bagi perempuan sangat penting untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan SDM. Kemiskinan, isolasi geografis, status minoritas, kecacatan, pernikahan dini dan kehamilan, kekerasan berbasis gender, dan kepercayaan tradisional tentang status dan peran perempuan merupakan beberapa hambatan yang menghalangi hak perempuan dan anak perempuan untuk menjalankan hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam segala bidang. Salah satu hal yang memengaruhi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan adalah pemberdayaan perempuan yang rendah. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Pemberdayaan gender di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, data IDG tahun 2018 turun sebesar 0,78 poin dibanding tahun 2017. Bahkan data terbaru tahun 2019 IDG menunjukkan angka 62,03% atau turun dari 66,18% tahun 2018.

Permasalahan di lingkup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal yang dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK). TPAK perempuan hanya sebesar 48,93% pada tahun 2020. Selain itu, masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2020 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO mencapai angka 33,42%. Perlindungan terhadap anak tetap dilaksanakan karena kekerasan terhadap anak masih terjadi.

4.1.5 Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat direpresentasikan dengan gambaran capaian kinerja reformasi birokrasi di



lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2019 cenderung menunjukkan peningkatan, walaupun nilainya pada tahun 2019 masih tetap rendah yaitu 67,98. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal.

Akuntabilitas kinerja pemerintah dapat direpresentasikan dengan hasil evaluasi SAKIP. Berdasarkan penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP yang diperoleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2016-2019 menunjukkan hal yang positif. Pada tahun 2019 nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh 75,28 dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah sudah berjalan dengan baik namun belum optimal.

Pengelolaan keuangan Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan kondisi baik yang ditunjukkan dengan opini BPK WTP dari tahun 2017-2019. Namun masih terdapat permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Pada sisi perencanaan, perlu ditingkatkan usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir. Dari sisi pengawasan, kualitas pengawasan yang belum optimal. Peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Kepulauan Riau juga masih belum optimal.

Tata Kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh kinerja ASN yang baik. Namun manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, harus didukung dengan penempatan dan penataan ASN secara transparan, jaminan pengembangan karir bagi ASN, adanya *Assesment Center*, fasilitasi pendidikan bagi ASN, serta pengembangan dan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi bagi ASN. Serta diperlukannya sarana dan prasarana pengembangan kepegawaian yang memadai. Pada sisi pelayanan sekretariat, diperlukan optimalisasi pelayanan kepada anggota DPRD dan optimalisasi fungsi-fungsi sekretariat daerah lainnya



Selain itu, meskipun tata kelola pemerintahan relatif baik, terdapat potensi konflik yang ditunjukkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih cukup tinggi yang mana pada tahun 2020 terdapat 235 kasus yang terjadi. Selain itu, kesiapsiagaan terhadap kondisi bencana belum maksimal karena kurangnya data/peta rawan bencana kebakaran dalam menurunkan jumlah potensi kebakaran yang ada.

Tata kelola pemerintahan yang baik juga didukung keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal karena hanya memperoleh nilai sebesar 43,24 dari 65,00 yang ditargetkan serta pemanfaatan aplikasi PPID yang belum optimal. Selain itu sistem manajemen perpustakaan yang belum dikelola secara optimal agar menunjang kemajuan budaya dan peningkatan minat baca. Pada sisi kearsipan, pengelolaannya belum maksimal dengan Nilai Hasil Evaluasi Pengawasan pada tahun 2019 adalah 54,14 atau berkategori “CC”.

4.1.6 Bidang Kebudayaan

Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Permasalahan kebudayaan merupakan bagian integral dari kehidupan yang memimpin kita. Jika pembangunan dapat dilihat sebagai peningkatan standar hidup kita, maka usaha-usaha yang diarahkan untuk pembangunan hampir tidak dapat mengabaikan dunia budaya. Kini, pembangunan berarti kebebasan, melebarnya pilihan, menempatkan manusia—anak-anak, laki-laki dan perempuan pada pusat dari masa depan. Budaya akan



mendorong dimensi ekonomi, dimensi sosial: dimensi lingkungan, dan nilai-nilai penting untuk pembangunan.

Kepulauan Riau menjadi pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Di samping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Untuk memajukan kebudayaan di Kepulauan Riau diperlukan langkah strategis dengan menganalisis permasalahan-permasalahan pada pembangunan kebudayaan. Berdasarkan data yang dirilis BPS (2019), Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kepulauan Riau berada di angka 58,83 atau berada di atas IPK Nasional yang hanya berkisar 53,74. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa dari penilaian 0-100%, IPK Kepulauan Riau sebesar 58,83 persen berarti baru setengah baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan budaya dalam mengembangkan identitas, pengetahuan dan praktik sosial cukup baik, namun kontribusi kebudayaan dalam mendukung pembangunan ekonomi di Kepulauan Riau belum terlalu signifikan. Angka ini masih jauh dibanding daerah lain yang dikenal pula karena kebudayaannya, seperti Yogyakarta (73,79) dan Bali (65,39).

Indeks ini diukur mengacu pada penilaian UNESCO untuk melihat seberapa jauh kontribusi kebudayaan terhadap pembangunan, apakah kebudayaan mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu individu dan masyarakat memperluas pilihan hidup dan bagaimana beradaptasi pada perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau harus lebih serius untuk melakukan pembinaan terhadap potensi budaya karena belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya Melayu di dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan di kebudayaan adalah belum optimalnya kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan



dengan beberapa hal, antara lain peninggalan budaya yang belum dibuat dalam bentuk manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah; sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak/cagar budaya yang belum memadai; dukungan SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya; persentase bangunan berciri khas Melayu yang sebesar 14,32% dari 32,33% yang ditargetkan; serta belum dilaksanakan zonasi situs dan kawasan cagar budaya secara maksimal.

Budaya Melayu yang semakin terkikis oleh perubahan zaman. Hal ini ditunjukkan bahasa daerah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Selain itu, belum optimalnya peran media pendidikan dan museum dalam melestarikan kebudayaan serta optimalisasi Pulau Penyengat dan pendirian Museum Melayu Center sebagai pusat budaya melayu.

4.1.7 Bidang Infrastruktur

Infrastruktur merupakan syarat dasar yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Ketika keadaan infrastruktur di sebuah daerah lemah, itu hanya berarti bahwa perekonomian daerah itu berjalan dengan cara yang tidak efisien. Biaya logistik yang sangat tinggi dan sulitnya penduduk untuk mengakses layanan publik adalah beberapa dampak dari buruknya ketersediaan infrastruktur. Hasil akhirnya kesejahteraan menjadi rendah (tidak tumbuh).

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi makro memiliki hubungan timbal balik. Pembangunan infrastruktur menimbulkan ekspansi ekonomi melalui efek *multiplier*, sementara ekspansi ekonomi menimbulkan kebutuhan untuk memperluas infrastruktur yang ada.

Hingga saat ini kondisi infrastruktur di Kepulauan Riau secara makro sudah cukup baik, namun terdapat permasalahan pada pemerataan infrastruktur yang



tersedia. Ketidakmerataan infrastruktur itu dapat diidentifikasi dari tingginya ketimpangan kesejahteraan antar-kabupaten/kota.

Ketimpangan antarwilayah untuk mengejar perkembangan kebutuhan ekonomi dan sosial berdampak pada kesejahteraan yang rendah. Banyak kajian menyatakan bahwa untuk kasus Indonesia lambatnya pengembangan infrastruktur dihambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur, sementara swasta memiliki keengganan yang tinggi untuk berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.

Jalan dan jembatan merupakan salah satu variabel terpenting bagi arus pembangunan ekonomi, terutama wilayah kepulauan. Secara umum kawasan dengan sektor dominan industri dan perdagangan (Batam, Tanjungpinang, dan Karimun) memiliki infrastruktur (jalan dan jembatan) yang cukup baik. Pada sisi lain kawasan dominan pertambangan pada urutan berikutnya dan kawasan dominan pertanian berada pada urutan terakhir. Saat ini kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Kepulauan Riau belum semuanya dalam kondisi baik dan perlu menjadi prioritas agar konektivitas pembangunan antar pulau dapat terjalin. Padahal infrastruktur jalan dan jembatan tersebut mendukung penguatan sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor lainnya. Pengembangan infrastruktur sering terhambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur. Sebagai daerah berbasis air maka transportasi laut merupakan transportasi utama bagi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, ketersediaan sarana transportasi yang baik merupakan hal yang prioritas.

Selain dari pada itu, Pemenuhan kebutuhan Air baku harus tetap menjadi prioritas pembangunan dan juga perlu koordinasi dengan instansi terkait bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan waduk/embung air serta sistem penyediaan air minum (SPAM) sangat diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan air baku.

Kualitas infrastruktur merupakan hal yang harus diperhatikan. Terkait hal tersebut, tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau



saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan pada hakikatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan perdesaan yang layak huni (livable), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Pembangunan perumahan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, baik dalam jumlah maupun kualitasnya dalam lingkungan yang sehat serta kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa aman, damai tentram dan sejahtera. Penataan ruang di daerah sangat penting untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kota, keserasian dengan wilayah di sekitarnya, dasar perizinan pembangunan, maupun administrasi pertanahan. Hal ini membutuhkan komitmen terhadap tata ruang termasuk tata ruang laut.

Penataan kawasan kumuh dilaksanakan secara berkelanjutan. Prasarana umum di kawasan kumuh memerlukan penataan yang baik, seperti aksesibilitas jalan, drainase lingkungan, air bersih, sanitasi, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau. Hal ini untuk mendukung cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana umum yang memadai.

Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal yang menjadi perhatian adalah sanitasi di kawasan pesisir dan wisata. Sanitasi tersebut harus terintegrasi dengan pengelolaan air limbah dan drainase. Hal-hal tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota.

Bencana yang terjadi seringkali menyebabkan terganggunya kualitas lingkungan hidup. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau memiliki kawasan rawan bencana yang cukup banyak, mulai dari tanah longsor, ancaman gelombang pasang dan abrasi serta banjir. Hal ini juga merupakan penekanan dalam pembangunan infrastruktur.



4.1.8 Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan ke dalam urusan-urusan sebagai berikut:

1) Urusan Pendidikan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pendidikan sebagai berikut:

a. Rendahnya sinkronisasi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja

Lulusan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan banyak yang tidak dapat langsung memasuki dunia kerja karena skill yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lulusan SMK yang diterima di industri hanya sebesar 60,1% pada tahun 2020. Permasalahan ini disebabkan oleh program keahlian yang diselenggarakan di SMK saat ini di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh tiga program keahlian, yaitu: teknik otomotif (masuk dalam kelompok bidang keahlian Teknologi dan Rekayasa), Teknik Informatika dan Komputer (bidang keahlian Teknik Informatika dan Komputer), dan program keahlian yang tergabung dalam kelompok bidang keahlian Bisnis dan Manajemen (seperti: keuangan/akuntansi, manajemen pemasaran, dan administrasi perkantoran). Keberadaan program-program keahlian yang lain secara kuantitas jumlahnya sangat kecil, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan yang besar dalam hal persebaran program keahlian di SMK. Hal ini menyebabkan adanya mis-match antara supply and demand, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun keselarasan antara jumlah lulusan pada bidang keahlian di SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Selain itu, kurangnya komitmen yang baik dari pelaku dunia usaha terhadap lulusan SMK menjadi salah satu faktor masih rendahnya lulusan SMK yang di terima di dunia usaha/industri.

b. Belum optimalnya pendidikan berbasis potensi daerah

Penyelenggaraan pendidikan masih lemah dalam menyesuaikan dengan



potensi daerah, hal ini juga yang mengakibatkan masih rendahnya kesesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja yang menyebabkan daya serap lulusan masih rendah pada dunia usaha dan dunia industri. Penyelenggaraan pendidikan yang belum selaras dengan potensi daerah disebabkan oleh masih belum optimalnya tahap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terhadap identifikasi belajar, identifikasi potensi, perumusan tujuan penentuan bahan pembelajaran, penggalian sumber dana, metode, alat bantu, dan penentuan waktu. Ketersediaan tenaga pengajar khusus yang terkait dengan potensi daerah yang masih terbatas juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya Pendidikan berbasis potensi daerah.

- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB

Masih terdapat beberapa masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum berpartisipasi dalam Pendidikan tingkat SMA/SMK/SLB. Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan menengah sebesar 96,02% pada tahun 2020. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam pendidikan khusus pada tahun 2020 baru sebesar 82,49%.. Apalagi pada masa Pandemi Covid-19, penyelenggaraan pendidikan tidak dapat dilaksanakan seperti pada saat kondisi normal sebelumnya. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan disebabkan karena secara geografis Provinsi Kepulauan Riau adalah wilayah yang didominasi oleh lautan, hal ini tentu saja menjadi permasalahan di dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau karena tidak semua kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau memiliki SMA/SMK/SLB, sehingga menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia Pendidikan. Walaupun di beberapa daerah sudah dibangun asrama, namun masyarakat masih kesulitan dalam biaya asrama tersebut. Kesadaran Masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SMA/SMK juga masih kurang, mereka lebih memilih anaknya bekerja atau melaut untuk yang anak



laki-laki dan berkeluarga untuk anak perempuan.

Pada jenjang Pendidikan khusus, menyekolahkan anak yang memiliki kebutuhan khusus masih menjadi permasalahan sosial di kalangan masyarakat. sebagian masyarakat malu dengan kondisi anaknya apabila terekspos dunia luar. Selain itu, untuk masyarakat yang berada di daerah kepulauan, orang tua merasa kesulitan dalam pengawasan dan biaya untuk menyekolahkan anaknya karena sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya.

d. Masih rendahnya angka harapan lama sekolah

Rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun sudah mencapai 10,12 tahun pada tahun 2020. Angka ini masih di bawah rata-rata lama sekolah Nasional yaitu 11,37 pada tahun 2020. Sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah menunjukkan angka sebesar 12,97 pada tahun 2020. Angka tersebut sedikit lebih rendah bila dibanding Angka Harapan Lama Sekolah secara nasional, yakni 12,98 pada tahun 2020. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh geografis di Provinsi Kepulauan Riau dimana beberapa kabupaten/kota merupakan daerah kepulauan. Selain itu, capaian angka harapan sekolah ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak sampai jenjang pendidikan tinggi masih rendah, daya tampung sekolah yang masih kurang dan belum merata di seluruh wilayah kepulauan, serta biaya sekolah yang tinggi pada wilayah pulau terpencil terutama untuk sekolah kejuruan, masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk praktek lapangan.

e. Adanya kesenjangan mutu dan kualitas pendidikan

Kesenjangan Pendidikan masih terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini dapat dilihat dari masih rendahnya SMA/SMK/SLB yang memiliki akreditasi B yang baru sebesar 87,23% pada tahun 2020 dari seluruh SMA/SMK/SLB yang ada. Kondisi ini akan mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan Pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Kesenjangan pendidikan ini disebabkan karena sekolah belum bisa memenuhi standar



yang menjadi syarat dari Akreditasi sekolah. Dengan kata lain masih banyak sekolah yang belum memenuhi syarat Standar Nasional Pendidikan (SNP), terutama masalah sarana-prasarana sekolah dan masalah tenaga kependidikan yang belum memenuhi standar penilaian khususnya bagi sekolah-sekolah yang baru di bangun 3 tahun terakhir.

f. Masih rendahnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Kualitas para guru di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah yaitu pada tahun 2020 hanya sebesar 39,09% guru SMA/SMK/SLB yang sudah tersertifikasi. Selain itu kompetensi tenaga kependidikan pada tahun 2020 hanya sebesar 65,54%. Kompetensi pendidik juga dipengaruhi oleh banyaknya pendidik yang memiliki rangkap tugas di sekolah. Jumlah guru yang tersertifikasi dan kurangnya kompetensi tenaga kependidikan ini disebabkan karena tahun 2020 merupakan masa Pandemi Covid 19 dimana anggaran yang ada pada Dinas Pendidikan mengalami refocusing anggaran. Pada tahun 2020 Dinas Pendidikan telah mengganggu kegiatan-kegiatan terkait peningkatan kompetensi untuk pendidik dan tenaga pendidik akan tetapi kegiatan-kegiatan tersebut tidak dapat di jalankan. Terbatasnya alokasi sertifikasi guru SMA/SMK/SLB dari pusat juga menjadi salah satu kendala yang menyebabkan masih rendahnya guru yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk terus meningkatkan kompetensinya baik melalui sertifikasi maupun melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi.

2) Urusan Kesehatan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kesehatan sebagai berikut:

a. Pandemi Covid-19 belum selesai



Pandemi Covid-19 diperkirakan dapat teratasi dengan baik pada tahun 2022. Kondisi ini menjadi angin segar bagi tumbuh kembangnya kegiatan masyarakat dalam kondisi yang normal. Di sisi lain, belum ada kepastian pada tahun tersebut semuanya akan dapat teratasi dengan baik. Sehingga perlu terus dilakukan penanganan yang serius dan terukur terhadap Pandemi Covid-19. Penyebab kondisi pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan sehingga masih terus meningkatkan jumlah positif Covid-19. Selain itu, belum terbentuknya herd immunity atas penularan COVID-19 di masyarakat. Merujuk pada rekomendasi World Health Organization (WHO) dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity) dapat tercapai melalui pelaksanaan vaksinasi dengan pemenuhan sasaran minimal 70% dari keseluruhan penduduk.

- b. Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan

Rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 hanya sebesar 0,38. Angka ini masih di bawah rasio dokter per satuan penduduk tingkat Nasional yaitu sebesar 0,4. Selain itu, Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah 0,67. Dengan kata lain, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 67 tenaga medis untuk melayani 100.000 penduduk. Rasio tenaga medis ini dari tahun 2019 sebesar 0,88 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga Kesehatan.

Dewasa ini semakin beragam jenis penyakit yang muncul dan menginfeksi manusia. Misalnya Covid-19 yang mengakibatkan Pandemi hingga melumpuhkan roda-roda kehidupan manusia. Oleh karena itu diperlukan sikap tanggap terhadap perubahan tersebut dengan menyediakan SDM



medis dan tenaga kesehatan yang siap dalam menangani berbagai penyakit tersebut. Perlunya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan disebabkan karena tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melakukan penanganan berbagai kasus Kesehatan termasuk pandemi dari sebuah virus.

Kejadian pandemik COVID-19 membutuhkan peran serta dari semua pihak untuk turut berkontribusi dalam penanganannya. Keberadaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting dan menentukan keberhasilan upaya tersebut. Peran dan kerja nyata tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi sebagai garda terdepan dalam upaya penanganan COVID-19 sangat krusial dan dibutuhkan untuk mempercepat penanganan pandemik ini. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah bersinergi dalam upaya penanganan COVID-19 dengan mengoptimalkan sistem pelayanan kesehatan agar dapat menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki termasuk tenaga kesehatan secara terarah, terpadu dan efektif, untuk menangani berbagai kasus COVID-19.

Tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Dalam memutus mata rantai penularan COVID-19, tenaga kesehatan tersebut sangat berisiko terpapar COVID-19, sehingga perlu apresiasi dan diberikan penghargaan dari Pemerintah yang bersifat finansial maupun non-finansial. Penghargaan bersifat finansial yang diberikan berupa insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada risiko keterpaparan dan beban kerja, serta santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang meninggal dikarenakan terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap tenaga kesehatan guna memenuhi asas



keadilan. Diharapkan dengan pemberian insentif dan santunan kematian dapat meningkatkan semangat dan etos kerja tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik guna mempercepat penanganan pandemik COVID-19.

c. Beberapa sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan

Sarana dan prasarana rumah sakit perlu ditingkatkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 2 rumah sakit yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau yaitu RSUD Raja Ahmad Tabib dan RSUD Engku Haji Daud. RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) merupakan rumah sakit rujukan provinsi, yang akan ditingkatkan menjadi rumah sakit Pendidikan dan akan dilakukan pengembangan jejaring layanan jantung di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memenuhi kriteria tersebut, dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah yang memiliki sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab). Untuk saat ini, RSUD RAT belum memiliki SDM tersebut. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dengan sertifikasi Catheterization Laboratory (Cath Lab) dengan status ASN tetap.

Sedangkan RSUD Engku Haji Daud akan ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional oleh Kementerian Kesehatan RI dengan rencana pengembangan sebagai RS jiwa. Saat ini RSUD Engku Haji Daud membutuhkan lahan seluas 7,5 ha untuk pengembangan layanan jiwa tersebut. Saat ini SDM khususnya di pelayanan jiwa RSUD Engku Haji Daud, dokter spesialis jiwa berjumlah 2 orang dengan status kepegawaianya pegawai kontrak. Sehingga dibutuhkan dokter spesialis jiwa dengan status ASN tetap.

d. Risiko kematian ibu yang masih mengintai

Kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh kematian pada ibu nifas yaitu sebesar 49% pada tahun 2020. Sementara itu cakupan



pelayanan nifas baru mencapai angka 90,74% pada tahun 2020. Kondisi ini diperparah dengan masih adanya persalinan yang dilakukan di lokasi non-fasilitas kesehatan (faskes). Hal ini dapat dilihat dari cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai angka 91,94% pada tahun 2020.

Kematian ibu nifas bisa terjadi dikarenakan deteksi risiko tinggi pada kehamilan dan pemeriksaan kesehatan ibu secara menyeluruh belum dilaksanakan secara optimal sehingga kemungkinan keterlambatan penanganan menjadi lebih besar, adanya persalinan yang tidak terpantau oleh bidan desa/ puskesmas karena dilakukan di RS dan lemahnya kinerja bidan desa sehingga bidan desa tidak mengetahui informasi dan belum sempat melaksanakan pemantauan melalui kunjungan rumah pada saat komplikasi ibu nifas terjadi. Cakupan pelayanan nifas masih belum optimal dikarenakan kinerja bidan desa yang masih lemah dalam memantau wilayahnya sehingga terkadang tidak mengetahui jika ada ibu nifas yang sudah melahirkan di RS yang perlu dipantau kondisinya melalui kunjungan rumah, pencatatan dan pelaporan masih belum optimal khususnya di daerah perkotaan yang memiliki banyak RS dan klinik, adanya kekhawatiran ibu nifas dan keluarga untuk melakukan kunjungan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

e. Masih rendahnya cakupan Neonatus

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi di Provinsi Kepulauan Riau yang ditangani menunjukkan angka yang masih rendah yaitu hanya sebesar 32,3% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pencatatan dan pelaporan masih belum optimal khususnya di daerah perkotaan yang memiliki banyak RS dan klinik sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pencatatan dan pelaporan.

f. Belum optimalnya pelayanan kesehatan anak balita



Cakupan pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan angka yang masih rendah yaitu sebesar 50,82% pada tahun 2020. Angka ini turun dari awalnya sebesar 69,11% di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran ibu mengenai pentingnya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya partisipasi ibu untuk mengikuti kelas ibu balita, kesibukan orangtua terutama ibu pekerja, dan mayoritas balita yang sudah mulai bersekolah (PAUD). Selain itu, kondisi ini diperparah dengan adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan posyandu tidak beroperasi selama beberapa bulan dan kegiatan sweeping tidak dilaksanakan khususnya di daerah zona merah.

- g. Belum optimalnya penanganan terhadap penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Berbagai penyakit utama baik yang menular maupun tidak menular masih perlu dioptimalkan dalam penanganannya. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA pada tahun 2020 menurun menjadi 48,87% dari yang awalnya sebesar 68,64% pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan selama pandemi Covid-19 pihak kantor pos yang mengantarkan sampel ke laboratorium TCM tidak mau mengantarkan sampel karena adanya ketakutan tertular Covid-19, masyarakat yang ada keluhan batuk atau terduga TBC selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, petugas puskesmas dan kader TB tidak melakukan kegiatan investigasi kontak karena takut tertular Covid-19, serta pengelola program tidak melakukan kegiatan penyisiran kasus TB di RS selama masa pandemi Covid-19.

Di sisi lain penemuan pneumonia mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 67,12% pada tahun 2020 dari awalnya sebesar 36,3% pada tahun 2019. Hal ini karena selama pandemi Covid 19 para petugas di layanan lebih difokuskan pada penanganan kasus Covid 19 dan dengan keluhan serta



gejala yang sama sehingga semua pasien yang memiliki gejala pneumonia segera dilakukan tatalaksana COVID 19. Walaupun demikian, data untuk kasus Covid 19 dan data Pneumonia sangat jauh berbeda. Hal ini dikarenakan untuk penemuan kasus dengan gejala pneumonia sebelum ditegakkan diagnosa COVID 19, tidak dimasukkan ke dalam data Pneumonia. Penanganan terhadap kasus diare juga masih rendah yaitu hanya sebesar 42,4% pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan selama pandemi Covid-19 masyarakat yang ada keluhan infeksi saluran pencernaan atau diare selama pandemi Covid-19 tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan karena takut terindikasi dan tertular Covid-19, tidak semua petugas puskesmas sudah terlatih dalam tatalaksana penanganan diare; serta pengelola program tidak melakukan kegiatan investigasi kasus diare di masyarakat selama masa pandemi Covid-19.

Penangan terhadap penderita ODHA di Provinsi Kepulauan Riau juga belum maksimal, terbukti dari penemuan kasus HIV AIDS baru yang menurun drastis. Pada tahun 2019 penemuan Kasus HIV baru mencapai angka 883, di Tahun 2020 penemuan kasus baru hanya mencapai angka 563. Hal ini dikarenakan masyarakat enggan mengunjungi fasilitas kesehatan akibat pandemi yang terjadi.

h. Belum optimalnya Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2020 turun menjadi 82,10% dari sebelumnya ditahun 2019 mencapai 85,37%. Hal disebabkan karena selama kondisi pandemi Covid-19 sebagian besar posyandu (luar gedung) tidak berjalan. Selain itu, kondisi ini juga disebabkan oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas selama pandemic Covid 19.

i. Belum optimalnya penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Capaian ODGJ berat yang mendapatkan layanan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 81,76% melebihi target Rencana Strategis (Renstra)



Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar 45%, akan tetapi masih ada kendala dan hambatan dalam pelayanan pada ODGJ, terutama pada ketersediaan obat-obatan khusus gangguan jiwa di puskesmas. Hal ini dikarenakan obat dimaksud belum masuk ke dalam program obat dari Kemenkes, sehingga penyediaannya hanya berupa *buffer stock* yang disediakan oleh Direktorat Obat Publik Kemenkes. Selain itu tidak tersedianya anggaran pada APBD di daerah untuk pengadaan obat-obat tersebut, hanya mengharapkan bantuan dari Obat Publik Kemenkes. Belum adanya RS Jiwa juga menyebabkan pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ jadi terhambat. Pasien ODGJ harus dirujuk ke RS Jiwa Pekanbaru yang membutuhkan tambahan biaya baik bagi pasien ODGJ maupun bagi keluarga yang mendampingi.

- j. Belum optimalnya Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS

Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 masih sebesar 89,65%. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya data yang valid terkait penerimaan JKN karena belum tersedianya data penduduk yang valid (NIK invalid).

- k. Penanganan limbah medis

Limbah medis yang dihasilkan perlu dilakukan pengelolaan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau ke beberapa fasilitas layanan Kesehatan (fasyankes) yang ada di tujuh Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau, pengelolaan limbah medis yang dilaksanakan saat ini belum sesuai dengan standar yang ada dalam aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran untuk pengelolaan limbah medis yang ada di fasyankes, waktu penyimpanan limbah melebihi aturan yang berlaku, masih ada limbah yang disimpan



dalam waktu yang lama di fasyankes, belum tersedia sarana/prasarana serta SDM yang menunjang pengelolaan limbah medis fasyankes sesuai peraturan yang berlaku, belum semua puskesmas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang berizin, belum semua puskesmas yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Incenerator yang dimiliki Rumah Sakit belum memiliki izin operasional, tingginya biaya pengolahan limbah dengan pihak ketiga, belum tersedianya kendaraan pengangkut khusus untuk limbah di wilayah kepulauan, serta belum ada pihak ketiga yang berizin yang mau mengangkut limbah yang ada di Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut:

a. Belum Optimalnya Penyediaan Air Baku

Masih terjadinya krisis air baku yakni jumlah air baku yang tersedia tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum curah lintas kabupaten baru tercapai 41,34% dari target 96,79% pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 baru terealisasi sebesar 92,68%. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kualitas dan kuantitas air baku yang memadai, serta pengembangannya masih dalam skala kecil. Penanganan air minum juga perlu koordinasi antara instansi terkait Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Perlunya Pembangunan Waduk/Embung Air

Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung baru sangat diperlukan karena kondisi waduk/embung eksisting belum mampu penampung kebutuhan pemenuhan air baku bagi masyarakat dan dunia usaha. Bintan dan Tanjungpinang sangat rentan terhadap banjir saat musim



hujan sedangkan saat musim panas sangat rentan dengan kekeringan. Saat ini juga penyediaan air irigasi untuk pertanian belum maksimal. Penambahan tampungan air berupa Pembangunan Waduk/Embung diperlukan karena dapat menjadi salah satu sumber/penyedia air baku dan didukung dengan data Kapasitas Debit/Volume Waduk/Empung Air yang tersedia.

c. Perlunya Optimalisasi Sanitasi yang Layak

Sanitasi yang layak dan aman sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini kondisi sanitasi masih sangat terbatas. Pada daerah ibukota, desa wisata, serta daerah pesisir, masalah sanitasi perlu menjadi perhatian. Data yang terintegrasi terkait sanitasi kabupaten/kota juga belum ada. Kondisi sanitasi yang terbatas disebabkan karena infrastruktur pendukung yang ada tidak selaras dengan pertumbuhan penduduk yang ada.

d. Perlunya Komitmen Terhadap Tata Ruang

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan merupakan salah satu hal krusial yang perlu ditangani di Indonesia. Perencanaan Tata Ruang yang tepat dalam rangka pencapaian tujuan secara ekonomi, sosial dan lingkungan sangat diperlukan. Penyusunan regulasi terkait Perda membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan juga melibatkan banyak pihak. Perencanaan Tata Ruang yang tepat diperlukan karena dokumen perencanaan merupakan salah satu acuan dalam pembangunan kedepan.

e. Perlu Peningkatan Infrastruktur Konektivitas antar pulau

Saat ini kondisi pembangunan di perkotaan dan perdesaan dimana terjadi ketimpangan yang sangat besar, kondisi infrastruktur merupakan salah satu komponen yang dapat dilihat. Pembangunan ekonomi selalu dipusatkan di daerah perkotaan yang lebih maju dan lebih siap infrastrukturnya daripada daerah perdesaan. Kondisi ini dapat diamati di provinsi Kepulauan Riau, Terciptanya konektivitas atau keterhubungan antar wilayah diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu negara.



Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi pada daerah yang dianggap terbelakang. Dengan konsep perspektif regional ini maka pembangunan antar wilayah tidak lagi berdiri sendiri namun ada konektivitas diantaranya. Konektivitas tersebut diwujudkan dalam ketersediaan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah satu dengan yang lain dan meminimalisir adanya kesenjangan antar wilayah. Pembangunan ini akan meningkatkan dan meratakan pembangunan, minimal pembangunan secara ekonomi, dan memangkas angka kemiskinan.

f. **Perlunya Peningkatan Kompetensi Tenaga Konstruksi**

Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kurang. Selain itu, penyedia jasa penyelenggaraan konstruksi dan pengembangan jasa konstruksi bagi pengguna jasa juga belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena minimnya anggaran APBD dalam menyelenggarakan sertifikasi tenaga Ahli Konstruksi dan akibat kebijakan Peraturan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berubah-ubah dari Kementerian terkait.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagai berikut:

a. **Penanganan Bangunan Pasca Bencana Masih Belum Optimal**

Diperlukan peningkatan bagi Desa/Kelurahan Tangguh bencana. Selain itu, personil yang siap siaga dalam penugasan pendataan dan penyediaan perumahan pasca bencana masih terbatas. Hal ini disebabkan karena belum terbentuknya tim pencari data dan penyediaan perumahan pasca bencana serta minimnya dana untuk sosialisasi tanggap bencana.

b. **Belum Optimalnya Prasarana, Sarana dan Utilitas untuk Mendukung Lingkungan yang Sehat**



Cakupan lingkungan yang sehat dan aman masih memerlukan dukungan peningkatan infrastruktur sehingga cita-cita mewujudkan masyarakat yang makmur akan tercapai. Hal ini disebabkan pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau, maka kebutuhan akan rumah semakin meningkat. Perumahan yang dibangun baik individu atau yang dikembangkan oleh swasta perlu dukungan peningkatan sarana dan prasarana.

c. **Belum Optimalnya Penanganan Permukiman Kumuh dan Permukiman Tidak Layak Huni**

Perlu dilakukan revitalisasi Kawasan kumuh dan permukiman tidak layak huni. Pada tahun 2020 persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 13%, persentase lingkungan kumuh sebesar 0,05%. Selanjutnya rasio rumah layak huni sebesar 47,25% dan rasio permukiman layak huni sebesar 97% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai terutama dalam penyediaan air bersih serta sanitasi yang layak. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui program penanganan kumuh dan rumah tidak layak huni.

5) Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah potensi konflik yang tinggi dalam penegakan Perda. Penegakan Perda sering kali mendapat berbagai hambatan, terutama dari masyarakat. Kecenderungan masyarakat yang antipati dalam upaya penegakan perda disebabkan karena penegakan perda yang tidak sesuai dengan harapan dan kepentingan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena penegakan perda yang tidak didukung dengan penyebaran informasi yang memadai ke masyarakat. Selain itu, dukungan terhadap kuantitas dan kualitas SDM yang masih kurang memadai. Selain itu, permasalahan lainnya adalah Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu (PILKADA,



PILEG, PILPRES) adalah sebesar 75.40%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik di masyarakat.

Selain permasalahan di atas, status pandemi COVID-19 sebagai status bencana nasional dan daerah menunjukkan perlunya kesiapsiagaan terhadap kondisi bencana, termasuk bencana Epidemi dan Wabah Penyakit. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya pencegahan, mitigasi dan penanganan bencana terhadap bencana Epidemi dan Wabah Penyakit dan potensi bencana yang lainnya.

6) Urusan Sosial

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial

Upaya untuk mengoptimalkan pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi kepada lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial masih rendah. Pada tahun 2020 hanya sebesar 51,89% lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. Hal tersebut di atas disebabkan oleh refocusing anggaran tahun 2020 sehingga anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi target RPJMD. Target RPJMD sampai tahun 2020 sebanyak 121 lembaga, sedangkan anggaran yg tersedia hanya cukup untuk 96 lembaga.

- b. Belum optimalnya penanganan kepada Pemerlu Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Penanganan terhadap PPKS di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah. Penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis Lembaga hanya sebesar 27,04% dari target 28,72% pada tahun 2020. PPKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga hanya sebesar 0,61% pada tahun 2020. Masyarakat lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga hanya



sebesar 8,05% dari target 9,91% pada tahun 2020. Sedangkan pemberian pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga kepada para tuna sosial yakni hanya teralisasi 1,69% dari target 1,96% pada tahun 2020. Rendahnya penanganan PPKS juga disebabkan oleh pendataan PPKS yang belum akurat. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau memiliki 6 Pekerja Sosial, terdiri dari 3 peksos tersertifikasi dan 3 peksos belum tersertifikasi. Namun, ketiadaan UPTD panti mengakibatkan peksos belum dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

- c. Belum optimalnya penanganan kepada keluarga miskin dan keluarga rentan miskin

Penanganan dan pembinaan keluarga miskin dan rentan miskin di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme UEP hanya sebesar 1,05% dari target 1,38% pada tahun 2020. Selain itu keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE) hanya sebesar 0,47% pada tahun 2020. Sedangkan Keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya hanya sebesar 53,97% pada tahun 2020. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan bantuan yang diberikan selama ini lebih menitikberatkan pada bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bukan pada bantuan yang bersifat pemberdayaan seperti UEP dan KUBE. Berdasarkan *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin*, verifikasi dan validasi (verivali) DTKS merupakan tanggung jawab Menteri Sosial. Selanjutnya, menurut *Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DTKS*, struktur organisasi pelaksana berada di kab/kota, sedangkan provinsi bertugas memfasilitasi koordinasi perencanaan bersama Kabupaten/Kota.

- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



Sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tersedia di Provinsi Kepulauan Riau masih kurang yaitu hanya berjumlah 1 unit, padahal target penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu sebanyak 3 unit. Hal tersebut di atas disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membangun UPTD Panti milik Pemerintah dan upaya Pengalihan P3D Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kota Batam dan Rumah Bahagia Kabupaten Bintan belum dapat dilaksanakan. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Provinsi Kepri belum memiliki UPTD panti sosial. Oleh karena itu, agar Pemerintah Provinsi Kepri tetap menjalankan kewenangan rehabilitasi sosial di dalam panti dan tetap memenuhi target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, selama ini pelaksanaan rehabilitasi sosial hanya dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan kepada PPKS di dalam panti swasta, bantuan operasional bagi panti swasta, dan perujukan PPKS ke UPTD panti sosial luar daerah.

- e. Belum optimalnya korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar yang hanya sebesar 25,00% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena lemahnya perhitungan kaji cepat yang dilakukan oleh relawan penanggulangan bencana baik provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga laporan yang didapat belum didukung data yang valid terhadap jumlah kerugian dari dampak bencana tersebut. Lemahnya perhitungan kaji cepat karena belum adanya pelatihan perhitungan kaji cepat di BPBD Provinsi Kepulauan Riau.

7) Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan tenaga kerja sebagai berikut:

- a. Diperlukan fasilitasi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkeadilan secara berkala

Hal ini disebabkan karena kebijakan terkait UMP menjadi salah satu alat



yang berfungsi untuk melindungi pekerja maupun pengusaha. Penetapan upah minimum oleh gubernur dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi

- b. Diperlukan perlindungan sumber daya tenaga kerja daerah.

Hal ini disebabkan adanya permasalahan keselamatan dan perlindungan pekerja yang disebabkan perselisihan dan PHK karena hubungan industrial. Perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap diperlukan meskipun telah terjadi penurunan untuk kasus hubungan industrial pada tahun 2020.

- c. Diperlukan peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis dunia kerja.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja berbasis dunia kerja sekaligus sertifikasi tenaga kerja minimal minimal 5.000 tenaga kerja per tahun dapat dilakukan karena besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan yaitu hanya sebesar 40,53% dari target 43,00% pada tahun 2019. Selain, terdapat tenaga kerja yang berasal dari luar Batam tetapi tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan industri. Faktor lain adalah masih banyaknya jumlah pengangguran dengan tingkat pendidikan formal (SMK) yang belum memiliki kualifikasi kompetensi yang diharapkan oleh pasar tenaga kerja/ dunia usaha serta masih belum optimalnya koordinasi dengan pihak terkait meningkatkan keterampilan pekerja agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.

- d. Diperlukan pelatihan kewirausahaan maupun model pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya ketersediaan anggaran pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan produktivitas. Selain itu, model pelatihannya harus komprehensif yang meliputi a) sistem seleksi peserta, b) materi dan metode pelatihan, c) pemagangan, d) pemodalan. Faktor lain adalah terbatasnya modul dan standar-standar pelatihan kerja serta belum optimalnya kerjasama dengan stakeholder



- e. Persentase perusahaan yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja belum maksimal atau sebesar 2,74%

Hal ini disebabkan minimnya SDM fungsional pengawas ketenagakerjaan yang jumlahnya tidak berimbang dengan jumlah perusahaan meskipun Rasio Besaran Pemeriksaan Perusahaan telah meningkat dari 28,18% di tahun 2019 menjadi 32,09 % di tahun 2020.

- f. Belum meratanya perluasan kesempatan kerja di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini disebabkan mekanisme dan sarana informasi kepada pencari kerja maupun perusahaan belum optimal dan efektif serta inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda dan berpendidikan kurang tertarik di sektor informal. Selain itu, dukungan dana, SDM dan koordinasi antar OPD sangat diperlukan.

- g. Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum optimal.

Persentase lulusan BLK yang diterima kerja adalah sebesar 70% dari target sebesar 87% seperti dalam tabel 2.86. Hal ini disebabkan pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan belum sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja serta terdapat keterbatasan sarana dan prasarana.

8) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan

Pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) perempuan hanya sebesar 48,93%, sedangkan laki-laki tercatat sebesar 82,86% pada tahun 2020. Selain itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga perlu ditingkatkan dimana pada tahun 2020 baru sebesar 61,58%. Hal ini disebabkan karena dari salah satu Komposit IDG yaitu Prosentase



Keterwakilan Perempuan dalam Politik dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2018 sebesar 17% di tahun 2019 turun 6% yaitu sebesar 11%, untuk itu Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya dengan melakukan berbagai kegiatan melalui OPD yang terkait. Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan Kegiatan Capacity Building bagi Perempuan Politik Provinsi Kepri yang bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Kepulauan Riau dan Badan Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau.

b. Masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Kepulauan Riau masih kerap terjadi. Pada tahun 2020 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO mencapai angka 33,42%. Hal ini disebabkan karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kepulauan Riau. Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO disebabkan banyak faktor diantaranya faktor individu, sosial budaya dan ekonomi. Faktor individu masih ada perempuan yang belum memahami hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari segala macam diskriminasi. Faktor sosial budaya dimana masih terjadi kesenjangan gender dalam ranah sosial budaya, konsep kesetaraan dalam keluarga merupakan kunci dalam menghentikan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu indikator terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keluarga terbagi peran-peran yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dimana peranan ini menentukan berbagai pengambilan keputusan, serta nilai-nilai luhur termasuk nilai kesetaraan dan keadilan gender yang ditanamkan. Faktor ekonomi, perempuan dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah rentan mengalami kekerasan, pandemi covid-19 menempatkan perempuan pada posisi yang rentan. Selain itu, posisi geografis dan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang



strategis menjadikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai daerah transit dan tujuan terjadinya perdagangan orang. Hasil identifikasi Bareskrim Polri, tujuh dari sepuluh rute perdagangan orang di Indonesia melintasi Batam Provinsi Kepulauan Riau.

c. Perlindungan terhadap anak masih perlu ditingkatkan

Kekerasan terhadap anak masih terjadi dengan ditunjukkan Rasio Kekerasan Terhadap Anak sebesar 2,90% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena faktor rendahnya ekonomi, pendidikan, psikologis dan lingkungan sosial. Faktor ekonomi, karena selama masa pandemic Covid-19 ini sangat mempengaruhi ekonomi keluarga, sehingga perhatian terhadap anak berkurang dan keluarga lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Faktor pendidikan, anak-anak tidak bersekolah dan sebagian anak-anak kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Faktor psikologi orang tua dalam menghadapi persoalan keluarga, juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak, sehingga mengakibatkan pemenuhan terhadap hak-hak mereka juga menjadi terabaikan.

9) Urusan Pangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pangan sebagai berikut:

a. Mewujudkan swasembada pangan daerah.

Hal ini disebabkan karena kondisi wilayah Provinsi Kepulauan Riau berupa kepulauan sehingga pemenuhan kebutuhan pangan berasal dari luar Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, agar tidak terjadi ketergantungan pangan sehingga perlu meningkatkan produksi tanaman pangan khususnya padi dan palawija. Pada tahun 2020 produksi padi menurun dari 1.150 ton pada tahun 2019 menjadi 852 ton pada tahun 2020.

b. Peringkat Provinsi Kepulauan Riau pada Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2019 berada di posisi 28 dari 32 provinsi.



Penyebab utamanya adalah rendahnya Indeks Ketersediaan Pangan yang diukur melalui indikator rasio konsumsi per kapita terhadap produksi bersih per kapita. Hal ini dikarenakan Provinsi Kepulauan Riau bukan merupakan daerah penghasil atau produksi beras sebagai bahan makanan pokok. Kebutuhan bahan pangan sangat tergantung pada *supply* pangan dari wilayah lain

- c. Adanya potensi pengembangan tanaman pangan terbatas yang tidak mencapai target sebesar 300 ha.

Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan dan pengolahan lahan sawah karena keterbatasan modal petani. Pada Tahun 2020, luas lahan panen padi adalah seluas 298,52 ha sehingga masih sekitar 1.095,48 ha yang belum diolah secara maksimal oleh petani berdasarkan Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 yaitu sebesar 1.394 ha.

- d. Perlunya peningkatan pada Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat.

Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat meningkat dari 57,31% pada tahun 2019 menjadi 67,18% pada tahun 2020. Namun, hal ini memerlukan upaya untuk meningkatkan kembali karena perlindungan terhadap konsumen perlu dimaksimalkan sehingga swasembada pangan yg aman dan sehat semakin terwujud.

10) Urusan Pertanahan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanahan adalah pengembangan infrastruktur terhambat oleh sulitnya masalah pembebasan lahan dan tingginya biaya infrastruktur.

Perlu disadari bersama bahwa akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan telah menjadi isu yang sangat penting, karena permasalahan ini tidak saja menyangkut faktor produksi namun menjadi faktor yang menentukan hubungan sosial dan perkembangan pembangunan dan kehidupan masyarakat. Satu hal



yang menarik untuk dikaji adalah masalah ketimpangan akses masyarakat terhadap sumberdaya agraria khususnya lahan yang menyangkut masalah penguasaan, kepemilikan dan pengusahaan lahan. Kondisi tersebut telah menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan yang diikuti pada perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai akses dan yang tidak mempunyai akses terhadap sumber daya lahan.

11) Urusan Lingkungan Hidup

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

a. Belum optimalnya penanganan pencemaran air

Belum optimalnya penanganan pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan, minyak kapal, ataupun pribadi. Hal ini perlu dukungan berupa penegakan regulasi baik berupa pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan maupun peningkatan koordinasi antara pihak perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup terkait (kabupaten/kota/provinsi) dalam mengendalikan pencemaran air oleh industri. Aparat Hukum juga perlu memberikan ketegasan terkait aktifitas Tank Cleaning yang mencemari Perairan Provinsi Kepulauan Riau yang sangat merugikan Dunia Usaha maupun Pariwisata. Data pada Mei 2021 menunjukkan bahwa jumlah limbah sludge oil yang mencemari di Kawasan Resort Lagoi yang belum dikelola dan dikemas dalam drum sebanyak 113,5 ton ($\pm$ 440 drum), sedangkan tumpahan minyak yang terjadi di Nongsa Kota Batam yang telah dikelola sebanyak 147,5 Ton dan yang belum dikelola 36 ton.

b. Kualitas lingkungan hidup yang masih rendah

Dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan, sangat perlu menjaga kebersihan pantai dan laut. Salah satunya yakni dengan pembuatan masterplan penanganan persampahan pada Organisasi Perangkat Daerah Terkait. Hal di atas disebabkan sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun



2014 bahwa 0 s/d 12 Mil adalah kewenangan provinsi, dan kondisi data indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2020 terealisasi sebesar 67 dari target yang diharapkan ialah 69,62.

c. Potensi bencana alam dan perubahan iklim

Risiko Bencana Alam dan Perubahan Iklim menjadi tantangan tersendiri bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai bencana alam dan cuaca ekstrim seperti gelombang yang tinggi. Selain itu, hal di atas disebabkan banyaknya penebangan Pohon Hutan dan Pohon Mangrove untuk pembangunan Pemukiman dan Industri.

d. Kurangnya kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau (RTH)

RTH memiliki banyak fungsi antara lain memiliki fungsi ekologi, estetis, dan sebagai ruang bagi masyarakat untuk dapat berekreasi. Untuk itu, kuantitas dan kualitas RTH yang ramah anak, perempuan, lansia dan penyandang disabilitas sangat diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

e. Perlunya Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha/Kegiatan Terhadap Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Pelayanan Kesehatan

Pemahaman terhadap pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan limbah B3 sesuai dengan regulasi yang berlaku perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan masih maraknya pencemaran limbah B3 berupa minyak mentah/minyak kotor/*sludge oil* di wilayah pesisir Kota Batam dan Kabupaten Bintan disebarkan oleh banyaknya kapal-kapal yang labuh jangkar dan melakukan kegiatan tank cleaning secara ilegal dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 yang lain adalah Limbah Pelayanan Kesehatan, untuk itu penanganan limbah B3 perlu menjadi perhatian khusus. Selain itu, sumber kedua dari pencemaran air adalah sampah. Produksi sampah berjalan seiring dengan perekonomian yang



tumbuh. Hal di atas disebabkan mahal biaya yang akan dikeluarkan oleh kapal-kapal maupun perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 .

12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya pelayanan pindah datang penduduk.

Pelayanan pindah datang penduduk di Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dikarenakan pelaporan data dari perangkat desa/kelurahan dan kecamatan masih rendah. Hal ini disebabkan karena adanya penduduk yang melakukan kepindahan namun belum melaporkan ke disdukcapil setempat dengan alasan belum mau menetap secara permanen di wilayah/daerah tersebut.

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Masyarakat masih banyak yang belum memahami pentingnya pengkinian dalam pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Selama ini kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap peristiwa penting terkait dengan cakupan akta pencatatan sipil, pengkinian data dalam Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran anak, serta belum tertibnya penduduk dalam mengisi biodata kependudukan sebagai dasar pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat (penduduk) yang belum menyadari pentingnya identitas kependudukan yang akurat dan valid. Penduduk datang untuk mengurus dokumen kependudukan jika hanya dibutuhkan pada saat tersebut seperti BPJS, masuk sekolah, test penerimaan ASN, TNI/POLRI dan lain sebagainya.

- c. Status perekaman yang belum dicetak

Kondisi ini dikarenakan updating biometrik dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk status



Print Ready Ready (PRR) atau status siap cetak. Hal ini disebabkan karena status PRR adalah melalui proses penunggalan biometric secara nasional dengan membandingkan sidik jari, iris mata, dan data pribadi penduduk tersebut dengan data penduduk se-Indonesia yang terdapat dalam database kependudukan secara nasional. Proses tersebut membutuhkan waktu dan komunikasi data yang stabil antar Pusat dan daerah kabupaten/kota sehingga KTP-el penduduk dapat dicetak hanya jika status perekaman datanya sudah Print Ready Record (PRR).

13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai berikut:

a. Masih lemahnya pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa

Dukungan lintas program atau lintas sektor dalam mendukung pengembangan BUM Desa dan SDM di Desa belum berjalan secara optimal, sehingga kualitas SDM di desa serta pengembangan BUM Desa masih lemah. Hal ini disebabkan karena belum ada program/kegiatan pengembangan BUM Desa yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Riau, dan belum adanya intervensi dalam bentuk rencana aksi lintas OPD di tingkat daerah terhadap pengembangan BUM Desa.

b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Peran lembaga TTG dalam penyebarluasan informasi terkait Teknologi Tepat Guna (TTG) kepada masyarakat di desa masih kurang, sehingga mengakibatkan Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan TTG. Pada tahun 2019 terdapat 2 TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 hanya 1 TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena tahun 2019 terdapat 2 TTG yang dimanfaatkan oleh masyarakat, sedangkan pada tahun 2020 masih



memanfaatkan TTG tahun 2018 dan Tahun 2019 yang sudah ada namun skala pemanfaatannya lebih luas dari awal pemanfaatannya.

c. Peran Lembaga kemasyarakatan desa belum optimal

Peran aktif lembaga kemasyarakatan di desa (RT, RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM) masih belum optimal yang disebabkan masih minimnya pembinaan, penguatan kapasitas dan dukungannya sebagai mitra memberdayakan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum seluruh lembaga kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan pelatihan yang memadai. Apalagi pada tahun 2020 terjadi krisis akibat pandemi Covid 19. Sehingga banyak kegiatan pembinaan yang tertunda.

d. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat

Beberapa Kabupaten di Provinsi Kepulauan Kepulauan Riau belum memiliki Perda tentang kelembagaan masyarakat desa, sehingga pembinaan, penguatan kapasitas kelembagaan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena belum dilakukan sosialisasi secara komprehensif terkait Perda tentang kelembagaan masyarakat desa oleh kabupaten/kota yang sudah menerbitkan Perda tersebut

14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:

a. Pemanfaatan bonus demografi yang belum optimal

Pada tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau berada pada periode bonus demografi, dimana proporsi penduduk usia produktif meningkat sebesar 70,60%. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau memasuki masa transisi menuju Ageing Population (penduduk lansia meningkat) menjadi 5,3 % pada tahun 2020 dari 3,4% pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena Perubahan struktur penduduk menuju pendewasaan usia penduduk. Meningkatnya penduduk usia produktif Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Laporan



Potret SP 2020 sebesar 70,60% memperlihatkan terjadi perubahan struktur penduduk Kepulauan Riau. Dengan struktur penduduk demikian, Kepulauan Riau berada pada periode bonus demografi, memiliki jendela kesempatan (windows of opportunities). Jika dimanfaatkan secara optimal, maka dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi membawa implikasi meningkatnya angkatan kerja (labour supply), memberi peluang untuk meningkatkan tabung (saving) serta meningkatkan kualitas SDM (human capital). Jika Kepri tidak berhasil memanfaatkan melimpahnya penduduk usia produktif pada masa bonus demografi dengan baik, maka akan terjadi kondisi sebaliknya yakni akan menjadi beban.

- b. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran

Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau belum optimal dalam kepesertaan ber-KB. Berdasarkan Data BKKBN Tahun 2020, cakupan kepesertaan ber KB Masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau masih relative rendah, yakni sebesar 49,01%. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepesertaan berKB tersebut adalah karena masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya merencanakan kelahiran, serta alat kontrasepsi yang tidak selalu tersedia sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya sosialisasi, edukasi dan pemberian informasi tentang manfaat ber KB, rendahnya pendampingan kepada para akseptor dan calon akseptor, adanya keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap suatu jenis alat kontrasepsi yang tidak tersedia.

- c. Meningkatnya kehamilan pada usia remaja

Kehamilan pada usia remaja di Provinsi Kepulauan Riau masih kerap terjadi. Akibatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga menurun serta meningkatnya risiko stunting pada balita. Hal ini disebabkan karena angka kelahiran remaja yang tinggi akan mempengaruhi ketahanan dan



kesejahteraan keluarga, meningkatnya angka kematian ibu, bayi dan balita, serta meningkatnya prevalensi stunting. Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, rendahnya ketahanan remaja (youth resiliensi), serta rendahnya ketahanan keluarga juga menjadi faktor meningkatnya kehamilan pada usia remaja. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya merencanakan kelahiran serta meningkatnya kehamilan pada usia remaja. Provinsi Kepulauan Riau diharapkan segera memaksimalkan pengetahuan masyarakat untuk berganti cara ber-KB dengan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang.

15) Urusan Perhubungan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perhubungan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur konektivitas antar pulau masih perlu ditingkatkan

Arus orang dan arus barang saat ini masih terhambat. Untuk itu perlu peningkatan dan pembangunan penyediaan transportasi antar pulau seperti pembangunan Pelabuhan. Hal di atas disebabkan Kebutuhan akan prasarana transportasi laut (Pelabuhan) dan sarana (kapal) di Kepulauan Riau belum terpenuhi secara ideal, jumlah pelabuhan yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat yang tersebar di pulau pulau sebanyak minimal 38 Pelabuhan sedangkan jumlah pelabuhan yang ada sebanyak 33 pelabuhan.

- b. Perlunya peningkatan fasilitas keselamatan keamanan transportasi

Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 92,19%, sedangkan realisasinya sebesar 96,16%. Walaupun target telah terealisasi, layanan transportasi, keselamatan dan keamanan transportasi masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan ketersediaan fasilitas keselamatan keamanan transportasi di jalan-jalan provinsi Kepulauan Riau belum memadai jumlahnya. Jumlah fasilitas



keselamatan keamanan transportasi yang dibutuhkan adalah sebanyak 325.594 unit sedangkan yang tersedia sebanyak 300.954 unit atau masih terdapat kekurangan 25.000 uni.

c. Ketersediaan prasarana lalu lintas masih belum optimal

Hal di atas disebabkan ketersediaan prasarana lalu lintas belum mencukupi jumlahnya dimana kebutuhan akan prasarana lalu lintas berjumlah 65 Unit sedangkan yang tersedia baru 53 unit, selain itu pembangunan prasarana lalu lintas (Pembangunan Halte, Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang dan Traffic Light).

d. Prasarana lalu lintas baru harus ditingkatkan untuk pemenuhan keselamatan.

Hal di atas disebabkan kurangnya perawatan prasarana dan fasilitas keselamatan yang ada, dan juga kondisi prasarana yang tidak dalam kondisi baik (rusak) dari jumlah prasarana yang ada sebanyak 300.954, unit 30% di antaranya Kurang lebih 90.000 unit dalam kondisi perlu perbaikan/penggantian dan perawatan.

16) Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan komunikasi dan informatika adalah keterbukaan informasi publik yang belum maksimal. Keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya sumber daya dan infrastruktur TIK. Selain itu, aplikasi yang masih disusun secara parsial dan belum terintegrasi dengan baik menjadi salah satu faktor peting penyebab belum optimalnya keterbukaan informasi publik Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hal-hal tersebut berdampak belum optimalnya pencapaian nilai e-Government. Permasalahan yang lain adalah ketersediaan komunikasi secara merata di seluruh wilayah Kepulauan Riau sehingga tidak terjadi “blank spot” karena ketidaktersediaan sarana komunikasi.



17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai berikut:

- a. Diperlukan fasilitasi dan pengembangan UMKM di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau.

Hal tersebut sebagai wujud pembinaan pemerintah yang saat ini mencapai 0,45% untuk UMKM serta sebagai penguatan untuk usaha skala mikro yang kekurangan modal berupa bantuan modal usaha, digitalisasi pemasaran UMKM serta mengoptimalkan pertumbuhan sektor UMKM yang volume usaha per UMKM menurun dari Rp506.670.000,00 pada tahun 2019 menjadi Rp493.430.000,00 pada tahun 2020.

- b. Koperasi belum jadi kebutuhan masyarakat yang disebabkan masyarakat belum merasakan manfaat dari pembentukan koperasi.

Hal ini berakibat pada koperasi aktif yang masih rendah yaitu 40,85% dari 55,80% yang menjadi target serta tingkat kesehatan koperasi yang belum maksimal sebesar 41,86.

- c. Koperasi belum mampu menjadi pendukung pengembangan ekonomi lokal.
Hal ini disebabkan oleh tidak maksimalnya jumlah koperasi yang dibina tahun 2019 sebanyak 660 koperasi menjadi 316 koperasi pada tahun 2020. Selain itu, penyebab lainnya adalah tidak adanya modernisasi koperasi, minimnya kegiatan usaha yang dikelola atau hanya di bidang kredit serta manajemen koperasi belum profesional karena anggotanya memiliki tingkat pemahaman kepengurusan yang masih rendah.

18) Urusan Penanaman Modal

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Penanganan industri yang terdampak Covid-19

Penanganan industri yang terdampak Covid-19 dapat dilaksanakan dengan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pemberian insentif, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah atau fasilitasi peminjaman modal.

- b. Belum optimalnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP).

Hal ini ditunjukkan nilai IKM yang menurun dari 82,34% pada tahun 2019 menjadi 81,93% pada tahun 2020. Kemudahan layanan perizinan dengan *one day service* sangat diperlukan agar jumlah dan nilai investasi dapat semakin meningkat dan selaras dengan iklim investasi nasional serta menghindari semakin panjangnya alur birokrasi perizinan.

- c. Belum optimalnya kerjasama ekonomi dengan pihak swasta agar dapat berinvestasi pada proyek jangka panjang seperti infrastruktur.
- d. Sebaran investasi yang belum proporsional, secara antar wilayah maupun antar sektor yang saat ini didominasi oleh Batam dan adanya hambatan investasi karena wilayah Kepulauan Riau didominasi oleh laut. Adanya kajian tentang peta potensi antar wilayah dan antar sektor sangat diperlukan
- e. Kemanfaatan investasi yang belum maksimal.

Hal ini disebabkan saat ini kemanfaatan investasi adalah untuk penyerapan tenaga kerja dan belum bisa mensejahterakan masyarakat khususnya pelaku UKM. Selain itu, sebagian besar investasi merupakan sektor industri berskala besar untuk kebutuhan industri nasional yang belum ada keterkaitan dengan sumber daya lokal.

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepemudaan dan olahraga sebagai berikut:

- a. Pembinaan organisasi kepemudaan belum optimal

Kondisi ini dapat terlihat dari minimnya ruang-ruang publik yang diperuntukkan bagi para pemuda untuk pengembangan minat dan bakat mereka. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum adanya



pengaturan di Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah yang jelas tentang kepemudaan; belum optimalnya peran dan fungsi wadah kepemudaan seperti Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi di lingkungan Perguruan Tinggi, Organisasi Remaja/Pemuda Masjid atau tempat Ibadah, dan Organisasi Fungsional Pemuda lainnya yang menyebabkan tersendatnya kaderisasi kepemimpinan; belum ada Sentra Pemberdayaan Pemuda yang merupakan Prasarana Kepemudaan sebagai wadah Pelayanan Kepemudaan untuk melaksanakan program penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; serta belum ada Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai implementasi dari Koordinasi Strategis Lintas Sektor sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

b. Rentannya pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan Narkoba.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi dan masih menghantui pembangunan Provinsi Kepulauan Riau. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau khususnya dalam mengatasi dekadensi moral, kenakalan remaja, pergaulan bebas, kriminalitas, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih bersifat parsial dan belum menyentuh sasaran kepada Pemuda belum bekerja (menganggur) yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Persebaran Pemuda yang tidak merata, disebabkan karakteristik wilayah kepulauan yang terdiri dari 7 (tujuh) kabupaten/kota yang rentang kendalinya cukup jauh dan berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam



yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial di kalangan pemuda.

c. Rendahnya sarana dan prasarana olahraga

Sarana dan prasarana olahraga di Provinsi Kepulauan Riau belum optimal. Kondisi ini mengakibatkan kurang maksimalnya peningkatan bakat dan minat masyarakat dalam pengembangan kemampuan berolahraga. Penyebab lainnya adalah tidak tersedianya anggaran pendukung pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan yang berkesinambungan di Provinsi Kepulauan Riau.

d. Rendahnya prestasi olahraga

Pemerataan pembinaan terhadap cabang olahraga tertentu masih rendah, hal ini mengakibatkan kurang mampunya tim dalam meraih prestasi olahraga dalam berbagai bidang baik pada level lokal, Nasional, maupun internasional. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya SDM pelatih secara kuantitas dan kualitas untuk menyiapkan bibit unggul penyumbang prestasi keolahragaan, belum optimalnya budaya berolahraga di masyarakat, profesi atlet belum menjadi pekerjaan yang dipercaya oleh masyarakat, belum optimalnya keterlibatan berbagai pihak terutama pihak swasta dalam pembinaan olahraga, anggaran untuk pembinaan olahraga belum menjadi skala prioritas, serta penyelenggaraan pelatihan sertifikasi bagi pelatih sangat minim dilakukan.

20) Urusan Statistik

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan statistik adalah dukungan Perangkat Daerah dalam penerapan Single Data Statistik (SDS) belum optimal. Hal ini disebabkan produsen data (perangkat daerah) belum maksimal memberikan data sektoral secara terbuka, dokumen data statistik sektoral daerah yang terintegrasi dengan SIM single data statistik (SDS) yang masih terbatas. Penyebab lainnya adalah masih kurangnya kesadaran OPD untuk menyediakan data yang dibutuhkan dan juga disebabkan oleh keterbatasan SDM di bidang Statistik dan



Database di Provinsi Kepulauan Riau.

21) Urusan Persandian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan persandian adalah infrastruktur persandian dan keamanan informasi masih belum memadai. Salah satu penyebabnya adalah peralatan persandian yang tersedia hanya yang berasal dari BSSN. Penyebab lainnya adalah Kuantitas dan kesempatan pengembangan SDM yang terbatas.

22) Urusan Kebudayaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kebudayaan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kebudayaan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Penyebabnya adalah perlu peningkatan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya daerah sebagai sarana peningkatan ekonomi bagi pelaku budaya dan masyarakat diantaranya penyelenggaraan even tahunan bidang kebudayaan yang berkelanjutan, memaksimalkan kreatifitas masyarakat/pelaku budaya dalam menciptakan produk seni berbasis budaya.

- b. Pengelolaan warisan budaya yang belum optimal.

Hal ini ditunjukkan dengan beberapa hal, antara lain peninggalan budaya yang belum dibuat dalam bentuk manuskrip dan salinan digital serta alat peraga dalam museum daerah; sarana dan prasarana pemeliharaan dan penyimpanan artefak/cagar budaya yang belum memadai; dukungan SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas; kurangnya karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya; persentase bangunan berciri khas Melayu yang sebesar 14,32% dari 32,33% yang ditargetkan; serta belum dilaksanakan zonasi situs dan kawasan cagar budaya secara



maksimal. Hal-hal di atas disebabkan sebagian besar kabupaten/kota belum menetapkan cagar budaya sehingga belum dapat menetapkan zonasi sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal tersebut menyebabkan masih belum optimalnya pencapaian indikator Warisan Kebudayaan.

- c. Budaya yang semakin terkikis oleh zaman.

Hal ini ditunjukkan bahasa daerah yang perlahan-lahan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Selain itu, belum optimalnya peran media pendidikan dan museum dalam melestarikan kebudayaan. Hal-hal di atas disebabkan belum maksimalnya regulasi terkait penggunaan bahasa daerah di Kepri, juga dikarenakan sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang berfokus pada bidang kebudayaan masih belum memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam membentuk suatu lembaga pendidikan yang berfokus kepada bidang kebudayaan, salah satunya masih kurangnya SDM, (Perguruan Tinggi yang berbasis budaya daerah).

- d. Optimalisasi Pulau Penyengat dan pendirian Museum Melayu Center sebagai pusat budaya melayu.

Hal ini disebabkan karena belum adanya museum Provinsi Kepulauan Riau, mengingat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Museum “PP 66 Tahun 2015 Tentang: Museum”, pasal (3) ayat 1 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.

23) Urusan Perpustakaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perpustakaan adalah diperlukan pemajuan budaya dan peningkatan minat baca. Hal ini disebabkan karena penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi Perpustakaan atau memanfaatkan taman bacaan masyarakat masih belum optimal. Data dari Indeks



Pembangunan Kebudayaan menunjukkan bahwa sampai dengan Tahun 2019, baru 13,55% penduduk usia 10 tahun keatas di Provinsi Kepulauan Riau yang mengunjungi Perpustakaan dan Taman Bacaan Masyarakat dari skor maksimal seharusnya 25%. Oleh karena itu, hal ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan pada indikator Budaya Literasi.

24) Urusan Kearsipan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kearsipan adalah nilai hasil evaluasi pengawasan yang diukur oleh ANRI terhadap penyelenggara pengelolaan arsip di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan pada tahun 2019 adalah 54,14 atau berkategori "CC". Beberapa kendala terhadap penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- a. masih belum lengkapnya instrument dasar pengelolaan arsip dinamis berupa klasifikasi arsip (KA), jadwal retensi arsip (JRA), dan system klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis (SKKAD);
- b. belum optimalnya pengelolaan arsip inaktif dengan retensi sekurang-kurangnya 10 tahun;
- c. belum optimalnya pengelolaan arsip statis; dan
- d. belum terpenuhinya sarana dan prasarana kearsipan yang sesuai standar

25) Urusan kelautan dan perikanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan adalah:

- a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ruang Laut

Pemanfaatan potensi ruang laut memerlukan campur tangan berbagai pihak baik pemerintah pusat, kabupaten maupun kota dalam rangka optimalisasi industri perikanan dan kelautan. Selain itu juga memerlukan penyesuaian dengan RTRW terkait pengembangan wilayah ruang laut. Pemanfaatan potensi ruang laut belum optimal disebabkan karena telah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah nomor



21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka penerbitan izin lokasi dan izin lokasi laut sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54/Permen-KP/KP tentang izin lokasi, izin pengelolaan dan izin lokasi di laut tidak berlaku lagi.

b. Terdapat *Illegal fishing, unregulated fishing dan unreported fishing*.

Data menunjukkan kasus *illegal fishing* pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus, Tahun 2017 sebanyak 76 kasus, Tahun 2019 sebanyak 89 kasus, serta pada tahun 2020 sebanyak 28 kasus. Hal ini menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan tangkap di wilayah provinsi kepulauan riau yang terealisasi sebesar 319.196,89 Ton pada tahun 2020 dari jumlah potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar 1.057.050 Ton/tahun. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha perikanan untuk melaporkan dan melegalkan aktifitas usaha yang dijalankannya serta diperlukannya pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil tentang peraturan terkait kelautan dan perikanan. Kasus illegal fishing pada tahun 2016 sebanyak 101 kasus, Tahun 2017 sebanyak 76 kasus, Tahun 2019 sebanyak 89 kasus, serta pada tahun 2020 sebanyak 28 kasus.

c. Perlunya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya

Nelayan saat ini masih menangkap ikan dengan armada yang cenderung tradisional. Penggunaan alat tangkap berbahaya yang dapat merusak padang lamun dan terumbu karang juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pemerintah dapat memberikan bantuan berupa peralatan maupun teknologi perikanan dan kelautan, sehingga terjadi peningkatan penguasaan teknologi bagi nelayan dalam rangka optimalisasi penangkapan ikan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena Armada Penangkapan dengan menggunakan KM >30 GT sejumlah 241 unit pada tahun 2020

d. Kesejahteraan nelayan belum maksimal

Hal ini terkait masih belum optimalnya kualitas dan kemampuan nelayan



dalam membudidaya dan mengolah hasil perikanan terutama dalam hal diversifikasi hasil olahan produk perikanan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kemampuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap manajemen usaha dan teknologi terkini dalam rangka pengembangan usahanya sehingga diperlukan pelatihan manajemen dan pelatihan peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan dan pengolah serta pemasar hasil perikanan.

- e. Infrastruktur Bidang Kelautan dan Perikanan masih perlu pembenahan
Hal ini memerlukan peningkatan infrastruktur penunjang bidang kelautan dan perikanan. Jalan, air bersih, pelabuhan perikanan, serta pabrik es perlu dibangun serta menghilangkan hambatan rantai pasok. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena belum tersedianya tempat pelelangan ikan serta sarana pendukung. Selain itu juga pola monopsoni yang masih berjalan sehingga perlu difasilitasinya nelayan untuk permodalan dalam melaksanakan aktifitasnya.
- f. Tingkat akurasi data oseanografi perlu menjadi perhatian karena menyangkut estimasi peralihan musim yang mempengaruhi kegiatan budidaya dan perikanan.
- g. Status Kawasan Konservasi belum maksimal.
Capaian peningkatan status Kawasan konservasi perairan level 3 saat ini baru tercapai 1 kawasan dari target 4 kawasan pada tahun 2019. Hal ini memerlukan pemanfaatan sumber daya alam secara ekonomis, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, hal tersebut disebabkan karena terjadi Perubahan Peraturan Menteri KKP Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perubahan mengenai level kawasan berdasarkan putusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28 Tahun 2020 tentang Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi sehingga perlu disesuaikan kembali data serta persyaratan yang harus dilengkapi.



- h. Terdapat alih fungsi hutan mangrove sebagai akibat penambangan dan penebangan usaha arang.

Hal tersebut disebabkan karena masih terdapatnya aktifitas yang diakibatkan kearifan lokal di beberapa lokasi dan ini perlu dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat lokal tidak lagi menebang hutan mangrove dan mengganti sumber energi alternatif.

- i. Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Baik Aspek Permodalan Maupun Pemasaran.

Hal ini menunjukkan pendampingan dan pemerdayaan masyarakat nelayan perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tingkat pendidikan masyarakat (nelayan) saat ini masih belum mumpuni, sehingga perlu pemberdayaan dari pihak terkait. Pemberdayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah geografis kepulauan. Adanya kegiatan pemberdayaan diharapkan pengetahuan masyarakat (terutama nelayan) meningkat, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah industri produk olahan maupun meningkatkan daya saing hasil pemasaran.

- j. Perlunya Pembangunan Industri Pengolahan Rumput Laut Maupun Perikanan.

Hal ini disebabkan karena Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi pengembangan rumput laut, sehingga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan nilai tambah maka diperlukan pembangunan industri rumput laut.

26) Urusan Pariwisata

Secara umum, permasalahan di urusan pariwisata tercermin dalam penurunan kunjungan wisatawan, khususnya di wisatawan mancanegara. Hal ini diikuti dengan penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau. Selain itu, dunia pariwisata sangat terdampak



oleh situasi pandemi Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan di urusan pariwisata sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau memerlukan pengembangan obyek-obyek wisata baru. Saat ini telah terdapat 16 (enam belas) Destinasi Pariwisata Unggulan Pariwisata Provinsi (DPUD) dan terdapat 516 obyek wisata di Kepulauan Riau. Namun demikian, diperlukan pengembangan obyek wisata baru sebagai daya tarik wisata di Kepulauan Riau. Destinasi obyek wisata yang dapat dikembangkan antara lain adalah wisata budaya (sejarah), religi, alam, bahari, kuliner, geopark dan lainnya. Pengembangan kawasan wisata dapat dilaksanakan di Galang Rempang. Pengembangan wisata alam, olahraga, dan rekreasi dapat dilaksanakan di Kabupaten Bintan. Pengembangan wisata bahari dapat dilaksanakan di Kabupaten Natuna. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya dapat dilaksanakan di Kabupaten Lingga. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata dapat dilaksanakan di Kabupaten Anambas. Selain itu, perlu dikembangkan obyek-obyek wisata baru di Karimun, integrasi pariwisata Tanjungpinang-Bintan serta menjadikan Batam sebagai tujuan utama wisatawan yang menghadiri kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang disebut dengan wisatawan bisnis yang memiliki sebuah tujuan di luar wisata rekreasi di Indonesia.

- b. Diperlukan fasilitasi wisata unggulan kabupaten dan kota.

Hal ini disebabkan karena belum adanya penetapan daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata provinsi selain penetapan 16 (enam belas) Destinasi Pariwisata Unggulan Pariwisata Provinsi (DPUD). Hal ini berimplikasi pada fasilitasi pengembangan obyek wisata unggulan kabupaten/kota hanya terfokus pada lokasi penetapan tersebut.

- c. Pengembangan wisata yang ramah kesehatan sebagai implikasi dari masa pandemi Covid 19.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Sebagai dampak pandemi Covid-19, pengelola destinasi wajib menyiapkan wisata ramah kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar wisatawan aman dan nyaman. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfasilitasi standarisasi industri dan usaha pariwisata yang ramah kesehatan.

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata.

Kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata sangat berperan dalam urusan pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memfasilitasi dalam menyiapkan sarana prasarana pendukung pariwisata. Hal ini didukung data bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memfasilitasi pembangunan homestay di 3 (tiga) lokasi wisata, yaitu 2 unit homestay di Pulau Benan, 2 unit homestay di Pulau Buru Kabupaten Karimun, dan 2 unit homestay di kawasan Pantai Trikora Kabupaten Bintan.

e. Diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata.

Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya pemberian insentif kepada pelaku industri pariwisata. Hal ini tercermin pada pelatihan yang bisa diberikan kepada pelaku industri pariwisata berkisar rata-rata 100 pelaku industri pariwisata pertahun. Selain itu dukungan kepada penyelenggara acara pariwisata juga masih sangat terbatas.

f. Diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota untuk menciptakan branding pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau.

Hal ini disebabkan karena belum adanya jaringan wisata yang terhubung antar daerah yang akan memudahkan wisatawan untuk mengetahui lebih banyak tentang pariwisata di Kepulauan Riau sehingga wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau tidak hanya terkonsentrasi di Batam, Bintan, Tanjungpinang, dan Karimun.

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pariwisata dalam



kerangka ekonomi kreatif adalah:

- a. Diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif.

Hal ini disebabkan karena masih minimnya pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Hal ini didukung data bahwa rata-rata dilakukan pelatihan pengembangan pelaku ekonomi kreatif terhadap 100 pelaku ekonomi kreatif pertahun. Demikian pula, perlunya perhatian terhadap perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

- b. Diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata.

Hal ini disebabkan peran ekonomi kreatif sangat diperlukan di daerah wisata, khususnya berkaitan dengan souvenir, pertunjukan, promosi dan lainnya.

- c. Diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif.

Hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran industri kreatif untuk melindungi karyanya serta membutuhkan waktu untuk mendapatkan perlindungan HAKI.

- d. Belum optimalnya kerjasama dengan pihak perbankan dalam mendukung ekonomi.

Hal ini disebabkan karena belum adanya kerjasama dengan pihak perbankan untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif, kurangnya akses permodalan pelaku sektor ekonomi kreatif terhadap perbankan mengakibatkan kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa baik di dalam maupun di luar negeri.

27) Urusan Pertanian

Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada urusan pertanian adalah pertumbuhan negatif untuk pertanian dan tanaman pangan sebesar -0,7 untuk pertanian dan -10,31 untuk tanaman pangan pada tahun 2020. Secara khusus, permasalahan pada urusan pertanian adalah:



- a. Diperlukan peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan.
Hal ini disebabkan karena untuk menunjang peningkatan produksi pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) diperlukan jaringan irigasi, jalan usaha tani, bangunan pengolahan hasil.
- b. Diperlukan pendampingan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
Hal ini diperlukan untuk mempromosikan dan memasarkan hasil-hasil pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) agar komoditas yang dihasilkan dapat ditampung oleh pedagang besar/ pengumpul/pasar dengan harga yang tidak merugikan petani.
- c. Diperlukan peningkatan kapasitas petani dan pelaku perkebunan.
Hal ini disebabkan karena tantangan pembangunan pada urusan pertanian saat ini menuntut SDM yang cakap, sehingga bisa menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan yang memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan pasar domestik maupun luar. Untuk itu, diperlukan kegiatan untuk peningkatan SDM petani dan pelaku perkebunan seperti diselenggarakannya kegiatan pelatihan, diklat dan rutin.
- d. Belum optimalnya penggunaan teknologi untuk pertanian, perkebunan dan peternakan.
Pemanfaatan teknologi tersebut antara lain adalah dukungan teknologi agar produk hortikultura bertahan lama.
- e. Belum optimalnya keberlanjutan produksi pertanian dan perikanan.
Keberlanjutan ini harus melibatkan kearifan lokal. Fungsi kearifan lokal antara lain adalah untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam dan tidak merusak tanah pertanian
- f. Diperlukan pendirian BUMD pertanian.
Hal ini disebabkan karena untuk meningkatkan nilai ekonomi produksi pertanian lokal baik melalui penguatan modal pola kemitraan, perbaikan tata niaga pertanian dan stabilisasi harga yang berpihak pada petani maka



diperlukan BUMD yang mengampu urusan tersebut.

- g. Belum optimalnya penyuluh yang meningkat kapasitasnya/kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya yaitu masih sebesar 37,28% pada tahun 2019.

Hal ini disebabkan karena peningkatan kapasitas atau kompetensi di bidang keahliannya dengan pemberian pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis dan sekolah lapang kepada 15 orang dari 41 orang penyuluh pertanian se-Provinsi Kepulauan Riau.

- h. Diperlukan diversifikasi komoditas dan produk pertanian untuk pasar domestik dan ekspor. Hal ini selaras dengan RPJPD 2005-2025 belum tercapai dengan baik.

Hal ini disebabkan karena diversifikasi merupakan upaya meningkatkan hasil pertanian dengan cara memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Diversifikasi tanaman dapat dilakukan dengan cara diversifikasi tanaman dengan pergantian jenis tanaman.

- i. Belum optimalnya Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar yaitu 0,021 pada tahun 2020.

Hal ini disebabkan terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengendalian penyakit hewan.

28) Urusan Kehutanan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kehutanan adalah perlunya optimalisasi peran hutan baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan. Saat ini penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan masih ada yang non prosedural. Kontribusi sektor kehutanan PDRB juga belum optimal yakni baru mencapai 0,01% dari 0,03% yang ditargetkan. Hal di atas disebabkan Perhitungan Kontribusi Sektor Kehutanan PDRB tidak hanya dihitung melalui sektor kehutanan tetapi juga dihitung melalui sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry



and Fishing.

29) Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan energi dan sumber daya mineral adalah:

a. Perlunya Pemenuhan Kebutuhan Listrik Ke Seluruh Pulau

Kepri terang menjadi hal yang penting dikarenakan kelistrikan belum mencakup ke seluruh pulau. Belum semua daerah mendapatkan pasokan listrik 24 jam. Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik pada tahun 2020 tercapai 91,35% dari target 97,85%. Selain itu, rasio rumah tangga pengguna listrik tercapai sebesar 93,72%. Pengalokasian bantuan pembangkit listrik dalam bentuk genset ke desa terpencil masih mengalami kendala. Hal ini dikarenakan infrastruktur belum memadai bagi pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan. Hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangkit dan jaringan baru.

b. Perlunya Mendorong Inovasi Energi Terbarukan (EBT)

Kontribusi pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi belum optimal yakni baru terealisasi 0,007% dari target 0,008% pada tahun 2019. Potensi alam seperti ombak, angin, air terjun, dan panas perlu dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai sumber EBT. Pemanfaatan ini masih terkendala dengan mahalnya biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Penyebab lainnya adalah sebaran jumlah penduduk yang sedikit pada satu pulau berpenghuni sehingga pembangunan pembangkit EBT menjadi tidak ekonomis.

c. Perlunya Optimalisasi Pusat Data Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah serta Pemanfaatannya

Penyediaan data dan informasi terkait sumber daya mineral, geologi, dan air tanah saat ini masih kurang. Selain itu, pemanfaatan pelaku usaha yang



memanfaatkan air tanah sesuai aturan perlu dimonitoring.

30) Urusan Perdagangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perdagangan adalah:

- a. Penurunan pertumbuhan dan ekspor bersih perdagangan.

Pertumbuhan sektor perdagangan mengalami penurunan -0,030 pada tahun 2020 serta Nilai Ekspor Bersih Perdagangan mengalami penurunan dari USD 1.850,91 juta pada tahun 2019 menjadi USD 742,38 juta pada tahun 2020. Hal ini disebabkan dampak pandemi Covid-19 dan belum optimalnya jumlah ekspor berdasarkan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, serta belum optimalnya sektor non migas dengan nilai ekspor non migas USD 7.793.311 ribu dari target sebesar USD 9.100.000 ribu.

- b. Cakupan pasar yang dilakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi mengalami penurunan.

Penurunan cakupan pasar di atas adalah dari 64% pada tahun 2019 menjadi 57,14% pada tahun 2020. Hal ini perlu ditingkatkan karena diperlukan stabilitas harga kebutuhan pokok serta penurunan harga logistik barang, antara lain di Anambas.

- c. Diperlukan revitalisasi Pembangunan Pasar Inpres.

Pembangunan pasar inpres diperlukan untuk memperlancar jalur distribusi barang serta untuk mengurangi pasar monopsoni (tengkulak)

- d. Adanya jenis barang beredar yang belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman pelaku usaha serta perhatian masyarakat kepada produk yang bertanda SNI sehingga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka memberi perlindungan konsumen. Kualitas produk unggulan daerah akan tidak



mampu bersaing dengan produk lain jika tidak memiliki SNI

31) Urusan Perindustrian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perindustrian adalah:

- a. Diperlukan pengembangan dan pembukaan wilayah industri baru.

Kontribusi sektor perindustrian mengalami peningkatan sebesar 42,77% pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 13,84%. Oleh karena itu diperlukan Langkah-langkah untuk meningkat pencapaian tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru sebagai penyangga pusat pertumbuhan yang telah berkembang, pengembangan kawasan industri kecil sebagai penunjang kegiatan industri utama, pengembangan industri hilir, pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan di Kabupaten Bintan. Selain itu, diperlukan penguatan pembangunan industri maritim serta mengembangkan kawasan strategis bagi pertumbuhan industri yang berbasis kelautan.

- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap industri kecil, menengah, industri kreatif serta peningkatan nilai tambah produk olahan industri.

Hal ini ditunjukkan dengan Cakupan IKM yang dibina provinsi menurun dari 338 IKM pada tahun 2019 menjadi 120 IKM pada tahun 2020 serta jumlah IKM yang mendapat bantuan mesin dan peralatan menurun dari 150 orang pada tahun 2019 menjadi 45 orang pada tahun 2020.

32) Urusan Transmigrasi

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan transmigrasi adalah:

- a. Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang baru di Kabupaten Natuna belum sesuai dengan kondisi sebenarnya (RKT dibuat Kementerian) dan juga adanya rencana kawasan transmigrasi di Kabupaten Lingga yang masih dalam proses pengusulan ke Kementerian.



Hal ini disebabkan Rencana Kawasan Transmigrasi yang dibuat belum sesuai sesuai dengan kondisi yang sebenarnya (RTRW) di Kab. Natuna dan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, hal ini mengingat pada pulau Bunguran terdapat lahan HPL transmigrasi dengan 5 SK HPL seluas 42.456.956 Ha dan kondisinya yang telah digunakan untuk permukiman transmigrasi 2 SKP (6 UPT) seluas 12.100 Ha sehingga yang belum dimanfaatkan adalah 30.456.956 Ha.

- b. Beberapa bekas kawasan transmigrasi belum dapat dipindahtangankan ke Provinsi untuk diolah dengan lebih baik sesuai kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau

Hal ini disebabkan terdapat bekas lahan transmigrasi yang belum terselesaikan sertifikatnya kepemilikannya sesuai dengan hak transmigran dan terdapat aset-aset transmigrasi yang belum diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, terdapat eks transmigran yang meninggalkan lokasi lahan transmigrasi sehingga sulitnya melakukan verifikasi maupun pendataan transmigran terkait pengurusan sertifikat.

33) Urusan Sekretariat Daerah

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sekretariat daerah adalah: Reformasi Birokrasi yang belum terlaksana dengan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah yang belum maksimal dimana untuk tahun 2020 yang mencapai nilai 68,57. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa paling tidak terdapat berbagai hal yang perlu menjadi perhatian, yang antara lain:

- a. perlunya komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi program-program reformasi birokrasi.
- b. Deregulasi kebijakan juga masih belum berjalan secara efektif



- c. pengimplementasian e-government masih belum dilaksanakan secara memadai dimana pelaksanaannya masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi
- d. Peta Proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah
- e. belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM
- f. Standar pelayanan formal yang telah dibentuk dan dilaksanakan juga belum sesuai dengan harapan masyarakat.

34) Urusan Sekretariat DPRD

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan, legeslasi dan penganggaran. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya capaian indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Tahun sebelumnya dengan nilai 68 (skor), dimana berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB No 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik, hasil penilaian survei tersebut masuk kedalam interval mutu pelayanan C (kurang baik) dan didukung data hasil survei indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD tahun 2020.

35) Urusan Perencanaan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan perencanaan adalah usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir masih rendah, hal ini disebabkan masih banyaknya ketidaksesuaian usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Musrenbang serta tidak sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi sehingga banyak usulan yang tidak dapat diakomodir. Disamping itu, Musrenbang merupakan mekanisme yang harus dilalui dalam menyusun rencana kegiatan



pemerintah yang pelaksanaannya dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional. Di tiap tingkatan musrenbang tersebut masyarakat selalu berperan di dalam mengusulkan program/kegiatan untuk kebutuhan daerahnya masing-masing, termasuk juga melalui hasil Reses oleh anggota DPRD. Hal ini menyebabkan usulan yang disampaikan menjadi sangat besar sedangkan kapasitas keuangan daerah sangat terbatas. Dengan demikian, tidak semua permintaan warga yang terangkum dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dapat diakomodir melainkan harus mempertimbangkan dengan seksama kapasitas kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah tiap tahunnya yang tercantum dalam dokumen RPJMD, RKPD, dan Renstra OPD.

36) Urusan Keuangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan keuangan adalah:

- a. Diperlukan optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan retribusi serta Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah

Salah satu potensi PAD yang bisa dioptimalkan adalah penerimaan retribusi daerah khususnya sektor perhubungan laut dan sector kelautan dan perikanan. Pada awal tahun 2021, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar yang selama ini memiliki potensi yang sangat besar mengingat lokasi geografis Kepulauan Riau (khususnya Batam) yang merupakan salah satu perairan jalur lintas kapal internasional. Selain itu potensi wisata bahari Kepulauan Riau yang bisa dikembangkan dari kegiatan reklamasi sebagai objek retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemanfaatan ruang laut) sebagai salah satu potensi objek retribusi daerah.

Dalam proyeksi penerimaan retribusi daerah pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025 diharapkan pertumbuhan retribusi daerah



signifikan berasal dari 2 (dua) objek retribusi yaitu retribusi labuh jangkar dan retribusi pemakaian kekayaan daerah (pemanfaatan ruang laut).

- b. Belum optimalnya inovasi pelayanan pengelolaan dan pembayaran pajak berbasis elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan belum maksimalnya minat masyarakat dalam memanfaatkan pembayaran melalui e- Samsat yakni 3% yang terealisasi dari target 20% pada tahun 2019

Hal ini disebabkan 1). masyarakat masih terbiasa dengan pelayanan konvensional, 2). banyaknya wajib pajak yang masih gagap terhadap teknologi pembayaran pajak secara elektronik 3). Masih rendahnya kesadaran masyarakat membayar pajak secara elektronik 4). Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami kemudahan membayar pajak secara elektronik 5). Masih banyaknya masyarakat dengan keterbatasan perangkat ponsel pintar sebagai alat untuk membayar pajak secara elektronik.

Berdasarkan data tahun 2020, PKB yang diterima melalui e-Samsat sebesar Rp3.547.426.174,00 sedangkan melalui loket sebesar Rp178.045.906.235,00. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah

- c. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kelengkapan bukti legalitas kepemilikan BMD baik bergerak maupun tidak bergerak yang tercapai 70% dari target 74,07% pada tahun 2019. Selain itu, pengamanan BMD yang tidak bergerak 9 yang tercapai 70% dari target 71,11% pada tahun 2019.

37) Urusan Kepegawaian

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan kepegawaian adalah:

- a. Manajemen ASN yang berkualitas dan profesional belum terlaksana secara optimal.

Sistem Merit telah dilaksanakan dengan baik namun pada aspek penilaian



manajemen karir pegawai masih rendah dengan nilai 67,5 dari nilai maksimal 130.

- b. Tingkat profesionalitas ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau masih pada kategori rendah (pada tahun 2019 baru terealisasi dengan indeks 65,1 dari target 75).

Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya nilai kompetensi (IP) ASN yang disebabkan kurangnya kesempatan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Hal ini ditunjukkan bahwa diklat yang diselenggarakan sebanyak 7 diklat di tahun 2019 dan 1 diklat di tahun 2018.

- c. Ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan belum tercapai (realisasi 58,02% dari target 60% pada tahun 2019)

Hal ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melakukan moratorium Penerimaan CPNS sejak 2015 s/d 2018, sehingga pemenuhan kebutuhan sesuai formasi tidak dapat tercapai.

- d. Belum optimalnya penempatan pegawai yang sesuai dengan latar belakang keahliannya. Hal ini disebabkan belum adanya *assesment center* sehingga penempatan pegawai belum seluruhnya optimal

38) Urusan Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh hasil kerjasama penelitian belum terdokumentasikan dan tersosialisasikan dengan baik kepada kepala daerah dan para pengambil kebijakan yang dapat menjadi referensi bagi penyusunan kebijakan program/kegiatan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.176. Kondisi demikian menunjukkan bahwa untuk meletakkan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan masih perlu kerja keras terutama dari aspek penganggaran dan kualitas hasil kerjasama penelitian yang dapat dimanfaatkan.



39) Urusan Pengawasan

Permasalahan pembangunan daerah pada urusan pengawasan adalah level kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau masih belum mencapai level 3. Hal ini disebabkan oleh belum terpenuhinya seluruh indikator penilaian Level 3 Kapabilitas APIP Inspektorat khususnya tahun 2019 pada elemen 2 (Pengelolaan Sumber Daya Manusia) dan elemen 3 (Praktik Profesional). Pada tahun 2020, Inspektorat Daerah telah melakukan perbaikan pada area-area yang diperlukan sesuai dengan rekomendasi BPKP atas Level kapabilitas APIP tahun 2019 dan memenuhi indikator yang dipersyaratkan untuk level 3, namun belum dievaluasi dan revaluasi oleh BPKP Pusat.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 sebagai berikut:

4.2.1 Potensi Maritim

Sebagai wilayah kepulauan, potensi maritim sangat mendukung didalam pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, namun hingga saat ini belum banyak yang dapat dikembangkan secara optimal, padahal kekayaan ini akan membuka peluang bagi daerah yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah serta perekonomian masyarakat. Kurangnya perhatian dan komitmen kita membangun sektor maritim, sehingga fokus pengembangan sektor ini belum optimal termasuk kebijakan fiskal dan moneter.

Sektor maritim merupakan hal penting di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini selaras dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas laut sebesar 417.012,97 km² dan terdiri dari 1.796 pulau dan berada posisi yang strategis dan potensial layak menjadi poros maritime.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Provinsi Kepulauan Riau menyimpan potensi sumber daya maritim antara lain; perikanan, pariwisata bahari, perkapalan, transportasi perhubungan laut dan energi laut. Provinsi Kepri memiliki garis pantai yang cukup panjang dan menyediakan banyak lokasi objek wisata bahari dengan pemandangan alami, indah dan bagus, tinggal bagaimana mengembangkannya sebagai sektor pariwisata bahari bagian dari ekonomi maritim, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan kemakmuran masyarakat.

Pada urusan perikanan, khususnya perikanan tangkap yang memiliki potensi untuk ditingkatkan. Jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan terjadinya peningkatan setiap tahunnya. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2017 sebesar 304.039 ton, tahun 2018 sebesar 304.975 ton, tahun 2019 sebesar 309.287 ton, dan tahun 2020 sebesar 319.197 ton. Selain itu, terdapat potensi ragam perikanan tangkap antara lain ikan kecil (pelagis) sebesar 513.000 ton, ikan demersal sebesar 656.000 ton, lobster sebesar 400 ton, cumi-cumi sebesar 2.700 ton, ikan karang sebesar 27.600 ton dan ikan hias sebesar 293.600 ton.

Selanjutnya, produksi perikanan budidaya mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 21.421 ton dari tahun 2019 sebesar 33.003 ton. Namun potensi produksi perikanan budidaya dapat ditingkatkan mengingat potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, dan tambak seluas lebih kurang 4.948 ha. Oleh karena itu, upaya peningkatan ini harus didukung pemerintah daerah dengan tersedianya pakan, benih serta sarana dan prasana yang cukup, terutama untuk pelaku UMKM.

Volume produk olahan hasil perikanan menjadi perhatian selanjutnya. Hal ini disebabkan produk olahan hasil perikanan akan memberikan nilai tambah bagi urusan perikanan. Penjualan dalam bentuk segar hingga saat ini memang masih cukup menguntungkan bagi nelayan, namun demikian ikan segar memiliki dua kelemahan yakni cepat rusak dan nilai tambah yang dihasilkan kecil. Dari data yang disajikan produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau masih belum



tampak signifikan dibandingkan dengan produksi yang dihasilkan. Namun produk olahan perikanan Provinsi Kepulauan Riau meningkat signifikan pada tahun 2020 sebesar 6.206 ton dari tahun 2019 sebesar 1.804 ton. Peningkatan volume produk olahan sangat ditentukan oleh berkembangnya Unit Pengolahan Ikan (UPI) atau industri perikanan, baik skala UMKM maupun skala besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap industri pengolahan ikan sangat diperlukan yang berupa tempat pengolahan, akses untuk melakukan ekspor, serta sarana dan prasarana lainnya.

Sebagai negara dengan jumlah laut yang dominan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki arus barang dan orang yang cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang melalui angkutan penyeberangan naik menjadi 304.628 kendaraan dari sebelumnya pada tahun 2019 sebanyak 276.935. Tingginya arus barang maupun arus orang pada mode armada angkutan umum perairan, menjadikan retribusi yang tinggi bagi jasa kepelabuhan yakni pada tahun 2020 sebesar Rp429.718.867,00. Selain itu retribusi izin bidang perhubungan juga mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp689.760.000,00. Hal ini merupakan potensi untuk ditingkatkan dengan dukungan pelabuhan serta sarana dan prasarana lainnya.

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau memiliki ciri khas dan potensi wisata masing-masing. Salah satu wisata yang dapat dioptimalkan adalah wisata bahari. Kawasan-kawasan wisata bahari akan menjadi salah satu daya tarik wisatawan domestik, nasional, dan internasional. Hal tersebut telah diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang mengoptimalkan wisata bahari. Arah kebijakan pengembangan pariwisata kemaritiman/bahari untuk dibawa pada pariwisata yang berbasis kemaritiman pada masyarakat lokal. Upaya ini menjadi penting agar supaya kunjungan wisata yang tinggi dapat menciptakan *multiplier effect* bagi masyarakat lokal. Dengan demikian maka ekonomi lokal akan tumbuh yang selanjutnya diharapkan akan



mempersempit kesenjangan antara sektor ekonomi nasional dan sektor ekonomi lokal yang pada gilirannya tentu mempersempit kesenjangan antar wilayah

Pada sisi lain, dukungan terhadap potensi kemaritiman diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap sumber-sumber potensi. Perlindungan tersebut antara lain perlindungan terhadap *illegal fishing, unregulated fishing, unreported fishing dan overfishing*. Pencemaran laut dari limbah B3 dari kapal yang labuh jangkar, alih fungsi hutan mangrove dan lainnya merupakan hal yang perlu ditangani agar selaras dengan peningkatan potensi kemaritiman. Selain itu, dukungan regulasi untuk kawasan industri kemaritiman mutlak diperlukan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki wilayah produktif yang merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian dengan satuan luasan hektar. Luasannya adalah 226.451 ha. Hal ini merupakan salah satu keunggulan wilayah yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau yang dapat menunjang sektor perekonomian. Keunggulan wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai kawasan industri dan memiliki iklim investasi serta dukungan regulasi diharapkan mampu untuk menarik investasi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah perizinan yang telah diterbitkan naik dari 1.348 izin pada tahun 2019 menjadi 2.505 izin pada tahun 2020. Upaya-upaya perlu dilaksanakan secara konsisten agar realisasi PMA naik sebagaimana tahun 2019 sebesar 20.450 milyar rupiah menjadi 23.751 milyar rupiah pada tahun 2020.

Kenaikan investasi diharapkan berpengaruh terhadap industri dan perdagangan. Hal ini didukung dengan kawasan industri dengan jumlah semakin meningkat dari sejumlah 22 unit pada tahun 2011 menjadi 32 unit pada tahun 2020. Selanjutnya, pertumbuhan sektor perindustrian juga meningkat dari 5,61% pada tahun 2015 menjadi 13,84% pada tahun 2020.

Perhatian terhadap UMKM dan koperasi mutlak diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam peningkatan kinerja perekonomian. Persentase Koperasi Aktif pada tahun 2020 adalah sebesar 40,85% yang meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 39,93%. Keaktifan koperasi dan UMKM ini harus bersinergi atau menjadi



bagian dalam pengoptimalan sektor kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, industri kecil, konstruksi, perdagangan dan lainnya dalam peningkatan penerimaan PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu kunci utama keberhasilan pengembangan wilayah adalah kolaborasi yang bersinergi pembangunan antara Propinsi dengan Kabupaten/Kota, akhirnya akan berdampak langsung kepada peningkatan ekonomi daerah maritim dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.2 Tata Kelola Pemerintahan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan bentuk keselarasan dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Selanjutnya, tujuan ini diterjemahkan dalam sasaran global berupa mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat. Lembaga tersebut termasuk pemerintah daerah.

Lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan diterjemahkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui pencapaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa nilai Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 secara konsisten menunjukkan peningkatan. Nilai tersebut meningkat dari tahun 2019 sebesar 67,98 menjadi pada tahun 2020 adalah sebesar 68,57. Selain itu, nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang direpresentasikan dengan nilai SAKIP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 - 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan predikat BB dengan nilai 75,63 yang meningkat dari 75,28 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan ada peningkatan pada sisi akuntabilitas kinerja pemerintah. Selaras dengan sasaran nasional, berdasarkan hasil penilaian BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Daerah (LKPD), dari tahun 2017 sampai dengan 2020 Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil mendapatkan opini BPK dengan predikat WTP. Hal ini mencerminkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan hasil yang positif dan perlu untuk dipertahankan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menjaga komitmen yang kuat untuk meningkatkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta perbaikan terus menerus dalam akuntabilitas kinerja pembangunan termasuk kinerja keuangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik termasuk pemenuhan SPM yang merupakan menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tanggung jawab tersebut adalah untuk menyediakan anggaran pendapatan dan belanja untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Pencapaian pelaksanaan SPM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum seluruhnya maksimal. Antara lain capaian SPM pada tahun 2020 di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 96,01% dari target 100% dan Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 82,48% dari target 100%. Selanjutnya, capaian Pelayanan Dasar Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota adalah 92,68% dari target 100%. Berdasarkan hal-hal tersebut maka mempertahankan pemenuhan pelayanan dasar yang berupa SPM harus menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang

Selanjutnya, tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung dengan perencanaan, pengawasan serta aparatur yang baik. Pada sisi perencanaan diperlukan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen



perencanaan yang lain dan dokumen penganggaran. Konsistensi tersebut antara lain pada dokumen RPJMD, RKPD, RTRW dan APBD. Pada sisi pengawasan, level APIP didorong untuk ditingkatkan karena masih berada pada nilai level APIP 2+. Profesionalitas aparatur ditunjukkan indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020, indeks profesionalitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencapai angka 53,76. Hal ini menunjukkan profesionalitas aparatur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu ditingkatkan. Selain itu, profesionalitas aparatur ditunjukkan dengan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana yang timbul serta mampu menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.2.3 Sumber Daya Manusia

RPJMN Tahun 2020-2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. SDM berkualitas di Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan SDG's/TPB khususnya pada tujuan ke-4 yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Sasaran-sasaran pada tujuan ke-4 tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
2. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.



3. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Selaras dengan hal tersebut, pencapaian pelaksanaan SPM di bidang pendidikan belum seluruhnya maksimal. Capaian SPM pada tahun 2020 di Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 84,62% dari target 100% dan Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus dengan indikator Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 82,48% dari target 100%. Hal ini memerlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian amanah tersebut.

Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus diharapkan dapat menjadi jembatan untuk Pendidikan yang lebih tinggi dan selaras dengan kebutuhan tenaga kerja atau industri. Pada tahun 2020, persentase lulusan SMA/MA yang diterima di perguruan tinggi adalah sebesar 58,50% dan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha sebesar 60,10%. Meskipun kedua indikator tersebut meningkat dari tahun ke tahun, diperlukan upaya-upaya yang konsisten untuk pencapaian yang lebih baik.

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kualitas layanan pendidikan. Pada era Revolusi Industri Keempat (4.0), layanan Pendidikan harus dapat menyelaraskan dengan kondisi tersebut. Pada tahun 2020, persentase SMA/SMK yang memiliki sistem informasi manajemen berbasis IT sebesar 78%. Kondisi ini harus ditingkatkan hingga mencapai 100% untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dengan siswa. Pembelajaran jarak jauh ini disebabkan kondisi pandemi COVID-19 yang belum diketahui berakhirnya sehingga pembelajaran jarak jauh dengan siswa masih diperlukan untuk beberapa tahun mendatang. Pembelajaran jarak jauh dengan siswa ini harus didukung dengan infrastruktur komunikasi yang baik dan merata, sehingga tidak ada *blank spot* di



lingkungan siswa berada. Oleh karena itu, dukungan sarana dan prasarana pembelajaran jarak jauh dengan siswa mutlak diperlukan.

Dukungan pembelajaran jarak jauh harus diikuti dengan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pada tahun 2020, persentase guru yang sudah sertifikasi adalah sebesar 39,09% serta persentase kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 65,54%. Berdasarkan data tersebut, kualitas tenaga pendidik harus ditingkatkan sesuai kompetensi dan kondisi yang ada. Salah satu kualitas yang ditingkatkan adalah mengenai metode dan penyampaian pembelajaran jarak jauh.

Aspek lainnya yang perlu ditingkatkan adalah kurikulum yang mengadopsi muatan lokal. Muatan lokal tersebut mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau yang memiliki potensi antara lain potensi kemaritiman, industri dan wisata. Pendidikan yang memiliki *"link and match"* dengan kebutuhan kemaritiman, industri dan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan persentase lulusan SMK yang diterima di DU/DI dan berwirausaha yang sebesar 60,10% pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan SDM dapat dilakukan melalui jalur non formal, antara lain melalui Balai Latihan Kerja atau sarana non formal lainnya. Oleh karena itu, sinergitas antara Perangkat Daerah pengampu dengan *stakeholders* mutlak diperlukan. Muatan lokal yang mempertimbangkan kondisi Kepulauan Riau lainnya adalah budaya Melayu. Karakteristik budaya Melayu akan membentuk SDM yang memiliki karakter sesuai dengan kondisi yang diperlukan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pada sisi lain, SDM yang berkarakter tidak dapat lepas dari pertumbuhan dari anak sampai menjadi pemuda serta dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak mutlak diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda sebagai sumber daya manusia.



4.2.4 Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam rangka mendukung tujuan pertama SDGs/TPB di mana tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Sasarannya adalah pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 adalah sebesar 114.830 orang dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 142.610 orang. Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 adalah sebesar 5,78% dan meningkat pada tahun 2020 sebesar 6,13%.

Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (*poverty gap index*). Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan tren peningkatan yaitu pada tahun 2018 adalah 0,59, pada tahun 2019 sebesar 0,90 dan pada September tahun 2020 mencapai 1,21. Pada dimensi Indeks Keparahan Kemiskinan, Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Indeks Keparahan Kemiskinan adalah sebesar 0,23. Pada September tahun 2020, indeks ini mengalami peningkatan yang mencapai 0,42.

Tantangan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mengurangi kemiskinan. Kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut harus efektif dan efisien untuk mengurangi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.

Penurunan tingkat kemiskinan dapat dimulai dari desa. Pengoptimalan lembaga desa yang pada tahun 2020 berjumlah 667 lembaga dan PKK yang berjumlah 501 diharapkan menimbulkan inovasi-inovasi baru dalam membangun desa. Adanya desa Makmur di Kepulauan Riau akan berimplikasi penurunan



kemiskinan di wilayah tersebut. Pada sisi lain, pertumbuhan industri diharapkan menciptakan lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan tingkat pengangguran.

4.2.5 Kesehatan

Wabah pandemi COVID-19 telah melanda 213 negara di dunia sejak merebak pertama kali di Wuhan (China) pada akhir tahun 2019. Di Indonesia, sejak temuan penderita penyakit akibat COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020 hingga 16 Agustus 2021 telah terkonfirmasi 3.871.738 kasus positif COVID-19 dengan 3.381.884 kasus sembuh, dan 118.833 kasus meninggal yang tersebar pada 34 provinsi dan 387 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara itu di Provinsi Kepulauan Riau, sejak temuan kasus pertama pada tanggal 16 Maret 2020, hingga 16 Agustus 2021 telah terkonfirmasi 50.049 kasus positif COVID-19 dengan 46.079 kasus sembuh, dan 1.466 kasus meninggal.

Peningkatan kasus COVID-19 dari hari ke hari harus diikuti dengan langkah-langkah untuk antisipasinya. Hal-hal tersebut terutama terkait ketersediaan sumber daya kesehatan dalam penanganan COVID-19 antara lain tenaga kesehatan, alat kesehatan, tempat tidur di rumah sakit, obat-obatan, tabung oksigen dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, berdasarkan Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Kepulauan Riau 2020-2024, kondisi Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi luas bahaya pandemi COVID-19 sebesar 789.558,00 Ha dan berada pada kelas tinggi. Implikasinya, antisipasi penanganan COVID-19 meliputi sumber daya kesehatan dan cakupan layanan kesehatan.

Sumber daya kesehatan berupa sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan rumah sakit berjumlah 31 unit, puskesmas berjumlah 87 unit, klinik kesehatan berjumlah 99 unit dan posyandu berjumlah 1.407 unit. Pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau tersebut didukung oleh ketersediaan tenaga medis, yaitu dokter meliputi 647 orang dokter, 3.604 orang perawat, dan 1.775 orang bidan. Selanjutnya, jumlah rumah sakit rujukan penanganan COVID-19



adalah sejumlah 4 rumah sakit dari seluruh sarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau. Rumah sakit rujukan tersebut terdiri 2 rumah sakit berada di Batam, 1 rumah sakit berada di Karimun dan 1 rumah sakit berada di Tanjung Pinang. Oleh karena itu, penambahan rumah sakit rujukan penanganan COVID-19 harus dilaksanakan bagi daerah yang belum terdapat rumah sakit tersebut, antara lain di Bintan, Lingga, Natuna dan Kepulauan Anambas. Selain itu, diperlukan pengoptimalan dan penambahan penanganan COVID-19 meliputi antara lain ketersediaan tempat tidur, tenaga kesehatan, alat kesehatan dan pendukung lainnya.

Penanganan COVID-19 selaras untuk mendukung pencapaian SPM di bidang kesehatan. Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, terdapat dua jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diwajibkan bagi provinsi yaitu (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan (2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi. Pencapaian Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 menunjukkan capaian 100%. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan oleh di masa mendatang.

Upaya-upaya mengoptimalkan layanan kesehatan ditujukan untuk mengoptimalkan cakupan layanan kesehatan. Cakup layanan kesehatan antara lain layanan kesehatan untuk bayi, balita, ibu, gizi, serta dukungan fasilitas kesehatan, tenaga medis dan penanganan penyakit. Layanan kesehatan tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Dengan cakupan layanan kesehatan yang optimal diharapkan meningkatkan kualitas kesehatan yang ditunjukkan Usia Harapan Hidup. Indikator tersebut merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat. Usia Harapan Hidup di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah 69,96 tahun. Nilai tersebut berada di bawah level nasional yaitu sebesar 71,47 tahun meskipun nilai Usia



Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Riau secara konsisten menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.

Secara khusus, kualitas kesehatan pada anak dicerminkan pada prevalensi *stunting*. Hal tersebut dipengaruhi salah satunya oleh gizi anak. Pemerintah telah menetapkan gizi menjadi salah satu tujuan utama dalam RPJMN 2015-2020, khususnya gizi ibu dan balita. Dalam rencana pembangunan tersebut, pemerintah memonitor perkembangan kualitas gizi melalui dua indikator yaitu prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta). Prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau telah menunjukkan penurunan dalam 5 tahun terakhir dan yang pada tahun 2020 tercatat 7,2. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang konsisten untuk semakin meminimalkan prevalensi *stunting* di Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.6 Disparitas antar wilayah

Disparitas atau ketimpangan wilayah merupakan hal yang menjadi perhatian dalam SDGs/TPB. Pada tujuan ke-10 dinyatakan salah satu tujuan SDGs/TPB adalah mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara. Ketimpangan wilayah ini merupakan salah satu fokus pembangunan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Sasaran dalam tujuan TPB dalam hal ini antara lain meningkatnya PDRB, menurunnya koefisien gini dan menurunnya tingkat kemiskinan.

Pada sisi PDRB, Kota Batam adalah wilayah dengan kontribusi PDRB tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau yakni sebesar 60,80 persen atau 120.945,74 milyar rupiah pada tahun 2015 dan meningkat 63,97 persen atau 161.364,18 milyar rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya kontribusi terendah adalah Kabupaten Lingga yaitu pada tahun 2015 hanya sebesar 1,53 persen atau 3.043,43 milyar rupiah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 1,70 persen atau 4.292,43 milyar rupiah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kondisi Indeks Gini di Provinsi Kepulauan Riau berfluktuasi dari waktu ke waktu. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 berada dalam kategori ketimpangan rendah, yaitu 0,334. Nilai ini selaras dan di bawah target RPJMN dalam SDGs/TPB yaitu sebesar 0,41. Jika melihat tren Indeks Gini untuk Kabupaten/Kota maka Kota Tanjungpinang memiliki indeks tertinggi di tahun 2020 sebesar 0,35 dan terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar 0,28.

Berkaitan dengan tingkat kemiskinan, sebaran data penduduk miskin yang berada di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa lebih dari 50% penduduk miskin berada di Kota Batam yaitu 67,06 ribu jiwa dan Kota Tanjungpinang yaitu 19,98 ribu jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna memiliki jumlah penduduk miskin yang paling rendah dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 2,80 ribu jiwa dan Kabupaten Natuna sebesar 3,47 ribu jiwa dengan total jumlah penduduk miskin sebesar 131,97 ribu jiwa di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam sektor pembangunan bidang sosial, ketimpangan dapat dicerminkan dari perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari masing-masing kabupaten/kota. Secara umum, dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2015-2020), IPM di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2015 nilai IPM adalah sebesar 73,75 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 74,68. IPM untuk kabupaten/kota, Pada tahun 2020, nilai tertinggi terdapat di Kota Batam dan terendah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada tahun 2015 nilai IPM Kota Batam adalah sebesar 79,34 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 80,36. Pada tahun 2015 nilai IPM Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebesar 65,86 dan pada tahun 2020 adalah sebesar 66,84.

Pada sisi infrastruktur, ketimpangan wilayah dapat dicermati dari kondisi pembangunan infrastruktur di tiap kabupaten/kota. Kondisi geografis yang dihadapi oleh Kepri menjadikan sebuah tantangan bagaimana pembangunan



infrastruktur dapat seimbang antar kabupaten/kotanya. Kebutuhan infrastruktur Jalan, Jembatan, Air Minum, drainase, sanitasi, perhubungan dan lainnya perlu menjadi perhatian oleh pemerintah agar karakteristik kepulauan dengan tujuan percepatan pembangunan dapat menjangkau diseluruh wilayah provinsi Kepulauan Riau.

4.2.7 Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur merupakan prasarana yang digunakan untuk mengembangkan atau menunjang proses perbaikan kondisi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur akan mendorong pembangunan kota, permukiman dan/atau wilayah yang lebih inklusif, nondiskriminatif, serta berkelanjutan. Secara umum, kawasan kumuh merupakan implikasi dari pembangunan. Penanganan kawasan kumuh setidaknya meliputi aspek air minum, pengelolaan sampah dan akses jalan. Sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum yang berupa pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota, Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai nilai 92,68% dari target SPM sebesar 100%. Pada sisi air baku, persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk telah meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 73,64%. Hal-hal tersebut memerlukan upaya untuk dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten /kota sesuai SPM dan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang lebih baik lagi.

Provinsi Kepulauan Riau mengalami pertumbuhan ekonomi, penduduk, urbanisasi, pencemaran air. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan air Provinsi Kepulauan Riau meningkat. Kabupaten/Kota yang cepat tumbuh dengan angka urbanisasi yang cukup tinggi, seperti Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Bintan, serta Kabupaten Karimun memerlukan strategi tersendiri untuk pemenuhan kebutuhan airnya baik domestik (rumah tangga), perkotaan, maupun industri. Ketahanan air menjadi isu utama, karena tanpa ketersediaan air yang mencukupi maka pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah akan



terganggu. Ketahanan air dikaitkan dengan target penyediaan air bersih, mengacu pada target ke-6 *Sustainable Development Goals* (SDG's) yaitu terpenuhinya kebutuhan air minum pada 2030.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota merupakan hal vital. Hal ini sesuai dengan amanat SPM. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus menyediakan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota di masa mendatang. Penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020. Jumlah sampah yang ditangani (ton) pada tahun 2020 sebesar 314.192,80 ton yang menurun dari tahun 2019 sebesar 359.838,29 ton. Secara persentase, sampah yang ditangani pada tahun 2020 sebesar 68% yang menurun dari tahun 2019 sebesar 76%. Penyediaan prasarana umum ini menjadi perhatian dalam penanganan kawasan kumuh dan pemukiman di masa mendatang.

Jalan merupakan salah satu prasarana penting dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan dengan kondisi baik akan memudahkan aksesibilitas manusia, barang dan jasa. Jalan yang berkondisi baik di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 adalah 660,7 km dan menurun pada tahun 2020 yaitu sepanjang 540,11 km. Selanjutnya, kondisi jalan dan jembatan yang baik akan berpengaruh terhadap konektivitas antar wilayah. Persentase jembatan berkondisi baik tahun 2020 dapat digambarkan panjang jembatan berkondisi baik yakni 3.621,12 m dibagi dengan panjang jembatan provinsi yakni 4.145.70 m dengan persentase 87.34%. Kondisi jembatan di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadi bagian untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Provinsi Kepulauan Riau. Tingkat konektivitas antar wilayah strategis (km) di Provinsi Kepulauan Riau telah meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat konektivitas antar wilayah strategis sebesar 25,96 km yang meningkat menjadi 32,34 km di tahun 2020.



Sebagai provinsi kepulauan yang sebagian wilayahnya adalah perairan, sektor perhubungan perlu menjadi perhatian. Ketersediaan pelabuhan sebagai sarana transportasi utama sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran konektivitas transportasi antarsatu daerah ke daerah lainnya. Jumlah ketersediaan pelabuhan laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 adalah sebanyak 33 pelabuhan. Penambahan pelabuhan baru telah diusulkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Review Rencana Induk Pelabuhan Nasional. Dalam usulan tersebut terdapat 6 (enam) pelabuhan yang diusulkan.

Pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian adalah pembangunan infrastruktur di Wilayah Perbatasan. Selain itu, kondisi geografis Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan kepulauan menyebabkan masih banyak daerah yang belum merasakan aliran listrik dari PLN. Banyak daerah-daerah terpencil di Provinsi Kepulauan Riau yang belum teraliri listrik. Penyebab utamanya dikarenakan infrastruktur ketenagalistrikan belum tersedia. Hal ini disebabkan rata-rata wilayah yang belum mendapat pasokan listrik merupakan wilayah pedesaan yang secara geografis berada di pulau-pulau yang sangat jauh dari perkotaan atau merupakan wilayah perbatasan. Kondisi Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2020 adalah 93,72 yang harus ditingkatkan di masa mendatang.

Selain daripada itu, didalam pembangunan infrastruktur perlu juga memperhatikan *Global Climate Change*. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi, maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim. Pemanasan global dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dalam sistem fisik dan biologis. Perubahan yang disebabkan antara lain peningkatan intensitas badai tropis, perubahan pola presipitasi, salinitas air laut, perubahan pola angin, mempengaruhi masa reproduksi hewan dan tanaman, distribusi spesies dan ukuran populasi,



4.2.8 Budaya Melayu dan Nasional

Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia (masyarakat) serta mampu membentuk suatu peradaban manusia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khasanah budaya baik yang bersifat *tangible* (aset budaya yang kasat mata) maupun *intangible* (aset budaya yang tidak kasat mata). Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keberagaman kebudayaan Melayu di Kepulauan Riau merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia.

Pada sisi lain, kawasan perbatasan negara di Provinsi Kepulauan Riau yang terbuka dan membentang dari perairan di Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas hingga Kabupaten Natuna yang berbatasan langsung dengan negara-negara lain akan berakibat rentannya pengaruh budaya asing terhadap kebudayaan Melayu di Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut ditambah dengan terbukanya akses teknologi seluas-luasnya bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau yang membuat berkurangnya batas-batas suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian budaya Melayu.

Pelestarian budaya Melayu di Kepulauan Riau tercermin pada Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK). Pada tahun 2019, Provinsi Kepulauan Riau mencapai skor 60.90 dan menduduki peringkat ke-6 secara nasional. Skor tersebut di atas skor IPK secara nasional yaitu sebesar 55.91. Pencapaian ini harus ditingkatkan di masa mendatang dengan diikuti upaya-upaya yang konsisten. Pada aspek Ekonomi Budaya, aktivitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan harus didorong dengan keterlibatan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan.



Pelestarian kebudayaan didukung dengan pendidikan budaya. Pendidikan budaya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang inklusif agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam bidang Seni, Budaya, dan Bahasa khususnya budaya Melayu. Pencapaian pendidikan kebudayaan melibatkan unsur pendidikan yang ditunjukkan dengan Rata-rata Lama Sekolah 25 tahun ke atas, Harapan Lama Sekolah, Angka Kesiapan Sekolah, serta melibatkan peran guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya. Selain itu, budaya Melayu harus dapat dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan yang didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat sesuai konteks ketahanan sosial budaya.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki banyak warisan budaya. Hal ini memerlukan upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian obyek dan cagar budaya. Pelestarian ini meliputi warisan budaya *tangible* berupa benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya serta warisan budaya *intangible*. Warisan budaya *intangible* termasuk penggunaan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari. Selain itu, partisipasi pelestarian warisan budaya Melayu ditunjukkan dengan masyarakat yang menonton secara langsung pertunjukkan seni Melayu, mengunjungi peninggalan sejarah/warisan Melayu serta masyarakat yang menggunakan produk tradisional Melayu.

Ekspresi Budaya Melayu merupakan segala aktivitas yang dilakukan untuk mendukung proses penciptaan karya budaya Melayu yang dihasilkan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni Melayu. Selanjutnya Budaya Literasi merupakan aktivitas serta sarana/prasarana pendukung dalam memperoleh, menguji kesahihan, dan menghasilkan informasi dan pengetahuan untuk pemberdayaan kecakapan masyarakat. Budaya literasi ini harus dikembangkan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat.

Budaya Melayu yang terpelihara dengan baik akan berimplikasi pada budaya secara nasional. Salah satunya adalah budaya menghargai dan menghormati orang lain. Hal ini termasuk dalam kehidupan beragama. Implikasinya adalah terwujudnya harmonisasi antar umat beragama dan antar masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini menggambarkan cita-cita yang hendak dicapai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021–2026. Cita-cita tersebut ditunjukkan melalui Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pembangunan. Untuk memastikan Cita-cita tersebut tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan lainnya maka bab ini juga akan menunjukkan hubungan dan keterkaitan dengan RPJPD dan RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan yang harus diselaraskan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026.

5.1 VISI DAN MISI

Secara historis, Kepulauan Riau dikenal sebagai salah satu pusat pemerintahan, pusat pengetahuan, perdagangan dan pusat peradaban Melayu yang terjadi pada zaman kesultanan Riau Lingga. Hingga awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau adalah daerah yang makmur. Pada masa itu Kepulauan Riau dikenang dengan "zaman dolar". Dua masa tersebut menjadi bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Kepulauan Riau pernah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur.

Saat ini, kondisi dan tantangan yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau sangatlah besar. Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid-19 yang memberikan dampak cukup besar terhadap berbagai sektor termasuk sektor perekonomian yang di tahun 2020 mencapai angka negatif. Hal ini juga berdampak pada naiknya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta melemahnya penggerak perekonomian dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pemajuan terhadap kemakmuran masyarakat menjadi suatu cita-cita penting yang harus diwujudkan saat ini.



Selain itu, Kepulauan Riau yang berada di Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Posisi ini menempatkan Kepulauan Riau pada posisi strategis dalam perdagangan dunia. Kondisi ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepulauan Riau. Kesiapan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjawab tantangan tersebut menjadi pilar penting yang harus dibenahi dan ditingkatkan untuk mampu membuat Provinsi Kepulauan Riau bersaing tidak hanya pada level nasional tetapi juga internasional.

Disisi lain, letak Kepulauan Riau yang strategis tersebut tidak hanya menuntut agar Provinsi Kepulauan Riau mampu bersaing tetapi juga munculnya potensi ancaman terhadap masuknya kehidupan budaya global di dalam masyarakat. Budaya global yang masuk dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan mereduksi nilai-nilai agama dan budaya yang selama ini menjadi karakter dan pilar penting dalam perekat kehidupan masyarakat Kepulauan Riau.

Berdasarkan cita-cita besar untuk membawa kembali Kepulauan Riau untuk mencapai hal yang pernah dicapai pada kedua masa tersebut dan untuk menjawab tantangan yang saat ini dihadapi maka visi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 yaitu:

“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.

Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.



Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. **Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dilakukan dengan kembali memulihkan perekonomian Kepulauan Riau yang sempat terjatuh cukup dalam akibat Covid-19. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan dan mengandalkan potensi daerah yang dimiliki sebagai sumber daya pembangunan Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau yang secara demografis sebagai daerah maritim dengan potensi laut yang besar tentu menjadi suatu modal penting yang dapat digunakan dalam pembangunan ekonomi. Di sisi lain, berbagai potensi lainnya seperti perindustrian, pariwisata dan lain-lain yang akan dikelola secara maksimal sehingga hal tersebut akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemakmuran masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

2. **Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mencapai pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kinerja pemerintahan dapat berjalan dengan stabil dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan kedua hal tersebut dapat dicapai maka langkah yang ditempuh melalui perwujudan keterbukaan informasi, pemerintahan yang bebas KKN, dan pemerintahan yang tanggap, tangkas, dan tangguh. Selain itu, untuk menunjang pelaksanaan hal tersebut



maka kualitas dan penempatan pegawai yang sesuai juga menjadi fokus lainnya yang akan dibenahi.

3. **Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini juga tidak terlepas dari pengaruh Era Globalisasi yang menuntut SDM yang bisa bersaing dalam hal keahlian dan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas, kesehatan, dan daya saing SDM. Namun demikian, pembangunan manusia tersebut tidak hanya ditekankan pada pengembangan kualitas dan daya saing tetapi juga dengan menjadikan nilai-nilai iman dan takwa sebagai nilai fundamental dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, tujuan pembangunan manusia dalam misi ini dimaksudkan agar SDM di Kepulauan Riau memiliki jaringan pengaman sosial yang memadai dan menjadi SDM yang unggul dan berkarakter.

4. **Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.**

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dalam Pembangunan. Budaya Melayu merupakan pilar penting dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu dijaga kelestariannya. Budaya Melayu sebagai suatu filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau pernah mengantarkan Kepulauan Riau menjadi daerah maju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Upaya pelestarian budaya Melayu ini dimaksudkan untuk menjaga filosofi hidup masyarakat Kepulauan Riau tetap terjaga sehingga tidak tergerus oleh zaman. Di sisi lain, kemajemukan masyarakat Kepulauan Riau menjadi modal sosial tersendiri dalam beragama, berkebudayaan dan bermasyarakat. Oleh karena itu, untuk mempersatukan hal tersebut maka keselarasan, keserasian, dan toleransi antar



umar beragama, suku, dan etnis menjadi pilar penting yang harus dijaga dan dilestarikan melalui penguatan nilai-nilai budaya nasional di masyarakat.

5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau setiap daerah.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

5.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan indikasi kinerja pembangunan yang diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dari hasil pembangunan daerah. Adapun keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 2021–2026 ditunjukkan lebih lanjut pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Untuk Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan	1.1.1 Optimalisasi Sektor Perikanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	1.1.2 Peningkatan Sektor Pariwisata 1.1.3 Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup 1.1.4 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
	1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1.2.1 Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan. 1.2.2 Peningkatan PAD 1.2.3 Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi 2.1.2 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 2.1.3 Manajemen ASN yang Profesional 2.1.4 Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Dalam Menghadapi Bencana 2.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan	3.1 Penguatan Jaring Pengaman Sosial	3.1.1 Menurunnya Angka Kemiskinan 3.1.2 Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif
	3.2 Pembangunan Manusia yang Unggul dan	3.2.1 Meningkatnya Derajat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Misi	Tujuan	Sasaran
Taqwa	Berkarakter	Kesehatan Masyarakat 3.2.2 Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan 3.2.3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak 3.2.4 Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	4.1 Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	4.1.1 Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu 4.1.2 Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	5.1.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar 5.1.2 Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

5.2.2 Kesesuaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau

Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Di dalam Pasal 167 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah ditetapkan tentang syarat minimal yang harus termuat di dalam tujuan dan sasaran RPJMD. Pasal 167 ayat (7) tersebut



menyebutkan bahwa Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan hal tersebut maka paling tidak terdapat 7 kriteria utama yang harus termuat di Tujuan dan Sasaran RPJMD. Adapun hubungan antara ketujuh kriteria tersebut dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 5.2 Kesesuaian Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Permendagri 86 Tahun 2017

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Tujuan 1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Sasaran RPJMD 1.1.1 - 1.1.3
	Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran RPJMD 1.2.1 dan 1.2.3
	Analisis: Pada Tujuan 1.1 dan 1.2 menunjukkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terus tumbuh akan berdampak secara langsung	Analisis: Pada sasaran tersebut berfokus pada dukungan pemerintah terhadap sektor-sektor penggerak ekonomi masyarakat yang dapat menstimulus pendapatan ekonomi masyarakat. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor UMKM, industri, pertanian, pariwisata, perikanan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
	terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.	
Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 1.2.1 Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.
	Tujuan 5.1 Percepatan Pembangunan Infrastruktur & Pengintegrasian Antar Pulau	Analisis: Sasaran pada sektor-sektor tersebut menunjukkan upaya pemerintah untuk mengupayakan pemerataan pendapatan. Fokus pemerintah tidak hanya diarahkan pada sektor-sektor unggulan tetapi juga pada berbagai sektor yang perlu terus ditingkatkan kontribusinya terhadap perekonomian.
	Analisis: Pada kedua tujuan tersebut merupakan hasil dari upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut maka pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur daerah menjadi 2 syarat penting yang harus dibangun sebelum pendapatan masyarakat dapat bertumbuh secara merata.	Sasaran 5.1.1 - 5.1.2 Analisis: Infrastruktur menjadi salah satu syarat penting untuk mencapai pemerataan pendapatan masyarakat. Dimana pembangunan dan konektivitas infrastruktur yang baik akan mempermudah investasi masuk ke berbagai daerah dan akan ikut mendorong pemerataan pertumbuhan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
		ekonomi dan pendapatan masyarakat di berbagai daerah khususnya pada masyarakat yang berada pada daerah pesisir.
Kesempatan Kerja	Tujuan 1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Sasaran RPJMD 1.1.1 - 1.1.3
	Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran RPJMD 1.2.1 dan 1.2.3
	Tujuan 3.1 Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Sasaran RPJMD 3.1.1 – 3.1.2
	Analisis: Kesempatan kerja dapat diwujudkan jika suatu daerah terus bertumbuh secara ekonomi dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga akan berdampak pada terciptanya lapangan kerja serta menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan Tujuan 1.1, 1.2, dan 3.1 dimana tujuan ini berfokus pada terwujudnya	Analisis: Fokus pemerintah di dalam RPJMD ini diarahkan pada peningkatan pembangunan di berbagai sektor-sektor ekonomi terutama pada sektor-sektor unggulan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Pengelolaan berbagai sektor unggulan yang dilakukan secara optimal akan berdampak peningkatan daya tarik investasi yang akan berbanding lurus dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
	pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.	
Lapangan Berusaha	Tujuan 1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan. Tujuan 1.2 Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Analisis: Lapangan berusaha merupakan suatu kondisi ketersediaan dan kemudahan berusaha yang diciptakan pemerintah bagi para pelaku usaha. Hal ini merupakan bagian dari Tujuan 1.1 dan 1.2 yang hendak dicapai dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.	Sasaran RPJMD 1.1.1 - 1.1.3 Sasaran RPJMD 1.2.1 dan 1.2.3 Analisis: Fokus pemerintah pada perbaikan dan peningkatan sektor ekonomi tidak hanya akan didukung dengan kemudahan investasi. Penciptaan lapangan berusaha bagi masyarakat juga menjadi fokus penting yang akan ditingkatkan dan dikembangkan pada sasaran-sasaran ini. Misalnya hal tersebut ditunjukkan pada sektor pariwisata, peluang pada sektor tersebut diupayakan semaksimal mungkin agar dapat diperankan dengan optimal pada berbagai lapisan masyarakat, baik dari hulu sampai ke hilir.
Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik	Tujuan 2.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif Analisis: Sesuai dengan Misi 2 yang merupakan konsep besar dari Tujuan	Sasaran 2.1.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi Analisis: Meningkatnya akses pelayanan publik



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
	2.1 ini maka pemerintahan yang berbasis pada pelayanan masyarakat dapat terwujud dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan antisipatif. Terlaksananya tujuan tersebut secara maksimal akan mampu mempertemukan antara kualitas pelayanan yang dihasilkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.	kepada masyarakat dapat dilihat dari seberapa baik keterbukaan informasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini akan membantu masyarakat dalam mencari dan memperoleh informasi yang berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bermaksud meningkatkan keterbukaan informasi ini untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Meningkatkan daya saing daerah	Tujuan 3.2 Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.	Sasaran 3.2.1 – 3.2.4
	Tujuan 4.1 Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat Analisis: Daya saing daerah dapat diwujudkan melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Sumber daya manusia yang unggul akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan Tujuan	Sasaran 4.1.1 – 4.1.2 Analisis: Secara keseluruhan sasaran yang ada di dalam tujuan ini diarahkan untuk membangun manusia yang unggul dan berkarakter. Manusia yang unggul tercermin dari terwujudnya manusia yang sehat, terdidik, dan terlatih dengan baik. Sementara itu, manusia yang berkarakter adalah manusia yang kuat secara mental dan psikis. Semua hal tersebut telah terumuskan dengan jelas di keseluruhan sasaran pada



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kriteria Dalam Permendagri 86 Tahun 2017	Tujuan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau
	3.2 dan 4.1 dalam RPJMD.	Tujuan 3.2 dan 4.1 ini.
Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan 1.1 Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan. Analisis: Selain pembangunan manusia dan ekonomi, pembangunan lingkungan merupakan salah satu tujuan penting dalam RPJMD ini. Hal ini tercermin dari Tujuan 1.1 yang hendak dicapai dimana pengelolaan potensi daerah yang ada di Kepulauan Riau secara keseluruhan dilakukan dengan tetap ikut menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan yang kolektif dan seimbang di Kepulauan Riau.	Sasaran 1.1.4 Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari Analisis: Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya pembangunan yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan pembangunan yang ekspansif dan eksploitatif yang jika tidak diikuti dengan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan maka hal tersebut akan berdampak negatif terhadap Kepulauan Riau secara jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk memastikan pengawasan dan pengendalian keberlangsungan lingkungan hidup tetap terjaga secara holistik melalui perwujudan pada sasaran ini.

5.2.3 Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Setelah penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 maka indikator yang digunakan pada masing-masing Tujuan dan Sasaran di dalam RPJMD tersebut dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.3 berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 5.3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
					2022	2023	2024	2025	2026		
“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”											
MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK											
PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT											
(1.1) Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku			Miliar Rupiah	3.280	3.289	3.297	3.305	3.313	3.322	3.330
	(1.1.1) Optimalisasi Sektor Perikanan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.280	3.289	3.297	3.305	3.313	3.322	3.330	
	(1.1.2) Peningkatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.391	2.170	2.387	2.626	2.888	3.177	3.495	
	(1.1.3) Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	67,00	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38	
	(1.1.4) Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	25,31	27,00	27,10	27,20	27,30	27,40	27,50	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
	PDRB per Kapita ADHK			Juta Rupiah	78,04	78,96	80,07	81,91	83,90	86,02	88,27
	Indeks Gini			Indeks	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318
	Pertumbuhan Ekonomi			%	-3,8	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3
(1.2) Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi		(1.2.1) Peningkatan PDRB Pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	49.317	52.493	55.744	59.334	63.154	67.221	71.550
			Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	%	41,7	38,5	39,77	40,20	40,61	41,03	41,45
			Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	%	8,5	8,52	8,54	8,56	8,58	8,60	8,62
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	5,1	5,60	5,80	6,00	6,20	6,40	6,60
			Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	-11,32	2,40	3,00	3,40	3,80	4,00	4,20



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
							2022	2023	2024	2025	2026
			Persentase Koperasi yang berkualitas	%	51,04	51,04	52,04	53,04	54,04	55,04	56,04
			Persentase UMKM yang Naik Kelas	%	29,87	29,87	30,21	30,55	30,89	31,23	31,57
			Nilai Realisasi Investasi PMA	Miliar Rupiah	23.751	21.000	22.500	23.000	23.500	24.000	24.500
			Nilai Realisasi Investasi PMDN	Miliar Rupiah	14.249	11.000	12.500	13.500	14.500	15.000	15.500
	(1.2.2) Peningkatan PAD		Persentase Peningkatan PAD	%	-8,85	-1,22	5,59	5,24	5,53	5,53	5,91
	(1.2.3) Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)		Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.168	2.173	2.177	2.181	2.186	2.191	2.196
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,70	62,75	62,80	62,81	62,82	62,83	62,84
MISI 2 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN											
	Indeks Reformasi Birokrasi			Indeks	68,57	69,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17
(2.1) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	(2.1.1) Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi		Indeks SPBE	Indeks	2,80	2,80	2,85	2,90	2,95	3,00	3,18



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(2.1.2) Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan		Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B	B	B	B	B	B	B
			Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	(2.1.3) Manajemen ASN yang Profesional		Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (281)	Baik (283)	Baik (286)	Baik (294)	Baik (304)	Baik (314)	Sangat Baik (325)
	(2.1.4) Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,22	0,25	0,37	0,46	0,53	0,64	0,73
	(2.1.5) Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	n/a	1,09	1,13	1,25	1,33	1,20	1,25
MISI 3 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASIS IMAN DAN TAQWA											
(3.1) Penguatan Jaring Pengaman Sosial	Angka Kemiskinan			%	6,13	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63	5.57
	(3.1.1) Menurunnya angka kemiskinan		Angka Kemiskinan	%	6,13	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63	5.57
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,34	10,22	10,10	9,50	8,70	8,10	7,50
	(3.1.2) Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6562 (Desa Berkembang)	0.6697 (Desa Berkembang)	0.6779 (Desa Berkembang)	0.6861 (Desa Berkembang)	0.6901 (Desa Berkembang)	0.6895 (Desa Berkembang)	0.7101 (Desa Maju)



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(3.2) Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia			Indeks	75,59	76,26	76,7	77,14	77,58	78,03	78,47
	(3.2.1) Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,13	70,27	70,41	70,56	70,70	70,85	
		Prevalensi Stunting	%	16,82	16,30	15,80	15,30	14,00	13,30	12,80	
	(3.2.2) Meningkatkan Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,9	12,92	12,93	12,94	12,95	12,96	
		Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,12	10,13	10,14	10,15	10,16	10,17	10,18	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100	100	100	100	100	
	(3.2.3) Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,10	93.10	93.20	93.30	93.40	93.50	93.60	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,58	61.00	65,50	66,00	66,50	67,00	69,00	
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,44	74,30	75,05	76,03	77,78	78,21	79,36	
	(3.2.4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemuda	IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	N/A	0,315	0,504	0,58	0,672	0,672	0,672	
		SDI (<i>Sport Development Index</i>)	Indeks	35,37	12,5	6,84	20,29	24,91	32,47	7,67	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN											
(4.1) Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan			Indeks	N/A	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9
	(4.1.1) Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	N/A	28,09	28,11	28,16	28,21	28,24	28,27	
		Nilai Warisan Budaya	Nilai	N/A	48,24	48,84	49,64	50,44	51,24	52,04	
		Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	N/A	1,46	1,49	1,55	1,61	1,65	1,69	
		Nilai Budaya Literasi	Nilai	N/A	72,13	72,25	72,50	73	73,25	73,50	
	(4.1.2) Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	N/A	73,00	74,46	75,95	77,43	79,02	80,60	
		Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2,77	2,79	2,81	2,83	2,85	2,87	2,89	
MISI 5 Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan											
(5.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio Konektivitas			Rasio	38,42	38,42	41,33	44,25	47,17	50,08	65
	(5.1.1) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,72	94,50	95,50	96,00	96,20	96,40	96,60	
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,68	93,76	96,15	97,03	97,82	98,01	98,63	
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	83,84	87,06	91,32	93,06	95,8	97	100	
		Cakupan Pelayanan Drainase	%	45,1	45,1	48,1	51,3	54,3	57,3	60,3	
		Cakupan Pelayanan Persampahan	%	59,99	66,00	67,80	68,90	69,60	70,60	72,00	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Dasar 2020	Proyeksi Tahun Berjalan 2021	Target RPJMD				
							2022	2023	2024	2025	2026
			Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	n/a	170,54	145,27	123,73	75,36	37,28	0
			Persentase jalan kondisi baik	%	n/a	61,75	63,25	64,75	66,25	67,75	69,25
		(5.1.2) Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18	18	18	18	18	18	30
			Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	Rasio	20,42	20,42	23,33	26,25	29,17	32,08	35
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	27,27	27,27	31,82	36,36	40,91	45,45	50



5.3 KESELERASAN RPJMD 2021–2026 DAN RPJPD 2005–2025

5.3.1 Kesesuaian Misi RPJMD 2021–2026 dan Misi RPJPD 2005–2025

RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan yang menjadi acuan penting dalam penyusunan RPJMD di dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini untuk memastikan terintegrasinya pelaksanaan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau. Untuk memastikan terintegrasinya perencanaan RPJMD Tahun 2021–2026 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Riau 2005–2025 maka analisis terhadap kesamaan upaya pembangunan yang ditunjukkan oleh misi perlu dilakukan. Hasil analisis menunjukkan bahwa keseluruhan misi yang ada di dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 telah sesuai dan selaras dengan misi yang ada di dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005–2025. Adapun analisis terhadap keselarasan Misi Pembangunan dalam RPJMD 2021–2026 dan Misi Pembangunan dalam RPJPD 2005–2025 dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.4 berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 5.4 Keselarasan Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJPD 2005–2025 Provinsi Kepulauan Riau

MISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021-2026	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
1. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Memiliki Kepribadian dan Berakhlak Mulia	1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJPD adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah adanya kesamaan upaya dalam pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi dalam RPJPD
2. Menciptakan Sumber Daya Manusia Kepulauan Riau yang Berkualitas Pendidikan, Memiliki Etos Kerja dan Produktivitas yang Tinggi	2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJPD dimana salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan daya saing daerah di dalam RPJPD dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan di bidang Pemerintahan yang sesuai dengan Misi 3 RPJMD	
3. Meningkatkan Daya Saing Daerah Agar Mampu Melaksanakan Pembangunan Dalam Perekonomian Nasional dan Global Khususnya Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan serta Pariwisata	3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 2 dan Misi 4 RPJPD adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini yaitu adanya kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM/Masyarakat Kepulauan Riau	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

MISI RPJPD 2005-2025	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021-2026	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
4. Mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Dasar Hidupnya Secara Layak.	4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJPD dimana hubungan tersebut terlihat dalam upaya mewujudkan Masyarakat Kepulauan Riau yang berkepribadian dan berakhlak mulia di dalam RPJPD dilakukan dengan penanaman dan pengimplementasian nilai-nilai budaya yang sesuai dengan upaya yang akan dilakukan dalam misi 4 RPJMD	
5. Mewujudkan Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Salah Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dalam Bidang Industri Pengolahan, Perikanan dan Kelautan Serta Pariwisata	5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJPD dimana salah satu upaya yang dilakukan di dalam RPJPD yaitu mewujudkan pemerataan dan penyebaran pembangunan serta sarana dan prasarana antar pulau di seluruh wilayah yang sesuai dengan upaya yang akan dilakukan dalam Misi 5 RPJMD	

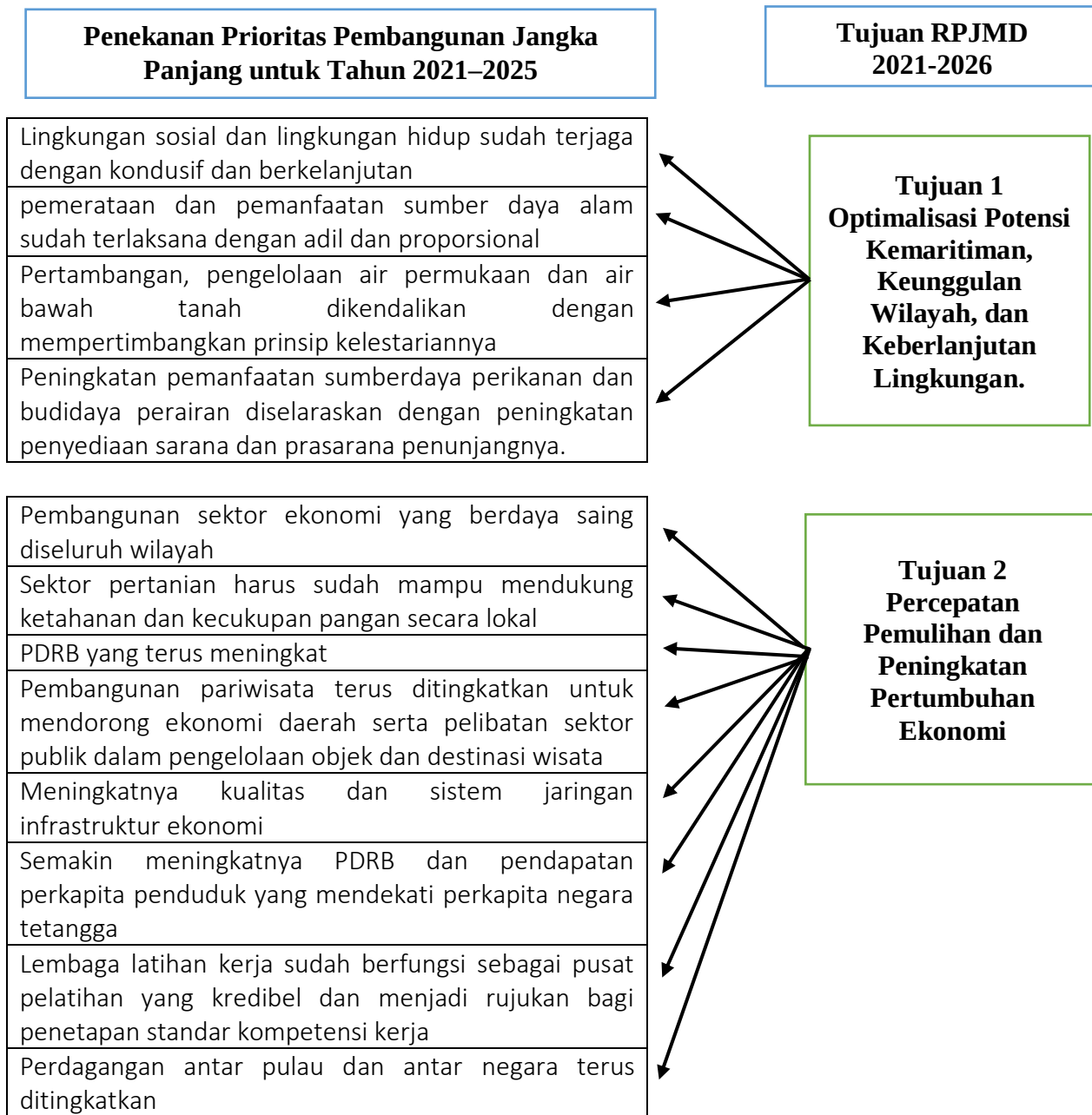


5.3.2 Kesesuaian Tujuan Pembangunan RPJMD 2021–2026 dan Penekanan Prioritas Pembangunan RPJPD di Tahun 2021–2025

Tujuan jangka panjang pembangunan daerah 2005-2025 adalah mewujudkan Kepulauan Riau yang berbudaya, maju dan sejahtera. Tujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam upaya mewujudkan tujuan jangka panjang nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana yang diarahkan dan ingin diwujudkan, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda bagi pembangunan lima tahunan sesuai periode pembangunan jangka menengah. Penekanan prioritas pembangunan pada setiap tahapan berbeda, dan berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya sampai tujuan jangka panjang tercapai. Untuk memastikan hal tersebut dapat tercapai maka penilaian terhadap kesesuaian antara Tujuan di dalam RPJMD 2021-2026 dan penekanan prioritas pembangunan jangka panjang untuk tahun 2021-2025 pada RPJPD perlu dilakukan. Adapun penilaian kesesuaian tersebut lebih lanjut dapat dilihat pada Skema 5.1 berikut:



Skema 5.1 Keselarasan Tujuan RPJMD dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang untuk Tahun 2021–2025





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Penekanan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang untuk Tahun 2021–2025

Tujuan RPJMD 2021-2026

Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip perencanaan yang modern, terbuka dan partisipatif

Pemanfaatan bidang informatika dan telekomunikasi, sudah menjadi bagian penting dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik

Pelayanan publik terus semakin baik dan maju dengan menggunakan kemajuan teknologi informasi dan peningkatan peran masyarakat sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sudah berorientasi kepada standar pelayanan dan kinerja

orientasi penyelenggaraan pemerintahan sudah mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah.

**Tujuan 3
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat dan Antisipatif**

Kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau terus meningkat yang ditandai dengan terus meningkatnya indikator pembangunan manusia

semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin yang berubah status ekonomi menjadi penduduk tidak miskin

Meningkatkan penurunan persentase dan jumlah keluarga miskin dan sangat miskin

**Tujuan 4
Penguatan Jaring Pengaman Sosial**

sumberdaya manusia yang berkualitas, cerdas, berakhlak dan berbudaya.

Pelayanan kesehatan terus ditingkatkan terutama dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan masyarakat yang rawan sosial dan miskin secara murah, mudah dan gratis namun tetap berkualitas

Kualitas pemuda dan remaja semakin meningkat

Pendidikan 12 tahun sudah berjalan dengan efektif

Kualitas lulusan sekolah di semua tingkatan sudah memiliki daya saing baik untuk memasuki pasar kerja maupun dalam memperoleh peluang meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi

**Tujuan 5
Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter**

Penekanan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang untuk Tahun 2021–2025

Tujuan RPJMD 2021-2026



Penyakit sosial seperti prostitusi dan perdagangan orang sudah dapat ditekan seminimal mungkin
Karakter dan budaya masyarakat di Kepulauan Riau terus semakin berkembang dan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai agama terus dilakukan di seluruh lapisan masyarakat
Terwujudnya pengamalan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari secara konsekuen sehingga membentuk budaya masyarakat yang madani dan didukung dengan semakin berkurangnya tindak pelanggaran yang merusak moral dan akhlak

**Tujuan 6
Pembinaan
Keagamaan,
Pelestarian Budaya,
dan Harmoni
Masyarakat**

Kawasan strategis dan cepat tumbuh terus berkembang
Sarana perhubungan terus dibina dan kualitasnya terus ditingkatkan
Elektrifikasi bidang kelistrikan dan energi ditingkatkan yang menjangkau 50 persen rumah tangga
Pengembangan perbatasan terus dilakukan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta terpadu pemanfaatannya terutama di pulau-pulau terluar dan perbatasan
Terintegrasinya pembangunan semua sektor maupun antar daerah
Pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan (Ro-Ro) dan angkutan antar pulau terus ditingkatkan dan sarannya terus ditingkatkan kualitasnya
Membangun sarana perekonomian kawasan perbatasan dalam kerangka koneksitas antar wilayah dan pengembangan potensi maritim Kepulauan Riau dan pengembangan antar sektor
Infrastruktur dasar sudah disediakan menurut standar pelayanan minimal dan optimal.
peningkatan kualitas rumah dan meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan lingkungan

**Tujuan 7
Percepatan
Pembangunan
Infrastruktur dan
Pengintegrasian Antar
Pulau**



pemukiman baik perkotaan dan pedesaan

Skema 5.1 tersebut menunjukkan bahwa prioritas pembangunan jangka panjang untuk tahun 2021–2025 telah terakomodir dan selaras dalam setiap tujuan yang hendak dicapai dalam RPJMD 2021–2026. Hal ini menunjukkan bahwa RPJMD Provinsi Kepulauan telah mendukung upaya untuk mencapai cita-cita jangka panjang daerah.

5.4 KESELERASAN RPJMD 2021 – 2026 DAN RPJMN 2020 - 2024

Selain RPJPD, RPJMN merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. Keselarasan antara RPJMN dan RPJMD dimaksudkan untuk meningkatkan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk menilai keselarasan antara RPJMN tahun 2020–2024 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 maka hal tersebut dilakukan dengan melihat upaya yang dilakukan di dalam RPJMD. Adanya kesamaan upaya di dalam RPJMD dan RPJMN menunjukkan adanya usaha yang sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya/misi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah selaras dengan misi/upaya yang dilakukan di dalam RPJMN 2020 - 2024. Adapun penilaian keselarasan tersebut antara misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021–2026 dan RPJMN Tahun 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 5.5 berikut:



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 5.5 Keselarasan Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di Bidang Ekonomi	
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 8 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi dalam RPJMN
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dalam pembangunan	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

MISI RPJMN 2020 - 2024	MISI RPJMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2021 - 2026	PEMBAHASAN	KESIMPULAN
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur	
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya			
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga			
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya			
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Selain penilaian terhadap kesamaan upaya antara RPJMN dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, penilaian terhadap keselarasan tujuan dan sasaran menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang ada di dalam RPJMD Provinsi telah selaras dengan apa yang hendak dicapai dalam RPJMN. Adapun keselarasan tujuan antara RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021–2026 dan RPJMN 2020–2024 dapat dilihat lebih lanjut pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Penyelarasan Tujuan RPJMD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau			RPJMN	
Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran RPJMN
1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	PDRB Sektor Perikanan	Berbagai indikator sektor perikanan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
	Percepatan	Pertumbuhan	Pertumbuhan	(*) Sasaran
	Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi	Ekonomi Makro
		Indeks Gini	Rasio Gini	(*) Sasaran Ekonomi Makro
		PDRB per Kapita ADHK	PDB Rill per Kapita	(*) Sasaran Ekonomi Makro



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau				RPJMN	
Misi RPJMD	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Sasaran RPJMN	
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Iman dan Taqwa	Penguatan Jaringan Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	(*) Sasaran Ekonomi Makro	
	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	(*) Sasaran Makro Pembangunan	
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur & Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio-rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	

Keterangan: (*) merupakan sasaran makro pembangunan RPJMN 2020–2024



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi uraian tentang strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Penyusunan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ini sebagai penyelarasan antara isu strategis dan permasalahan pembangunan Daerah dengan cita-cita yang telah dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, posisi dari strategi, arah kebijakan dan program pembangunan ialah sebagai jembatan yang berisi upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis Daerah agar tujuan pembangunan Daerah dapat tercapai.

6.1 STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program perencanaan pembangunan sebagai prioritas pembangunan Daerah dalam upaya untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Daerah serta memedomani prioritas Nasional. Dengan demikian, strategi harus disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan kondisi eksternal Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

6.1.1 Analisis SWOT

1) Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal Provinsi Kepulauan Riau dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Provinsi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kepulauan Riau. Kekuatan tersebut selanjutnya akan diterjemahkan menjadi modal pembangunan yang harus dioptimalkan dalam pencapaian tujuan, sedangkan kelemahan akan diterjemahkan sebagai aspek yang harus diperbaiki agar tidak menghambat Daerah dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

a. Kekuatan

1. Tersedianya aparatur yang mumpuni dan siap berkerja secara profesional;
2. Tersedianya Industri besar dan UMKM yang Tangguh;
3. Tersedianya Sarana dan prasarana pelayanan umum yang memadai;
4. Memiliki wilayah yang didominasi oleh laut;
5. Memiliki kawasan geopark yang tersebar di beberapa wilayah.
6. Kuatnya modal sosial keharmonian dan kerukunan masyarakat;
7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian;
8. Memiliki wilayah budidaya yang masih besar;
9. Berada di jalur perdagangan internasional yang terpadat di dunia;
10. Jumlah hotel dan restoran yang semakin meningkat; dan
11. Keunggulan budaya, nilai, adat dan seni sebagai jati diri masyarakat.

b. Kelemahan

1. Fasilitas kesehatan belum merata di setiap daerah;
 2. Banyaknya lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan;
 3. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan persampahan;
 4. Banyak bangunan yang tidak teratur;
 5. Perkembangan sektor perikanan yang masih stagnan;
 6. Keterbatasan kompetensi personil keamanan yang memiliki dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan;
 7. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi;
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi;
9. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri;
10. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara;
11. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar seperti listrik, jaringan komunikasi, sanitasi, dan pelayanan air bersih;
12. Rendahnya kompetensi dan modernisasi nelayan laut;
13. Rendahnya pengelolaan pertanian dan produksi pangan untuk menutupi kebutuhan pangan dalam daerah;
14. Rendahnya kemampuan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL);
15. Banyaknya BUMDes yang ada belum menunjukkan eksistensinya;
16. Rendahnya modernisasi koperasi dan UMKM;
17. Masih rendahnya bangunan berciri khas budaya Melayu; dan
18. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan.

2) Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal Provinsi Kepulauan Riau bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran. Peluang yang diidentifikasi harus dapat dikelola dengan baik sedangkan ancaman harus dapat diminimalisir agar tidak mengganggu upaya Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

a. Peluang

1. Maraknya relokasi pabrik Industri dari Cina sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina;
2. Terbukanya akses bantuan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai instrumen dana transfer;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

3. Banyaknya potensi investasi baik dalam Negeri maupun luar negeri yang tertarik berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau;
4. Pengembangan Kawasan Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus;
5. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan;
6. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar;
7. Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif;
8. Potensi industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan penggalian yang masih cukup besar; dan
9. Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau.

b. Ancaman

1. Pandemi Covid-19 masih belum selesai;
2. Masih banyaknya titik-titik rawan bencana banjir dan kebakaran;
3. Masih seringnya terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Masih maraknya alih fungsi hutan mangrove;
5. *Illegal fishing, unregulated fishing, dan unreported fishing* yang masih marak terjadi;
6. Ancaman gangguan keamanan dan kedaulatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga;
7. Kondisi lingkungan hidup yang terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan; dan
8. Arus orang yang masuk dengan berbagai budaya dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.1 Matrik Identifikasi Strategi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau

	Peluang (O)	Ancaman (T)
	1. Maraknya relokasi pabrik industri dari Cina sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika dan Cina; 2. Terbukanya akses bantuan dari Pemerintah Pusat melalui berbagai instrumen dana transfer; 3. Banyaknya potensi investasi baik dalam Negeri maupun luar negeri yang tertarik berinvestasi di Provinsi Kepulauan Riau; 4. Pengembangan Kawasan Free Trade Zone dan Kawasan Ekonomi Khusus; 5. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pembangunan wilayah laut, pesisir,	1. Pandemi Covid-19 masih belum selesai; 2. Masih banyaknya titik-titik rawan bencana banjir dan kebakaran; 3. Masih seringnya terjadi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); 4. Masih maraknya alih fungsi hutan mangrove; 5. <i>Illegal fishing, unregulated fishing</i>, dan <i>unreported fishing</i> yang masih marak terjadi; 6. Ancaman gangguan keamanan dan kedaulatan pada wilayah terluar yang berbatasan dengan negara tetangga; 7. Kondisi lingkungan hidup yang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	pulau-pulau kecil dan wilayah perbatasan; 6. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar; 7. Potensi pariwisata pantai, laut dan pulau-pulau kecil yang sangat prospektif; 8. Potensi industri pengolahan, konstruksi, pertambangan, dan penggalan yang masih cukup besar; dan 9. Besarnya potensi pemodal yang berpeluang menanamkan investasinya di Provinsi Kepulauan Riau.	terdegradasi akibat eksploitasi sumberdaya alam terutama pertambangan; dan 8. Arus orang yang masuk dengan berbagai budaya dapat mengancam kelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah dan moralitas masyarakat.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Kekuatan (S)	Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Memanfaatkan Peluang	Strategi Memanfaatkan Kekuatan Untuk Meminimalisir Ancaman
1. Tersedianya aparatur yang mumpuni dan siap berkerja secara professional; 2. Tersedianya industri besar dan UMKM yang Tangguh; 3. Tersedianya Sarana dan prasaran pelayanan umum yang memadai; 4. Memiliki wilayah yang didominasi oleh laut; 5. Memiliki kawasan geopark yang tersebar di beberapa wilayah. 6. Kuatnya modal sosial keharmonian dan kerukunan masyarakat; 7. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian;	• Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. [S2, S9, S10; O2, O3, O7, O9] • Meningkatkan kapasitas permodalan bagi UMKM. [S2, S9, S10; O2, O3, O7, O9] • Pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi. [S3, S6, S7; O1, O3, O8, O9] • Mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah. [S3, S6, S7, S10; O1, O3, O6, O7, O8, O9]	• Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan. [S1, S7; T5, T7] • pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial. [S4, S5; T2, T4, T7] • Peningkatan upaya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat. [S6, S11; T1, T6, T8] • Peningkatan penataan desa dan Kerjasama desa. [S4, S8, S11; T5, T7, T8] • Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

8. Memiliki wilayah budidaya yang masih besar; 9. Berada di jalur perdagangan internasional yang terpadat di dunia; 10. Jumlah hotel dan restoran yang semakin meningkat; dan 11. Keunggulan budaya, nilai, adat dan seni sebagai jati diri masyarakat.	• Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi. [S1, S3, S7, S11; O1, O3, O4, O6, O7, O9] • Divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. [S2, S10, S11; O7, O8] • Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi. [S1, S2, S3, S10, S11; O3, O7, O8] • Mengintensifkan penyebaran informasi publik secara <i>up to date</i> melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik. [S1, S3; O2, O3] • Memaksimalkan penerapan e-	dalam perekaman dan pendataan penduduk. [S1, S3; T8] • Percepatan penyediaan sarana dan prasaran pemulihan Kesehatan. [S1, S3, S6; T1] • Digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT. [S1, S3, S6; T1] • Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun. [S1, S3, S6; T1] • Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat. [S1, S3, S6; T1] • Meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	<i>government</i> guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan. [S1, S3; O2, O3] • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan. [S1, S3; O1, O3] • Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD. [S1, S8, S9; O2, O3, O6, O7] • Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel. [S1, S7; O2, O5, O9] • Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis	Bisnis, dan Publik). [S1; T3, T4, T5] • Optimalisasi pengelolaan potensi PAD. [S4, S5; T3, T1] • Menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional. [S4, S5, S8, S11; T3, T8] • Peningkatan kompetensi tenaga kerja. [S2, S2; T3] • Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi anak. [S1; T1] • Menjamin pemenuhan hak anak (PHA). [S6; T1, T8] • Peningkatan sanitasi lingkungan. [S4, S5; T2, T4] • Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	budaya lokal. [S4, S5, S10, S11; O3, O5, O7] • Jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi. [S1; O2] • Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan. [S1; O2] • Pengembangan perikanan tangkap. [S4; O6] • Pengembangan perikanan budidaya. [S8; O6] • Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor [S4, S8, S9; O3, O6] • Meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku. [S2, S10; O2, O5]	keluarga dan perawat. [S1; T1] • Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari. [S11; T4, T7] • Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga. [S11; T8] • Meningkatkan daya saing UMKM. [S2; T2, T6] • Penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM). [O2; T3] • Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial. [S6, S11; T3, T8] • Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan. [S3; T2, T6]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	• Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku. [S2, S10; O2, O5] • Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan. [S4, S8; O3, O8, O9] • Pengembangan industri galangan kapal. [S4, S9; O1, O3, O4, O9] • Pengembangan pariwisata maritim. [S4, S5, S11; O3, O7] • Peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan. [S4, S9; O1, O3, O4, O9] • Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga. [S4, S9; O1, O3, O4, O9] • Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut. [S4; O3, O8, O9]	



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	• Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan. [S4, S9; O1, O3, O4, O8, O9]	
Kelemahan (W)	Strategi Pemanfaatan Peluang Untuk Mengatasi Kelemahan	Strategi Mengatasi Kelemahan Untuk Meminimalisir Ancaman
1. Fasilitas kesehatan belum merata di setiap daerah; 2. Banyaknya lahan yang tidak memiliki bukti kepemilikan; 3. Belum optimalnya pengelolaan limbah dan persampahan; 4. Banyak bangunan yang tidak teratur; 5. Perkembangan sektor perikanan yang masih stagnan; 6. Keterbatasan kompetensi personil keamanan yang memiliki dalam Pengendalian dan Kenyamanan	• Penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor. [O1, O2; W7, W8] • Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. [O3, O4; W1, W10, W11] • Pemetaan potensi investasi. [O1, O2; W7, W8] • Optimalisasi penerapatan <i>Free Trade Zone</i> secara menyeluruh. [O4; W7,	• Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan. [T1; W8, W15, W16] • Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. [T5; W5, W12] • Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). [T1, T3, T8; W7, W8] • Mendorong eksistensi Lembaga



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Lingkungan; 7. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih cukup tinggi; 8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi; 9. Rendahnya kesesuaian kompetensi antara pencari kerja dengan kebutuhan industri; 10. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur perhubungan baik darat, laut maupun udara; 11. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar seperti listrik, jaringan komunikasi, sanitasi, dan pelayanan air bersih; 12. Rendahnya kompetensi dan modernisasi nelayan laut;	W10] • Pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman. [O5, O7; W8, W15] • Pengembangan <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota. [O5, O7; W8, W10, W15, W16] • Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan industri. [O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W18] • Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. [O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. [O1, O3, O4,	Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa. [T3, T8; W8, W15, W16] • Pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah. [T3; W13] • Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian. [T3; W13] • Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. [T1; W1] • Kemudahan layanan perizinan dengan <i>one day service</i>. [T8; W2, W15, W16] • Mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi. [T3, T8;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

13. Rendahnya pengelolaan pertanian dan produksi pangan untuk menutupi kebutuhan pangan dalam daerah; 14. Rendahnya kemampuan pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL); 15. Banyaknya BUMDes yang ada belum menunjukkan eksistensinya; 16. Rendahnya modernisasi koperasi dan UMKM; 17. Masih rendahnya bangunan berciri khas budaya Melayu; dan 18. Masih rendahnya pemberdayaan perempuan dalam berbagai sendi-sendi kehidupan.	O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. [01, 03, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata. [01, 03, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir. [01, 03, O4, O5, O8, O9; W2, W4, W10, W11] • Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan	W7, W8, W9] • Internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu. [T8; W17] • Pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi). [T1; W7, W8, W18] • Ketersediaan BUMD pertanian. [T3, T7; W7, W8, W13, W15, W16] • Pengembangan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi. [T2; W3, W4, W6] • Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana. [T2; W3, W4, W6] • Penguatan sektor pertanian berbasis kearifan lokal. [T3, T7, T8; W7, W8,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	ekonomi keluarga. [O3, O7, O8; W18] • Peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. [O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Perluasan kesempatan kerja. [O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Pembinaan Hubungan Industrial. [O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Perlindungan Ketenagakerjaan. O1, O3, O4, O5, O8, O9; W6, W7, W8, W9, W18] • Menjamin perlindungan sosial dan Kesehatan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan	W13, W15, W16] • Mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA). [T8; W1, W7, W8] • Mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat. [T2; W3, W4, W6] • Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama. [T6, T8; W17] • Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku. [T6, T8; W17]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	pelecehan. [O3, O7, O8; W1, W18] • Penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari. [O2, O5; W2, W3, W4, W14] • Peningkatan penataan desa dan Kerjasama desa. [O6, O8; W12, W13, W15] • Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas. [O2, O5, O9; W1, W6] • Pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan. [O2, O5; W2, W3, W4, W14] • Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur	• Meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah. [T2, T5; W10, W11]



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

	kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu. [O7; W15, W16, W17] • Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. [O3, O8, O9; W3, W14] • Meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh. [O2, O5; W2, W3, W4, W11, W14]	

Strategi yang telah dirumuskan dengan menggunakan analisis SWOT seperti terlihat pada Tabel 6.1 kemudian dituangkan dan disandingkan dengan sasaran yang telah ditentukan sesuai dengan konteksnya. Strategi tersebut dimaksudkan sebagai gambaran umum upaya yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran tersebut. Penentuan strategi untuk setiap sasaran dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut ini.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Visi: Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya		
Misi 1: Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat		
1.1. Optimalisasi potensi kemaritiman, keunggulan wilayah, dan keberlanjutan lingkungan	1.1.1. Optimalisasi Sektor Perikanan	1.1.1.1. Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan. 1.1.1.2. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan. 1.1.1.3. Pengembangan perikanan tangkap 1.1.1.4. Pengembangan perikanan budidaya 1.1.1.5. Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor 1.1.1.6. Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan. 1.1.1.7. Pengembangan industri galangan kapal. 1.1.1.8. Peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		1.1.1.9. Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga. 1.1.1.10. Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut. 1.1.1.11. Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan. 1.1.1.12. Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan.
	1.1.2. Peningkatan Sektor Pariwisata	1.1.2.1. Pengembangan <i>tourism linkage networking</i> antar kabupaten dan kota. 1.1.2.2. Divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. 1.1.2.3. Meningkatkan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi. 1.1.2.4. Pengembangan kawasan strategis pariwisata berbasis kemaritiman. 1.1.2.5. Pengembangan pariwisata maritim. 1.1.2.6. Pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		1.1.2.7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan. 1.1.2.8. Peningkatan kualitas destinasi pariwisata
	1.1.3. Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	1.1.3.1. Pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial. 1.1.3.2. Pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan.
	1.1.4. Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	1.1.4.1. Mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari. 1.1.4.2. Penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari.
1.2. Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	1.2.1. Peningkatan PDRB pada Sektor Konstruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan.	1.2.1.1. Meningkatkan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. 1.2.1.2. Meningkatkan kapasitas permodalan bagi UMKM 1.2.1.3. Pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi. 1.2.1.4. Mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		1.2.1.5. Peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri. 1.2.1.6. Penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor. 1.2.1.7. Meningkatkan daya saing UMKM. 1.2.1.8. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi. 1.2.1.9. Kemudahan layanan perizinan dengan <i>one day service</i>. 1.2.1.10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan 1.2.1.11. Pemetaan potensi investasi. 1.2.1.12. Meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku. 1.2.1.13. Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku. 1.2.1.14. Penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		(IKM).
	1.2.2. Peningkatan PAD	1.2.2.1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. 1.2.2.2. Optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD. 1.2.2.3. Optimalisasi penerapatan <i>Free Trade Zone</i> secara menyeluruh. 1.2.2.4. Optimalisasi pengelolaan potensi PAD.
	1.2.3. Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	1.2.3.1. Pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah. 1.2.3.2. Bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian. 1.2.3.3. Ketersediaan BUMD pertanian. 1.2.3.4. Penguatan sektor pertanian berbasis komoditas daerah.
Misi 2: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan		
2.1. Tata kelola pemerintahan yang bersih, kuat, dan	2.1.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi yang	2.1.1.1. Mengintensifkan penyebaran informasi publik secara <i>up to date</i> melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
antisipatif	Terbuka dan Terintegrasi	elektronik. 2.1.1.2. Memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan. 2.1.1.3. Meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik). 2.1.1.4. Mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk.
	2.1.2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	2.1.2.1. Peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel. 2.1.2.2. Meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal.
	2.1.3. Manajemen ASN yang Profesional	2.1.3.1. Mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas. 2.1.3.2. Jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi. 2.1.3.3. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		ASN yang berkelanjutan.
	2.1.4. Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana	2.1.4.1. Mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat. 2.1.4.2. Pengembangan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi. 2.1.4.3. Peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana.
	2.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.1.5.1. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Misi 3: Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa		
3.1. Penguatan jaring pengaman sosial	3.1.1. Menurunnya Angka Kemiskinan	3.1.1.1. Meningkatkan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 3.1.1.2. Meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial. 3.1.1.3. Peningkatan kompetensi tenaga kerja. 3.1.1.4. Perluasan kesempatan kerja. 3.1.1.5. Pembinaan hubungan industrial.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
	3.1.2. Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	3.1.1.6. Perlindungan ketenagakerjaan.
		3.1.2.1. Mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa.
		3.1.2.2. Peningkatan upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
3.2. Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter	3.2.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.1.2.3. Peningkatan penataan desa dan Kerjasama desa.
		3.2.1.1. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat.
		3.2.1.2. Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan.
		3.2.1.3. Digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT.
		3.2.1.4. Pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun.
		3.2.1.5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya kesehatan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 3.2.1.6. Peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi dan anak. 3.2.1.7. Peningkatan sanitasi lingkungan. 3.2.1.8. Penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat.
	3.2.2. Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	3.2.2.1. Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan industri. 3.2.2.2. Meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif. 3.2.2.3. Mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata. 3.2.2.4. Mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi. 3.2.2.5. Akselerasi pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
		3.2.2.6. Peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. 3.2.2.7. Internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu.
	3.2.3. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak	3.2.3.1. Peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga. 3.2.3.2. Menjamin pemenuhan hak anak (PHA). 3.2.3.3. Menjamin perlindungan perempuan dan anak bebas dari kekerasan dan TPPPO. 3.2.3.4. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga.
	3.2.4. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Pemuda	3.2.4.1. Menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional. 3.2.4.2. Mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 4: Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan		
4.1. Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat	4.1.1. Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	4.1.1.1. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal. 4.1.1.2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu.
	4.1.2. Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	4.1.2.1. Peningkatan partisipasi politik masyarakat. 4.1.2.2. Pemberdayaan dan pembinaan Ormas/LSM yang sesuai dengan peraturan perundangan. 4.1.2.3. Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama. 4.1.2.4. Menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku.
Misi 5: Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan		
5.1. Percepatan pembangunan	5.1.1. Percepatan Pembangunan	5.1.1.1. Percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi
infrastruktur dan pengintegrasian antar pulau	Infrastruktur Dasar	wilayah. 5.1.1.2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan. 5.1.1.3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Air Baku serta Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 5.1.1.4. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Sanitasi dan Air Minum. 5.1.1.5. Meningkatkan Akses terhadap Infrastruktur dan Pelayanan Dasar di Permukiman Kumuh. 5.1.1.6. Percepatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
	5.1.2. Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	5.1.2.1. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir. 5.1.2.2. Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

6.2 ARAH KEBIJAKAN/TEMA PEMBANGUNAN

Arah Kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan arah kebijakan pembangunan atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahapan arah kebijakan/tema pembangunan yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Kepulauan Riau.

**Tabel 6.3 Arah Kebijakan/Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026**

Arah Kebijakan				
Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5
Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.	Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.



Tabel 6.3 menunjukkan arah kebijakan/tema pembangunan setiap tahun dalam perencanaan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau.

1. Pembangunan pada tahun pertama akan diarahkan pada Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun pertama ini, fokus utama kebijakan pembangunan yang akan dijalankan ialah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi serta menjamin layanan Kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun pertama ini ialah peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, peningkatan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), percepatan penyediaan sarana dan prasarana pemulihan Kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, digitalisasi layanan kesehatan melalui layanan berbasis IT, mengembangkan minat dan bakat pemuda agar terhindar dari penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), perluasan kesempatan kerja, meningkatkan kualitas sistem pemberdayaan sosial, penguatan sektor pertanian berbasis kearifan lokal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, pemerataan layanan kesehatan dengan menyediakan layanan kesehatan sampai ke desa dan dusun, ketersediaan BUMD pertanian dan perkebunan, pemetaan potensi investasi, penambahan tenaga medis di pulau-pulau seperti Dokter Keluarga, bidan keluarga dan perawat, peningkatan gizi masyarakat melalui peningkatan gizi dan anak, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pendekatan kesejahteraan keluarga, menjamin perlindungan sosial dan Kesehatan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, jaminan pengembangan karir bagi apar ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, menjamin pemenuhan hak anak (PHA), bantuan permodalan bagi para pelaku usaha sektor pertanian, mendorong eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), mengembangkan layanan pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.



2. Pembangunan pada tahun kedua akan diarahkan pada Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kedua ini, diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun kedua ini fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun kedua ini ialah peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi, jaminan pengembangan karir bagi apra ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, percepatan pemerataan layanan kelistrikan untuk setiap wilayah, peningkatan penataan desa dan kerjasama desa, peningkatan upaya pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, optimalisasi penerapatan *Free Trade Zone* secara menyeluruh, pengembangan *tourism linkage networking* antar kabupaten dan kota, pengembangan wisata ramah kesehatan (model kegiatan wisata pada masa pandemi), divesifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan, meningkatkan daya saing UMKM, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), optimalisasi kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD, optimalisasi pengelolaan potensi PAD, kemudahan layanan perizinan dengan *one day service*, pemetaan potensi investasi, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan, peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri, peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan, akselerasi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, mengembangkan sistem pemulihan bencana yang terintegrasi, peningkatan sarana dan prasarana penanganan bencana pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, Pengembangan perikanan tangkap, Pengembangan perikanan budidaya, Pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, Pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan, peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola



komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.

3. Pembangunan pada tahun ketiga akan diarahkan pada Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ketiga diharapkan roda perekonomian sudah pulih dan mengalami peningkatan yang pesat, sehingga perlu terus ditingkatkan dengan tambahan investasi serta penguatan daya saing Daerah. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun ketiga ini ialah mendorong pembukaan wilayah industri baru berbasis potensi keunggulan daerah, peningkatan investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, penyederhanaan layanan perizinan investasi untuk memberikan kemudahan bagi para investor, perlindungan Ketenagakerjaan, jaminan pengembangan karir bagi apar ASN berprestasi, penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan, penyediaan fasilitas pendukung dalam upaya hutan lestari, pemulihan kawasan-kawasan tercemar serta berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pengembangan kawasan strategis industri dan pariwisata berbasis kemaritiman, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, pembinaan Hubungan Industrial, pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan, penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan, pengembangan perikanan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tangkap, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan akses pasar perikanan orientasi ekspor, pengembangan kawasan strategis industri sektor perikanan, penguasaan dan peningkatan industri kecil menengah (IKM), pengembangan industri galangan kapal, pengembangan pariwisata maritime, meningkatkan kontribusi sektor industri non migas terhadap PDRB harga berlaku, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan tatalaksana konsesi tata ruang laut untuk perkapalan, Pengembangan pelabuhan komersial dan niaga, Peningkatan tatalaksana konsesi migas bawah laut, Penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan sektor kelautan, Pengembangan kawasan strategis industri sektor kelautan, pemanfaatan jasa lingkungan dan perhutanan sosial, peningkatan sanitasi lingkungan, mendorong pemulihan kawasan-kawasan hutan yang telah tercemari, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, menumbuhkan jiwa entrepreneur muda yang peka terhadap pengembangan potensi regional, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi



terbarukan, serta meningkatkan pembangunan infrastruktur vital yang menjadi kebutuhan masing-masing wilayah.

4. Pembangunan pada tahun keempat akan diarahkan pada Pemerataan Pembangunan Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun ke empat diharapkan seluruh sendi-sendi aktivitas keseharian masyarakat sudah Kembali secara utuh dalam kondisi normal. Sehingga perekonomian semakin meningkat serta pengembangan investasi terus bertambah. Oleh karena itu, pada tahun keempat ini difokuskan untuk peningkatan pemerataan pembangunan sebagai hasil dari terbukanya kawasan-kawasan ekonomi baru di Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun keempat ini ialah ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, meningkatkan layanan SPBE (Administrasi pemerintahan, ASN, Bisnis, dan Publik), peningkatan kualitas pengawasan, perencanaan, pengelolaan, dan keuangan pembangunan yang terpadu dan akuntabel, meningkatkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi antar lembaga vertikal dan horizontal, mengintensifkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam perekaman dan pendataan penduduk, meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, Menjaga dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku, internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, serta meningkatkan infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh.



5. Pembangunan pada tahun kelima akan diarahkan pada Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.

Pada tahun kelima, diharapkan seluruh perencanaan mulai dari tahun pertama dapat berjalan dengan baik, sehingga tahun kelima ini difokuskan pada melanjutkan strategi-strategi pembangunan yang sebelumnya telah terbukti memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Daerah. Fokus strategi pada periode ini pada dasarnya akan terus melakukan inovasi-inovasi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan capaian empat tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam lima tahun tersebut akan senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional, serta dilaksanakan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) sebagai salah satu komitmen pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan demikian, sertiap tahun strategi-strategi yang terkait dengan pelestarian budaya serta penerapan tata Kelola pemerintahan yang baik akan terus dilaksanakan, seperti internalisasi dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya Melayu, menjamin perlindungan sosial dan kesehatan perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan pelecehan, mengintensifkan penyebaran informasi publik secara *up to date* melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, memaksimalkan penerapan e-government guna memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan, meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel, mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya manusia yang meritokratis dan berintegritas, mengembangkan peta rawan bencana dan sistem tanggap bencana yang antisipatif dengan melibatkan kesiapsiagaan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dan unsur kebudayaan lainnya dalam pengembangan budaya Melayu, menjaga dan menumbuhkan pola



komunikasi yang baik antar umat beragama, menjaga dan menumbuhkan pola komunikasi yang baik antar etnis dan suku.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Program pembangunan Daerah merupakan program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan Pemerintahan Daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Identifikasi program pembangunan daerah, dilakukan dengan cara menganalisis tujuan, sasaran, dan strategi yang telah dirumuskan, kemudian dijabarkan program pembangunan Daerah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan demikian akan terlihat alur keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan dengan program pembangunan daerah.

Berikut ini adalah daftar program pembangunan Daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Program pembangunan tersebut dikelompokkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan.

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- f. Program Pemasaran Pariwisata;
- g. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- h. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - i. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
 - j. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
 - k. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - l. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 - m. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
 - n. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - o. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - p. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
 - q. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
 - r. Program Pengelolaan Persampahan;
 - s. Program Pengelolaan Hutan;
 - t. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan;
 - u. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - v. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - w. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);
 - x. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - y. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 - z. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - aa. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - bb. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- cc. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- dd. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
- ee. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
- ff. Program Pengembangan Ekspor;
- gg. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- hh. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- ii. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- jj. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- kk. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
- ll. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- mm. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- nn. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- oo. Program Promosi Penanaman Modal;
- pp. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
- qq. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- rr. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ss. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- tt. Program Perekonomian dan Pembangunan;
- uu. Program Pengelolaan Pelayaran;
- vv. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- ww. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- xx. Program Penyuluhan Pertanian;
- yy. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- zz. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- aaa. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- bbb. Program Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- ccc. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
- d. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi;
- e. Program Pendaftaran Penduduk;
- f. Program Pencatatan Sipil;
- g. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- h. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
- i. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- k. Program Penataan Organisasi;
- l. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- m. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan;
- n. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- o. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
- p. Program Pengelolaan Perbatasan;
- q. Program Pelayanan Penghubung;
- r. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
- s. Program Pengelolaan Arsip;
- t. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip;
- u. Program Perizinan Penggunaan Arsip;
- v. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- w. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- x. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- y. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- z. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - aa. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - bb. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi;
 - cc. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
 - dd. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - ee. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
 - ff. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
 - gg. Program Kepegawaian Daerah;
 - hh. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - ii. Program Penanggulangan Bencana; dan
 - jj. Program Penanganan Bencana.
- 3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa.** Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:
- a. Program Pemberdayaan Sosial;
 - b. Program Rehabilitasi Sosial;
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - d. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - f. Program Hubungan Industrial;
 - g. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - h. Program Perencanaan Tenaga kerja;
 - i. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 - j. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
 - k. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - l. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- m. Program Penataan Desa;
 - n. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
 - o. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
 - p. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - q. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - r. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - s. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman;
 - t. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 - u. Program Pengembangan Kurikulum;
 - v. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - w. Program Pengelolaan Pendidikan;
 - x. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan;
 - y. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - z. Program Perlindungan Perempuan;
 - aa. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - bb. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - cc. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 - dd. Program Perlindungan Khusus Anak;
 - ee. Program Pengendalian Penduduk;
 - ff. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
 - gg. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera;
 - hh. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - ii. Program Pengembangan Daya Saing Olahraga; dan
 - jj. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
- 4. Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan Nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.** Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- a. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- b. Program Pengelolaan Permuseuman;
- c. Program Pengembangan Kebudayaan;
- d. Program Pembinaan Sejarah;
- e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- f. Program Pembinaan Perpustakaan;
- g. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno;
- h. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
- i. Program Kesejahteraan Rakyat;
- j. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; dan
- k. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

5. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan. Program pembangunan Daerah pada misi ini ialah:

- a. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan;
- b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan;
- c. Program Kawasan Permukiman;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Program Pengembangan Perumahan;
- f. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- i. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian;
- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- k. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- l. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- m. Program Penataan Bangunan Gedung;
- n. Program Pengembangan Permukiman;
- o. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- p. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- q. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
- r. Program Penyelenggaraan Jalan;
- s. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum; dan
- t. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi pada setiap misi. Program pembangunan Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD secara rinci tercantum pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
(3)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	Target	Rp (7)	Target	Rp (9)	Target	Rp (11)	Target	Rp (13)	Target	Rp (15)	Target	Rp (17)	(18)
1		Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat																
1.1		Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan																
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	3.280	3.289	3.297		3.305		3.313		3.322		3.330		3.330		
1.1.1		Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan																
		Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	3.280	3.289	3.297		3.305		3.313		3.322		3.330		3.330		
(a)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					13.971.782.755		38.719.801.284		16.605.523.740		8.706.612.617		8.966.093.860		8.966.093.860	Dinas Kelautan Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	319196,89	306463,67	307076,60		307690,60		308305,60		308921,60		309538,60		309538,60		
		Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%		110,57	115		115,50		116		116,10		116,30		116,30		
(b)		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya					8.952.367.825		13.653.804.681		13.548.002.291		8.888.480.941		8.108.369.934		8.108.369.934	Dinas Kelautan Perikanan
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21421,10	33920,50	26491,92		28473,50		30614,37		32955,78		35288,63		35288,63		
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPI (%)	%		108,47	109,55		110,65		111,20		111,76		112,32		112,32		
(c)		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					825.578.154		777.725.277		762.068.419		599.105.783		477.343.038		477.343.038	Dinas Kelautan Perikanan
		Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	6205,9	1331,88	1334,88		1337,88		1340,88		1343,88		1346,88		1346,88		
(d)		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil					6.923.237.054		6.393.705.868		8.042.054.194		5.239.938.217		4.918.032.377		4.918.032.377	Dinas Kelautan Perikanan
		Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	0	4	3		4		4		4		4		4		
(e)		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					1.155.039.965		2.470.357.327		2.946.697.527		2.402.200.437		3.077.982.093		3.077.982.093	Dinas Kelautan Perikanan
		Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	90	90		90		90		90		90		90		
(f)		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam					738.997.214		696.162.817		635.339.001		433.807.521		450.325.856		450.325.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6,34%	6,34%	11,34%		16,34%		21,34%		26,34%		31,34%		31,34%		
(g)		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					1.805.394.308		1.700.748.478		1.552.153.911		1.059.805.930		1.100.160.761		1.100.160.761	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29,18%	29,18%	31,18%		33,18%		35,18%		37,18%		39,18%		39,18%		
(h)		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan					3.578.043.000		1.648.806.671		4.514.250.795		4.623.474.898		4.799.525.572		4.799.525.572	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	82,11	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1.1.2		Peningkatan sektor pariwisata																
		Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	3.391	2.170	2.387		2.626		2.888		3.177		3.495		3.495		
(a)		Program Pemasaran Pariwisata					7.545.550.492		6.668.506.980		6.253.073.323		4.280.995.275		4.467.706.520		4.467.706.520	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	408.005	325.000	370.500		474.240		607.027		776.995		994.553		994.553		
		Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	7.153.725	1.630.000	1.988.600		2.426.092		2.959.832		3.610.995		4.405.414		4.405.414		
		Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	n/a	3.257,3	3.996,8		5.142,1		6.632,4		8.575,5		11.113,5		11.113,5		
(b)		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					11.512.798.697		14.747.659.666		15.444.589.525		11.090.631.760		11.512.936.033		11.512.936.033	Dinas Pariwisata
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,73	2,2	2,3		2,4		2,5		2,6		2,7		2,7		
		Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,66	1,7	1,75		1,8		1,9		2,0		2,1		2,1		
		Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	22,76	22,00	22,70		23,80		40,00		41,30		43,00		43,00		
(c)		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif					1.830.468.872		1.853.991.501		2.013.021.466		2.100.541.682		2.180.525.198		2.180.525.198	Dinas Pariwisata
		Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	7,75%	3%	3%		3%		3%		3%		3%		3%		
(d)		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual					2.980.881.392		2.656.410.747		2.474.478.214		2.100.541.682		2.180.525.198		2.180.525.198	Dinas Pariwisata
		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	n/a	2%	2%		2%		2%		2%		2%		2%		
(e)		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					1.050.153.935		989.284.002		902.850.159		616.463.320		639.936.743		639.936.743	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80		80		80		80		80		80		
1.1.3		Penurunan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup																
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	67,00	69,47	69,73		69,95		70,18		70,28		70,38		70,38		
(a)		Program Perencanaan Lingkungan Hidup					139.698.474		157.809.046		152.827.147		167.381.470		185.030.639		185.030.639	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
(b)		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					148.397.112		146.096.046		141.394.318		154.859.756		171.188.703		171.188.703	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	n/a	76,1	76,75		77,39		78,04		78,04		78,04		78,04		
		Indeks Kualitas Air	Indeks	54,00	56,60	56,70		56,80		56,90		56,90		56,90		56,90		
		Indeks Kualitas Udara Ambian	Indeks	90,59	88,14	88,25		88,35		88,46		88,46		88,46		88,46		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,06	59,07	59,08		59,09		59,10		59,1		59,1		59,1		
(c)		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					51.859.454		73.280.296		89.170.386		91.327.899		118.506.804		118.506.804	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	14,28		14,28		28,57		42,58		57,14		57,14		

		(d)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20%	26,67%	33,33%		43.846.587	43.166.695	41.777.485		45.756.090		50.580.770		50.580.770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									33,33%			40,00%		40,00%		46,67%		46,67%	
		(e)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100%	100%	100%		14.722.468	14.494.179	14.027.721		15.363.626		16.983.620		16.983.620	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									100%			100%		100%		100%		100%	
		(f)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang merah Penbagaan	%	0	28,57%	42,85%		123.166.202	207.627.507	250.791.711		159.823.824		165.909.526		165.909.526	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									57,14%			71,43%		85,71%		85,71%		85,71%	
		(g)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100%	100%	100%		35.535.153	40.167.383	38.874.698		42.576.861		47.066.312		47.066.312	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									100%			100%		100%		100%		100%	
		(h)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	83,33%	57,14%	57,14%		35.911.277	35.354.432	34.216.640		37.475.201		41.426.715		41.426.715	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									71,43%			71,43%		85,71%		85,71%		85,71%	
		(i)	Program Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	%	22%	24%	26%		65.252.024	64.240.266	62.172.852		68.093.779		75.273.822		75.273.822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									27%			28%		30%		30%		30%	
									72%			71%		70%		70%		70%	
1	1		Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	25,31	27,00	27,10			27,20	27,30		27,40		27,50		27,50	
		(j)	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	25,31	27,00	27,10		532.379.192	524.123.987	507.256.394		277.782.030		307.077.326		307.077.326	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
						5 ha	5 ha	5 ha						10 ha		10 ha		10 ha	
		(k)	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	88	500	500		81.536.494	184.330.575	267.597.549		195.387.819		215.990.185		215.990.185	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									500			500		500		500		500	
		(c)	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS		2	2		38.894.590	36.640.148	100.316.684		102.743.887		71.104.083		71.104.083	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
									2			2		2		2		2	
1	2		Percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rp	78,04	78,96	80,07			81,91	83,90		86,02		88,27		88,27	
						0,334	0,336	0,332			0,329	0,325		0,321		0,318		0,318	
						%	-3,8	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6		4,9 - 5,8	5,0 - 5,9		5,1 - 6,1		5,2 - 6,3		5,2 - 6,3	
1	2	1	Peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rp	49.317	52.493	55.744		59.334	63.154	67.221		71.55		71.55		71.55	
						41,70	38,50	39,77		40,20	40,61	41,03		41,45		41,45		41,45	
						8,50	8,52	8,54		8,56	8,58	8,60		8,62		8,62		8,62	
						5,1	5,6	5,8		6,0	6,2	6,4		6,6		6,6		6,6	
						-11,32	2,40	3,00		3,40	3,80	4,00		4,20		4,20		4,20	
						51,04	51,04	52,04		53,04	54,04	55,04		56,04		56,04		56,04	
						29,87	29,87	30,21		30,55	30,89	31,23		31,57		31,57		31,57	
						23.751	21.000	22.500		23.000	23.500	24.000		24.500		24.500		24.500	
						14.249	11.000	12.500		13.500	14.500	15.000		15.500		15.500		15.500	
		(a)	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	22,3%	22,3%	25,86%		9.315.254.351	8.775.315.503	8.008.615.299		5.468.257.965		5.676.475.924		5.676.475.924	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									29,36%			32,86%		36,36%		39,86%		39,86%	
		(b)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Baso Wirauusaha Baru	%	27,52%	27,52%	28,02%		1.544.115.231	1.454.613.885	1.327.524.123		906.429.400		940.944.026		940.944.026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									28,52%			29,02%		29,52%		30,02%		30,02%	
		(c)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29,18%	29,18%	31,18%		1.805.394.308	1.700.748.478	1.552.153.911		1.059.805.930		1.100.160.761		1.100.160.761	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									33,18%			35,18%		37,18%		39,18%		39,18%	
		(d)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6,34%	6,34%	11,34%		738.997.214	696.162.817	635.339.001		433.807.521		450.325.856		450.325.856	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									16,34%			21,34%		26,34%		31,34%		31,34%	
		(e)	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoprasian	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8,8%	8,8%	13,8%		1.106.551.091	1.042.412.217	951.336.556		649.569.683		674.303.716		674.303.716	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									18,8%			23,8%		28,8%		33,8%		33,8%	
						0,24%	0,24%	0,44%		0,64%		0,84%		1,04%		1,24%		1,24%	
		(f)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diawasi	%	1,53%	1,53%	2,53%		291.709.426	274.801.112	250.791.711		171.239.811		177.760.206		177.760.206	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									3,53%			4,53%		5,53%		6,53%		6,53%	
		(g)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya	%	3,67%	3,67%	5,77%		129.648.634	183.200.741	167.194.474		114.159.874		118.506.804		118.506.804	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
									7,87%			9,97%		12,07%		14,17%		14,17%	
		(h)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	41,7	38,5	38,5		1.568.748.471	2.051.848.301	1.972.894.792		1.278.590.589		1.398.380.290		1.398.380.290	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						41,7	38,5	38,5		39	39	39,5		39,5		39,5		39,5	
		(i)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri	%	0	46,92	60		181.508.088	256.481.038	234.072.263		159.823.824		165.909.526		165.909.526	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
									70			80		90		100		100	
		(j)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Informasi industri		0	0	1		100.000.000	100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
									1			1		1		1		5	
		(k)	Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	6,5	3,5	3,5		1.789.151.140	2.161.768.746	1.805.700.318		1.278.590.589		1.327.276.208		1.327.276.208	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
									3,5			3,5		3,5		3,5		3,5	

		(f)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan						207.437.814			311.441.260			300.950.053			216.903.761			237.013.609			237.013.609	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kegiatan Perdagangan	%	0	35%	50%			55%		60%		65%		70%		70%		70%					
		(fm)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						1.458.547.132			1.355.685.485			1.237.239.107			844.783.068			876.950.351			876.950.351	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Nilai Inflasi	%	0	3,09+1	3,14+1			3,13+1		3,03+1		2,94+1		2,85+1		2,85+1							
		(n)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						9.658.823.231			9.801.239.654			8.944.904.353			6.107.553.260			6.340.114.028			6.340.114.028	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	0	50	70			70		70		70		70		70		70					
		(o)	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen						1.439.099.837			1.282.405.188			2.073.211.476			742.039.181			782.144.908			782.144.908	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20	<20			<20		<20		<20		<20		<20		<20					
		(p)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						1.050.153.935			989.284.002			902.850.159			616.463.320			639.936.743			639.936.743	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80			80		80		80		80		80		80					
		(q)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						894.575.574			1.025.924.151			652.058.448			719.207.206			462.176.537			462.176.537	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	0	0			95		100		100		100		100		100					
			Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%			100			100		100		100		100		100		100					
		(r)	Program Pelayanan Penanaman Modal						3.286.592.871			3.370.893.638			3.076.378.320			3.150.812.523			2.180.525.198			2.180.525.198	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	80			90		100		100		100		100		100					
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93	82,5	83,15			84,2		84,88		85,2		86,1		86,1		86,1					
		(s)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						972.364.755			916.003.706			835.972.369			856.199.055			592.534.021			592.534.021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100			100		100		100		100		100		100					
		(t)	Program Promosi Penanaman Modal						2.139.202.461			2.198.408.894			2.006.333.687			2.054.877.732			1.422.081.651			1.422.081.651	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	0	5%	7%			8%		10%		11%		12%		12%		12%					
		(u)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal						350.051.312			329.761.334			300.950.053			205.487.773			213.312.248			213.312.248	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	n/a	100	100			100		100		100		100		100		100					
1	2	2	Peningkatan PAD																						
			Persentase Peningkatan PAD	%	-8,85	-1,22	5,59			5,24		5,53		5,53		5,91		5,91		5,91					
		(a)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						272.262.131			256.481.038			351.108.395			239.735.735			248.864.289			248.864.289	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-18,77%	-25,58%	11,91%			7,31%		9,49%		7,89%		11,08%		11,08%		11,08%					
		(b)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						181.508.088			170.987.358			234.072.263			159.823.824			165.909.526			165.909.526	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	97,67%	90%	91%			91%		92%		92%		93%		93%		93%					
		(c)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah						3.873.302.195			3.768.780.733			5.300.191.890			3.734.770.188			3.928.235.106			3.928.235.106	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
			Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-12,81%	2,50%	4,89%			4,99%		5,05%		5,23%		5,24%		5,24%		5,24%					
			Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1	1			1		1		1		1		1		1					
			Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	15.300			15.606		15.918		16.236		16.561		16.561		16.561					
			Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	29,69	20	22			24		25		27		30		30		30					
		(d)	Program Perekonomian dan Pembangunan						945.240.706			920.741.033			1.193.565.904			814.963.139			845.994.952			845.994.952	Biro Administrasi Perekonomian
			Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	n/a	90%	90%			92%		93%		95%		100%		100%		100%					
		(e)	Program Pengelolaan Pelayanan						26.837.267.233			25.281.702.285			23.072.837.397			15.754.062.614			16.353.938.987			16.353.938.987	Dinas Perhubungan
			Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	0,00	0,00	20,00			40,00		60,00		80,00		100		100		100					
			Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	12,00	14,00	16			18		20		22		24		24		24					
1	2	3	Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)																						
			Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Milliar Rp	2.168	2.173	2.177			2.181		2.186		2.191		2.196		2.196		2.196					
			Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	62,70	62,75	62,80			62,81		62,82		62,83		62,84		62,84		62,84					
		(f)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian						1.039.425.547			3.554.094.379			3.310.450.583			3.343.556.409			2.441.240.168			2.441.240.168	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	-4,50%	1,29%	1,35%			1,42%		1,49%		1,56%		1,64%		1,64%		1,64%					
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	-2,60%	0,52%	0,74%			0,77%		0,80%		0,94%		1,03%		1,03%		1,03%					
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	1,40%	2,5%	2,8%			3,0%		3,2%		3,5%		3,8%		3,8%		3,8%					
		(g)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian						710.831.011			1.996.888.079			1.946.143.676			2.253.515.913			1.693.462.233			1.693.462.233	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,10%	1,10%	1,20%			1,25%		1,30%		1,35%		1,40%		1,40%		1,40%					
			Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	55,21%	55,21%	59,49%			62,08%		68,81%		76,99%		76,99%		76,99%		76,99%					
		(h)	Program Penyuluhan Pertanian						316.302.008			607.466.053			552.520.085			964.750.922			523.962.046			523.962.046	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Ratio	99,84	99,84	99,88			99,91		99,95		99,98		99,99		99,99		99,99					

					Persentase Penyuluh yang meningkatkan Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%		40%	40%	42%		45%		48%		51%		56%			56%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

	(a)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah						3.860.806.278		3.818.874.021		3.659.479.542		3.935.423.218		4.289.538.287		4.289.538.287	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Presentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	(b)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						2.009.999.399		1.988.168.775		1.905.185.382		2.048.846.209		2.233.204.352		2.233.204.352	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Presentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	56%	66%	81%		88%		94%		99%		100%		100%			
	(c)	Program Penataan Organisasi						1.210.890.652		1.395.906.988		1.277.365.781		1.318.546.545		1.385.344.542		1.385.344.542	Biro Organisasi dan Korpri
		Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	n/a	37,10	38,60		40,1		41,6		43,10		44,60		44,60			
	(d)	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum						1.098.737.090		1.035.051.138		966.911.212		1.013.137.990		1.075.417.181		1.075.417.181	Biro Hukum
		Presentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100,00%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	(e)	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan						659.973.513		628.989.211		596.326.957		633.587.301		693.264.805		693.264.805	Biro Administrasi Pembangunan
		Presentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	85%	88%	90%		92%		95%		97%		100%		100%			
	(f)	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa						459.604.407		455.070.641		433.284.479		465.715.206		502.676.237		502.676.237	Biro Pengadaan Barang/Jasa
		Presentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,00	8,1	8,2		8,3		8,4		8,5		8,6		8,6			
	(g)	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah						951.828.696		939.144.212		873.040.686		1.003.603.168		1.161.085.302		1.161.085.302	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
		Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,0221	3,0221	3,03		3,04		3,04		3,05		3,06		3,06			
	(h)	Program Pengelolaan Perbatasan						900.000.000		855.000.000		810.000.000		1.080.000.000		1.215.000.000		1.215.000.000	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
		Presentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	n/a	35		45		55		75		90		90			
	(i)	Program Pelayanan Penghubung						1.296.823.892		1.896.823.892		2.041.823.892		2.186.665.087		2.311.573.258		2.311.573.258	Biro Humas Protokol dan Penghubung
		Presentase kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	85	85	86		87		88		87		90		90			
	(j)	Program Pengelolaan Arsip						466.735.082		527.618.135		577.824.102		705.964.661		732.992.647		732.992.647	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Ketersediaan Arsip	%	1,01	10,97	13,98		17,24		20,75		24,5		28,5		28,5			
	(k)	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						116.683.771		146.560.593		167.194.474		194.071.786		213.312.248		213.312.248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	18,33	23	27,5		60,83		62,5		64,16		65,83		65,83			
	(l)	Program Perizinan Penggunaan Arsip						77.789.180		109.920.445		144.901.827		171.239.811		201.461.562		201.461.562	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Izin Penggunaan Arsip	Skor	0	5	5		5		5		5		5		5			
	(m)	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah						3.128.169.040		3.141.909.887		3.229.495.038		3.542.736.661		3.733.584.648		3.733.584.648	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Presentase keseluruhan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	n/a	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%			
	(n)	Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah						6.675.239.358		7.400.157.549		8.199.769.523		8.725.952.007		9.430.724.359		9.430.724.359	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Presentase keseluruhan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	(o)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						2.265.424.697		2.443.996.974		2.543.740.744		2.766.265.040		3.013.301.183		3.013.301.183	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Presentase pemanfaatan hasil kelibangan	%	65	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%			
		Presentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	30%	35%		40%		45%		50%		55%		55%			
	(p)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi						704.766.603		732.802.965		668.777.896		684.959.244		711.040.826		711.040.826	Inspektorat
		Presentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	97%	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau			
		Presentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	N/A	5%	7%		14%		21%		28%		35%		35%			
	(q)	Program Penyelenggaraan Pengawasan						1.660.563.041		1.587.739.757		1.560.481.756		1.826.557.084		1.896.108.868		1.896.108.868	Inspektorat
		Presentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10%	<10%	<10%		<9%		<8%		<7%		<6%		<6%			
		Presentase Tindakanlanjut Hasil Pengawasan APHP dan BPK	%	84%	84%	80%		82%		83%		84%		85%		85%			
		Presentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkedar Pengawasan	%	50%	50%	75%		80%		85%		90%		95%		95%			
		Presentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BR ke Atas	%	65%	70%	78%		81%		84%		87%		87%		87%			
		Rata-Rata Nilai Peer Review Antar Irian	%	n/a	n/a	78%		80%		82%		84%		86%		86%			
	(r)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						9.651.430.666		9.648.572.370		9.362.890.538		10.274.388.661		11.139.639.600		11.139.639.600	Inspektorat
		Presentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	58,5	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%			
		Presentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	41,185	80%	80%		81%		82%		83%		84%		84%			
		Presentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	(s)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						465.153.076		478.764.604		34.542.378.305		1.016.022.879		1.130.554.913		1.130.554.913	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PUKADA, RUKG, PUPRES)			-	-		-		70		-		-		-			
		Presentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
	(t)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						913.544.375		907.363.813		825.022.349		901.578.676		1.008.269.687		1.008.269.687	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Presentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21%	80%	83%		85%		88%		90%		93%		93%			
	(u)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						88.245.002.823		71.710.404.638		68.974.967.719		69.434.074.648		70.174.076.926		70.174.076.926	Sekretariat DPRD

			Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	68	70	72		74		76		78		80		80	
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n/a	n/a	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2	1	3	Managemen ASN yang Profesional															
			Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (281)	Baik (283)	Baik (286)		Baik (294)		Baik (304)		Baik (314)		Sangat Baik (325)		Sangat Baik (325)	
		(a)	Program Kepegawaian Daerah					1.994.707.813	2.254.906.596		2.469.474.214		3.035.068.956		3.780.764.396		3.780.764.396	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	%	n.a	43,42	44,63		45,90		47,19		48,42		49,46		49,46	
			Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	n.a	70	73		77		80		82		85		85	
			Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	n.a	95	95		96		96		97		98		98	
		(b)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.085.399.672	1.077.700.431		1.058.090.529		1.181.652.125		1.328.612.630		1.328.612.630	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	n.a	30	32		34		38		40		50		50	
2	1	4	Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana															
		(a)	Program Penanggulangan Bencana	Indeks	0,22	0,25	0,37	1.594.678.198	1.381.333.589	0,53	2.344.066.524	0,64	3.132.838.551	0,73	1.284.613.758	0,73	1.284.613.758	Badan Penanggulangan Bencana
			Indeks Pencegahan Bencana	Indeks	1,15	1,28	1,99		2,66		3,18		3,40		3,44		3,44	
			Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan	Indeks	0,20	0,20	0,32		0,32		0,44		0,44		0,56		0,56	
			Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,20	0,24	0,46		0,48		0,57		0,76		0,80		0,80	
		(b)	Program Penanganan Bencana					444.746.674	418.967.882		382.362.615		391.614.032		406.525.741		406.525.741	Dinas Sosial
			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	1	5	Ketenteraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
			Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks	n/a	1,09	1,13		1,25		1,33		1,20		1,25			
		(a)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					842.716.121	964.857.237		936.289.054		1.016.022.879		1.113.963.960		1.113.963.960	Satpol PP
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibad dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	n/a	16,67	50		53,33		56,67		60		63,33		63,33	
			Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	n/a	33,33	41,67		50		58,33		66,67		75		75	
			Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100		100		100		100		100		100	
		(b)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					23.223.831	28.642.925		26.617.094		36.274.813		41.467.332		41.467.332	Satpol PP
			Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindaklanjutnya	%	42,85	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00	
3			Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat dan berdaya saing dengan berbasiskan iman dan taqwa															
3	1		Penguatan nilai-nilai pengamalan sosial															
3	1	1	Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	6,13	6,07	6,01	5,74		5,69		5,63		5,57		5,57	
				Angka Kemiskinan	%	6,13	6,07	6,01	5,74		5,69		5,63		5,57		5,57	
				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,34	10,22	10,10	9,50		8,70		8,10		7,50		7,50	
		(a)	Program Pemberdayaan Sosial					849.846.796	846.387.424		514.958.980		584.498.555		606.754.838		606.754.838	Dinas Sosial
			Persentase lembaga/oros penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	6,55	2,98		3,27		1,79		2,08		2,38		19,05	
			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	24,00	24,40	52,00		46,00		21,60		31,60		24,00		100,00	
		(b)	Program Rehabilitasi Sosial					1.026.428.235	966.933.512		588.301.622		607.535.815		675.478.913		675.478.913	Dinas Sosial
			Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	100	0,00	25,00		25,00		25,00		25,00		25,00		25,00	
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	0	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		(c)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					1.609.263.660	1.515.986.133		922.356.181		944.672.957		980.643.805		980.643.805	Dinas Sosial
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,17		0,15		0,08		0,08		0,09		0,72	
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,10	2,92	0,79		0,71		0,47		0,47		0,47		5,84	
			Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	31,63		31,63		31,63		31,63		31,63		31,63	
		(d)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja					7.831.836.595	7.460.520.142		7.257.266.892		7.498.186.945		4.557.672.727		4.557.672.727	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	11,82	44,51	51,28		56,41		61,54		66,67		71,79		71,79	

				Presentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	1,5	4	6		8		10		12,5		15		15			
				Presentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	29,17	34,56	40,00		45,45		50,00		53,85		57,14		57,14			
			(a)	Program Penempatan Tenaga Kerja					2.005.629.673		2.114.482.891		1.852.058.448		1.867.835.263		1.412.176.537		1.412.176.537		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64,31	60,00	61,00		62,00		63,00		64,00		65,00		65,00			
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,50	67,52	67,55		67,57		67,59		67,62		67,65		67,65			
			(f)	Program Hubungan Industrial					1.055.066.706		1.143.034.602		986.852.603		1.001.051.737		815.958.883		815.958.883		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	n/a	30	35		40		45		50		55		55			
				Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100			
			(g)	Program Pengawasan Ketenagakerjaan					1.459.945.511		1.589.756.648		1.520.449.840		1.336.671.642		1.175.212.285		1.175.212.285		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	3,65	10,8	11,8		12,8		13,8		14,8		15,8		15,8			
				Presentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	94,8	94,9	95,25		95,5		95,75		96		96,25		96,25			
				Presentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	74,71	75	75,5		76		76,5		77		77,5		77,5			
			(h)	Program Perencanaan Tenaga kerja					238.894.590		273.780.296		300.316.684		302.743.887		271.104.083		271.104.083		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100			
			(i)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi					75.929.727		98.853.531		116.877.790		118.495.924		97.402.722		97.402.722		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang disuulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	n/a	n/a	33,3		33,3		33,3		33,3		33,3		33,3			
			(j)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi					62.964.863		74.426.765		83.438.895		84.247.962		73.701.361		73.701.361		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	n/a	23	25,8		28,7		34,4		40,2		45,9		45,9			
			(k)	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi					166.854.322		181.754.795		193.470.563		194.522.351		180.811.769		180.811.769		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
				Presentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	%	n/a	n/a	6,25		12,5		18,75		25		31,25		31,25			
3	1	2		Masyarakat desa yang tangguh dan adaptif																	
				Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6562 (Desa Berkembang)	0,6697 (Desa Berkembang)	0,6840 (Desa Berkembang)		0,6928 (Desa Berkembang)		0,7017 (Desa Berkembang)		0,7108 (Desa Maju)		0,7201 (Desa Maju)		0,7201 (Desa Maju)			
			(a)	Program Penataan Desa					156.540.000		156.540.000		156.540.000		176.540.000		176.540.000		176.540.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Presentase Kabupaten/Kota yang desanya telah diata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
			(b)	Program Peningkatan Kerjasama Desa					206.600.000		146.600.000		146.600.000		166.600.000		166.600.000		166.600.000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Presentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	0	0	1,45		2,91		5,45		8		10,91		10,91			
			(c)	Program Administrasi Pemerintahan Desa					572.695.022		534.854.770		515.901.090		535.901.090		557.847.195		557.847.195		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Presentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pedes	%	14,05	18,13	25,68		34,74		43,81		52,87		61,93		61,93			
			(d)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat					1.165.000.000		1.165.000.000		1.165.000.000		1.175.836.642		1.255.836.642		1.255.836.642		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	26,66	36,65	44,64		52,64		56,63		64,63		72,62		72,62			
3	2			Pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter																	
				Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76,26	76,7		77,14		77,58		78,03		78,47		78,47			
3	2	1		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
				Angka Harapan Hidup	Tahun	69,96	70,13	70,27		70,41		70,56		70,7		70,85		70,85			
				Prevalensi Stunting	%	16,82	16,30	15,80		15,30		14,00		13,30		12,80		12,80			
			(a)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					116.896.449.648		79.152.788.287		49.621.545.229		57.642.571.883		66.690.953.952		66.690.953.952		Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian per 1.000 Kelahiran Hidup	92	128	125		124		123		122		121		121			
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	11,1	15	14		13		12		11		10		10			
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	7,2	16,3	15,8		15,3		14,8		13		12,8		12,8			
				Presentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
				Presentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
				Jumlah Kabupaten/Kota sehat (KKS)	Kab/Kota	7	2	2		5		5		7		7		7			
				Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90,46	90,00	90,00		92,00		92,00		93,00		93		93			
				Capaian OCHA yang mendapatkan ARV	%	63,78	60,00	64,00		68,00		72,00		76,00		80,00		80,00			
				Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	42,86	42,86	43,00		43,00		57,14		57,14		67,00		67,00			
				Presentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	89,63	92,90	93,60		94,10		94,60		95,00		95,50		95,50			

			Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	5,00	57,00	57,00		71,00		71,00		71,00		71,00			
			Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,65	87,88	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00	
			Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96,51	95,50	96,00		97,00		97,00		98,00		98,00		98,00	
			Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	87,86	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00	
			Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	93,18	90,00	92,00		94,00		96,00		96,00		96,00		96,00	
			Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Internasional		Internasional		Internasional	
			Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	-	-	Satelit		Satelit		Utama		Utama		Utama		Utama	
			Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	
			Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	78,5	78,5	78,5		79,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Indeks	n/a	80	81		82		83		84		85		85	
	(b)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						31.448.460.607		30.603.730.669		25.590.270.959		26.146.493.488		27.706.819.010	27.706.819.010	Dinas Kesehatan
			Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	49,43	50	52		54		56		58		60		60	
			Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Dilat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85,70	60	65		70		75		80		85		85	
			Persentase Jumlah Pegawai yang Mengikuti Dilat >20jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	15,00	25	30		35		40		50		60		60	
	(c)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan						2.707.166.635		916.238.550		633.962.090		1.207.877.061		1.219.265.427	1.219.265.427	Dinas Kesehatan
			Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	57,14	57,14	71,43		71,43		86,00		86,00		100,00		100,00	
	(d)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera						139.342.983		146.651.774		144.796.992		193.465.671		221.159.105	221.159.105	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	63,27	58,00	59,30		59,70		60,30		60,75		61		61	
	(e)	Program Pengawasan Keamanan Pangan						205.779.700		269.227.877		258.657.456		370.635.092		261.153.440	261.153.440	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
			Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	94%	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%	
3	2	Meningkatnya mutu dan akses layanan pendidikan																
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	12,9	12,92		12,93		12,94		12,95		12,96		12,96	
			Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,12	10,13	10,14		10,15		10,16		10,17		10,18		10,18	
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100		100		100		100		100		100	
	(a)	Program Pengembangan Kurikulum						283.930.226		419.869.199		368.376.891		371.335.362		381.374.124	381.374.124	Dinas Pendidikan
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	n/a	59,20	60,00		60,50		61,00		61,50		62,00		62,00	
			Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	n/a	28,30	30,00		30,50		31,00		31,50		32,00		32,00	
			Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	17,00	20,00	24,32		27,03		29,73		32,43		35,14		35,14	
	(b)	Program Pengelolaan Pendidikan						63.845.183.326		94.412.723.772		82.834.048.706		83.499.296.970		85.756.635.526	85.756.635.526	Dinas Pendidikan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	96,02	97,00	98,00		98,50		99,00		99,50		100,00		100,00	
			Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	82,49	83,00	84,00		85,00		87,00		88,00		90,00		90,00	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	77,2	77,20	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00	
			Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,40	0,39	0,38		0,37		0,36		0,35		0,34		0,34	
			Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	95,61	95,78	95,94		96,11		96,27		96,44		96,60		96,60	
			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	93,31	95,77	97,43		99,08		100,00		100,00		100,00		100,00	
			Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	29,3	33,70	33,75		33,80		33,85		33,90		33,95		33,95	
	(c)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan						1.108.679.929		1.639.489.253		1.438.424.051		1.449.976.174		1.489.175.152	1.489.175.152	Dinas Pendidikan
			Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	653,51	712,80	724,76		726,42		728,07		729,70		730,00		730,00	
	(d)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan						135.204.869		199.937.714		175.417.567		176.826.363		181.606.726	181.606.726	Dinas Pendidikan
			Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Meng peroleh Ijin	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
3	2	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dan Anak																
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,10	93,20		93,30		93,40		93,50		93,60		93,60	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,58	61,00	65,50		66,00		66,50		67,00		69,00		69,00	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	73,44	74,30	75,06		76,03		77,78		78,21		79,36		79,36	
	(a)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan						409.320.013		423.199.211		558.958.976		156.435.132		369.750.379	369.750.379	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,34	5,34	5,4		5,5		5,6		5,7		5,8		5,8	
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,75		28,90		29		29,10		29,30		29,30	
			Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,11	11,10	11,10		11,10		12		12		12		12	
	(b)	Program Perlindungan Perempuan						197.402.560		243.464.859		246.474.291		293.221.407		338.649.880	338.649.880	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPOG)	%	33,42	44,25	44,07		43,88		43,7		43,51		43,33		43,33	
	(c)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga						200.305.539		223.414.812		226.777.641		270.851.939		326.209.680	326.209.680	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,75		28,90		29		29,1		29,3		29,3	

		(d)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak						11.611.915		14.321.462			15.970.257			21.160.308			27.644.888			27.644.888	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%		15,38	38,46	46,15		51,28		56,41			61,54		66,67			66,67				
		(e)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)						110.313.195		108.843.113			101.144.958			114.870.242			131.313.219			131.313.219	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%		71,24	72,6	73,60		74,60		75,60			76,60		77,60			77,60				
		(f)	Program Perlindungan Khusus Anak						58.059.576		57.285.849			53.234.188			60.458.022			69.112.220			69.112.220	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%		83,08	86,34	86,64		86,94		87,24			87,54		87,84			87,84				
		(g)	Program Pengendalian Penduduk						63.865.534		74.471.604			80.915.966			105.801.539			124.401.997			124.401.997	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Contraceptive Prevalence Rate	%		44,2	47,50	49,01		49,50		59,00			59,25		59,75			59,75				
		(h)	Program Pembinaan Keluarga Berencana						81.283.407		91.657.359			88.368.752			112.451.921			138.224.441			138.224.441	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Unmetneed	%		10,14	10,10	9,50		9,25		9,00			8,80		8,50			8,50				
4	1	4	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pemuda																					
			IPP (Indeks Pembangunan Pemuda)	Indeks	n/a	0,32	0,50			0,58		0,67			0,67		0,67			0,67				
			SDI (Sport Development Index)	Indeks	35,37	12,50	6,84			20,29		24,91			32,47		7,67			7,67				
		(a)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						1.346.551.052		979.588.021			2.937.907.231			1.212.729.986			1.501.564.372			1.501.564.372	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	n/a	0,51	0,56			0,6		0,63			0,64		0,69			0,69				
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	n/a	4,79	4,8			5,05		5,3			5,55		5,8			5,8				
		(b)	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						3.879.918.283		4.034.933.854			12.101.272.261			9.990.496.352			12.369.920.437			12.369.920.437	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Peningkatan Prestasi Olahraga	Medal	n/a	0	0			0		0			0		0			0				
			Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	n/a	0,54	0,64%			0,73%		0,77%			0,82%		0,86%			0,86%				
			Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a	17,31	19,23%			21,15%		23,08%			25,00%		25,00%			25,00%				
			Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	n/a	35,20	38,09%			40,88%		43,88%			46,77%		49,66%			49,66%				
		(c)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan						24.675.320		17.185.755			76.961.096			63.537.084			78.669.632			78.669.632	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
			Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	n/a	0	8,43 (7 Kwartir)			9,63 (8 Kwartir)		9,63 (8 Kwartir)			9,63 (8 Kwartir)		0			0				
4			Mengembangkan dan melestarikan budaya Melayu dan budaya nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan																					
4	1		Pembinaan keagamaan, pelestarian budaya, dan harmoni masyarakat																					
4	1	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	n/a	61,9	62,9			63,9		64,9			65,9		66,9			66,9				
			Peningkatan pengembangan pelestarian budaya melayu																					
			Nilai Ekonomi Budaya	%	n/a	28,09	28,11			28,16		28,21			28,24		28,27			28,27				
			Nilai Warisan Budaya	%	n/a	48,24	48,84			49,64		50,44			51,24		52,04			52,04				
			Nilai Cagar Budaya	%	n/a	1,49	1,49			1,55		1,61			1,65		1,69			1,69				
			Nilai Budaya Literasi	%	n/a	68,00	69,00			70,00		71,00			72,00		73,00			73,00				
		(a)	Program Peneembangan Kesenian Tradisional						156.921.812		222.205.807			314.739.159			272.145.726			181.477.608			181.477.608	Dinas Kebudayaan
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	n/a	28,06%	28,11%			28,16%		28,21%			28,24%		28,27%			28,27%				
		(b)	Program Pengelolaan Permusuman						198.362.410		155.158.979			400.419.994			155.045.013			169.129.505			169.129.505	Dinas Kebudayaan
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	n/a	12,10%	12,76%			13,48%		14,20%			14,63%		15,06%			15,06%				
		(c)	Program Pengembangan Kebudayaan						525.076.968		467.337.056			934.401.596			704.139.144			834.865.784			834.865.784	Dinas Kebudayaan
			Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	15,16%	16,75%			17,94%		19,13%			19,84%		20,55%			20,55%				
			Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni	%	n/a	1,43%	1,49%			1,55%		1,61%			1,65%		1,69%			1,69%				
			Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni	%	n/a	47,03%	51,01%			54,99%		58,97%			62,95%		66,93%			66,93%				
		(d)	Program Pembinaan Sejarah						145.148.941		150.948.121			150.904.111			93.436.888			115.690.636			115.690.636	Dinas Kebudayaan
			Persentase SDM sejarawan yang Berkompetensi	%	n/a	5%	20,00%			40,00%		60,00%			80,00%		100,00%			100,00%				
		(e)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						125.000.000		306.575.262			332.480.107			262.425.363			252.397.540			252.397.540	Dinas Kebudayaan
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	26,29%	31,75%			37,21%		42,67%			45,95%		49,23%			49,23%				
		(f)	Program Pembinaan Perpustakaan						389.366.303		406.610.353			468.389.485			419.046.251			483.654.416			483.654.416	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	56,36	58,47	62,47			62,50		62,75			63,00		63,25			63,25				
		(g)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						84.803.868		81.841.948			92.525.391			117.975.075			136.444.136			136.444.136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14,45	14,70	14,95			15,20		15,45			15,65		15,85			15,85				
4	1	2	Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama																					
			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	n/a	73,00	74,46			75,95		77,43			79,02		80,60			80,60				
			Indeks Ketahanan Nasional	Skor	2.7700	2,79	2,81			2,83		2,85			2,87		2,89			2,89				
		(a)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya						311.156.722		366.401.482			370.057.102			438.373.916			486.625.284			486.625.284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Konflik antar Agama	%	0%	0	0			0		0			0		0			0				
		(b)	Program Kesejahteraan Rakyat						55.364.247.591		58.269.478.209			60.398.926.718			66.186.720.139			72.730.595.687			72.730.595.687	Biro Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	n/a	n/a	20			40		60			80		100			100				
		(c)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						387.752.532		368.844.159			345.535.246			422.391.534			483.507.761			483.507.761	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0%	0%	0			0		0			0		0			0				

		(d) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						746.693.675		820.739.321		775.782.359		1.456.679.992		2.118.901.660		2.118.901.660	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%			
5		Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan																	
5	1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau																	
		Rasio Konektivitas	%	38,42	38,42	41,33		44,25		47,17		50,08		65,00		65,00			
5	1	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar																	
		Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,72%	94,5	95,5		96		96,2		96,4		96,60		96,60			
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,68	93,76	96,15		97,03		97,82		98,01		98,63		98,63			
		Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	83,84	87,06	91,32		93		95,8		97		100		100			
		Cakupan Pelayanan Drainase	%	45,1	45,1	48,1		51		54,3		57		60,3		60,3			
		Cakupan Pelayanan Persampahan	%	59,99	66	67,8		69		69,6		72		72		72			
		Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	n/a	170,54	145,27		173,73		75,36		37,28		0,00		0,00			
	(a)	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan						3.578.043.000		3.688.806.671		4.514.250.794		4.623.474.888		4.799.525.572		4.799.525.572	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketetapan	%	82,11	100,00	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
		Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35%	95	98		99		100		100		100		100			
	(b)	Program Pengelolaan Energi Terbarukan						7.937.089.372		3.761.721.886		10.299.179.592		10.548.372.359		10.950.028.713		10.950.028.713	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mix)	%	0,13	12,00	13		14,00		14,00		15,00		16		16			
	(c)	Program Kawasan Permukiman						20.000.000.000		20.000.000.000		30.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase RT/RT yang dibangun	%	n/a	n/a	10%		15,00%		20%		25%		30%		30%			
		Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	0	0,00	15%		27,00%		56%		78%		100%		100%			
	(d)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	n/a	n/a	5		10		15		20		25		25			
	(e)	Program Pengembangan Perumahan						8.000.000.000		8.000.000.000		10.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100		100		100		100		100		100			
	(f)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						104.644.407.111		71.138.970.479		93.329.069.256		112.073.803.615		110.013.567.671		110.013.567.671	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	n/a	10.000	12.000		13.000		14.000		15.000		15.000		15.000			
	(g)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)						12.120.232.913		14.430.201.864		17.413.101.133		17.596.088.156		17.129.177.564		17.129.177.564	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	20	18	15		12		9		8		2		2			
		Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	n.a	7,54	13,53		19,51		25,49		31,48		37,46		37,46			
		Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	n.a	51,59	53,69		56,09		58,99		62,09		65,39		65,39			
	(h)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						18.183.992.584		17.374.865.513		18.778.938.141		20.240.602.998		24.824.657.339		24.824.657.339	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	92,68	93,76	96,15		97,03		97,82		98,01		98,63		98,63			
	(i)	Program Pengelolaan Aspek Konektivitas						239.849.974		128.740.519		234.072.263		376.727.584		391.072.454		391.072.454	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	43,33	36,7	36,36		54,55		72,73		81,82		90,91		90,91			
	(j)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						3.022.787.571		4.383.248.349		6.695.813.942		7.729.708.866		7.714.163.005		7.714.163.005	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Cakupan Pelayanan Drainase (%)	%	45,1	45,1	48,1		51,3		54,3		57,3		60,3		60,3			
	(k)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya						17.478.521.140		23.782.825.873		35.166.187.904		43.155.908.074		41.644.607.030		41.644.607.030	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (%)	%	23	25	28		30		33		35		35		35			
	(l)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						3.483.237.048		1.400.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Proses Revisi Rtrw Provinsi Dan Ditetapkan/Perda (%)	%	13%	20%	70		78		85		93		100		100			
	(m)	Program Penataan Bangunan Gedung						3.501.095.694		3.275.098.649		3.950.848.085		5.137.420.432		6.033.496.835		6.033.496.835	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	(n)	Program Pengembangan Permukiman						3.890.800.286		5.170.443.987		5.588.270.466		6.456.916.766		7.381.185.131		7.381.185.131	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100			
	(o)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						2.308.976.556		2.407.050.953		2.681.483.899		3.782.101.489		5.402.978.843		5.402.978.843	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	83,84	87,06	91,32		93,06		95,8		97		100		100			
	(p)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						2.232.029.497		2.003.137.213		2.488.254.099		4.245.192.120		5.854.872.981		5.854.872.981	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	59,99	66,00	67,80		68,90		69,60		70,60		72,00		72,00			
	(q)	Program Penyelenggaraan Jalan						157.667.237.673		176.346.035.602		222.396.761.227		259.219.190.768		277.048.657.033		277.048.657.033	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase jalan kondisi baik (%)	%	n/a	61,75	63,25		64,75		66,25		67,75		69,25		69,25			
5	1	Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir						n/a		61,75		66,25		67,75		69,25		69,25	
		Persentase jalan kondisi baik	%	n/a	61,75	63,25		64,75		66,25		67,75		69,25		69,25			
		Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18,00	18,00	18,00		18,00		18,00		18,00		30,00		30,00			

				Rasio Konektivitas Angkutan Penyebrangan	Rasio	20,42	20,42	23,33		26,25		29,17		32,08		35,00		35,00		
				Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	27,27	27,27	31,82		36,36		40,91		45,45		50,00		50,00		
	(a)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)							272.262.131		256.481.038		702.216.790		1.369.918.488		1.599.841.857		1.599.841.857	Dinas Perhubungan
				Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)	Trayek	6	6,00	6,00		6,00		6,00		6,00		10		10		
	(b)	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum							150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(c)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi							1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
				Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	n.a	8,00	9,00		10,00		10,50		11,00		11,50		11,50		
				Total Kebutuhan Dana					953.714.038.343		951.164.481.802		1.036.876.976.031		1.054.439.869.981		1.102.781.029.313		1.102.781.029.213	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini menyajikan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode RPJMD. Kerangka pendanaan menyajikan besaran Kapasitas Riil Keuangan Daerah dalam rangka pendanaan program pembangunan sehingga program pembangunan yang diprioritaskan memiliki pendanaan yang cukup.

7.1 Kerangka Pendanaan

Kapasitas Riil Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar Rp780.214.773.917. Pada tahun 2026 jumlah kapasitas riil keuangan daerah diperkirakan sebesar Rp882.148.038.900. Kerangka pendanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun tercantum pada Tabel 7.1 berikut ini.



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN DAERAH (2+7+10)	3.534.303.462.607	3.685.626.759.843	3.862.826.531.910	4.062.456.787.423	4.279.016.992.004
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (3+4+5+6)	1.242.335.715.947	1.307.423.412.172	1.379.722.106.355	1.455.993.605.108	1.542.009.534.272
3	Pajak Daerah	1.111.035.036.467	1.166.523.910.918	1.225.458.189.063	1.289.550.736.735	1.357.130.655.976
4	Retribusi Daerah	12.525.679.480	14.147.001.254	18.900.042.292	20.676.799.623	25.012.231.108
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.150.000.000	10.500.000.000	12.400.000.000	15.500.000.000	22.700.000.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	109.625.000.000	116.252.500.000	122.963.875.000	130.266.068.750	137.166.647.188
7	PENDAPATAN TRANSFER (8+9)	2.290.706.696.660	2.376.879.245.171	2.481.714.117.930	2.605.003.359.309	2.735.474.643.575
8	Dana Perimbangan	2.244.047.508.560	2.327.420.505.785	2.428.793.266.787	2.547.848.840.075	2.673.747.762.802
9	Dana Insentif Daerah (D.I.D)	46.659.188.100	49.458.739.386	52.920.851.143	57.154.519.234	61.726.880.773
10	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (11+12+13)	1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
11	Pendapatan Hibah					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		1.261.050.000	1.324.102.500	1.390.307.625	1.459.823.006	1.532.814.157
12	Dana Darurat					
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
14	PEMBIAYAAN					
15	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (16+17+18+19+20+21)	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
16	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
17	Pencairan Dana Cadangan					
18	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan					
19	Penerimaan Pinjaman Daerah					
20	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
21	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
22	TOTAL PENERIMAAN DAERAH (1+15)	3.610.429.606.152	3.765.122.409.161	3.946.051.186.478	4.150.806.979.379	4.373.652.474.897
23	BELANJA DAERAH (24+31+33)	2.830.214.832.235	2.953.743.308.797	3.099.532.810.583	3.305.146.161.951	3.491.504.435.997
24	BELANJA OPERASI (25+26+27+28+29+30)	2.241.036.607.154	2.340.185.584.767	2.515.228.106.798	2.693.065.830.123	2.849.968.008.613
25	Belanja Pegawai					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
		1.177.493.281.120	1.261.919.549.376	1.352.399.181.066	1.449.366.202.349	1.553.285.759.057
26	Belanja Barang dan Jasa	611.020.012.832	615.370.842.695	695.366.715.438	749.016.853.019	797.624.185.951
27	Belanja Bunga					
28	Belanja Subsidi					
29	Belanja Hibah	448.298.226.727	458.479.685.549	462.779.692.964	489.675.479.668	493.725.820.876
30	Belanja Bantuan Sosial	4.225.086.475	4.415.507.146	4.682.517.331	5.007.295.087	5.332.242.728
31	BELANJA TIDAK TERDUGA	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
32	Belanja Tidak Terduga	56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
33	BELANJA TRANSFER (34+35)	532.703.025.527	556.365.883.143	581.608.351.585	609.382.631.452	638.837.378.158
34	Belanja Bagi Hasil	520.836.525.527	545.935.229.643	572.439.807.158	601.323.480.901	631.753.384.824
35	Belanja Bantuan Keuangan	11.866.500.000	10.430.653.500	9.168.544.427	8.059.150.551	7.083.993.334
36	PENGELUARAN PEMBIAYAAN (37+38+39+40+41))	-	-	-	-	-
37	Pembentukan Dana Cadangan					
38	Penyertaan Modal Daerah					
39	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo					
40	Pemberian Pinjaman Daerah					



**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026**

No	Uraian Akun	Jumlah Per Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
41	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
42	KAPASITAS RIIL (22 -23-36)	780.214.773.917	811.379.100.364	846.518.375.895	845.660.817.428	882.148.038.900



7.2 Program Perangkat Daerah

Pada bab ini akan disajikan seluruh program baik program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dan seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan. Program prioritas selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Perincian program dan indikator kinerja program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut.

1) Pendidikan

- a. Program Pengelolaan Pendidikan
- b. Program Pengembangan Kurikulum
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

2) Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- e. Program Pengembangan Permukiman
- f. Program Penataan Bangunan Gedung
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- h. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- i. Program Penyelenggaraan Jalan
- j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - b. Program Kawasan Permukiman
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - d. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - c. Program Penanggulangan Bencana
 - 6) Sosial
 - a. Program Pemberdayaan Sosial
 - b. Program Rehabilitasi Sosial
 - c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - d. Program Penanganan Bencana
 - e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - 7) Tenaga kerja
 - a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - c. Program Hubungan Industrial
 - d. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - e. Program Perencanaan Tenaga kerja
 - 8) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
 - a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Program Perlindungan Perempuan
 - c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 - d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- f. Program Perlindungan Khusus Anak
- 9) Pangan
 - a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - b. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - c. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 10) Pertanahan
 - a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- 11) Lingkungan hidup
 - a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 - h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - i. Program Pengelolaan Persampahan
- 12) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - b. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
 - c. Program Pencatatan Sipil
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 13) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Administrasi Pemerintahan Desa



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- b. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 - c. Program Penataan Desa
 - d. Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 14) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Program Pengendalian Penduduk
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- 15) Perhubungan
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - b. Program Pengelolaan Pelayaran
- 16) Komunikasi dan Informatika
- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- 17) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
 - b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - d. Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
 - e. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - f. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 - g. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- 18) Penanaman Modal
- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - 19) Kepemudaan dan olah raga
 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
 - c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 - 20) Statistik
 - a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
 - 21) Persandian
 - a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - 22) Kebudayaan
 - a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - c. Program Pembinaan Sejarah
 - d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - e. Program Pengelolaan Permuseuman
 - 23) Perpustakaan
 - a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
 - 24) Kearsipan
 - a. Program Pengelolaan Arsip
 - b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - c. Program Perizinan Penggunaan Arsip
 - 25) Kelautan dan Perikanan
 - a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - 26) Pariwisata
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

27) Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- e. Program Penyuluhan Pertanian

28) Kehutanan

- a. Program Pengelolaan Hutan
- b. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- c. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

29) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
- b. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
- c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

30) Perdagangan

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan Ekspor
- e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

31) Perindustrian



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

32) Transmigrasi

- a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi

33) Sekretariat Daerah

- a Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum
- b Program Penataan Organisasi
- c Program Kesejahteraan Rakyat
- d Program Perekonomian dan Pembangunan
- e Program Kebijakan Administrasi Pembangunan
- f Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- g Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- h Program Pengelolaan Perbatasan
- i Program Pelayanan Penghubung
- j Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

34) Sekretariat DPRD

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

35) Perencanaan Pembangunan

- a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- b. Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan
- c. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

36) Keuangan

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah (BP2RD dan BPKAD)
- b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

37) Kepegawaian

- a. Program Kepegawaian Daerah

38) Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

39) Inspektorat

- a. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

40) Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- b. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- c. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- d. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
- e. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Penyajian Program dan Anggaran Indikatif disusun berdasarkan urusan yang diharapkan dapat menjelaskan arah pembangunan dan program yang direncanakan dalam rencana 5 (lima) tahun mendatang. Detil program pada RPJMD disajikan pada tabel 7.2 (terlampir).

Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Setuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Proyeksi Tahun Berjalan (2021)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun Ke 1 (2022)		Tahun Ke 2 (2023)		Tahun Ke 3 (2024)		Tahun Ke 4 (2025)		Tahun Ke 5 (2026)		Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(14)	(17)	(18)
1	Ururan Wajib Terkait Pelayanan Dasar																	
1	Pendidikan					623.762.885.568		695.652.393.076		727.339.562.873		774.730.978.850		827.150.449.570		827.150.449.570		
(a)	Program Pengelolaan Pendidikan					63.845.183.326		94.412.723.772		82.834.048.706		81.499.296.970		85.756.635.526		85.756.635.526		Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK	%	96,02	97,00	98,00		98,50		99,00		99,50		100,00		100,00		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	82,49	83,00	84,00		85,00		87,00		88,00		90,00		90,00		
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	77,2	77,20	78,00		79,00		80,00		81,00		82,00		82,00		
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,40	0,39	0,38		0,37		0,36		0,35		0,34		0,34		
		Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	95,61	95,78	95,94		96,11		96,27		96,44		96,60		96,60		
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	93,31	95,77	97,43		99,08		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	29,3	33,70	33,75		33,80		33,85		33,90		33,95		33,95		
(b)	Program Pengembangan Kurikulum					283.930.226		419.869.199		368.376.891		371.335.362		381.374.124		381.374.124		Dinas Pendidikan
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	n/a	59,20	60,00		60,50		61,00		61,50		62,00		62,00		
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	n/a	28,30	30,00		30,50		31,00		31,50		32,00		32,00		
		Jumlah SMK yang Terakreditasi	%	17,00	20,00	24,32		27,03		29,73		32,43		35,14		35,14		
(c)	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan					1.108.679.929		1.639.489.253		1.438.424.051		1.449.976.174		1.489.175.152		1.489.175.152		Dinas Pendidikan
		Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	653,51	712,80	724,76		726,42		728,07		729,70		730,00		730,00		
(d)	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					135.204.869		199.937.714		175.417.567		176.826.363		181.606.726		181.606.726		Dinas Pendidikan
		Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memeroleh ijin	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
(e)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					558.389.887.217,53		598.980.373.138,66		642.523.295.656,90		689.233.543.981,79		739.341.658.041,56		739.341.658.041,56		Dinas Pendidikan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
2	Kesehatan					870.399.129.361		918.501.219.099,10		911.432.378.632,34		291.128.886.766,62		316.078.195.382		343.599.860.919		343.599.860.919
(a)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					125.496.678.491		116.896.449.648		79.152.788.287		49.621.545.229		57.642.571.883		66.690.953.952		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 kelahiran	92	128	125		124		123		122		121		121		
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 kelahiran	11,1	15	14		13		12		11		10		10		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,82	16,3	15,8		15,3		14,00		13,3		12,8		12,8		
		Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Jumlah Kabupaten/kota sehat (KCS)	kab/kota	7	7	2		5		5		7		7		7		
		Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Sukses Rate)	%	90,46	90,00	90,00		92,00		92,00		93,00		93		93		
		Capaian GDAH yang mendapatkan ARV	%	63,78	60,00	64,00		68,00		72,00		76,00		80,00		80,00		
		Eliminasi malaria (Babupaten/kota)	%	42,86	42,86	43,00		43,00		57,14		57,14		67,00		67,00		
		Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	89,63	92,90	93,60		94,10		94,60		95,00		95,50		95,50		
		Jumlah kab/kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	5,00	57,00	57,00		71,00		71,00		71,00		71,00		71,00		
		Persentase penduduk dengan kepemilikan jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,65	87,88	89,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	86,51	95,50	96,00		97,00		97,00		97,50		98,00		98,00		
		Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	82,86	80,00	85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	%	93,18	90,00	92,00		94,00		96,00		96,00		96,00		96,00		
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Internasional		Internasional		Internasional		
		Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	-	-	Satelit		Satelit		Utama		Utama		Utama		Utama		
		Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Indeks	78,5	78,5	78,5		79,00		80,00		80,00		80,00		80,00		
		Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Engku Haji Daud	Indeks	n/a	80	81		82		83		84		85		85		
(b)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan					29.515.274.797		31.448.460.607		30.603.730.669		25.580.270.959		26.146.493.488		27.706.819.010		Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	49,43	50	52		54		56		58		60		60		
		Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	85,70	60	65		70		75		80		85		85		
		Persentase jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat >20jam/Tahun pada RSUD Engku Haji Daud	%	15,00	25	30		35		40		50		60		60		
(c)	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman					-		250.000.000		250.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		Dinas Kesehatan
		Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	75,44	85,00	86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00		
(d)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan					2.673.716.300		2.707.166.635		916.238.550		633.962.090		1.207.877.061		1.219.265.427		Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	57,14	57,14	71,43		71,43		86,00		86,00		100,00		100,00		
(e)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					212.707.499.773		167.199.136.209,30		200.509.621.126,14		215.183.108.508		230.931.252.950		247.832.822.530		Dinas Kesehatan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					256.026.653.127		282.710.650.167		348.497.401.061		401.100.871.834		426.571.537.926		426.571.537.926		
(a)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					12.120.232.913		14.430.201.864		17.413.101.133		17.596.088.156		17.129.177.564		17.129.177.564		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	20	18	15		12		9		6		2		2		

			Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada (%)	%	n/a	7,54	13,53		19,51		25,49		31,48		37,46		37,46		
			Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk (%)	%	n/a	51,59	53,69		56,09		58,99		62,09		65,39		65,39		
	(b)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum						18.183.992.584		17.374.865.513		18.778.938.141		20.240.602.998		24.824.657.339		24.824.657.339	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak (%)	%	92,68	93,76%	96,15		97,03		97,82		98,01		98,63		98,63		
	(c)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah						2.308.976.556		2.407.050.953		2.681.483.899		3.782.101.489		5.402.978.843		5.402.978.843	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Cakupan Pelayanan Air Limbah (%)	%	83,84	87,06	91,32		93,06		95,8		97		100		100		
	(d)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase						3.022.787.571		4.383.248.349		6.695.813.942		7.729.708.866		7.714.163.005		7.714.163.005	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Cakupan Pelayanan Drainase (%)	%	45,1	45,1	48,1		51,3		54,3		57,3		60,3		60,3		
	(e)	Program Pengembangan Permukiman						3.890.800.286		5.170.443.987		5.588.270.466		6.456.916.766		7.381.185.131		7.381.185.131	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(f)	Program Penataan Bangunan Gedung						3.501.095.694		3.275.098.649		3.950.848.085		5.137.420.432		6.033.496.835		6.033.496.835	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(g)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya						17.478.521.140		23.782.825.873		35.166.187.904		43.155.908.074		41.644.607.030		41.644.607.030	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	23	25	28		30		33		35		35		35		
	(h)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						2.232.029.497		2.003.137.213		2.488.254.099		4.245.192.120		5.854.872.981		5.854.872.981	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Cakupan Pelayanan Persampahan (%)	%	59,99	66,00	67,80		68,90		69,60		70,60		72,00		72,00		
	(i)	Program Penyelenggaraan Jalan						157.667.237.673		176.346.035.602		222.396.761.227		259.219.190.768		277.048.657.033		277.048.657.033	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase jalan kondisi baik (%)	%	n/a	61,75	63,25		64,75		66,25		67,75		69,25		69,25		
	(j)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi						1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000		1.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	n/a	8,00	9,00		10,00		10,50		11,00		11,50		11,50		
	(k)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						3.483.237.048		1.400.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Proses Revisi Ritrw Provinsi Dan Ditetaskan/Perda (%)	%	13%	20%	70		78		85		93		100		100		
	(l)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						30.937.742.165		30.937.742.165		30.937.742.165		30.937.742.165		30.937.742.165		30.937.742.165	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman							146.444.407.111		113.438.970.479		147.629.069.256		170.873.803.615		168.813.567.671		168.813.567.671	
	(a)	Program Pengembangan Perumahan						8.000.000.000		8.000.000.000		10.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000		9.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100		100		100		100		100		100		
			Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100		100		100		100		100		100		
	(b)	Program Kawasan Permukiman						20.000.000.000		20.000.000.000		30.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000		35.000.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Persentase RT/ILH yang diteliti	%	n/a	n/a	10%		15,00%		20%		25%		30%		30%		
			Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	0	0,00	15%		27,00%		56%		78%		100%		100%		
	(c)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						104.644.407.111		71.138.970.479		93.329.069.256		112.073.803.615		110.013.567.671		110.013.567.671	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	n/a	10.000	12.000		13.000		14.000		15.000		15.000		15.000		
	(d)	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	n/a	n/a	5		10		15		20		25		25		
	(e)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						13.500.000.000		14.000.000.000		14.000.000.000		14.500.000.000		14.500.000.000		14.500.000.000	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							28.831.357.465		30.670.995.511		33.669.242.340		34.944.486.512		37.398.488.644		37.398.488.644	
	(a)	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						842.716.121		964.857.237		936.289.054		1.016.022.879		1.113.963.960		1.113.963.960	Satpol PP
			Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perda di Provinsi	%	n/a	16,67	50		53,33		56,67		60		63,33		63,33		
			Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	n/a	33,33	41,67		50		58,33		66,67		75		75		
			Persentase gangguan Transibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(b)	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						23.223.831		28.842.925		26.617.094		36.274.813		41.467.332		41.467.332	Satpol PP
			Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan / atau tindak lanjutnya	%	42,85	50,00	60,00		70,00		80,00		90,00		100,00		100,00		
	(c)	Program Penanggulangan Bencana						1.594.678.198		1.381.333.589		2.344.066.524		1.317.838.051		1.284.613.758		1.284.613.758	Badan Penanggulangan Bencana
			Skor Nilai Prioritas Pencegahan Bencana	Skor	1,15	1,28	1,99		2,66		3,18		3,40		3,44		3,44		
			Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,20	0,20	0,32		0,32		0,44		0,44		0,56		0,56		
			Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penganganan Darurat Bencana	Skor	0,20	0,24	0,46		0,48		0,57		0,76		0,80		0,80		
	(d)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						18.547.616.722		19.903.320.363		21.358.191.758		22.919.490.484		24.595.007.974		24.595.007.974	Satpol PP
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
	(e)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						7.823.122.593		8302841398		9004077910		9650859784		10363435620		10363435620	Badan Penanggulangan Bencana
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
6	Sosial							16.036.458.094		16.735.911.287		16.304.751.274		17.433.899.392		18.608.401.216		18.608.401.216	
	(a)	Program Pemberdayaan Sosial						849.846.796		846.387.424		514.958.980		584.498.555		606.754.838		606.754.838	Dinas Sosial
			Persentase lembaga/oros penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitas	%	2,98	6,55	2,98		3,27		1,79		2,08		2,38		19,05		

			Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitas	%	24,00	24,40	52,00		1.026.428.235	966.933.512	21,60	31,60	24,00	100,00			
	(b)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam negeri	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	625.478.913	625.478.913	Dinas Sosial
			Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam negeri	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase sarana prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	100	0,00	25,00		25,00		25,00	25,00	25,00	25,00			
			Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam negeri	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase golongan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam negeri	%	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
			Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam negeri	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
	(c)	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,17		0,15	0,08	0,08	0,08	0,09	0,72	980.643.805	980.643.805	Dinas Sosial
			Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,10	2,92	0,79		0,71	0,47	0,47	0,47	0,47	5,84			
			Persentase PKMS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkeadilan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	31,63		31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63			
	(d)	Program Pemantauan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	406.525.741	406.525.741	Dinas Sosial
	(e)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	n/a	33,33	33,33		33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	220.185.642	220.185.642	Dinas Sosial
	(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15.768.812.76,14	15.768.812.76,14	Dinas Sosial
2		Ururan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar															
7		Tenaga Kerja							38.090.546.592	39.916.267.457		41.020.386.669	43.419.596.489		41.907.543.738	41.907.543.738	
	(a)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	11,82	44,51	51,28		56,41	61,54	66,67	71,79	71,79	71,79	4.557.672.727	4.557.672.727	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	1,5	4	6		8	10	12,5	15	15	15			
			Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	29,17	34,56	40,00		45,45	50,00	53,85	57,14	57,14	57,14			
	(b)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64,31	60,00	61,00		62,00	63,00	64,00	65,00	65,00	65,00			
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,50	67,52	67,55		67,57	67,59	67,62	67,65	67,65	67,65			
	(c)	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PHB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar asosiasi BPJS Ketenagakerjaan)	%	n/a	30	35		40	45	50	55	55	55	815.958.883	815.958.883	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Tingkat upah nil terhadap UMP per jam	%	n/a	100	100		100	100	100	100	100	100			
	(d)	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	3,65	10,8	11,8		12,8	13,8	14,8	15,8	15,8	15,8			
			Persentase Kepatuhan BPJS Ketenagakerjaan	%	94,8	94,9	95,25		95,5	95,75	96	96,25	96,25	96,25			
			Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	74,71	75	75,5		76	76,5	77	77,5	77,5	77,5			
	(e)	Program Perencanaan Tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	n/a	100	100		100	100	100	100	100	100			
	(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	15.768.812.76,14	15.768.812.76,14	Dinas Sosial
8		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							15.331.725.657	16.458.691.055		17.710.121.141	18.625.439.037		20.259.420.553	20.259.420.553	
	(a)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARGO)	%	5,34	5,34	5,4		5,5	5,6	5,7	5,8	5,8	5,8	369.750.379	369.750.379	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,75		28,90	29	29,10	29,30	29,30	29,30			
			Persentase keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,11	11,10	11,10		11,10	12	12	12	12	12			
	(b)	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPDPO)	%	33,42	44,25	44,07		43,88	43,7	43,51	43,33	43,33	43,33	338.649.880	338.649.880	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(c)	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,75		28,90	29	29,1	29,3	29,3	29,3	326.209.680	326.209.680	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	(d)	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang memiliki data terpadu gender dan anak	%	15,38	38,46	46,15		51,28	56,41	61,54	66,67	66,67	66,67	27.644.888	27.644.888	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

	(e)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					110.313.195		108.843.113		101.144.958		114.870.242		131.313.219		131.313.219	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	71,24	72,6	73,60		74,60		75,60		76,60		77,60		77,60		
	(f)	Program Perlindungan Khusus Anak					58.059.576		57.285.849		53.234.188		60.458.022		69.112.220		69.112.220	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	83,08	86,34	86,64		86,94		87,24		87,54		87,84		87,84		
	(g)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					14.344.712.859		15.388.161.749		16.507.560.831		17.708.441.986		18.996.740.287		18.996.740.287	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	9	Pangan					25.823.549.498		27.689.793.835		29.514.450.144		32.045.531.373		33.904.429.984		33.904.429.984	
	(a)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					772.163.416		762.189.953		701.228.834		908.953.066		778.248.991		778.248.991	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	111%	111%	113%		114%		115%		116%		117%		117%		
		Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	11,70%	≤10%	≤11%		≤11%		≤11%		≤11%		≤11		≤11		
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	85,40%	86,20%	86,90%		87,70%		88,50%		89,30%		90,10%		90,10%		
	(b)	Program Pemangangan Kerawanan Pangan					232.262.131		256.481.038		234.072.263		387.347.490		278.669.732		278.669.732	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	10%	≤10	≤10		≤10		≤10		≤10		≤10		≤10		
	(c)	Program Pengawasan Keamanan Pangan					205.779.700		269.227.877		258.657.456		370.635.092		261.153.440		261.153.440	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	94%	80%	81%		82%		83%		84%		85%		85%		
	(d)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					24.613.344.251		26.401.894.968		28.320.491.589		30.378.595.726		32.586.357.821		32.586.357.821	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	10	Pertanahan					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	
	(a)	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
		Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	11	Lingkungan Hidup					32.022.410.484		34.406.312.935		36.872.072.035		39.426.949.451		42.300.950.214		42.300.950.214	
	(a)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup					139.698.474		157.909.046		152.827.147		167.381.370		185.030.639		185.030.639	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
	(b)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					148.397.112		146.096.046		141.394.318		154.859.756		171.188.703		171.188.703	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	n.a	76,1	76,75		77,39		78,04		78,04		78,04		78,04		
		Indeks Kualitas Air	Indeks	56,00	56,60	56,70		56,80		56,90		56,90		56,90		56,90		
		Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	90,59	88,14	88,25		88,35		88,46		88,46		88,46		88,46		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,06	59,07	59,08		59,09		59,10		59,1		59,1		59,1		
	(c)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)					51.859.454		73.280.296		89.170.386		91.327.899		118.506.804		118.506.804	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	14,28		14,28		28,57		42,58		57,14		57,14		
	(d)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)					43.846.587		43.166.695		41.777.485		45.756.090		50.580.770		50.580.770	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20%	26,67%	33,33%		33,33%		40,00%		40,00%		46,67%		46,67%		
	(e)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Ijin Lingkungan dan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH)					14.722.468		14.494.179		14.027.721		15.363.626		16.983.620		16.983.620	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	(f)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					123.166.202		207.627.507		250.791.711		159.823.824		165.909.526		165.909.526	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Kab/Kota yang meraih penghargaan	%	0	28,57%	42,85%		57,14%		71,43%		85,71%		85,71%		85,71%		
	(g)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					35.535.153		40.167.383		38.874.698		42.576.861		47.066.312		47.066.312	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	(h)	Program Pemangangan Pengadaan Lingkungan Hidup					35.911.277		35.354.432		34.216.640		37.475.201		41.426.715		41.426.715	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	83,33%	57,14%	57,14%		71,43%		71,43%		85,71%		85,71%		85,71%		
	(i)	Program Pengelolaan Persampahan					65.252.074		64.240.266		62.172.857		68.093.779		75.273.822		75.273.822	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Pengurangan Sampah	%	22%	24%	26%		27%		28%		30%		30%		30%		
		Persentase Pemangangan Sampah	%	75%	74%	73%		72%		71%		70%		70%		70%		
	(j)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					31.364.021.684		33.623.977.085		36.046.819.073		38.644.291.046		41.428.983.302		41.428.983.302	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					1.449.166.185		1.448.880.105		1.419.113.066		1.720.357.713		1.619.431.660		1.619.431.660	
	(a)	Program Pendaftaran Penduduk					0		320.220.000	-	320.220.000	-	320.000.000	-	320.000.000	-	320.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kab/ Kota yang telah melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(b)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan					35.200.000		35.200.000		35.200.000		45.800.000		45.800.000		45.800.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai kebutuhan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
	(c)	Program Pencatatan Sipil					0		454.310.000	-	454.023.920	-	424.476.881	-	522.621.528	-	514.195.475	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	25	75	75		100		100		100		100		100		
	(d)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					639.436.185		639.436.185		639.436.185		739.436.185		739.436.185		739.436.185	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

			Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi (semendagri)	%	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							12.403.162.679	13.048.883.602	13.827.175.638	14.752.819.931	15.771.293.168	15.771.293.168				
	(a)	Program Administrasi Pemerintahan Desa						572.695.022	534.854.770	515.901.090	535.901.090	557.847.195	557.847.195				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase aparat/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	14,05	18,13	25,68		34,74	43,81	52,87	61,93	61,93				
	(b)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat						1.165.000.000	1.165.000.000	1.165.000.000	1.175.836.642	1.255.836.642	1.255.836.642				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapasitas	%	26,66	36,65	44,64	52,64	56,63	64,63	72,62	72,62	72,62				
	(c)	Program Penataan Desa						156.540.000	156.540.000	156.540.000	176.540.000	176.540.000	176.540.000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
	(d)	Program Peningkatan Kerjasama Desa						206.600.000	146.600.000	146.600.000	166.600.000	166.600.000	166.600.000				Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	0	0	1,45	2,91	5,45	8	10,91	10,91	10,91				
	(e)	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						10.302.327.657	11.045.888.832	11.843.134.548	12.697.942.199	13.614.469.331	13.614.469.331				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							284.491.924	312.780.737	314.081.710	411.719.131	483.785.542	483.785.542				
	(a)	Program Pengendalian Penduduk						63.865.534	74.471.604	80.915.966	105.801.539	124.401.997	124.401.997				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Contraceptive Prevalence Rate	%	44,2	47,50	49,01	49,50	59,00	59,25	59,25	59,75	59,75				
	(b)	Program Pembinaan Keluarga Berencana						81.283.407	91.657.359	88.368.752	112.451.921	138.224.441	138.224.441				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Unmetneed	%	10,14	10,10	9,50	9,25	9,00	8,80	8,50	8,50	8,50				
	(c)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera						139.342.983	146.651.774	144.796.992	193.465.671	221.159.105	221.159.105				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	63,27	58,00	59,30	59,70	60,30	60,75	61	61	61				
15	Perhubungan							61.503.649.396	62.498.491.578	63.493.156.228	59.805.798.960	63.820.623.463	63.820.623.463				
	(a)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						272.262.131	256.481.038	702.216.790	1.369.918.488	1.599.841.857	1.599.841.857				Dinas Perhubungan
			Penyediaan Jaringan Trayek Angkutan Darat Antar Kota Dalam Provinsi (ADDP)	Trayek	6	6,00		6,00	6,00	6,00	10	10	10				
	(b)	Program Pengelolaan Pelayaran						26.837.267.233	25.281.702.285	23.072.837.397	15.754.062.614	16.353.938.987	16.353.938.987				Dinas Perhubungan
			Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100	100				
			Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	12,00	14,00	16	18	20	22	24	24	24				
	(c)	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						34.394.120.021	36.960.308.756	39.718.102.041	42.681.817.858	45.866.842.619	45.866.842.619				Dinas Perhubungan
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
16	Komunikasi dan Informatika							20.678.124.027	19.716.421.856	20.444.950.536	21.509.493.879	24.090.486.307	24.090.486.307				
	(a)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						3.177.857.392	3.007.726.504	3.084.158.436	3.076.817.266	3.549.182.373	3.549.182.373				Dinas Komunikasi dan Informatika
			Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	74,18	76	78	80	82	84	86	86	86				
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	n/a	20%	20%	30%	40%	50%	60%	60%	60%				
	(b)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						4.457.675.021	3.140.395.678	2.804.714.349	2.866.867.540	3.728.549.088	3.728.549.088				Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	20%	20%	25%	30%	35%	40%	40%	40%				
			Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	82,93%	82,93%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				
	(c)	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						12.647.591.014	13.568.299.675	14.556.077.751	15.615.814.271	16.752.754.896	16.752.754.896				Dinas Komunikasi dan Informatika
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
17	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah							27.425.186.290	27.535.382.336	27.282.702.449	24.246.559.139	25.712.503.309	25.712.503.309				
	(a)	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam						738.997.214	696.162.817	635.339.001	433.807.521	450.325.856	450.325.856				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Fasilitas Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6,34%	6,34%	11,34%	16,34%	21,34%	26,34%	31,34%	31,34%	31,34%				
	(b)	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						1.805.394.308	1.700.748.478	1.552.153.911	1.059.805.930	1.100.160.761	1.100.160.761				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29,18%	29,18%	31,18%	33,18%	35,18%	37,18%	39,18%	39,18%	39,18%				
	(c)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)						1.544.115.231	1.454.613.885	1.327.524.123	906.429.400	940.944.026	940.944.026				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Rasio Wirasaha Baru	%	27,52%	27,52%	28,02%	28,52%	29,02%	29,52%	30,02%	30,02%	30,02%				
	(d)	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)						9.315.254.351	8.775.315.503	8.008.615.299	5.468.257.965	5.678.475.924	5.678.475.924				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase UMKM yang dikembangkan	%	22,3%	22,3%	25,86%	29,36%	32,86%	36,36%	39,86%	39,86%	39,86%				
	(e)	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian						1.106.551.091	1.042.412.217	951.336.556	649.569.683	674.303.716	674.303.716				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8,8%	8,8%	13,8%	18,8%	23,8%	28,8%	33,8%	33,8%	33,8%				
			Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0,24%	0,24%	0,44%	0,64%	0,84%	1,04%	1,24%	1,24%	1,24%				
	(f)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi						291.709.426	274.801.112	250.791.711	171.239.811	177.760.206	177.760.206				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Koperasi yang diawasi	%	1,53%	1,53%	2,53%	3,53%	4,53%	5,53%	6,53%	6,53%	6,53%				
	(g)	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi						129.648.634	183.200.741	167.194.474	114.159.874	118.506.804	118.506.804				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	3,67%	3,67%	5,77%	7,87%	9,97%	12,07%	14,17%	14,17%	14,17%				
	(h)	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						12.493.516.035	13.408.127.483	14.389.747.374	15.443.288.954	16.574.026.015	16.574.026.015				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

18	Penanaman Modal								20.443.400.148		21.567.028.566		21.590.085.362		22.769.107.426		21.794.252.075		21.794.252.075	
(a)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal								894.575.574		1.025.924.151		652.058.448		719.207.206		462.176.537		462.176.537	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perusahaan yang mendapatkan lisensi dan kepemilikan Bauran	%	0		0	0	95				100		100		100		100		
		Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%				100	100				100				100		100		
(b)	Program Promosi Penanaman Modal								2.139.202.461		2.198.408.894		2.006.333.687		2.054.877.732		1.422.081.651		1.422.081.651	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	0		5%	7%	8%				10%		11%		12%		12%		
(c)	Program Pelayanan Penanaman Modal								3.286.592.871		3.370.893.638		3.076.378.320		3.150.812.523		2.180.525.198		2.180.525.198	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21		70	80	90				100		100		100		100		
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93		82,5	83,15	84,2			84,88		85,2		86,1		86,1			
(d)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal								972.364.755		916.003.706		835.972.369		856.199.055		592.534.021		592.534.021	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100		100	100	100				100		100		100		100		
(e)	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								350.051.312		329.761.334		300.950.053		205.487.773		213.312.248		213.312.248	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	n/a		100	100	100				100		100		100		100		
(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								12.800.613.175		13.726.036.843		14.718.392.486		15.782.523.136		16.923.622.420		16.923.622.420	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		100	100	100				100		100		100		100		
19	Kepemudaan dan Olahraga								41.413.564.612		43.904.800.134		56.909.215.721		56.186.389.163		62.237.902.389		62.237.902.389	
(a)	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan								1.346.551.057		979.588.021		2.937.907.231		1.212.729.986		1.501.564.377		1.501.564.377	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	n/a		0,51	0,46	0,31				0,72		0,40		0,51		0,51		
		Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	n/a		4,79	4,80	5,05				5,30		5,55		5,80		5,80		
(b)	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan								3.879.918.283		4.034.933.854		12.101.272.261		9.990.496.352		12.369.920.437		12.369.920.437	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a		0	0,00	5,00				3,00		5,00		0,00		0,00		
		Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	n/a		0,54	0,01	0,01				0,01		0,01		0,01		0,01		
		Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a		12,31	0,19	0,23				0,23		0,25		0,25		0,25		
		Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	n/a		35,20	0,38	0,41				0,44		0,47		0,50		0,50		
(c)	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan								24.675.320		17.185.755		76.961.096		63.537.084		78.669.632		78.669.632	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	n/a		0,00	8,43	9,63				9,63		9,63		9,63		9,63		
(d)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								36.162.419.953		38.873.092.504		41.787.075.133		44.919.625.740		48.287.147.943		48.287.147.943	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		100	100	100				100		100		100		100		
20	Statistik								324.121.585		317.547.951		300.950.053		319.647.647		343.669.732		343.669.732	
(a)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral								324.121.585		317.547.951		300.950.053		319.647.647		343.669.732		343.669.732	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100		100	100	100				100		100		100		100		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100		100	100	100				100		100		100		100		
21	Persandian								216.357.640		203.816.931		192.697.204		197.359.590		204.874.563		204.874.563	
(a)	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi								216.357.640		203.816.931		192.697.204		197.359.590		204.874.563		204.874.563	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks KAM			68,13	68,13	70,33				73,63		79,12		83,52		83,52		
22	Kebudayaan								17.119.199.588		18.688.879.017		20.800.521.269		21.530.139.351		23.079.299.205		23.079.299.205	
(a)	Program Pengembangan Kebudayaan								525.076.968		467.337.056		934.401.596		704.139.144		834.865.784		834.865.784	Dinas Kebudayaan
		Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a		15,16%	16,75%	17,94%				19,13%		19,84%		20,55%		20,55%		
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n/a		1,43%	1,49%	1,55%				1,61%		1,65%		1,69%		1,69%		
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	n/a		47,03%	51,01%	54,99%				58,97%		62,95%		66,93%		66,93%		
(b)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional								156.921.812		222.205.807		314.739.159		272.145.226		181.477.608		181.477.608	Dinas Kebudayaan
		Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	n/a		28,06%	28,11%	28,16%				28,21%		28,24%		28,27%		28,27%		
(c)	Program Pembinaan Sejarah								145.148.941		150.948.121		150.904.111		93.436.888		115.690.636		115.690.636	Dinas Kebudayaan
		Persentase SDM sejarawan yang berkemampuan	%	n/a		5%	20,00%	40,00%				60,00%		80,00%		100,00%		100,00%		
(d)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya								125.000.000		306.575.262		332.480.107		262.425.363		252.397.540		252.397.540	Dinas Kebudayaan
		Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a		26,29%	31,75%	37,21%				42,67%		45,95%		49,23%		49,23%		
(e)	Program Pengelolaan Permuseuman								198.362.430		155.158.979		400.419.994		155.045.013		169.129.505		169.129.505	Dinas Kebudayaan
		Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi/ peninggalan sejarah dan atau warisan budaya	%	n/a		12,10%	12,76%	13,48%				14,20%		14,63%		15,06%		15,06%		
(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								15.968.689.457		17.386.653.790		18.667.576.303		20.042.947.717		21.519.738.131		21.519.738.131	Dinas Kebudayaan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100		100,00	100,00	100,00				100,00		100,00		100,00		100,00		
23	Perpustakaan								474.170.170		488.452.301		560.914.876		537.021.326		620.098.553		620.098.553	
(a)	Program Pembinaan Perpustakaan								389.366.303		406.610.353		468.389.485		419.046.251		483.654.416		483.654.416	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Tingkat begmanan membaca masyarakat	Nilai	56,36		58,47	62,47	66,47				70,47		74,47		78,4		78,4		
(b)	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno								84.803.868		81.841.948		92.525.391		117.975.075		136.444.136		136.444.136	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14,45		14,70	14,95	15,20				15,45		15,65		15,85		15,85		
24	Kearsipan								17.853.999.257		19.229.887.251		20.680.086.063		22.303.868.179		23.927.992.625		23.927.992.625	
(a)	Program Pengelolaan Arsip								466.735.082		527.618.135		705.964.661		732.992.647		732.992.647		732.992.647	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Keterdesaian Arsip	%	1,01		10,97	13,98	17,24				20,75		24,5		28,5		29,1		
(b)	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip								116.683.771		146.560.593		167.194.474		194.071.786		213.312.248		213.312.248	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	18,33		23	27,5	60,83				62,5		64,16		65,83		65,83		
(c)	Program Peminatan Penggunaan Arsip								77.789.180		109.920.445		144.901.877		171.239.811		201.461.562		201.461.562	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Min Penggunaan Arsip	Skor	0		5	5	5				5		5		5		5		
(d)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi								17.192.791.224		18.445.788.079		19.790.165.610		21.232.592.915		22.780.226.163		22.780.226.163	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

[illegible]

			Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35%	95	98		99	100	100	100	100	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	(a)	Program Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
30		Perdagangan						15.603.213.099	15.901.824.336	15.264.855.466	9.806.339.178	10.209.435.846	10.203.435.846		
	(a)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan						207.437.814	311.441.260	300.950.053	216.903.761	237.013.609	237.013.609		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Kegiatan Perdagangan	%	0	35	50		55	60	65	70	70		
	(b)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan						9.658.823.231	9.801.239.654	8.944.904.153	6.107.553.260	6.340.114.028	6.340.114.028		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	0	50	70		70	70	70	70	70		
	(c)	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						1.458.547.132	1.355.685.485	1.237.239.107	844.783.068	876.950.351	876.950.351		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Nilai Inflasi	%	0	3,09+1	3,14+1		3,13+1	3,03+1	2,94+1	2,85+1	2,85+1		
	(d)	Program Pengembangan Ekspor						1.789.151.149	2.161.768.746	1.805.700.318	1.278.590.589	1.327.276.208	1.327.276.208		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Ekeri	%	6,5	3,5	3,5		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5		
	(e)	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen						1.439.099.837	1.282.405.188	2.073.211.476	742.039.181	782.144.908	782.144.908		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20	<20		<20	<20	<20	<20	<20		
	(f)	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri						1.050.153.935	989.284.002	902.850.159	616.463.320	639.936.743	639.936.743		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80		80	80	80	80	80		
31		Perindustrian						15.187.403.775	16.714.447.774	17.673.429.056	18.091.799.410	19.366.764.492	19.366.764.492		
	(a)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri						1.568.748.471	2.051.848.301	1.972.894.792	1.278.590.589	1.398.380.290	1.398.380.290		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDB	Miliar Rp	41,7	38,5	38,5		39	39	39,5	39,5	39,5		
	(b)	Program Pengendalian Izin Usaha Industri						181.508.088	256.481.038	234.072.263	159.823.824	165.909.526	165.909.526		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Izin Usaha Industri	%	0	46,92	60		70	80	90	100	100		
	(c)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional						100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	0	0	1		1	1	1	1	5		
	(d)	Program Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						13.337.147.217	14.316.118.435	15.366.462.000	16.493.384.997	17.702.474.676	17.702.474.676		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	100	100	100		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
32		Transmigrasi						305.748.913	355.035.092	393.787.248	397.266.237	351.915.852	351.915.852		
	(a)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi						75.929.727	98.853.531	116.877.790	118.495.924	97.402.722	97.402.722		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugur, dan Satuan Pemukiman Tersebutan	%	n/a	n/a	33,3		33,3	33,3	33,3	33,3	33,3		
	(b)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi						62.964.863	74.426.765	83.438.895	84.247.962	73.701.361	73.701.361		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	n/a	23	25,8		28,7	34,4	40,2	45,9	45,9		
	(c)	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi						166.854.322	181.754.795	193.470.563	194.522.351	180.811.769	180.811.769		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
			Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan penempatan usaha ekonomi kawasan	%	n/a	n/a	6,25		12,5	18,75	25	31,25	31,25		
4		Usur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah						233.139.243.073	238.835.098.364	252.265.196.897	270.125.629.722	290.136.444.685	290.136.444.685		
	(a)	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah						951.828.696	939.144.212	873.400.686	1.003.603.168	1.161.085.302	1.161.085.302		Biro Pemerintahan dan Perbatasan
			Skor Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,0221	3,0221	3,03		3,04	3,04	3,05	3,06	3,06		
	(b)	Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum						1.098.787.090	1.035.051.138	966.911.212	1.013.137.990	1.075.417.181	1.075.417.181		Biro Hukum
			Persentase produk hukum daerah yang dilaksanakan	%	100,00%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
	(c)	Program Penataan Organisasi						1.210.890.652	1.395.906.988	1.277.365.781	1.318.546.545	1.385.344.542	1.385.344.542		Biro Organisasi dan Korpori
			Tingkat Kematangan Peranekat Daerah	Skor	n/a	37,10	38,60		40,1	41,6	43,10	44,60	44,60		
	(d)	Program Kesejahteraan Rakyat						55.364.247.591	58.269.478.209	60.398.926.718	66.186.720.139	72.730.595.687	72.730.595.687		Biro Kesejahteraan Rakyat
			Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang diwujudkan	%	n/a	n/a	20		40	60	80	100	100		
	(e)	Program Perekonomian dan Pembangunan						945.240.705	920.741.033	1.193.565.904	814.963.139	845.994.952	845.994.952		Biro Administrasi Perekonomian
			Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	n/a	90%	90%		92%	93%	95%	100%	100%		
	(f)	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan						659.973.513	628.989.211	596.326.957	633.587.301	693.264.805	693.264.805		Biro Administrasi Pembangunan
			Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	85%	88%	90%		92%	95%	97%	100%	100%		
	(g)	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa						459.604.407	455.070.641	433.284.479	465.715.206	502.676.237	502.676.237		Biro Pengadaan Barang/Jasa
			Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,00	8,1	8,2		8,3	8,4	8,5	8,6	8,6		
	(h)	Program Pelayanan Penghubung						1.296.823.892	1.896.823.892	2.041.823.892	2.186.695.087	2.311.573.258	2.311.573.258		Biro Humas Protokol dan Penghubung
			Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	85	85	86		87	88	87	90	90		
	(i)	Program Pengelolaan Perbatasan						900.000.000	855.000.000	810.000.000	1.080.000.000	1.215.000.000	1.215.000.000		Biro Pemerintahan dan Perbatasan
			Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	n/a	35		45	55	75	90	90		
	(j)	Program Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						170.251.896.527	177.438.893.040	183.673.951.269	195.422.691.148	208.215.492.722	208.215.492.722		Sekretariat Daerah
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86		87	88	89	90	90		
34		Sekretariat DPRD						152.824.529.787	156.098.334.849	159.608.491.519	166.760.581.550	174.691.302.093	174.691.302.093		
	(a)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						88.245.002.873	71.710.404.638	68.974.967.719	69.434.074.648	70.174.076.926	70.174.076.926		Sekretariat DPRD
			Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	68	70	72		74	76	78	80	80		
			Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n/a	n/a	100%		100%	100%	100%	100%	100%		
	(b)	Program Peningjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						64.579.526.945	84.387.590.711	90.633.523.800	97.326.506.902	104.517.725.106	104.517.725.106		Sekretariat DPRD
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100	100	100	100	100		
5		Usur Peningjangan Urusan Pemerintahan Penguasaan						38.654.439.478	39.650.261.847	42.664.702.956	45.786.948.610	48.132.355.088	49.132.355.088		

		Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah					3.128.169.040		3.141.909.887		3.229.495.038		3.542.736.661		3.733.584.648		3.733.584.648	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	(a)	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	n/a	80%	82%		84%		86%		88%		90%		90%		
		Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah					6.675.239.358		7.400.157.549		8.199.769.523		8.725.952.007		9.430.724.359		9.430.724.359	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
	(b)	Persentase keselarasan muatan rencana strategis daerah dengan RKPD	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase keselarasan muatan RKA strategis Daerah dengan RKPD	%	n/a	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%		
	(c)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					28.851.031.080		29.108.194.411		31.235.438.395		33.518.259.942		35.968.046.082		35.968.046.082	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
36		Penelitian dan Pengembangan					2.265.424.697		2.443.996.974		2.543.740.744		2.766.265.040		3.013.301.183		3.013.301.183	
	(a)	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					2.265.424.697		2.443.996.974		2.543.740.744		2.766.265.040		3.013.301.183		3.013.301.183	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	65	70%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	30%	35%		40%		45%		50%		55%		55%		
37		Keuangan					172.911.815.620		165.188.263.475		177.791.161.146		188.418.004.699		201.989.251.102		201.989.251.102	
	(a)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					181.508.088		170.987.358		234.072.263		159.823.824		165.909.526		165.909.526	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	97,67%	90%	91%		91%		92%		92%		93%		93%		
	(b)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					3.860.806.278		3.818.874.021		3.659.479.542		3.935.423.218		4.289.538.287		4.289.538.287	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Persentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	(c)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					3.873.302.195		3.768.780.733		5.300.191.890		3.734.770.188		3.928.235.106		3.928.235.106	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-12,81%	2,50%	4,89%		4,99%		5,05%		5,23%		5,24%		5,24%		
		Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1	1		1		1		1		1		1		
		Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	15.300		15.606		15.918		16.236		16.561		16.561		
		Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	29,69	20	22		24		25		27		30		30		
	(d)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					2.009.999.399		1.988.168.775		1.905.185.382		2.048.846.209		2.233.204.352		2.233.204.352	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	56%	66%	81%		88%		94%		99%		100%		100%		
	(e)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					87.692.398.803		81.787.944.087		87.748.235.313		93.924.603.827		100.673.928.501		100.673.928.501	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
		Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-18,77%	-25,58%	11,91%		7,31%		9,49%		7,89%		11,08%		11,08%		
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
	(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					75.293.798.857		73.653.508.500		78.943.996.755		84.614.437.428		90.692.435.330		90.692.435.330	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
38		Kepagawian					25.510.027.754		26.849.611.957		28.833.060.386		31.294.778.165		34.072.993.562		34.072.993.562	
	(a)	Program Kepagawian Daerah					1.994.707.813		2.254.906.596		2.469.474.214		3.035.068.956		3.780.764.396		3.780.764.396	Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase pemenuhan ASN sesuai kebutuhan	%	n.a	43,42	44,63		45,90		47,19		48,42		49,46		49,46		
		Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	n.a	70	73		77		80		82		85		85		
		Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	n.a	95	95		96		96		97		98		98		
	(b)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					23.515.319.941		24.594.705.361		26.363.586.172		28.259.709.209		30.292.229.165		30.292.229.165	Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
39		Pendidikan dan Pelatihan					1.085.399.672		1.077.700.431		1.058.090.529		1.181.652.125		1.328.612.630		1.328.612.630	
	(a)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia					1.085.399.672		1.077.700.431		1.058.090.529		1.181.652.125		1.328.612.630		1.328.612.630	Badan Kepagawian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	n.a	30	32		34		38		40		50		50		
40		Inspektorat Daerah					30.942.421.375		32.804.765.335		34.187.351.976		36.887.339.098		39.669.965.405		39.669.965.405	
	(a)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi					704.766.603		732.802.965		668.777.896		684.959.244		711.040.826		711.040.826	Inspektorat
		Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	97%	90%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
		Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		Hijau		
		Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Keselamatan Manajemen Risiko Level 2 ke Atas	%	N/A	5%	7%		14%		21%		28%		35%		35%		
	(b)	Program Penyelenggaraan Pengawasan					1.660.563.041		1.587.739.757		1.560.481.756		1.826.557.984		1.896.108.868		1.896.108.868	Inspektorat
		Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10%	<10%	<10%		<9%		<8%		<7%		<6%		<6%		
		Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APSP dan BPK	%	84%	84%	80%		82%		83%		84%		85%		85%		
		Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	50%	50%	75%		80%		85%		90%		95%		95%		
		Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	65%	70%	78%		81%		84%		87%		87%		87%		
		Rata-Rata Nilai Peer Review Antar Irian	%	n/a	n/a	78%		80%		82%		84%		86%		86%		
	(c)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi					28.577.091.731		30.848.772.613		31.958.092.324		34.375.821.870		37.062.815.712		37.062.815.712	Inspektorat
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	58,5	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%		
		Persentase Auditor dan P2UPD yang Memiliki Peningkatan Kompetensi	%	41,185	80%	80%		81%		82%		83%		84%		84%		
		Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
7		Usur Pemerintahan Umum					27.906.782.908		29.899.302.761		65.830.886.312		35.372.788.316		38.693.219.769		38.693.219.769	
	(a)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					387.752.512		368.844.159		345.535.246		422.391.534		483.507.761		483.507.761	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0%	0%	0		0		0		0		0		0		
	(b)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya					311.156.722		366.401.482		370.057.102		438.373.916		486.625.284		486.625.284	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

			Persentase Konflik antar Agama	%	0%	0	0		0		0		0		0		0		
	(c)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial						746.693.675		820.739.321		775.782.359		1.456.679.992		2.118.901.660		2.118.901.660	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	(d)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						465.153.076		478.764.604		34.542.378.305		1.016.022.879		1.130.554.913		1.130.554.913	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES.)	%	66,90%	•	•		•		70%		•		•		•		
			Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	(e)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						913.544.375		907.363.813		825.022.349		901.578.676		1.008.269.687		1.008.269.687	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21%	80%	83%		85%		88%		90%		93%		93%		
	(f)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi						25.082.482.549		26.957.189.382		28.972.110.951		31.137.741.319		33.465.360.465		33.465.360.465	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100		100		100		100		100		100		
		Total Page Indikator						2.568.728.067.868		2.688.669.492.435		2.894.284.272.398		3.044.043.872.794		3.233.057.983.906		3.233.057.983.906	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator kinerja ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek pelayanan umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tertuang pada Tabel 8.1.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Makro Daerah Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Kondisi tahun dasar	Proyeksi tahun berjalan	Target RPJMD					Kondisi kinerja akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76.26	76.7	77.14	77.58	78.03	78.47	78.47
2	Angka Kemiskinan	%	6,13	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63	5.57	5.57
3	Angka Pengangguran	%	10,34	10,22	10,10	9,50	8,70	8,10	7,50	7,50
4	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3
5	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	78,04	78,96	80,07	81,91	83,90	86,02	88,27	88,27
6	Indeks Gini	Indeks	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3
2	Angka Pengangguran	%	10,34	10,22	10,10	9,50	8,70	8,10	%	%
3	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	78,04	78,96	80,07	81,91	83,90	86,02	88,27	88,27
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	67	69,47	69,73	69,95	70,18	70,28	70,38	70,38
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68,57	69,17	69,77	70,37	70,97	71,57	72,17	72,17
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,59	76,26	76,7	77,14	77,58	78,03	78,47	78,47
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,1	93,10	93,20	93,30	93,40	93,50	93,60	93,60
9	Angka Kemiskinan	%	6,13	6,07	6,01	5,74	5,69	5,63	5,57	5,57
10	Prevalensi Stunting	%	16,82	16,30	15,80	15,30	14,00	13,30	12,80	12,80
11	Indeks Gini	Indeks	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318
12	Rasio Elektrifikasi	Rasio	93,72	94,5	95,5	96	96,2	96,4	96,6	96,6
13	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	Ha	n/a	170,54	145,27	123,73	75,36	37,28	0	0
14	Rasio Konektivitas	Rasio	38,42	38,42	41,33	44,25	47,17	50,08	65	65
15	Persentase Jalan Kondisi Baik	%	n/a	61,75	63,25	64,75	66,25	67,75	69,25	69,25
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	N/A	61,9	62,9	63,9	64,9	65,9	66,9	66,9



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Tabel 8.3. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-3,8	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3
2	Laju Inflasi	%	1,18+1	3,09+1	3,14+1	3,13+1	3,03+1	2,94+1	2,85+1	2,85+1
3	Indeks Gini	Indeks	0,334	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321	0,318	0,318
4	Angka Kemiskinan	%	6,13	6,07	6,01	5,74	5,69	5,63	5,57	5,57
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,59	76,26	76,7	77,14	77,58	78,03	78,47	78,47
B	Aspek Pelayanan Umum									
	Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar									
	Urusan Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,62	84,72	100	100	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	96,02	97,00	98,00	98,50	99,00	99,50	100,00	100,00
3	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	82,49	83,00	84,00	85,00	87,00	88,00	90,00	90,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	77,2	77,20	78,00	79,00	80,00	81,00	82,00	82,00
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,40	0,39	0,38	0,37	0,36	0,35	0,34	0,34
6	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	95,61	95,78	95,94	96,11	96,27	96,44	96,60	96,60
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	93,31	95,77	97,43	99,08	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	29,3	33,70	33,75	33,80	33,85	33,90	33,95	33,95
9	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	n/a	59,20	60,00	60,50	61,00	61,50	62,00	62,00
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	n/a	28,30	30,00	30,50	31,00	31,50	32,00	32,00
11	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	17,00	20,00	24,32	27,03	29,73	32,43	35,14	35,14
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap	Rasio	653,51	712,80	724,76	726,42	728,07	729,70	730	730



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Murid Sekolah Menengah									
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Kesehatan									
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	92	128	125	124	123	122	121	121
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	11,1	15	14	13	12	11	10	10
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	16,82	16,3	15,8	15,3	14,00	13,3	12,8	12,8
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90,46	90,00	90,00	92,00	92,00	93,00	93	93
6	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,65	87,88	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	93,00
7	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96,51	95,50	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00
8	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	82,86	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00
9	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Internasional	Internasional	Internasional
10	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	49,43	50	52	54	56	58	60	60
11	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan	%	57,14	57,14	71,43	71,43	86,00	86,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)									
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Jumlah Titik Rawan Banjir	titik	20	18	15	12	9	6	2	2
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Pada Sistem Irigasi Yang Sudah Ada	%	N/A	7,54	13,53	19,51	25,49	31,48	37,46	37,46
3	Persentase Tersedianya Air Baku Untuk Memenuhi Kebutuhan Penduduk	%	N/A	51,59	53,69	56,09	58,99	62,09	65,39	65,39
4	Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	92,68	93,76	96,15	97,03	97,82	98,01	98,63	98,63
5	Cakupan Pelayanan Air Limbah	%	83,84	87,06	91,32	93,06	95,8	97	100	100
6	Cakupan Pelayanan Drainase	%	45,1	45,1	48,1	51,3	54,3	57,3	60,3	60,3
7	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Penataan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	23	25	28	30	33	35	35	35
10	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	59,99	66,00	67,80	68,90	69,60	70,60	72,00	72,00
11	Persentase jalan kondisi baik	%	N/A	61,75	63,25	64,75	66,25	67,75	69,25	69,25
12	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Provinsi Yang Dibuktikan Dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	%	N/A	8,00	9,00	10,00	10,50	11,00	11,50	11,50
13	Persentase Proses Revisi Rtrw	%	13	20	70	78	85	93	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Provinsi Dan Ditetapkan/Perda									
	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%	n/a	n/a	10	15,00	20	25	30	30
4	Persentase luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	0	0,00	15	27,00	56	78	100	100
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum untuk melayani perumahan penduduk (jumlah penduduk terlayani)	Unit	n/a	10.000	12.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	n/a	n/a	5	10	15	20	25	25
	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	%	n/a	16,67	50	53,33	56,67	60	63,33	63,33
2	Persentase Penegakan pelanggaran Perda dan/atau Perkada	%	n/a	33,33	41,67	50	58,33	66,67	75	75
3	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen kebakaran dan /atau tindakanlajutnya	%	42,85	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
5	Skor Nilai Prioritas Pencegahan	Skor	1,15	1,28	1,99	2,66	3,18	3,40	3,44	3,44



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Bencana									
6	Skor Nilai Prioritas Penguatan Sistem Pemulihan Bencana	Skor	0,20	0,20	0,32	0,32	0,44	0,44	0,56	0,56
7	Skor Nilai Prioritas Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Skor	0,20	0,24	0,46	0,48	0,57	0,76	0,80	0,80
8	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Sosial									
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	2,98	6,55	2,98	3,27	1,79	2,08	2,38	19,05
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	24,00	24,40	52,00	46,00	21,60	31,60	24,00	100,00
3	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	100	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	0	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase tuna sosial dan korban	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti									
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,16	0,15	0,17	0,15	0,08	0,08	0,09	0,72
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	8,10	2,92	0,79	0,71	0,47	0,47	0,47	5,84
11	Persentase PPKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,79	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63	31,63
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Tenaga kerja									
1	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	11,82	44,51	51,28	56,41	61,54	66,67	71,79	71,79
2	Persentase calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	%	1,5	4	6	8	10	12,5	15	15
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	29,17	34,56	40,00	45,45	50,00	53,85	57,14	57,14
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	64,31	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	65,00
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,50	67,52	67,55	67,57	67,59	67,62	67,65	67,65
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,34	10,22	10,10	9,50	8,70	8,10	7,50	7,50



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	n/a	30	35	40	45	50	55	55
8	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	3,65	10,8	11,8	12,8	13,8	14,8	15,8	15,8
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	94,8	94,9	95,25	95,5	95,75	96	96,25	96,25
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	74,71	75	75,5	76	76,5	77	77,5	77,5
12	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	n.a	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Persentase Pencapaian Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,34	5,34	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,8
2	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,11	11,10	11,10	11,10	12	12	12	12
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	%	33,42	44,25	44,07	43,88	43,7	43,51	43,33	43,33
4	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,61	28,61	28,75	28,90	29	29,10	29,3	29,30
5	Persentase OPD yang memiliki data terpilah Gender dan Anak	%	15,38	38,46	46,15	51,28	56,41	61,54	66,67	66,67
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	%	71,24	72,6	73,60	74,60	75,60	76,60	77,60	77,60
7	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	%	83,08	86,34	86,64	86,94	87,24	87,54	87,84	87,84
	Urusan Pangan									



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	111	111	113	114	115	116	117	117
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	11,70	≤10	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11	≤11
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	85,40	86,4	86,90	87,70	88,50	89,30	90,10	90,10
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	94	80	81	82	83	84	85	85
Pertanahan										
	Persentase Permintaan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dari Opd, Kabupaten/ Kota Yang Terfasilitasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Lingkungan Hidup										
1	Persentase ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah	%	n/a	20	20	20	20	20	20	20
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	n/a	76,10	76,75	77,39	78,04	78,68	79,33	79,33
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,00	56,60	56,70	56,80	56,90	70,00	70,10	70,10
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	90,59	88,14	88,25	88,35	88,46	88,56	88,67	88,67
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,06	59,07	59,08	59,09	59,10	59,11	59,12	59,12
6	Persentase ketersediaan data Keanekaragaman Hayati di Provinsi Kepulauan Riau	%	0	0	14,28	14,28	28,57	42,58	57,14	57,14
7	Persentase Izin Pengelolaan Limbah B3 yang diawasi	%	20	26,67	33,33	33,33	40,00	40,00	46,67	46,67
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	0	28,57	42,85	57,14	71,43	85,71	85,71	85,71
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	100	100	100	100	100	100	100



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
11	Persentase Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	83,33	57,14	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	85,71
12	Persentase Pengurangan Sampah	%	22	24	26	27	28	30	30	30
13	Persentase Penanganan Sampah	%	75	74	73	72	71	70	70	70
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
1	Persentase Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun profil kependudukan sesuai pedoman	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	25	75	75	100	100	100	100	100
4	Persentase Kab/ Kota yang mengelola informasi administrasi kependudukan berdasarkan database konsolidasi kemendagri	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pmdes	%	14,05	18,13	25,68	34,74	43,81	52,87	61,93	61,93
2	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang sudah mendapat pembinaan peningkatan kapastitas	%	26,66	36,65	44,64	52,64	56,63	64,63	72,62	72,62
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase desa yang difasilitasi kerjasama	%	0	0	1,45	2,91	5,45	8	10,91	10,91



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Prevalence Rate	%	44,2	47,50	49,01	49,50	59,00	59,25	59,75	59,75
2	Unmetneed	%	10,14	10,10	9,50	9,25	9,00	8,80	8,50	8,50
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	%	63,27	58,00	59,30	59,70	60,30	60,75	61	61
	Perhubungan									
1	Rasio Konektivitas Provinsi	%	38,42	38,42	41,33	44,25	47,17	50,08	65	65
2	Persentase Ketersediaan/Peningkatan Kapasitas Pelabuhan Komersial dan Niaga	%	n/a	n/a	20,00	40,00	60,00	80,00	100	100
3	Penyediaan Lintas Angkutan Penyeberangan	Lintas	12	14	16	18	20	22	24	24
	Komunikasi dan Informatika									
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	74,18	76	78	80	82	84	86	86
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	n/a	20	20	30	40	50	60	60
3	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	n/a	20	20	25	30	35	40	40
4	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	n/a	82,93	82,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	6.34	6.34	11.34	16.34	21.34	26.34	31.34	31.34
2	Persentase koperasi yang mendapat dukungan pemberdayaan	%	29.18	29.18	31.18	33.18	35.18	37.18	39.18	39.18
3	Rasio Wirausaha Baru	%	27.52	27.52	28.02	28.52	29.02	29.52	30.02	30.02
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	22.3	22.3	25.86	29.36	32.86	36.36	39.86	39.86



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	%	8.8	8.8	13.8	18.8	23.8	28.8	33.8	33.8
6	Persentase UMKM yang mengikuti pelatihan	%	0.24	0.24	0.44	0.64	0.84	1.04	1.24	1.24
7	Persentase Koperasi yang diawasi	%	1,53	1,53	2,53	3,53	4,53	5,53	6,53	6,53
8	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatan nya	%	3,67	3,67	5,77	7,87	9,97	12,07	14.17	14.17
Penanaman Modal										
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	0	0	0	95	100	100	100	100
2	Persentase pemenuhan dokumen peta potensi investasi provinsi	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	0	5	7	8	10	11	12	12
4	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	95,21	70	80	90	100	100	100	100
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93	82,5	83,15	84,2	84,88	85,2	86,1	86,1
6	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase ketersediaan data/informasi perkempangan investasi di Kepulauan Riau	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Kepemudaan dan Olahraga										
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	n/a	0,51	0,56	0,6	0,63	0,64	0,69	0,69
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	n/a	4,79	4,8	5,05	5,3	5,55	5,8	5,8
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	n/a	0	0	5	3	5	0	0
4	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	n/a	0,54	0,64	0,73	0,77	0,82	0,86	0,86
5	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	n/a	17,31	19,23	21,15	23,08	25,00	25,00	25,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi	%	n/a	35,20	38,09	40,98	43,88	46,77	49,66	49,66
7	Persentase Kwartir yang difasilitasi dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.	%	n/a	0	8,43 (7 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	9,63 (8 Kwartir)	0	0
Statistik										
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100
Persandian										
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah (Indeks KAMI)	Indeks	n/a	68,13	68,13	70,33	73,63	79,12	83,52	83,52
Kebudayaan										
1	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	15,16	16,75	17,94	19,13	19,84	20,55	20,55
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	n/a	1,43	1,49	1,55	1,61	1,65	1,69	1,69
3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	n/a	47,03	51,01	54,99	58,97	62,95	66,93	66,93
4	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas)	%	n/a	28,06	28,11	28,16	28,21	28,24	28,27	28,27
5	Persentase SDM sejarawan yang	%	n/a	5	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Berkompetensi									
6	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	n/a	26,29	31,75	37,21	42,67	45,95	49,23	49,23
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah dan atau warisan dunia	%	n/a	12,10%	12,76	13,48	14,20	14,63	15,06	15,06
	Perpustakaan									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	56,36	58,47	62,47	62,50	62,75	63,00	63,25	63,25
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	14,45	14,70	14,95	15,20	15,45	15,65	15,85	15,85
	Kearsipan									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	1,01	10,97	13,98	17,24	20,75	24,50	28,50	28,50
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	18,33	23	27,5	60,83	62,5	64,16	65,83	65,83
3	Izin Penggunaan Arsip	Skor	0	5	5	5	5	5	5	5
	Urusan Pilihan Dasar									
	Kelautan dan Perikanan									
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	-	4	3	4	4	4	4	4
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	319196,89	306463,67	307076,60	307690,60	308305,60	308921,60	309538,60	309538,60
3	Nilai Tukar Nelayan/NTN (%)	%	n/a	110,57	115,00	115,50	116,00	116,10	116,30	116,30
4	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	21421,10	33920,50	26491,92	28473,50	30614,37	32955,78	35288,63	35288,63
5	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%		108,47	109,55	110,65	111,20	111,76	112,32	112,32
6	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	100	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	6205,90	1331,88	1334,88	1337,88	1340,88	1343,88	1346,88	1346,88
	Pariwisata									
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,73	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,7
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,66	1,7	1,75	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	22,76	22,00	22,70	23,80	40,00	41,30	43,00	43,00
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	408.005	325.000	370.500	474.240	607.027	776.995	994.553	994.553
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Orang	7.153.725	1.630.000	1.988.600	2.426.092	2.959.832	3.610.995	4.405.414	4.405.414
6	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rp	N/A	3.257,3	3.996,8	5.142,1	6.632,4	8.575,5	11.113,5	11.113,5
7	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	7,75	3	3	3	3	3	3	3
8	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	n/a	2	2	2	2	2	2	2
	Pertanian									
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,10	1,10	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,40
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	55,21	55,21	59,49	62,08	68,81	76,99	76,99	76,99
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	-4,50	1,29	1,35	1,42	1,49	1,56	1,64	1,64
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	-2,60	0,52	0,74	0,77	0,80	0,94	1,03	1,03
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	1,40	2,5	2,8	3,0	3,2	3,5	3,8	3,8
6	Persentase Angka Kesembuhan	%	60	61,00	62,00	63,00	64,00	65,00	66,00	66,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Penyakit									
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	67,5	58,17	58,50	59,00	60,00	61,00	62,00	62,00
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	37,50	37,5	38,0	39,5	42,0	43,5	45,0	45,0
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	52,23	62,40	72,50	73,60	73,90	74,60	74,80	74,80
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	15	20	20	20	20	20	20	20
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,84	99,84	99,88	99,91	99,95	99,98	99,99	99,99
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	40	40	42	45	48	51	56	56
	Kehutanan									
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	25,31	27,00	27,10	27,2	27,3	27,4	27,5	27,5
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5 ha	5 ha	5 ha	10 ha	10 ha	10 ha	10 ha	50 ha
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	88	500	500	500	500	500	500	500
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	n/a	2	2	2	2	2	2	2
	Energi dan Sumber Daya Mineral									
1	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	43,33	36,7	36,36	54,55	72,73	81,82	90,91	90,91
2	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0,13	12,00	13	14,00	14,00	15,00	16	16
3	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang	%	82,11	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan									
4	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	91,35	95	98	99	100	100	100	100
	Perdagangan									
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	0	35	50	55	60	65	70	70
2	Persentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	0	50	70	70	70	70	70	70
3	Nilai Inflasi	%	0	3,09+1	3,14+1	3,13+1	3,03+1	2,94+1	2,85+1	2,85+1
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	6,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20	<20
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	0	68	80	80	80	80	80	80
	Perindustrian									
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	41,7	38,5	38,5	39	39	39,5	39,5	39,5
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	0	46,92	60	70	80	90	100	100
3	Jumlah Dokumen Informasi Industri	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1	5
	Transmigrasi									
1	Persentase rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	%	n/a	n/a	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
2	Persentase bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	%	n/a	23	25,8	28,7	34,4	40,2	45,9	45,9
3	Persentase satuan kawasan permukiman transmigrasi yg	%	n/a	n/a	6,25	12,5	18,75	25	31,25	31,25



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan									
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	Sekretariat Daerah									
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Skor	n/a	37,10	38,60	40,1	41,6	43,10	44,60	44,60
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	n/a	n/a	20	40	60	80	100	100
4	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	n/a	90	90	92	93	95	100	100
5	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	85	88	90	92	95	97	100	100
6	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8,00	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6
7	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,0221	3,0221	3,03	3,04	3,04	3,05	3,06	3,06
8	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di luar wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang difasilitasi	%	85	85	86	87	88	87	90	90
9	Persentase Program Kegiatan Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan yang Terealisasi	%	n/a	n/a	35	45	55	75	90	90
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	85	85	86	87	88	89	90	90
	Sekretariat DPRD									
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap	%	68	70	72	74	76	78	80	80



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pelayanan Sekretariat DPRD									
2	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
	Perencanaan									
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	n/a	80	82	84	86	88	90	90
2	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	n/a	95	95	95	95	95	95	95
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
	Penelitian dan Pemngembangan									
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	65	70	75	80	85	90	95	95
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	30	35	40	45	50	55	55
	Keuangan									
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	97,67	90	91	91	92	92	93	93
2	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ketepatan waktu tahapan penyusunan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Realisasi	%	-12,81	2,50	4,89	4,99	5,05	5,23	5,24	5,24



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pajak Daerah									
5	Jumlah Pengembangan Teknologi Informasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Jumlah Wajib Pajak Pengguna Layanan SAMSAT Unggulan	Pengguna Sistem Aplikasi	14.200	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561	16.561
7	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	29,69	20	22	24	25	27	30	30
8	Persentase jumlah barang milik daerah yang memiliki dokumen kepemilikan	%	56%	66%	81%	88	94	99	100	100
9	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah dan PAD lainnya	%	-18,77	-25,58	11,91	7,31	9,49	7,89	11,08	11,08
10	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Kepegawaian										
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	n.a	43,42	44,63	45,90	47,19	48,42	49,46	49,46
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	n.a	70	73	77	80	82	85	85
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	n.a	95	95	96	96	97	98	98
4	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
Pendidikan dan Pelatihan										
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	n/a	30	32	34	38	40	50	50
Unsur Pengawasan										
Inspektorat Daerah										
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN %	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN % 100%	%	97	90	100	100	100	100	100	100
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Skor Hijau	Skor	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko Level 2 Ke Atas	%	N/A	5	7	14	21	28	35	35
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10	<10	<10	<9	<8	<7	<6	<6
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	84	84	80	82	83	84	85	85
7	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	50	50	75	80	85	90	95	95
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB ke Atas	%	65	70	78	81	84	87	87	87
9	Rata- Rata Nilai Peer Reviu Antar Irbn	%	n/a	n/a	78	80	82	84	86	86
10	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	58,5	50	60	70	80	90	100	100
11	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	41,185	80	80	81	82	83	84	84
12	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Unsur Pemerintahan Umum									
	Kesatuan Bangsa dan Politik									
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase Konflik antar Agama	%	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES,)		66,90	-	-	-	70	-	-	-
5	Persentase Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	84,21	80	83	85	88	90	93	93



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Tahun Dasar	Proyeksi Tahun Berjalan	Target RPJMD					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
7	Persentase Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	%	n/a	100	100	100	100	100	100	100
C	Aspek Daya Saing									
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	81,93	82,5	83,15	84,2	84,88	85,2	86,1	86,1



BAB IX

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Bab ini berisi uraian tentang kebijakan-kebijakan Daerah tahun 2021-2026 yang difokuskan pada pembangunan kewilayahan yang berbasis potensi daerah. Penyusunan Bab ini sebagai penyalaras dan kontrol utama dalam pengendalian program prioritas pembangunan baik yang bersifat *cross cutting* maupun *regional management*.

9.1 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

9.1.1 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037. Tujuan Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ialah untuk Mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan sejahtera melalui penataan ruang yang optimal dan berkelanjutan sebagai wilayah kepulauan.

Upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Pengembangan Keterpaduan Pusat-Pusat Kegiatan;
2. Mendorong Terbentuknya Aksesibilitas dan Konektivitas Jaringan Transportasi Kepulauan;
3. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah;
4. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Guna Mendorong Pengembangan Ekonomi Wilayah;
5. Mengembangkan Zona dan Kawasan Industri Berdaya Saing Global;
6. Mendorong Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

7. Memelihara Kelestarian Wilayah Kepulauan; dan
8. Peningkatan Fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara.

Prioritas pemanfaatan ruang di Provinsi Kepulauan Riau dititikberatkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Perwujudan Struktur Ruang Provinsi melalui perwujudan sistem perkotaan, transportasi darat-laut-udara, jaringan energi, telekomunikasi, sumberdaya air dan jaringan lainnya.
2. Perwujudan Pola Ruang Provinsi melalui pengendalian pemanfaatan kawasan lindung dan budidaya darat.
3. Perwujudan Pola Ruang Laut melalui perlindungan dan pengawasan kawasan laut, serta pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut sesuai dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
4. Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi, meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna yang sekaligus sebagai Kawasan Strategis Nasional.

9.1.2 Kerangka Umum Pengembangan Wilayah

Kerangka umum pengembangan wilayah di Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan mengacu pada arah pembangunan wilayah Sumatera yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Salah satu arah pembangunan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Arah pengembangan wilayah



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

tersebut sangat sesuai dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 yang dijabarkan dalam misi pertama yaitu percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat, serta misi kelima yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir.

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan isu strategis pada masing-masing wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, maupun antar kelompok pendapatan. Semangat dan tekad kuat membangun daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan memperkuat daya saing daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Arah pengembangan wilayah ini juga disusun dengan mendasarkan pada rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau, untuk menjamin kebijakan, program dan kegiatan yang konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektor, mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah, sistem hukum dan kelembagaan yang handal, serta memperkuat koordinasi dan kerjasama yang solid antar perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Isu utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah masih besarnya kesenjangan pembangunan di berbagai sektor antar kabupaten/kota. Oleh karena itu, Dalam kurun waktu tahun tahun 2021-2026, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia,



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

optimalisasi potensi setiap wilayah, peningkatan produktivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar yang terpadu dan merata.

1) Pengembangan Kawasan Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024

a. Koridor Pertumbuhan dan Koridor Pemerataan di Kepulauan Riau

Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat arah pembangunan yang dikhususkan untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau dalam RPJMN 2020-2024 diarahkan sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan pembangunan. Arah pembangunan sebagai koridor pertumbuhan dikhususkan untuk Kabupaten Karimun, Kota Batam, Kabuapten Bintan, dan Kota Tanjungpinang. Selain itu untuk arah pembangunan sebagai koridor pemerataan diarahkan pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna.

Selain sebagai koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan, dalam RPJMN 2020-2024 beberapa daerah di Provinsi Kepulauan Riau juga diarahkan pada Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu KPPN Bintan Kepulauan dan PPN Karimun.

b. Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis di Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 antara lain Pengembangan kawasan strategis dan industri pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Bintan Aerospace, Kawasan Pelabuhan Bebas Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam-Bintan-Karimun, Pengembangan DPP Baru Batam-Bintan, Pengembangan Industri Kedirgantaraan di Batam-Bintan, serta Pengembangan perguruan tinggi dengan prodi vokasi yang mendukung sektor industri manufaktur, konstruksi, pariwisata, dan pertanian.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

c. Major Project Provinsi Kepulauan Riau

Beberapa major proyek pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 ialah sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Batam –Bintan
2. Penguatan Keamanan Laut di Natuna
3. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
4. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 smelter yaitu KI/KEK Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, KI Ketapang, KI Sadai, KI Surya Borneo, KI Teluk Weda, KI Teluk Bintuni, KI/KEK Palu
5. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
6. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
7. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng
8. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
9. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
10. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
11. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
12. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
13. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
14. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
15. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
16. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
17. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
18. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
19. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana
20. Penguatan NSOC - SOC dan Pembentukan 121 CSIRT



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Kepulauan Riau

Di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan 2 (dua) Kawasan Strategis Nasional, yaitu: Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 22 pulau kecil terdepan yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau (Pulau Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil, Kepala, Iyu Kecil/Tokong Hiu Kecil, Karimun Kecil/Karimun Anak, Nipa, Pelampong, Batu Berhanti/Batu Berantai, Nongsa/Putri, Pulau Berakit, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun) dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura; dan Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pengembangan Kawasan Perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan untuk meningkatkan peran sebagai halaman depan negara yang maju dan berdaulat dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja. Fokus Pengembangan Kawasan Perbatasan diarahkan pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Provinsi (PKSN) serta percepatan pembangunan di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri). Pengembangan kawasan perbatasan diarahkan untuk mewujudkan kemudahan aktivitas masyarakat kawasan perbatasan dalam berhubungan dengan negara tetangga dan pengelolaan sumber daya darat dan laut untuk menciptakan kawasan perbatasan yang berdaulat, sehingga terwujud halaman depan negara dan wilayah perbatasan yang mencerminkan NKRI aman, sejahtera, dan antisipatif terhadap perubahan global. Pengembangan infrastruktur diarahkan pada peningkatan konektivitas dengan membangun sistem jaringan jalan lokal di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) dan antar Lokpri yang saling terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi, serta pembangunan jalan non status pembuka akses menuju kampung, desa-desa di Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri).

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan untuk mengembangkan kawasan strategis nasional agar



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala ekonomi dengan orientasi daya saing nasional. Fokus pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan, Karimun diarahkan pada pengembangan industri manufaktur unggulan kawasan berorientasi ekspor di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun, serta industri pariwisata dengan memanfaatkan fasilitas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, serta menyiapkan sarana dan prasarana perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

3) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau meliputi: (1) Kawasan Strategis Provinsi di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring, Kota Tanjungpinang; (2) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Kepulauan Anambas; (3) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Lingga; dan (4) Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Natuna. Pengembangan kawasan strategis Provinsi diarahkan pada pengembangan potensi sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan dan daya saing Provinsi terutama pada sektor kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan dan energi, didukung pengembangan industri maritim dan penyediaan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar pulau dan antar kabupaten/kota.

4) Pengembangan Kawasan Tertinggal

Pembangunan wilayah Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten yang tertinggal. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal difokuskan pada promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan, upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik dan pengembangan perekonomian masyarakat yang berbasis energi dan hasil bumi yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah pinggiran, seperti daerah tertinggal dan kawasan perbatasan ke pusat pertumbuhan.

5) Pengembangan Wilayah Perkotaan

Pengembangan perkotaan diarahkan pada perwujudan kota layak huni yang aman dan nyaman, kota layak anak, kota hijau, serta kota cerdas yang berdaya saing didukung dengan penataan dan pemanfaatan ruang yang baik. Pengembangan wilayah perkotaan juga diarahkan sebagai pusat ekonomi daerah dengan fokus pada pengembangan sentra industri pengolahan berbasis potensi perikanan, pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Khusus di Kota Batam, Bintan dan Karimun, perkotaan diarahkan pada sebagai pusat perdagangan dan jasa.

9.1.3 Sasaran dan Arah Pengembangan Wilayah Per Kabupaten/Kota

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target sebagai berikut:

**Tabel 9.1 Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Kota Tanjungpinang	3.53	3.66	4.7	4.80-4.92	4.95-5.50	6.00-6.50	6.00-6.50
2	Kabupaten Bintan	2±3	3±3	4±2	4±2	4±2	6,5	6,5
3	Kota Batam	3.25	5.05	5.91	6.4	6.92	7.52	7.52



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
4	Kabupaten Karimun	1,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Kabupaten Lingga	2.92	3.06	4.5	4.63	4.75	4.87	4.87
6	Kabupaten Natuna	0.43	0.47	3.22	3.24	3.27	3.29	3.29
		2.12	2.27	3.76	3.86	3.96	4.06	4.06
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.61-4.61	3.73-4.73	3.85-4.85	3.97-4.97	4.09-5.09	4.22-5.22	4.22-5.22
	Provinsi Kepulauan Riau	1,5 - 3,5	4,8 - 5,6	4,9 - 5,8	5,0 - 5,9	5,1 - 6,1	5,2 - 6,3	5,2 - 6,3

**Tabel 9.2 Target Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Kota Tanjungpinang	9.56	9.43	8.97	8,90	8,80	8,65	8.65
2	Kabupaten Bintan	6.30	6.25	6.24	6.20	6.16	6.12	6.12
3	Kota Batam	4.79	4.74	4.69	4.68	4.66	4.65	4.65
4	Kabupaten Karimun	6.50	6.00	5.50	5.00	4.50	4.00	4.00
5	Kabupaten Lingga	13,60	13,52	13,44	13,36	13,14	12,92	12,92
6	Kabupaten Natuna	4.28	4.16	4.04	3.92	3.80	3.68	3.68
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	6.29	6.15	6,00	5.85	5,70	5.56	5.56
	Provinsi Kepulauan Riau	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63	5.57	5.57

**Tabel 9.3 Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
1	Kota Tanjungpinang	9.24	9,18	6,57	6.00	5.50	5.00	5.00
2	Kabupaten Bintan	8.84	8,81	7,94	7,92	7,90	7,88	7,88
3	Kota Batam	10.50	10,00	9,75	9,65	9,60	9,55	9,55



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

No	Kab/Kota	Kondisi Awal	Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	2026 (%)
4	Kabupaten Karimun	8.20	8,00	7,60	7,10	6,60	6,00	6,00
5	Kabupaten Lingga	4,36	4,31	3,88	3,84	3,80	3,75	3,75
6	Kabupaten Natuna	4.10	3,82	2,99	2,89	2,79	2,69	2,69
7	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.50	3,46	3,13	2,78	2,42	2,03	2,03
	Provinsi Kepulauan Riau	10.22	10.1	7.76	7.76	7.58	7.49	7.49

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Kota Tanjungpinang

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompok yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.

Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Tanjungpinang

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Penataan Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Fasilitasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Air Baku;
4. Penataan dan Pembangunan Drainase, Sanitasi, dan Persampahan;
5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang;
6. Pembangunan dan Pengembangan Jalan Strategis;
7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai Pusat Budaya Melayu;
9. Pembangunan Pusat Kebudayaan Melayu;
10. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang;
11. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
12. Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman

2) Kabupaten Bintan

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompok Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun internasional. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km². Penangkapan ikan di areal penangkapan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

(*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, dan overhaul*) dan industri pengolahan makanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Wisata Alam, Olahraga Rekreasi Berstandar Internasional;
2. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pariwisata;
3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi Sektor Industri, Logistik, dan Pariwisata;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
5. Percepatan dan Fasilitasi Pembangunan Jembatan Batam-Bintan;
6. Pengembangan Pusat Industri Pengolahan Pertambangan;
7. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
8. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi;
9. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
10. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).

3) Kota Batam

a. Gambaran Umum Wilayah Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Ugang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kota Batam

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Batam

Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Jalur Transportasi Lokal dan Internasional;
2. Pembangunan Jalan, Jembatan dan Drainase;
3. Pembangunan Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan Industri Galangan Kapal, Jasa Kepelabuhan, Pergudangan, *Offshore*, dan Elektronik;
6. Pengembangan Pelabuhan Logistik;
7. Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai Tujuan Utama Wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan Percepatan Pembangunan Jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

4) Kabupaten Karimun

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.

Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

(contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi.

Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

b. Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Karimun

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Industri;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
5. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
6. Pengembangan Industri Kelautan dan Perikanan;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif;
8. Rehabilitasi Gedung Workshop Pelatihan Kerja dan Peralatan; dan
9. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus).



5) Kabupaten Lingga

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat diekspor ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lingga

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan Pusat Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Terpadu;
2. Pengembangan Pusat Wisata Sejarah dan Budaya;
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Penunjang Kegiatan Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan;
4. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik dan Pelabuhan;
5. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
6. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
7. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM dan Ekonomi Kreatif.

6) Kabupaten Natuna

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperoleh masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tadah hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri. Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai.

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiap, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Natuna

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembangunan Bandara Baru;
2. Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Skala Internasional;
3. Pengembangan Jalur Transportasi Laut dan Udara;
4. Fasilitasi Pembangunan Pusat Logistik Kapal Perikanan;
5. Pengembangan Perikanan Tangkap, Budidaya, Pengolahan Perikanan, Manajemen, dan Pemasaran;
6. Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
7. Pembangunan Wisata Bahari;
8. Pembangunan Jalan, Jembatan, Drainase, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
9. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

10. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;

7) Kabupaten Kepulauan Anambas

a. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Objek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

b. Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata.

c. Kebijakan Pengembangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas

Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Sentra Perikanan Rakyat;



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

2. Peningkatan Penguasaan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
3. Bantuan Peralatan dan Teknologi Perikanan dan Kelautan;
4. Pemberian Modal dan Pemasaran Produk Perikanan Dan Kelautan;
5. Pengembangan Wisata Bahari dan Ekowisata Berstandar Internasional;
6. Pembangunan Jalan, Jembatan, Air Bersih, Listrik, dan Pelabuhan;
7. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Udara;
8. Peningkatan Akses Telekomunikasi Informasi dan Komunikasi;
9. Fasilitasi dan Pengembangan UMKM.

9.2 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN *CROSS CUTTING*

Kebijakan pembangunan yang bersifat *cross cutting* merupakan upaya dalam melakukan pembangunan pada suatu sektor yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi lebih dari satu perangkat daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Dalam bentuk operasional selanjutnya kebijakan ini akan dituangkan secara rinci berupa Rencana Aksi Daerah (RAD) pada setiap sektor yang akan dikolaborasikan.

9.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu kebijakan unggulan yang akan ditangani secara bersama-sama baik lintas OPD maupun lintas kabupaten/kota ialah penanggulangan kemiskinan. Kebijakan ini akan diarahkan pada penanganan masalah kemiskinan yang masih cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan menjadi 6,13 persen dari awalnya hanya 5,80 persen pada tahun 2019. Kenaikan persentase penduduk miskin ini tidak terlepas dari imbas pandemic Covid-19 yang cukup menggerus jalannya roda-roda perekonomian masyarakat. Dengan upaya bersama menghadapi masalah kemiskinan ini, maka diharapkan persentase penduduk



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

miskin pada tahun 2026 dapat menurun menjadi 5,57%. Rincian target penurunan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Gambar 9.1 berikut ini.



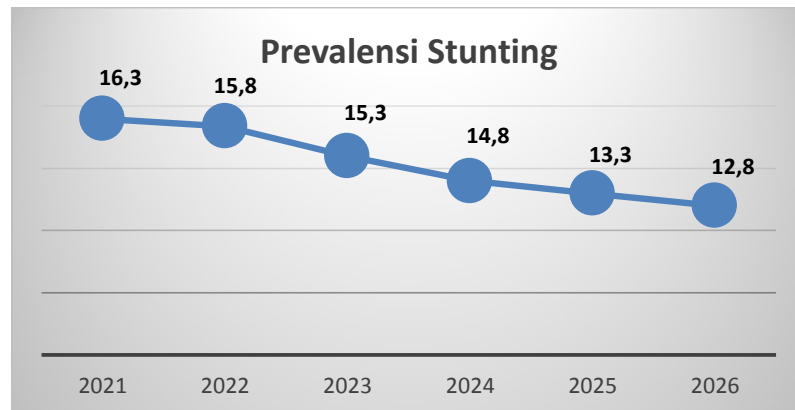
Gambar 9.1 Target Persentase Penduduk Miskin

9.2.2 Penanggulangan Stunting

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Penanggulangan stunting juga menjadi fokus pembangunan nasional yang harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Melalui upaya bersama dalam penanganan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, maka diharapkan pada tahun 2026 angka Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita turun menjadi 12 persen dari awalnya sebesar 19 persen pada tahun 2021. Rincian target penanggulangan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 9.2 berikut ini.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026



Gambar 9.2 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita

9.2.3 Pembangunan Infrastruktur

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau, sehingga diperlukan infrastruktur penghubung yang memadai untuk memudahkan arus orang dan barang wilayah. Kolaborasi pembangunan infrastruktur koneksi ini akan difokuskan pada pembangunan interkoneksi antar pulau, infrastruktur untuk penanganan banjir serta pemenuhan kebutuhan akan infrastruktur dasar. Selain dari pada itu Climate Change perlu menjadi perhatian didalam melakukan pembangunan di provinsi Kepulauan Riau. Selain daripada itu Target dari pembangunan infrastruktur penghubung ini dapat dilihat pada Gambar 9.3 berikut ini.



Gambar 9.3 Rasio Konektivitas Provinsi Kepulauan Riau



9.2.4 Kluster Daerah Pertanian

Kluster daerah pertanian merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan sektor pertanian unggulan di masing-masing daerah. Kebijakan ini lebih difokuskan sebagai kolaborasi antar pemerintah kabupaten/kota yang nantinya akan menjadi objek kluster daerah pertanian tersebut. Dengan adanya kluster ini, maka diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki produk unggulan pertanian yang pengembangannya tentu saja sesuai dengan kondisi geografis di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan PDRB Sektor Pertanian dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 2,19 Triliun pada tahun 2026.

9.2.5 *Tourism Linkage Networking*

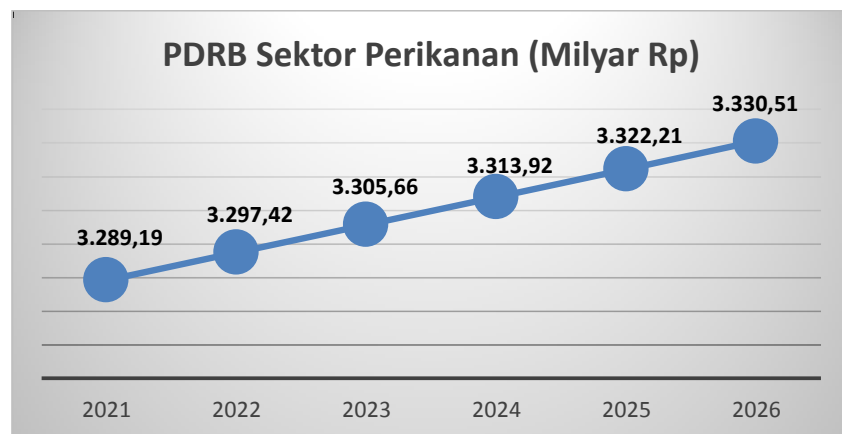
Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu kawasan terbesar yang mendapatkan kunjungan turis dari luar negeri, maka salah satu kebijakan prioritas ialah menargetkan pengembangan dan penguatan hubungan berkelanjutan antara sektor pariwisata dan sektor ekonomi produktif lainnya seperti pertanian, manufaktur dan hiburan yang terkait erat dengan sektor pariwisata.

Tujuan utama dari *Tourism Linkages Networking* adalah untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa yang dapat diperoleh secara kompetitif dari sumber lokal. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sambil menghasilkan dan mempertahankan potensi penghasilan devisa Negara. Sehingga, dari kolaborasi ini dapat meningkatkan PDRB Sektor Pariwisata dari 2,17 Triliun pada tahun 2021 menjadi 3,49 Triliun pada tahun 2026.



9.2.6 Industri Perikanan dan Kelautan

Kolaborasi industri perikanan dan kelautan diarahkan pada pembangunan dan penguatan integrasi industri perikanan dan kelautan antar kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah-daerah yang merupakan potensi penghasil ikan akan difokuskan pada produksi dan penangkapan ikan, sedangkan daerah yang merupakan pusat aktivitas ekonomi akan menjadi sentra pengolahan hasil-hasil perikanan dan kelautan. Kondisi ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan yang menjadi salah satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau. Target dari kolaborasi Industri perikanan ini dapat dilihat pada Gambar 9.4 berikut ini.



Gambar 9.4 PDRB Sektor Perikanan

9.2.7 *Link and match* Pendidikan dan Industri

Salah satu permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau ialah masih banyaknya pengangguran terbuka. Data pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau ialah sebesar 10,34 persen. Angka ini naik cukup signifikan yang sebelumnya hanya sebesar 6,91 persen pada tahun 2019. Kenaikan tingkat pengangguran ini juga tidak terlepas dari dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya beberapa pemutusan hubungan kerja (PHK).



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

Selain itu, masalah utama dari pengangguran terbuka ialah kurangnya link and match antara kebutuhan SDM di dunia kerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh calon tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesesuaian antara kompetensi yang diharapkan oleh dunia kerja dengan kompetensi para pencari kerja. Dengan adanya kolaborasi maka diharapkan tingkat pengangguran terbuka dapat diatasi dengan rincian seperti pada Gambar 9.5 berikut ini.



Gambar 9.5 Target Tingkat Pengangguran Terbuka

9.3 PROGRAM- PROGRAM PENDUKUNG PEMBANGUNAN *CROSS CUTTING*

9.3.1. Penanggulangan Kemiskinan

- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Program Pengelolaan Pendidikan
- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga
- Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- h. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- i. Program Kawasan Permukiman
- j. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- k. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- l. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- m. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- n. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- o. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- p. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- q. Program Pengelolaan Persampahan
- r. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
- s. Program Pengelola Energi Terbarukan
- t. Program Pengelola Ketenagalistrikan
- u. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Menengah, Usaha Mikro (UMKM)
- v. Program Pengembangan UMKM
- w. Program Penempatan Tenaga Kerja
- x. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- y. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- z. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- aa. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- bb. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- cc. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- dd. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

9.3.2. Penanggulangan Stunting

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- d. Program Rehabilitasi Sosial
- e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
- f. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
- g. Program Pengembangan Perumahan
- h. Program Kawasan Permukiman
- i. Program Peningkatan Sarana, Prasaran dan Utilitas Umum
- j. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- k. Program Pengawasan Keamanan Pangan
- l. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
- m. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

9.3.3. Pembangunan Infrastruktur

- a. Program Penyelenggaraan Jalan
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- e. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- h. Program Pengembangan Permukiman
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- j. Program Pengembangan Perumahan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- k. Program Kawasan Permukiman
- l. Program Peningkatan Sarana, Prasarana dan Utilitas Umum
- m. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- n. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

9.3.4. Cluster Daerah Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- d. Program Pengembangan UMKM
- e. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- f. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- h. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik

9.3.5. Tourism Linkage Networking

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata"
 - b. Program Pemasaran Pariwisata
 - c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - d. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - f. Program Penyelenggaraan Jalan
 - g. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - h. Program Kawasan Permukiman
 - i. Program Pengelolaan Persampahan
 - j. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
 - k. Program Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
-



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026

- l. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- m. Program Pengembangan UMKM
- n. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- o. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- p. Program Pengembangan Ekspor
- q. Program Pengelolaan Pelayaran
- r. Program Fasilitas dan Koordinasi Hukum

9.3.6. Industri Perikanan dan Kelautan

- a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
- b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
- f. Program Penyelenggaraan Jalan
- g. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- h. Program Kawasan Permukiman
- i. Program Pengembangan UMKM
- j. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- k. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- l. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- m. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
- n. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

9.3.7. Link and Match Pendidikan dan Industri

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Perencanaan Tenaga Kerja
- d. Program Pengembangan Kurikulum
- e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri



BAB X

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan penjabaran suatu perencanaan strategis untuk memberikan arah pembangunan dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang yaitu periode 2021-2026. Hal ini dilaksanakan agar tujuan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau tercapai sesuai dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Selain itu, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, khususnya Prioritas Pembangunan RPJPD di Tahun 2021–2025 serta kaidah-kaidah lainnya.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau wajib dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, RPJMD ini merupakan pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi SKPD masing-masing. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-PD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Kepulauan Riau 2021-2026.

Semangat dan kerjasama yang baik di antara pemangku kepentingan di Kepulauan Riau terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”. Pada akhirnya masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan di Kepulauan Riau akan memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan Nasional.

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021-2026**

Tabel T-B.10 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

No	Uraian	Data Tahun Dasar 2021 (Rp)	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
				2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	2.370.174.111.334		2.241.036.607.154	2.340.185.584.767	2.515.228.106.798	2.693.065.830.123	2.849.968.008.613
1	Belanja Pegawai	1.160.462.322.430	7,17%	1.177.493.281.120	1.261.919.549.376	1.352.399.181.066	1.449.366.202.349	1.553.285.759.057
2	Belanja Barang dan Jasa	662.681.755.999		611.020.012.832	615.370.842.695	695.366.715.438	749.016.853.019	797.624.185.951
3	Belanja Bunga							
4	Belanja Subsidi							
5	Belanja Hibah	542.767.742.905		448.298.226.727	458.479.685.549	462.779.692.964	489.675.479.668	493.725.820.876
6	Belanja Bantuan Sosial	4.262.290.000		4.225.086.475	4.415.507.146	4.682.517.331	5.007.295.087	5.332.242.728
B	BELANJA TIDAK TERDUGA	55.767.947.443		56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
1	Belanja Tidak Terduga	55.767.947.443		56.475.199.554	57.191.840.887	2.696.352.200	2.697.700.376	2.699.049.226
C	BELANJA TRANSFER	558.968.004.567		532.703.025.527	556.365.883.143	581.608.351.585	609.382.631.452	638.837.378.158
1	Belanja Bagi Hasil	545.468.004.567	4,95%	520.836.525.527	545.935.229.643	572.439.807.158	601.323.480.901	631.753.384.824
2	Belanja Bantuan Keuangan	13.500.000.000		11.866.500.000	10.430.653.500	9.168.544.427	8.059.150.551	7.083.993.334

Tabel T-B.11. Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

NO	Uraian	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	3.500.007.224.302,10	3.939.451.004.378,32	3.514.310.183.325,26
	Dikurangi realisasi:			
2.	Belanja Daerah	3.419.789.812.825,19	3.653.938.156.214,07	3.855.203.051.882,02
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
A	Defisit riil	80.217.411.476,91	285.512.848.164,25	-340.892.868.556,76
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:			
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	39.427.248.919,41	119.762.452.305,32	405.406.834.699,57
5.	Pencairan Dana Cadangan			
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan			
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	117.791.909,00	90.951.593,00	0
9.	Penerimaan Piutang Daerah			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	39.545.040.828,41	119.853.403.898,32	405.406.834.699,57
A+B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	119.762.452.305,32	405.366.252.062,57	64.513.966.142,81

Tabel T-B.12. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
	Defisit Riil	2,35%	7,81%	-8,84%
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	1,15%	3,28%	10,52%
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	0,00%	0,00%
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%
4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%
6.	Penerimaan Piutang Daerah			
7.	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	3,50%	11,09%	1,67%

Tabel T-B.13. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	2018		2019		2020		Rata-rata pertumbuhan*) (%)
		Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	Rp	% dari SiL PA	
	Jumlah SiLPA	119.762.452.305,32	100%	405.366.252.062,57	100%	64.513.966.142,81	100%	-144,93
1.	Pelampauan penerimaan PAD	78.416.085.135	65,48	51.543.256.504	12,72	29.737.288.813	46,09	-53,80
2.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(123.789.354.534)	(103,36)	173.921.402.750	42,90	(39.580.272.176)	(61,35)	149,46
3.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	36.000.000	0,03	-	-	-	-	0,00
4.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	65.150.204.855	54,40	(11.840.839.137)	(2,92)	(104.062.355.856)	(161,30)	-14,78
5.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	99.949.516.848	83,46	191.742.431.946	47,30	178.419.305.361	276,56	42,19
6.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	0,00

Tabel T-B.14. Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	119.039.829.823	404.983.689.165	64.616.411.036
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	99.949.516.848	191.742.431.946	178.419.305.361
3.	Kegiatan lanjutan	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	19.090.312.975	213.241.257.219	(113.802.894.325)

Tabel T-B.15. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

No	Uraian	Data tahun dasar 2020 (Rp)	Proyeksi				
			Tahu 2022 (Rp)	Tahu 2023 (Rp)	Tahu 2024(Rp)	Tahu 2025 (Rp)	Tahu 2026 (Rp)
1.	Total APBD	3.929.519.418.750	3.610.429.606.151	3.765.122.409.161	3.946.051.186.478	4.150.806.979.379	4.373.652.474.897
2.	Rata-rata Persentase SilPA	2%	2%	2%	2%	2%	2%
3.	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	64.616.411.035,76	76.126.143.544,00	79.495.649.318,00	83.224.654.568,00	88.350.191.956,00	94.635.482.893,00

Tabel T-B.16. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	3.534.303.462.607	3.685.626.759.843	3.862.826.531.910	4.062.456.787.423	4.279.016.992.004
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	76.126.143.544	79.495.649.318	83.224.654.568	88.350.191.956	94.635.482.893
	Total penerimaan	3.610.429.606.151	3.765.122.409.161	3.946.051.186.478	4.150.806.979.379	4.373.652.474.897
	Dikurangi:					
1	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	2.830.214.832.235	2.953.743.308.797	3.099.532.810.583	3.305.146.161.951	3.491.504.435.997
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	780.214.773.916	811.379.100.364	846.518.375.895	845.660.817.428	882.148.038.900